PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Penghasilan Komprehensif Lainnya 2

Laporan Perubahan Ekuitas 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan ..... 5 – 23

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. Tien Soeharto No. 56 Telp (0388) 21243 - 21897
TIRTA DHARMA
PERUMDA TTS - NTT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	FRANS STEVEN TAFUI,SP
Alamat Kantor	:	Jl.Tien Soeharto No.56
Alamat Rumah	:	Niki-Niki RT 017/RW 006 Kel.Niki-Niki Kec.Amanuban Barat
Nomor Telepon	:	081322153738
Jabatan	:	Direksi Perumda Air Minum Kab.TTS

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan;

2. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia;

3. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perumda Air Minum Kabupaten Timur Tengah Selatan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Soe, 26 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Direksi

FRANS STEVEN TAFUI,SP
Direksi

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00076/3.0410/AU.8/11/2042-2/1/III/2026

Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi

Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perumda Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Timor Tengah Selatan** ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat untuk pertama kalinya pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Sehubungan dengan penerapan tersebut, laporan keuangan tidak terdapat dampak yang material.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan

00076

Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

26 Maret 2026

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024*	2023
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan bank	2b,4	1.030.279.432	1.572.892.367	1.289.079.035
Piutang usaha – bersih	2c,5	4.725.151.320	3.944.062.501	3.037.408.351
Persediaan	2d,6	583.343.470	547.911.270	649.332.720
Pajak dibayar di muka	11a	142.306.851	151.967.292	151.967.292
Jumlah aset lancar		**6.481.081.073**	**6.216.833.430**	**5.127.787.398**
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap - bersih	2f,7	3.736.766.640	3.899.433.275	4.277.526.412
Aset lain-lain – bersih	8	147.201.770	147.201.770	147.201.771
Pembayaran dimuka kepada pemerintah daerah	9	365.000.001	365.000.001	365.000.000
Jumlah aset tidak lancar		**4.248.968.410**	**4.411.635.046**	**4.789.728.183**
Jumlah aset		**10.730.049.484**	**10.628.468.476**	**9.917.515.581**
Kewajiban dan Ekuitas				
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang usaha	2g,10	552.075.444	701.836.412	348.439.611
Utang pajak	11b	69.879.451	87.313.799	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		**621.954.895**	**789.150.211**	**348.439.611**
Kewajiban Jangka Panjang				
Kewajiban imbalan pasca kerja	2j,12	867.715.331	762.604.927	374.341.930
Jumlah kewajiban jangka panjang		**867.715.331**	**762.604.927**	**374.341.930**
Jumlah kewajiban		**1.489.670.226**	**1.551.755.138**	**722.781.541**
Ekuitas				
Modal pemerintah daerah	2l,m,n,13	10.391.191.551	10.391.191.551	10.391.191.551
Deviden		(70.015.788)	(99.591.792)	-
Saldo laba (rugi)	14	(1.080.796.505)	(1.214.886.421)	(1.196.457.511)
Jumlah ekuitas		**9.240.379.258**	**9.076.713.338**	**9.194.734.040**
Jumlah kewajiban dan ekuitas		**10.730.049.484**	**10.628.468.476**	**9.917.515.581**

*Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024*
Pendapatan			
Pendapatan penjualan air	2k,15	8.122.557.900	8.506.525.600
Pendapatan penjualan non-air	2k,16	428.461.981	439.824.071
Jumlah pendapatan usaha		**8.551.019.881**	**8.946.349.671**
Beban Usaha			
Beban pegawai	2k,17	(4.751.450.536)	(5.134.967.967)
Beban kantor	2k,18	(2.292.488.683)	(2.203.545.802)
Beban pemeliharaan	2k,19	(673.799.901)	(635.299.480)
Beban penyusutan	2k,20	(622.023.742)	(609.811.437)
Jumlah beban usaha		**(8.339.762.862)**	**(8.583.624.686)**
Laba (Rugi) Usaha		**211.257.019**	**362.724.985**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	2k,21		
Pendapatan lain-lain		93.028.763	6.451.464
Beban lain-lain		(724.623)	(1.799.499)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih		**92.304.140**	**4.651.965**
Laba (rugi) sebelum pajak		**303.561.159**	**367.376.950**
Taksiran beban pajak penghasilan	2h,11c	(69.879.451)	(87.313.798)
Laba (rugi) setelah pajak		**233.681.708**	**280.063.152**
Pendapatan (Beban) komprehensif			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		-	-
Pajak penghasilan terkait		-	-
Laba (Rugi) bersih komprehensif		**233.681.708**	**280.063.152**

*Disajikan kembali

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Pemerintah Daerah	Modal Pemerintah Pusat Belum Ditetapkan Statusnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah
Saldo 1 Januari 2024	**7.412.420.420**	**2.978.771.131**	**(1.196.457.511)**	**9.194.734.040**
Koreksi saldo laba	-	-	(298.492.062)	(298.492.062)
Deviden	-	-	(99.591.792)	(99.591.792)
Laba tahun 2024	-	-	280.063.152	280.063.152
Saldo 31 Desember 2024*	**7.412.420.420**	**2.978.771.131**	**(1.314.478.213)**	**9.076.713.338**
Deviden	-	-	(70.015.788)	(70.015.788)
Laba tahun 2025	-	-	233.681.708	233.681.708
Saldo 31 Desember 2025	**7.412.420.420**	**2.978.771.131**	**(1.150.812.293)**	**9.240.379.258**

*Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024*
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) bersih	**233.681.708**	**280.063.152**
Penyesuaian terhadap laba (rugi) bersih :		
Koreksi aset tetap	622.023.742	609.811.438
Penyusutan aset tetap	-	-
Penyesuaian akumulasi penyusutan	-	(298.492.062)
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	**855.705.450**	**591.382.528**
Perubahan atas aset dan kewajiban operasional:		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	(781.088.819)	(906.654.150)
Penurunan (kenaikan) persediaan	(35.432.200)	101.421.450
Penurunan (kenaikan) utang usaha	(149.760.968)	440.710.599
Kenaikan (penurunan) pajak dibayar dimuka	9.660.441	-
Kenaikan (penurunan) utang pajak	(17.434.347)	-
Kenaikan (penurunan) kewajiban imbalan pasca kerja	105.110.403	388.262.997
Jumlah perubahan modal kerja	(868.945.490)	(23.740.896)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**(13.240.040)**	**615.123.424**
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(459.357.107)	(231.718.300)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	**(459.357.107)**	**(231.718.300)**
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan		
Pembagian deviden	(70.015.788)	(99.591.792)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(70.015.788)**	**(99.591.792)**
Kenaikan kas dan bank	**(542.612.935)**	**283.813.332**
Kas dan bank awal periode	**1.572.892.367**	**1.289.079.035**
Kas dan bank akhir periode	**1.030.279.432**	**1.572.892.367**

*Disajikan kembali

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 4 tahun 2022 penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan air yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat baik rumah tangga, Instansi pemerintah, sosial, niaga dan lainnya serta melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan yang efisien serta mampu memperoleh keuntungan untuk pengembangan pelayanan tanpa mengabaikan fungsi sosial kemasyarakatan.

Perusahaan berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 56, Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai beberapa unit Instalasi Saluran Air yang berlokasi di :

1. Pusat/Kota SoE
2. IKK Niki-Niki
3. IKK Kapan
4. IKK Siso
5. IKK Panite
6. IKK Oinlasi/Kie
7. IKK Oe'nino
8. IKK Oe'ekam
9. IKK Kualin
10. IKK Boking

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Dewan Pengawas, Direktur, dan Personalia

1. Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Perusahaan sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76/KEP/HK/2025 Tanggal 25 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengangkat Apris A. Manafe, SE, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Direktur

Direktur Perusahaam Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai diterbitkannya laporan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 85/KEP/HK/2025 Tanggal 8 Mei 2025, tentang Pengangkatan Plt.Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 8 Mei 2025 – 18 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Plt.Direktur : Susy A.E.Nitbani, S.H

3. Personalia

Jumlah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Timor Tengah Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	**2024**
Pegawai tetap	53 orang	57 orang
Pegawai kontrak	11 orang	9 orang
	64 orang	**66 orang**

4. Pelanggan

Data pelanggan sampai dengan 2025 tercatat sejumlah 8.253 pelanggan dan 2024 tercatat sejumlah 8.152 pelanggan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2025 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Pagu/cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di Perusahaan dan kas di bank, serta investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai bukan kas dan dicatat dalam akun "Aset yang dibatasi penggunaannya".

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing-masing saldo piutang pada akhir tahun, yaitu jumlah keseluruhan setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan individual masing-masing saldo piutang pada akhir periode.

d. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Pencatatan persediaan dilakukan dengan *phsycal inventory method*.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli Aset tatap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa Aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran Aset tetap, biaya pemindahan, dan biaya restorasi relokasi, pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskonto dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi Aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat Aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika Aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika Aset tetap tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu Aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

	Masa Manfaat	Persentase (%)
Bangunan permanen	20 Tahun	5%
Instalasi sumber air	20 Tahun	5%
Instalasi pompa, transmisi dan distribusi	16 Tahun	6%
Inventaris kantor dan peralatan produksi	4 Tahun	25%
Kendaraan bermotor	4 Tahun	25%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Aset Tetap (Lanjutan)

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif lainnya.

g. Utang Usaha

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai beban pada tahun berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan atau banding, jumlah tambahan pokok dan denda pajak tersebut ditangguhkan pembebanannya sampai keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

i. Pendapatan Tangguhan

Pendapatan tangguhan merupakan jumlah yang belum diakui sebagai pendapatan karena belum memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan.

Uang muka yang diterima dari pelanggan-pihak ketiga merupakan penerimaan pembayaran atas penjualan yang belum diakui penjualannya, Perusahaan akan mengakui Uang muka diterima sebagai penjualan di tahun berikutnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan telah melaksanakan SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima.
Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah diterima / digunakan oleh pelanggan.
Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atas dasar akrual.
Pendapatan dan beban selama tahun berjalan diakui pada laporan penghasilan komprehensif lainnya tahun bersangkutan dengan metode akrual. Pendapatan terjadi diluar usaha dimasukkan kedalam pendapatan lain-lain, sedangkan beban diluar kegiatan usaha operasional dimasukkan kedalam beban lain-lain.

l. Penyertaan Pemerintah

Penyertaan Pemerintah merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berupa uang, aset tetap, barang, peralatan, dan biaya-biaya yang dibayar oleh Pemerintah dan bentuk lainnya yang ditetapkan sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan.

m. Modal Hibah

Penerimaan barang-barang, peralatan dan dana yang sifatnya sebagai sumbangan dan tidak mempunyai keterkaitan apapun dibukukan sebagai Modal Hibah. Apabila barang dan peralatan (pipa dan aksesoris) yang diterima tidak dilengkapi dengan harga, maka barang dan peralatan tersebut akan dinilai berdasarkan harga barang dan peralatan sejenis jika dibeli sendiri.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah, yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan atau pinjaman yang harus dikembalikan.

o. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi penjualan, beban pokok penjualan, biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa serta mata uang dari negara yang kekuatan persaingannya dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan penentuan mata uang fungsional adalah mata uang yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan dan penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah dalam Rupiah.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (LANJUTAN)

Penyisihan Atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan mengevaluasi pelanggan tertentu yang menurut informasi pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang guna untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.
Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan. Perusahaan tidak menerapkan penyisihan atas piutang ragu-ragu.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (LANJUTAN)

Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan biaya imbalan kerja dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4 - 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	2025	2024
Kas		
Kas kecil	4.244.150	3.039.750
Kas besar	1.555.700	-
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	1.024.479.582	1.569.852.617
Jumlah kas dan bank	**1.030.279.432**	**1.572.892.367**

5. PIUTANG USAHA

	2025	2024
Piutang rekening air	6.384.346.087	5.603.257.268
Piutang rekening non air	49.468.667	49.468.667
Akumulasi penyisihan piutang usaha	(1.708.663.434)	(1.708.663.434)
Jumlah piutang usaha	**4.725.151.320**	**3.944.062.501**

6. PERSEDIAAN

	2025	2024
Persediaan aksesoris	260.112.746	239.665.796
Persediaan *water meter*	162.035.150	155.266.400
Persediaan pipa	148.678.387	145.474.387
Rupa-rupa persediaan (ATK & lainnya)	12.517.187	7.504.687
Jumlah persediaan	**583.343.470**	**547.911.270**

7. ASET TETAP

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Instalasi sumber air	864.251.163	-	-	864.251.163
Instalasi perpompaan	2.222.624.578	319.120.000	-	2.541.744.578
Instalasi transdis	13.757.159.060	112.067.200	-	13.869.226.260
Bangunan dan gedung	449.214.543	-	-	449.214.543
Alat dan perlengkapan	262.790.030	21.953.907	-	284.743.937
Kendaraan/alat pengangkutan	1.123.266.601	-	-	1.123.266.601
Inventaris/perabot kantor	912.581.943	6.216.000	-	918.797.943
Jumlah	**19.591.887.918**	**459.357.107**	**-**	**20.051.245.025**
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(687.993.998)	(11.696.430)	-	(699.690.428)
Instalasi perpompaan	(1.645.296.636)	(85.423.361)	-	(1.730.719.997)
Instalasi transdis	(11.157.003.527)	(405.102.487)	-	(11.562.106.014)
Bangunan dan gedung	(372.193.774)	(12.390.248)	-	(384.584.022)
Alat dan perlengkapan	(255.182.551)	(2.097.482)	-	(257.280.033)
Kendaraan/alat pengangkutan	(746.310.692)	(57.259.122)	-	(803.569.814)
Inventaris/perabot kantor	(828.473.464)	(48.054.612)	-	(876.528.076)
Jumlah	**(15.692.454.643)**	**(622.023.742)**	**-**	**(16.314.478.385)**
Nilai buku bersih	**3.899.433.275**			**3.736.766.640**

7. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Instalasi sumber air	864.251.163	-	-	864.251.163
Instalasi perpompaan	2.222.624.578	-	-	2.222.624.578
Instalasi transdis	13.558.781.260	198.377.800	-	13.757.159.060
Bangunan dan gedung	449.214.543	-	-	449.214.543
Alat dan perlengkapan	262.790.030	-	-	262.790.030
Kendaraan/alat pengangkutan	1.123.266.601	-	-	1.123.266.601
Inventaris/perabot kantor	879.241.443	33.340.500	-	912.581.943
Jumlah	**19.360.169.618**	**231.718.300**	**-**	**19.591.887.918**
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber Air	(676.297.567)	(11.696.431)	-	(687.993.998)
Instalasi perpompaan	(1.554.209.604)	(91.087.032)	-	(1.645.296.636)
Instalasi transdis	(10.762.001.902)	(395.001.625)	-	(11.157.003.527)
Bangunan dan gedung	(359.803.527)	(12.390.247)	-	(372.193.774)
Alat dan perlengkapan	(254.175.598)	(1.006.954)	-	(255.182.552)
Kendaraan/alat pengangkutan	(689.051.570)	(57.259.122)	-	(746.310.692)
Inventaris/perabot kantor	(787.103.438)	(41.370.026)	-	(828.473.464)
Jumlah	**(15.082.643.206)**	**(609.811.437)**	**-**	**(15.692.454.643)**
Nilai buku bersih	**4.277.526.412**			**3.899.433.275**

8. ASET LAIN-LAIN

		2025	2024
a.	**Aset Tetap Tidak Produktif**		
	Nilai perolehan aset tetap tidak produktif	81.661.626	81.661.626
	Penurunan nilai aset tetap tidak produktif	(81.661.626)	(81.661.626)
	Jumlah aset tetap tidak produktif	**-**	**-**
b.	**Piutang Uang Muka Kepada Rekanan**		
	Nilai nominal piutang uang muka	147.201.770	147.201.770
	Jumlah pengembalian uang muka	-	-
	Jumlah piutang uang muka	**147.201.770**	**147.201.770**
	Jumlah aset lain-lain - bersih	**147.201.770**	**147.201.770**

9. PEMBAYARAN DIMUKA KEPADA PEMDA

	2025	2024
Pembayaran di muka kepada pemda	365.000.001	365.000.001
Jumlah pembayaran dimuka kepada pemda	**365.000.001**	**365.000.001**

10. UTANG USAHA

	2025	2024
Pembelian pipa dan aksesoris lainnya	552.075.444	701.836.412
Jumlah utang usaha	**552.075.444**	**701.836.412**

11. PERPAJAKAN

		2025	2024
a.	**Pajak Dibayar Dimuka**		
	PPN	142.306.851	142.306.851
	PPh pasal 23	-	9.660.441
	Jumlah pajak dibayar dimuka	**142.306.851**	**151.967.292**

11. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

		2025	2024
b.	**Utang Pajak**		
	Utang PPh Pasal 29	69.879.451	87.313.799
	Jumlah utang pajak	**69.879.451**	**87.313.799**
c.	**Rekonsiliasi Pajak Penghasilan**		
	Laba Komersil	**303.561.159**	**367.376.950**
	Koreksi Fiskal		
	Beban umum dan administrasi-representatif direktur	192.899.850	144.449.000
	Beban kantor-jamuan tamu	38.135.000	30.558.000
	Pendapatan jasa giro	(5.714.965)	-
	Pendapatan lain-lain	(87.313.798)	
	Laba fiskal	**441.567.246**	**542.383.950**
	Pembulatan	**441.568.000**	**542.384.000**
	Beban pajak		
	Dengan fasilitas – 11%	27.265.508	32.010.682
	Tanpa fasilitas – 22%	42.613.943	55.303.116
	Estimasi beban pajak	**69.879.451**	**87.313.798**
	Pajak Penghasilan	**69.879.451**	**87.313.798**

12. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

	2025	2024
Kewajiban imbalan pasca kerja	(867.715.331)	762.604.927
Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja	**(867.715.331)**	**762.604.927**

13. MODAL PEMERINTAH DAERAH

	2025	2024
Modal Pemerintah Pusat belum ditetapkan statusnya	2.978.771.131	2.978.771.131
Modal Pemerintah Daerah	7.412.420.420	7.412.420.420
Jumlah modal pemerintah daerah	**10.391.191.551**	**10.391.191.551**

14. SALDO LABA (RUGI)

	2025	2024
Saldo awal	(1.314.478.213)	(1.196.457.511)
Koreksi saldo awal	-	(298.492.062)
Jumlah saldo awal	(1.314.478.213)	(1.494.949.573)
Deviden	(70.015.788)	(99.591.792)
Laba tahun berjalan	233.681.708	280.063.152
Jumlah saldo laba (rugi)	**(1.150.812.293)**	**(1.314.478.213)**

15. PENDAPATAN AIR

	2025	2024
Pendapatan harga air	5.677.887.900	6.015.685.600
Pendapatan jasa administrasi dan dana meter	2.444.670.000	2.490.840.000
Jumlah pendapatan air	**8.122.557.900**	**8.506.525.600**

16. PENDAPATAN NON AIR

	2025	2024
Pemasangan sambungan baru	221.120.950	160.961.893
Pendapatan denda	172.155.000	170.535.000
Penyambungan kembali	11.250.000	11.475.000
Pendapatan non air lainnya	2.262.550	11.702.350
Balik nama	3.750.000	3.000.000
Pindah jaringan	1.350.000	3.600.000
Penggantian meter	770.000	-
Rupa-rupa pendapatan lainnya	15.803.481	78.549.828
Jumlah pendapatan non air	**428.461.981**	**439.824.071**

17. BEBAN PEGAWAI

	2025	2024
Gaji transmisi dan distribusi	842.850.950	887.789.083
Gaji dan honor umum dan administrasi	699.999.098	704.740.035
Tunjangan - tunjangan	366.104.512	376.879.895
Tunjangan transmisi dan distribusi	362.073.042	346.604.509
Gaji hubungan langganan	310.040.280	309.099.990
Gaji kabag. Admin/ keuangan	303.077.969	299.377.968
THR dan gaji XIII	288.339.969	601.067.737
Gaji dan honor Sumber air	255.580.213	188.541.507
Jamsostek	241.611.495	217.919.899
Iuran dana pensiun	212.237.183	210.651.724
Gaji kabag. Teknik	151.338.984	126.440.151
Rupa - rupa biaya pegawai (BPJS)	126.077.195	126.182.806
Tunjangan hubungan langganan	122.788.938	112.122.412
Kesejahteraan direksi/ representatif direksi	119.393.837	121.339.284
Beban imbalan pasca kerja	105.110.405	89.770.935
Tunjangan sumber	91.360.154	57.137.882
Gaji dan honor direktur	56.384.812	155.418.600
Beban penagihan rekening air	31.500.000	51.000.000
Pendidikan dan latihan	30.092.500	52.137.300
Bantuan dan sumbangan	20.914.000	36.975.000
Kesejahteraan pegawai/ insentif	9.200.000	7.800.000
Biaya lembur	3.375.000	-
Biaya pembinaan pegawai dan pakaian dinas	2.000.000	54.771.250
Rupa - rupa biaya pegawai	-	1.200.000
Jumlah beban pegawai	**4.751.450.536**	**5.134.967.967**

18. BEBAN KANTOR

	2025	2024
Beban umum	711.071.126	476.083.601
Beban listrik	681.484.045	699.311.492
Beban BBM	361.552.500	269.616.000
Beban perjalanan dinas	184.997.500	379.309.200
Beban keuangan	117.741.041	111.592.566
Beban ATK dan cetakan	49.692.763	44.502.913
Beban kantor lainnya	185.949.708	223.130.030
Jumlah beban kantor	**2.292.488.683**	**2.203.545.802**

19. BEBAN PEMELIHARAAN

	2025	2024
Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi	406.776.550	378.775.000
Pemeliharaan pipa dinas	153.417.500	100.563.650
Pemeliharaan kendaraan	34.468.601	25.993.042
Pemeliharaan mata air dan sumber	30.272.500	29.075.000
Pemeliharaan bangunan	20.133.750	9.568.950
Pemeliharaan instalasi sumber lainnya	15.466.000	23.279.150
Pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi lainnya	6.025.000	57.449.688
Pemeliharaan bangunan pengumpulan & reservoir	5.090.000	7.345.000
Pemeliharaan inventaris kantor	1.650.000	2.750.000
Pemeliharaan taman dan lapangan	500.000	500.000
Jumlah beban pemeliharaan	**673.799.901**	**635.299.480**

20. BEBAN PENYUSUTAN / AMORTISASI

	2025	2024
Beban penyusutan instalasi transdis	405.102.485	395.001.625
Beban penyusutan instalasi pompa	85.423.361	91.087.032
Beban penyusutan kendaraan/ alat angkut	57.259.122	57.259.122
Beban penyusutan inventaris kantor	48.054.612	41.370.026
Beban penyusutan bangunan/ gedung	12.390.247	12.390.247
Beban penyusutan instalasi sumber	11.696.431	11.696.431
Beban penyusutan peralatan/ perlengkapan	2.097.481	1.006.954
Jumlah beban penyusutan	**622.023.742**	**609.811.437**

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan bunga/jasa giro	5.714.965	6.451.464
Pendapatan lain-lain	87.313.798	-
Pendapatan imbalan pasca kerja	-	-
Jumlah pendapatan lain-lain	**93.028.763**	**6.451.464**

21. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (LANJUTAN)

	2025	2024
Beban Lain-lain		
Beban admin bank	(720.000)	(720.000)
Beban lain-lain	(4.623)	(1.079.499)
Jumlah beban lain-lain	**(724.623)**	**(1.799.499)**
Total pendapatan (beban) lain-lain - bersih	**92.304.140**	**4.651.965**

22. PENYAJIAN KEMBALI

	31 Desember 2024		
	Sebelum disajikan kembali	**Dampak disajikan kembali**	**Setelah disajikan kembali**
Laporan Posisi Keuangan			
Aset tidak lancar			
Pembayaran di muka kepada pemerintah daerah	464.591.793	(99.591.792)	365.000.001
Ekuitas			
Deviden	**-**	(99.591.792)	(99.591.792)

23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Dewan Pengawas
Susunan Dewan Pengawas Perusahaan sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7/KEP/HK/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengangkat Yohanis Naat, SH sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Direktur
Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai diterbitkannya laporan ini sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8/KEP/HK/2026 Tanggal 19 Januari 2026, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

Direktur : Frans Steven Tafui, S.P

24. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diuraikan dan diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2026.

2025 LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

bankNTT
melayani lebih sungguh

MERAJUT KEPERCAYAAN, MENGHUBUNGKAN NUSA

Weaving Trust, Connecting Region

PENJELASAN TEMA
Theme Explanation

Merajut Kepercayaan, Menghubungkan Nusa
Weaving Trust, Connecting Region

Tema ini mencerminkan peran strategis Bank NTT sebagai penghubung utama dalam ekosistem ekonomi Nusa Tenggara Timur, sekaligus membangun kepercayaan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi intermediasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Filosofi "merajut" menggambarkan bahwa kepercayaan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang konsisten, disiplin, dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan, hal ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola, penerapan manajemen risiko yang *prudent*, serta komitmen dalam menjaga tingkat kesehatan bank.

Pada tahun 2025, Bank NTT mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi kepercayaan tersebut melalui peningkatan kualitas aset, penguatan pencadangan risiko, serta penataan portofolio kredit secara lebih selektif. Penyesuaian kinerja laba yang terjadi merupakan konsekuensi dari kebijakan *prudential* yang diambil untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Sejalan dengan itu, "menghubungkan nusa" mencerminkan peran Bank NTT dalam menjembatani potensi ekonomi daerah melalui akses keuangan yang inklusif, dukungan kepada pengembangan UMKM, serta integrasi layanan perbankan melalui transformasi digital. Dengan fondasi kepercayaan yang semakin kuat, Bank NTT optimis dapat terus tumbuh secara sehat, resilien, dan berkelanjutan serta memberi nilai tambah bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

This theme reflects Bank NTT's strategic role as a key connector within the economic ecosystem of East Nusa Tenggara, while fostering sustainable trust among all stakeholders. Trust serves as the cornerstone for performing intermediary functions and driving inclusive regional economic growth.

The philosophy of "weaving" illustrates that trust is not formed instantly, but rather through a consistent, disciplined, and sustainable process. In the banking context, this is realized through strengthened governance, the implementation of prudent risk management, and a commitment to maintaining the bank's financial health.

In 2025, Bank NTT is taking strategic steps to strengthen this foundation of trust by improving asset quality, bolstering risk reserves, and managing its loan portfolio more selectively. The resulting adjustment in profit performance is a consequence of the prudential policies adopted to ensure the bank's long-term resilience and sustainability.

In line with this, "connecting the islands" reflects Bank NTT's role in bridging regional economic potential through inclusive financial access, support for SME development, and the integration of banking services through digital transformation. With an increasingly strong foundation of trust, Bank NTT is optimistic that it can continue to grow in a healthy, resilient, and sustainable manner while adding value to economic development and growth in East Nusa Tenggara.

DAFTAR ISI
Table of Content

ii Penjelasan Tema
Theme Explanation

02 Daftar isi
Table of Content

06 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

10 IKHTISAR KEUANGAN
Financial Highlight

LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN
Report to Stakeholders

25 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

36 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile

41 Laporan Direksi
Board of Director Report

48 Profil Direksi
Board of Directors Profile

58 Profil Pejabat Eksekutif
Executive Profile

66 Pemimpin Cabang
Branch Manager

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

80 Identitas Perusahaan
Corporate Identity

82 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief Company History

86 Bidang Usaha
Business Fields

88 Produk dan Layanan
Products And Services

100 Visi, Misi Dan Nilai Perusahaan
Vision, Mission And Company Values

106 Milestone
Milestone

108 Logo Bank NTT
Bank NTT Logo

110 Struktur Organisasi Bank NTT
Bank NTT Organization Structure

112 Informasi Kepemilikan Saham
Shareholding Information

116 Profil Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Penyertaan Saham & Afiliasi
Profile Of Subsidiaries, Associates, Equity Investments & Affiliates

117 Jaringan Kantor BanK NTT Tahun Buku 2025
Office Network of Bank Ntt In 2025

134 Peristiwa Penting Tahun 2025
Key Events in 2025

135 Penghargaan Dan Sertifikasi
Awards And Certification

137 Informasi Pada Website Perusahaan
Information on Company Website

TINJAUAN FUNGSIONAL DAN OPERASIONAL
Functional & Operational Review

140	**Sumber Daya Manusia** Human Resources
143	Struktur Organisasi Pengelolaan SDM Organizational Structure for Human Resource Management
144	Profil Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Profile of the Acting (Plt.) Head Of The Human Resources Division
145	Ruang Lingkup Kerja Scope Of Work
154	Rekruitmen Pegawai Employee Recruitment
157	Profil SDM Bank NTT Tahun Buku 2025 Bank NTT Human Resources Profile for Fiscal Year 2025
163	Konsep dan Pengelolaan SDM HR Concept and Management
165	Kesejahteraan Pegawai Employee Welfare
166	Internalisasi Budaya Perusahaan Internalization of Corporate Culture
166	Pengelolaan Jalur Karier Career Path Management
168	Penghargaan Kepada Pegawai Employees Recognition
169	Pelatihan & Pengembangan SDM Training & Human Resource Development
173	Pengelolaan Hubungan Industrial Industrial Relationship Management
174	**Teknologi Informasi** Information Technology
179	Program Kerja Divisi Teknologi Informasi Bank NTT Tahun 2025 Work Program of the Information Technology Division of Bank NTT for 2025
183	Arsitektur Teknologi Informasi Bank NTT Tahun 2025 Information Technology Architecture of Bank NTT – 2025

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

190	Perekonomian Nasional dan Regional National And Regional Economy
191	Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation
193	Perluasan Jaringan Kantor Baru Expansion Of New Branch Network
195	Penerapan Fungsi Kepatuhan Implementation Of The Compliance Function
202	Penerapan Fungsi Audit Internal Implementation of Internal Audit Functions
205	Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan Significant Accounting Policies
215	Tinjauan Per Segmen Usaha Review By Business Segment
217	Rencana Pengembangan Dan Strategi Pemasaran Development Plan And Marketing Strategy
219	**Rencana Pengembangan Dan Strategi Pemasaran** Development Plan And Marketing Strategy
220	Deposito Timed Deposits
221	Segmen Kredit Credit Segment
224	Treasuri Treasury

DAFTAR ISI

Table of Content

225	**TINJAUAN KEUANGAN** FINANCIAL REVIEW
225	Kinerja Keuangan Bank NTT Tahun 2025 Financial Performance of Bank NTT for the Year 2025
225	Laporan Laba Rugi Tahun 2025 2025 Income Statement
228	Aset Asset
229	Ekuitas Equity
231	Kemampuan Membayar Hutang Dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Serta Rasio Keuangan Lainnya Debt Payment Capacity, Receivables Collectibility Rate, and Other Financial Ratios
231	Rasio Kecukupan Modal Capital Adequacy Ratio
232	Non Performing Loan (NPL) Non Performing Loan (NPL)
233	Rentabilitas Profitability
234	Struktur Modal (Capital Structure) Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Permodalan (Capital Structure Policy) Capital Goods Expenditures And Material Commitments For Capital Goods Investments
236	Belanja Barang Modal dan Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal Capital Goods Shopping And Material Commitments For Capital Goods Investment
238	Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun 2025 Dengan Hasil Yang Dicapai Pada Akhir Tahun 2025 Dan Target Tahun 2026 Comparison Between The Targets At The Beginning Of 2025 And The Results Achieved At The End Of 2025 And The 2026 Targets
239	Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information And Facts That Happened After The Accountant's Report Date
239	Prospek Usaha Bank NTT Bank NTT Business Prospectt
244	Pemasaran Marketing
245	Kebijakan Dividen Dividend Policy
247	Laporan Komitmen Kontinjensi Contingency Commitment Report
247	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization Of Use Of Proceeds From The Public Offering
247	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen Yang Dilaksanakan Oleh Perusahaan (Esop/Msop) Employee And/Or Management Share Ownership Program Implemented By The Company (Esop/Msop)
248	Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan /Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Material Transaction Information Containing Conflict Of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties
249	Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi Information Transaction with related parties
250	Perubahan Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Changes
251	Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Impact Of Changes In Accounting Policies On Financial Statements
252	Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Government Guarantees On Commercial Bank Payment Obligations
253	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Changes In Legislation That Significantly Affect The Company
256	Tinjauan Bisnis Bank NTT Business Review of Bank NTT
257	Kontribusi Bank NTT Terhadap Pemerintah Bank NTT's Contribution To The Government
258	Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR)

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Good Corporate Governance

266	Pendahuluan Introduction
274	Struktur Organisasi Bank NTT Organizational Structure of Bank NTT"
276	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Mechanism
279	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting Of Shareholders (GMS)
283	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Conduct Of The General Meeting Of Shareholders (GMS)
304	Dewan Komisaris Board of Commissioners
321	Direksi Board of Directors
232	Komite – Komite Dibawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners
371	Komite – Komite Dibawah Direksi Committees Under the Board of Directors
387	Assessment Terhadap Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Assessment of The Performance of The Board of Commissioners and The Board of Directors
389	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Dan Direksi Disclosure of Affiliate Relationships of The Board of Commissioners and The Board of Directors
391	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions Involving Conflicts of Interest
395	Penerapan Fungsi Kepatuhan Implementation Of Compliance Functions
400	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of Internal Audit Function
411	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation Of External Audit Function
434	Integritas Pelaporan dan Sistem Informasi Integrity of Reporting and Information Systems
445	Aspek Pemegang Saham Shareholder Aspects
451	Penerapan Strategi Anti Fraud Termasuk Anti Penyuapan Implementation Of Anti-Fraud Strategies, Including Anti-Bribery
453	Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) Code Of Conduct

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

492	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR)
500	Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) Governance In Bank Business Groups (KUB)
505	Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2025 Responsibility For The 2025 Annual Report

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

2022

2023

MANAGING SUSTAINABILITY FOR EXCELLENT GROWTH

Sustainability, atau Berkelanjutan, adalah tema besar kinerja sekaligus tema laporan tahunan Bank NTT tahun 2022. Berkelanjutan harus diikuti komitmen untuk dapat melakukan kerja secara terus-menerus, yang dibentuk dari landasan yang kuat dengan hasil yang secara pasti akan tumbuh dengan konsisten.

Sustainability, or "Berkelanjutan", is the main theme of performance as well as the theme of Bank NTT's 2022 annual report. Sustainability must be followed by a commitment to be able to carry out work continuously, which is formed from a strong foundation with results that will definitely grow consistently.

FOCUSING POTENTIAL FOR GROWTH

Bank NTT bertekad untuk senantiasa mensinergikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal, meningkatkan pertumbuhan usaha, menghasilkan kinerja yang unggul, dan memberikan tingkat pengembalian terbaik bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, saat ini maupun di tahun-tahun mendatang.

Bank NTT is determined to always synergize all existing resources optimally, increase business growth, produce superior performance, and provide the best rate of return for all shareholders and other stakeholders, now and in the years to come.

BERTUMBUH DALAM KEBERSAMAAN
GROWING IN TOGETHERNESS

Pertumbuhan bisnis Bank NTT yang signifikan di tahun buku 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari kerja bersama seluruh elemen dalam ekosistem perbankan. Kebersamaan seluruh insan Bank NTT dan kemitraan yang strategis dengan berbagai pihak merupakan kekuatan utama meningkatnya performa Bank NTT.

The significant growth of Bank NTT's business in fiscal year 2024 compared to the previous year cannot be separated from the joint work of all elements in the banking ecosystem. The togetherness of all Bank NTT people and strategic partnerships with various parties are the main forces for increasing Bank NTT's performance.

MERAJUT KEPERCAYAAN, MENGHUBUNGKAN NUSA
WEAVING TRUST, CONNECTING REGION

Filosofi "merajut" menggambarkan bahwa kepercayaan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang konsisten, disiplin, dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan, hal ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola, penerapan manajemen risiko yang *prudent*, serta komitmen dalam menjaga tingkat kesehatan Bank.

The philosophy of "weaving" illustrates that trust is not built overnight, but rather through a consistent, disciplined, and sustained process. In the banking context, this is achieved through strengthened governance, the implementation of prudent risk management, and a commitment to maintaining the Bank's financial health.

HIGHLIGHT

Highlight

Kinerja 2025 menunjukkan penguatan fundamental melalui pertumbuhan dana, kredit, dan diversifikasi bisnis berkelanjutan

Kinerja 2025 menunjukkan penguatan fundamental melalui pertumbuhan dana, kredit, dan diversifikasi bisnis berkelanjutan

Bank NTT terus mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah Daerah melalui CMS, SP2D Online, EDC, Samsat Online, Pembayaran Pajak Daerah melalui EDC.

Bank NTT terus mendorong digitalisasi layanan pemerintah melalui CMS, SP2D Online, EDC, dan Mobile Banking.

Rp15.93 triliun trillion

Dana Pihak Ketiga tumbuh signifikan menjadi Rp15.93 triliun, naik 73.12% dibandingkan tahun 2024.

Dana Pihak Ketiga tumbuh signifikan menjadi Rp15,93 triliun, naik 73,12% dibanding 2024.

Rp13.95 triliun trillion

Kredit yang disalurkan tumbuh menjadi Rp13.95 triliun, naik 9.24% dari tahun 2024.

Kredit yang disalurkan tumbuh menjadi Rp13,95 triliun, naik 9,24%.

0.74%

NPL Net turun signifikan menjadi 0.74%, menunjukkan kualitas kredit yang semakin sehat dibandingkan tahun 2024.

NPL Net turun signifikan menjadi 0,74%, menunjukkan kualitas kredit yang semakin sehat.

Rp20.09 triliun trillion

Total aset Bank NTT meningkat kuat menjadi Rp20.09 triliun, tumbuh 22.26% dibanding 2024.

Total aset Bank NTT meningkat kuat menjadi Rp20,09 triliun, tumbuh 22,26% dibanding 2024.

Rp2.81 triliun trillion

Ekuitas menguat menjadi Rp2.81 triliun, bertambah Rp110.8 miliar.

Ekuitas menguat menjadi Rp2,81 triliun, bertambah Rp110,8 miliar.

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Jumlah Aset
Total Assets

Rp juta | Rp million

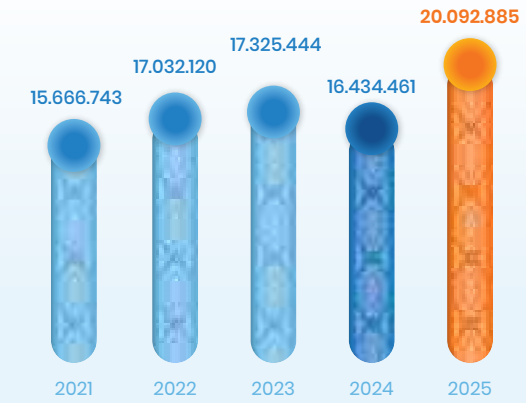

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp juta | Rp million

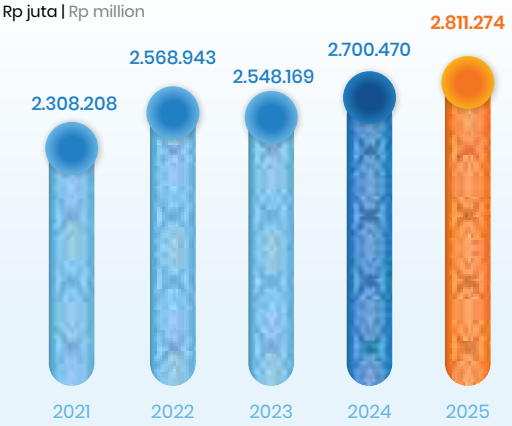

Pendapatan Bunga
Interest Income

Rp juta | Rp million

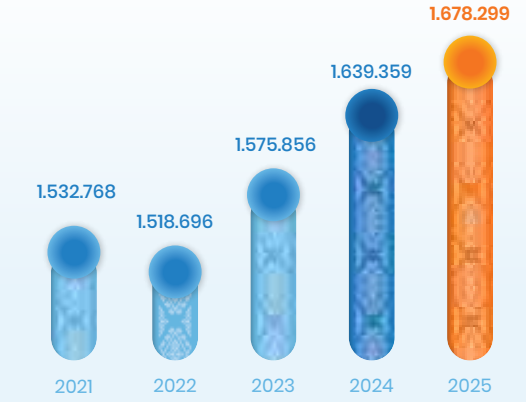

Pendapatan Bunga Bersih
Net Interest Income

Rp juta | Rp million

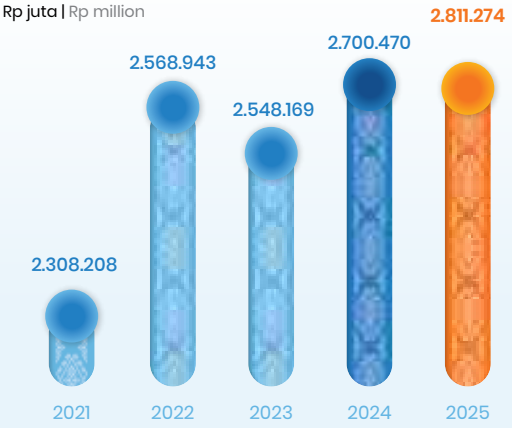

Pendapatan Operasional Lainnya
Other Operating Income

Rp juta | Rp million

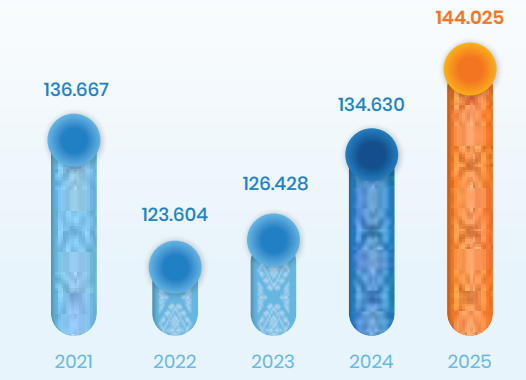

Laba Operasional
Operating Profit

Rp juta | Rp million

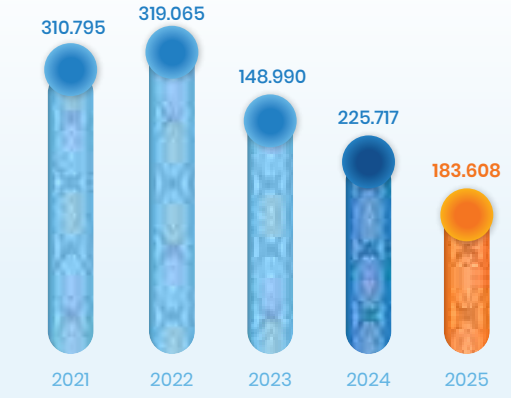

Laba Sebelum Pajak
Profit Before Tax

Rp juta | Rp million

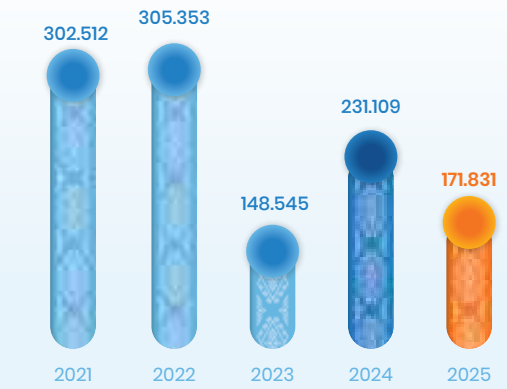

Laba Setelah Pajak
Net Profit After Tax

Rp juta | Rp million

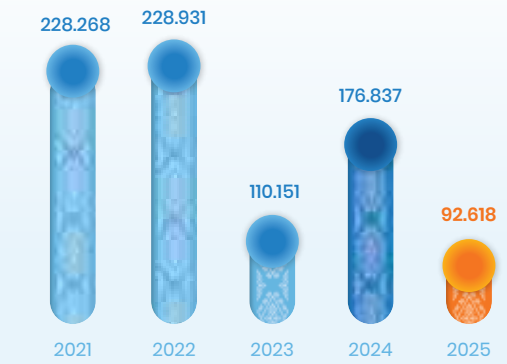

Laba Bersih Perlembar Saham
Net Profit Per Share

Rp juta | Rp million

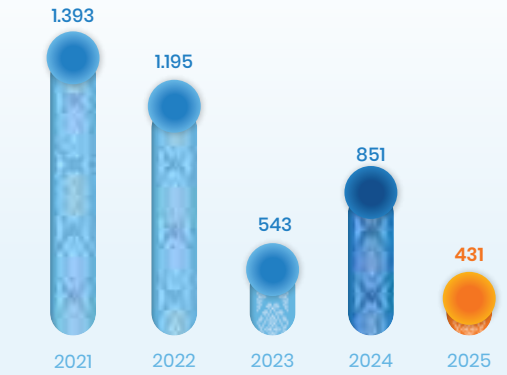

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Minimum Capital Provision Obligation (KPMM)

dalam % | in %

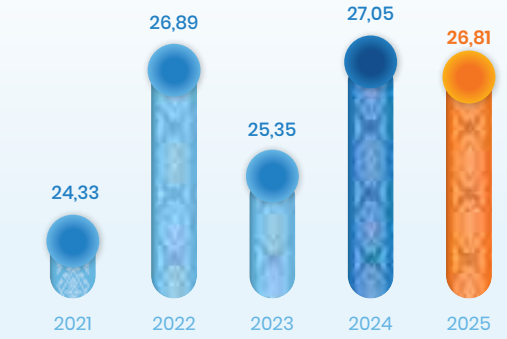

NPL Gross
NPL Gross

dalam % | in %

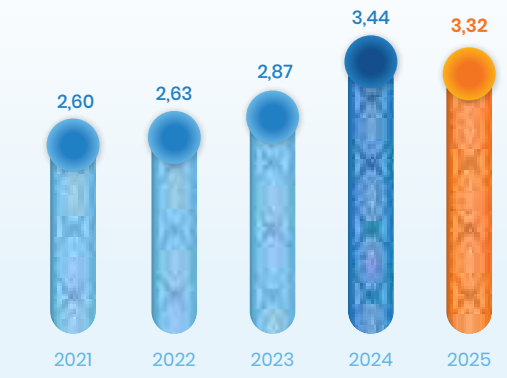

NPL Net
NPL Net

dalam % | in %

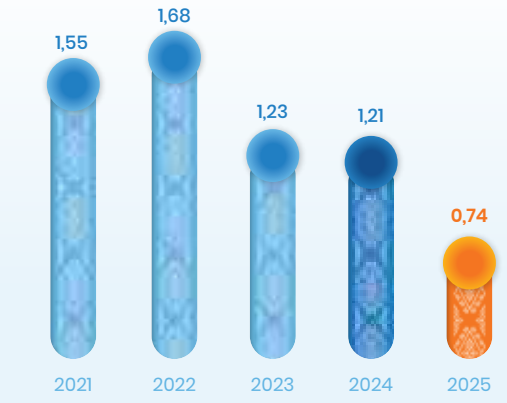

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA)

dalam % | in %

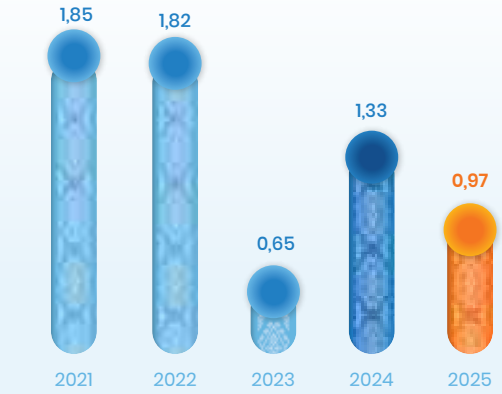

Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE)

dalam % | in %

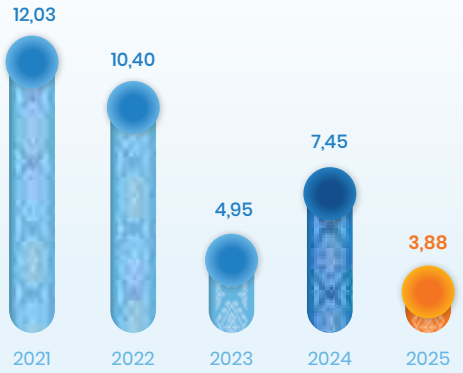

NIM

NIM

dalam % | in %

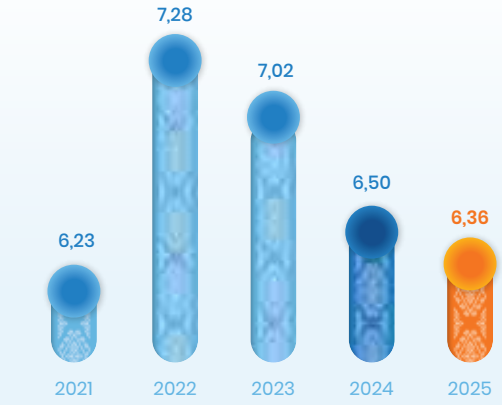

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Operating Costs to Operating Income (BOPO)

dalam % | in %

LDR

LDR

dalam % | in %

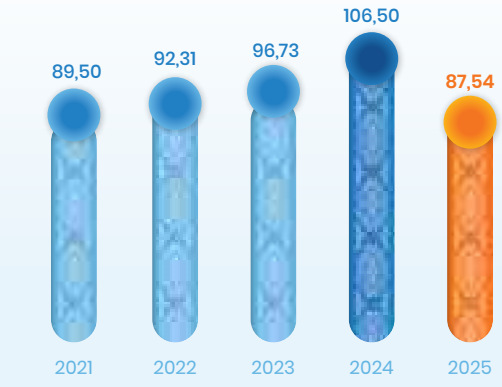

Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA)

Savings & Current Account against Total Third Party Funds (CASA)

dalam % | in %

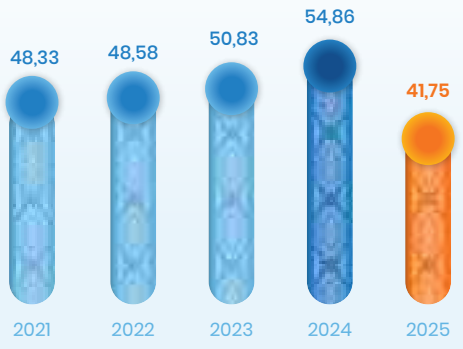

Rasio Lancar
Current Ratio

dalam % | in %

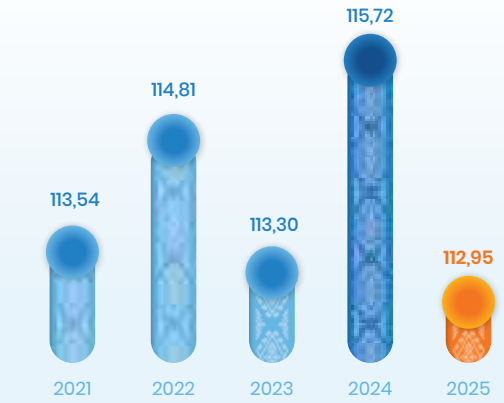

Liabilitas Terhadap Aset
Liabilities to total Assets

dalam % | in %

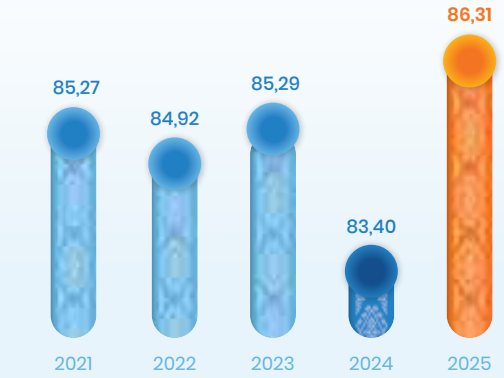

Liabilitas Terhadap Ekuitas
Liabilities to Equity

dalam % | in %

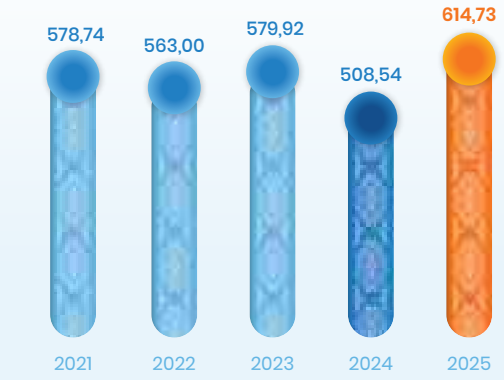

GWM Rupiah
Rupiah Minimum Reserve Requirement (GWM)

dalam % | in %

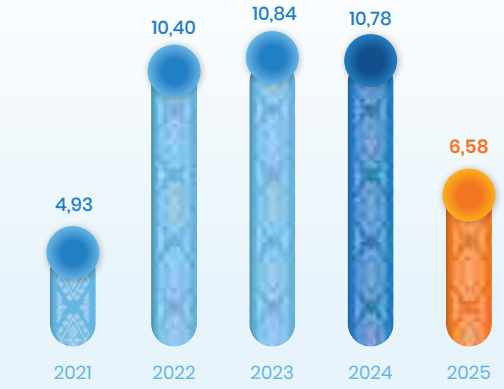

GWM Valas
GWM Valas

dalam % | in %

Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan
Overall Net Open Position (NOP)

dalam % | in %

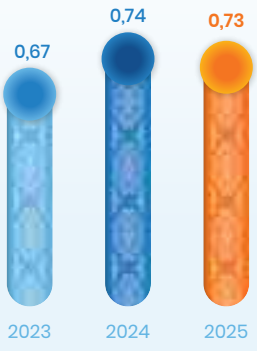

IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

(Jutaan Rp) (Million Rp)

NERACA	2021	2022	2023	2024	2025	BALANCE
Jumlah Aset	15.666.743	17.032.120	17.325.444	16.434.461	20.092.885	Total Assets
Aset Produktif	14.839.671	14.586.349	14.822.038	15.603.199	19.298.268	Productive Assets
Kredit Yang Diberikan (Bruto)	11.181.261	11.815.139	12.474.212	12.766.585	13.945.702	Credit Granted (Gross)
CKPN Kredit	175.226	171.478	262.691	347.978	466.950	CKPN Credit
Dana Pihak Ketiga	12.493.078	12.779.276	12.895.747	11.987.255	15.929.812	Third Party Funds
Jumlah Ekuitas	2.308.208	2.568.943	2.548.169	2.700.470	2.811.274	Total Equity
Modal Disetor	1.735.458	1.956.186	2.045.186	2.114.551	2.209.537	Paid-up Capital
Modal Sumbangan	247	247	247	247	247	Donation Capital
Dana Setoran Modal	75.674	26.500	12.714	11.500	5.000	Capital Deposit Fund
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	(40.479)	(66.096)	(71.674)	(68.224)	(95.792)	Actuarial Advantages (Disadvantages) Defined Benefit Program
Cadangan Umum	309.040	423.174	451.791	465.559	487.664	General Backup
Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-	Last Year's Profit
Laba Thn Berjalan Setelah Pajak	228.268	228.931	110.151	176.837	92.618	Current Year Profit
Jumlah Lembar Saham yang ditempatkan & disetor	173.545.765 Lembar / Shares	195.618.635 Lembar / Shares	204.518.635 Lembar / Shares	211.455.086 Lembar/ Shares	220.953.680 Lembar/ Shares	Number of Shares Placed & Deposited

(Jutaan Rp) (Million Rp)

LABA (RUGI)	2021	2022	2023	2024	2025	PROFIT (LOSS)
Pendapatan Bunga	1.532.768	1.518.696	1.575.856	1.639.359	1.678.299	Interest Income
Beban Bunga	594.798	448.778	535.813	556.619	597.016	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	937.970	1.069.918	1.040.043	1.082.740	1.081.283	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	136.667	123.604	126.428	134.630	144.025	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	763.842	874.457	1.017.481	991.652	1.041.700	Other Operating Expenses
Laba Operasional	310.795	319.065	148.990	225.717	183.608	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(8.283)	(13.712)	(445)	5.391	(11.778)	Non-Operating Income (Expense)
Laba Sebelum Pajak	302.512	305.353	148.545	231.109	171.831	Profit Before Tax
Pajak Penghasilan	74.244	76.422	38.392	54.272	79.213	Income Tax

(Jutaan Rp) (Million Rp)

LABA (RUGI)	2021	2022	2023	2024	2025	PROFIT (LOSS)
Laba Bersih Setelah Pajak	228.268	228.931	110.151	176.837	92.618	Net Profit After Tax
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	(27.745)	(25.616)	(5.579)	3.450	55.861	Other Comprehensive Income (Expense) Not Reclassified to Profit and Loss
Jumlah Laba Komprehensif	200.523	203.315	104.573	180.287	148.479	Comprehensive Profit Amount
Laba Bersih Perlembar Saham (Rp.)	1.393	1.195	543	851	431	Net Profit Per Share (Rp.)

RATIO PENTING	2021	2022	2023	2024	2025	RATIO MATTERS
PERMODALAN						CAPITAL
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24,33	26,89	25,35	27,05	26,81	Minimum Capital Provision Obligation (KPMM)
ASET PRODUKTIF						PRODUCTIVE ASSETS
Asset Produktif Bermasalah & Asset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif dan Asset Non Produktif	3,00	2,97	3,91	2,80	2,36	Problematic Productive Assets &; Non-Productive Assets Problematic to Total Productive Assets and Non-Productive Assets
Asset Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif	2,30	2,36	3,35	2,81	2,37	Productive Assets Problematic to Total Productive Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Terhadap Asset Produktif	1,39	1,35	1,95	2,23	2,39	Impairment Loss Reserve (CKPN) of Financial Assets Against Productive Assets
NPL Gross	2,60	2,63	2,87	3,44	3,32	NPL Gross
NPL Net	1,55	1,68	1,23	1,21	0,74	NPL Net
RENTABILITAS						PROFITABILITY
Return On Asset (ROA)	1,85	1,82	0,65	1,33	0,97	Return On Asset (ROA)
Return On Equity (ROE)	12,03	10,40	4,95	7,45	3,88	Return On Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	6,23	7,28	7,02	6,50	6,36	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,40	80,59	91,25	87,28	89,92	Operating Costs to Operating Income (BOPO)
Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA)	48,33	48,58	50,83	54,86	41,75	Savings & Current Account against Total Third Party Funds (CASA)

RATIO PENTING	2021	2022	2023	2024	2025	RATIO MATTERS
LIKUIDITAS						LIQUIDITY
Loan to Deposit Ratio (LDR)	89,50	92,31	96,73	106,50	87,54	Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio Lancar	113,54	114,81	113,30	115,72	112.95	Current Ratio
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	-	-	-	138.96	264.61	Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	-	-	-	106.89	106.89	Net Stable Funding Ratio (NSFR)
SOLVABILITAS						SOLVENCY
Liabilitas terhadap total Aset	85,27	84,92	85,29	83,40	86.31	Liabilities to total Assets
Liabilitas terhadap Ekuitas	578,74	563,00	579,92	508,54	614.73	Liabilities to Equity
KEPATUHAN						COMPLIANCE
Persentase pelanggaran BMPK	-	-	-	-	-	Percentage of BMPK violations
Persentase pelampauan BMPK	-	-	-	-	-	BMPK exceeded percentage
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	4,93	10,40	10,84	10,78	6,58	The main rupiah reserve requirement is the main reserve requirement
Giro Wajib Minimum (GWM) Valas	4,93	10,40	10,84	386,04	366,11	Foreign Currency Statutory Reserves (Minimum Reserve Requirement)
Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan	-	-	0,67	0,74	0,73	Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan

INFORMASI HARGA SAHAM

Bank NTT hingga 31 Desember 2025 belum mengeluarkan sahamnya kepada publik dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu informasi terkait harga saham tertinggi dan terendah, harga saham saat penutupan serta volume saham tidak dapat disajikan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025.

STOCK PRICE INFORMATION

As of December 31, 2025, Bank NTT has not issued its shares to the public or listed them on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, information regarding the highest and lowest stock prices, closing stock prices, and trading volume cannot be presented in the 2025 Annual Report.

INFORMASI MENGENAI OBLIGASI

INFORMASI MENGENAI OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 2018

Pada tanggal 21 Desember 2018 Bank NTT menerbitkan "Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018" dengan nominal sebesar Rp 500 miliar di Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

INFORMATION REGARDING BONDS

INFORMATION REGARDING BANK NTT'S 2018 PHASE I SUSTAINABLE BOND I

On December 21, 2018, Bank NTT issued the "Bank NTT Sustainable Bond I Phase I 2018" with a nominal value of Rp 500 billion on the Indonesia Stock Exchange, with the following details:

JENIS EFEK JENIS EFEK	NILAI (RP) NILAI (RP)	TINGKAT SUKU BUNGA TINGKAT SUKU BUNGA	TANGGAL PENERBITAN TANGGAL PENERBITAN	TANGGAL JATUH TEMPO TANGGAL JATUH TEMPO
Seri A	228.000.000.000,-	9,25% per tahun	21 Desember 2018	01 Januari 2020
Seri B	155.000.000.000,-	10,50% per tahun	21 Desember 2018	21 Desember 2021
Seri C	80.000.000.000,-	10,75% per tahun	21 Desember 2018	21 Desember 2023
Seri D	37.000.000.000,-	11% per tahun	21 Desember 2018	21 Desember 2025

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 2018

Dana hasil penjualan umum Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya emisi, telah digunakan seluruhnya untuk melakukan ekspansi kredit.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING OF BANK NTT'S FIRST PHASE OF THE 2018 CONTINUOUS BOND ISSUANCE

The proceeds from the public offering of Bank NTT's 2018 Phase I Continuous Bond Series I, after deducting issuance costs, were fully utilized for credit expansion.

PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 2018 SERI D TAHUN 2025

HOLDERS OF BANK NTT SUSTAINABLE BOND I PHASE I 2018 SERIES D 2025

NO	NAMA INVESTOR INVESTOR NAME	PEMEGANG REKENING ACCOUNT HOLDER	NOMINAL (Rp) FACE VALUE (IDR)	JATUH TEMPO MATURITY
1	DP Bank DKI	BNI. Tbk	10.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
2	DP BPD SUMBAR	BNI. Tbk	10.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
3	DPPPK BPD Jawa Tengah	Bank Mandiri PT. Custody	5.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
4	Dana Pensiun Wijaya Karya PPMP	BRI PT	4.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
5	Dana Pensiun BPD Sulawesi Tenggara	Bank Mandiri PT.Custody	3.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
6	Dana Pensiun Wijaya Karya PPIP	BRI PT	3.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
7	Dana Pensiun LKBN Antara	Bank Mandiri PT.Custody	1.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
8	Dana Pensiun Pegawai Bank BPR Jatim	BNI. Tbk	1.000.000.000	21 Desember 2025 December 21, 2025
	TOTAL		**37.000.000.000,-**	

KRONOLOGI PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 2018

Pada tanggal 21 Desember 2025 Bank NTT telah memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 **SERI D** kepada investor.

Realisasi pembayaran bunga dan pokok atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 **SERI D** pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TIMELINE OF INTEREST PAYMENTS FOR BANK NTT CONTINUOUS BOND I PHASE I 2018

On December 21, 2025, Bank NTT fulfilled its obligation to pay the interest and principal on Bank NTT Continuous Bond I Phase I 2018 SERIES D to investors.

The realization of interest and principal payments on the issuance of Bank NTT Continuous Bond I Phase I 2018 SERIES D in 2025 is as follows:

NO	TANGGAL	NOMINAL BUNGA (Rp) INTEREST AMOUNT (IDR)	NOMINAL POKOK (Rp) PRINCIPAL AMOUNT (Rp)	DATE
1	21 Maret 2025	1.017.500.000	-	March 21, 2025
2	21 Juni 2025	1.017.500.000	-	June 21, 2025
3	21 September 2025	1.017.500.000	-	September 21, 2025
4	21 Desember 2025	1.017.500.000	37.000.000.000	December 21, 2025
	TOTAL	**4.070.000.000**	**37.000.000.000**	TOTAL

INFORMASI MENGENAI *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* (NCD) BANK NTT I TAHUN 2024 SERTA *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* (NCD) BANK NTT I TAHUN 2025

Pada tanggal 07 Februari 2025 manajemen telah menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit* Bank NTT I Tahun 2025 senilai Rp 6.176.062.916.- (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang digunakan untuk realisasi Kredit Tapera kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.

INFORMATION REGARDING THE BANK NTT NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) I 2024 AND THE BANK NTT NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) I 2025

Following the maturity of all Bank NTT bond series, management issued the Bank NTT I Negotiable Certificate of Deposit for 2025 on February 7, 2025, in the amount of Rp 6,176,062,916. (Six Billion One Hundred Seventy-Six Million Sixty-Two Thousand Nine Hundred Sixteen Thousand Rupiah) to be used for the disbursement of Tapera loans to the Tapera Management Agency (BP).

SERI SERIES	JUMLAH NOMINAL (Rp) AMOUNT NOMINAL (Rp)	NOMOR SERI PENERBITAN ISSUE SERIAL NUMBER	ARRANGER ARRANGER	TINGKAT DISKONTO (%) RATE DISCOUNT (%)	TENOR TENOR	TANGGAL PENERBITAN DATE OF ISSUE	TANGGAL JATUH TEMPO MATURITY
-	6.176.062.916,-	BNTT03XXNCD	-	1,49	12 bulan	07 Februari 2025 February 7, 2025	07 Februari 2025 February 7, 2025

Guna memperkuat likuiditas, manajemen kembali menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit* Bank NTT I Tahun 2025 senilai Rp 270.000.000.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar*) dalam 3 (tiga) Seri dengan rincian sebagai berikut :

To strengthen liquidity, management has reissued the Bank NTT I 2025 Negotiable Certificate of Deposit worth Rp 270,000,000,000 (Two Hundred Seventy Billion) in 3 (three) Series with the following details: :

SERI SERIES	JUMLAH NOMINAL (Rp) AMOUNT NOMINAL (Rp)	NOMOR SERI PENERBITAN ISSUE SERIAL NUMBER	ARRANGER ARRANGER	TINGKAT DISKONTO (%) RATE DISCOUNT (%)	TENOR TENOR	TANGGAL PENERBITAN DATE OF ISSUE	TANGGAL JATUH TEMPO MATURITY
SERI A	120.000.000.000,-	BNTT04AXNCD	PT BRI Danareksa Sekuritas	8,00	12 bulan 12 months	17 Juni 2025 June 17, 2025	12 Juni 2026 June 12, 2026
SERI B	50.000.000.000,-	BNTT04BXNCD	PT BRI Danareksa Sekuritas	8,50	24 bulan 24 months	17 Juni 2025 June 17, 2025	07 Juni 2027 June 7, 2027
SERI C	100.000.000.000,-	BNTT04CXNCD	PT BRI Danareksa Sekuritas	9,00	36 bulan 36 months	17 Juni 2025 June 17, 2025	01 Juni 2028 June 1, 2028
TOTAL	**270.000.000.000,-**						

PEMEGANG *NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT* (NCD) BANK NTT I TAHUN 2025

HOLDERS OF THE NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT (NCD) BANK NTT I 2025

NAMA INVESTOR INVESTOR NAME	NOMINAL (Rp) FACE VALUE (Rp)	JATUH TEMPO MATURITY
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	100.000.000.000,-	07 Februari 2026 February 7, 2026
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA	20.000.000.000,-	12 Juni 2026 June 12, 2026
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN	50.000.000.000,-	07 Juni 2027 June 07, 2027
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN	50.000.000.000,-	01 Juni 2028 June 01, 2028
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN	50.000.000.000,-	01 Juni 2028 June 01, 2028
TOTAL	**270.000.000.000,-**	

PEMERINGKATAN OLEH LEMBAGA PEMERINGKAT - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 2018

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, maka berikut disampaikan hasil pemeringkatan dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2018 SERI D.

Pada tanggal 21 Desember 2025 Bank NTT telah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi Bank NTT SERI D kepada investor sehingga per 31 Desember 2025 Bank NTT tidak lagi memiliki Obligasi yang diterbitkan, oleh karena itu lembaga pemeringkat PEFINDO telah melakukan penarikan peringkat atas peringkat efek utang tersebut.

RATING BY RATING AGENCY - BANK NTT SUSTAINABLE BOND I PHASE I 2018

To comply with the provisions set forth in the decision of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP-135/BL/2006 dated December 14, 2006, regarding the Rating of Debt Securities, the following presents the rating results from PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) for PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and the 2018 Series D Continuous Bond I.

On December 21, 2025, Bank NTT fulfilled its obligation to pay the principal and interest on the Bank NTT SERIES D bonds to investors; therefore, as of December 31, 2025, Bank NTT no longer holds any issued bonds, and consequently, the rating agency PEFINDO has withdrawn the rating for said debt securities.

Keterangan Notes	**Pemeringkatan 2025** 2025 Rating
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	idA- /Stable (Single A Minus ; Stable Outlook)
Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2018 SERI D	idA- (Single A Minus)

Penarikan Peringkat
Rating Withdrawal

22 Desember 2025
December 22, 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melakukan pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 Seri D (peringkat idA-) senilai Rp37.000.000.000 pada tanggal 22 Desember 2025. Dengan demikian, PEFINDO melakukan penarikan atas peringkat efek utang tersebut.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur has repaid the Bank NTT Series I 2018 Continuous Bond Phase I Series D (rated idA-) in the amount of Rp37,000,000,000 on December 22, 2025. Consequently, PEFINDO has withdrawn the rating for this debt security.

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Report to Stakeholders

Pada tahun 2025 Bank NTT berhasil mencatatkan Aset sebesar Rp 20,09 triliun bertumbuh signifikan Rp 3,66 triliun atau naik 22,26% dibandingkan dengan pencapaian Aset pada tahun 2024 sebesar Rp 16,43 triliun.

In 2025, Bank NTT successfully achieved Asset Rp 20.09 trillion, increased significantly Rp 3.66 trillion or 22.26% comparing to 2024 Rp 16.43 trillion.

S. Donny H. Heatubun
Komisaris Utama
President Commissioners

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of the Board of Commissioners

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami naikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Bank NTT dapat melalui tahun 2025 yang penuh tantangan dengan mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Sebagai perwakilan pemegang saham, Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 terus melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap kinerja Direksi dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank.

Sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris juga terus mencermati perkembangan ekonomi global, nasional dan regional yang dapat memberi pengaruh terhadap kinerja bank. Ketidakpastian ekonomi dunia maupun domestik dapat memberikan tekanan terhadap risiko strategis yang diambil oleh manajemen Bank NTT.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL, NASIONAL DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025 tetap tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Pengenaan tarif secara sepihak oleh Amerika Serikat (AS) memicu tindakan balasan dari sejumlah negara besar, sehingga eskalasi perang dagang antarnegara semakin menguat. Sementara itu, ketegangan geopolitik terus berlanjut, antara lain dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina yang belum selesai dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas seiring dengan peningkatan serangan Israel ke Palestina. Kondisi ini turut mendorong ketidakpastian pasar keuangan meningkat tinggi, sehingga berdampak negatif pada keyakinan para pelaku ekonomi dan investor di berbagai negara.

Kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan fragmentasi antarnegara yang semakin melebar. Kebijakan tarif menurunkan volume dan nilai perdagangan global serta semakin memperparah dampak gangguan rantai pasok dunia. Dampak terhadap aktivitas ekonomi lebih

Dear Shareholders and Stakeholders,

We give thanks to God Almighty that Bank NTT was able to navigate the challenging year of 2025 while achieving solid financial performance.

As representatives of the shareholders, the Board of Commissioners continued throughout 2025 to oversee and provide input on the Board of Directors' performance in implementing the Bank's Business Plan.

Throughout 2025, the Board of Commissioners continued to monitor global, national, and regional economic developments that could affect the bank's performance. Economic uncertainties, both global and domestic, could put pressure on the strategic risks taken by Bank NTT's management.

GLOBAL, NATIONAL, AND EAST NUSA TENGGARA ECONOMIC DEVELOPMENTS IN 2025

Global economic uncertainty in 2025 remains high, influenced by the intensifying trade war and ongoing geopolitical tensions. The unilateral imposition of tariffs by the United States (US) triggered retaliatory measures from several major countries, thereby intensifying the escalation of the trade war between nations. Meanwhile, geopolitical tensions continue, driven in part by the unresolved Russia-Ukraine war and escalating tensions in the Middle East as Israeli attacks on Palestine intensify. These conditions have further fueled high financial market uncertainty, negatively impacting the confidence of economic actors and investors across various nations.

U.S. tariff policies and ongoing geopolitical tensions have contributed to a slowdown in global economic growth, with widening disparities among nations. Tariff policies have reduced the volume and value of global trade and further exacerbated the impact of disruptions in the global supply chain. The impact on economic activity is most evident in the deterioration of consumer

terlihat pada memburuknya sentimen konsumen dan produsen akibat ketidakpastian pendapatan dan keberlangsungan usaha.

and producer sentiment due to uncertainty regarding income and business sustainability.

Secara umum, arah kebijakan moneter global sepanjang 2025 tetap bersifat akomodatif. Ketidakpastian global yang tinggi mendorong bank-bank sentral cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kecepatan dan waktu penurunan suku bunga khususnya dalam merespon kebijakan bank sentral USA The Fed yang memberi pengaruh kuat terhadap kebijakan bank-bank sentral negara lainnya di seluruh dunia.

In general, the direction of global monetary policy throughout 2025 remains accommodative. High global uncertainty is prompting central banks to be more cautious in determining the pace and timing of interest rate cuts, particularly in response to the U.S. Federal Reserve's ( ) policy, which exerts a strong influence on the policies of other central banks worldwide.

Situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Kerjasama antara Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter terus dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas, bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Indonesia's economic situation in 2025 remains resilient and performs well amid high global volatility and uncertainty. Cooperation between the Government through fiscal policy and Bank Indonesia through monetary policy continues, maintaining stability while closely aligning with national economic policies to drive economic growth.

Di bidang kebijakan moneter, sejalan dengan inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan melakukan ekspansi operasi moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas nilai Rupiah.

In the area of monetary policy, in line with low and controlled inflation within the target range, Bank Indonesia has lowered interest rates and expanded monetary operations to support economic growth while maintaining the stability of the Rupiah.

Sinergi kebijakan juga diperkuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital nasional, termasuk melalui elektronifikasi penyaluran bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Koordinasi di antara anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan juga ditempuh untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mendukung peran sektor keuangan dalam pembiayaan perekonomian bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sedangkan di bidang sistem pembayaran, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan digital, khususnya pada sektor riil dan UMKM.

Policy synergy has also been strengthened in the development of the national digital economy and finance, including through the digitization of social assistance distribution and the digitization of government financial transactions at both the central and local levels. Coordination among members of the Financial System Stability Committee (KSSK)—comprising the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Deposit Insurance Corporation—was also pursued to strengthen financial system stability and support the financial sector's role in financing the economy for sustainable and inclusive economic growth. Meanwhile, in the field of digital payment systems, the digitization of payment systems continues to be accelerated to enhance economic and financial inclusion, particularly in the real sector and among MSMEs.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sepanjang tahun 2025 telah melakukan penurunan suku bunga BI-Rate secara bertahap sebanyak empat kali dari 6% sampai dengan 4,75%, melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan ekspansi likuiditas moneter. Langkah ini

Throughout 2025, Bank Indonesia, as the monetary authority, has gradually cut the BI Rate four times, from 6% to 4.75%, while stabilizing the rupiah exchange rate and expanding monetary liquidity. These measures were taken to optimize monetary policy—namely,

ditempuh untuk mengoptimalkan kebijakan moneter, yakni menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan devisa.

Pada tahun 2025 perekonomian Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,14% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11% dan juga lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 4,95%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja dan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Pemerintah serta rumah tangga mendorong kinerja ekonomi NTT pada akhir tahun 2025. Peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi investasi swasta pada sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) serta percepatan realisasi belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk proyek konstruksi.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 secara aktif melakukan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi guna memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency* serta *Fairness* (TARIF). Melalui implementasi kebijakan GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi Bank NTT kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem bisnis perbankan yang berdampak positif pada peningkatan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank.

Penerapan konsep TARIF diatas telah diimplementasikan manajemen diantaranya dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), adanya pembagian tugas dan kewenangan Direksi dan Komisaris yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, adanya Divisi Kepatuhan dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan, adanya Fungsi Audit dalam melaksanakan audit internal maupun eksternal, adanya Fungsi Pengendalian Internal yang dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI dan Divisi Manajemen Risiko, tersedianya *website* Bank NTT untuk memberikan informasi secara terbuka dan *up to date* terkait manajemen, aktivitas, produk dan kinerja keuangan bank, serta adanya Rencana Bisnis

maintaining price stability, exchange rate stability, and sufficient foreign exchange reserves.

In 2025, the economy of East Nusa Tenggara grew by 5.14%, higher than the national economic growth rate of 5.11% recorded in 2025 and also higher than the 4.95% growth in 2024. On the expenditure side, improved performance and contributions from Gross Fixed Capital Formation (GFCF) and Government Consumption will drive East Nusa Tenggara's economic performance by the end of 2025. This improvement aligns with increased private investment in the Hotel, Restaurant, and Café (HORECA) sector, as well as accelerated spending by the Central and Regional Governments on construction projects.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively performed its oversight functions and provided input on every policy adopted by the Board of Directors to ensure that such policies align with the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF). Through the implementation of sound GCG policies, it is hoped that Bank NTT's trust and reputation among all stakeholders within the banking business ecosystem will be enhanced, positively impacting the bank's financial health and performance.

The management has implemented the above TARIF concept, including by holding General Shareholders' Meetings (GSM) and Extraordinary General Shareholders' Meetings (EGSM), the division of duties and authorities between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as established by the Decision of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 02 of 2020 regarding the Rules of Procedure of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; the existence of a Compliance Division to carry out compliance functions; the existence of an Audit Function to conduct both internal and external audits; the existence of an Internal Control Function carried out by the Supervision & SKAI Division and the Risk Management Division, the availability of the Bank NTT website to provide open and up-to-date information regarding the bank's management, activities, products,

Bank untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang sejalan dengan visi, misi, dan budaya kerja Bank NTT serta mekanisme Remunerasi dan Nominasi yang memadai.

Ke depan komunikasi dan koordinasi yang terarah dengan Direksi akan terus dilakukan untuk memastikan implementasi GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dapat terlaksana secara lebih efektif.

KERJASAMA KELOMPOK USAHA BANK (KUB) DENGAN BANK JATIM

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum maka Bank NTT telah melakukan kerjasama dengan Bank Jatim melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk dapat memenuhi Modal Inti Minimum sebesar Rp 3 Triliun paling lambat 31 Desember 2024.

Pada tanggal 30 September 2025 Bank Jatim telah melakukan penempatan modal sebesar Rp 100 Miliar kepada Bank NTT setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur melalui surat OJK Provinsi Jawa Timur Nomor: S-141/KO.14/2025, tanggal 28 Juli 2025. Hal: Persetujuan Penyertaan Modal PT. BPD Nusa Tenggara Timur. Oleh Bank NTT penempatan modal dari Bank Jatim tersebut sebesar Rp 28.57 miliar dibukukan pada pos Agio sedangkan Rp 71.43 miliar dibukukan pada pos modal disetor.

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kinerja Direksi bersama seluruh jajaran sehingga proses KUB dengan Bank Jatim dapat berjalan baik dan akan terus mendukung tindak lanjut dari KUB tersebut. Dengan struktur permodalan yang lebih baik diharapkan Bank NTT semakin kompetitif dalam persaingan bisnis perbankan dan memiliki ketahanan yang baik dalam menyerap kerugian yang terjadi.

PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam melaksanakan Pengendalian Internal Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang dibentuk. Pada tahun 2025 Bank NTT memiliki 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pengelola Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi.

and financial performance, as well as the existence of the Bank's Business Plan for both the short and long term, which aligns with the vision, mission, and work culture of Bank NTT, and adequate Remuneration and Nomination mechanisms.

Moving forward, the Board of Commissioners will continue to engage in targeted communication and coordination with the Board of Directors to ensure the implementation of GCG, as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Application of Corporate Governance for Commercial Banks, is carried out more effectively.

COOPERATION BETWEEN THE BANK BUSINESS GROUP (KUB) AND BANK JATIM

In accordance with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 12/POJK.03/2020 on the Consolidation of Commercial Banks, Bank NTT has entered into a collaboration with Bank Jatim through the Bank Business Group (KUB) scheme to meet the Minimum Core Capital requirement of Rp 3 trillion by no later than December 31, 2024.

On September 30, 2025, Bank Jatim injected capital of Rp 100 billion into Bank NTT after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) of East Java Province via OJK East Java Province Letter No. S-141/KO.14/2025, dated July 28, 2025. Subject: Approval of Capital Contribution to PT. BPD Nusa Tenggara Timur. Bank NTT recorded the capital injection from Bank Jatim in the amount of Rp 28.57 billion under the Agio account, while Rp 71.43 billion was recorded under the paid-in capital account.

The Board of Commissioners highly appreciates the performance of the Board of Directors and the entire management team, which has ensured that the KUB process with Bank Jatim has proceeded smoothly, and will continue to support the follow-up to this KUB. With an improved capital structure, it is expected that Bank NTT will become increasingly competitive in the banking industry and possess strong resilience in absorbing any losses that may occur.

INTERNAL CONTROL

In implementing Internal Control, the Board of Commissioners is assisted by established committees. As of 2025, Bank NTT has 3 (three) Committees: the Audit Committee, the Risk Management Committee, and the Remuneration & Nomination Committee.

Ketiga Komite tersebut secara berkesinambungan terus melakukan pengawasan, koordinasi dan evaluasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan terhadap kinerja Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi Pengawasan & SKAI, Kantor Akuntan Publik serta regulator eksternal lainnya terkait kondisi perkembangan bank untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dan pembenahan secara terarah kepada Direksi terhadap kinerja bank.

Pengendalian internal dilakukan guna memastikan pengelolaan bank telah dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan bank, Komunikasi secara intens juga terus dilakukan Dewan Komisaris dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan fungsi pengawasan.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan atau *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa Laporan Keuangan telah disusun secara andal dan bebas dari salah saji material sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai kepada pengguna Laporan Keuangan.

Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan di Bank NTT mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang selain bertujuan untuk memperkuat ketepatan, keandalan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan bank, sekaligus memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan didukung oleh pengendalian internal yang efektif.

Sebagai panduan dalam penerapan ICoFR, Bank NTT telah menetapkan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan / *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Tahun 2024, Bank NTT telah menunjuk Unit Kerja Khusus ICoFR di bawah Divisi Kepatuhan - Sub

These three committees continuously conduct oversight, coordination, and evaluation in accordance with their duties, functions, and authorities regarding the performance of the Risk Management Division, the Compliance Division, the Supervision & SKAI Division, the Public Accounting Firm, and other relevant external regulators regarding the bank's development conditions. These findings are then submitted to the Board of Commissioners as recommendations for policy decisions and targeted improvements directed at the Board of Directors regarding the bank's performance.

Internal controls are implemented to ensure the bank is managed appropriately in accordance with applicable regulations, thereby preventing deviations that could potentially harm the bank. The Board of Commissioners also maintains close communication with the Internal Audit Unit (SKAI), which assists the Board of Commissioners and the Board of Directors in performing their oversight functions.

Internal Control over Financial Reporting

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) is a process designed to provide reasonable assurance that financial statements have been prepared reliably and are free from material misstatements, thereby providing greater assurance to users of financial statements.

The implementation of Internal Control over Financial Reporting at Bank NTT refers to Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting, which aims not only to strengthen the accuracy, reliability, and transparency of financial information and bank financial statements, but also to ensure that the financial statement preparation process is supported by effective internal controls.

As a guide for the implementation of ICoFR, Bank NTT has established policies and procedures for Internal Control over Financial Reporting through Board of Directors' Decision No. 172 of 2025 regarding Guidelines for Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Furthermore, in accordance with the provisions of POJK No. 15 of 2024, Bank NTT has designated a Special ICoFR Unit under the Compliance Division—Compliance Systems, Procedures & Reporting Subdivision—which

Divisi Sistem Prosedur & Pelaporan Kepatuhan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penerapan ICoFR di Bank NTT.

AKTIVITAS KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025 Komite Audit telah melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap penunjukan dan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, melaksanakan pemantauan terhadap progres tindak lanjut temuan regulator, serta melakukan komunikasi intensif dengan Divisi Pengawasan & Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terkait program kerja dan perkembangan bank. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit Bank NTT ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 004 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Audit.

Sementara itu Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025 secara rutin telah melaksanakan pemantauan terhadap kebijakan Direksi dan penilaian terhadap faktor risiko yang harus dihadapi oleh bank maupun mitigasi risiko atas kebijakan yang diambil melalui koordinasi yang baik dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan khususnya terhadap kinerja keuangan dan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional maupun non operasional bank. Adapun Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank NTT ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 005 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Pemantau Risiko.

Sedangkan Komite Remunerasi & Nominasi pada tahun 2025 telah melaksanakan pengawasan terhadap besaran remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai serta menetapkan prosedur/ mekanisme dan rekomendasi pemilihan calon Dewan Komisaris dan Direksi. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi Bank NTT ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Komite Remunerasi & Nominasi.

is responsible for coordinating the implementation of ICoFR at Bank NTT.

COMMITTEE ACTIVITIES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the Audit Committee has conducted oversight and provided input to the Board of Commissioners regarding the appointment and conduct of audits by the Public Accounting Firm, monitored the progress of follow-up actions on regulatory findings, and maintained intensive communication with the Supervision Division and the Internal Audit Unit (SKAI) regarding the bank's work programs and developments. The duties, authorities, and responsibilities of the Bank NTT Audit Committee are established through the Board of Commissioners' Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 004 of 2023 regarding the Rules of Procedure of the Audit Committee.

Meanwhile, throughout 2025, the Risk Monitoring Committee has routinely monitored the Board of Directors' policies and assessed the risk factors faced by the bank, as well as evaluated the risk mitigation measures associated with the policies adopted. This has been achieved through close coordination and evaluation of risk management implementation with the Risk Management Division and the Compliance Division, particularly regarding financial performance and the risks inherent in the bank's operational and non-operational activities. The duties, authorities, and responsibilities of the NTT Bank Risk Monitoring Committee are established through the Board of Commissioners' Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 005 of 2023 regarding the Rules of Procedure of the Risk Monitoring Committee.

Meanwhile, in 2025, the Remuneration & Nomination Committee oversaw the remuneration levels of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees, and established procedures, mechanisms, and recommendations for the selection of candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The duties, authorities, and responsibilities of Bank NTT's Remuneration & Nomination Committee are stipulated in the Board of Commissioners' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 5 of 2020 regarding the Rules of Procedure for the Remuneration & Nomination Committee.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun buku 2025 Bank NTT telah mengalami perubahan komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H., M.H dimana RUPS LB menyetujui pengangkatan Stefanus Donny H. Heatubun sebagai Komisaris Utama sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 427/KEP/HK/2025, tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara Stefanus Donny H. Heatubun sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030.

Dengan adanya penetapan Komisaris Utamamaka Bank NTT pada tahun 2025 telah memiliki 2 (dua) orang Komisaris untuk mendukung upaya perbaikan tata kelola perusahaan.

Untuk 1 (satu) orang Komisaris Independen yaitu Frans Gana masih diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 16 tanggal 16 November 2024, yang juga dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 387 C/KEP/HK/2024, tanggal 16 November 2024.

Sementara untuk pemenuhan posisi 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya masih menunggu proses penilaian kemampuan dan kepatuhan oleh OJK Pusat untuk ditetapkan dalam RUPS LB selanjutnya.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK NTT TAHUN 2025

Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian Direksi di tahun 2025. Mencermati sejumlah indikator keuangan Bank NTT pada tahun 2025 terdapat banyak pencapaian positif namun juga terdapat sejumlah hal yang perlu untuk diperbaiki di tahun buku 2026.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the 2025 fiscal year, Bank NTT underwent a change in the composition of its Board of Commissioners in accordance with the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, presided over by Serlina Sari Darmawan, S.H., M.H., wherein the EGM approved the appointment of Stefanus Donny H. Heatubun as President Commissioner, as set forth in the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 427/KEP/HK/2025, dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Stefanus Donny H. Heatubun as President Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term from November 12, 2025, to November 11, 2030.

With the appointment of the Chairman of the Board of Commissioners, Bank NTT now has 2 (two) Commissioners to support efforts to improve corporate governance.

The term of office of one (1) Independent Commissioner, namely Frans Gana, has been extended in accordance with the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 16 dated November 16, 2024, which was also formalized through the Decision Letter of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 387 C/KEP/HK/2024, dated November 16, 2024.

Meanwhile, the appointment of one (1) additional Independent Commissioner is still pending the assessment of competence and compliance by the OJK Headquarters and will be finalized at the next Extraordinary General Meeting of Shareholders.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON BANK NTT'S FINANCIAL PERFORMANCE FOR 2025

The Board of Commissioners appreciates the achievements of the Board of Directors in 2025. Upon reviewing Bank NTT's financial indicators for 2025, there were many positive achievements; however, there are also several areas that need improvement in the 2026 fiscal year.

Pada tahun 2025 Bank NTT berhasil mencatatkan Aset sebesar Rp 20.09 triliun bertumbuh signifikan Rp 3.66 triliun atau naik 22.26% dibandingkan dengan pencapaian Aset pada tahun 2024 sebesar Rp 16.43 triliun. Peningkatan Aset tersebut terutama nampak pada peningkatan penyaluran Kredit dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

In 2025, Bank NTT recorded total assets of Rp 20.09 trillion, a significant increase of Rp 3.66 trillion, or 22.26%, compared to the 2024 total assets of Rp 16.43 trillion. This increase in assets was primarily driven by higher loan disbursements and deposits with Bank Indonesia and other banks.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank NTT mencatat pencapaian yang baik dimana pada tahun 2025 realisasi DPK adalah sebesar Rp 15.93 triliun, naik Rp 3.94 triliun atau 73.12% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 11.99 triliun. Kenaikan ini perlu mendapat catatan mengingat kenaikan DPK pada tahun 2025 masih didominasi oleh peningkatan pertumbuhan Deposito sebesar 71.48% atau Rp 9.26 triliun pada tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 5.41 Triliun. Oleh karena itu manajemen perlu meningkatkan portofolio Giro dan Tabungan sebagai dana murah.

In terms of third-party funds (DPK) mobilization, Bank NTT recorded strong performance, with DPK reaching Rp 15.93 trillion in 2025—an increase of Rp 3.94 trillion, or 73.12%, compared to the 2024 figure of Rp 11.99 trillion. This increase warrants note, as the rise in TDF in 2025 was still dominated by a 71.48% growth in deposits—amounting to Rp 9.26 trillion in 2025—compared to the 2024 realization of Rp 5.41 trillion. Therefore, management needs to expand the checking and savings account portfolio as a source of low-cost funding.

Dari sisi Kredit, realisasi pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana Kredit yang disalurkan tumbuh 9.24 % dari Rp12.77 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 13.95 triliun di tahun 2025, naik sebesar Rp 1.18 triliun.

In terms of loans, the figures for 2025 show positive growth, with disbursed loans increasing by 9.24% from Rp12.77 trillion in 2024 to Rp13.95 trillion in 2025, an increase of Rp1.18 trillion.

Pada tahun 2025 Laba Bersih yang diperoleh Bank NTT mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Rp 176.84 miliar ditahun 2024 menjadi Rp 92.62 miliar ditahun 2025 atau turun 47.63%. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan pencadangan atas meningkatnya kewajiban bank untuk membayar pajak penghasilan. Dewan Komisaris memandang pencadangan merupakan langkah logis dari risiko bisnis untuk mengantisipasi kerugian yang tidak bisa dikendalikan khususnya dalam iklim bisnis yang tidak mendukung pertumbuhan bisnis debitur.

In 2025, Bank NTT's net profit experienced a significant decline from Rp 176.84 billion in 2024 to Rp 92.62 billion in 2025, a decrease of 47.63%. This decline in profit was caused by the establishment of an Allowance for Impairment Losses (AIL) and provisions for the bank's increased liability to pay income tax. The Board of Commissioners views these provisions as a logical business risk management step to anticipate uncontrollable losses, particularly in a business climate that does not support the growth of borrowers' businesses.

Dari sisi permodalan, pada tahun 2025 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank NTT adalah sebesar 26.81% berada jauh diambang batas yang ditentukan oleh OJK yakni sebesar 8%. Kerjasama dengan Bank Jatim dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dipandang cukup baik untuk meningkatkan modal inti minimum Bank NTT sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK yakni sebesar Rp 3 triliun sehingga Bank

In terms of capital, in 2025 Bank NTT's Minimum Capital Adequacy Ratio (MCAR) stood at 26.81%, well above the 8% threshold set by the OJK. The collaboration with Bank Jatim under the Bank Business Group (KUB) scheme is considered effective in boosting Bank NTT's minimum core capital to meet the OJK's requirement of Rp 3 trillion, thereby ensuring Bank NTT possesses strong resilience to absorb potential losses. The Board of Commissioners

NTT memiliki ketahanan yang kuat dalam menyerap kerugian yang terjadi. Dewan Komisaris mendukung komunikasi manajemen dengan para pemegang saham agar terus memperkuat ketahanan modal demi keberlanjutan dan kompleksitas bisnis Bank NTT di masa yang akan datang.

supports management's communication with shareholders to continue strengthening capital resilience for the sustainability and complexity of Bank NTT's business in the future.

Kinerja Bank NTT di tahun 2025 juga dapat dilihat dari indikator *Non Performing Loan* (NPL) gross dimana pada tahun 2025 NPL gross Bank NTT adalah sebesar 3.32% sedikit mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 3.44%. Dewan Komisaris memandang besaran persentase NPL gross pada tahun 2025 masih dibawah 5% sebagaimana ambang batas yang diatur dalam ketentuan OJK. Dewan Komisaris terus mendukung Direksi agar penyaluran kredit tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas kredit.

Bank NTT's performance in 2025 can also be assessed through the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio, which stood at 3.32% in 2025—a slight decrease from the 3.44% recorded in 2024. The Board of Commissioners views the gross NPL percentage as a key , noting that the 2025 figure remains below the 5% threshold set by OJK regulations. The Board of Commissioners continues to support the Board of Directors in ensuring that credit disbursement adheres to the principle of prudence and maintains credit quality.

Rasio keuangan lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi Bank NTT pada tahun 2025 dimana rasio BOPO Bank NTT pada tahun 2025 adalah sebesar 89.92% sedikit naik dari tahun 2024 sebesar 87.28%. Rasio BOPO menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Bank NTT masih cukup efisien dalam hal biaya operasional. Kedepannya Dewan Komisaris mendukung manajemen dalam mengambil langkah-langkah efisiensi dengan tetap berpatokan kepada anggaran dan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi pelampauan anggaran.

Another financial ratio that warrants attention is the Operating Expense to Operating Income Ratio (BOPO), which is used to measure Bank NTT's efficiency level in 2025. Bank NTT's BOPO ratio in 2025 stands at 89.92%, a slight increase from 87.28% in 2024. The OIR indicates that in 2025, Bank NTT remains reasonably efficient in terms of operating costs. Moving forward, the Board of Commissioners supports management in implementing efficiency measures while adhering to the bank's established budget and business plan to prevent budget overruns.

Dari sisi Likuiditas, pada tahun 2025 rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank NTT masih berada dalam posisi mencukupi dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah yakni 87.54% apabila dibandingkan dengan posisi LDR pada tahun 2024 yang sangat ketat yaitu 106,50%.

In terms of liquidity, in 2025 Bank NTT's Loan-to-Deposit Ratio (LDR) remains sufficient to meet its obligations to customers at 87.54%, compared to the very tight LDR of 106.50% in 2024.

Sedangkan dari sisi Rasio *Current Account & Saving Account* (CASA) Bank NTT pada tahun 2025 mengalami penurunan CASA sebesar 13.11% dari realisasi pada tahun 2025 sebesar 41.75% dibandingkan dengan pencapaian CASA di tahun 2024 sebesar 54.86%. Dewan Komisaris berharap manajemen agar terus meningkatkan rasio CASA Bank NTT sehingga dapat mengurangi peningkatan biaya beban bunga.

Meanwhile, regarding Bank NTT's Current Account and Savings Account (CASA) ratio in 2025, the CASA ratio decreased by 13.11% from the 2025 realization of 41.75% compared to the 2024 CASA achievement of 54.86%. The Board of Commissioners hopes that management will continue to improve Bank NTT's CASA ratio so as to reduce the increase in interest expense.

DIGITALISASI & PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA DI TAHUN 2025

Perkembangan teknologi telah mengubah model bisnis perbankan dari pola manual dan konvensional menuju pola digital. Agar tidak tergerus zaman maka Bank NTT terus melaksanakan digitalisasi, memberikan akses layanan dan jasa bank yang mudah, murah, aman dan cepat. Implementasi digitalisasi membutuhkan keseimbangan antara infrastruktur teknologi, tata kelola, mitigasi risiko serta penguatan kapasitas pegawai berbasis teknologi sebagai variabel utama dalam mendukung operasional digitalisasi dapat berjalan dengan baik.

Digitalisasi yang dilaksanakan oleh Bank NTT sepanjang tahun 2025 perlu dilandasi dengan tingkat keamanan yang memadai pada sisi aplikasi maupun infrastruktur pendukung. Hal tersebut menjadi sangat fundamental mengingat digitalisasi yang dijalankan tidak berkolerasi positif dengan tingkat literasi digital nasabah sehingga menjadi sangat rentan bagi nasabah Bank NTT terpapar risiko *cyber crime* yang dewasa ini hadir dengan beragam modus.

Melihat potensi pasar digitalisasi di Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang cukup banyak dan melek teknologi maka kelompok ini dapat menjadi segmen bisnis baru yang dapat digarap untuk meningkatkan *fee based income* bank melalui inovasi terhadap fitur-fitur digital Bank NTT yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut.

Selain itu Dewan Komisaris juga meminta kepada Direksi untuk dapat memastikan bahwa kerjasama dengan menggunakan jasa pihak ketiga terkait digitalisasi tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya kebocoran data dan informasi rahasia penting Bank NTT.

Selama triwulan IV 2025 secara umum stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat dari penyaluran kredit Bank Umum dan Bank Syariah yang tumbuh menguat dibandingkan triwulan IV 2024. DPK juga tercatat tumbuh menguat sebesar 15.19% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan IV 2024, yang ditopang oleh perbaikan kinerja deposito, giro, dan tabungan. Fungsi intermediasi perbankan di Provinsi NTT yang membaik, dengan LDR mencapai 121.55%. Selain itu, tingkat risiko masih terjaga, dengan rasio NPL (gross) sebesar 3.39% yang berada di bawah level 5%.

DIGITALIZATION & OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS IN 2025

Technological advancements have transformed the banking business model from manual and conventional methods to digital ones. To stay relevant, Bank NTT continues to implement digitalization, providing easy, affordable, secure, and fast access to banking services. The implementation of digitalization requires a balance between technological infrastructure, governance, risk mitigation, and strengthening employees' technology-based capabilities as key factors in ensuring that digital operations run smoothly.

The digitalization initiatives implemented by Bank NTT throughout 2025 must be underpinned by adequate security measures on both the application and supporting infrastructure sides. This is of fundamental importance, given that the digitalization efforts do not correlate positively with customers' digital literacy, leaving Bank NTT customers highly vulnerable to cybercrime, which today manifests in various forms.

Given the potential of the digitalization market in East Nusa Tenggara, which is dominated by a significant number of tech-savvy Millennials and Generation Z, this demographic could serve as a new business segment to be targeted for increasing the bank's fee-based income through innovations in Bank NTT's digital features that meet the needs of this community.

Additionally, the Board of Commissioners has requested that the Board of Directors ensure that collaborations involving third-party services related to digitalization strictly adhere to principles of prudence to prevent data breaches and the leakage of Bank NTT's confidential information.

During the fourth quarter of 2025, financial system stability in NTT Province generally showed an upward trend. This improvement is evident in the credit disbursement of Commercial Banks and Sharia Banks, which grew more strongly compared to the fourth quarter of 2024. Total Deposits (DPK) also recorded a robust growth of 15.19% (year-on-year) compared to the fourth quarter of 2024, supported by improved performance in deposits, demand deposits, and savings. Banking intermediation functions in NTT Province have improved, with the Loan-to-Deposit Ratio (LDR) reaching 121.55%. Additionally, risk levels remain under control, with the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio at 3.39%, below the 5% threshold.

Sementara itu Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV tahun 2025 tercatat sebesar 2.39% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2.30% (yoy). Tingkat inflasi ini berada dalam target sasaran inflasi nasional 2.5±1%, serta berada di bawah capaian inflasi nasional yang sebesar 2.92% (yoy). Dengan kondisi tersebut Dewan Komisaris meyakini bahwa fungsi intermediasi, daya beli masyarakat dan iklim usaha di provinsi NTT masih tetap terjaga di tahun 2026.

Meanwhile, inflation in NTT Province in the fourth quarter of 2025 stood at 2.39% (year-on-year), an increase compared to the previous quarter's inflation rate of 2.30% (year-on-year). This inflation rate falls within the national inflation target of 2.5±1% and remains below the national inflation rate of 2.92% (yoy) as reported by the Central Bank of Indonesia ( ). Given these conditions, the Board of Commissioners is confident that the banking sector's intermediation function, public purchasing power, and the business climate in NTT Province will remain stable in 2026.

APRESIASI

Akhir kata Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham Bank NTT/pemerintah daerah dan secara khusus kepada Bank Jatim yang terus mengawal berjalannya kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dan berbagai masukan yang telah disampaikan sebagai bank induk. KUB ini menjadi momentum *transfer of knowledge* bagi Bank NTT untuk terus melakukan pembenahan di berbagai lini bisnis dan operasional.

Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada Direksi dan seluruh pegawai Bank NTT atas berbagai upaya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Semoga dengan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat terus bekerjasama dan bergandengan tangan untuk meraih pencapaian yang lebih baik lagi di tahun 2026.

APPRECIATION

In closing, the Board of Commissioners would like to express its highest appreciation to all Bank NTT shareholders—including local governments—and especially to Bank Jatim, which has consistently overseen the implementation of the Bank Business Group (KUB) collaboration and provided valuable input as the parent bank. This KUB initiative serves as a catalyst for knowledge transfer, enabling Bank NTT to continue improving across various business and operational areas.

High appreciation is also extended to the Board of Directors and all employees of Bank NTT for the various efforts carried out throughout 2025. May we, with the grace and blessings of the Almighty God, continue to work together and join hands to achieve even greater success in 2026.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DEWAN KOMISARIS

S. Donny H. Heatubun, S.E., M.B.M

Komisaris Utama
President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile

S. Donny H. Heatubun, S.E., M.B.M
Komisaris Utama
President Commsissioner

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Jakarta, 11 Desember 1967
December 11, 1967

Usia / Age
58 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan gelar *Magister of Business Management* (MBM) dari Asia Institute of Management Manila – Filipina.

Riwayat Jabatan

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terhitung sejak 12 November 2025 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H. M.H. yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 427/KEP/HK/2025, tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara Stefanus Donny H. Heatubun sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030.

Educational Background:

Earned a Bachelor of Economics (B.E.) from Parahyangan Catholic University in Bandung and a Master of Business Management (M.B.M.) from the Asia Institute of Management in Manila, Philippines.

Professional History

Has served as President Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since November 12, 2025, to the present.

Legal Basis for Appointment

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, prepared by Serlina Sari Darmawan. S.H. M.H., as set forth in the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 427/KEP/HK/2025. dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Stefanus Donny H. Heatubun as President Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term from November 12, 2025, to November 11, 2030.

Rangkap Jabatan

Sepanjang tahun 2025 tidak merangkap jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Pernah meniti karir sebagai staf Urusan Luar Negeri pada Bank Daiwa Perdania, Kepala Divisi Rental Marketing Indomobil, Asisten Manajer – Analis Senior Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Analis Senior Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senior Advisor PT Bimasena Artha Internasional.

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah Diikuti Dalam Tahun Buku 2025

1. Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan oleh PT. Ultima Bersama Olingga.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Utama.

Concurrent Positions

Throughout 2025, he did not hold concurrent positions at PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

Work Experience

Previously held positions as a Foreign Affairs staff member at Bank Daiwa Perdania, Head of the Rental Marketing Division at Indomobil, Assistant Manager – Senior Analyst in the Monetary Management Department at Bank Indonesia, Senior Analyst in the Financial Market Development Department at Bank Indonesia, Head of the Bank Indonesia Representative Office in West Papua Province, Senior Economist at the Bank Indonesia Representative Office in Bali Province, Head of the Bank Indonesia Representative Office in East Nusa Tenggara Province, and Senior Advisor at PT Bimasena Artha Internasional.

Education and/or Training Completed in Fiscal Year 2025

1. APUPPT and PPPSPM Executive Training and Risk Management for Directors and Commissioners organized by PT. Ultima Bersama Olingga.
2. Level 6 Risk Management Certification organized by the Professional Certification Institute.

Affiliative Relationships with Other Members of the Board of Commissioners and Major Shareholders.

Has no affiliate relationships with other members of the Board of Commissioners and major shareholders.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile

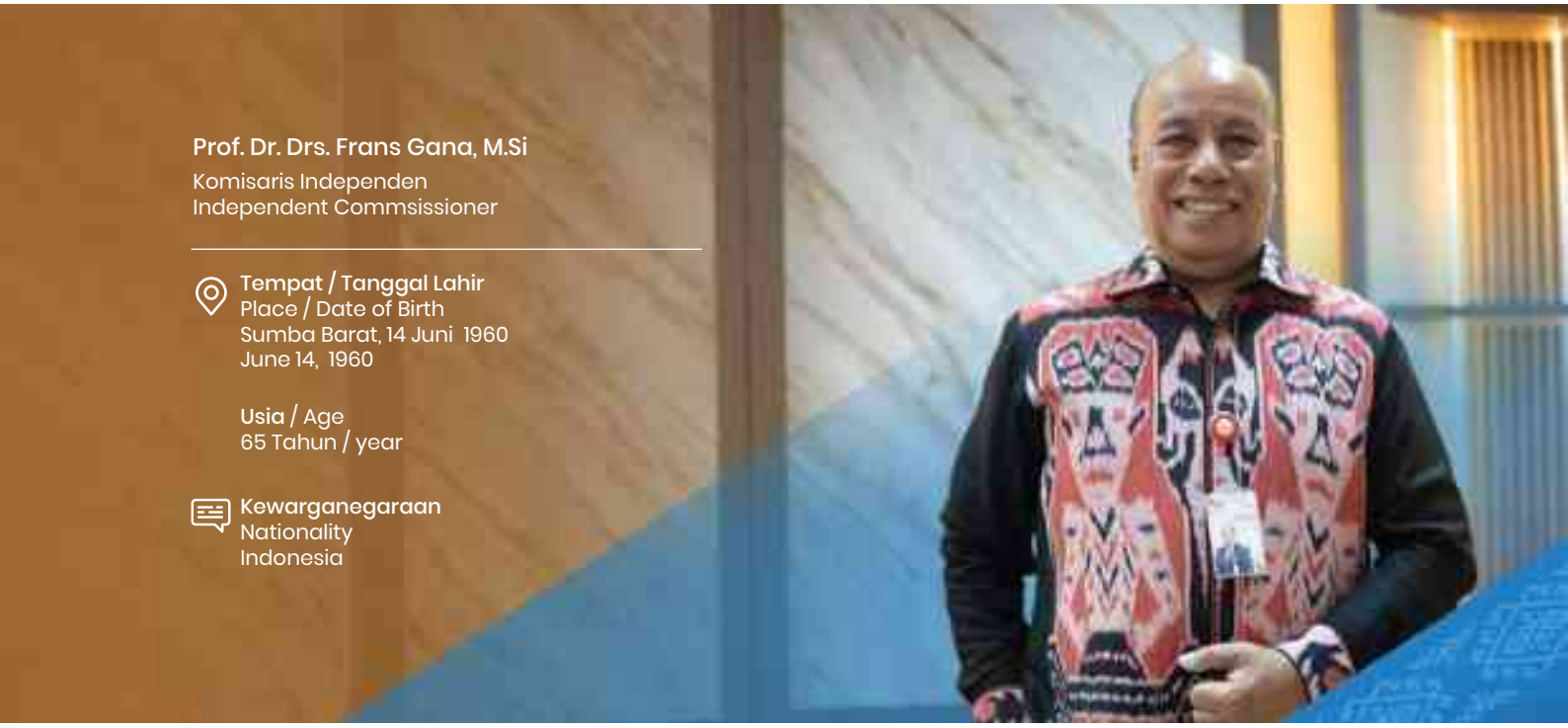

Prof. Dr. Drs. Frans Gana, M.Si
Komisaris Independen
Independent Commsissioner

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Sumba Barat, 14 Juni 1960
June 14, 1960

Usia / Age
65 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Universitas Nusa Cendana Kupang, gelar Magister Science (M.Si) dari Universitas Indonesia dan gelar Doktor (Dr.) dari Universitas Indonesia serta gelar Profesor dari Universitas Nusa Cendana Kupang dalam bidang Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis.

Riwayat Jabatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak Juni 2019 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 16 tanggal 16 November 2024, yang juga dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 387 C/KEP/HK/2024, tanggal 16 November 2024. Frans Gana sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk masa bakti 16 November 2024 sampai dengan 10 Juni 2029.

Educational Background

Earned a Bachelor of Social Sciences (S.Sos) from Nusa Cendana University in Kupang, a Master of Science (M.Si) from the University of Indonesia, a Doctorate (Dr.) from the University of Indonesia, and the title of Professor from Nusa Cendana University in Kupang in the field of Strategic Management and Business Policy.

Professional History

Has served as an Independent Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since June 2019 to present.

Legal Basis for the Appointment

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 16 dated November 16, 2024, which was also formalized through the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 387 C/KEP/HK/2024, dated November 16, 2024. Frans Gana as an Independent Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term of office from November 16, 2024, to June 10, 2029.

Rangkap Jabatan

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Meniti karier sebagai Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1987 hingga sekarang, menjabat sebagai Asisten Direktur II Bidang Adminsitrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan perlengkapan program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana; Asisten Direktur I Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana serta Dekan FISIP Universitas Nusa Cendana.

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah Diikuti Dalam Tahun Buku 2025

1. Peranan Strategis Dewan Komisaris & Direksi Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* yang diselenggarakan oleh Equivalent.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite Dalam Proses Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang diselenggarakan oleh Sindopi.
3. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Utama.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen Dalam Hal Komisaris Independen

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di bank NTT.
- Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Bank NTT.
- Tidak bekerja di Bank NTT atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
- Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Bank NTT dan afiliasinya.
- Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Bank NTT.
- Menjabat sebagai Komisaris Independen tidak lebih dari 2 (dua) periode.

Concurrent Positions

Serves as Chair of the Audit Committee and Chair of the Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Work Experience

Has pursued a career as a Lecturer at Nusa Cendana University in Kupang since 1987 to the present, serving as Assistant Director II for General Administration, Human Resources, Finance, and Equipment of the Graduate Program at Nusa Cendana University, Assistant Director I for Academic Affairs of the Graduate Program at Nusa Cendana University, and Dean of the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) at Nusa Cendana University.

Education and/or Training Completed in Fiscal Year 2025

1. The Strategic Role of the Board of Commissioners & Directors in the Implementation of Good Corporate Governance organized by Equivalent.
2. Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committee Members in the Process of Financial Reporting Integrity at Banks, organized by Sindopi.
3. Level 6 Risk Management Certification Refresher.

Affiliated Relationships with Other Members of the Board of Commissioners and Major Shareholders.

No Affiliated Relationships with Other Members of the Board of Commissioners and Major Shareholders.

Statement of Independence of Independent Commissioners Regarding Independent Commissioners

- Has no affiliation with Directors and/or other members of the Board of Commissioners at Bank NTT.
- Does not serve as a Director in a company affiliated with Bank NTT.
- Has not worked at Bank NTT or its affiliates within the past three years.
- Has no financial ties, either directly or indirectly, with Bank NTT or other companies that provide services and products to Bank NTT and its affiliates.
- Free from business interests, activities, or other relationships that could hinder or interfere with the Board of Commissioners' ability to act or think independently within the scope of Bank NTT.
- Served as an Independent Commissioner for no more than 2 (two) terms.

Pada tahun 2025 Bank NTT berhasil mencatatkan Kredit sebesar Rp 13.95triliun bertumbuh signifikan Rp 1.18 triliun atau naik 9.24% dibandingkan dengan pencapaian Aset pada tahun 2024 sebesar Rp 12.77 triliun.

Bank NTT achieved total of Loan during 2025 Rp 13.95 trilion grew significantly Rp 1.18 trilion or increased 9.24% comparing to 2024 Rp 12.77 trillion.

Ir. Charlie Paulus, M.S.M

Direktur Utama

President Director

LAPORAN DIREKSI
Board of Directors' Report

Pemegang Saham dan Seluruh Pemangku Kepentingan yang terhormat.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan Laporan Direksi Bank NTT atas kinerja dan pelaksanaan strategi perusahaan untuk tahun buku 2025.

Laporan Direksi ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan strategi, kinerja usaha, serta berbagai inisiatif yang telah dilakukan Bank NTT sepanjang tahun 2025. Direksi berharap bahwa laporan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai arah dan komitmen Bank NTT dalam membangun pertumbuhan bisnis Bank NTT dan pertumbuhan ekonomi di provinsi NTT yang sehat dan berkelanjutan.

STRATEGI DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Bank NTT tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, tercermin dari kinerja operasional yang terjaga serta pertumbuhan yang tetap terjadi pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT tetap kuat, serta mencerminkan efektivitas strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar.

Bank NTT memandang bahwa keberlanjutan pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh capaian laba jangka pendek, tetapi oleh kualitas dan stabilitas struktur keuangan, kekuatan manajemen risiko, serta tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan fondasi menjadi prioritas utama dalam periode ini.

Selain penguatan aspek keuangan, Bank NTT juga terus melakukan transformasi operasional melalui peningkatan efisiensi, optimalisasi proses bisnis, serta pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah sekaligus memperkuat daya saing di tengah percepatan digitalisasi industri perbankan.

Dear Shareholders and All Stakeholders.

With deep gratitude to God Almighty, we present the Bank NTT Board of Directors' Report on the company's performance and strategy implementation for the 2025 fiscal year.

This Management Report provides a comprehensive overview of the implementation of strategies, business performance, and various initiatives undertaken by Bank NTT throughout 2025. The Board of Directors hopes that this report will provide all stakeholders with a comprehensive understanding of Bank NTT's direction and commitment to fostering healthy and sustainable business growth for Bank NTT and economic growth in the province of NTT.

BOARD STRATEGY

Throughout 2025, Bank NTT continued to perform its intermediary functions optimally, as evidenced by its sustained operational performance and continued growth in loan disbursements and third-party funds mobilization. This indicates that public confidence in Bank NTT remains strong and reflects the effectiveness of its business strategies, which are adaptable to changing market conditions.

Bank NTT believes that sustainable growth is determined not only by short-term profit targets, but also by the quality and stability of its financial structure, the strength of its risk management, and the level of stakeholder trust. Therefore, strengthening the bank's foundation is a top priority during this period.

In addition to strengthening financial aspects, Bank NTT continues to pursue operational transformation through improved efficiency, business process optimization, and the development of digital infrastructure. This transformation is a key factor in enhancing service quality for customers while strengthening competitiveness amid the accelerating digitalization of the banking industry.

Dari sisi tata kelola, Bank NTT senantiasa mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh aktivitas bisnis. Penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko yang terintegrasi menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

PERAN DIREKSI DALAM MERUMUSKAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sepanjang tahun 2025, Direksi secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis, profil risiko, serta efektivitas strategi yang telah dijalankan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyesuaian kebijakan, termasuk dalam hal penguatan manajemen risiko, penyesuaian strategi kredit, serta peningkatan pencadangan.

Dalam proses perumusan strategi, Direksi juga memastikan adanya keselarasan antara rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta keterkaitan yang kuat dengan visi Bank NTT sebagai lembaga keuangan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan serta sebagai *agent of regional development*.

KINERJA PERUSAHAAN

Pada tahun 2025 Bank NTT berhasil mencatatkan Aset sebesar Rp 20.09 triliun bertumbuh signifikan Rp 3.66 triliun atau naik 22.26% dibandingkan dengan pencapaian Aset pada tahun 2024 sebesar Rp 16.43 triliun. Peningkatan Aset tersebut terutama nampak pada peningkatan penyaluran Kredit dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Secara umum, Bank NTT mencatatkan kinerja yang masih tetap terjaga dari sisi operasional. Hal ini nampak pada penyaluran kredit pada tahun 2025 yang mengalami loncatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Pada tahun 2024 realisasi kredit adalah Rp 12.77 triliun namun di tahun 2025 mengalami kenaikan Rp 1.18 triliun atau naik 9.23% menjadi Rp 13.95 triliun.

Begitu juga dengan realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami kenaikan signifikan dari Rp 11.99 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 15.93 triliun pada tahun 2025 naik 73.12% atau Rp 3.94 triliun.

From a governance perspective, Bank NTT consistently prioritizes the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all its business activities. Strengthening oversight functions, enhancing regulatory compliance, and implementing integrated risk management are all part of our efforts to ensure the bank's healthy and responsible business continuity.

THE BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN FORMULATING STRATEGIES AND POLICIES

Throughout 2025, the Board of Directors actively evaluated business performance, risk profiles, and the effectiveness of implemented strategies. The results of these evaluations served as the basis for policy adjustments, including strengthening risk management, adjusting credit strategies, and increasing provisions.

In the strategy formulation process, the Board of Directors also ensures alignment between short-term and long-term plans, as well as a strong connection to Bank NTT's vision as a competitive and sustainable regional financial institution and as an agent of regional development.

COMPANY PERFORMANCE

In 2025, Bank NTT successfully recorded assets of Rp 20.09 trillion, a significant increase of Rp 3.66 trillion, or 22.26%, compared to the 2024 asset figure of Rp 16.43 trillion. This asset growth was primarily driven by increased loan disbursements and placements with Bank Indonesia and other banks.

Overall, Bank NTT has maintained solid operational performance. This is evident in the significant increase in loan disbursements in 2025 compared to 2024. In 2024, loan disbursements totaled Rp 12.77 trillion, but in 2025, they increased by Rp 1.18 trillion—a 9.23% rise—to Rp 13.95 trillion.

Similarly, third-party funds (DPK) saw a significant increase from Rp 11.99 trillion in 2024 to Rp 15.93 trillion in 2025, a rise of 73.12% or Rp 3.94 trillion.

Namun demikian, pada tahun 2025 Bank NTT mencatatkan penyesuaian pada kinerja laba. Laba setelah pajak yang dicatatkan Bank NTT pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan yakni Rp 92.62 miliar dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang adalah sebesar Rp 176.84 miliar, turun Rp 84.22 miliar atau 25.65%. Penurunan ini disebabkan oleh pembentukan CKPN yang cukup besar pada tahun 2025 yakni Rp 466.59 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 Rp 347.94 miliar, naik sebesar Rp 118.64 miliar atau 34.10%.

However, in 2025, Bank NTT recorded a decline in profit performance. Bank NTT's profit after tax in 2025 saw a significant decrease to Rp 92.62 billion compared to the 2024 figure of Rp 176.84 billion, a drop of Rp 84.22 billion or 25.65%. This decline was caused by a substantial provision for credit losses in 2025, amounting to Rp 466.59 billion, compared to Rp 347.94 billion in 2024—an increase of Rp 118.64 billion, or 34.10%.

Penurunan laba tersebut merupakan bagian dari langkah yang diambil Bank NTT dalam memperkuat kualitas aset serta meningkatkan pencadangan risiko secara lebih konservatif, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan antisipasi terhadap potensi risiko di masa mendatang.

This decline in profit is part of the measures taken by Bank NTT to strengthen asset quality and increase risk provisions in a more conservative manner, in line with the application of prudential banking principles and in anticipation of potential future risks.

Penurunan laba setelah pajak tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayarkan oleh Bank NTT kepada pemerintah di tahun 2025. Pada tahun 2025 besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp 79.21 miliar naik Rp 24.94 miliar atau 45.96% dari tahun 2024 sebesar Rp 54.27 miliar.

This decline in after-tax profit is also due to the increase in Income Tax (PPh) that Bank NTT is required to pay to the government in 2025. In 2025, the amount of Income Tax (PPh) payable is Rp 79.21 billion, an increase of Rp 24.94 billion or 45.96% from the 2024 figure of Rp 54.27 billion.

Rasio-rasio keuangan utama Bank NTT secara umum masih berada dalam batas yang sehat dan sesuai dengan ketentuan regulator, Bank NTT terus menjaga tingkat permodalan yang memadai dimana Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tahun 2025 adalah sebesar 26.81% sedikit turun dibandingkan dengan KPMM pada tahun 2024 sebesar 27.05%. Permodalan yang kuat akan memberikan Bank NTT kemampuan yang lebih baik dalam menyerap kerugian dan memberikan fondasi yang cukup baik untuk bisnis yang dijalankan Bank NTT dalam jangka panjang.

Bank NTT's key financial ratios generally remain within healthy limits and in compliance with regulatory requirements. Bank NTT continues to maintain an adequate capital level, with the Minimum Capital Adequacy Ratio (MCAR) for 2025 standing at 26.81%, a slight decrease from the 2024 MCAR of 27.05%. Strong capitalization will provide Bank NTT with greater capacity to absorb losses and lay a solid foundation for the Bank's long-term operations.

Dari sisi kualitas kredit, *Non Performing Loan* (NPL) gross Bank NTT pada tahun 2025 sebesar 3.32% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 3.44%. Oleh karena itu manajemen akan mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat menekan NPL Bank NTT melalui Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit baik dengan melakukan restrukturisasi kredit, penagihan melalui Satuan Tagih Kredit, mengajukan gugatan sederhana serta kepada debitur serta dengan melakukan penjualan agunan baik secara sukarela maupun melalui lelang.

In terms of credit quality, Bank NTT's gross Non-Performing Loan (NPL) ratio in 2025 stood at 3.32%, compared to 3.44% in 2024. Therefore, management will take strategic steps to reduce Bank NTT's NPL through the Credit Recovery and Resolution Division, including credit restructuring, collections via the Credit Collection Unit, filing summary lawsuits against debtors, and selling collateral—either voluntarily or through auction.

Sementara itu dari sisi likuiditas, kemampuan Bank NTT masih tetap terjaga baik dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank NTT masih berada di posisi stabil pada tahun 2025 yakni sebesar 87,54% dibandingkan dengan tahun 2024 dimana likuiditas Bank NTT sangat ketat yakni sebesar Rp 106,50%.

Meanwhile, in terms of liquidity, Bank NTT's ability to meet its obligations to third parties remains strong, with the Bank's Loan-to-Deposit Ratio (LDR) expected to remain stable at 87.54% in 2025, compared to 2024 when liquidity was very tight at 106.50%.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan praktik perbankan yang sehat dan berkelanjutan maka manajemen akan melakukan perbaikan dan pembenahan secara bertahap dari berbagai sisi, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi operasional kedepannya dengan memperhatikan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan Bank NTT tahun 2025.

As part of its commitment to implementing sound and sustainable banking practices, management will implement gradual improvements and reforms across various aspects—both business and operational—moving forward, taking into account the audit findings of the Public Accounting Firm (KAP) regarding Bank NTT's 2025 financial statements.

Melalui langkah-langkah strategis yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, Bank NTT meyakini bahwa fondasi bisnis yang semakin kuat akan menjadi pendorong utama bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Fokus pada kualitas pertumbuhan, penguatan manajemen risiko, serta transformasi operasional melalui digitalisasi akan terus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang dalam industri perbankan.

Through the strategic measures implemented throughout 2025, Bank NTT is confident that a stronger business foundation will be the primary driver of improved performance in the future. A focus on quality growth, strengthening risk management, and operational transformation through digitalization will remain a priority as the bank addresses challenges and capitalizes on opportunities in the banking industry.

KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Direksi, Direksi dibantu oleh komite yang berada di bawah Direksi. Pada tahun 2025 komite-komite tersebut telah menjalankan perannya secara efektif dalam memberikan rekomendasi strategis serta memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hingga tahun 2025 Komite dibawah Direksi terdiri atas: Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Asset & Liability Committee (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia.

PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To support the Board of Directors in carrying out its duties, functions, and authorities, the Board is assisted by committees reporting to it. By 2025, these committees will have effectively fulfilled their roles in providing strategic recommendations and ensuring that policy implementation aligns with the principles of good corporate governance.

As of 2025, the committees under the Board of Directors consist of: the Credit Committee, the Risk Management Committee, the Asset & Liability Committee (ALCO), the Information Technology Steering Committee, and the Human Resources Committee.

PROSPEK BISNIS

Memasuki tahun 2026, Bank NTT memandang prospek industri perbankan masih memiliki peluang pertumbuhan yang positif, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dan sektor-sektor produktif.

BUSINESS OUTLOOK

Looking ahead to 2026, Bank NTT believes that the banking industry still holds positive growth prospects, particularly in supporting regional economic development and productive sectors.

Direksi melihat bahwa potensi pertumbuhan kredit tetap terbuka, terutama pada sektor UMKM, infrastruktur daerah, serta sektor-sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, Direksi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memanfaatkan peluang tersebut, dengan tetap memperhatikan kualitas aset dan profil risiko.

Transformasi digital, penguatan layanan berbasis teknologi, serta peningkatan efisiensi operasional akan terus menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

KOMITMEN TERHADAP PERKEMBANGAN LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bank NTT terus memperkuat komitmennya dalam penerapan tanggung jawab sosial terhadap Lingkungan dan Masyarakat sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Direksi meyakini bahwa keberhasilan jangka panjang Bank tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

Terhadap hal tersebut Bank NTT memiliki program *Corporate Social Responsibility* yaitu BANK NTT PEDULI yang berfokus pada tujuh bidang yakni bidang Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Pendidikan, Kesehatan, Budaya serta Olah Raga. Sepanjang tahun 2025 manajemen telah merealisasikan penyaluran program *Corporate Social Responsibility* BANK NTT PEDULI sebesar Rp 7 miliar.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2025 telah terjadi perubahan komposisi Direksi sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H. M.H sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yohanis Landu Praing dari jabatannya sebagai Direktur Umum dan SDM merangkap Plt. Direktur Utama dan Plt. DIrektur Keuangan & Treasury.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hilarius Minggu dari jabatannya sebagai Direktur Dana merangkap Plt. Direktur Kredit dan Plt. Direktur Teknologi Informasi.

The Board of Directors believes that credit growth potential remains open, particularly in the MSME sector, regional infrastructure, and key sectors in the East Nusa Tenggara region. However, the Board of Directors continues to prioritize the principle of prudence in capitalizing on these opportunities, while maintaining a focus on asset quality and risk profiles.

Digital transformation, the enhancement of technology-based services, and improved operational efficiency will continue to be key priorities in supporting future business growth.

COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT

Bank NTT continues to strengthen its commitment to fulfilling its social responsibility toward the environment and the community as part of its sustainable business strategy. The Board of Directors believes that the Bank's long-term success is determined not only by financial performance but also by its contributions to regional economic development, community welfare, and environmental conservation.

In response to this, Bank NTT has a Corporate Social Responsibility program called BANK NTT PEDULI, which focuses on seven areas: Social, Economic, Environmental, Education, Health, Culture, and Sports. Throughout 2025, management has allocated Rp 7 billion for the BANK NTT PEDULI Corporate Social Responsibility program.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, changes in the composition of the Board of Directors occurred in accordance with the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, as follows:

1. Respectfully dismissing Mr. Yohanis Landu Praing from his position as Director of General Affairs and Human Resources, concurrently serving as Acting President Director and Acting Director of Finance & Treasury.
2. To honorably dismiss Mr. Hilarius Minggu from his position as Director of Funds, concurrently serving as Acting Director of Credit and Acting Director of Information Technology.

3. Direktur Utama adalah Charlie Paulus.
4. Direktur Umum & SDM adalah Rahmat Saleh.
5. Direktur Keuangan dan Treasury adalah Heru Helbianto.
6. Direktur Kredit adalah Aloysius R.A. Geong.
7. Direktur Kepatuhan tetap dijabat oleh Christofel S.M. Adoe hingga calon Direktur Kepatuhan sebagai perwakilan dari Bank Jatim telah mendapat keputusan OJK Pusat untuk disetujui dan memenuhi syarat sebagai Direktur Kepatuhan serta setelah mendapat persetujuan izin KUB antara Bank Jatim dan Bank NTT yang selanjutnya akan disahkan melalui RUPS Luar Biasa.

Laporan Manajemen atas Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan

Direksi Bank NTT bertanggung jawab untuk menerapkan Pengendalian Internal yang memadai dalam proses pelaporan keuangan yang diawasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank NTT untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan ini disusun untuk mendukung tercapainya kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan dan memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Dalam menjalankan penilaian, Bank menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwey Commission* (COSO). Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, Direksi Bank NTT menyimpulkan bahwa Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Efektif.

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang melekat dimana proses ICoFR tidak dapat mencegah atau mendeteksi seluruh potensi salah saji, maka pengendalian internal atas pelaporan keuangan ini

3. The President Director is Charlie Paulus.
4. The Director of General Affairs & Human Resources is Rahmat Saleh.
5. The Director of Finance and Treasury is Heru Helbianto.
6. The Director of Credit is Aloysius R.A. Geong.
7. Christofel S.M. Adoe will continue to serve as Compliance Director until the nominee for Compliance Director, representing Bank Jatim, has received approval from the OJK Central Office and meets the requirements to serve as Compliance Director, and after obtaining approval for the KUB agreement between Bank Jatim and Bank NTT, which will subsequently be ratified through an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Management Report on Internal Controls in the Financial Reporting Process

The Board of Directors of Bank NTT is responsible for implementing adequate internal controls in the financial reporting process, which is overseen by the Board of Commissioners through the Audit Committee and carried out by all levels of management and employees of Bank NTT to provide reasonable assurance regarding the Bank's financial information and financial statements.

This Internal Control over Financial Reporting has been established to support the achievement of accuracy, accuracy, and transparency of Financial Information and Financial Statements, to improve operational efficiency and effectiveness in financial reporting, to ensure compliance with applicable laws and regulations in the financial reporting process, and to ensure that the Financial Statements have been prepared in accordance with financial accounting standards and the Financial Services Authority's regulations regarding the recording of financial transactions.

In conducting its assessment, the Bank used the criteria set forth in the Internal Control—Integrated Framework published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Based on the assessment conducted, the Board of Directors of Bank NTT concluded that the internal control over financial reporting for the period ended December 31, 2025, is effective.

Given the inherent limitations of the ICoFR process—which cannot prevent or detect all potential misstatements—this internal control over financial reporting is designed to provide reasonable assurance,

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bukan untuk memberikan keyakinan absolut (*absolute assurance*). Oleh karena itu, Direksi Bank NTT berkomitmen untuk terus memperkuat budaya pengendalian internal, meningkatkan kualitas pemantauan serta memastikan tindak lanjut perbaikan atas temuan dilaksanakan secara konsisten.

not absolute assurance. Therefore, the Board of Directors of Bank NTT is committed to continuously strengthening the internal control culture, improving the quality of monitoring, and ensuring that corrective actions on findings are implemented consistently.

APRESIASI

Segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang selalu memberikan masukan dan arahan terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh Direksi, juga kepada seluruh pemegang saham yang selalu mendukung Bank NTT dalam mensinergikan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga kepada segenap pegawai karyawati Bank NTT yang sudah gigih berjuang, juga kepada regulator yang selalu menjaga Bank NTT berada didalam jalur yang tepat, seluruh mitra kerja Bank NTT dan kepada segenap masyarakat Nusa Tenggara Timur.

APPRECIATION

The entire Board of Directors would like to express its gratitude to the Board of Commissioners for their consistent input and guidance on every policy formulated by the Board of Directors; to all shareholders for their unwavering support of Bank NTT in aligning with programs of both the central and local governments; to all Bank NTT employees for their tireless efforts; and to the regulators for ensuring that Bank NTT remains on the right track, all of Bank NTT's business partners, and to the people of East Nusa Tenggara.

Ke depan, Bank NTT akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem perbankan, meningkatkan inovasi fitur layanan digital, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dengan kualitas aset kredit serta pengelolaan risiko. Dengan fondasi yang semakin kokoh, Bank NTT siap melangkah menuju fase pertumbuhan berikutnya dengan lebih percaya diri, terukur, dan berkelanjutan.

Moving forward, Bank NTT will continue to strengthen synergies with all stakeholders involved in the banking ecosystem, enhance innovation in digital service features, and maintain a balance between business growth, credit asset quality, and risk management. With an increasingly solid foundation, Bank NTT is ready to move toward its next phase of growth with greater confidence, in a measured and sustainable manner.

Direksi
Board of Director

Ir. Charlie Paulus, M.S.M

Direktur Utama
President Director

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

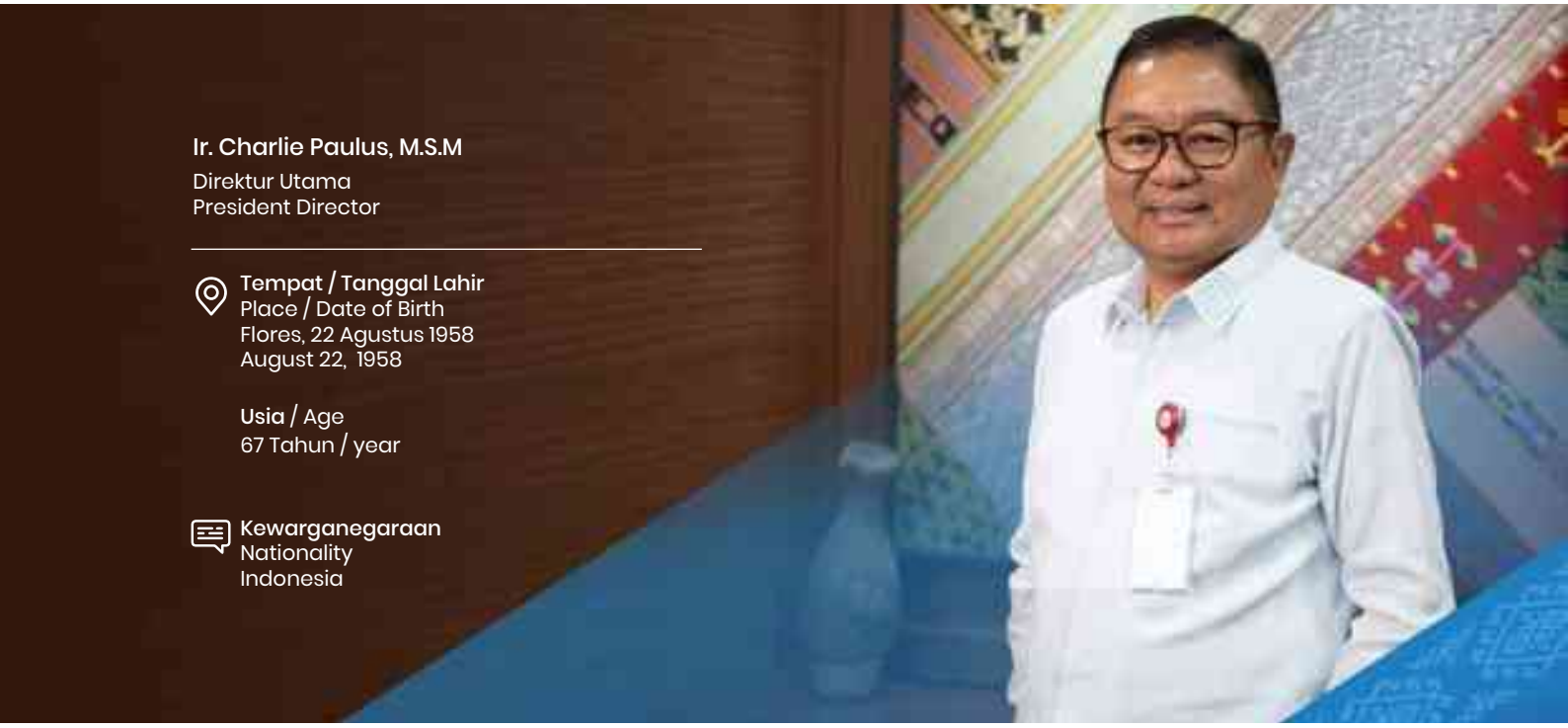

Ir. Charlie Paulus, M.S.M
Direktur Utama
President Director

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Flores, 22 Agustus 1958
August 22, 1958

Usia / Age
67 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Insinyur di bidang Teknik dari Universitas Indonesia dan gelar *Master of Science in Management* dari Arthur D. Little Management Education Institute Boston, USA..

Riwayat Jabatan
Menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 12 November 2025 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan. S.H. M.H.. yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 428/KEP/HK/2025, tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara Charlie Paulus sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030.

Education
Earned a Bachelor of Engineering degree in Gas and Petrochemical Engineering from the University of Indonesia and a Master of Science in Management from the Arthur D. Little Management Education Institute in Boston.

Professional History
Has served as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since November 12, 2025, to present.

Legal Basis for Appointment
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, by Serlina Sari Darmawan. S.H. M.H., as set forth in the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 428/KEP/HK/2025. dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Charlie Paulus as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term from November 12, 2025, to November 11, 2030.

Rangkap Jabatan

Sepanjang tahun 2025 tidak merangkap jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Meniti karier di dunia perbankan sejak tahun 1986 di Bank Panin Pekan Baru sebagai Kepala Seksi Kredit, Kepala Cabang Pembantu Bank Panin Duri – Riau, Kepala Cabang Bank Summa Menado, Staf *Corporate Planning* pada Bank Dharmala Jakarta, Senior Manager pada Bank Tata Jakarta, Direktur Operasional pada Bank Deka Jakarta, General Manager pada Bank Tata Jakarta, Presiden Direktur pada Bank Danpac (sekarang J-Trust Bank) Jakarta, Direktur Batara Finance Jakarta, Direktur Utama Batara Finance Jakarta, Komisaris Utama PT Bank Kesawan, Presiden Direktur PT Bank Index Selindo, Pelaksana Tugas (Plt.) Direksi PT Citra Krisindo Adi Perdana, Wakil Presiden Direktur PT Proline Finance Indonesia.

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah Diikuti Dalam Tahun Buku 2025 :

1. Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan oleh PT. Ultima Bersama Olingga.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama.

Concurrent Positions

Throughout 2025, he did not hold concurrent positions at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Work Experience

He began his career in the banking industry in 1986 at Bank Panin Pekanbaru as Head of the Credit Section, Assistant Branch Manager at Bank Panin Duri – Riau, Branch Manager at Bank Summa Manado, Corporate Planning Staff at Bank Dharmala Jakarta, Senior Manager at Bank Tata Jakarta, Director of Operations at Bank Deka Jakarta, General Manager at Bank Tata Jakarta, and President Director at Bank Danpac (now J-Trust Bank) in Jakarta, President Director of Batara Finance in Jakarta, Chief Executive Officer of Batara Finance in Jakarta, Chairman of the Board of Bank Kesawan (now QNB Indonesia), President Director of Bank Index Selindo, Acting Director of PT Citra Krisindo Adi Perdana, and most recently as Vice President Director of PT Proline Finance Indonesia.

Education and/or Training Completed in Fiscal Year 2025:

1. APUPPT and PPPSPM Executive Training and Risk Management for Directors and Commissioners organized by PT. Ultima Bersama Olingga.
2. Level 7 Risk Management Certification administered by the Banking Professional Certification Institute.

Affiliative Relationships with Other Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Major Shareholders

Has no affiliate relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Rahmat Saleh, S.T, M.Sos
Direktur Umum dan SDM
Director of General Affairs and Human Resources

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Kupang / 09 Juli 1976
July 09, 1976

Usia / Age
49 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta dan gelar Magister Sosial dari Universitas Muhammadiyah Kupang.

Riwayat Jabatan
Menjabat sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 12 November 2025 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H. M.H. yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 429/KEP/HK/2025. tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara Rahmat Saleh sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030.

Education
Earned a Bachelor of Engineering degree from the National Institute of Science and Technology, Jakarta, and a Master of Social Sciences degree from Universitas Muhammadiyah Kupang.

Professional History
Has served as General Director and Head of Human Resources (HR) at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since November 12, 2025, to present.

Legal Basis for Appointment
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, by Serlina Sari Darmawan. S.H. M.H. as set forth in the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 429/KEP/HK/2025. dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Rahmat Saleh as General Director and Head of Human Resources of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term from November 12, 2025, to November 11, 2030.

Rangkap Jabatan

Sepanjang Tahun 2025 tidak pernah merangkap jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT sebagai Kepala Sub Divisi Logistik Kantor Pusat, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Umum, Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala DIvisi IT Support, Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal dan menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Operasional.

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah Diikuti Dalam Tahun Buku 2025 :

1. Webinar OJK Institute *Imboost Your Spirit : Cultivating Positivity for a Balanced and Fulfilling Life* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kegiatan Pengelompokkan Aset Hapus Buku & Tata Cara Lelang Inventaris yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Pengembangan Kajian.
3. Diklat Simulasi *Tabletop Exercise/Fase* I Perencanaan & Persiapan yang diselenggarakan oleh Temika Cyber.
4. Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko bagi Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan oleh PT. Ultima Bersama Olingga.
5. Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Direksi Lainnya. Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama.

Concurrent Positions

Throughout 2025, he has never held concurrent positions at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Work Experience

He has been with Bank NTT since October 2005 and has held a number of key positions at the bank, including Head of the Logistics Subdivision at the Head Office, Acting Head of the General Affairs Division, Head of the General Affairs Division, Acting Head of the IT Support Division, and Acting Head (Pgs.) Head of the Corporate Secretary & Legal Division, and currently holds the position of Head of the Operations Division.

Education and/or Training Completed in Fiscal Year 2025:

1. OJK Institute Webinar "Imboost Your Spirit: Cultivating Positivity for a Balanced and Fulfilling Life" organized by the Financial Services Authority.
2. Asset Write-Off Classification and Inventory Auction Procedures Workshop organized by the Center for Research and Development.
3. Tabletop Exercise Simulation Training/Phase I Planning & Preparation organized by Temika Cyber.
4. Executive Training on APUPPT and PPPSPM and Risk Management for Directors and Commissioners, organized by PT. Ultima Bersama Olingga.
5. Refresher Program for Banking Risk Management Certification, Level 7.

Affiliative Relationships with Other Board Members, Members of the Board of Commissioners, and Major Shareholders.

Has no affiliate relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Christofel S. M. Adoe, S.Sos
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Kalabahi, 13 Februari 1969
February 13, 1969

Usia / Age
56 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Riwayat Jabatan
Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 29 Desember 2021 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 22 tanggal 29 Desember 2021, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 437/KEP/HK/2025, tanggal 29 Desember 2021, tentang Pengangkatan Saudara Christofel Semuel Melianus Adoe sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 29 Desember 2021 Sampai Dengan 28 Desember 2026.

Education
Earned a Bachelor's degree in Business Administration from Nusa Cendana University in Kupang.

Professional History
Has served as Director of Compliance at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since December 29, 2021, to present.

Legal Basis for Appointment
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, as set forth in the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 429/KEP/HK/2025, dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Rahmat Saleh as General Director and Director of Human Resources of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term from November 12, 2025, to November 11, 2030.

Rangkap Jabatan

Tahun 2025 tidak merangkap jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 1994 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Wakil Pemimpin Cabang Atambua, Kasubdiv Pengawasan Wilayah II Kantor Pusat, Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Bisnis Retail Kantor Pusat, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Kantor Pusat dan terakhir menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Kepatuhan.

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah diikuti Dalam Tahun 2025

1. Diklat "Peranan Strategis Dewan Komisaris & Direksi Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)" yang diselenggarakan oleh Equivalent Training Center.
2. Workshop Teknis Penyusunan Laporan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) OJK bagi BPD se Indonesia yang diselenggarakan oleh ASBANDA.
3. *Guide to* CAFP & CAFP *Examination* yang diselenggarakan oleh Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM).
4. Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 6 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.
5. Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7 yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
6. Uji Kompetensi Bidang Kepatuhan Perbankan yang diselenggarakan oleh LSPP.
7. Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan jenjang kualifikasi 7.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama.

Concurrent Positions

In 2025, I did not hold any concurrent positions at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Work Experience

He began his career at Bank NTT in October 1994 and has held key positions at the bank, including: Deputy Branch Manager of the Atambua Branch; Head of the Regional Supervision Sub-Division II at the Head Office; Business Manager of the Kupang Main Branch; Acting (Pjs.) Head of the Retail Business Division at the Head Office; Acting (Acting) Head of the Commercial Business Division at the Head Office, Head of the Commercial Business Division at the Head Office, Head of the Supervision and Internal Audit Unit (SKAI) at the Head Office, and most recently served as Head of the Compliance Division.

Education and/or Training Completed in 2025

1. Training on "The Strategic Role of the Board of Commissioners & Directors in Implementing Good Corporate Governance (GCG)" organized by Equivalent Training Center.
2. Technical Workshop on the Preparation of the OJK's Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) Report for Regional Development Banks (BPDs) across Indonesia, organized by ASBANDA.
3. Guide to CAFP & CAFP Examination organized by Asia Anti-Fraud Management (AAFM).
4. Level 6 Compliance Certification organized by the Banking Professional Certification Institute.
5. Level 7 Compliance Certification Training organized by the Banking Compliance Directors Communication Forum (FKDKP).
6. Banking Compliance Competency Test conducted by LSPP.
7. Refresher Program for Banking Risk Management Certification at Qualification Level 7.

Affiliative Relationships with Other Board Members, Members of the Board of Commissioners, and Major Shareholders

Has no affiliate relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Aloysius R.A. Geong, S.E
Direktur Kredit
Director of Credit

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Ruteng, 26 Januari 1977
January 26, 1977

Usia / Age
48 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Riwayat Jabatan
Menjabat sebagai Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 12 November 2025 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H. M.H. yang juga dituangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 431/KEP/HK/2025 tanggal 12 November 2025, mengangkat Aloysius R.A. Geong sebagai Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk masa bakti 12 November 2025 sampai dengan 11 November 2030.

Education
Earned a Bachelor's degree in Economics from the National University of Education in Denpasar.

Professional History
Has served as Credit Director of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since November 12, 2025, to present.

Legal Basis for Appointment
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 22 dated December 29, 2021, by Serlina Sari Darmawan. S.H. M.H., which was also formalized through the Decision Letter of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 431/KEP/HK/2025 dated November 12, 2025. appointing Aloysius R.A. Geong as Credit Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term of office from November 12, 2025, to November 11, 2030.

Rangkap Jabatan

Tahun 2025 tidak merangkap jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Pernah berkarier di Bank BNI 46 sejak Februari 2002 s/d Mei 2006 dan menduduki jabatan penting di Bank BNI 46 yakni : Asisten Pembukuan & Laporan Keuangan BNI Cabang Kupang, Asisten Umum BNI Cabang Kupang, Asisten Manager BNI Kanwil 11 dan Asisten Manager BNI Cabang Toli-Toli.

Meniti karier di Bank NTT sejak Mei 2006 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kasubdiv Pemberian & Supervisi Kredit Kantor Pusat, Kasubdiv Bisnis UKM & Umum Kantor Pusat, Kasubdiv Sektor Swasta Kantor Pusat, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Waitabula, Pemimpin Cabang Waitabula, Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Bisnis, Pemimpin Cabang Mbay, Kepala Divisi Supporting Kredit, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Dana & Jasa, Pemimpin Cabang Khusus dan terakhir sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah diikuti Dalam Tahun 2025

1. Webinar OJK Institute Imboost Your Spirit : *Cultivating Positivity for a Balanced and Fulfilling Life* yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelatihan Anti Gratifikasi, Strategi Anti Fraud & Integritas Laporan Keuangan Bank Berdasarkan POJK No. 12. POJK No. 15 Tahun 2024 serta Konsekuensi Hukumnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Kebijakan Nasional (LEMIKNAS).
3. Pelatihan Metode Pengukuran Kinerja dengan *Key Performance Indicator* yang diselenggarakan oleh Calamus Rotana Cattail.
4. Diklat Data-*Driven GRC For Corporate Integrity* yang diselenggarakan oleh LPPI Jakarta.
5. Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan jenjang kualifikasi 7.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama.

Concurrent Positions

As of 2025, I do not hold any concurrent positions at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Work Experience

Previously worked at Bank BNI 46 from February 2002 to May 2006 and held key positions at Bank BNI 46, namely: Assistant for Bookkeeping & Financial Reporting at BNI Kupang Branch, General Assistant at BNI Kupang Branch, Assistant Manager at BNI Regional Office 11, and Assistant Manager at BNI Toli-Toli Branch.

He has built his career at Bank NTT since May 2006 and has held key positions at Bank NTT, namely: Head of the Credit Granting & Supervision Sub-Division at the Head Office, Head of the SME & General Business Sub-Division at the Head Office, Head of the Private Sector Sub-Division at the Head Office, Acting (Pjs.) Branch Manager of Waitabula, Branch Manager of Waitabula, Deputy Special Branch Manager of Kupang for Business, Branch Manager of Mbay, Head of the Credit Support Division, Head of the Operations Division, Head of the Funds & Services Division, Special Branch Manager of Kupang, and most recently as Head of the Human Resources (HR) Division.

Education and/or Training Completed in 2025

1. OJK Institute Webinar "Imboost Your Spirit: Cultivating Positivity for a Balanced and Fulfilling Life" organized by the Financial Services Authority.
2. Anti-Graft Training. Anti-Fraud Strategies & Integrity of Bank Financial Reports Based on OJK Regulation No. 12 and OJK Regulation No. 15 of 2024, along with Their Legal Consequences, organized by the National Policy Information Agency (LEMIKNAS).
3. Training on Performance Measurement Methods Using Key Performance Indicators, organized by Calamus Rotana Cattail.
4. Data-Driven GRC for Corporate Integrity Training organized by LPPI Jakarta.
5. Refresher Program for Banking Risk Management Certification, Level 7.

Affiliative Relationships with Other Board Members, Members of the Board of Commissioners, and Major Shareholders

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Heru Helbianto, S.E, M.M
Direktur Keuangan & Treasury
Director of Finance & Treasury

Tempat / Tanggal Lahir
Place / Date of Birth
Jakarta, 18 Desember 1974
Jakarta, December 18, 1974

Usia / Age
51 Tahun / year

Kewarganegaraan
Nationality
Indonesia

Riwayat Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Indonesia dan gelar Magister Manajemen bidang *Finance & Banking* dari Universitas Trisakti Jakarta.

Riwayat Jabatan
Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 12 November 2025 hingga sekarang.

Dasar Hukum Penunjukan
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 tanggal 12 November 2025 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H. M.H. yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 430/KEP/HK/2025, tanggal 12 November 2025, tentang Pengangkatan Saudara Heru Helbianto sebagai Direktur Keuangan & Treasury

Education
He holds a Bachelor's degree in Economics from the Indonesian College of Economics, Finance, and Banking and a Master's degree in Management with a concentration in Finance & Banking from Trisakti University in Jakarta.

Professional History
Has served as Director of Funds & Treasury at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur since November 12, 2025, to the present.

Legal Basis for Appointment
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 09 dated November 12, 2025, by Serlina Sari Darmawan. S.H. M.H. as set forth in the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 430/KEP/HK/2025, dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Heru Helbianto as Director of Finance & Treasury of PT. Bank

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 12 November 2025 Sampai Dengan 11 November 2030.

Rangkap Jabatan

Sepanjang Tahun 2025 tidak pernah merangkap jabatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman Kerja

Meniti karier di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 2024 sebagai Senior Interest Rate Trader di PT Bank Permata, Tbk. AVP - *Head of Debt Capital Market Trading* di PT. Trimegah Securities Tbk, VP-*Head of Syndicate Bonds Market Making and Cross Market Trading*, Direktur pada Post Energy Group, *Head of Treasury Division* pada PT. Bank of India Tbk, *General Manager* pada PT Post Energy Group, *Head of Treasury Global Market* pada PT. Bank KB Bukopin Tbk dan terakhir sebagai *Deputy Director - Head of Treasury Division* di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

Pendidikan dan/atau Pelatihan yang Telah Diikuti Dalam Tahun Buku 2025 :

1. Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris yang diselenggarakan oleh PT. Ultima Bersama Olingga.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan.

Hubungan Afiliasi Dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the term from November 12, 2025, to November 11, 2030.

Concurrent Positions

Throughout 2025, he has never held concurrent positions at PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

Work Experience

He has built his career in finance and banking since 2024 as a Senior Interest Rate Trader at PT Bank Permata Tbk, AVP-Head of Debt Capital Market Trading at PT. Trimegah Securities Tbk, VP-Head of Syndicate Bonds Market Making and Cross Market Trading, Director at Post Energy Group, Head of Treasury Division at PT Bank of India Tbk, General Manager at PT Post Energy Group, Head of Global Treasury Market at PT Bank KB Bukopin Tbk, and most recently as Deputy Director-Head of Treasury Division at PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Education and/or Training Completed in Fiscal Year 2025:

1. APUPPT and PPPSPM Executive Training and Risk Management for Directors and Commissioners organized by PT. Ultima Bersama Olingga.
2. Level 7 Risk Management Certification administered by the Banking Professional Certification Institute.

Affiliative Relationships with Other Board Members, Members of the Board of Commissioners, and Major Shareholders.

Has no affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Shareholders.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE PROFILE

Kepala Divisi
Head Division

Ratna F.F. Touor, S.E, M.M
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Tempat / Tanggal Lahir : Belu/ 27 April 1978
Place/Date of Birth : Belu/April 27, 1978

Usia / Age : 47 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko sejak Oktober 2021 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kasudiv. Standarisasi & Pengukuran Kualitas Layanan, Kasubdiv Pemantauan Risiko & Laporan, Wakil Pemimpin Cabang Oelamasi, Pemimpin Cabang SoE, Pjs. Kepala Divisi Kepatuhan.

Latar Belakang Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) BPD Jateng Semarang, dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Has served as Head of Risk Management Division since October 2021 to present.

He has built his career at Bank NTT since March 2002 and has held key positions at the bank, including: Head of the Service Quality Standardization & Measurement Sub-Division, Head of the Risk Monitoring & Reporting Sub-Division, Deputy Branch Manager of Oelamasi, Branch Manager of SoE, and Acting Head of the Compliance Division.

Educational Background
He earned a Bachelor's degree in Economics from the School of Economics (STIE) BPD Central Java in Semarang and a Master's degree in Financial Management from Widya Mandira Catholic University in Kupang.

Endri Wardono, S.E
Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer
Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division

Tempat / Tanggal Lahir : Ngawi/ 27 Februari 1978
Place/Date of Birth : Ngawi/February 27, 1978

Usia / Age : 47 tahun/year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer sejak Juni 2024 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT antara lain : Pejabat Sementara (Pjs.) Kasubdiv Industri Kecil Kantor Pusat, Kasubdiv Industri Kecil Kantor Pusat, Kasubdiv UMKM Kantor Pusat, Head Group Bisnis UKM Kantor Pusat, Head Group Line Bisnis Kredit UKM Kantor Pusat, Wakil Pemimpin Cabang Labuan Bajo, Pemimpin Cabang Kefamenanu, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Dana, Kepala Divisi Dana, serta Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal.

Latar Belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang.

Has served as Head of Micro, Small & Consumer Credit Mar-keting Division since June 2024 to present.

He has been with Bank NTT since March 2002 and has held several key positions at the bank, including: Acting (Acting) Head of the Small Industry Subdivision at Headquarters, Head of the Small Industry Subdivision at Headquarters, Head of the MSME Subdivision at Headquarters, Head of the SME Business Group at Headquarters, Head of the SME Credit Business Line Group at Headquarters, Deputy Branch Manager in Labuan Bajo, Branch Manager in Kefamenanu, Acting (Acting) Head of the Funds Divi-sion, Head of the Funds Division, and Head of the Corporate Sec-retary & Legal Division.

Educational Background
Earned a Bachelor's degree in Economics from the School of Management (STIM) Kupang

Yuan Nerda A. Taneo, S.E, M.Si

Kepala Divisi Riset dan Pengembangan
Head of Research and Development Division

Tempat / Tanggal Lahir : Oe'ekam 18 September 1978
Place/Date of Birth: Oe'ekam/September 18, 1978

Usia / Age : **47 tahun** / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan sejak Agustus 2025 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT antara lain : Kasubdiv Standarisasi & Pengukuran Kualitas Layanan pada Divisi Kualitas Pelayanan, Kasubdiv administrasi Personalia pada Divisi Sumber Daya Manusia, Kasubdiv Perencanaan Strategis pada Divisi Perencanaan Divisi Perencanaan & Corporate Secretary, Kasubdiv HUmas pada Divisi Perencanaan & Corporate Secretary, Wakil Pemimpin Cabang Surabaya, Pemimpin Cabang Soe, Pemimpin Cabang Waikabubak, Pemimpin Cabang Betun, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajayana Malang dan Magister Sains dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Has served as Head of Research and Development Division since August 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since March 2002 and has held key positions at the bank, including: Head of the Service Quality Standardization & Measurement Sub-Division within the Service Quality Division, Head of the Personnel Administration Sub-Division within the Human Resources Division, Head of the Strategic Planning Sub-Division within the Planning Division of the Planning & Corporate Secretary Division, Head of the Public Relations Sub-Division within the Planning & Corporate Secretary Division, Deputy Branch Manager of Surabaya, Branch Manager of Soe, Branch Manager of Waikabubak, Branch Manager of Betun, Acting (Pjs.) Head of the Corporate Secretary & Legal Division.

Educational Background

Earned a Bachelor of Economics from Gajayana University in Malang and a Master of Science from Satya Wacana Christian University in Salatiga

Sanry W.A. Bara Lay, S.E, M.M

Kepala Divisi Operasional
Head of Operational Division

Tempat / Tanggal Lahir : Atambua / 24 April 1974
Place / Date of Birth: Atambua / April 24, 1974

Usia / Age : **51 tahun** / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Bank NTT sejak Juni 2024 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni Pemimpin Cabang Pembantu Atapupu, Pempimpin Cabang Pembantu/Asst. Manager Bisnis Atapupu, Pelaksana Harian (Plh.) Pemimpin Cabang Pembantu Weluli, Manager Operasional Cabang SoE, Wakil Pemimpin Cabang Rote Ndao, Pemimpin Cabang Kefamenanu, Pemimpin Cabang Atambua, Pemimpin Cabang Waingapu, Pemimpin Cabang Rote Ndao, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Merdeka Malang dan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari Universitas Widyagama Malang.

Has served as Head of Operational Division at Bank NTT since June 2024 to present.

He/She began his/her career at Bank NTT in March 2002 and has held several key positions within the Bank, including Head of Atapupu Sub-Branch, Head of Sub-Branch/Assistant Business Manager at Atapupu, Acting Head of Weluli Sub-Branch, Operations Manager of SoE Branch, Deputy Head of Rote Ndao Branch, Head of Kefamenanu Branch, Head of Atambua Branch, Head of Waingapu Branch, Head of Rote Ndao Branch, Acting Head of the Human Resources Division, and Head of the Human Resources Division.

Educational Background

He/She holds a Bachelor's degree in Economics, majoring in Marketing Management, from Universitas Merdeka Malang, and a Master's degree in Human Resource Management from Universitas Widyagama Malang.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Donny Rivers Messah, S.H, M.Hum

Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit
Head of Credit Recovery & Settlement Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 23 Oktober 1980
Place / Date of Birth: Kupang / October 23, 1980

Usia / Age : 45 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit sejak Mei 2021 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Februari 2009 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Pejabat Sementara (Pjs.) Kasubdiv Corporate Legal, Kasubdiv Corporate Legal, Pemimpin Cabang Waingapu, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya Jogjakarta dan Magister Hukum dari Universitas Atmajaya Jogjakarta.

Has served as Head of Credit Recovery & Settlement Division since May 2021 to present.

He has built his career at Bank NTT since February 2009 and has held key positions at Bank NTT, including: Acting Head of the Cor-porate Legal Sub-Division, Head of the Corporate Legal Sub-Division, Branch Manager of Waingapu, and Acting Head of the Credit Recovery & Resolution Division.

Educational Background

He holds a Bachelor of Law degree from Atmajaya University in Yogyakarta and a Master of Law degree from Atmajaya University in Yogyakarta.

Soleman M. Bislissin, S.P

Pjs. Kepala Divisi Kredit Komersil & Menengah
Acting Head of Commercial & Medium-Term Credit Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 04 Mei 1980
Place / Date of Birth: Kupang / May 4, 1980

Usia / Age : 45 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Kredit Komersil & Menengah sejak Januari 2024 sampai sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Kapan, Kasubdiv Konsumer & Priority Banking pada Divisi Dana, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Ruteng, Pejabat Sementara (Pjs), Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Kantor Cabang Utama (KCU) Kupang, Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis KCU Kupang, Pelaksana Tugas (Plt.) Pemimpin Cabang Utama Kupang.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Has served as Acting Head of the Commercial & Medium-Sized Credit Division since January 2024 to present.

He has been with Bank NTT since October 2005 and has held key posi-tions at the bank, including: Deputy Assistant Branch Manager in Kapan, Head of the Consumer & Priority Banking Subdivision within the Funds Division, Acting of the Ruteng Branch, Acting (Pjs.) Deputy Branch Man-ager for Business at the Kupang Main Branch Office (KCU), Deputy Branch Manager for Business at the Kupang KCU, and Acting (Plt.) Man-ager of the Kupang Main Branch.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Agriculture from Nusa Cendana University in Kupang.

Max D. Siokain, S. Sos
Kepala Divisi Pengawasan & SKAI
Head of Supervision & SKAI Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 25 Maret 1975
Place / Date of Birth: Kupang / March 25, 1975

Usia / Age : 50 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI sejak Juni 2024 sampai sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Officer Administrasi, Kasubdiv Inspektur Wilayah II, Pemimpin Cabang Rote Ndao, Wakil Pemimpin Cabang Utama Bidang Bisnis Kantor Cabang Utama Kupang, Staf Direksi setara Wakil Pemimpin Cabang Utama, Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Operasional Kantor Cabang Khusus, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala Divisi Kepatuhan.

Latar Belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Has served as Head of Supervision & SKAI Division since June 2024 to present.

Has built his career at Bank NTT since March 2002 and has held key positions at Bank NTT, namely: Administrative Officer, Head of the Regional Inspectorate Sub-Division II, Branch Manager of Rote Ndao, Deputy Head of the Main Branch for Business at the Kupang Main Branch, Executive Staff equivalent to Deputy Head of the Main Branch, Deputy Head of the Kupang Special Branch for Operations, Acting Head of the Compliance Division, and Head of the Compliance Division.

Educational Background
Earned a Bachelor of Social Sciences degree from Nusa Cendana University in Kupang.

Zet R. Lamu, S.E
Kepala Divisi Treasury & Financial Institution
Head of Treasury & Financial Institutions Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 13 November 1974
Place / Date of Birth: Kupang / November 13, 1974

Usia / Age : 51 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury & Financial Institution Bank NTT sejak November 2023 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak September 2001 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Takari, Pemimpin Cabang Pembantu Takari, Wakil Pemimpin Cabang Soe, Kepala Sub Divisi Domestik & Internasional, Wakil Pemimpin Cabang Khusus Bidang Bisnis, Kepala Divisi Treasury & International.

Latar Belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Widyagama Malang.

Has served as Head of Treasury & Financial Institutions Division at Bank NTT since November 2023 to present.

He has been with Bank NTT since September 2001 and has held key positions at the bank, including: Deputy Assistant Branch Manager in Takari, Assistant Branch Manager in Takari, Deputy Branch Manager in Soe, Head of the Domestic & International Subdivision, Deputy Branch Manager for Business Affairs, and Head of the Treasury & International Division.

Educational Background
He holds a Bachelor's degree in Economics from Widyagama University in Malang.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Salmon R. Teru, S.T

Kepala Divisi Dana & Jasa
Head of Funds & Services Division

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 16 September 1976
Place/Date of Birth: Jakarta / September 16, 1976

Usia / Age : 49 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Kepala Divisi Dana & Jasa Bank NTT sejak Juni 2024 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak September 2001 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Pejabat Sementara (Pjs.) Kasubdiv Sistem & Prosedur Kantor Pusat, Kasubdiv Sistem & Prosedur Kantor Pusat, Kasubdiv Pengamanan Informasi dan Teknologi Kantor Pusat, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Informasi & Teknologi Kantor Pusat, Kepala Divisi Informasi & Teknologi Kantor Pusat, Kepala Divisi IT Bisnis, serta Kepala Divisi Riset & Pengembangan.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gunadarma Jakarta.

Has served as Head of Funds & Services Division at Bank NTT since June 2024 to present.

He has built his career at Bank NTT since September 2001 and has held key positions at the bank, including: Acting Head of the Systems & Procedures Sub-Division at the Head Office, Head of the Systems & Procedures Sub-Division at the Head Office, and Head of the Information Security and Technology Sub-Division at the Head Office. Acting Head of the Information & Technology Division at the Head Office, Head of the Information & Technology Division at the Head Office, Head of the Business IT Division, and Head of the Research & Development Division.

Educational Background

Earned a Bachelor of Engineering degree from Gunadarma University, Jakarta.

Fransiskus A.L.A, Boli Tobi, S.E

Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal
Head of Corporate Secretary & Legal Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/ 15 April 1975
Place/Date of Birth: Kupang/April 15, 1975

Usia / Age : 50 tahun/year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal sejak Agustus 2025 sampai sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Juni 2001 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni Pemimpin Cabang Pembantu Baun, Manajer Operasional Kantor Cabang Kefamenanu, Pemimpin Cabang Pembantu Reo, Kasubdiv Perencanaan, Wakil Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bidang Bisnis, Pemimpin Cabang Ende, Pemimpin Cabang Oelamasi, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Riset dan Pengembangan.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma Jakarta.

Has served as Head of Corporate Secretary & Legal Division since Au-gust 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since June 2001 and has held key posi-tions at the bank, including Assistant Branch Manager in Baun, Operations Manager at the Kefamenanu Branch Office, Assistant Branch Manager in Reo, Head of the Planning Sub-Division, Deputy Head of the Special Busi-ness Branch Office, Branch Manager in Ende, Branch Manager in Oelamasi, and Acting (Acting) Head of the Research and Development Division.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Economics from Gunadarma University in Jakarta.

Charles F. Corputty, S.E
Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Supporting Kredit
Acting Head of Credit Support Division

Tempat / Tanggal Lahir : Atambua / 13 Mei 1979
Place/Date of Birth: Atambua / May 13, 1979

Usia / Age : **46 tahun / year**

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Supporting Kredit Kantor Pusat Bank NTT sejak Mei 2023 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kasubdiv E-Banking pada Divisi Operasional, Kasubdiv E-Banking Support pada Divisi IT Bisnis, Pemimpin Cabang Kalabahi, Wakil Kepala Divisi Operasional.

Latar Belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya Jogjakarta.

Has served as Acting Head of Credit Support Division at Bank NTT Headquarters since May 2023 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held key positions at the bank, including: Head of the E-Banking Sub-Division within the Operations Division, Head of the E-Banking Support Sub-Division within the Business IT Division, Branch Manager of Kalabahi, and Deputy Head of the Operations Division.

Educational Background
She holds a Bachelor's degree in Economics from Atmajaya University in Yogyakarta.

Fransisca I. R. Tamu Ina, S.T
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Tempat / Tanggal Lahir : Sumba Timur / 24 Juli 1977
Place/Date of Birth: East Sumba / July 24, 1977

Usia / Age : **48 tahun / year**

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi Kantor Pusat Bank NTT sejak Maret 2024 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Juli 2003 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni Kepala Sub Divisi Maintenance IT, Kepala Sub Divisi Maintenance dan Wakil Kepala Divisi Operasional, Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Teknologi Informasi.

Latar Belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Duta Wacana Jogjakarta.

Has served as Head of Information Technology Division at Bank NTT Headquarters since October 2021 to present.

Has built her career at Bank NTT since January 2005 and has held key positions at Bank NTT, including Head of the IT Maintenance Sub-Division, Head of the Maintenance Sub-Division, and Deputy Head of the Operations Division.

Educational Background
He holds a Bachelor of Engineering degree from Duta Wacana University in Yogyakarta.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Jemmy M. Toelle, S.E
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Umum
Acting Head of General Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 26 Juni 1977
Place/Date of Birth: Kupang / June 26, 1977

Usia / Age : 48 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Umum Bank NTT sejak November 2025 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Agustus 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kepala Kantor Kas Bupati Rote Ndao, Officer Mechanical Electrical Kantor Pusat, Kasubdiv Administrasi Umum & Logistik Kantor Pusat, Wakil Pemimpin Cabang Waikabubak.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang.

Has served as Acting Head of General Affairs Division at Bank NTT since November 2025 to the present.

He has built his career at Bank NTT since 2002 and has held key positions at the bank, including: Head of the Rote Ndao Regent's Cash Office, Mechanical and Electrical Officer at Headquarters, Head of the General Administration and Logistics Subdivision at Headquarters, and Deputy Branch Manager in Waikabubak.

Educational Background

He earned a bachelor's degree from the Kupang School of Management (STIM).

Nurchalis Tahir, S.E
Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Kepatuhan
Acting Head of Compliance Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kalabahi / 08 Juni 1971
Place/Date of Birth: Kalabahi / June 08, 1971

Usia / Age : 54 tahun / year

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi Kepatuhan sejak 04 Juni 2024 sampai sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Juni 2000 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Atapupu, Asisten Manajer Operasional Cabang Sabu, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Pembantu Oelamasi, Pemimpin Cabang Pembantu Oinlasi, Pemimpin Cabang Pembantu Niki-Niki, Manajer Operasional Cabang Kalabahi, Grup Line Bisnis Dana Institusi pada Divisi dana Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Borong, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Utama Kupang.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka Malang.

Has served as Acting Head of Compliance Division since June 4, 2024, to the present.

He has built his career at Bank NTT since June 2000 and has held key positions at the bank, including: Deputy Assistant Branch Manager of Atapupu, Assistant Operations Manager of the Sabu Branch, Acting (Pjs.) Assistant Branch Manager of Oelamasi, Assistant Branch Manager of Oinlasi, Assistant Branch Manager of Niki-Niki, Operations Manager of the Kalabahi Branch, Institutional Funds Business Line Group in the Head Office Funds Division, Branch Manager of Borong, and Acting (Pjs.) Head of the Kupang Main Branch.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Economics from Merdeka University of Malang.

Stefanus Ngongo Mesa, S.P

Wakil Kepala Divisi Operasional
Deputy Head of Operational Division

Tempat / Tanggal Lahir : Waingapu / 17 September 1977
Place/Date of Birth: Waingapu/September 17, 1977

Usia / Age : **48 tahun / year**

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Operasional sejak Mei 2025 sampai dengan sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yaitu: Kepala Kantor USPD Lamboya, Asisten Manajer Operasional Cabang Pembantu Nggongi, Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Nggongi, Pemimpin Cabang Pembantu Melolo, Wakil Pemimpin Cabang Anakalang, Wakil Pemimpin Cabang Waingapu, Wakil Pemimpin Cabang Waitabula, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Rote Ndao, Wakil Pemimpin Cabang Waitabula, Kepala Sub Divisi Kompetensi & Learning System pada Divisi SDM, Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Pemimpin Cabang Khusus Kupang, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Waingapu, Pemimpin Cabang Waingapu, Pemimpin Cabang Waitabula.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Currently serves as Deputy Head of Operations Division since May 2025.

He/She began his/her career at Bank NTT in October 2005 and has held several strategic positions within the Bank, including Head of USPD Lamboya Office, Assistant Operations Manager at Nggongi Sub-Branch, Deputy Head of Nggongi Sub-Branch, Head of Melolo Sub-Branch, Deputy Head of Anakalang Branch, Deputy Head of Waingapu Branch, Deputy Head of Waitabula Branch, Acting Head of Rote Ndao Branch, Deputy Head of Waitabula Branch, Head of Competency & Learning System Sub-Division at the Human Resources Division, Acting Deputy Head of Kupang Special Branch, Acting Head of Waingapu Branch, Head of Waingapu Branch, and Head of Waitabula Branch.

Educational Background

He/She holds a Bachelor's degree in Agriculture from Universitas Nusa Cendana, Kupang.

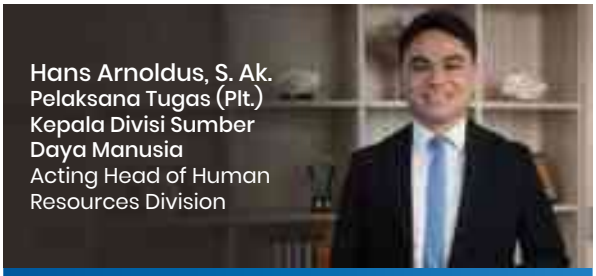

Hans Arnoldus, S. Ak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Acting Head of Human Resources Division

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 14 Oktober 1989
Place/Date of Birth: Kupang / October 14, 1989

Usia / Age : **36 tahun/year**

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank NTT sejak November 2025 hingga sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak November 2012 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT khususnya di Divisi Sumber Daya Manusia yakni : Officer Remunerasi dan Kasubdiv Remunerasi & Administrasi Pegawai.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Bisnis dari Universitas Kristen Petra Surabaya.

Has served as Acting Head of Human Resources Division at Bank NTT since November 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since November 2012 and has held key positions at Bank NTT, particularly within the Human Resources Division, including: Compensation Officer, and Head of the Compensation & Employee Administration Sub-Division within the Human Resources Division.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Business Accounting from Petra Christian University in Surabaya

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE PROFILE

PEMIMPIN CABANG
BRANCH MANAGER

Louis K. Gonsalves Atie, S.E

Pemimpin Cabang Utama Kupang
Head Main Branch of Kupang

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 01 Januari 1978
Place / Date of Birth: Kupang / January 1, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Utama Kupang sejak Juni 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak Maret 2002 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Pemimpin Cabang Pembantu Oelolok, Pemimpin Cabang Ende, Kepala Sub Divisi Treasury Operasional pada Divisi Treasury, Kepala Sub Divisi Supervisi Cabang pada Divisi Umum, Pemimpin Cabang Atambua, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Supporting Kredit dan Kepala Divisi Pengawasan & SKAI.

Latar belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogjakarta.

Has served as Head Main Branch of Kupang since June 2024.

He began his career at Bank NTT in March 2002 and has held key positions at the bank, including: Head of the Oelolok Sub-Branch. Head of the Ende Branch; Head of the Operational Treasury Subdi-vision within the Treasury Division; Head of the Branch Supervi-sion Subdivision within the General Division; Head of the Atambua Branch; Head of the Risk Management Division; Head of the Credit Support Division; and Head of the Supervision & SKAI Division.

Educational Background
He holds a Bachelor's degree in Economics from the Veteran Na-tional Development University in Yogyakarta.

Mathius J. Mangi, S.E

Pemimpin Cabang Khusus Kupang
Head of Special Branch Kupang

Tempat / Tanggal Lahir : Waingapu / 24 Maret 1971
Place / Date of Birth: Waingapu / March 24, 1971

Usia : 54 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Khusus Kupang sejak Juni 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak November 1990 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Kepala Seksi Kredit Cabang Lewoleba, Pemimpin Cabang Pembantu Mbay, Asisten Manager Bisnis Cabang Pembantu Mbay, Pemimpin Cabang Mbay, Pemimpin Cabang Waitabula, Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Pemimpin Cabang Khusus Kupang, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Umum.

Latar belakang Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Has served as Head of Special Branch Kupang since June 2024.

He began his career at Bank NTT in November 1990 and has held key positions at the bank, including: Head of the Credit Section at the Lewoleba Branch; Assistant Branch Manager at the Mbay Branch; Assistant Business Manager at the Mbay Branch; and Branch Manager at the Mbay Branch. Branch Manager of Waitabula. Head of the Credit Recovery and Settlement Division. Special Branch Manager of Kupang. Head of the Operations Divi-sion. Head of the General Affairs Division.

Educational Background
He holds a Bachelor's degree in Economics from Satya Wacana Christian University in Salatiga.

Johanis Eduard Hede, S.E., M.M

Pemimpin Cabang Oelamasi
Head Branch of Oelamasi

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 16 September 1978
Place / Date of Birth: Kupang / September 16, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Oelamasi sejak Mei 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni : Kepala Sub Divisi Pelaporan dan Wakil Pemimpin Cabang Oelamasi.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Has served as Head Branch of Oelamasi since May 2025.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held key positions at the bank, including: Head of the Reporting Sub-Division and Deputy Branch Manager of Oelamasi.

Educational Background

She holds a Bachelor's degree in Economics from Artha Wacana Christian University in Kupang and a Master's degree in Man-agement from Widya Mandira Catholic University in Kupang.

Yosefina Gudelia Lely, S.Sos

Pemimpin Cabang Maumere
Head Branch of Maumere

Tempat / Tanggal Lahir : Natarmage / 12 Maret 1971
Place/Date of Birth: Natarmage / March 12, 1971

Usia : 54 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Maumere sejak Oktober 2021.

Meniti karier di Bank NTT sejak Januari 1996 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Kas, Kepala Kantor Fungsional RSUD T.C. Hillers, Pemimpin Cabang Pembantu Paga, Pemimpin Cabang Pembantu Kewapante, serta Wakil Pemimpin Cabang Maumere.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Sosial di bidang Adminstrasi Niaga dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Has served as Head Branch of Maumere since October 2021.

She has built his career at Bank NTT since January 1996 and has held key positions at the bank, including: Acting Head of the Cash Office; Head of the Functional Office at T.C. Hillers Regional General Hospital; Assistant Branch Manager in Paga; Assistant Branch Manager in Kewapante; and Deputy Branch Manager of Maumere.

Educational Background

He holds a Bachelor of Social Sciences degree in Business Admin-istration from Nusa Cendana University in Kupang.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Ketut Edy Suryantha, S.T

Pemimpin Cabang Ende
Head Branch of, Ende

Tempat / Tanggal Lahir : Gianyar-Bali / 20 Mei 1979
Place/Date of Birth: Gianyar, Bali / May 20, 1979

Usia : 46 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Juni 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Oelolok, Wakil Pemimpin Cabang Pembatu Weluli, Kepala Sub Divisi Recruitmen dan Penempatan, Pejabat Sementara (Pjs.) Waikabubak, Pemimpin Cabang Bajawa, Pemimpin Cabang Ende.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Teknik bidang Teknik Informatika dari Universitas Atmajaya Jogjakarta.

Has served as Head Branch of, Ende Branch since June 2024.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held key positions at the bank, including: Deputy Assistant Branch Manager of Oelolok, Deputy Assistant Branch Manager of Weluli, Head of the Recruitment and Placement Subdivision, Acting Branch Manager of Waikabubak, and Branch Manager of Bajawa.

Educational Background

He holds a Bachelor of Engineering degree in Computer Engineering from Atmajaya University in Yogyakarta.

Victor Aprilus Basilius Payong Beda, S.E, M.M

Pejabat Sementara Pemimpin Cabang Atambua
Acting Head Branch of Atambua

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang / 15 April 1982
Place / Date of Birth: Kupang / April 15, 1982

Usia : 43 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pejabat Sementara Pemimpin Cabang Atambua sejak Mei 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2011 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Kepala USPD Noemuti, Officer Perencanaan & Anggaran Kantor Pusat, Wakil Pemimpin Cabang SoE, Kepala Sub Divisi Recruitment & Penempatan pada Divisi Sumber Daya Manusia, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Borong, Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional Kantor Cabang Utama Kupang,

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Warmadewa Denpasar dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Has served as Acting Head Branch of Atambua since May 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2011 and has held a number of important positions at Bank NTT, namely:

Head of the Noemuti USPD, Planning & Budgeting Officer at Headquarters, Deputy Branch Manager of SoE, Head of the Re-cruitment & Placement Subdivision within the Human Re-sources Division, Acting (Pjs.) Branch Manager of Borong, and Acting (Pjs.) Deputy Branch Manager for Operations at the Kupang Main Branch Office.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Economics from Warmadewa University in Denpasar and a Master's degree in Management from Widya Mandira Catholic University in Kupang.

Yusuf Hanggar Mawolu, S.Sos

Pemimpin Cabang Waingapu
Head Branch of Waingapu

Tempat / Tanggal Lahir : Waingapu/10 Juli 1978
Place/Date of Birth: Waingapu/July 10, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Waingapu sejak Juni 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yaitu : Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Melolo, Pemimpin Cabang Pembantu Nggongi, Pemimpin Cabang Pembantu Baing, Penjabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Waingapu, Penjabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Anakalang, Pemimpin Cabang Waibakul.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Sosial bidang Adminstrasi Niaga dari Universitas Nusa Cendana Kupang

Has served as Head Branch of Waingapu since June 2024 to the present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held key positions at the bank, including: Deputy Assistant Branch Manager of Melolo, Assistant Branch Manager of Nggongi, Assistant Branch Manager of Baing, Acting (Pjs.) Branch Manager of Waingapu, Acting (Pjs.) Branch Manager of Anakalang, and Branch Manager of Waibakul.

Educational Background

He holds a Bachelor of Social Sciences degree in Business Administration from Nusa Cendana University in Kupang.

Jemmi Romi D. Radjalangu, S.T

Pemimpin Cabang Ruteng
Head Branch of Ruteng

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/29 Mei 1977
Place/Date of Birth: Kupang/May 29, 1977

Usia : 48 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Ruteng sejak Desember 2020.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu: Pemimpin Cabang Pembantu Reo, Pemimpin Cabang Pembantu Mukun, Wakil Pemimpin Cabang Sabu, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Sabu, Pemimpin Cabang Sabu.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Teknik bidang Teknik Elektro –Telekomunikasi Multimedia dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Has served as Head Branch of Ruteng since December 2020 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held a number of key positions at Bank NTT, namely: Assistant Branch Manager of Reo, Assistant Branch Manager of Mukun, Deputy Branch Manager of Sabu, Acting Branch Manager of Sabu, and Branch Manager of Sabu.

Educational Background

He holds a Bachelor of Engineering degree in Electrical Engi-neering – Multimedia Telecommunications from the Sepuluh November Institute of Technology in Surabaya.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Egbert E. D. Balukh, S.E

Pemimpin Cabang Lembata
Head Branch of Lembata

Tempat / Tanggal Lahir : SoE/27 April 1981
Place/Date of Birth: SoE/April 27, 1981

Usia : 44 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Lembata sejak Mei 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejunlah jabatan penting di Bank NTT yaitu: Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Walikota, Kepala Sub Divisi Manajemen Aset pada Divisi Umum, Kepala Sub Divisi Promosi produk pada Divisi Corporate Secretary & Legal, Kepala Sub Divisi Promosi Korporasi & CSR, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang SoE.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universtas Kristen Artha Wacana Kupang.

Has served as Head Branch of Lembata since May 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held several key positions at the bank, including: Deputy Branch Manager for the Deputy Mayor, Head of the Asset Management Subdivision in the General Division, Head of the Product Promotion Subdivision in the Corporate Secretary & Legal Division, Head of the Cor-porate Promotion & CSR Subdivision, and Acting Branch Man-ager (Pjs.) of SoE.

Educational Background

Earned a Bachelor of Economics degree from Artha Wacana Christian University in Kupang.

Marthin Sooai, S.T

Pemimpin Cabang Waikabubak
Head Branch of Waikabubak

Tempat / Tanggal Lahir : Kendal/ 25 November 1981
Place/Date of Birth: Kendal/November 25, 1981

Usia : 44 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Waikabubak sejak Agustus 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menempati beberapa jabatan penting di Bank NTT yaitu : Internal Control Cabang Kefamenanu, Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Mena, Pemimpin Cabang Pembantu Mena, Kepala Sub Divisi Kredit Sindikasi & Pinjaman Daerah pada Divisi Kredit Komersil & Menengah, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Kefamenanu.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Teknik bidang Teknik Sipil dari Universtas Katolik Widya Mandira Kupang.

Has served as Head Branch of Waikabubak since August 2025 to present.

He began his career at Bank NTT in October 2005 and has held several key positions at the bank, including: Internal Control at the Kefamenanu Branch, Deputy Assistant Branch Manager in Mena, Assistant Branch Manager in Mena, Head of the Syndicated Credit & Regional Loans Subdivision within the Commercial & Medium-Sized Credit Division, and Acting Branch Manager of Kefamenanu.

Educational background

He holds a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from Widya Mandira Catholic University in Kupang.

Mikael Johanis, S.P

Pemimpin Cabang SoE
Head Branch of SoE

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/ 16 Mei 1977
Place/Date of Birth: Kupang/May 16, 1977

Usia : 48 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang SoE sejak Juni 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menempati sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu: Kepala USPD Weliman, Pemimpin Cabang Pembantu Niki-Niki, Pemimpin Cabang Pembantu Lewa, Wakil Pemimpin Cabang Sabu, Pemimpin Cabang Sabu, Pemimpin Cabang Larantuka.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian di bidang Agronomi dari Universitas Mercubuana Jogjakarta.

Has served as Head Branch of SoE since June 2024 to the present.

He began his career at Bank NTT in October 2005 and has held several key positions at the bank, including: Head of the Weliman USPD, Assistant Branch Manager of Niki-Niki, Assistant Branch Manager of Lewa, Deputy Branch Manager of Sabu, Branch Manager of Sabu, and Branch Manager of Larantuka.

Educational Background

He holds a Bachelor of Agriculture degree in Agronomy from Mercubuana University in Yogyakarta.

Patrisius Iwan Pindu Amahu, S.Pt

Pemimpin Cabang Larantuka
Head Branch of Larantuka

Tempat / Tanggal Lahir : Waingapu/ 20 Juli 1978
Place / Date of Birth: Waingapu / July 20, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Larantuka sejak Agustus 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menempati sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Nggongi, Pemimpin Cabang Pembantu Nggongi, Kepala Sub Divisi Penyelamatan Kredit Kantor Pusat, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Waitabula.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Peternakan dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Has served as Head Branch of Larantuka since August 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held several key positions at the bank, including: Deputy Assistant Branch Manager of Nggongi, Assistant Branch Manager of Nggongi, Head of the Credit Recovery Sub-division at the Head Office, and Acting Branch Manager of Waitabula.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Animal Science from Nusa Cendana University in Kupang.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Jorsalino R. Seran, S.E

Pemimpin Cabang Kefamenanu
Head Branch of Kefamenanu

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/ 19 Oktober 1981
Place/Date of Birth: Kupang/October 19, 1981

Usia : 44 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Kefamenanu sejak Mei 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Resident Inspector pada Cabang Pembantu Betun, Internal Auditor pada Divisi Pengawasan & SKAI, Inspektur Wilayah I Divisi Pengawasan &SKAI, Wakil Pemimpin Cabang Anakang, Wakil Pemimpin Cabang Kefamenanu, Wakil Pemimpin Cabang SoE, Pejabat Sementara (Pjs.) Cabang Bajawa.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang.

Has served as Head Branch of Kefamenanu since May 2025 to present.

Has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held several key positions at Bank NTT, namely: Resident Inspector at the Betun Sub-Branch, Internal Auditor at the Supervision & SKAI Division, and Regional In-spector I at the Supervision & SKAI Division. Deputy Branch Manager of Anakalang, Deputy Branch Manager of Kefamenanu, Deputy Branch Manager of SoE, Acting (Pjs.) Branch Manager of Bajawa.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Economics from the School of Management (STIM) in Kupang.

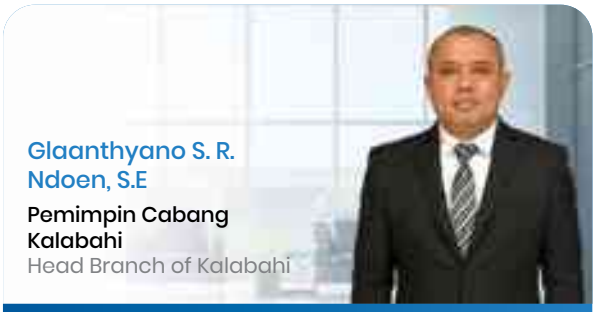

Glaanthyano S. R. Ndoen, S.E

Pemimpin Cabang Kalabahi
Head Branch of Kalabahi

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/ 18 Agustus 1978
Place/Date of Birth: Kupang/August 18, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Kalabahi sejak Agustus 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Resident Inspector Kantor cabang Utama Kupang, Asisten Manager Operasional Kantor Cabang Pembantu Lewa, Internal Auditor pada Divisi Pengawasan & SKAI, Kepala Sub Divisi Pelaporan Risiko pada Divisi Manajemen Risiko.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Has served as Head Branch of Kalabahi since August 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held a number of key positions at Bank NTT, namely: Resident Inspector at the Kupang Main Branch, Assis-tant Operations Manager at the Lewa Sub-Branch, Internal Auditor in the Supervision & SKAI Division, and Head of the Risk Reporting Sub-Division in the Risk Management Division.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Economics from Artha Waca-na Christian University in Kupang.

Boy Reynaldo Nunuhitu, A.Md

Pemimpin Cabang Labuan Bajo
Head Branch of, Labuan Bajo

Tempat / Tanggal Lahir : Atambua/ 25 Oktober 1975
Place/Date of Birth: Atambua/October 25, 1975

Usia : 50 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Labuan Bajo sejak Mei 2023.

Meniti karier di Bank NTT sejak Desember 2004 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Wakil Pemimpin Cabang Baun, Kepala Sub Divisi Pertanian/Peternakan pada Divisi Kredit Kantor Pusat, Kepala Sub Divisi Mikro pada Divisi Kredit Kantor Pusat, Head Goup Bisnis Mikro pada Divisi Kredit Kantor Pusat, Pemimpin Cabang Oelamasi, Pemimpin Cabang Utama Kupang.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Diploma III bidang Keuangan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Kerjasama Jogjakarta

Has served as Head Branch of Labuan Bajo since May 2023 to present.

He has built his career at Bank NTT since December 2004 and has held several key positions at Bank NTT, namely: Deputy Branch Manager of Baun, Head of the Agriculture/Livestock Subdivision in the Credit Division at Headquarters, Head of the Micro Subdivision in the Credit Division at Headquarters, Head of the Micro Business Group in the Credit Division at Headquarters, and Branch Manager of Oelamasi. Main Branch Manager of Kupang.

Educational Background

Earned a Diploma III in Banking and Finance from the Jogjakarta Cooperative School of Economics (STIE)

Ade Roni Oematan, S.Kom

Pemimpin Cabang Rote Ndao
Head Branch ofRote Ndao

Tempat / Tanggal Lahir : Merdeka / 13 Agustus 1984
Place/Date of Birth: Merdeka / August 13, 1984

Usia : 41 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Rote Ndao.

Meniti karier di Bank NTT sejak Februari 2009 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Kepala Sub Divisi Interface pada Divisi Teknologi Informasi, Kepala Sub Divisi Pengembangan Produk & Digital Loan pada Divisi Supporting Kredit.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Komunikasi bidang Manajemen Informatika dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang.

Has served as Head Branch of Rote Ndao since January 2024 to the present.

He has built his ca-reer at Bank NTT since February 2009 and has held several key positions at the bank, including: Head of the Interface Subdivi-sion within the Information Technology Division, and Head of the Product Development & Digital Loans Subdivision within the Credit Support Division.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Communication with a major in Information Management from the Uyelindo Kupang School of Computer Science (STIKOM).

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Gilbert Daud, S.H

Pemimpin Cabang Waibakul
Head Branch of Waibakul

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/ 23 Maret 1982
Place/Date of Birth: Kupang/March 23, 1982

Usia : 43 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Waibakul sejak Juni 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Februari 2009 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Officer Merchant, Officer Electronic Data Capture (EDC), Kepala Sub Divisi Digital Funding Business, Kepala Sub Divisi Protokol Perusahaan & Kesekretariatan, Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Nusa Cendana Kupang

Has served as Head Branch of Waibakul since June 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since February 2009 and has held a number of key positions at Bank NTT, namely: Merchant Officer, Electronic Data Capture (EDC) Officer, Head of the Digital Funding Business Subdivision, Head of the Corporate Protocol & Secretariat Subdivision, and Acting Deputy Branch Manager for Operations.

Educational Background

He holds a Bachelor of Laws degree from Nusa Cendana Uni-versity in Kupang.

Yorry R.M. Blegur, S.E

Pemimpin Cabang Betun
Head Branch of Betun

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/ 09 Juni 1982
Place/Date of Birth: Kupang/June 9, 1982

Usia : 43 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Betun sejak Maret 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Kepala Kantor Kas Pagal, Kepala Kantor Kas Liliba, Pemimpin Cabang Takari, Wakil Pemimpin Cabang Betun, Wakil Pemimpin Cabang Kefamenanu, Kepala Sub Divisi Pengembangan & Kebijakan Produk pada Divisi Dana dan Jasa.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Has served as Head Branch of Betun since March 2025.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 to the present and has held a number of important positions at Bank NTT, namely: Head of the Pagal Cash Office, Head of the Liliba Cash Office, Branch Manager of Takari, Deputy Branch Man-ager of Betun, Deputy Branch Manager of Kefamenanu, and Head of the Product Development & Policy Sub-Division in the Funds and Services Division.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Economics from Artha Waca-na Christian University in Kupang.

Machsi J.H. Tasekeb, S.E

Pemimpin Cabang Borong
Head Branch of Borong

Tempat / Tanggal Lahir : Hundihuk/07 Mei 1980
Place/Date of Birth: Hundihuk/ May 07, 1980

Usia : 45 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Borong sejak Agustus 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Officer Perencanaan & Anggaran, Pejabat Sementara (Pjs.) Kualitas Pelayanan dan Pengaduan Konsumen, Wakil Kepala Divisi Riset dan Pengembangan.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Has served as Head Branch of Borong since August 2025 to present.

Has built a career at Bank NTT since October 2005 and has held several key positions at Bank NTT, including: Planning & Budgeting Officer, Acting Head of Service Quality and Consumer Complaints, and Deputy Head of the Research and Development Division.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Economics from Artha Waca-na Christian University in Kupang.

Petrus Soba Lewar, S.E

Pemimpin Cabang Mbay
Head Branch of Mbay

Tempat / Tanggal Lahir : Pamakayo/03 Februari 1973
Place/Date of Birth: Pamakayo/February 3, 1973

Usia : 52 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Mbay sejak Maret 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak Juni 2001 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Pemimpin Cabang Pembantu Wairiang, Wakil Pemimpin Cabang Borong, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Lewoleba.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang.

Has served as Head Branch of Mbay since March 2024 to pre-sent.

He began his career at Bank NTT in June 2001 and has held several key positions at Bank NTT, including: Assistant Branch Manager of Wairiang, Deputy Branch Manager of Bo-rong, and Acting Branch Manager of Lewoleba.

Educational Background

Earned a Bachelor's degree in Economics from the School of Management (STIM) in Kupang.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE PROFILE

Yusthinus M. N. Dunga, S.Kom

Pejabat Sementara Pemimpin Cabang Waitabula
Acting Head Branch of Waitabula

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang/28 Juli 1982
Place/Date of Birth: Kupang/July 28, 1982

Usia : 43 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Waitabula sejak Mei 2025.

Meniti karier di Bank NTT sejak Februari 2009 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Kepala Kantor USPD Wajewa Barat- Waemangura, Kepala USPD Kota Baru, Kepala USPD Eban, Officer Pelaporan & Penyelesaian Kredit Kantor Pusat, Officer Peternakan Kantor Pusat, Kepala Kantor Fungsional Camplong, Kepala Sub Divisi Protokol Perusahaan & Kesekretariatan.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Komunikasi bidang Teknik Informatika dari Institut Sains dan Teknologi Palapa Malang.

Has served as Acting Head Branch of Waitabula since May 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since February 2009 and has held a number of important posi-tions at Bank NTT, namely: Head of the West Wajewa-Waemangura USPD Office, Head of the Kota Baru USPD, Head of the Eban USPD, Credit Reporting & Settlement Officer at Headquarters, Livestock Officer at Headquarters, Head of the Camplong Functional Office, and Head of the Corporate Proto-col & Secretariat Sub-Division.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Communication with a major in Information Technology from the Palapa Institute of Science and Technology in Malang.

Mathias Nara Tifaona, S.E

Pemimpin Cabang Sabu
Head Branch of Sabu

Tempat / Tanggal Lahir : Hadakewa/06 Oktober 1978
Place/Date of Birth: Hadakewa/October 6, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Sabu sejak Maret 2024.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yaitu : Kepala USPD Sabu Timur, Kepala Kantor Kas RSUD Larantuka, Pemimpin Cabang Pembantu Boru, Wakil Pemimpin Cabang Sabu, Wakil Pemimpin Cabang Larantuka, Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Mbay.

Latar belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Has served as Head Branch of Sabu since March 2024 to the present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held several key positions at the bank, including: Head of the Sabu Timur USPD, Head of the Larantuka Regional General Hospital Cash Office, Assis-tant Branch Manager of Boru, Deputy Branch Manager of Sa-bu, Deputy Branch Manager of Larantuka, and Acting Branch Manager of Mbay.

Educational Background

He holds a Bachelor's degree in Economics from Widya Man-dira Catholic University in Kupang.

Devideris D. Harri Seso, S.H
Pejabat Sementara
Pemimpin Cabang Bajawa
Acting Head Branch
of Bajawa

Tempat / Tanggal Lahir : Bajawa / 01 Oktober 1978
Place/Date of Birth: Bajawa / October 1, 1978

Usia : 47 tahun/year
Age

Kewarganegaraan : Indonesia
Nationality

Menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Pemimpin Cabang Bajawa sejak Mei 2025 sampai sekarang.

Meniti karier di Bank NTT sejak Oktober 2005 dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Bank NTT yakni: Kepala USPD Golewa, Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Mukun, Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Aimere, Pemimpin Cabang Pembantu Aimere, Wakil Pemimpin Cabang Bajawa, Wakil Pemimpin Cabang Waingapu, Wakil Pemimpin Cabang Borong, Wakil Pemimpin Cabang Bajawa.

Latar belakang pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Negeri Jember.

Has served as Acting Head Branch of Bajawa since May 2025 to present.

He has built his career at Bank NTT since October 2005 and has held a number of important positions at Bank NTT, name-ly: Head of the Golewa USPD, Deputy Assistant Branch Man-ager of Mukun, Deputy Assistant Branch Manager of Aimere, Assistant Branch Manager of Aimere, Deputy Branch Manager of Bajawa, Deputy Branch Manager of Waingapu, Deputy Branch Manager of Borong, and Deputy Branch Manager of Bajawa.

Educational Background
He holds a Bachelor of Law degree from Jember State Univer-sity.

SETOR PINJAMAN KPR &
MIKRO MERDEKA
SMART BRANCH SYSTEM

Profil Perusahaan
Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN
COMPANY IDENTITY

Nama
Name
PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Call Name
Bank NTT

Bidang Usaha
Business
Perbankan
Banking

Status
Status
Bank Umum (Tertutup)
Commercial Bank (Closed)

Alamat Kantor Pusat
Headquarters Address
Jl. W. J. Lalamentik No. 102
Kupang

Kode Pos
Zip Code
85111

Telepon
Phone
0380 – 840555 (hunting)

Whistle Blowing System
Whistle Blowing System

Email
Email
wbs@bpdntt.co.id

Telepon/WA
Phone/WA
08113835187

Call Center Halo Bank NTT
Halo Bank NTT Call Center
14013

Whats App Call Center Bank NTT
Bank NTT WhatsApp Call Center
08113814013

Website
Website
www.bpdntt.co.id

Email
Email
banknt@bpdntt.co.id

Facebook
Humas Bpd Ntt

Instagram
bank_ntt

Youtube
Humas Bpd Ntt

SWIFT
PDNTIDJA

Hasil Pemeringkatan Perusahaan
Company Rating Results
idA-I Stable (Single A minus. Stable Outlook)

Tanggal Berdiri
Date of Establishment
17 Juli 1962 July 17, 1962

NPWP
NPWP
01.126.733.3-922.0.00

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis for Establishment

Akta No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat dihadapan Casper Melkior Keluanan Amalo (Wakil Notaris Sementara di Kupang)

Deed No. 12 dated October 18, 1961, executed before Casper Melkior Keluanan Amalo (Acting Deputy Notary in Kupang)

SIUP
Business License

Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Decision of the Minister of Finance and the Cent-ral Bank No: BUM 9-13/II dated February 5, 1962 regarding the Granting of a Business License to PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Tanda Daftar Perusahaan
Company Registration Number

24.13.1.65.00382

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp. 7.000.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Paid-in Capital

Rp. 2.209.536.800.000,-

Pemegang Saham
Shareholders

Pemerintah Daerah Provinsi NTT, Bank Jatim, Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten se-NTT (Saham Seri A : 99,94%)
Perorangan (Saham Seri B : 0,06%)

The NTT Provincial Government. Bank Jatim. Kupang City Government. Regencies throughout NTT (Series A Shares: 99.94%)
Individuals (Series B Shares: 0.06%)

Total Aset
Total Assets

Rp. 20.092.884.511.703,-

Jumlah Pegawai
Number of Employees

2.005 orang orang

Jaringan Kantor
Office Network

1	Unit Kantor Pusat Head Office
1	Unit Kantor Cabang Utama Main Branch Office
1	Unit Kantor Cabang Khusus Special Branch Office
21	Unit Kantor Cabang Branch Offices
46	Unit Kantor Cabang Pembantu Sub Branch Offices
117	Unit Kantor Fungsional Functional Offices
28	Unit Payment Point Payment Point Units
8	Unit Kas Mobil Keliling Mobile Cash Units

Jumlah Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) & Mesin Cash Recycle Machine (CRM)
Total Number of ATMs & Cash Recycle Ma-chines (CRMs)

248 Unit

Jumlah Elektronic Data Capture (EDC)
Total Electronic Data Capture (EDC) Terminals

948 Merchant

Jumlah Pengguna Mobile Banking Bank NTT
Number of Bank NTT Mobile Banking Users

145.959 pengguna users

Jumlah Pengguna CMS Bank NTT
Number of Bank NTT CMS Users

5.863 pengguna users

Jumlah Agen Laku Pandai
Number of Laku Pandai Agents

1.740 Unit Unit

Jumlah Agen Di@ Bisa Bank NTT
Number of Di@ Bisa Bank NTT Agents

1.887 agen agents

Jumlah Penggguna Kartu ATM Bank NTT
Number of Bank NTT ATM Cardholders

467.674 pengguna users

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF COMPANY HISTORY

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disingkat PT. Bank NTT (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, abbreviated as PT. Bank NTT (hereinafter referred to as the "Company"), was established under the name PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur based on Deed of Establishment No. 12 dated October 18, 1961, executed before Casper Melchior Keluanan Amalo, acting notary in Kupang.

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mulai melakukan kegiatannya sebagai bank pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Bank Sentral No: BUM 9-13/II tanggal 5 Februari 1962 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dengan kedudukan tempat usaha di Kupang Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur commenced its operations as a bank on July 17, 1962, pursuant to the Decree of the Minister of Finance and the Central Bank No. BUM 9-13/II dated February 5, 1962, regarding the Granting of a Business License to PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, with its place of business in Kupang, the capital of East Nusa Tenggara Province.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59. Tambahan Lembaran Negara No.2490). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963.

In accordance with the provisions of Law No. 13 of 1962 on the Basic Provisions of Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No. 59. Supplement to the State Gazette No. 2490), the Government of East Nusa Tenggara Province established the change in the legal status of the East Nusa Tenggara Development Bank from a Limited Liability Company to a Regional Enterprise through East Nusa Tenggara Level I Regional Regulation No. 01/pd/DPRD-GR/1963 dated March 12, 1963.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah. Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1998 dated February 4, 1998, regarding the Legal Form of Regional Development Banks, the Bank again changed its legal form from a Regional Enterprise back to a Limited Liability Company (PT). The change in the Bank's legal form was established in East Nusa Tenggara First-Level Provincial Regulation No. 3 of 1999 dated March 26, 1999, regarding the Change in the Legal Form of the East Nusa Tenggara First-Level Provincial Regional Development Bank ( ) from a Regional Enterprise to a Limited Liability Company, which was approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia pursuant to Decision No. 584.63-345 dated April 20, 1999, regarding the Approval of Regional Regulation of the First-Level Province of East Nusa Tenggara No. 3 of 1999 concerning the Change in Legal Form of the Regional Development Bank of the First-Level Province of East Nusa Tenggara from a Regional Enterprise to a Limited Liability Company, the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara.

Penyesuaian bentuk hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. yang telah memperolah pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan Nomor 3491.

The conversion of the Bank's legal form into a Limited Liability Company was formalized in Notarial Deed No. 122 dated April 22, 1999, executed before Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., and approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia pursuant to Minister of Justice Decision No. C2-8228.HT.01.01.TH 99 dated May 5, 1999, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated June 11, 1999, Supplement No. 3491.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 maka telah dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2008. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan dalam akta No.26 tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Emmanuel Mali, S.H. notaris di Kupang dan telah mendapat persetujuan

To comply with the provisions of Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, amendments to the Articles of Association were made through an Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 10, 2008. The resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders was recorded in Deed No. 26 dated June 6, 2008, executed before Emmanuel Mali, S.H., a notary in Kupang, and received approval from the Minister of

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-48098. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008 Tambahan Nomor 19417.

Pada tahun 1999, Perseroan menjadi salah satu Bank Pembangunan Daerah yang masuk Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah karena mempunyai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil dari 8% (delapan persen). Dalam rangka pelaksanaan hak opsi (*call option*), tanggal 18 Desember 2003, dilaksanakan Perjanjian Jual Beli Seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2004. Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 46.600 (empat puluh enam ribu enam ratus) saham miliknya dalam Perseroan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perubahan penting lainnya adalah mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp 500.000.000.000,- menjadi Rp1.000.000.000.000,- yang dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 73 tanggal 15 November 2010 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. notaris di Kupang. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-18804.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 14 April 2011.

Pada bulan Juli 2011, Perseroan menerbitkan obligasi sebesar Rp. 500 miliar dengan suku bunga tetap yang telah digunakan untuk pendanaan jangka panjang dalam rangka ekspansi Perseroan.

Bank NTT kembali melakukan Perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.8 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Lalu Muhamad Supriandi, S.H. M.Kn. notaris di Labuan Bajo mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp1.000.000.000.000,- menjadi Rp4.000.000.000.000,- . Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-0011840.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016.

Law and Human Rights of the Republic of Indonesia via Decision Letter No. AHU-48098.AH.01.02 of 2008 dated August 5, 2008, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 7, 2008, Supplement No. 19417.

In 1999, the Company became one of the Regional Development Banks included in the Regional Development Bank Recapitalization Program because its Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) was less than 8% (eight percent). In connection with the exercise of the call option on December 18, 2003, the Agreement for the Sale and Purchase of All State Shares and the Redemption of State Bonds at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur was executed on June 30, 2004. The Republic of Indonesia, acting through the Government of the Republic of Indonesia, transferred 46,600 (forty-six thousand six hundred) shares it held in the Company to the Government of East Nusa Tenggara Province.

Another significant change concerns the increase in the Bank's authorized capital from Rp 500,000,000,000 to Rp 1,000,000,000,000.- as stated in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 73 dated November 15, 2010, drawn up before Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., a notary in Kupang. This change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-18804.AH.01.02.2011 dated April 14, 2011.

In July 2011, the Company issued bonds totaling Rp. 500 billion with a fixed interest rate, which were used for long-term financing in support of the Company's expansion.

Bank NTT again amended the Bank's Articles of Association based on the Deed of the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 8 dated May 27, 2016, executed before Notary Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., in Labuan Bajo, regarding the change in the Bank's authorized capital from Rp1,000,000,000,000 to Rp4,000,000,000,000. S.H. M.Kn., a notary in Labuan Bajo, regarding the change in the Bank's authorized capital from Rp1,000,000,000,000 to Rp4,000,000,000,000. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter No. AHU-0011840.AH.01.02.Year 2016 dated June 22, 2016.

Dari perubahan Modal Dasar Perseroan Bank NTT sebagaimana disampaikan di atas, posisi modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada akhir Desember 2016 telah mencapai Rp1.081.098.350.000,- (satu triliun delapan puluh satu milliar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Upaya manajemen Bank NTT dalam mengembangkan usaha bank ini mendapatkan dukungan pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-NTT yang secara konsisten melakukan tambahan setoran modal dan menempatkan dana-dana Pemerintah Daerah di Bank NTT.

As a result of the changes to Bank NTT's authorized capital as described above, the amount of paid-in capital as of the end of December 2016 reached Rp1,081,098,350,000 (one trillion eighty-one billion ninety-eight million three hundred fifty thousand rupiah). Bank NTT's management efforts to develop the bank's operations have received support from shareholders—namely the Provincial Government and the cities/regencies throughout NTT—who have consistently made additional capital contributions and placed local government funds in Bank NTT.

Pada tanggal 13 November 2017 Bank NTT menerbitkan Surat Berharga "Negotiable Certificate of Deposit I Bank NTT" dengan nominal sebesar Rp.450.000.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Miliar).

On November 13, 2017, Bank NTT issued the "Negotiable Certificate of Deposit I Bank NTT" with a face value of Rp450,000,000,000 (four hundred fifty billion rupiah).

Pada tanggal 21 Desember 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 500 miliar dengan suku bunga tetap yang telah digunakan untuk pendanaan jangka panjang dalam rangka ekspansi Perseroan.

On December 21, 2018, the Company issued the Bank NTT Continuous Bond I Phase I 2018 in the amount of Rp. 500 billion with a fixed interest rate, which has been used for long-term financing in support of the Company's expansion.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank berdasarkan Akta Penyertaan Persetujuan Penambahan Setoran Modal ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.M.Kn. notaris di Kupang mengenai perubahan Modal Dasar bank dari Rp 4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah) menjadi Rp 7.000.000.000.000,- (Tujuh Triliun Rupiah) akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0010766. AH.01.02 tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022.

The latest amendment to the Bank's Articles of Association is based on the Deed of Approval for the Increase in Capital Contribution to PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 4 dated February 7, 2022, executed before Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. in Kupang regarding the change in the Bank's Authorized Capital from Rp 4,000,000,000,000.- (Four Trillion Rupiah) to Rp 7,000,000,000,000.- (Seven Trillion Rupiah). This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decision No. AHU-0010766.AH.01.02 of 2022 dated February 12, 2022.

Pada tahun 2023 Bank NTT resmi menjadi Bank Devisa yakni bank yang dapat menjalankan usaha dalam valuta asing (valas) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.03/2023 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

In 2023, Bank NTT officially became a Foreign Exchange Bank, meaning a bank authorized to conduct business in foreign currency (forex), pursuant to Decision No. KEP-62/D.03/2023 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Granting of a License to Conduct Business Activities in Foreign Currency for PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2024 guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum maka pada tanggal 16 Desember 2024 telah dilakukan penandatanganan *Share Holder Agreement* dan penandatanganan Perjanjian Kepatuhan antara Bank Jatim dengan Bank NTT di Surabaya dalam format Kerjasama Usaha Bank (KUB).

In 2024, to comply with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 12/POJK.03/2020 on the Consolidation of Commercial Banks, a Shareholder Agreement and a Compliance Agreement were signed on December 16, 2024, between Bank Jatim and Bank NTT in Surabaya under the framework of a Bank Business Cooperation (KUB).

Sebagai tindak lanjut atas KUB dimaksud maka Bank Jatim telah melakukan realisasi penyetoran modal kepada Bank NTT sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) pada tanggal 30 September 2025 setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor : S-141/KO.14/2025, tanggal 28 Juli 2025, Hal : Persetujuan Penyertaan Modal PT. BPD Nusa Tenggara Timur.

As a follow-up to the aforementioned KUB, Bank Jatim has made a capital injection to Bank NTT in the amount of Rp 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) on September 30, 2025, after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) of East Java- , through Letter No. S-141/KO.14/2025 dated July 28, 2025, regarding Approval of Capital Contribution to PT. BPD Nusa Tenggara Timur.

BIDANG USAHA

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian Pendirian Perseroan No. 122 tanggal 22 April 1999 (berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 UU No.1/1995) Bank NTT bergerak dalam bidang usaha perbankan dengan Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberi Kredit.
c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   - Surat-surat Wesel termasuk Wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
   - Surat Pengakuan Hutang dan Kertas Dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
   - Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
   - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   - Obligasi.
   - Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
   - Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.

BUSINESS FIELDS

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Company's Articles of Association as stipulated in the Deed of Incorporation No. 122 dated April 22, 1999 (pursuant to Article 8(1) and Article 12 of Law No. 1 of 1995), Bank NTT operates in the banking sector, with the Company's business activities including:

a. Collecting funds from the public in the form of deposits, including demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings accounts, and/or other forms deemed equivalent thereto.
b. Granting loans.
c. Issuing promissory notes.
d. Buying, selling, or guaranteeing, at its own risk or for the benefit of and at the instruction of its customers:
   - Bills of exchange, including those accepted by the Bank, with a validity period not exceeding the customary practice in the trade of such instruments.
   - Promissory notes and other commercial papers with a validity period not exceeding the customary practice in the trade of such instruments.
   - Treasury Bills and Government Guarantees.
   - Bank Indonesia Certificates (SBI).
   - Bonds.
   - Commercial papers with a maturity of up to 1 (one) year.
   - Other Securities with a maturity of up to 1 (one) year.
e. Transferring funds for both personal and customer purposes.
f. Placing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other banks using written instruments, telecommunications, or through money orders, checks, or other means.

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
l. Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
m. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh yang berwenang.
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku.
q. Membantu Pemerintah Daerah dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Receiving payments for bills of exchange and settling accounts with or through third parties.
h. Providing a place to store goods and securities.
i. Conducting custody activities for the benefit of another party based on a contract.
j. Placing funds from one customer to another in the form of securities not listed on the Stock Exchange.
k. Purchasing collateral, either in whole or in part, through an auction in the event that a debtor fails to fulfill their obligations to the Bank, provided that the purchased collateral must be liquidated as soon as possible.
l. Conducting factoring activities, credit card business, and trustee activities.
m. Conducting foreign exchange activities and/or acting as a foreign exchange bank in compliance with regulations established by the competent authorities.
n. Engaging in equity investment activities in banks or other financial institutions, such as leasing, venture capital, securities companies, insurance, and clearing, settlement, and custody institutions, in compliance with the regulations established by the competent authorities.
o. Engaging in temporary capital participation to address the consequences of credit defaults, provided that the participation is withdrawn in accordance with the regulations established by the competent authority.
p. Acting as a founder of a pension fund in accordance with the provisions of applicable pension fund regulations.
q. Assisting local governments in developing Rural Credit Banks (BPR) owned by the East Nusa Tenggara Provincial Government (Level I) and the Regency/ Municipal Governments (Level II).
r. Conducting other activities commonly carried out by banks, provided they do not conflict with applicable laws and regulations.

PRODUK DAN LAYANAN
PRODUCTS AND SERVICES

PRODUK DANA
FUND PRODUCTS

GIRO
CHECKING ACCOUNT

Merupakan simpanan masyarakat atau nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Pemindahbukuan dan sarana pembayaran lainnya.

A deposit held by the public or customers that can be withdrawn at any time using checks, giro notes, transfers, and other payment methods.

Jenis giro yang dimiliki oleh Bank NTT yaitu :

The types of checking accounts offered by Bank NTT are:

Giro Pemerintah Pusat : fasilitas Rekening Giro yang diperuntukan bagi instansi pemerintah pusat, instansi vertikal yang merupakan perwakilan pemerintah pusat, Kementerian dan Instansi Lainnya.

Central Government Checking Account: A checking account facility intended for central government agencies, vertical agencies acting as representatives of the central government, ministries, and other agencies.

Giro Pemerintah Daerah : merupakan Fasilitas Rekening Giro yang diperuntukkan bagi Instansi / Lembaga di lingkungan Oragnisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dalam pengelolaan keuangan Non Kasda / Non Kas Umum Daerah.

Local Government Checking Account: A checking account facility intended for agencies/institutions within the local government apparatus of provincial, city, or regency governments for the management of non-Kasda (non-general local government) funds.

Giro Swasta : merupakan Fasilitas Giro yang diperuntukkan bagi perorangan, Badan Usaha, Koperasi atau Yayasan dan lain-lain.

Private Checking Account: A checking account facility intended for individuals, business entities, cooperatives, foundations, and others.

Giro Valas : merupakan Fasilitas Giro yang diperuntukkan bagi perorangan atau Badan Usaha dalam mata uang asing.

Foreign Currency Checking Account: a checking account facility intended for individuals or business entities in foreign currency.

TABUNGAN
SAVINGS

Tabungan Simpeda
Tabungan SIMPEDA atau Simpanan Pembangunan Daerah merupakan tabungan milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diluncurkan pada bulan April 1990. Tabungan SIMPEDA dirancang sebagai alat pemersatu Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.

Tabungan Flobamora
Merupakan produk Tabungan Bank NTT yang fungsi serta keunggulannya sama dengan Tabungan Simpeda namun berbeda dalam hal undian berhadiah.

Tabungan Pesiar
Diluncurkan pada tahun 2008 dengan *call name* awal Tabungan Ziarah sebelum dirubah dengan *call name* Tabungan Pesiar, merupakan Tabungan yang khusus disiapkan bagi umat beragama untuk menabung sesuai rencana pelaksanaan ibadah sucinya atau diperuntukkan bagi nasabah yang merencanakan perjalanan wisata ke kota-kota suci seperti Jerusalem, Vatikan dan sebagai Tabungan Haji bagi yang beragama Muslim.

TabunganKu
Merupakan Tabungan Nasional program Bank Indonesia, yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa dan masyarakat menengah kebawah dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Tabungan Simpel
Merupakan Tabungan Nasional "Simpanan Pelajar" produk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diperuntukan bagi pelajar sejak usia dini /PAUD hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan setoran awal minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Simpeda Savings
SIMPEDA Savings, or Regional Development Savings, is a savings product of Regional Development Banks (BPD) launched in April 1990. SIMPEDA Savings was designed as a unifying tool for Regional Development Banks (BPD) throughout Indonesia.

Flobamora Savings
This is a savings product of Bank NTT whose functions and advantages are the same as those of Simpeda Savings, but it differs in terms of prize draws.

Pesiar Savings
Launched in 2008 under the initial name "Tabungan Ziarah" before being renamed "Tabungan Pesiar," this savings account is specifically designed for religious believers to save for their planned religious pilgrimages or for customers planning trips to holy cities such as Jerusalem and the Vatican, and serves as a Hajj savings account for Muslims.

TabunganKu
This is a National Savings program by Bank Indonesia intended for students and the lower-middle class, with a minimum initial deposit of Rp. 20,000 (twenty thousand rupiah).

Simpel Savings
This is the "Student Savings" National Savings product from the Financial Services Authority (OJK). It is intended for students from early childhood education (PAUD) through high school (SMU) with a minimum initial deposit of Rp. 5,000 (five thousand rupiah).

Tabungan Pensiun

Merupakan tabungan berjangka yang pengendapan dan simpanannya sampai dengan jangka waktu batas usia pensiun (BUP), tidak dikenakan biaya administrasi dan suku bunga menarik. Tabungan Pensiun Bank NTT, singkatan/call name "TENUN NTT" merupakan pengembangan produk baru simpanan tabungan Bank NTT.

Retirement Savings

This is a term savings account where deposits are held until the retirement age limit (BUP). It has no administrative fees and offers attractive interest rates. Bank NTT's Pension Savings, abbreviated as "TENUN NTT," is a new savings product developed by Bank NTT.

Tabungan Flobamora Valas

Merupakan produk tabungan dalam mata uang asing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Flobamora Foreign Currency Savings

This is a foreign currency savings product guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

DEPOSITO
DEPOSITS

Deposito Rupiah

Merupakan simpanan berjangka yang diperuntukan bagi Perorangan. Pemerintah maupun Badan Usaha dengan jangka waktu bervariasi antara 1 bulan sampai dengan 24 bulan dalam mata uang rupiah, dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) sesuai konfirmasi awal dan dapat dijadikan jaminan kredit (*cash collateral*).

Rupiah Deposit

This is a time deposit intended for individuals, government entities, and businesses, with terms ranging from 1 month to 24 months in Indonesian rupiah ( ). It can be automatically renewed (automatic rollover) in accordance with the initial agreement and can be used as cash collateral.

Deposito Bebas

Merupakan simpanan berjangka yang diperuntukan bagi perorangan maupun Badan Usaha dengan jangka waktu bervariasi antara 1 bulan sampai dengan 24 bulan dalam mata uang rupiah yang dapat dicairkan sewaktu- waktu sebelum jangka waktu jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti.

Flexible Deposit

This is a time deposit intended for individuals and business entities with terms ranging from 1 month to 24 months in Indonesian rupiah that can be withdrawn at any time before maturity without incurring a penalty.

Deposito Valas

Merupakan simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi Perorangan maupun Badan Usaha dengan jangka waktu bervariasi antara 1 bulan sampai 24 bulan dalam mata uang asing dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Foreign Currency Time Deposit

A time deposit intended for individuals and business entities with terms ranging from 1 month to 24 months in foreign currency and guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

PRODUK KREDIT
LOAN PRODUCTS

PRODUK KREDIT KONSUMSI
CONSUMER LOAN PRODUCTS

Kredit Multi Guna
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan Pegawai Swasta untuk keperluan konsumtif dengan suku bunga yang kompetitif, layanan yang mudah dan proses yang cepat.

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank NTT adalah KPR yang bekerjasama dengan developer, KPR Tapera, KPR swadaya, KPR pembelian rumah jadi/bekas, KPR re-finance, KPR renovasi / perbaikan rumah, KPR bersubsidi dan non subsidi pemerintah.

Kredit Kesejahteraan Pegawai
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Bank NTT untuk pembelian/ pembangunan/ renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor maupun untuk keperluan lainnya, Kredit tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan tingkat suku bunga sebesar 5 % - 8% pertahun dengan jangka waktu 1 sampai dengan 26 tahun.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Merupakan fasilitas kredit pembelian kendaraan bermotor tanpa uang muka dengan suku bunga kompetitif.

Kredit Pra Pensiun
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif sampai dengan nasabah memasuki masa pensiun dengan jangka waktu pinjaman tertentu.

Kredit Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki usia pensiun, penerima pensiun janda atau duda dengan jangka waktu tertentu.

Multi-Purpose Loan
A credit facility provided to civil servants (PNS) and private-sector employees for consumer needs, featuring competitive interest rates, convenient services, and a fast processing time.

Home Ownership Loan (KPR)
A credit facility provided for the construction of new homes or home renovations for Civil Servants and employees. Bank NTT's Home Ownership Loan (KPR) is a KPR program in collaboration with Tapera KPR developers, self-help KPR, KPR for the purchase of new or used homes, KPR refinancing, KPR for home renovations/repairs, and government-subsidized and non-subsidized KPR.

Employee Welfare Loan
This is a credit facility provided to Bank NTT employees for the purchase, construction, or renovation of homes, the purchase of motor vehicles, or other purposes. This loan is provided with the aim of improving employee welfare, featuring an interest rate of 5%–8% per year and a term ranging from 1 to 26 years.

Motor Vehicle Loan (KKB)
This is a credit facility for the purchase of motor vehicles with no down payment and competitive interest rates.

Pre-Retirement Loan
This is a loan facility provided to active Civil Service Employees (ASN) until they reach retirement age, with a specific loan term.

Civil Servant (ASN) Retirement Loan
A loan facility provided to Civil Service (ASN) customers who have reached retirement age, as well as widows or widowers receiving a pension, with a specific loan term.

Kredit Multiguna Digital Loan

Merupakan Kredit Konsumsi yang proses pengajuan pinjamannya dilakukan secara online melalui aplikasi Mobile Banking Bank NTT (Be Pung Mobile).

Kredit Multiguna Anggota DPRD

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan dengan status sebagai Anggota DPRD yang telah dilantik dan pembayaran gajinya melalui Bank NTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Kredit Multi Usaha RC (KMU-RC)

Kredit perorangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Otonom dengan tujuan untuk membiayai usaha produktif yang dijalankan oleh debitur atau yang akan mulai berjalan dengan sumber pengembalian utama berasal dari gaji pegawai.

Digital Multipurpose Loan

This is a consumer loan where the application process is conducted online via the Bank NTT Mobile Banking app (Be Pung Mobile).

Multi-Purpose Loan for Regional Legislative Council Members

This is a credit facility provided to individuals who are members of the Regional People's Representative Council (DPRD) who have been sworn in and whose salaries are paid through Bank NTT, intended to meet consumption needs.

RC Multi-Business Loan (KMU-RC)

An individual loan provided to Civil Servants (ASN) of Autonomous Regions to finance productive businesses currently operated by the borrower or those about to commence, with the primary source of repayment derived from the employee's salary.

PRODUK KREDIT MIKRO & KECIL
MICRO & SMALL LOAN PRODUCTS

Pelayanan Kredit Mikro dan Kecil yang disalurkan oleh Bank NTT terdiri dari :

Kredit Pola Pelayanan Langsung (POPELA)

Kredit Mikro Kecil yang dilayani secara langsung per individu oleh petugas Bank tanpa melalui unit pelayanan mikro, Jangka waktu kredit kepada usaha mikro kecil untuk modal kerja maksimal 5 tahun dan pola angsurannya disesuaikan dengan *cash flow* usaha.

Kredit Mikro Pundi Putri

Merupakan produk kredit mikro yang diberikan khusus kepada kelompok mikro perempuan dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

Kredit Mikro Merdeka Bank NTT

Kredit angsuran berjadwal pembayaran dengan sistem angsuran bulanan tanpa agunan dan tanpa bunga, dengan plafon kredit maksimal Rp.10.000.000,-.

The micro and small business loan services provided by Bank NTT consist of:

Direct Service Model Loans (POPELA)

Micro and Small Loans serviced directly on an individual basis by bank staff without going through the microfinance unit. The loan term for micro and small businesses for working capital is a maximum of 5 years, and the repayment schedule is adjusted to the business's cash flow.

Pundi Putri Micro Credit

A microcredit product specifically provided to women's micro-groups to support women's empowerment.

Bank NTT Merdeka Micro Credit

A scheduled installment loan with a monthly payment system, unsecured and interest-free, with a maximum credit limit of Rp. 10,000,000.

Kredit Urban Farming

Kredit yang diberikan kepada masyarakat diwilayah perkotaan dengan pemanfaatan ruang terbuka (pekarangan rumah, balkon hingga atap rumah, lahan di area pemukiman, atau area perkantoran) menjadi lahan hijau untuk budidaya tanaman pertanian yang menghasilkan produk pertanian dan budidaya ikan air tawar.

Kredit Green House

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada kegiatan usaha berkelanjutan dalam pengembangan sektor pertanian hortikultura melalui pembangunan sektor pertanian hortikultura untuk pembangunan greenhouse dan pembiayaan komponen-komponen greenhouse.

Kredit Ekowisata, Agrowisata, dan Industri Kreatif (KREASI)

Kredit yang diberikan kepada kegiatan usaha berkelanjutan dalam pengembangan sektor Ekowisata, Agrowisata dan Industri Kreatif.

Kredit Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KSPAMS)

Kredit yang diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat/badan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses air bersih dan sanitasi yang layak dan aman di wilayah Provinsi NTT dengan tujuan penggunaan pembiayaan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

Kredit Pembiayaan Ekosistem Pertanian

Pembiayaan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian melalui pembiayaan tanaman pertanian dengan masa tanam berdurasi pendek dan berkelanjutan budidaya namun bernilai pasar kepada petani yang melakukan budidaya tanaman pertanian di lahan pertanian termasuk di dalamnya pembiayaan alat-alat pertanian dan alat bantu pengairan.

Kredit Pembiayaan Ekosistem Peternakan

Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha sektor peternakan dengan pola pelayanan mudah, murah dan cepat, Pembiayaan hanya khusus untuk penggemukan ternak dengan jangka waktu yang pendek dan berkelanjutan namun bernilai pasar, pembiayaan sarana produksi untuk penggemukan ternak, biaya hidup selama penggemukan/biaya tenaga kerja selama masa penggemukan.

Urban Farming Loan

A loan provided to urban communities for the utilization of open spaces (such as home yards, balconies, rooftops, land in residential areas, or office areas) as green spaces for cultivating agricultural crops and raising freshwater fish.

Greenhouse Loan

Investment financing provided for sustainable business activities in the development of the horticultural sector through the construction of greenhouses and the financing of greenhouse components.

Ecotourism, Agrotourism, and Creative Industries (KREASI) Loan

Loans provided for sustainable business activities in the development of the Ecotourism, Agrotourism, and Creative Industries sectors.

Drinking Water Supply and Sanitation System Loan (KSPAMS)

Loans provided to individuals, community groups, or legal entities to improve community welfare through access to clean, adequate, and safe water and sanitation in the Province of NTT, with the purpose of financing the infrastructure and facilities of the drinking water supply and sanitation systems.

Agricultural Ecosystem Financing Credit

Financing aimed at promoting economic growth in the agricultural sector through the financing of short-term, sustainable crops with market value to farmers who cultivate agricultural crops on farmland, including financing for agricultural equipment and irrigation aids.

Livestock Ecosystem Financing Credit

Loans provided to livestock sector businesses through a service model that is easy, affordable, and fast. Financing is exclusively for livestock fattening with short-term, sustainable terms that align with market value, covering production facilities for livestock fattening, living expenses during the fattening period, and labor costs during the fattening period.

KREDIT KOMERSIL DAN KORPORASI
COMMERCIAL AND CORPORATE LOANS

Sebagai pelopor penggerak ekonomi rakyat, Bank NTT juga memberikan pembiayaan melalui kredit produktif dalam bentuk modal kerja dan investasi.

Kredit Sindikasi
Kredit sindikasi yang disalurkan Bank NTT merupakan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Pinjaman Daerah
Merupakan skim kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kota/kabupaten yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk program pembangunan daerah.

As a pioneer in driving the people's economy, Bank NTT also provides financing through productive loans in the form of working capital and investment.

Syndicated Loans
Syndicated loans disbursed by Bank NTT are loans provided to borrowers through a joint financing agreement with other banks.

Regional Loans
This is a credit scheme provided to provincial, city, and regency governments, which is used entirely for regional development programs.

LAYANAN JASA PERBANKAN
BANKING SERVICES

Remittance, jasa pengiriman uang dalam mata uang asing dari dalam negeri ke luar negeri (outgoing) maupun dari luar negeri ke dalam negeri (incoming).

Kliring, merupakan jasa penyelenggaraan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran regular dan layanan penagihan regular.

RTGS, *(Real Time Gross Settlement),* merupakan jasa transfer dana yang penyelesainnya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

Modul Penerimaan Negara (MPN)/ Bank Persepsi, merupakan layanan penerimaan pembayaran/setoran penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak dari masyarakat ke rekening kas negara.

Jaminan Bank/ Bank Garansi, merupakan jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga khususnya kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah berupa jaminan tender, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan proyek yang dananya disalurkan melalui Bank NTT.

Remittance, a service for sending money in foreign currency from within the country to abroad (outgoing) or from abroad to within the country (incoming).

Clearing, a service for facilitating fund transfers, debit instrument clearing, regular payment services, and regular collection services.

RTGS (Real-Time Gross Settlement) is a fund transfer service where settlement is processed instantly on a per-transaction, individual basis.

State Revenue Collection Module (MPN)/Revenue Collection Bank, a service for receiving payments/ deposits of state revenue from taxes and non-tax sources from the public into the state treasury account.

Bank Guarantee is a guarantee provided by a bank to a third party, particularly contractors working on government projects, in the form of bid bonds, advance payment guarantees, and project performance guarantees, with funds disbursed through Bank NTT.

Referensi Bank/Surat Dukungan, merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh bank yang menyatakan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam suatu bisnis.

Payroll, merupakan sistem administrasi penggajian yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan/institusi dan digunakan secara rutin baik mingguan maupun bulanan. Payroll sangat membantu pihak perusahaan/ institusi untuk mengelola segala macam administrasi yang berhubungan dengan penggajian para pegawai.

Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melayani pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara Daerah Otonom. Pembayaran Gaji Pensiunan, menjalin kerjasama dengan PT.Taspen Cabang Kupang untuk memberikan jasa pembayaran gaji pensiunan.

Cash Management System (CMS), jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah melalui jaringan privat dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer.

Cash Management System (CMS) Siskeudes, jasa atau layanan pengelolaan keuangan desa yang dapat dilakukan oleh nasabah sendiri melalui jaringan privat dengan menggunakan perangkat lunak browser pada computer.

Pick Up Service, merupakan layanan pengambilan uang secara tunai dari nasabah untuk disetorkan ke rekening bank nasabah.

Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Daerah (KKI), merupakan alat pembayaran melalui fasilitas kartu kredit yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemrosesannya menggunakan sistem pembayaran ritel nasional Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Bank Reference/Letter of Support is a statement issued by a bank confirming a customer's ability to fulfill their obligations in a business transaction.

Payroll is a payroll administration system required by a company or institution and used on a regular basis, either weekly or monthly. Payroll greatly assists companies and institutions in managing all administrative tasks related to employee payroll.

Payment of Salaries for Civil Servants and Government Employees with Work Agreements (PPPK), We provide salary payment services for civil servants in autonomous regions. Pensioner Salary Payments: We collaborate with PT. Taspen Kupang Branch to provide pensioner salary payment services.

Cash Management System (CMS) is a cash management service provided to customers who hold deposits at the bank. Transactions are conducted based on customer instructions via a private network using browser software on a computer.

The Siskeudes Cash Management System (CMS) is a village financial management service that customers can perform themselves via a private network using browser software on a computer.

Pick Up Service is a service for collecting cash from customers to be deposited into their bank accounts.

The Indonesian Local Government Credit Card (KKI) is a payment instrument in the form of a credit card facility used by local governments to make payments for procurement transactions in accordance with applicable laws and regulations. Transactions are processed through the National Payment Gateway (GPN), the national retail payment system.

Electronic Data Capture (EDC)
Electronic Data Capture (EDC)

Merupakan layanan bagi nasabah yang ingin melaksanakan transaksi pembayaran dan pembelanjaan dengan menggunakan kartu ATM dimana mengharuskan nasabah untuk menginput nomor pin. Keunggulan mesin EDC adalah Real Time Transaksi, dimana transaksi yang dilakukan pada saat itu juga langsung tercatat pada mesin merchant.

Is a service for customers who wish to make payment and purchase transactions using an ATM card, which requires the customer to enter a PIN. The key advantage of the EDC machine is Real-Time Transactions, where transactions made at that very moment are immediately recorded on the merchant's terminal.

Mobile Banking Bank NTT (B Pung Mobile)
Bank NTT Mobile Banking (B Pung Mobile)

Merupakan layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh pelanggan melalui telepon genggam dengan mengirimkan perintah perbankan menggunakan media paket internet.

Is a banking service that customers can access directly via their mobile phones by sending banking commands using an internet data plan.

Internet Banking (IB)
Internet Banking (IB)

Merupakan aplikasi berbasis website dengan tampilan yang lebih luas, dan mudah digunakan untuk semua transaksi keuangan pribadi dengan memanfaatkan media jaringan internet.

Is a web-based application with a more comprehensive and user-friendly interface for all personal financial transactions, utilizing an internet connection.

Internet Banking Bisnis (IBB)
Business Internet Banking (IBB)

Merupakan layanan internet banking Bank NTT yang diperuntukan untuk nasabah perusahaan, yang dapat diakses langsung oleh pelanggan melalui Web Browser dengan mengirimkan perintah perbankan menggunakan media jaringan internet.

is Bank NTT's internet banking service designed for corporate customers, accessible directly via a web browser by sending banking commands using an internet connection.

Agen Laku Pandai
Laku Pandai Agents

Merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, yaitu program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (Agen Bank) dan di fasilitasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

are branchless financial services aimed at financial inclusion—a program providing banking services and/or other services through partnerships with third parties (Bank Agents) and facilitated by information technology.

Customer on Boarding
Customer on Boarding

Adalah aplikasi mobile berbasis android yang dapat digunakan oleh marketing untuk melakukan proses pembuatan CIF pembukaan rekening Tabungan, Deposito. Pengajuan Kredit, Simulasi Kredit, Registrasi Kartu ATM dan Registrasi e-Channel.

is an Android-based mobile application that can be used by marketing staff to process CIF creation for opening Savings Accounts, Deposits, Loan Applications, Loan Simulations, ATM Card Registration, and e-Channel Registration.

Layanan Call Center Halo Bank NTT
Halo Bank NTT Call Center Service

Merupakan pusat layanan yang disediakan oleh Bank NTT untuk menerima pengaduan dan memberikan pelayanan informasi kepada nasabah secara lengkap dan akurat melalui sambungan telepon 14013 atau melalui nomor Whats App 08113814013.

This is a service center provided by Bank NTT to receive complaints and provide comprehensive and accurate information to customers via the telephone number 14013 or via WhatsApp at 08113814013.

JENIS MENU YANG TERDAPAT PADA APLIKASI B'PUNG MOBILE BANKING BANK NTT

Portofolio atau Informasi Saldo: digunakan untuk mengetahui saldo terakhir pada rekening Tabungan, Deposito, Giro maupun rekening pinjaman nasabah pengguna. Selain itu, nasabah juga dapat melihat mutasi rekening dalam periode 7 hari dengan maksimal transaksi 30 hari. Mengetahui saldo portofolio pinjaman/ kredit yang dimiliki nasabah, jangka waktu, baki debet dan bunga yang masih harus dibayar.

Transfer Internal: transfer ke sesama rekening Bank NTT bebas biaya.

Transfer Online: Transfer antar Bank/ATM Bersama dengan biaya Rp 6.500,-.

BI-Fast: merupakan layanan transfer dana antar bank yang dapat dilakukan secara real time, aman, dan efisien dalam jangka waktu 24 jam/7 hari dengan biaya Rp 2.500,- dan limit transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi.

Pembayaran: merupakan layanan pembayaran Tagihan telepon, TV Berlangganan, Pulsa Listrik, BPJS Kesehatan, PDAM, SAMSAT Online, e-PBB P2, 9 Pajak Daerah & BPHTB, serta pembayaran uang sekolah.

Pembelian: pulsa regular Telkomsel, pulsa Internal Telkomsel, Voucher XL, Voucher Flexi dan Voucher Listrik

Digital Loan: adalah fitur pengajuan kredit melalui aplikasi Be Pung Mobile Bank NTT.

Menu Ubah PIN dan Ubah Password: untuk keamanan nasabah dapat melakukan perubahan password dan PIN secara langsung melalui handphone tanpa harus ke kantor Bank NTT.

Notifikasi: penyampaian informasi transaksi yang telah dilakukan.

Tarik Tunai: merupakan layanan transaksi penarikan tunai melalui Be Pung Mobile Bank NTT pada mesin *Cash Recycle Machine* (CRM).

MENU OPTIONS AVAILABLE ON THE B'PUNG MOBILE BANKING APP BY BANK NTT

Portfolio or Balance Information, Used to view the latest balance in the customer's savings, time deposit, checking, or loan accounts. Additionally, customers can view account transactions for the past 7 days, with a maximum transaction history of 30 days. This feature also allows customers to view their loan portfolio balances, loan terms, outstanding balances, and interest due.

Internal transfers and transfers to other Bank NTT accounts are free of charge.

Online Transfer: Transfers between banks or via the ATM Bersama network incur a fee of Rp 6,500.

BI-Fast is an interbank fund transfer service that can be conducted in real time, securely, and efficiently 24 hours a day, 7 days a week, with a fee of Rp 2,500 and a transaction limit of Rp 250 million per transaction.

Payments: a service for paying phone bills, cable TV subscriptions, electricity credits, BPJS Health, PDAM, SAMSAT Online, e-PBB, 9 local taxes & BPHTB, as well as school fees.

Purchases: regular Telkomsel credit, Telkomsel data packages, XL vouchers, Flexi vouchers, and electricity credit.

Digital Loan is a feature for applying for credit through the Be Pung Mobile Bank NTT app.

Change PIN and Change Password menus: for security, customers can change their passwords and PINs directly via their mobile phones without having to visit a Bank NTT branch.

Notifications: Receive information about completed transactions.

Cash Withdrawal: a cash withdrawal service via the Be Pung Mobile Bank NTT app at a Cash Recycle Machine (CRM).

Setor Tunai: layanan transaksi penarikan tunai melalui Be Pung Mobile Bank NTT pada mesin *Cash Recycle Machine* (CRM).

Cash Deposit: a cash deposit service via the Be Pung Mobile Bank NTT app at a Cash Recycle Machine (CRM).

QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*): merupakan produk sistem pembayaran Bank Indonesia berbasis digital menggunakan barcode yang digunakan dalam bertransaksi antar bank maupun dengan sesama bank.

QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) is a digital payment system developed by Bank Indonesia that uses barcodes for transactions between banks and within the same bank.

Histori: menyediakan periode riwayat transaksi yang dapat dipilih 31 hari.

History: Provides a transaction history for a selectable period of up to 31 days.

Administrasi: menyediakan layanan mengubah *password* dan PIN.

Administration: Allows users to change their password and PIN.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission And Company Values

VISI Vision

"Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"

"To be a Healthy, Strong, and Trusted Bank"

Arti Visi	Meaning of the Vision
Menjadi Bank Yang Sehat :	**To be a Healthy Bank: :**
• Dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.	• To effectively perform its intermediary functions.
• Dapat menjaga kualitas aset dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	• To maintain asset quality effectively. To be well-managed and operated in accordance with the principle of prudence.
• Dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran.	• Being able to facilitate the smooth flow of payments.
• Dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter.	• To assist the government in implementing monetary policy.
Kuat :	**Strong :**
• Mempunyai struktur permodalan yang cukup.	• Has an adequate capital structure.
• Menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.	• Generates sufficient profits to ensure business continuity.
• Memiliki kemampuan memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.	• Has the ability to maintain liquidity so that it can meet its obligations at all times.
Terpercaya :	**Trustworthy :**
• Dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pemerintah dan Masyarakat serta dapat bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.	• Provides the best service to the Government and the public and contributes to the overall economy.
• Menjadi bank kebanggaan Masyarakat Nusa Tenggara Timur.	• To be the bank of pride for the people of East Nusa Tenggara.

MISI Mission

- **Pelopor penggerak ekonomi rakyat.**
- **Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.**
- **Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.**
- **Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.**

- **A pioneer in driving the people's economy.**
- **To tap into the region's potential and utilize it productively for the welfare of the people of East Nusa Tenggara.**
- **Increasing local revenue sources.**
- **Optimizing the Bank's intermediary functions through the mobilization and distribution of funds to the community in the form of loans.**

Arti Misi

Pelopor Penggerak Ekonomi Rakyat

Mendukung Program Pemerintah dalam memajukan ekonomi rakyat melalui pembiayaan kredit produktif, khususnya pembiayaan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menggali Sumber Potensi Daerah Untuk Diusahakan Secara Produktif bagi Kesejahteraan Masyarakat NTT

Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam menggali sumber potensi daerah yang diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui pembiayaan kredit bagi Usaha Mikro maupun Usaha Kecil.

Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Memberi kontribusi tertinggi kepada Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dalam bentuk pembagian dividen maupun pembayaran pajak.

Mengoptimalkan Fungsi Intermediasi Bank Melalui Penghimpunan dan Penyaluran Dana Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Kredit

- Menciptakan produk dan layanan berbasis Digitalisasi yang sifatnya memberi kepuasan dan kemudahan dalam bertransaksi melalui sarana dan fasilitas yang dimiliki bank.

MISSION STATEMENT

Pioneer of the People's Economy

Supporting government programs to advance the people's economy through productive credit financing, particularly financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).

Tapping into Local Potential to Be Utilized Productively for the Welfare of the People of NTT

To serve as a partner to local governments in identifying and productively harnessing local resources for the welfare of the community, and to assist the community in improving their standard of living through credit financing for micro and small businesses.

Increasing Local Revenue Sources

Making the greatest contribution to the government in increasing Local Revenue (PAD) through both dividend distributions and tax payments.

Optimizing the Bank's Intermediary Function Through the Mobilization and Distribution of Funds to the Community in the Form of Loans

- Creating digital-based products and services designed to provide satisfaction and ease in transactions through the bank's facilities and infrastructure.

- Menjadikan budaya menabung bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi di kantor-kantor, perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah.
- Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan kredit.
- Menjadi mitra Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dibidang sistem keuangan.

- Fostering a culture of saving among the public through educational activities at bank branches, universities, and schools.
- Helping to improve the standard of living of the public through credit financing.
- Serving as a partner to the Government in implementing policies in the financial system sector.

PENETAPAN VISI DAN MISI BANK NTT

Visi dan Misi Bank NTT merupakan gambaran tentang keadaan dimasa depan yang hendak diraih oleh manajemen dan pegawai Bank NTT melalui langkah-langkah, cara maupun strategi yang digunakan oleh manajemen untuk kemajuan maupun perkembangan bank ke depan, Visi dan Misi Bank NTT ditetapkan oleh manajemen Bank NTT dalam Rencana Bisnis Bank NTT tahun 2006-2008.

ESTABLISHMENT OF BANK NTT'S VISION AND MISSION

The Vision and Mission of Bank NTT outline the future state that the management and employees of Bank NTT aim to achieve through the steps, methods, and strategies employed by management to ensure the bank's progress and development moving forward. The Vision and Mission of Bank NTT were established by the management of Bank NTT in the Bank's Business Plan for 2006–2008.

BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

"BINTANG" merupakan akronim dari Nilai-Nilai Budaya *(Corporate Culture)* yang dimiliki Bank NTT sejak tanggal 30 Juni 2022 dan ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 89 Tahun 2022 Tentang Penetapan Buku Pedoman "*Code of Conduct* dan *Code Of Good Corporate Governance*" PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

"BINTANG" is an acronym for the-Corporate Culture (Corporate Culture) adopted by Bank NTT as of June 30, 2022, and established by the Board of Directors through Board Resolution No. 89 of 2022 of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur regarding the Adoption of the "Code of Conduct and Code of Good Corporate Governance" Manual of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Business Oriented

Selalu berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pelanggan dan bisnis dengan pendekatan humanis.

Always focused on the interests and needs of customers and the business with a humanistic approach.

Tuntutan sikap Business Oriented antara lain :

- Mengutamakan pelayanan terbaik bagi nasabah/ mitra.
- Berorientasi pada hasil yang positif.
- Inovatif, kreatif dalam menciptakan peluang untuk mencapai kinerja.

Requirements for a Business-Oriented attitude include:

- Prioritizing the best service for customers/partners.
- Focusing on positive results.
- Innovative and creative in creating opportunities to achieve performance goals.

Independent, Infinite & Integrity

Konsisten terhadap standar/nilai-nilai/ketentuan yang diyakini, disiplin dan menjunjung tinggi akhlat/moral.

Consistent with the standards, values, and principles one upholds; disciplined and upholding ethics and morality.

Tuntutan sikap Independent, Infinite & Integrity antara lain :

- Mengutamakan kejujuran.
- Patuh terhadap ketentuan/aturan, bertindak sesuai kode etik
- Tidak menerima suap & terlibat suap
- Memelihara akhlak/moral yang baik.

Requirements for the attitudes of Independence, Integrity, and Integrity include:

- Prioritizing honesty.
- Comply with regulations/rules. Act in accordance with the code of ethics
- Do not accept bribes or engage in bribery
- Maintaining good ethics and morals.

Networking

Membangun kerjasama yang sinergis, harmonis guna menciptakan skala bisnis yang optimum.

Building synergistic and harmonious cooperation to create an optimal business scale.

Tuntutan sikap Networking antara lain :

- Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berkontribusi.

Requirements for a networking mindset include:

- Being open to collaboration to generate added value.
- Establishing mutually beneficial cooperative relationships
- Providing employees with opportunities to contribute.

Trust & Team Work

Menjaga kepercayaan dan membangun kerjasama & kekompakan

Maintaining trust and fostering cooperation and unity

Tuntutan sikap Trust & Team Work antara lain :

- Saling menghargai yang dilandasi kepercayaan dan kerjasama untuk mencapai tujuan.
- Menumbuhkan budaya transparansi dan kebersamaan.
- Menjaga hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja, mitra dan nasabah.
- Menjaga rahasia Bank.

Requirements for Trust & Teamwork include:

- Mutual respect grounded in trust and cooperation to achieve goals.
- Fostering a culture of transparency and togetherness.
- Maintaining good relationships with colleagues, partners, and customers.
- Maintaining bank confidentiality.

Adaptive

Komitmen untuk terus menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan.

Commitment to continuously adapting to changes.

Tuntutan sikap Adaptive antara lain :

- Cepat menyesuaikan diri menjadi lebih baik.
- Selalu terus berinovasi dalam mencapai tujuan.
- Bertindak proaktif

Requirements for an adaptive mindset include:

- Quickly adapting to improve.
- Always continue to innovate in achieving goals.
- Acting proactively.

New Technology

Selalu menyesuaikan bisnis dengan perkembangan teknologi saat ini khususnya digitalisasi produk, layanan serta sistem administrasi bank yang relevan dengan kebutuhan dan kompleksitas bisnis bank.

Always aligning the business with current technological advancements, particularly the digitalization of products, services, and relevant banking administrative systems to meet the needs and complexity of the bank's operations.

Tuntutan sikap New Technology adalah melakukan perubahan dengan perkembangan teknolgi perbankan dan layanan terkini.

The requirement of the New Technology mindset is to adapt to the latest developments in banking technology and services.

Growth & Sustainable

Terus bertumbuh dalam bisnis serta selalu berpikir positif.

Continuously grow the business and always maintain a positive mindset.

Tuntutan sikap Growt & Sustainable antara lain :

- Mengutamakan pertumbuhan bisnis.
- Inovatif, kreatif dalam menciptakan peluang dalam mencapai kinerja.
- Kepedulian/memiliki empati.
- Terus meningkatkan kompetensi diri.
- Konsisten untuk terus berkontribusi bagi stakeholders.
- Menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

The requirements of the Growth & Sustainable mindset include:

- Prioritizing business growth.
- Being innovative and creative in creating opportunities to achieve performance goals.
- Caring and empathetic.
- Continuously improving one's competencies.
- Consistently contributing to stakeholders.
- Ensuring sustainable business growth.

SKEMA BUDAYA PERUSAHAAN

COMPANY CULTURE FRAMEWORK

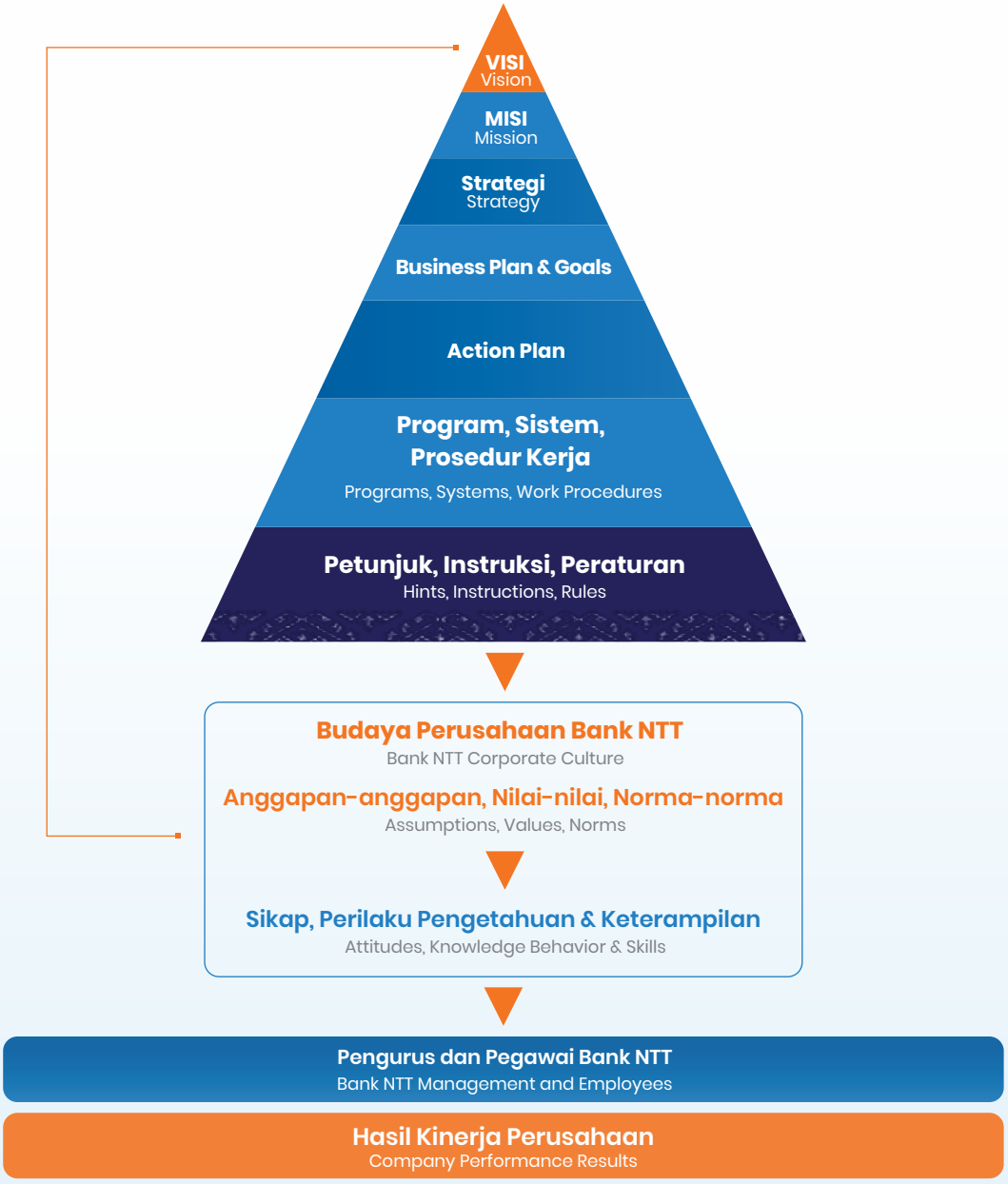

Motto

Motto

“ melayani lebih sungguh “

“ serve more truly “

MILESTONE

Milestone

1962

Mulai beroperasi (17/07) berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961, dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Commenced operations (July 17) pursuant to Deed of Establishment No. 12 dated October 18, 1961, under the name PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

1963

Perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah.

Change in the legal status of Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur from a Limited Liability Company to a Regional Company.

1999

- Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan Modal Dasar sebesar Rp. 80 miliar.
- Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah.

- Change in legal entity from Regional Company back to a Limited Liability Company with an authorized capital of Rp. 80 billion.
- Regional Development Bank Recapitalization Program.

2002

Pergantian System Teknologi dari Integrated Banking System (IBS) ke Online Integrated Banking System (OLIBS) bekerja sama dengan Konsultan Collega Inti Pratama.

Technology System Migration from the Integrated Banking System (IBS) to the Online Integrated Banking System (, OLIBS) in collaboration with Collega Inti Pratama Consultants.

2004

- Penyelesaian Program Rekapitalisasi dan Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 46.600 saham miliknya dalam Perseroan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Perubahan modal dasar bank dari Rp. 80 miliar menjadi Rp. 250 miliar.

- Completion of the Recapitalization Program and the Government of the Republic of Indonesia transferred its 46,600 shares in the Company to the Government of East Nusa Tenggara Province.
- The bank's authorized capital was increased from Rp 80 billion to Rp 250 billion.

2006

Tergabung dalam jaringan ATM Bersama dengan bank-bank di seluruh Indonesia.

Joined the ATM Bersama network with banks throughout Indonesia.

2007

- Perubahan modal dasar bank dari Rp. 250 miliar menjadi Rp. 500 miliar
- Perubahan Logo Bank NTT dan Peresmian Gedung Kantor Pusat Bank NTT di Jl. W.J. Lalamentik No. 102.Kupang.

- Increase in the bank's authorized capital from Rp. 250 billion to Rp. 500 billion
- Change of the Bank NTT Logo and Inauguration of the Bank NTT Headquarters Building at Jl. W.J. Lalamentik No. 102, Kupang.

2010

Perubahan modal dasar bank dari Rp. 500 miliar menjadi Rp. 1 triliun.

Increase in the bank's authorized capital from Rp 500 billion to Rp 1 trillion.

2011

Menerbitkan Obligasi I Bank NTT sebesar Rp 500 miliar.

Issued Bank NTT Bond I in the amount of Rp 500,000,000,000 (five hundred billion rupiah)

2016

Perubahan modal dasar bank dari Rp. 1 triliun menjadi Rp. 4 triliun.

The bank's authorized capital was increased from Rp 1 trillion to Rp 4 trillion.

01 02 03 04 05 06 07

2017

Menerbitkan surat berharga dalam bentuk *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Issued securities in the form of Negotiable Certificates of Deposit (NCDs) totaling Rp 450,000,000 (four hundred fifty million rupiah).

2018

Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Issued Bank NTT Continuous Bond I Phase I in the amount of Rp 500,000,000,000.00 (five hundred billion rupiah).

2022

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta Penyertaan Persetujuan Penambahan Setoran Modal ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.M.Kn. notaris di Kupang mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp 4.000.000.000.000,- menjadi Rp 7.000.000.000.000,- akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0010766.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022

The latest amendment to the Bank's Articles of Association is based on the Deed of Consent for the Increase in Capital Contribution to PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 4 dated February 7, 2022, executed before Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. notary in Kupang regarding the change in the Bank's authorized capital from Rp 4,000,000,000,000 to Rp 7,000,000,000,000. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, , based on Decision No. AHU-0010766.AH.01.02 of 2022 dated February 12, 2022.

2023

Bank NTT resmi menjadi Bank Devisa yakni bank yang dapat menjalankan usaha dalam valuta asing (valas) berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.03/2023 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Agustus 2023.

Bank NTT officially became a Foreign Exchange Bank, namely a bank authorized to conduct business in foreign currency (forex), pursuant to Decision No. KEP-62/D.03/2023 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Granting of a License to Conduct Business Activities in Foreign Currency for PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. August 31, 2023.

2024

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mewajibkan Bank NTT untuk memiliki Modal Inti Minimum sebesar 3 (tiga) triliun rupiah paling lambat pada 31 Desember 2024 Bank NTT telah mengambil kebijakan strategis dengan melakukan kerjasama dengan Bank Jatim melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) setelah mendapatkan persetujuan seluruh pemegang saham Bank NTT dalam RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan pada 16 November 2024.

To comply with Financial Services Authority Regulation No.12/POJK.03/2020 on the Consolidation of Commercial Banks, which requires Bank NTT to have a Minimum Core Capital of 3 (three) trillion rupiah no later than December 31, 2024, Bank NTT has implemented a strategic policy by entering into a partnership with Bank Jatim through the Bank Business Group (KUB) scheme following approval from all Bank NTT shareholders at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on November 16, 2024.

2025

Bank Jatim telah melakukan realisasi penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) pada tanggal 30 September 2025 setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor : S-141/KO.14/2025, tanggal 28 Juli 2025. Hal : Persetujuan Penyertaan Modal PT. BPD Nusa Tenggara Timur.

Bank Jatim has completed the capital injection into Bank NTT in the amount of Rp 100,000,000,000.- (one hundred billion rupiah) on September 30, 2025, after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) of East Java Province via Letter No.: S-141/KO.14/2025. dated July 28, 2025. Subject: Approval of Capital Contribution to PT. BPD Nusa Tenggara Timur.

09 10 11 12 13

LOGO BANK NTT

Bank NTT Logo

WARNA BIRU
Blue Color

Diambil dari NTT sebagai wilayah kepulauan dan didominasi laut, juga merupakan warna yang melambangkan kepercayaan dan ketangguhan.
Adapted from East Nusa Tenggara as Archipelago and dominated by sea, also a color reflecting trust and resilience.

bankNTT

melayani lebih sungguh

TIGA TITIK
Three Points

Menggambarkan 3 elemen yaitu : BUDAYA, MASYARAKAT DAN ALAM.
Illustrating 3 elements: CULTURE, SOCIETY AND NATURE.

TIGA BENTUK
Three Shapes

Merupakan analogi integrasi dan keragaman yang bertautan menjadi satu. Tiga bentuk yaitu BANK, NASABAH, PEMDA menjadi kekuatan yang tak terpisahkan.
An analogy of united integration and harmony. Three shapes represent BANK, CUSTOMERS, Regional Government as an integrated force.

WARNA ABU-ABU
Grey Color

Menggambarkan kedinamisan, berpikiran terbuka dan berwawasan luas.
Reflecting dynamic, open minded and broad perspective.

WARNA ORANGE
Orange Color

Sebagai penekanan yang “Lebih” dipunyai untuk melayani nasabah.
As an emphasize with higher sense of belonging to serve the customers.

STRUKTUR ORGANISASI BANK NTT

Bank NTT Organization Structure

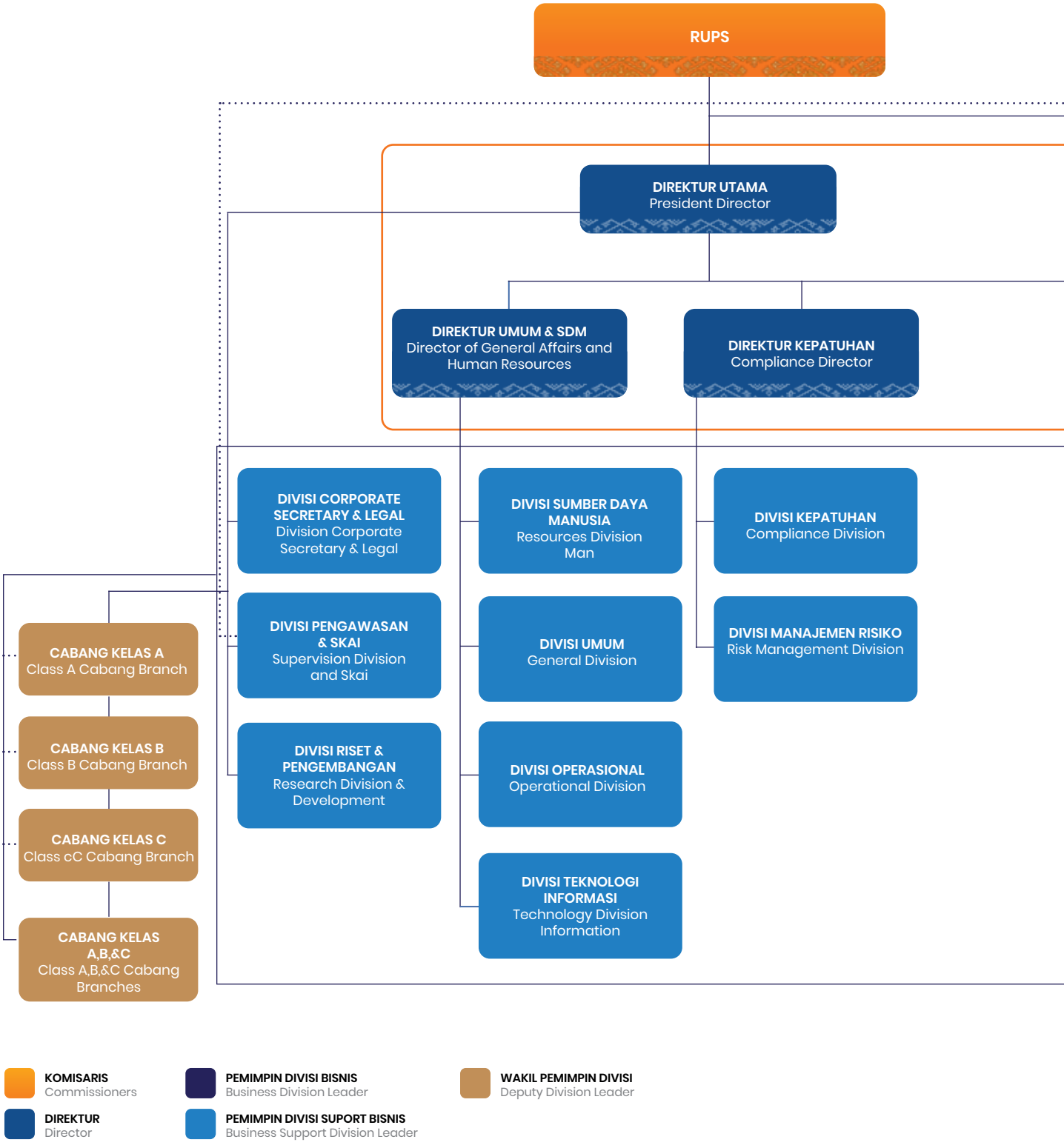

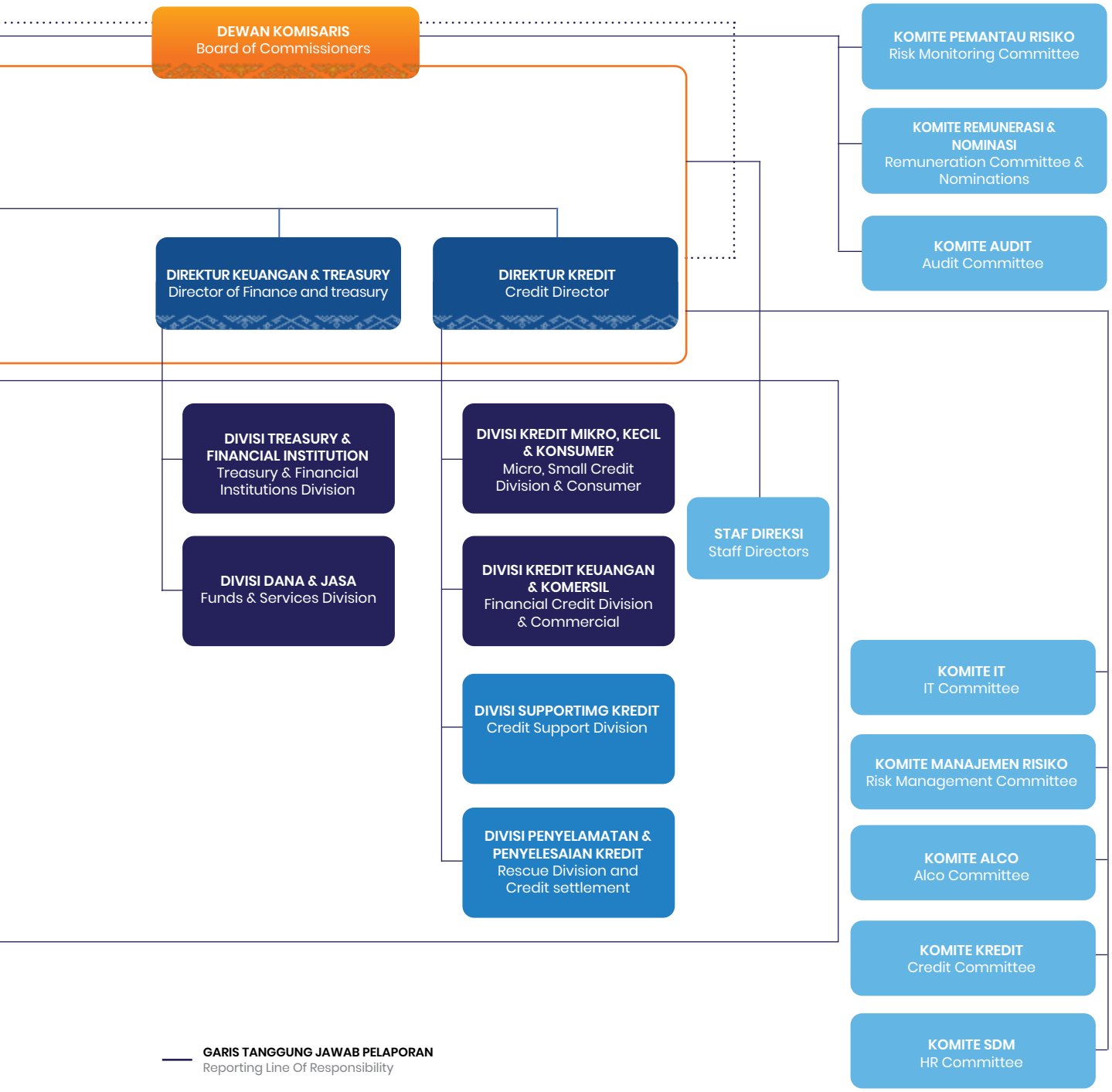
DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
KOMITE PEMANTAU RISIKO
Risk Monitoring Committee
KOMITE REMUNERASI & NOMINASI
Remuneration Committee & Nominations
KOMITE AUDIT
Audit Committee
DIREKTUR KEUANGAN & TREASURY
Director of Finance and treasury
DIREKTUR KREDIT
Credit Director
DIVISI TREASURY & FINANCIAL INSTITUTION
Treasury & Financial Institutions Division
DIVISI DANA & JASA
Funds & Services Division
DIVISI KREDIT MIKRO, KECIL & KONSUMER
Micro, Small Credit Division & Consumer
DIVISI KREDIT KEUANGAN & KOMERSIL
Financial Credit Division & Commercial
DIVISI SUPPORTIMG KREDIT
Credit Support Division
DIVISI PENYELAMATAN & PENYELESAIAN KREDIT
Rescue Division and Credit settlement
STAF DIREKSI
Staff Directors
KOMITE IT
IT Committee
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee
KOMITE ALCO
Alco Committee
KOMITE KREDIT
Credit Committee
KOMITE SDM
HR Committee
GARIS TANGGUNG JAWAB PELAPORAN
Reporting Line Of Responsibility
GARIS SUPERVISI, KOMUNIKASI, KOORDINASI
Line Of Supervision, Communication, Coordination

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM
SHAREHOLDING INFORMATION

Modal Dasar

Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 7 Februari 2022 dari Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.M.Kn. notaris di Kupang maka telah terjadi perubahan modal dasar Bank dari Rp 4.000.000.000.000,- menjadi Rp 7.000.000.000.000,- . Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-0010766. AH.01.02 tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022.

Saham Seri A merupakan saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham Seri A mempunyai hak suara khusus. dapat ditukar dengan saham Seri B. menerima dividen dan sisa likuidasi terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT sedangkan Saham Seri B adalah saham biasa yang dimiliki oleh individu dengan hak yang terbatas.

Authorized Capital

Pursuant to Deed No. 4 dated February 7, 2022, executed by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., a notary in Kupang, the Bank's authorized capital has been increased from IDR 4,000,000,000,000 to IDR 7,000,000,000,000. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decision No. AHU-0010766.AH.01.02 of 2022 dated February 12, 2022.

Series A shares are shares that may only be held by Provincial Governments, City Governments, and Regency Governments. Series A shares carry special voting rights, are exchangeable for Series B shares, receive dividends and liquidation proceeds first, and hold special voting rights in proposing candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank NTT, whereas Series B shares are common shares held by individuals with limited rights.

PERKEMBANGAN MODAL DASAR
DEVELOPMENT OF AUTHORIZED CAPITAL

Tahun Year	Dasar Hukum	Nominal Modal Dasar (Rp) Nominal Authorized Capital (Rp)	Dasar Hukum
1999	Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang.	80.000.000.000,-	Deed of Establishment of the Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 122 dated April 22, 1999, executed before Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notary in Kupang.
2004	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.105 tanggal 21 Agustus 2004 dan diperkuat dengan akta perubahan (addendum) akta tersebut No.151 tanggal 31 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang.	250.000.000.000,-	Minutes of the Extraordinary General Meeting of Share-holders No. 105 dated August 21, 2004, and reinforced by an amendment (addendum) to said minutes No. 151 dat-ed August 31, 2005, executed before Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notary in Kupang.
2007	Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.60 tanggal 13 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kupang.	500.000.000.000,-	Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 60 dated June 13, 2007, executed before Emmanuel Mali, S.H., Notary in Kupang.
2010	Akta No. 73 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang.	1.000.000.000.000,-	Deed No. 73 dated November 15, 2010, executed before Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notary in Kupang.
2016	Akta No. 08 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Lalu Muhamad Supriandi, S.H.M.Kn Notaris di Kabupaten Manggarai Barat – Labuan Bajo.	4.000.000.000.000,-	Deed No. 08 dated May 27, 2016, executed before Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., Notary in West Mang-garai Regency – Labuan Bajo.

PERKEMBANGAN MODAL DASAR DEVELOPMENT OF AUTHORIZED CAPITAL			
Tahun Year	Dasar Hukum	Nominal Modal Dasar (Rp) Nominal Authorized Capital (Rp)	Dasar Hukum
2022	Akta Nomor 04 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan S.H.M.Kn. notaris di Kupang mengenai perubahan modal dasar Bank dari Rp 4.000.000.000.000,- menjadi Rp 7.000.000.000.000,-	7.000.000.000.000,-	Deed No. 04 dated February 7, 2022, executed before Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., a notary in Kupang, regarding the change in the Bank's authorized capital from Rp 4,000,000,000,000 to Rp 7,000,000,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor serta Tambahan Modal Disetor

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendominasi kepemilikan saham Seri A sebesar 23,76 % selaku Pemegang Saham Utama. Pemerintah Kota Kupang dengan kepemilikan saham sebesar 5,88 %. Bank Jatim Tbk sebesar 3,23 % serta Pemerintah Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur menguasai dengan persentase saham sebesar 67,07 % dari jumlah saham sedangkan sisanya sebesar 0,06% dimiliki oleh perorangan dalam bentuk saham Seri B.

Paid-in Capital and Additional Paid-in Capital

The East Nusa Tenggara Provincial Government holds a 23.76% stake in Series A shares as the majority shareholder. The Kupang City Government holds a 5.88% stake. Bank Jatim Tbk holds 3.23%, and the regency governments throughout East Nusa Tenggara collectively control 67.07% of the total shares, while the remaining 0.06% is held by individuals in the form of Series B shares.

Susunan Pemegang Saham Bank NTT per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

The composition of Bank NTT's shareholders as of December 31, 2025, is as follows:

*) dalam jutaan

*) in millions

Saham Seri A	Lembar Saham Shares Shares	Persentase Percentage (%)	Nominal Nominal (Rp)	SERIES A SHARES
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	52.500.755	23,76	525.007.550.000	East Nusa Tenggara Provincial Government
Pemerintah Kota Kupang	13.000.000	5,88	130.000.000.000	Kupang City Government
Pemerintah Kabupaten :				**Regency Government:**
Pemerintah Kabupaten Kupang	12.500.000	5,66	125.000.000.000	Kupang Regency Government
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	11.565.422	5,23	115.654.220.000	North Central Timor Regency Government
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	10.058.282	4,55	100.582.820.000	East Manggarai Regency Government
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	10.006.577	4,53	100.065.770.000	South Central Timor Regency Government
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	9.678.175	4,38	96.781.750.000	Southwest Sumba Regency Government
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	9.228.066	4,18	92.280.660.000	East Sumba Regency Government
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	9.034.031	4,09	90.340.310.000	West Sumba Regency Government
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	9.027.261	4,09	90.272.610.000	Rote Ndao Regency Government

*) dalam jutaan

*) in millions

Saham Seri A	Lembar Saham Shares Shares	Persentase Percentage (%)	Nominal Nominal (Rp)	SERIES A SHARES
Pemerintah Kabupaten Malaka	7.904.141	3,58	79.041.410.000	Malaka Regency Government
Pemerintah Kabupaten Belu	7.387.172	3,34	73.871.720.000	Belu Regency Government
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	6.642.283	3,01	66.422.830.000	Central Sumba Regency Government
Pemerintah Kabupaten Manggarai	6.140.811	2,78	61.408.110.000	Manggarai Regency Government
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	5.719.967	2,59	57.199.670.000	West Manggarai Regency Government
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	5.649.283	2,56	56.492.830.000	Sabu Raijua Regency Government
Pemerintah Kabupaten Lembata	5.396.088	2,44	53.960.880.000	Lembata Regency Government
Pemerintah Kabupaten Ende	5.261.653	2,38	52.616.530.000	Ende Regency Government
Pemerintah Kabupaten Nagekeo	4.469.967	2,02	44.699.670.000	Nagekeo Regency Government
Pemerintah Kabupaten Sikka	3.572.463	1,62	35.724.630.000	Sikka Regency Government
Pemerintah Kabupaten Flores Timur	3.529.859	1,60	35.298.590.000	Flores Timur Regency Government
Pemerintah Kabupaten Ngada	2.705.737	1,22	27.057.370.000	Ngada Regency Government
Pemerintah Kabupaten Alor	2.702.105	1,22	27.021.050.000	Alor Regency Government
JUMLAH SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA	**161.179.343**	**72,95**	**1.611.793.430.000**	TOTAL SHARES OF REGENCY & MUNICIPAL GOV-ERNMENTS
BANK JATIM. Tbk	7.142.857	3,23	71.428.570.000	BANK JATIM Tbk
JUMLAH SAHAM SERI A	220.822.955	99,94	2.208.229.550.000	TOTAL SERIES A SHARES
Ch. Amos Corputty	95.744	0,04	957.440.000	Ch. Amos Corputty
L. O. Wila Huky	23.321	0,01	233.210.000	L. O. Wila Huky
Johan Christian Tallo	11.660	0,01	116.600.000	Johan Christian Tallo
JUMLAH SAHAM SERI B	**130.725**	**0,06**	**1.307.250.000**	TOTAL SERIES B SHARES
JUMLAH SAHAM SERI A dan B	**220.953.680**	**100**	**2.209.536.800.000**	TOTAL SHARES OF SERIES A AND B

Perkembangan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Development of Issued and Fully Paid-in Capital

*) dalam jutaan

*) in millions

Pemegang Saham	2021	2022	2023	2024	2025	Shareholders
SAHAM SERI A						SERIES A SHARES
Pemerintah Provinsi NTT	482.708	525.008	525.008	525.008	525.008	Government of NTT Province
Pemerintah Kota Kupang	97.626	110.000	120.000	125.000	130.000	Kupang City Government
Pemerintah Kabupaten se-NTT	1.153.817	1.319.871	1.398.871	1.463.236	1.481.793	Regency Governments throughout NTT
Bank Jatim Tbk	-	-	-	-	71.429	Bank Jatim Tbk

*) dalam jutaan

*) in millions

Pemegang Saham	2021	2022	2023	2024	2025	Shareholders
JUMLAH SAHAM SERI A	1.734.150	1.954.872	2.043.879	2.113.244	2.208.229	TOTAL SERIES A SHARES
SAHAM SERI B						SERIES B SHARES
Charles Amos Corputty	957	957	957	957	95.744	Charles Amos Corputty
Luther Oktovianus Wila Huky	233	233	233	233	233	Luther Oktovianus Wila Huky
Johan Christian Tallo	117	117	116	117	117	Johan Christian Tallo
JUMLAH SAHAM SERI B	**1.307**	**1.307**	**1.307**	**1.307**	**1.307**	**TOTAL SERIES B SHARES**
JUMLAH SAHAM	**1.735.458**	**1.956.186**	**2.045.186**	**2.114.551**	**2.209.537**	**TOTAL SHARES**

Modal Disetor

Setoran modal dari para pemegang saham Bank sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.209.537.000.000- yang merupakan setoran saham seri A baik melalui inbreng maupun setoran dana yang ditempatkan pada pos Modal Disetor.

Paid-in Capital

Capital contributions from the Bank's shareholders as of December 31, 2025, amount to Rp.2,209,537,000,000— , which consists of Series A share contributions, whether through in-kind contributions or cash deposits, recorded under the Paid-in Capital account.

Modal Sumbangan

Modal Sumbangan sebesar Rp247.088.700,- merupakan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia berupa penyediaan jasa konsultasi, penyediaan perangkat keras *(hardware)*dan perangkat lunak *(software)*serta pelatihan, sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.26/23/Bppp tanggal 21 Mei 1993.

Contributed Capital

Contributed Capital in the amount of Rp247,088,700.00 consists of contributions for banking infrastructure assistance received from Bank Indonesia in the form of consulting services, the provision of hardware and software, and training, in accordance with Bank Indonesia's letter No. 26/23/Bppp dated May 21, 1993.

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Komisaris

Per posisi 31 Desember 2025 Direksi dan Komisaris Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT.

Share Ownership by the Board of Directors and Commissioners

As of December 31, 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners of Bank NTT do not hold any shares in Bank NTT.

Kepemilikan Saham oleh Masyarakat

Kepemilikan Saham oleh masyarakat atau Saham Perorangan yang merupakan Saham Seri B dengan kepemilikan saham kurang dari 6% masing-masing adalah sebagai berikut :

Share Ownership by the Public

Share ownership by the public, or individual shares, which are Series B shares with less than 6% ownership each, is as follows:

*) dalam jutaan

*) in millions

Saham Seri B	Lembar Saham Shares Shares	Persentase Percentage (%)	Nominal Nominal (Rp)	SERIES B SHARES
Charles Amos Corputty, BSc. MBA. MSc	95.744	0,04	957.440.000	Charles Amos Corputty. BSc. MBA. MSc
Luther Oktovianus Wila Huky	23.321	0,01	233.210.000	Luther Oktovianus Wila Huky
Johan Christian Tallo	11.660	0,01	116.600.000	Johan Christian Tallo
JUMLAH SAHAM SERI B	**130.725**	**0,06**	**1.307.250.000**	**TOTAL SERIES B SHARES**

PROFIL ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, PENYERTAAN SAHAM & AFILIASI

PROFILE OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, EQUITY INVESTMENTS & AFFILIATES

Entitas Anak

Per posisi 31 Desember 2025 Bank NTT tidak memiliki Anak Perusahaan (Entitas Anak) dan tidak memiliki Saham lebih dari 5% pada perusahaan lain.

Entitas Asosiasi

Per posisi 31 Desember 2025 Bank NTT tidak memiliki Entitas Asosiasi.

Ventura Bersama

Per posisi 31 Desember 2025 Bank NTT tidak memiliki Anak Perusahaan atau penyertaan saham pada Joint Ventura. Special Purpose Vehicle (SPV) atau tidak memiliki grup perusahaan.

Subsidiary

As of December 31, 2025, Bank NTT did not have any subsidiaries (Subsidiary Entities) and did not hold more than a 5% equity interest in any other company.

Associated Entities

As of December 31, 2025, Bank NTT has no associated entities.

Joint Ventures

As of December 31, 2025, Bank NTT does not have any subsidiaries or equity interests in joint ventures, special purpose vehicles (SPVs), or corporate groups.

JARINGAN KANTOR BANK NTT TAHUN BUKU 2025

OFFICE NETWORK OF BANK NTT IN 2025

Sepanjang Tahun Buku 2025 Bank NTT terus melakukan perluasan jaringan kantor yang difokuskan pada konsep *branchless banking* melalui perluasan pemanfaatan kanal-kanal digital seperti Mobile Banking dan SMS Banking, Electronic Data Capture (EDC), Agen Laku Pandai, mesin ATM dan mesin CRM, Mobil Kas Bank NTT, Internet Banking (IB), Internet Business Banking (IBB) dan juga layanan penyaluran kredit melalui aplikasi *Digital Loan* serta mendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparasi melalui pemanfaatan produk Bank NTT berbasis digital seperti Cash Management System (CMS) SP2D Online, CMS Siskuedes, Kartu Kredit Indonesia (KKI) sektor Pemerintah Daerah, Pembayaran Tagihan PDAM dan 9 (Sembilan) Pajak Daerah melalui mesin EDC Bank NTT dan Pemanfaatan Payment Point SAMSAT Online untuk melakukan pembayaran Pajak kendaraan bermotor.

Throughout the 2025 fiscal year, Bank NTT continued to expand its branch network with a focus on the concept of branchless banking by increasing the use of digital channels such as Mobile Banking and SMS Banking, Electronic Data Capture (EDC), Laku Pandai Agents, ATMs and CRM machines, Bank NTT Cash Cars, Internet Banking (IB), Internet Business Banking (IBB), and multipurpose loan services via the Digital Loan app, as well as supporting local governments in managing regional finances to ensure accountability and transparency through the use of Bank NTT's digital products such as the Cash Management System (CMS), Online SP2D, CMS Siskuedes, the Indonesian Credit Card (KKI) for the local government sector, payment of PDAM bills and nine local taxes via Bank NTT's EDC machines, utilization of the SAMSAT Online Payment Point for motor vehicle tax payments, utilization of payroll partnerships for salary payments with local government agencies and private entities, as well as online school fee payments via the Bank NTT Mobile Banking app.

Fokus pada konsep *branchless banking* bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan inklusif kepada masyarakat NTT yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan guna meningkatkan layanan keuangan non tunai, menurunkan biaya operasional bank serta meningkatkan *fee based income* bank.

The focus on the branchless banking concept aims to provide inclusive financial services to the people of NTT, which is geographically an archipelago, in order to improve non-cash financial services, reduce bank operating costs, and increase the bank's fee-based income.

Sementara itu sepanjang tahun buku 2025 manajemen tidak melakukan penambahan jaringan kantor fisik. Kebjakan terhadap penambahan maupun pengurangan jaringan kantor fisik dilakukan dengan tetap mengacu pada *prudential principle* serta memperhatikan *feasibility study* dimana tercakup didalamnya adalah penilaian terhadap potensi ekonomi wilayah, potensi market terhadap penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, faktor risiko serta tingkat kejenuhan bank.

Meanwhile, throughout the 2025 fiscal year, management will not expand the physical branch network. Decisions regarding the addition or reduction of physical branches will be made in accordance with prudential principles and based on feasibility studies, which include assessments of regional economic potential, market potential for credit disbursement and third-party fund mobilization, risk factors, and the bank's market saturation level.

Manajemen secara periodik melakukan reviu terhadap penambahan jaringan kantor fisik untuk menilai efektifitas kinerja dari setiap unit kantor yang ada. Evaluasi diberikan terhadap kontribusi positif unit kantor dalam rentang waktu tertentu dan pencapaiannya terhadap Rencana Bisnis Bank. Hasil evaluasi menjadi rujukan terhadap penataan jaringan kantor fisik yang

Management periodically reviews the expansion of the physical branch network to assess the performance effectiveness of each existing branch. The evaluation focuses on the positive contributions of each branch over a specific period and its achievements in relation to the Bank's " " Business Plan. The evaluation results serve as a reference for the restructuring of the existing

ada baik melalui penutupan, penurunan maupun peningkatan status kantor fisik serta melakukan relokasi kantor ke tempat yang strategis dan potensial terhadap pertumbuhan bisnis bank dan ekonomi di wilayah tersebut.

physical branch network, whether through closures, downgrades, or upgrades of physical branches, as well as relocating branches to strategic locations with potential for the growth of the bank's business and the local economy.

Jaringan Kantor Bank NTT

NTT BANK BRANCH NETWORK

Kantor Pusat Head Office	Alamat Address
Kantor Pusat Head Office	Jl. W. J.Lalamentik No. 102. Kota Kupang

No	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
1	Cabang Utama Kupang	Jl. Cak Doko No. 50. Kota Kupang
2	Cabang Khusus	Jl. W. J. Lalamentik No. 102. Kota Kupang
3	Cabang Maumere	Jl. El Tari. Maumere - Kabupaten Sikka
4	Cabang Atambua	Jl. Cut Nyak Dien. Atambua - Kabupaten Belu
5	Cabang Ende	Jl. Dr. Moh. Hatta No. 60. Ende
6	Cabang Waingapu	Jl. Ahmad Yani No. 18. Waingapu - Kabupaten Sumba Timur
7	Cabang Ruteng	Jl. Katedral. Ruteng - Kabupaten Manggarai
8	Cabang Kefamenanu	Jl. El Tari. Kefamenanu - Kabupaten TTU
9	Cabang SoE	Jl. Diponegoro No. 01. SoE - Kabupaten TTS
10	Cabang Waikabubak	Jl. Gajah Mada No. 10. Waikabubak - Kabupaten Sumba Barat
11	Cabang Lewoleba	Jl. Trans Lembata. Lewoleba - Kabupaten Lembata
12	Cabang Larantuka	Jl. Basuki Rahmat. Larantuka - Kabupaten Flores Timur
13	Cabang Bajawa	Jl. Soekarno – Hatta. Kelurahan Ngedukelu. Kec. Bajawa. Kabupaten Ngada
14	Cabang Kalabahi	Jl. Dr. Soetomo No. 1. Kalabahi - Kabupaten Alor
15	Cabang Rote Ndao	Jl. Gereja No. 1. Kel. Namodale. Kec. Lobalain. Kabupaten Rote Ndao
16	Cabang Labuan Bajo	Jl. Wae Kelambu. Labuan Bajo - Kabupaten Manggarai Barat
17	Cabang Betun	Jl. Wei Abuk. Betun - Kabupaten Malaka
18	Cabang Waitabula	Jl. Timotius Tako Geli Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya
19	Cabang Mbay	Jl. Moh. Hatta. Kolibali. RT. 015 / RW. 000. Kelurahan Danga. Kecamatan Aesesa. Kabupaten Nagekeo
20	Cabang Borong	Jl. Raya Ruteng - Bajawa. Kabupaten Manggarai Timur
21	Cabang Sabu	Jl. Eltari Seba. Kec. Sabu Barat - Kabupaten Sabu Raijua
22	Cabang Waibakul	Jl. Lintas Waikabubak – Waingapu. Anamanu. Desa Wairasa. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat. Kabupaten Sumba Tengah
23	Cabang Oelamasi	Jl. Timor Raya KM 36. Kompleks Perkantoran Bupati Kupang Oelamasi - Kabupaten Kupang

No	Cabang Pembantu Sub-Branch Office"	Alamat Address
1	WaliKota	Jl. S.K. Lerik - Kota Kupang
2	Wolowaru	Jl. Raya Ende - Maumere, Kab. Ende
3	Melolo	Jl. Raya Melolo, Kab. Sumba Timur
4	Waiwerang	Jl. Kebun Raya, Waiwerang, Kab. Flores Timur
5	Niki-Niki	Jl. Timor Raya, Niki-Niki, Kab. TTS
6	Baun	Jl. Raya Kupang - Baun, Kab. Kupang
7	Takari	Jl. Timor Raya KM. 68, RT. 10 / RW. 5, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, Kab. Kupang
8	Kewapante	Jl. Raya Maumere – Larantuka, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kab. Sikka
9	Atapupu	Jl. Raya Mota'ain, Atapupu, Kab. Belu
10	Maurole	Jl. Raya Pasar Maurole, Kab. Ende
11	Lewa	Jl. Raya Waingapu - Waikabubak, Kab. Sumba Timur
12	Reo	Jl. Raya Ruteng - Reo, Kab. Manggarai
13	Balauring	Jl. Pasar Balauring, Desa Balauring, Kec. Omesuri, Kab. Lembata
14	Aimere	Jl. Raya Bajawa - Ruteng, Kab. Ngada
15	Pante baru	Jl. Raya Pantai Baru - Ba'a, Kab. Rote Ndao
16	Oelolok	Jl. Nasional Trans Timor, RT.013 / RW.007, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara
17	Oinlasi	Jl. Stanis Banunaek, Kab. TTS
18	Lembor	Jl. Nangalili - Lembor, Kab. Manggarai Barat
19	Weluli	Jl. Atambua - Weluli, Kab. Belu
20	Kapan	Jl. SoE - Kapan, Kab. Timor Tengah Selatan
21	Mena	Jln. Trans-Mena Oecusi, Desa Oepuah Utara, Kec. Biboki Moenleu, Kab. TTU
22	Waemoro	Jl. Raya Ruteng, Kab. Manggarai
23	Iteng	Jl. Iteng - Ruteng, Kab. Manggarai
24	Paga	Jln. Raya Maumere-Ende Lowolaba, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kab. Sikka
25	Elopada	Jl. Ahmad Yani, Desa Kalembu Ndara Mane, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya
26	Kabir	Jl. Raya Kabir, RT.07/RW.04, Kec. Pantar - Kab. Alor
27	Nggongi	Jl. Raya Trans Waingapu - Karera, Kab. Sumba Timur
28	Boawae	Jl. Trans Ende Bajawa, RT. 20, Pagonage, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo
29	Watunggong	Jl. Raya Watunggong - Elar, RT. 006, RW. 002, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kab. Manggarai Timur
30	Naikliu	Jl. Raya Naikliu, Amfoang Utara, Kab. Kupang
31	Kaputu	Jl. Raya Trans Kaputu - Betun, Kab. Malaka
32	Motaain	Jalan Lintas Silawan, RT.016/RW.007 – Dusun Motaain – Desa Silawan – Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu
33	Panite	Desa Pollo, RT.001 / RW.001, Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS

No	Cabang Pembantu Sub-Branch Office"	Alamat Address
34	Busalangga	Jl. Busalangga - Ba'a, Kec. Rote Barat Laut - Kab. Rote Ndao
35	Mukun	Desa Mukun, Kec. Kota Komba - Manggarai Timur
36	Pota	Jl. Raya Pota - Buntal, Kab. Manggarai Timur
37	Bukapiting	Nailang, RT.012/RW.006, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor
38	Wairiang	Jl. Trans Lembata, Kec. Buyasuri - Kab. Lembata
39	Weliman	Jl. Loro Haitimuk, Kec. Weliman Kab. Malaka
40	Nemberala	Desa Nemberala, Kec. Rote Barat Daya - Kab. Rote Ndao
41	Mangili	Jl. Raya Mangili Kanggoa, RT.009/RW.005, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur
42	Boru	Jl. Negara Trans Flores Desa Boru Kec. Wulangitang - Kab. Flores Timur
43	Kantor Gubernur NTT	Kompleks Kantor Gubernur NTT (sayap kanan), Jl. Raya El Tari No. 52, Kec. Oebobo, Kota Kupang
44	Raijua	RT. 012, RW. 006, Kelurahan Ledeunu, Kecamatan Raijua, Kab. Sabu Raijua
45	Oesapa	Jl. Timor Raya, KM. 10, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
46	Capem *Mobile*Surabaya	Jl. Panglima Sudirman No. 74, Surabaya

No	Kantor Fungsional Functional Office	Alamat Address
1	RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Kompleks RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang. Jl. Moh. Hatta No. 19. RT. 001 / RW. 001. Kelurahan Oetete. Kecamatan Oebobo. Kota Kupang
2	Oepura	Jl. Soeharto. Oepura. Kota Kupang
3	RSUD. T. C. Hillers	Jl. Wairklau. Maumere (Kom. RSUD. TC. Hillers)
4	Oeba	Jl. Sumba No. 10 - Kota Kupang
5	Merdeka	Jl. Ahmad Yani. Merdeka. Kota Kupang
6	Universitas Flores	Jl. Sam Ratulangi. Kabupaten Ende
7	RSUD. Umbu Raha Meha	Jl. Adam Malik No. 54. Waingapu. Kabupaten Sumba Timur
8	RSUD. Larantuka	Jl. Herman Fernandez. Larantuka. Kabupaten Flores Timur
9	Kantor Bupati Ende	Jl. Eltari (Kom. Kantor Bupati Ende)
10	STKIP Ruteng	Jl. Ahmad Yani No. 10. Ruteng. Kabupaten Manggarai
11	Kantor Bupati Manggarai	Jl. Motang Rua No. 1. Kota Ruteng. Kabupaten Manggarai
12	RSUD. Ruteng	Jl. Dr. Sutomo No. 1 (Kom. RSUD Ruteng). Kabupaten Manggarai
13	Baing	Jl. Raya Baing. RT.007/RW.004. Desa Hadakamali. Kecamatan Wula Waijelu. Kabupaten Sumba Timur
14	Universitas Kristen Artha Wacana	Jl. Adi Sucipto. Oesapa. Kota Kupang
15	Kantor Bupati Alor	Jl. El Tari No. 1. Kalabahi. Kabupaten Alor
16	Oesao	Jl. Timor Raya Km. 25.5 Kab Kupang

No	Kantor Fungsional Functional Office	Alamat Address
17	RSUD. Lewoleba	Jl. Trans Lembata - Lewoleba. Kec. Nubatukan. Kabupaten Lembata (Bagian Depan Dekat Loket Pembayaran)
18	RSUD. Atambua	Jl. Dr. Soetomo No. 2. Atambua. Kabupaten Belu
19	RS. Kristen Lindimara	Jl. Prof. Dr. W. Z. Johanes No. 4. Waingapu. Kabupaten Sumba Timur
20	RSUD. Kalabahi	Jl. Dr. Soetomo No. 8. Kalabahi. Kabupaten Alor
21	RSUD. Bajawa	Jl. Diponegoro (Komp. RSUD Bajawa) Kabupaten Ngada
22	Kantor Bupati Sumba Barat	Jl. Wae Karou (Kom. Kantor Bupati Sumba Barat)
23	Kantor Bupati Rote Ndao	Kom. Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai. Kabupaten Rote Ndao
24	Pagal	Jl. Reo - Ruteng. Kabupaten Manggarai
25	Kampung Ujung	Jl. Cumi - Cumi. Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Barat
26	Kantor Bupati Sumba Timur	Kompleks Kantor Bupati Sumba Timur. Jln. Soeharto No. 42 - Kelurahan Hambala. Kecamatan Kota Waingapu. Kabupaten Sumba Timur
27	Kantor Bupati Belu	Jl. El Tari. No. 1. Kel. Umanen - Kabupaten Belu
28	Wolowona	Jl. Hasanudin-Kec. Ende Timur. Kabupaten Ende
29	RSUD Kefamenanu	Jl. Letjen Soeprapto. Kefamenanu. Kabupaten TTU
30	Bupati Manggarai Timur	Jl. D.I. Panjaitan Lehong Manggarai Timur
31	Bupati Sumba Tengah	Kompleks Pemerintahan Makatul. Waibakul. Kabupaten Sumba Tengah
32	Bupati Sumba Barat Daya	Kompleks Pemerintahan Daerah Waitabula. Kabupaten Sumba Barat
33	Namosain	Jl. Pahlawan. Kelurahan Nunbaun Sabu. Kecamatan Alak. Kota Kupang
34	Nong Meak	Jl. Nong Meak No. 01. Maumere. Kabupaten Sikka
35	Pasar Kadelang	Jl. Buton. RT. 001 / RW. 004. Kelurahan Kalabahi Timur. Kecamatan Teluk Mutiara. Kabupaten Alor
36	Kantor Bupati Manggarai Barat	Jl. Frans Sales Lega. Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Barat
37	Lamahora	Jl. Trans Lembata - Lamahora. Kabupaten Lembata
38	Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 43. Atambua - Kabupaten Belu
39	Liliba	Jl. Bumi. RT. 037. RW. 010. Kelurahan Liliba. Kecamatan Oebobo. Kota Kupang
40	RS. St. Elisabeth Lela	Jl. Dusun Tada. Desa Lela. Kabupaten Sikka
41	Kupang Tengah	Jl. Timor Raya Km. 15. Kabupaten Kupang
42	Kelapa Lima	Jl. Timor Raya Km. 5. RT. 002/ RW. 001. Kelurahan Kelapa Lima. Kecamatan Kelapa Lima. Kota Kupang
43	Tuak Daun Merah	Jl. Frans Lebu Raya. RT. 021. RW. 006. Kelurahan TDM. Kecamatan Oebobo. Kota Kupang
44	Tenau	Jl. Simpang Raya Tenau. Kota Kupang
45	Kantor Bupati Nagekeo	Kompleks Bupati Nagekeo. Lape - Mbay (Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo)
46	RSUD SoE	Jl. Bougenvile. Kota SoE. Kabupaten TTS
47	Pasar Inpres SoE	Jl. Hayam Wuruk. Kota SoE. Kabupaten TTS

No	Kantor Fungsional Functional Office	Alamat Address
48	Kantor Bupati Sabu Raijua	Kompleks Kantor Bupati Sabu Raijua (bagian depan sebelah kanan). Jl. Trans Seba Bolou. Desa Menia. Kec. Sabu Barat. Kabupaten Sabu Raijua
49	Pasar Oebobo	Jl. Walter Mongonsidi. Kel. Fatululi. Kota Kupang
50	BTN Kolhua	Jl. Fetor Foenay. Kel. Maulafa. Kota Kupang
51	Penfui	Jl. Adi Sucipto RT. 008/RW.04. Penfui. Kota Kupang
52	RSUD Waikabubak	Kompleks RSUD Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat
53	Kantor Bupati Timor Tengah Selatan	Jl. Piet A. Tallo No. 1. Soe. Kabupaten TTS
54	Kota Larantuka	Jl. Trans Larantuka - Maumere. Kabupaten Flores Timur
55	Boas	Dusun Motasorun. RT. 002. RW. 002. Desa Dirma. Kec. Malaka Timur. Kabupaten Malaka
56	Bakunase	Jl. Alfons Nisnoni. Kelurahan Bakunase. Kecamatan Kota Raja. Kota Kupang
57	Mbaumuku	Jl. Gajah. Ruko Pemda. Kabupaten Manggarai
58	RSUD Ba'a	Kompleks RSUD Ba'a. Jln. Ba'a - Busalangga. Kel. Mokdale. Kec. Lobalain. Kabupaten Rote Ndao
59	RSUD Naibonat	Kompleks RSUD Naibonat. Kabupaten Kupang
60	RS. St. Carolus Borromeus	Kompleks RS. St. Carolus Borromeus. Kel. Bello - Kota Kupang
61	Citra Bangsa	Kompleks Univ. Citra Bangsa. Kayu Putih - Kota Kupang
62	RSD Aeramo	Kompleks Rumah Sakit Daerah Aeramo. Kabupaten Nagekeo
63	Oe'ekam	Jl. Raya Oe'ekam - SoE. Kec. Amanuban Timur. Kabupaten TTS
64	Panite	Jl Raya Panite - Batu putih. Kec. Amanuban Sltn. Kabupaten TTS
65	Kokar	Jl. Raya Kalabahi – Kokar. RT. 002. RW. 001. Dusun 1. Desa Alor Kecil. Kec. Alor Barat Laut. Kabupaten Alor
66	Moru	Jl. Raya Pasar Moru. Kec. Alor Barat Daya. Kabupaten Alor
67	Hinga	Jl. Raya Trans Sagu Kec. Kalobalogit. Kabupaten Flores Timur
68	Kota Baru	Jl. Trans Utara Ende Kec. Kota Baru. Kabupaten Ende
69	Detusoko	Jl. Negara Ende - Maumere. Kec. Detusoko. Kabupaten Ende
70	Nangapanda	Jl. Negara Ende - Bajawa. Kec. Nangapanda. Kabupaten Ende
71	Wajewa Barat / Waemangura	Jl. Waimagura. Kec. Wawewa Barat. Kabupaten Sumba Barat Daya
72	Kodi Utara	Jl. Raya Waitabula - Kodi Utara. Kec. Kodi Utara. Kabupaten Sumba Barat Daya
73	Hadakewa	Jl. Trans Lembata. RT. 002 / RW. 001. Dusun Tujuh Maret. Desa Hadakewa. Kec. Lebatukan. Kabupaten Lembata
74	Bola	Jl. Raya Bola Mapitara. Km. 25. Kec. Bola. Kabupaten Sikka
75	Talibura	Jl. Raya Maumere - Larantuka. Kec. Talibura. Kabupaten Sikka
76	Nita	Jl. Raya Maumere - Ende. Kec. Nita. Kabupaten Sikka
77	Mauponggo	Depan Kantor Puskesmas Mauponggo RT. 04 RW. 00. Kel. Mauponggo. Kec. Mauponggo. Kabupaten Nagekeo

No	Kantor Fungsional Functional Office	Alamat Address
78	Nangaroro	Jl. Trans Ende - Bajawa. RT. 021. RW. 000. Kelurahan Nangaroro. Kecamatan Nangaroro. Kabupaten Nagekeo
79	Golewa	Jl Raya Bajawa Ende. Kec. Golewa. Kabupaten Ngada
80	So'a	Jl. Raya Bajawa - So'a. Kec. So'a. Kabupaten Ngada
81	Riung	Jl Raya Mbay Riung. Kec. Riung. Kabupaten Ngada
82	Satarmese Barat	Jl. Raya Pela - Ramut. Kec. Satarmese Barat. Kabupaten Manggarai
83	Kuwus	Jl. Raya Ruteng - Terang. Kec. Kuwus. Kabupaten Manggarai Barat
84	Papela	Jl. Raya Ba'a - Papela. Kec. Rote Timur. Kabupaten Rote Ndao
85	Tana Righu	Jl. Raya Tana Righu Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat
86	Lamboya	Jl. Raya Lamboya - Waikabubak. Kec. Lamboya. Kabupaten Sumba Barat
87	Nggaha Ori Angu	Jl. Raya Waingapu - Lewa. Kec. Nggaha Ori Angu. Kabupaten Sumba Timur
88	Noemuti	Jl. Timor Raya. RT. 004. RW. 002. Dusun 1. Desa Fatumuti. Kec. Noemuti. Kabupaten Timor Tengah Utara
89	Halilulik	Jl. Raya Halilulik - Betun. Kec. Tasifeto Barat. Kabupaten Belu
90	Pasar Baru	Jl. Raya Pramuka. Kec. Atambua Barat. Kabupaten Belu
91	Kobalima	Jl. Raya Betun - Kobalima. Kec. Kobalima. Kabupaten Malaka
92	Camplong	Jl. Timor Raya - Lili. RT. 018. RW. 009. Kel. Camplong I. Kec. Fatuleu. Kabupaten Kupang
93	Oekabiti	Jl. Raya Oesao - Oekabiti. Kec. Amarasi Barat. Kabupaten Kupang
94	Sabu Timur	Jl. Eltari. Kelurahan/Desa Keduru. Kec. Sabu Timur. Kabupaten Sabu Raijua
95	Haekesak	Jl. Raya Sabuk Merah Trans Atambua – Haekesak. Desa Tohe Fatukesi. Kecamatan Raihat. Kabupaten Belu
96	Eban	Jl. Raya Eban - Kefa. Kabupaten TTU
97	Solor Timur	Jl. Trans Lewograran – Desa Lewohedo. Kecamatan Solor Timur. Kabupaten Flores Timur
98	Pasar Inpres Matawai	Jl. Palapa - Kota Waingapu. Kabupaten Sumba Timur
99	Batakte	Jl. Air Terjun Oenesu. Kupang Barat. Kabupaten Kupang
100	Maunori	Jl. Raya Maunori. Kabupaten Nagekeo
101	Bambor	Jl. Trans Flores - Bambor. Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Barat
102	Terang	Jl. Raya Labuan Bajo - Terang. Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai Barat
103	Bealaing	Jl. Raya Bealaing - Borong. Kabupaten Manggarai Timur
104	Waelengga	Jl. Raya Ruteng - Ende . Borong. Kabupaten Manggarai Timur
105	Pasar Pada	Jl. Trans Nagawutung. Lewoleba. Kabupaten Lembata
106	Maritaing	Jl. Maritaing. Kec. Alor Timur. Kabupaten Alor
107	Mamboro	Kompleks Kantor Camat Mamboro. Kabupaten Sumba Tengah
108	Lamalera	Jl. Ikan Paus. Kec. Wulandoni. Kabupaten Lembata
109	Wini	Jl. Ikan Paus. Kec. Insana Utara. Kabupaten TTU
110	Waiwadan	Jl. Trans Adonara - Larantuka. Kec. Adonara Barat. Kabupaten Flores Timur

No	Kantor Fungsional Functional Office	Alamat Address
111	Wewaria	Jl. Pantura Maurole - Detusoko. Dusun Welamosa I. RT. 001. RW.001. Desa Welamosa. Kecamatan Wewaria. Kabupaten Ende
112	Semau	Jln. Poros Selatan. Desa Uitao. Kec. Semau - Kabupaten Kupang
113	Pulau Ende	Jln. Raya Pulau Ende. RT. 005 / RW. 003. Desa Rendorateru. Kabupaten Ende
114	Moni	Jl. Trans Ende - Maumere. RT. 001/RW. 001. Desa Koanara. Kec. Kelimutu. Kabupaten Ende
115	Benteng Jawa	Desa Tengku Leda. RT. 003. RW. 001. Kecamatan Lamba Leda. Kabupaten Manggarai Timur
116	Weoe	Dusun Weoe C. RT. 004. RW. 002. Desa Weoe. Kec. Wewiku. Kabupaten Malaka
117	Kajong	Kajong. RT. 007. RW. 004. Desa Kajong. Kecamatan Reok Barat. Kabupaten Manggarai

No	Payment Point Payment Point	Alamat Address
1	SAMSAT Kabupaten Sumba Tengah	Jl. Waibakul - Waikabubak. Kabupaten Sumba Tengah
2	SAMSAT Kabupaten Sumba Barat Daya	Jl. Poma. Waitabula. Kabupaten Sumba Barat Daya
3	SAMSAT Kota Kupang	Jl. R. Suprapto No. 15 A. Kota Kupang
4	SAMSAT Kabupaten Ende	Jl. Melati. Kabupaten Ende
5	SAMSAT Kabupaten Flores Timur	Jl. Ahmad Yani. Kota Larantuka. Kabupaten Flores Timur
6	SAMSAT Kabupaten Manggarai Timur	Kompleks Pasar Borong. Kabupaten Manggarai Timur
7	SAMSAT Kabupaten TTS	Jl. Gunung Molo. SoE. Kabupaten TTS
8	SAMSAT Kabupaten Sumba Timur	Jl. Ampera No. 14. Waingapu. Kabupaten Sumba Timur
9	SAMSAT Kabupaten Manggarai	Jl. Katedral No. 04. Ruteng. Kabupaten Manggarai
10	SAMSAT Kabupaten Manggarai Barat	Jl. Frans Nala. Batu Cermin. Kabupaten Manggarai Barat
11	SAMSAT Kabupaten Ngada	Jl. R. A Kartini. Kota Bajawa. Kabupaten Ngada
12	SAMSAT Kabupaten Sikka	Jl. Eltari. Maumere. Kabupaten Sikka
13	SAMSAT Nagakeo	Jl. Trans Mbay - Marakokop. Kabupaten Nagekeo
14	SAMSAT Kabupaten Lembata	Jl. Trans Lembata. Kabupaten Lembata
15	Samsat Timor Tengah Utara	Jl. El Tari KM. 6. Kota Kefamenanu. Kabupaten TTU
16	SAMSAT Kabupaten Sumba Barat	Jl. Wae Karou. Loli. Kabupaten Sumba Barat
17	SAMSAT Kabupaten Alor	Jl. Ahmad Yani No. 32. Kalabahi. Kabupaten Alor
18	SAMSAT Kabupaten Belu	Jl. A. J. Bere Mau. Kec. Atambua Barat. Kabupaten Belu
19	Bapenda Kota Kupang (eks. Swastisari Kota Kupang)	Jl. S. K. Lerik No. 1. Kelapa Lima. Kota Kupang
20	SAMSAT Sabu Raijua	Jl. Trans Seba Bolou. Km. 07. Desa Raemadia. Kec. Sabu Barat. Kabupaten Sabu Raijua
21	Mall Pelayanan Publik Kabupaten Ngada	Jl. Soekarno - Hatta. Kel. Ngedukelu. Kec. Bajawa. Kabupaten Ngada
22	SAMSAT Oelamasi	Jl. Timor Raya. Babau. Kec. Kupang Timur. Kabupaten Kupang
23	SAMSAT Betun	Jl. Ahmad Yani No. 01. Dusun Laran. Desa Wehali. Kec. Malaka Tengah. Kabupaten Malaka

No	Payment Point Payment Point	Alamat Address
24	SAMSAT Rote Ndao	Jl. Civic Center Bumi Ti'i Langga. Kel. Lekunik. Kec. Lobalain. Kabupaten Rote Ndao
25	RSUD Borong	Lehong. Desa Gurung Liwut. Kecamatan Borong. Kabupaten Manggarai Timur
26	Unkriswina Sumba	Jl. R. Suprapto No. 35. Kelurahan Prailiu. Kecamatan Kambera. Kabupaten Sumba Timur
27	RSJ Naimata Kupang	Jl. Taebenu. RT. 007 / RW. 003. Kelurahan Naimata. Kecamatan Maulafa. Kota Kupang
28	Kantor Bupati Kupang	Jl. Timor Raya KM 36. Kompleks Perkantoran Bupati Kupang. Oelamasi. Kabupaten Kupang

No	Kas Mobil Mobile Cash	Alamat Address
1	Kas Mobil Keliling KCK	Jl. W. J. Lalamentik No. 102. Kota Kupang
2	Kas Mobil Keliling KC. Lewoleba	Jl. Trans Lembata. Lewoleba - Kabupaten Lembata
3	Kas Mobil Cabang Maumere	Jl. El Tari. Maumere. Kabupaten Sikka
4	Kas Mobil Cabang Ende	Jl. Moh. Hatta No. 60. Kabupaten Ende
5	Kas Mobil Keliling KC. Ende	Jl. Moh. Hatta No. 60. Kabupaten Ende
6	Kas Mobil Cabang Ruteng	Jl. Katedral. Ruteng. Kabupaten Manggarai
7	Kas Mobil Cabang Waikabubak	Jl. Gajah Mada No. 10. Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat
8	Kas Mobil Keliling KC. Atambua	Jl. Cut Nyak Dien. Atambua. Kabupaten Belu

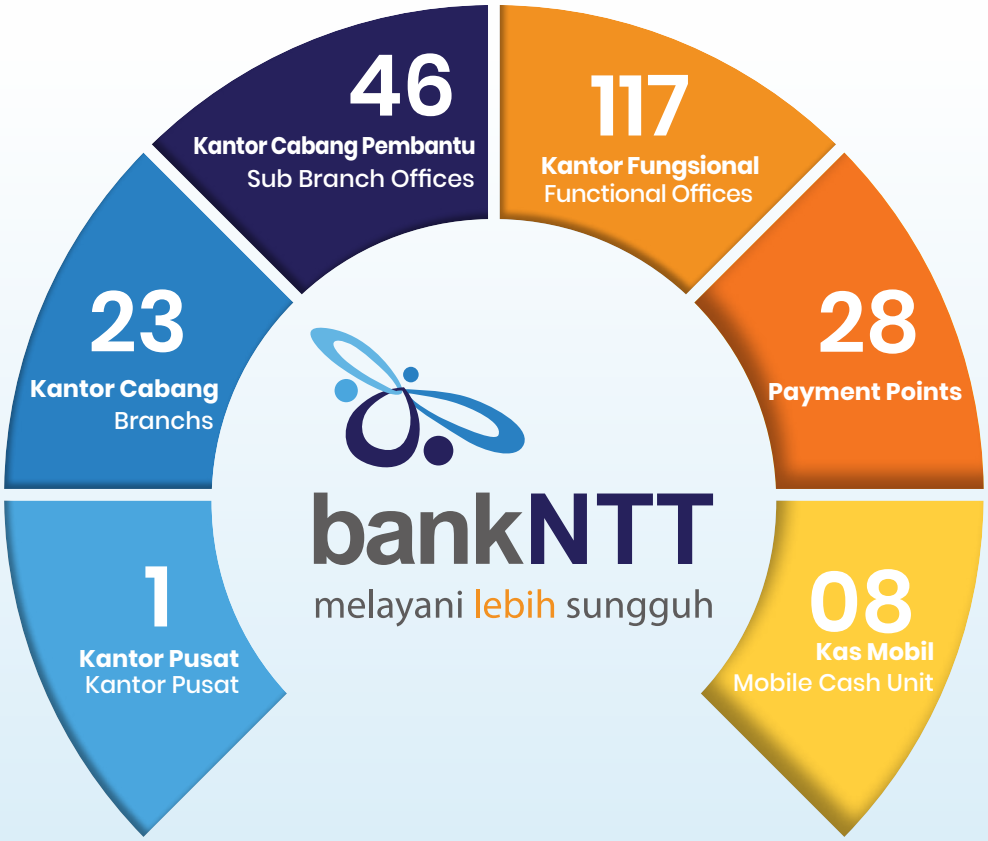

Lokasi Jaringan ATM & CRM Bank NTT Tahun 2025

Location of Bank NTT ATM Network & CRM in 2025

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
KANTOR CABANG UTAMA	
ATM Hotel Harper	Fatuli, Kec Oebobo, Kota Kupang.
ATM Sulung Budi	Jl. Cendrawasih No. 04. Kec. Kota Lama, Kota Kupang.
ATM Lippo Plaza	Jl. Veteran Fatululi.Kec. Oebobo, Kota Kupang.
ATM Gerai Kuanino	Jl. Moh. Hatta 56, Kupang, Kota Kupang.
ATM KCU	Jl. Moh. Hatta 56, Kota Kupang.
ATM Indomaret Merdeka	Jl. Ahmad Yani, Kota Kupang.
ATM Hotel Pelangi	Jl. Frans Seda No. 22 Kec Oebobo, Kota Kupang.
ATM Kantor Fungsional Namosain	Jl. Pahlawan No.22. Namosain Kec. Alak, Kota Kupang.
ATM Se'I Babi Bakunase	Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
ATM Gerai Kuanino	Jl. Moh. Hatta 56, Kota Kupang.
ATM Kantor Fungsional Tenau	Jl. Simpang Raya Tenau, Alak, Kota Kupang.
ATM Kantor Cabang Utama	Jl. Cak Doko 50, Kota Kupang.
ATM Kantor Fungsional RSU Kupang	Kompleks RSUD W. Z. Yohanes Kupang, Kota Kupang.
ATM RSU SK. Lerik	Jl Walter Mongonsidi. Kel. Fatululi , Kota Kupang.
ATM Hotel Debitos	Jl. El Tari 2, Kota Kupang.
ATM Indomaret Sudirman Kuanino	Jl. Sudirman Kuanino, Kota Kupang.
ATM Dinas Penanaman Modal	Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kota Kupang.
CRM Cabang Utama	Jl. Cak Doko 50, Kota Kupang.
CRM Gerai Cabang Utama	Jl. Cak Doko 50, Kota Kupang.
CRM Gerai Kuanino	Jl. Moh. Hatta 56, Kota Kupang.
CRM Kantor Fungsional Oebobo	Jl. Walter Mongonsidi. Kel. Fatululi, Kota Kupang.
ATM Capem Gubernur	Jl. Polisi Militer Aula Eltari Lt 1, Kota Kupang.
CRM Capem Gubernur	Jl. Polisi Militer Aula Eltari Lt 1, Kota Kupang.
ATM Capem Walikota	Jl. Timor Raya No.134 Pasir Panjang. Kec Kota Lama, Kota Kupang.
CRM Capem Walikota	Jl. S.K. Lerik, Kota Kupang.
KANTOR CABANG KHUSUS	
ATM Kantor Fungsional Sikumana	Jl. Fetor Funai, Maulafa, Kota Kupang.
ATM Kantor Fungsional UNKRIS	Jl. Adi Sucipto. No.147, Oesapa, Kota Kupang.
ATM Flobamora Mall	Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
ATM Capem Oesapa	Jl. Timor Raya Km. 10 No. 3. Lasiana, Kota Kupang.
ATM Swalayan Dutalia	Jl. Timor Raya, Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
ATM Bandara El Tari	Penfui Timur, Kabupaten Kupang.
ATM Disabilitas Kantor Pusat	Jl. W.J. Lalamentik No 102, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
ATM RSUP Ben Mboi	Jl. Viquam Kel Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang.
ATM Hotel Pelangi Kupang	Jl. Frans Seda No. 22 Kec. Oebobo, Kota Kupang.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
ATM Swalayan Kingmart	Jl. Raya Penfui, Kota Kupang.
ATM RS Mamami	Pasir Panjang. Kec Kota Lama, Kota Kupang.
ATM Kantor PU Kupang	Jl. W.J. Lalamentik No 18. Kec. Oebobo, Kota Kupang.
ATM Indomaret Liliba	Jl. Bumi, Kel. Liliba, Kota Kupang.
ATM Indomaret BTN Kolhua	Jl. Fetor Foenay. Kolhua. Kel. Maulafa - Kota Kupang.
ATM RS Kartini Kupang	Jl. Frans Seda No. 17, Kota Kupang.
ATM RSIA Leona	Jl. Soverdi No.20 Oebufu. Kec Oebobo, Kota Kupang.
ATM Tiara Mart Oesapa	Jl.Piet A. Tallo. Oesapa Selatan, Kota Kupang.
ATM Chrysant Homestay	Jl.Antonov No. 27, Kel. Baumata Barat, Kabupaten Kupang.
ATM Tofa. KCK	Jl.Amabi No. 99, Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
ATM Kantor Fungsional SR. S.T. Carolus Barromeus	Jl. H. R. Koroh KM 8 Bello, Kota Kupang.
ATM Kantor Fungsional Oesapa	Jl. Frans Seda, Kota Kupang.
ATM Kahang Jaya	Jl. Eltari II Liliba, Kota Kupang.
ATM Chrysant Homestay	Kompleks Univ. Citra Bangsa, Kayu Putih, Kota Kupang.
ATM KANTOR FUNGSIONAL Politani Kupang	Lasiana Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang.
ATM Gallery Kantor Pusat	Jl. W.J. Lalamentik No 102.Kec. Oebobo, Kota Kupang.
ATM Oepura	Jl.H.R. Koroh No.17 Oepura. Kec. Maulafa, Kota Kupang.
CRM Gallery Kantor Pusat	Jl.W.J. Lalamentik No 102.Kec. Oebobo, Kota Kupang.
CRM Gallery Kantor Pusat	Jl.W.J. Lalamentik No 102.Kec. Oebobo, Kota Kupang.
ATM Gerai Kantor Pusat	Jl. Soeharto No. 83A - Kota Kupang.
CRM Capem Oesapa	Jl. Timor Raya Km. 10 No. 3. Lasiana, Kota Kupang.
CRM Gallery Kantor Pusat	Jl.W.J. Lalamentik No 102.Kec. Oebobo, Kota Kupang.
CABANG MAUMERE	
ATM Kantor Fungsional Nong Meak	Jl. Nong Meak Kel. Kabor Kec. Alok Kabupaten Sikka.
ATM RS. Hillers	Kompleks RSUD TC. Hillers Jl. Wairklau Kel. Kota Uneng Kec. Alok Kabupaten Sikka.
ATM Kantor Fungsional Bupati Maumere	Jl. Nong Meak Kel. Kabor Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
ATM Hotel Benggoan	Jl. Moa Toda No 9. Kel Kota Baru Kec Alok Timur, Kabupaten Sikka.
ATM Mobil Kas Maumere	Jl. Eltari Kel. Kota Uneng Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
ATM Kantor Cabang Maumere	Jl. Eltari Kel. Kota Uneng Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
ATM Hotel Sylvia	Jl. Gadja Mada No. 88 Kel. Madawat Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
ATM Apotik Agradece	Jl. Raya Maumere-Magepanda. Kel. Wolomarang Kec Alok Barat, Kabupaten Sikka.
CRM Kantor Cabang Maumere	Jl. Eltari Kel. Kota Uneng Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
ATM Capem Paga	Jl. Raya Maumere-Ende, Desa Paga. Kec. Paga, Kabupaten Sikka.
ATM Capem Kewapante	Desa Namang Kewa. Kec. Kewapante, Kabupaten Sikka.
ATM Hotel Capa	Jl. Nairoa - Waipare. Maumere, Kabupaten Sikka.
ATM RS ST. Gabriel	Desa Namang Kewa. Kec. Kewapante, Kabupaten Sikka.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
CABANG ATAMBUA	
ATM Kantor Fungsional HalilulK	Jl. Raya Halilulik, Kabupaten Belu.
ATM Kantor Fungsional RSUD Atambua	Jl. Basuki Rahmat, Atambua - Kabupaten Belu.
ATM Mini Market Jabalmart	Jl. Gajah Mada, Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Hotel Timor	Jl. Dr. G. A. Siwabessy , Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Sudirman	Jl. Jend. Sudirman 43, Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Sudirman	Jl. Jend. Sudirman 43, Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Mobil Kas Atambua	Jl. Cut Nyak Dien, Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Kantor Fungsional Pasar Baru	Jl. Raya Pramuka. Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu.
ATM Kantor Fungsional Haekesak	Jl. Raya Atambua – Haekesak, Kabupaten Belu.
ATM Kantor Fungsional RSUD Atambua	Jl. Dr. Soetomo No 2 Kompleks RSUD Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Hotel King Star	Jl. Moh. Yamin. KM 1 Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Maiona Mart	Jl. Marsda Adi Sucipto. Atambua, Kabupaten Belu.
CRM Cabang Atambua	Jl. Cut Nyak Dien, Atambua, Kabupaten Belu.
ATM Capem Motaain	Jl. Lintas Silawan, Kabupaten Belu.
ATM Capem Weluli	Jl. Atambua – Weluli, Kabupaten Belu.
ATM Capem Atapupu	Jl. Raya Atapupu, Kabupaten Belu.
CABANG ENDE	
ATM Hotel Flores	Jl. Eltari, Kabupaten Ende.
ATM Kantor Cabang Ende	Jl. Sudirman, Kabupaten Ende.
ATM RSUD Ende	Jl. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kabupaten Ende.
ATM KANTOR FUNGSIONAL Nangapanda	Jl. Negara Ende - Bajawa KM. 28. Kec. Nangapanda, Kabupaten Ende.
ATM KANTOR FUNGSIONAL Detusoko	Jl. Negara Ende - Maumere. Kec. Detusoko, Kabupaten Ende.
ATM Roxy Swalayan	Jl. A. Yani, Kabupaten Ende.
ATM Toko Metro	Jl. Gatot Subroto, Kabupaten Ende.
ATM Kantor Cabang Ende	Jl. Moh Hatta No.60 Kabupaten Ende.
ATM Kantor Fungsional Wolowona	Jl. Hasanudin-Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende.
CRM Kantor Cabang Ende	Jl. Moh Hatta No.60 Kabupaten Ende.
ATM Capem Wolowaru	Jl. Raya Ende - Kabupaten Ende.
ATM Capem Maurole	Jl. Raya Pasar Maurole, Kabupaten Ende.
CABANG WAINGAPU	
ATM Kantor Cabang Waingapu	Jl. Ahmad Yani No.18. Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Kantor Fungsional Bupati Waingapu	Jl. Jend Soeharto No.42. Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Kantor Fungsional RSU Umbu Rara Meha	Kompleks RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Kantor Dinkes Waingapu	Jl. R. Suprapto Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Cabang Waingapu	Jl. Ahmad Yani No.18. Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM SPBU Hambala	Hambala. Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM SPBU Kambaniru	Jl. Gatot SubrotoNo 30a. Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Cinta Karya Mart	Jl. Matawai Amahu, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
CRM Kantor Cabang Waingapu	Jl. Ahmad Yani No.18, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Capem Lewa	Jl. Raya Waingapu – Waikabubak, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Capem Nggongi	Jl. Raya Trans Waingapu – Karera, Kabupaten Sumba Timur.
ATM Capem Melolo	Jl. Raya Melolo – Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
CABANG RUTENG	
ATM Kantor Cabang Ruteng	Jl Katedral No.4 Ruteng, Kabupaten Manggarai.
ATM STKIP Ruteng	Jl. Ahmad Yani No. 10. Ruteng, Kabupaten Manggarai.
CRM Kantor Cabang Ruteng	Jl Katedral No.4 Ruteng, Kabupaten Manggarai.
ATM Kantor Cabang Ruteng	Jl. Watu Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
CRM RSUD Ben Mboy Ruteng	Kompleks RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai.
ATM Capem Waemoro	Jl. Raya Ruteng - Labuan Bajo, Kel. Wae Belang, Ruteng, Kabupaten Manggarai.
ATM Capem Iteng	Jl. Raya Iteng – Ruteng, Kabupaten Manggarai.
ATM Capem Reo	Jl. Raya Ruteng – Reo, Kabupaten Manggarai.
CABANG KEFA	
ATM Kantor Fungsional Bupati Kefa	Jl. Sudirman Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.
ATM Kantor Cabang Kefa	Jl Eltari Km. 2. Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.
ATM Toko Jabalmart	Jl Kartini Kel. Kefa Tengah Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.
ATM Duta Bangunan	Jl. Eltari Kefamenanu, Kabupaten TTU.
ATM Pertamina Km.4	Jl. Trans Kefa KM. 4. Kefamenanu, Kabupaten TTU.
ATM Kantor Fungsional Eban	Jl. Raya Eban, Kefa, Kabupaten TTU.
CRM Kantor Cabang Kefa	Jl. Eltari Km. 2. Kel. Benpasi Kec. Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.
ATM Capem Mena	Jl. Trans-Mena Oecusi, Desa Oepuah Utara. Kec. Biboki Moenleu, Kabupaten TTU.
ATM Kantor Fungsional Wini	Jl. Ikan Paus Wini. Desa Humusu Wini, Kec. Insana Utara - Kabupaten TTU.
ATM Capem Oelolok	Jl. Timor Raya - Kabupaten TTU.
CABANG SOE	
ATM Kantor Fungsional RSUD Soe	Jl. Bougenvile, SoE, Kabupaten TTS.
ATM Pasar Inpres Kota Soe	Jl. Hayam Wuruk, SoE, Kabupaten TTS.
ATM Kantor Cabang Soe	Jl. Diponegoro No. 01 SoE. Kabupaten TTS.
ATM Kantor Dinas PPO Soe	Jl. Mollo, Soe, Kabupaten TTS.
ATM Swalayan Mubatar	Jl Diponegoro, Soe, Kabupaten TTS.
ATM Kantor Fungsional Panite	Jl. Raya Panite - Batu Putih, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten TTS.
ATM Hotel Blessing	Jl. Trans Timor Kec. Kota SoE, Kabupaten TTS.
ATM Kantor Fungsional Bupati Soe	Jl. Piet A. Tallo No. 1. Soe, Kabupaten TTS.
CRM Kantor Cabang Soe	Jl. Diponegoro No. 01 SoE, Kabupaten TTS.
ATM Capem Oinlasi	Jl. Stanis Banunaek, Oinlasi, Kabupaten TTS.
ATM Kantor Fungsional Oe'ekam	Jl. Raya Oeekam, Kec. Amanuban Timur, Kabupaten TTS.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
CABANG WAIKABUBAK	
ATM Kantor Cabang Waikabubak	Jl. Gajah Mada No.10, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
ATM RS Kristen Lende Moripa	Jl. Gajah Mada No. 10, Kabupaten Sumba Barat.
ATM Kantor Fungsional Bupati Waikabubak	Jl. Gajah Mada 10 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
ATM Kantor Fungsional RSUD Waikabubak	Jl. Adhyaksa, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
ATM Toko Sahabat	Jl. Ahmad Yani No. 138, Kel Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
ATM Toko Umma Kabba	Jl. Bhayangkara. Kel. Pada Ewatta, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
CRM Kantor Cabang Waikabubak	Jl. Gajah Mada 10 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
CABANG LEWOLEBA	
ATM Capem Wairiang	Jl. Trans Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata.
ATM Kantor Fungsional Lamahore	Jl Trans Lembata - Lamahora. Kabupaten Lembata.
ATM Kantor Fungsional RSUD Lewoleba	Jl. Trans Lembata Lewoleba. Kabupaten Lembata.
ATM Kantor Fungsional Bupati Lewoleba	Jl. Trans Lembata. Lewoleba. Kabupaten Lembata.
ATM Kantor Cabang Lewoleba	Jl. Trans Lembata. Lewoleba. Kabupaten Lembata.
ATM Toko Naga Mas	Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.
CRM Kantor Cabang Lewoleba	Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata.
ATM Capem Balauring	Jl. Balauring – Lembata, Kabupaten Lembata.
CABANG LARANTUKA	
ATM Kantor Fungsional RSUD Larantuka	Jl. Yoakhim L. B. de Rosari 27 Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
ATM Kantor Cabang Larantuka	Jl. Basuki Rahmat. Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
ATM Kantor Fungsional Waiwadan	Jl Trans Adonara - Larantuka. Kec. Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur.
ATM Kantor Fungsional Kota Larantuka	Jl. Nasional Larantuka. Kel. Pantai Besar. Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
CRM Kantor Cabang Larantuka	Jl. Basuki Rahmat, Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
ATM Capem Boru	Jl. Negara Trans Flores, Desa Boru Kec. Wulangitang, Kabupaten Flores Timur.
ATM Capem Waiwerang	Jl. Kebun Raya – Waiwerang, Kabupaten Flores Timur.
CABANG BAJAWA	
ATM Alfamart Trans Flores	Jl. Trans Flores. Kec. Golewa Bajawa, Kabupaten Ngada.
ATM KANTOR FUNGSIONAL Bupati Bajawa	Kompleks Kantor Bupati Ngada – Bajawa, Kabupaten Ngada.
ATM Kantor Cabang Bajawa	Jl. Gajah Mada No. 1 Bajawa, Kabupaten Ngada.
ATM Kantor Fungsional Golewa	Jl. Raya Bajawa - Ende. Kec. Mataloko, Kabupaten Ngada.
ATM Bandara Soa	Jl. T. W. Mengeruda Desa Masumeli Kec. Soa, Kabupaten Ngada.
CRM Kantor Cabang Bajawa	Jl. Soekarno-Hatta Kel Ngedukelu Kec. Bajawa, Kabupaten Ngada.
ATM Capem Aimere	Jl. Raya Bajawa – Ruteng, Kabupaten Ngada.
CABANG KALABAHI	
ATM Kantor Cabang Kalabahi	Jl. Dr. Sutomo No. 01 Kalabahi Kota, Kabupaten Alor.
ATM Kantor Fungsional Bupati Alor Kalabahi	Jl. Soekarno Hatta No. 12. Kel. Welai Timur, Kalabahi, Kabupaten Alor.
ATM Kantor Fungsional RSUD Kalabahi	Jl. Dr. Sutomo 8, Kalabahi Kota, Kabupaten Alor.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
ATM Kantor Cabang Kalabahi	Jl. Dr. Soetomo No. 1. Kalabahi Kota, Kabupaten Alor.
ATM SPBU Afengmale	Jl. Panglima Polem. Kadelang. Kalabahi Timur, Kalabahi, Kabupaten Alor.
ATM Hotel Pulo	Jl. Eltari. Kelurahan Mutiara, Kabupaten Alor.
ATM Kantor Cabang Kalabahi	Jl. Dr. Soetomo No. 01. Kalabahi Kota, Kabupaten Alor.
ATM Lipa	Jln Jend. Sudirman-Kalabahi Tengah- Kabupaten Alor.
CRM Kantor Cabang Kalabahi	Jl. Dr. Soetomo No. 01. Kalabahi Kota, Kabupaten Alor.
ATM Capem Kabir	Jl. Raya Kabir, RT.07/RW.04. Kec. Pantar, Kabupaten Alor.
ATM Capem Bukapiting	Jl. Bukapiting RT. 12/RW.06, Kec. Alor Timur Laut, Kabupaten Alor.
CABANG ROTE	
ATM Kantor Cabang Rote	Jl. Gereja No. 1. Kel. Namodale. Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Sanggaoen	Jl. Baa-Busalangga, Desa Tuanatuk Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Kantor Cabang Rote	Jl. Gereja No. 1 Ba'a, Kel. Namodale Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Kantor Fungsional RSUD Ba'a	Jl. Baa-Busalangga, Kel. Mokdale Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Kantor Cabang Rote	Jl. Gereja No. 1 Ba'a. Kel. Namodale Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
CRM Kantor Cabang Rote	Jl. Gereja No. 1 Ba'a. Kel. Namodale Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Capem Pante Baru	Jl. Raya Pantai Baru – Baa, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Kantor Fungsional Papela	Jl. Raya Baa – Papela, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Capem Busalangga	Jl. Busalangga - Baa - Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.
ATM Capem Nembrala	Jl. Raya Nemberala – Baa, Kabupaten Rote Ndao.
CABANG SABU	
ATM Kantor Cabang Sabu	Jl. Trans Seba-Bolou, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Kantor Cabang Sabu	Jl. Raya Pelabuhan Seba, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Kantor Fungsional Bupati Sabu	Jl. Trans Seba-Bolou, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Kantor Fungsional Sabu Timur	Jl. Eltari, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Capem Raijua	Jl. Raya Raijua, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Seba	Jl. Trans Seba-Bolou, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Seba	Jl. Raya Seba, Kabupaten Sabu Raijua.
ATM Ledeana	Jl. Raya Seba – Mehara, Kabupaten Sabu Raijua.
CRM Kantor Cabang Sabu	Jl. Trans Seba-Bolou, Kabupaten Sabu Raijua.
CABANG BETUN	
ATM Kantor Cabang Betun	Jl. Umakatahan Desa Wehali. Kabupaten Malaka.
ATM Kantor Cabang Betun	Jl. Lintas Batas Desa Rainawe. Kabupaten Malaka.
ATM Kantor Fungsional Bupati Malaka	Jl. Sukabi Hanawa. Desa Kamanasa. Kabupaten Malaka.
CRM Kantor Cabang Betun	Jl. Umakatahan Desa Wehali. Kabupaten Malaka.
ATM Kantor Fungsional Boas	Jl. Trans Atambua-Betun Desa Dirma. Kabupaten Malaka.
ATM Capem Kaputu	Jl. Raya Trans Kaputu, Desa Manulea, Kabupaten Malaka.
ATM Capem Weliman	Jl. Loro Haitimuk, Kec. Weliman Kabupaten Malaka.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
CABANG LABUAN BAJO	
ATM Kantor Fungsional Kampung Ujung	Jl. Cumi – Cumi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
ATM Kantor Cabang Labuan Bajo	Jl. Wai Kalembu, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
ATM Kantor Fungsional Bupati Labuan Bajo	Jl. Wae Kulambu, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
ATM Kantor Cabang Labuan Bajo	Jl. Wai Kalembu, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
CRM Gallery Digital Lounge Labuan Bajo	Jl. Pius Papu, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
CRM Water Front Labuan Bajo	
ATM Kantor Fungsional Bambor	Jl Trans Flores – Bambor, Kabupaten Manggarai Barat.
CABANG WAITABULA	
ATM Kantor Cabang Waitabula	Jl. Timotius Tako Geli, Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
ATM Kantor Fungsional Bupati Waitabula	Kompleks Pemerintahan Daerah Waitabula.
ATM Laratama	Desa Radamata, Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya.
ATM SPBU Bumi Indah	Desa Taworara Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya.
ATM Kantor Fungsional Waimangura	Waimangura, Kab Sumba Barat Daya.
ATM Kantor Cabang Waitabula	Jl. Timotius Tako Geli, Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
ATM Kantor Fungsional Kodi Utara	Jl. Raya Waitabula - Kodi Utara, Kec. Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.
ATM Kantor Cabang Waitabula	Jl. Timotius Tako Geli, Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
CRM Kantor Cabang Waitabula	Jl. Timotius Tako Geli, Desa Radamata Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
CABANG OELAMASI	
ATM Kantor Fungsional Oesao	Jl. Timor Raya Km. 25, Kabupaten Kupang.
ATM Kantor Cabang Oelamasi	Jl. Timor Raya Km. 25, Kabupaten Kupang.
ATM Kantor Fungsional Tarus	Jl. Timor Raya Km. 15, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
ATM Kantor Fungsional Oekabiti	Nonbes, Kabupaten Kupang.
ATM PDAM Kabupaten Kupang	Jl.Anggrek No 14. Oepura, Kec Maulafa, Kota Kupang.
CRM Kantor Cabang Oelamasi	Jl. Timor Raya Km.36, Oelamasi, Kabupaten Kupang.
ATM Kantor Capem Baun	Jl. H. R. Koroh RT/RW 017/009, Kel. Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
ATM Kantor Capem Takari	Jl. Timor Raya No.70, Takari, Kabupaten Kupang.
CABANG BORONG	
ATM Kantor Fungsional Bupati Borong	Kompleks Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong – Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
ATM Kantor Fungsional Bealaing	Jl. Raya Ruteng - Bajawa. Kec. Pocoranaka – Borong. Kabupaten Manggarai Timur.
ATM Kantor Cabang Borong	Jl. Raya Ruteng – Bajawa, Kabupaten Manggarai Timur.
ATM Pancaran Mart	Jl. Rana Loba – Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
CRM Kantor Cabang Borong	Jl. Raya Ruteng – Bajawa, Kabupaten Manggarai Timur.
ATM Capem Benteng Jawa	Jl. Raya Pota – Buntal, Kabupaten Manggarai Timur.

Nama Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
CABANG MBAY	
ATM Kantor Fungsional Bupati Mbay	Jl. Moh. Hatta No. 1, Kabupaten Nagekeo.
ATM Kantor Cabang Mbay	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
ATM Kantor Fungsional Nangaroro	Jl. Trans Ende – Bajawa, Kec. Nangaroro, Kabupaten Nagekeo.
ATM Kantor Cabang Mbay	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
ATM Kantor Cabang Mbay	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
ATM Kantor Fungsional RSUD Mbay	Jl. Prof. W. Z. Yohanes, Desa Aeramo, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
CRM Kantor Cabang Mbay	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Danga, Kec. Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
ATM Capem Boawae	Jl. Raya Trans Ende – Bajawa, Kabupaten Nagekeo.
CABANG WAIBAKUL	
ATM Kantor Cabang Waibakul	Jl. Lintas Waikabubak – Waingapu, Kabupaten Sumba Tengah.
ATM Kantor Cabang Waibakul	Jl. Lintas Waikabubak – Waingapu, Kabupaten Sumba Tengah.
ATM RS Bergerak	Waihibur, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.
ATM Orange Mart	Desa Wairasa. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.
CRM Kantor Cabang Waibakul	Jl. Lintas Waikabubak – Waingapu, Kabupaten Sumba Tengah.

JARINGAN KANAL DIGITAL BANK NTT TAHUN 2025

BANK NTT DIGITAL CHANNEL NETWORK BY 2025

948 Merchant

Jumlah Pengguna Electronic Data Capture (EDC) Bank NTT

Number of Bank NTT Electronic Data Capture (EDC) Users

145.959 Pengguna Member

Jumlah Pengguna Mobile Banking Bank NTT

Number of Bank NTT Mobile Banking Users

5.863 Pengguna Member

Jumlah Pengguna CMS Bank NTT

Number of Bank NTT CMS Users

1.740 Unit Unit

Jumlah Agen Laku Pandai Bank NTT

Number of Bank NTT Laku Pandai Agents

467.674 Pengguna Member

Jumlah Pengggguna Kartu ATM Bank NTT

Number of Bank NTT ATM Card Users

1.887 agen agen

Jumlah Agen Di@ Bisa Bank NTT

Number of Di@ Bisa Bank NTT Agents

PERISTIWA PENTING TAHUN 2025

KEY EVENTS IN 2025

14 Mei May

Bank NTT melaksanakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada tanggal 14 Mei 2025 yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham seri A dan seri B Bank NTT.

Bank NTT held its 2024 Annual General Meeting of Shareholders at the Fernandez Hall of the NTT Governor's Office on May 14, 2025, chaired directly by NTT Governor Emanuel Melkiades Laka Lena as the Controlling Shareholder (PSP) and attended by all Series A and Series B shareholders of Bank NTT.

12 November November

Direktur Umum & SDM Bank NTT Rahmat Saleh beserta tim Teknologi Informasi Bank NTT melakukan kunjungan kerja ke Bank Jatim dalam rangka penyelarasan sistem Teknologi Informasi dengan Bank Jatim sebagai bank induk dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB) di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2025.

Bank NTT General Director & Head of Human Resources Rahmat Saleh, along with the Bank NTT Information Technology team, conducted a working visit to Bank Jatim to align information technology systems with Bank Jatim, the parent bank within the Bank Business Group (KUB) scheme, in Surabaya on December 15, 2025.

12 November November

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur bertempat di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT pada tanggal 12 November 2025 dengan agenda utama pemilihan pengurus baru Bank NTT.

Extraordinary General Meeting of Share-holders (EGM) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur held at the Sasando Building, NTT Governor's Office, on November 12, 2025, with the main agenda being the election of new management for Bank NTT.

13 November November

Pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi baru PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena sebagai Pemegang Saham Pengendali bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada tanggal 13 November 2025.

The inauguration of the new Board of Commissioners and Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur by the Governor of Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena, as the Controlling Shareholder, took place in the Fernandez Hall at the NTT Governor's Office on November 13, 2025.

18 Desember December

Direktur Kredit Bank NTT Aloysius R.A. Geong melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2025.

Bank NTT Credit Director Aloysius R.A. Geong signed a cooperation agreement with PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) in Jakarta on December 18, 2025.

18 Desember December

Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank NTT dengan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) tentang Pembayaran Gaji, Pemberian Kredit dan Jasa Bank Lainnya melalui Bank NTT pada tanggal 18 Desember 2025.

Bank NTT President Director Charlie Paulus signed a cooperation agreement between Bank NTT and the Synod of the Evangelical Church of Timor (GMIT) regarding salary payments, credit facilities, and other bank-ing services provided through Bank NTT on December 18, 2025.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

TOP BUMD AWARDS 2025

Jakarta, 28 April 2025 | April 28, 2025

Bank NTT meraih penghargaan Bintang Lima (Golden Trophy) pada ajang TOP BUMD AWARDS 2025 yang diselenggarakan oleh Top Business atas kinerja, tata kelola dan pelayanan yang sangat baik.

Bank NTT received the Five-Star Award (Golden Trophy) at the TOP BUMD AWARDS 2025, organized by Top Business, for its excellent performance, governance, and service.

Bank Penyalur Terbaik 1

Bandung, 23 Juli 2025 | July 23, 2025

Bank NTT dianugerahi penghargaan sebagai Bank Penyalur Terbaik 1 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah Penyalur Pembiayaan TAPERA Terbanyak untuk periode Januari - Juni 2025 dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

Bank NTT was awarded the title of Best Distributing Bank 1 in the category of Regional Development Banks Distributing the Most TAPERA Financing for the period January–June 2025 by the People's Housing Savings Management Agency (BP TAPERA).

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jakarta, 22 Agustus 2025 | August 22, 2025

Bank NTT memperoleh penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat sebagai Bank Umum Dengan Program Literasi Keuangan Teraktif.

Penghargaan tersebut diberikan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2025 oleh Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan.

Bank NTT received an award from the Financial Services Authority (OJK) Headquarters as the Commercial Bank with the Most Active Financial Literacy Program.

The award was presented in Jakarta on August 22, 2025, by Friderica Widyasari Dewi, Executive Director of Supervision of Financial Services Industry Conduct, Education, and Consumer Protection at the Financial Services Authority.

INDONESIA BEST CSR Awards 2025

Bandung, 29 April 2025 | April 29, 2025

Bank NTT meraih penghargaan sebagai lembaga keuangan kategori Bank terbaik dalam penyaluran Corporate Social Responsibility pada ajang 7th INDONESIA BEST CSR Awards 2025 yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media di Jakarta pada tanggal 29 April 2025.

Bank NTT received an award as the best financial institution in the banking category for its implementation of Corporate Social Responsibility at the7thINDONESIA BEST CSR Awards 2025, organized by The Iconomics Media in Jakarta on April 29, 2025.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

BANK NTT WEBSITE

Seiring perkembangan teknologi dengan hadirnya *internet of things* maka Bank NTT memiliki website resmi : www.bpdntt.co.id. Keberadaan website bank memberikan akses informasi yang luas bagi nasabah dan masyarakat sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip *good corporate governance* yaitu asas keterbukaan (*transparancy*).

Informasi yang dapat diperoleh pada website Bank NTT diantaranya: informasi produk dan layanan, struktur organisasi, profil perusahaan, profil Dewan Komisaris dan Direksi, persentase kepemilikan saham, laporan keuangan bulanan, triwulanan dan tahunan, tingkat suku bunga, realisasi penyaluran *corporate social responsibility* serta aktivitas perusahaan lainnya. Website Bank NTT disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

With the advancement of technology and the advent of the Internet of Things, Bank NTT now has an official website: www.bpdntt.co.id. The bank's website provides extensive access to information for customers and the public, reflecting the implementation of one of the principles of good corporate governance: transparency.

Information available on the Bank NTT website includes: product and service information, organizational structure, company profile, profiles of the Board of Commissioners and Directors, shareholding percentages, branch network, monthly, quarterly, and annual financial reports, interest rates, corporate social responsibility (CSR) initiatives, and other company activities. The Bank NTT website is available in both Indonesian and English.

Tinjauan Fungsional dan Operasional

Functional & Operational Review

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bank NTT memegang peran kunci terhadap perkembangan bank dalam jangka panjang. Menyadari hal tersebut maka peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan. Sepanjang tahun 2025 realisasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh Bank NTT untuk pendidikan, pelatihan maupun sertifikasi adalah sebesar Rp 16.67 miliar.

The quality of Bank NTT's human resources plays a key role in the bank's long-term development. Recognizing this, improving the quality of human resources is essential. Throughout 2025, Bank NTT allocated a budget of Rp 16.67 billion for education, training, and certification.

Di tahun 2025 penekanan utama pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada SDM Bank NTT adalah pada sektor digitalisasi dalam menghadapi perubahan pola bisnis dan pesatnya perkembangan teknologi. Manajemen berharap bahwa melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan SDM Bank NTT mampu dalam mengantisipasi perubahan model bisnis perbankan di masa yang akan datang sehingga bank tetap *survive*. kompetitif serta tidak kehilangan market.

In 2025, the primary focus of education and training provided to Bank NTT's human resources will be on digitalization, in response to changing business models and rapid technological advancements. Management hopes that through this education and training, Bank NTT's human resources will be able to anticipate future changes in banking business models, ensuring the bank remains competitive and does not lose market share.

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan kepada SDM di Bank NTT dilakukan secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan suku. agama dan ras.

Pada tahun 2025 kaderisasi kepemimpinan di setiap jenjang juga terus dilakukan oleh manajemen untuk mengisi kekosongan jabatan-jabatan sesuai dengan *career path* dan *talent management* yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman SDM Bank NTT seiring dengan berakhirnya masa kerja pejabat sebelumnya yang telah purna bhakti.

Menimbang kompleksitas bisnis bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* maka manajemen telah melakukan sejumlah perubahan nomenklatur dan penyesuaian struktur organisasi bank yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 033 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Manajemen melalui Divisi SDM juga telah menghadirkan beberapa terobosan digital terhadap pengelolaan SDM yang dimiliki sebagai berikut:

Aplikasi Mo Dance

Merupakan aplikasi absensi/kehadiran pegawai yang hanya dapat digunakan pada radius tertentu dalam wilayah kantor dimana data dari aplikasi tersebut dapat di analisa dalam memetakan berbagai aspek dari SDM yang dimiliki bank.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BANK NTT (SIM BANK NTT)

Adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan administrasi pegawai dan distribusi informasi dalam lingkup Bank NTT.

Menu-menu yang disediakan pada aplikasi SIM Bank NTT adalah :

- **Curriculum Vitae (CV)**, memuat identitas pegawai. pelatihan/sertifikasi yang pernah diikuti. riwayat karir di Bank NTT serta latar belakang pendidikan.
- **Message**, menu yang disediakan untuk membuat dan mengirim pesan serta menerima pesan masuk.
- **Absen**, memuat riwayat kehadiran pegawai setiap harinya beserta rekapan kehadiran pegawai setiap bulan dan tahun yang terhubung dengan Aplikasi Mo Dance Bank NTT.

The provision of education and training to Bank NTT's human resources is conducted fairly and equitably, without discrimination based on ethnicity, religion, or race.

In 2025, management will continue to implement leadership succession planning at every level to fill vacant positions in accordance with the career paths and talent management guidelines established in the Bank NTT Human Resources Handbook, as the terms of service for previous officials who have retired come to an end.

Considering the complexity of the bank's business in accordance with the Bank's Business Plan (RBB) and Corporate Plan, management has implemented several changes to nomenclature and adjustments to the bank's organizational structure, as established through the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 033 of 2023 regarding the Organizational Structure and Operational Procedures of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Management, through the HR Division, has also introduced several digital innovations in HR management, as follows:

Mo Dance App

This is an employee attendance application that can only be used within a certain radius of the office, where data from the application can be analyzed to map various aspects of the bank's human resources.

BANK NTT Management Information System (SIM BANK NTT) Application

This is an application used for employee administration and information distribution within Bank NTT.

The menus provided in the SIM Bank NTT application are:

- **Curriculum Vitae (CV)**, containing employee identity, training/certifications completed, career history at Bank NTT, and educational background.
- **Message**, a menu provided for creating and sending messages as well as receiving incoming messages.
- **Attendance**, containing daily employee attendance records along with monthly and annual attendance summaries linked to the Bank NTT Mo Dance Application.

- **Key Performance Indicator (KPI)**, merupakan fitur yang disediakan untuk menilai kinerja pegawai per triwulanan dan di-*approve* secara berjenjang oleh atasan langsung sampai level kewenangan tertinggi sesuai dengan unit kerja dan jabatan pegawai.
- **Gaji**, memuat besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh serta fasilitas kredit internal pegawai yang telah diambil beserta kewajibannya.
- **Kantor**, memberikan informasi ter-*update* jaringan kantor yang dimiliki.
- **Nota Dinas**, adalah fitur yang memberikan informasi dari manajemen terkait mutasi. promosi dan demosi yang dikirimkan kepada pegawai yang bersangkutan dan atasan tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan.
- **MoCis**, merupakan menu yang disediakan kepada pegawai dalam mengajukan izin. sakit. cuti. cuti alasan penting untuk mendapat persetujuan dari atasan langsung dan pimpinan tertinggi pada unit kerja pegawai yang bersangkutan.
- **Surat Keterangan Masa Dinas (SKMD)**, merupakan menu yang disediakan kepada pegawai untuk memperoleh SKMD guna memenuhi persyaratan pengajuan fasilitas kredit pegawai internal.
- **MoJadi**, adalah fitur yang disediakan untuk pengajuan SPPD kepada atasan langsung dan jenjang pimpinan tertinggi pada unit kerja sekaligus sebagai media yang disediakan untuk melaporkan bukti pelaksanaan SPPD yang telah disetujui.

- **Key Performance Indicator (KPI)**, a feature provided to evaluate employee performance on a quarterly basis and approved through a hierarchical process by the immediate supervisor up to the highest level of authority, in accordance with the employee's work unit and position.
- **Payroll**: Displays the amount of salary and allowances received, as well as internal credit facilities taken by employees along with their obligations.
- **Offices**: Provides up-to-date information on the network of offices owned by the bank.
- **Official Memo**: a feature that delivers management notifications regarding transfers, promotions, and demotions to the relevant employees and the highest-ranking supervisor within the respective work unit.
- **MoCis** is a menu provided to employees for submitting requests for leave, sick leave, vacation, or leave for important reasons to obtain approval from their immediate supervisor and the highest-ranking official in the employee's respective work unit.
- **Certificate of Service (SKMD)** is a menu provided to employees to obtain an SKMD to meet the requirements for applying for internal employee credit facilities.
- **MoJadi** is a feature provided for submitting travel expense reports (SPPD) to the immediate supervisor and the highest-ranking leadership within the work unit, as well as a platform for reporting proof of the implementation of approved travel expense reports.

TAMPILAN APLIKASI SIMBANK NTT

SIMBANK NTT APP INTERFACE

TAMPILAN APLIKASI MO DANCE BANK NTT

MO DANCE BANK NTT APP INTERFACE

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN SDM

Struktur Organisasi. Tugas. Tanggung Jawab dan Kewenangan Divisi Sumber Daya Manusia ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 033 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Divisi Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Hans Arnoldus. S.E yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Nota Dinas Direktur Umum & SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 1875/DIR-DSM/XI/2025, tanggal 13 November 2025, Perihal: Penunjukan Pelaksana Tugas.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Organizational Structure. Duties. Responsibilities and Authorities of the Human Resources Division are established pursuant to the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 033 of 2023 regarding the Organizational Structure and Operational Procedures of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

As of 2025, the Human Resources Division is led by Acting Head (Plt.) Hans Arnoldus. S.E., who was appointed as Acting Head of the Human Resources Division pursuant to the Memorandum from the Director General & HR of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 1875/DIR-DSM/XI/2025, dated November 13, 2025, regarding the Appointment of an Acting Head.

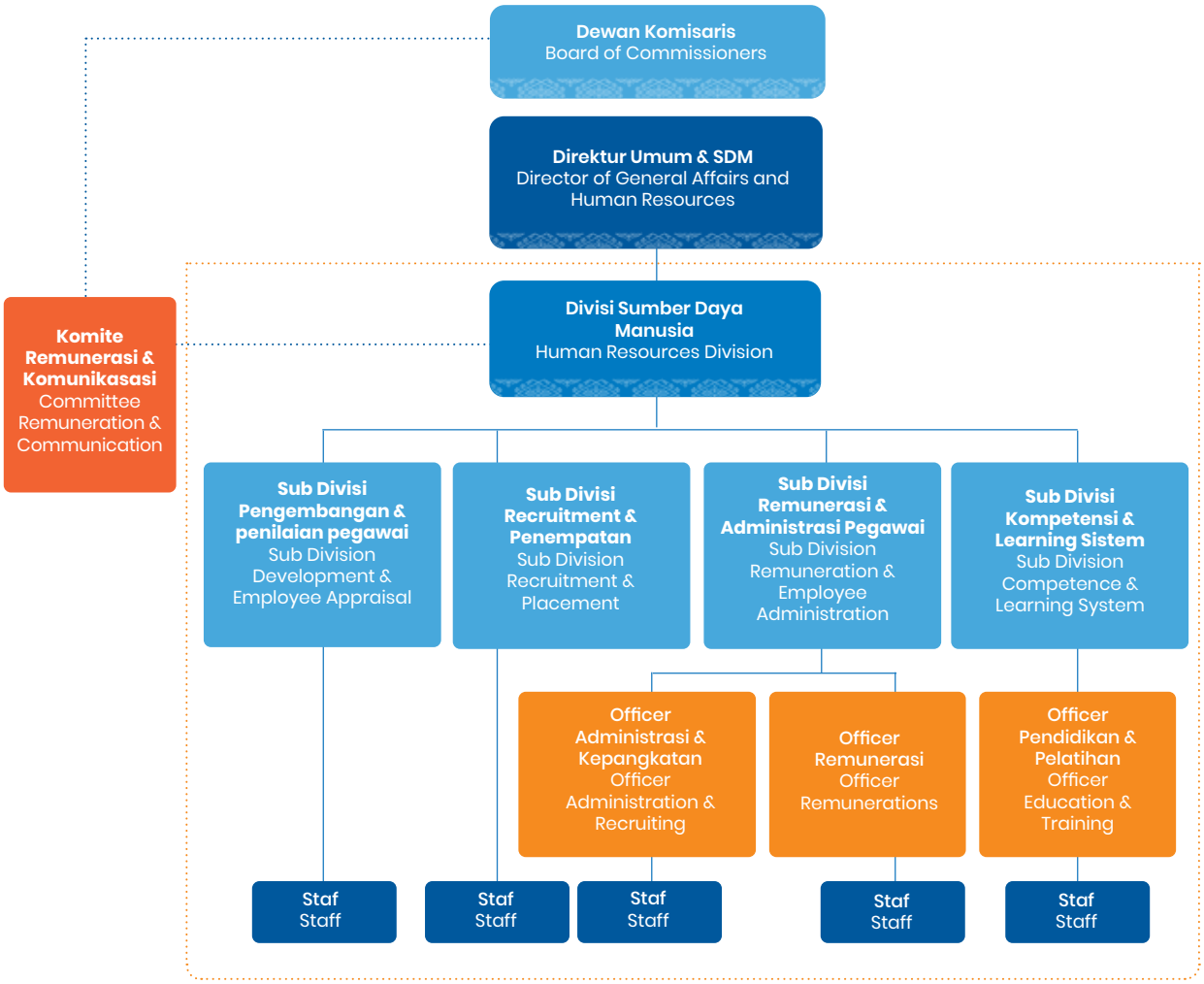

PROFIL PELAKSANA TUGAS (Plt.) KEPALA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

PROFILE OF THE ACTING (Plt.) HEAD OF THE HUMAN RESOURCES DIVISION

Hans Arnoldus
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Acting Head of Human Resources Division"

Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank NTT sejak November 2025 hingga sekarang.

Has served as Acting Head of the Human Resources Division at Bank NTT since November 2025 to the present.

Meniti karier di Bank NTT sejak November 2012 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT khususnya di Divisi Sumber Daya Manusia yakni : Officer Remunerasi dan Kasubdiv Remunerasi & Administrasi Pegawai.

He has built his career at Bank NTT since November 2012 and has held key positions at the bank, particularly within the Human Resources Division, including: Compensation Officer and Head of the Compensation & Employee Administration Subdivision.

Latar Belakang Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Bisnis dari Universitas Kristen Petra Surabaya.

Educational Background

Holds a Bachelor's degree in Business Accounting from Petra Christian University, Surabaya.

RUANG LINGKUP KERJA

SCOPE OF WORK

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division	1. Mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional pengelolaan SDM yang merupakan penerapan dari kebijakan, perencanaan dan sistem SDM yang telah dikembangkan; 2. Mensinergikan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh Divisi SDM dengan Divisi Perencanaan Strategis dalam kaitannya dengan pengembangan kebijakan, perencanaan dan sistem SDM. 3. Memimpin pelaksanaan seluruh program kerja SDM dan menetapkan strategi untuk aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh Divisi SDM dan secara periodik melaksanakan tinjauan terhadap strategi dan rencana kerja tersebut, aktivitas aktivitasnya antara lain: a. Rekrutmen; b. Pelaksanaan evaluasi kinerja; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; d. Pelaksanaan hubungan kepegawaian; e. Pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian; f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi SDM; g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; h. Pelaksanaan Manajemen Karir; i. Pelaksanaan Manajemen Remunerasi; j. Pelaksanaan terminasi pegawai 4. Mensinergikan aktivitas-aktivitas SDM dengan unit kerja lainnya, terutama dengan Divisi Perencanaan Strategis terkait dengan aspek perencanan SDM dan pengembangan organisasi; 5. Menetapkan kriteria pegawai yang akan direkrut pada proses rekrutmen berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah dan kompentensi SDM yang telah ditetapkan;	1. Integrating all operational activities of human resource management which are the implementation of policies, planning and HR systems that have been developed; 2. Synergize all activities carried out by the HR Division with the Strategic Planning Division in relation to the development of policies, planning and HR systems. 3. Leading the implementation of all HR work programs and establishing strategies for activities carried out by the HR Division and periodically carrying out reviews of these strategies and work plans, the activities include: a. Recruitment; b. Implementation of performance evaluation; c. Implementation of education and training; d. Implementation of personnel relations; e. Implementation of personnel data management; f. Implementation of HR information system management; g. Implementation of personnel administration; h. Implementation of Career Management; i. Implementation of Remuneration Management; j. Implementation of employee termination 4. Synergizing HR activities with work units others, especially with the relevant Strategic Planning Division with aspects of HR planning and organizational development; 5. Determine the criteria for employees to be recruited in the recruitment process based on the planning of the needs of the number and competencies of human resources that have been determined;

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division	6. Memfinalisasi laporan proses rekrutmen yang diserahkan oleh Pemimpin Sub Divisi Kepegawaian dan mengajukan rekomendasi peserta seleksi yang diterima sebagai pegawai kepada Direktur untuk disetujui; 7. Mendelegasikan keputusan hasil proses rekrutmen yang sudah disetujui oleh Direktur kepada Pemimpin Sub Divisi Kepegawaian untuk ditindaklanjuti; 8. Memfinalisasi hasil negosiasi kontrak dan/atau perjanjian baru dan/atau perpanjangan yang terkait dengan SDM untuk selanjutnya diajukan kepada Direktur untuk disetujui; 9. Menetapkan dan mensinergikan pengelolaan sistem informasi SDM serta potensi - potensi pengembangan yang hendak dilaksanakan dengan unit kerja lain yang relevan; 10. Menetapkan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam menindaklanjuti kinerja dari vendor pekerjaan SDM seperti penyedia pelatihan, penyedia jasa tenaga kerja, head hunter, konsultan dan lain-lain; 11. Merencanakan dan mengkoordinasikan proses penerapan sistem evaluasi kinerja pegawai dan melakukan sosialisasi ketentuan dan peraturan SDM kepada seluruh unit kerja; 12. Mengajukan hasil evaluasi kinerja dan dampaknya terhadap paket remunerasi dan karir dari setiap pegawai kepada Direksi; 13. Mengajukan perencanaan jalur karir tahunan yang mencakup promosi, demosi dan mutasi dari setiap pegawai Bank kepada Direksi; 14. Menetapkan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan pada kasus-kasus khusus yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti pemberian sanksi, sengketa hukum dan pemutusan hubungan kerja dengan meminta persetujuan Direksi; 15. Menetapkan strategi komunikasi termasuk forum komunikasi rutin dengan pegawai yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan peraturan SDM telah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai Bank; 16. Menetapkan jadwal pelaksanaan dan anggaran program pendidikan dan pelatihan serta daftar pegawai yangdiharuskan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan tersebut berdasarkan kepada rekomendasi yang diajukan oleh Sub Divisi Pengembangan SDM; 17. Menetapkan tindakan yang harus dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berdasarkan masukan dari Sub Divisi Pengembangan SDM;	6. Finalize the recruitment process report submitted by the Head of the Personnel Subdivision and submit recommendations for selection participants accepted as employees to the Director for approval; 7. Delegate the decision of the results of the recruitment process that has been approved by the Director to the Leader of the Personnel Sub-Division for follow-up; 8. Finalize the results of contract negotiations and/or new agreements and/or extensions related to HR to be subsequently submitted to the Director for approval; 9. Determine and synergize the management of the HR information system and the development potentials to be carried out with other relevant work units; 10. Determine the actions that must be implemented in following up the performance of HR job vendors such as training providers, labor service providers, head hunters, consultants and others; 11. Plan and coordinate the process of implementing an employee performance evaluation system and disseminating HR rules and regulations to all work units; 12. Submit the results of performance evaluations and their impact on the remuneration and career packages of each employee to the Board of Directors; 13. Submit an annual career path plan that includes promotion, demotion and mutation of each Bank employee to the Board of Directors; 14. Determine the actions to be carried out in special cases related to employment, such as sanctions, legal disputes and termination of employment by seeking the approval of the Board of Directors; 15. Establish communication strategies including regular communication forums with employees aimed at ensuring that all HR rules and regulations are known and understood by all Bank employees; 16. Determine the implementation schedule and budget of the education and training program and the list of employees required to participate in the education and training program based on recommendations submitted by the Human Resources Development Subdivision; 17. Determine actions that must be implemented to follow up the results of the implementation of education and training programs based on input from the Human Resources Development Subdivision;

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division	18. Menetapkan inisiatif-inisiatif yang hendak dilaksanakan untuk mengelola sistem informasi SDM dan berkoordinasi dengan unit kerja lain yang relevan untuk ditindaklanjuti; 19. Mensinergikan kepentingan Bank dalam aspek pengelolaan SDM dengan kebijakan pemerintah dan menjalin hubungan yang baik dengan Departemen Tenaga Kerja dan memastikan komunikasi dan koordinasi antara Bank dengan Departemen Tenaga Kerja terjalin dengan baik; 20. Mengintegrasikan dan memimpin pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang - undangan ketenagakerjaan; 21. Menetapkan inisiatif yang harus dilaksanakan untuk merespon setiap perubahan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terjadi dan menganalisis dampaknya terhadap Bank; 22. Merencanakan proses pelaksanaan seluruh aktivitas administrasi kepegawaian yang ada di Bank untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien; 23. Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di Unit Kerjanya sesuai dengan fungsi dan jabatan; 24. Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit; 25. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan di bawah unit kerjanya serta pengusulan Promosi, Mutasi maupun Demosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan; 26. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 27. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya; 28. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.	18. Determine the initiatives to be implemented to manage the HR information system and coordinate with other relevant work units for follow-up; 19. Synergize the Bank's interests in the aspect of HR management with government policies and establish good relations with the Ministry of Manpower and ensure that communication and coordination between the Bank and the Ministry of Manpower are well established; 20. Integrate and lead the implementation of activities aimed at ensuring the Bank's compliance with labor laws and regulations; 21. Establish initiatives that must be implemented to respond to any changes in labor laws and regulations that occur and analyze their impact on the Bank; 22. Planning the process of implementing all personnel administration activities in the Bank to ensure that these activities have been carried out effectively and efficiently; 23. Carry out delegation of authority to officials and employees in their Work Unit in accordance with functions and positions; 24. Assist subordinates in understanding the systems and procedures of their units, conducting coaching and counseling to subordinates, as well as mediating and facilitating problems between subordinates and between units; 25. Proposing the fulfillment and addition of human resources for positions under their work units and proposing Promotion, Mutation and Demotion on the basis of performance management that has been carried out; 26. Organizing the preparation of annual Work Plans and Budgets in the context of implementing activities in accordance with the scope of their field of duty; 27. Supervise and control the utilization of budgets under the scope of its authority; 28. Monitor the development of systems and procedures related to processes under the scope of its authority.

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Sub. Divisi Pengembangan & Penilaian Pegawai Sub. Division of Officer Development & Evaluation	1. Merencanakan dan mengkoordinasikan proses penerapan system pengembangan dan evaluasi kinerja yang telah ditetapkan; 2. Merekomendasikan perhitungan hasil evaluasi kinerja kepada Pemimpin Divisi SDM untuk ditindaklanjuti; 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan proses komunikasi hasil evaluasi kinerja yang telah disetujui dan dampaknya terhadap paket remunerasi dan karir pegawai; 4. Menganalisis pemetaan kompetensi yang dihasilkan oleh Sub Divisi Pengembangan Organisasi &Perencanaan SDM; 5. Mengevaluasi kinerja dari penyedia pelatihan eksternal dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan apabila kinerja yang ditunjukkan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan; 6. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses pelaksanaan aktivitas evaluasi kinerja, pengelolaan karir, pelatihan dan pengembangan serta merekomendasikan solusi yang paling sesuai; 7. Berkoordinasi dengan fungsi SDM yang ada di Kantor Cabang terkait masalah pelatihan & pengembangan, manajemen karir dan evaluasi kinerja dan remunerasi; 8. Merencanakan blue print pengembangan sumber daya manusia. 9. Menyusun kebijakan - kebijakan pengembangan sumber daya manusia. 10. Merencanakan kebutuhan manajemen kinerja dan manajemen karir. 11. Menyusun Carier Path pegawai sesuai kebutuhan bank. 12. Pengembangan, pengelolaan dan pengadministrasian jabatan fungsional. 13. Mengimplementasi sistem evaluasi kinerja yang telah ditetapkan dan membimbing seluruh unit organisasi yang ada pada proses implementasi. 14. Mengidentifikasi permasalahan - permasalahan yang muncul pada proses pelaksanaan aktivitas evaluasi kinerja dan melaporkannya pada atasan langsung untuk ditindaklanjuti. 15. Melaksanakan proses perhitungan hasil dari evaluasi kinerja untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kinerja pegawai bersangkutan dan mengajukan hasil perhitungan tersebut kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. 16. Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pegawai di Unit Kerjanya sesuai dengan fungsi dan jabatan;	1. Plan and coordinate the process of implementing a predetermined performance development and evaluation system; 2. Recommend the calculation of performance evaluation results to the HR Division Leader for follow-up; 3. Plan and coordinate the communication process of approved performance evaluation results and their impact on employee remuneration and career packages; 4. Analyze competency mapping produced by the Sub-Division of Organization Development & HR Planning; 5. Evaluate the performance of external training providers and recommend actions that need to be implemented if the performance demonstrated is not in accordance with the expected standards; 6. Analyze problems that arise in the process of implementing performance evaluation activities, career management, training and development and recommend the most suitable solutions; 7. Coordinate with the HR function in the Branch Office regarding training & development issues, career management and performance evaluation and remuneration; 8. Planning a blue print for human resource development. 9. Formulate policies - human resource development policies. 10. Plan for performance management and career management needs. 11. Arrange employee Carier Path according to bank needs. 12. Development, management and administration of functional positions. 13. Implement a performance evaluation system that has been established and guide all existing organizational units in the implementation process. 14. Identify problems that arise in the process of implementing performance evaluation activities and report them to the direct supervisor for follow-up. 15. Carry out the process of calculating the results of performance evaluations to be used as a basis for decision making regarding the performance of the employees concerned and submit the results of these calculations to the Head of the Human Resources Division. 16. Carry out delegation of authority to employees in their Work Unit in accordance with their functions and positions;

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Sub. Divisi Pengembangan & Penilaian Pegawai Sub. Division of Officer Development & Evaluation	17. Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit; 18. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan di bawah unit kerjanya serta pengusulan Promosi, Mutasi maupun Demosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan; 19. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 20. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya; 21. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya. 22. Melaksanakan perencanaan mutasi pegawai, pembinaan dan pendayagunaan pegawai. 23. Melaksanakan seluruh aktivitas administrasi pada pelaksanaan proses penilaian kinerja pegawai. 24. Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Sumber Daya Manusia.	17. Assist subordinates in understanding the systems and procedures of their units, conducting coaching and counseling to subordinates, as well as mediating and facilitating problems between subordinates and between units; 18. Organizing the preparation of annual Work Plans and Budgets in the context of implementing activities in accordance with the scope of their field of duty; 19. Supervise and control the utilization of budgets under the scope of its authority; 20. Monitor the development of systems and procedures related to processes under the scope of its authority. 21. Carry out employee mutation planning, coaching and utilization of employees. 22. Carry out all administrative activities in the implementation of the employee performance appraisal process. 23. Perform other tasks related to the Human Resources function. 24. Perform other tasks related to Human Resources functions.
Sub. Divisi Rekrutmen & Penempatan Sub. Recruitment & Placement Division	1. Menyelenggarakan pengelolaan sistem penerimaan pegawai, mulai dari publikasi, pengadaan, seleksi sampai dengan penempatan tenaga kerja: 2. Menyiapkan pengumuman penerimaan pegawai, mengatur kegiatan penerimaan pegawai; 3. Memilah pelamar dari database pelamar sesuai persyaratan/kualifikasi yang dibutuhkan; 4. Memproses dan meneliti persyaratan lamaran serta mengatur pelaksanaan testing pelamar yangmemenuhi syarat; 5. Melaksanakan korespondensi dan komunikasi dengan peserta seleksi mengenai status dari lamaran yang mereka ajukan; 6. Menyelenggarakan tes/ujian penerimaan pegawai secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga ekstern yang berkompeten didalam proses seleksi pegawai; 7. Mengatur jadwal pelaksanaan wawancara dan memilih/mengusulkan pewawancara serta memberikan informasi yang diperlukan kepada pewawancara; 8. Menghimpun nilai tes dan hasil penilaian pewawancara dan menilai kualifikasi untuk menentukan peserta tes yang diterima; 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan proses rekrutmen yang memuat daftar peserta seleksi yang lolos dan diterima sebagai calon pegawai Bank;	1. Organizing the management of the employee recruitment system, starting from publication, procurement, selection to by Manpower Placement: 2. Prepare employee acceptance announcements, organize employee recruitment activities; 3. Sorting applicants from the applicant database according to the requirements/ qualifications needed; 4. Process and research application requirements and arrange the testing of qualified applicants; 5. Carry out correspondence and communication with selection participants regarding the status of their applications; 6. Conducting employee acceptance tests / examinations independently or collaborating with competent external institutions in the employee selection process; 7. Set the interview schedule and select/ propose interviewers and provide necessary information to interviewers; 8. Compile test scores and assessment results of interviewers and assess qualifications to determine accepted test takers; 9. Prepare a report on the results of the recruitment process containing a list of selection participants who passed and were accepted as prospective Bank employees;

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Sub. Divisi Rekrutmen & Penempatan Sub. Recruitment & Placement Division	10. Mengajukan laporan hasil pelaksanan proses rekrutmen kepada Pemimpin Sub Divisi Kepegawaian untuk ditindaklanjuti; 11. Memproses pengaturan dan penyelesaian keputusan untuk menerima penempatan calon pegawai baru setelah daftar peserta seleksi yang diterima disetujui; 12. Memberikan penjelasan tentang sistem kepegawaian termasuk sistem imbalan/ kompensasi di Bank serta menyiapkan surat perjanjian/kontrak kerja yang mengikat antara Bank dengan calon pegawai; 13. Berkoordinasi dengan Pengelola Pelatihan & Pengembangan Pegawai untuk menentukan program pelatihan yang diperlukan oleh calon pegawai yang diterima; 14. Mengkomunikasikan kepada pegawai baru yang telah diterima mengenai program pelatihan yang relevan dan harus diambil oleh pegawai baru tersebut sebagai bagian dari proses pengembangan diri; 15. Melaksanakan aktivitas administrasi lainnya yang harus diselesaikan sebagai bagian dari proses penerimaan pegawai baru. 16. Merencanakan dan mengusulkan pemberdayaan pegawai (man power planning) sesuai kebutuhan bank. 17. Mengkaji dan mengusulkan perumusan sistem perekrutan dan penempatan sesuai kebutuhan bank. 18. Berkoordinasi dengan pihak luar dalam hal ini perguruan tinggi, Lembaga Penunjang Profesi dalam rangka sistem perekrutan pegawai. 19. Bekerja sama dengan Pihak ketiga dalam hal pengadaan tenaga kerja outsourcing dalam rangka pemenuhan kebutuhan bank. 20. Melakukan review terhadap pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai struktur organisasi yang berlaku. 21. Memberikan penjelesan tentang sistem kepegawaian termasuk imbalan/ kompensasi di Bank serta menyiapkan surat perjanjian/kontrak kerja yang mengikat antara Bank dan Calon Pegawai. 22. Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pegawai di Unit Kerjanya sesuai dengan fungsi dan jabatan; 23. Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit; 24. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan di bawah unit kerjanya serta pengusulan Promosi, Mutasi maupun Demosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan;	10. Submit a report on the results of the recruitment process to the Head of the Personnel Subdivision for follow-up; 11. Process the arrangement and completion of the decision to accept the placement of new employee candidates after the list of accepted selection participants is approved; 12. Provide an explanation of the personnel system including the reward/ compensation system at the Bank and prepare a binding agreement/ employment contract between the Bank and prospective employees; 13. Coordinate with the Employee Training & Development Manager to determine the training program needed by prospective employees received; 14. Communicate to new employees who have been accepted about the relevant training programs that should be taken by the new employee as part of the self-development process; 15. Carry out other administrative activities that must be completed as part of the recruitment process. 16. Plan and propose employee empowerment (man power planning) according to bank needs. 17. Review and propose the formulation of recruitment and placement systems according to bank needs. 18. Coordinate with external parties in this case universities, Professional Support Institutions in the framework of the employee recruitment system. 19. Cooperate with third parties in terms of outsourcing labor procurement in order to meet bank needs. 20. Review the fulfillment of employee needs in accordance with the applicable organizational structure. 21. Provide an explanation of the personnel system including rewards/compensation at the Bank and prepare a binding agreement/employment contract between the Bank and Prospective Employees. 22. Carry out delegation of authority to employees in their Work Unit in accordance with their functions and positions; 23. Assist subordinates in understanding the systems and procedures of their units, conducting coaching and counseling to subordinates, as well as mediating and facilitating problems between subordinates and between units; 24. Proposing the fulfillment and addition of human resources for positions under the work unit as well as proposing promotions, transfers and demotions on the basis of performance management that has been carried out;

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Sub. Divisi Rekrutmen & Penempatan Sub. Recruitment & Placement Division	25. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 26. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya; 27. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya. 28. Melaksanakan perencanaan mutasi pegawai, pembinaan dan pendayagunaan pegawai. 29. Melaksanakan seluruh aktivitas administrasi pada pelaksanaan proses penilaian kinerja pegawai. 30. Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Sumber Daya Manusia.	25. Supervise and control budget utilization under the scope of its authority; 26. Monitor the development of systems and procedures related to processes that are under the scope of his authority. 27. Carrying out employee transfer planning, coaching and employee utilization. 28. Carrying out all administrative activities in the implementation of the employee performance appraisal process. 29. Perform other tasks related to Human Resources functions. 30. Perform other tasks related to Human Resources functions.
Sub Divisi Remunerasi & Administrasi Pegawai Sub-Division of Remuneration & Employee Administration	1. Menyelenggarakan dan menata kelola sistem administrasi kepegawaian. 2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan, pengorganisasian dan administrasi kepegawaian. 3. Melaksanakan perumusan sistem dan kebijakan imbal jasa pegawai dengan mempertimbangkan internal dan eksternal equity. 4. Mengelola sistem informasi SDM dalam suatu database kepegawaian. 5. Mengelola program pembayaran administrasi (gaji) pegawai. 6. Melaksanakan perencanaan mutasi pegawai, pembinaan dan pendayagunaan pegawai. 7. Melakukan perencanaan pengurusan pengangkatan, kepangkatan, pembinaan, pemberhentian dan pension pegawai. 8. Pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia. 9. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM) terintegrasi yang meliputi antara lain; a. Modul informasi data kepegawaian; b. Modul penggajian (payroll); c. Modul pengelolaan, penilaian kinerja (performance management); d. Modul e-learning; e. Modul aplikasi penunjang SIM SDM (website portal SDM) seperti: data absensi, perjalanan dinas, datadiklat, aplikasi formulir kepegawaian, On The Job Training, data general check-up, data outsourcing, database kesejahteraan pegawai lainnya. 10. Mengelola dokumentasi sistem dan prosedur serta ketentuan-ketentuan di bidang sumber daya manusia ke dalam database sistem informasi manajemen SDM. 11. Mengelolaa data dan informasi kepegawaian, dokumentasi kepegawaian dan aktivitas administrasi lainnya yang terkait dengan kepegawaian.	1. Organizing and managing personnel administration systems. 2. Coordinate the formulation of personnel planning, organizing and administrative policies. 3. Carry out the formulation of employee reward systems and policies by considering internal and external equity. 4. Manage HR information systems in a personnel database. 5. Manage the administrative payment program (salary) of employees. 6. Carry out employee mutation planning, coaching and utilization of employees. 7. Planning the management of appointment, rank, coaching, dismissal and retirement of employees. 8. Development and utilization of human resources. 9. Manage an integrated Human Resource Management Information System (SIM SDM) which includes, among others; a. Personnel data information module; b. Payroll module; c. Management module, performance management; d. E-learning modules; e. SIM HR supporting application modules (HR portal website) such as: attendance data, official travel, training data, employment form application, On The Job Training, general check-up data, outsourcing data, other employee welfare databases. 10. Manage system documentation and procedures as well as provisions in the field of human resources to in the HR management information system database. 11. Manage personnel data and information, personnel documentation and other administrative activities related to staffing.

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Sub Divisi Remunerasi & Administrasi Pegawai Sub-Division of Remuneration & Employee Administration	12. Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pegawai di Unit Kerjanya sesuai dengan fungsi dan jabatan; 13. Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit; 14. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan di bawah unit kerjanya serta pengusulan Promosi, Mutasi maupun Demosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan; 15. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 16. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya; 17. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya. 18. Melaksanakan perencanaan mutasi pegawai, pembinaan dan pendayagunaan pegawai. 19. Melaksanakan seluruh aktivitas administrasi pada pelaksanaan proses penilaian kinerja pegawai. 20. Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Sumber Daya Manusia.	12. Carry out delegation of authority to employees in their Work Unit in accordance with their functions and positions; 13. Assist subordinates in understanding the systems and procedures of their units, conducting coaching and counseling to subordinates, as well as mediating and facilitating problems between subordinates and between units; 14. Proposing the fulfillment and addition of human resources for positions under their work units and proposing Promotion, Mutation and Demotion on the basis of performance management that has been carried out; 15. Organizing the preparation of annual Work Plans and Budgets in the context of implementing activities in accordance with the scope of their field of duty; 16. Supervise and control the utilization of budgets under the scope of its authority; 17. Monitor the development of systems and procedures related to processes under the scope of its authority. 18. Carry out employee mutation planning, coaching and utilization of employees. 19. Carry out all administrative activities in the implementation of the employee performance appraisal process. 20. Perform other tasks related to the Human Resources function.
Sub Divisi Kompetensi & Learning System Sub-Division of Competency & Learning System	1. Merencanakan blue print pengembangan SDM untuk bidang pendidikan dan pelatihan. 2. Menyelenggarakan dan mengkoordinir kegiatan pendidikan dan pelatihan. 3. Menyusun program kebijakan - kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan. 4. Menyusun dan mempersiapkan modul - modul pendidikan dan pelatihan. 5. Mendukung pengembangan SDM melalui penyiapan sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan arah bisnis bank. 6. Mengevaluasi kinerja dari penyedia pelatihan eksternal dan merekomendasikan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan apabila kinerja yang ditunjukkan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan; 7. Mengevaluasi anggaran-anggaran pelatihan per Divisi, berdasarkan kurikulum dan estimasi jumlah peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi Bank; 8. Mengorganisir penyusunan dan mengevaluasi rekomendasi jalur karir tahunan yang akan mencakup skema promosi, demosi dan mutasi untuk seluruh pegawai Bank;	1. Planning a blue print for human resource development for education and training. 2. Organizing and coordinating education and training activities. 3. Drawing up policy programs - policies in the field of education and training. 4. Compile and prepare education and training modules. 5. Supporting human resource development through the preparation of an education and training system that is in accordance with the needs and development of the bank's business direction. 6. Evaluate the performance of external training providers and recommend actions that need to be implemented if the performance demonstrated is not in accordance with the expected standards; 7. Evaluate training budgets per Division, based on curriculum and estimated number of trainees in accordance with the Bank's organizational development needs; 8. Organise the preparation and evaluation of annual career path recommendations which will include promotion, demotion and mutation schemes for all Bank employees; 9. Analyze problems that arise in the process of implementing performance evaluation activities, career management, training and development and recommend the most suitable solutions;

Struktur Organisasi Organizational Structure	Ruang Lingkup Kerja	Scope of Work
Sub Divisi Kompetensi & Learning System Sub-Division of Competency & Learning System	9. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses pelaksanaan aktivitas evaluasi kinerja, pengelolaan karir, pelatihan dan pengembangan serta merekomendasikan solusi yang paling sesuai; 10. Mengelola learning system bank. 11. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. 12. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan perencanaan, pengorganisasian dan administrasi program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 13. Menyiapkan program - program penelusuran bakat, pembinaan kepribadian dan pelatihan ketrampilan bagi pegawai dengan tujuan termanfaatkannya potensi pegawai secara maksimal demi kepentingan bank. 14. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap efektivitas program dan kontribusi peraturan bagi perkembangan bank. 15. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. 16. Pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia. 17. Mengikuti perkembangan peraturan perundangan kepegawaian pada umumnya dan kepegawaian perbankan pada khususnya. 18. Melaksanakan penyusunan modul - modul pendidikan dan pelatihan internal bank. 19. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan internal maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Lembaga Pendidikan & Pelatihan Perbankan) baik di dalam maupun di luar negeri. 20. Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia. 21. Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pegawai di Unit Kerjanya sesuai dengan fungsi dan jabatan; 22. Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit; 23. Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan di bawah unit kerjanya serta pengusulan Promosi, Mutasi maupun Demosi atas dasar pengelolaan kinerja yang telah dilakukan; 24. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 25. Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya; 26. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya. 27. Melaksanakan perencanaan mutasi pegawai, pembinaan dan pendayagunaan pegawai. 28. Melaksanakan seluruh aktivitas administrasi pada pelaksanaan proses penilaian kinerja pegawai. 29. Melakukan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan fungsi Sumber Daya Manusia	10. Manage the bank's learning system. 11. Coordinate the formulation of education and training plans for employees. 12. Coordinate the formulation of policies for planning, organizing and administering Education and Training (Diklat) programs. 13. Prepare talent search programs, personality coaching and skills training for employees with the aim of utilizing employee potential optimally for the benefit of the bank. 13. Prepare talent search programs, personality coaching and skills training for employees with the aim of utilizing employee potential optimally for the benefit of the bank. 14. Reviewing and evaluating the effectiveness of the program and the contribution of regulations to the development of the bank. 15. Planning and implementation of human resource capacity and competency development. 16. Development and utilization of human resources. 17. Follow the development of general personnel legislation and banking staffing in particular. 18. Carry out the preparation of internal bank education and training modules. 19. Prepare education and training plans internally and in collaboration with third parties (Banking Education & Training Institutions) both at home and abroad. 20. Perform other tasks related to the functions of the Human Resources Division. 21. Carry out delegation of authority to employees in their Work Unit in accordance with their functions and positions; 22. Assist subordinates in understanding the systems and procedures of their units, conducting coaching and counseling to subordinates, as well as mediating and facilitating problems between subordinates and between units; 23. Proposing the fulfillment and addition of human resources for positions under their work units and proposing Promotion, Mutation and Demotion on the basis of performance management that has been carried out; 24. Organizing the preparation of annual Work Plans and Budgets in the context of implementing activities in accordance with the scope of their field of duty; 25. Supervise and control the utilization of budgets under the scope of its authority; 26. Monitor the development of systems and procedures related to processes under the scope of its authority. 27. Carry out employee mutation planning, coaching and utilization of employees. 28. Carry out all administrative activities in the implementation of the employee performance appraisal process. 29. Perform other tasks related to the Human Resources function

REKRUTMEN PEGAWAI

Bank NTT terus berusaha memenuhi standar kebutuhan SDM sesuai dengan perkembangan bisnis bank, dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan unit kerja yang meliputi berbagai jenis latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian.

Mekanisme Rekrutmen

Mekanisme rekrutmen yang dilaksanakan Bank NTT dilaksanakan melalui 2 (dua) sistem yaitu :

- Manajemen melakukan penataan pegawai. dari hasil penataan pegawai tersebut menjadi dasar proses penerimaan pegawai.
- Proses penerimaan pegawai dapat dilakukan secara internal untuk memenuhi kekurangan pegawai berdasarkan hasil penataan pegawai yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila hasil penerimaan pegawai secara internal belum memenuhi kekurangan tersebut maka akan dilaksanakan secara eksternal.

Tahapan Dalam Melakukan Proses Rekrutmen Umum

- **Tahapan Seleksi Adminsitrasi** ; yang meliputi penelitian lamaran dan dokumen (persyaratan awal). Penelitian lamaran dan dokumen para pelamar dilakukan oleh Divisi SDM atau Tim Penerimaan Pegawai atau Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk penerimaan pegawai.
- **Tahapan Test Keterampilan (Test Profesi)**; materi test keterampilan dan pengetahuan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan jabatan yang akan diisi (persyaratan jabatan) yang ingin direkrut.
- **Tahapan Test Psikologi**; pelaksanaan test ini diserahkan kepada pihak ketiga yakni kepada psikiater yang disesuaikan dengan beberapa ketentuan seperti informasi jabatan yang akan diisi. titik berat materi yang dikehendaki dan kriteria batas kelulusan *(Passing Grade)*.
- **Tahapan Test Kesehatan**; untuk mengetahui kesehatan jasmani seseorang yang meliputi: pemeriksaan laboratorium. pemeriksaan tensi. mata. gigi. tinggi & berat badan. pemeriksaan fisik. pemeriksaan paru-paru. pemeriksaan jantung. pemeriksaan HIV/AIDS. pemeriksaan narkoba. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh Bank NTT.
- **Tahapan Test Wawancara**; test wawancara merupakan test terakhir dari serangkaian test yang dilakukan kecuali untuk jabatan/tugas yang mengutamakan penampilan yaitu wawancara

EMPLOYEE RECRUITMENT

Bank NTT continues to strive to meet human resource standards in line with the bank's business growth through a workforce needs analysis tailored to the requirements of each department, encompassing diverse educational backgrounds, experience, and expertise.

Recruitment Mechanism

The recruitment mechanism implemented by Bank NTT is carried out through two systems, namely:

- Management conducts workforce restructuring, and the results of this restructuring serve as the basis for the employee recruitment process.
- The employee hiring process can be conducted internally to address staffing shortages based on the results of the previous workforce restructuring. If the results of internal hiring do not fully address the shortage, the process will be conducted externally.

Stages of the General Recruitment Process

- **Administrative Screening Stage**, which includes reviewing applications and documents (initial requirements). The review of applicants' applications and documents is conducted by the HR Division, the Employee Recruitment Team, or a third party designated for employee recruitment.
- **Skills Test Stage (Professional Test)**: The content of the skills and knowledge tests is tailored to the specific requirements of the position to be filled (job qualifications).
- **Psychological Testing Phase**: The administration of this test is delegated to a third party—specifically a psychiatrist—in accordance with certain criteria, such as the job description of the position to be filled, the focus of the test content, and the passing grade criteria.
- **Health Examination Phase**: To assess an individual's physical health, this includes: laboratory tests, blood pressure checks, eye exams, dental exams, height and weight measurements, physical examinations, lung examinations, heart examinations, HIV/AIDS testing, and drug testing. These examinations are conducted by a hospital physician designated by Bank NTT.
- **Interview Stage**: The interview is the final stage in a series of tests, except for positions or roles that prioritize appearance—such as initial and final interviews for specialized recruitment of tellers or

awal dan wawancara akhir seperti rekrutmen khusus untuk tenaga teller atau *costumer service* yang mengutamakan penampilan yang luwes serta menarik.

customer service representatives, where a polished and attractive appearance is essential.

Tahapan Dalam Melakukan Proses Rekruitmen Tenaga Ahli (Special Hire)

- Tahapan Test Psikologi
- Test Kesehatan
- *Fit and proper test* oleh pihak ketiga yang kompeten

Stages in the Recruitment Process for Specialized Personnel (Special Hire)

- Stages of the Psychological Test
- Health Test
- Fit and proper test by a competent third party

Pedoman Dasar Rekrutmen

Rekrutmen pegawai merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam rangka penerimaan/pengadaan tenaga kerja/pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan Bank serta kompleksitas bisnis bank. Agar bank dapat tumbuh dan berkembang maka diperlukan pegawai yang berintegritas. berpengalaman, kompeten, dan loyal.

Basic Recruitment Guidelines

Employee recruitment is an integrated process aimed at hiring staff tailored to the bank's needs, financial condition, and business complexity. For the bank to grow and thrive, it requires employees who are of high integrity, experienced, competent, and loyal.

Di dalam perjalanan karier pegawai ada yang berhenti di tengah jalan karena atas permintaaan sendiri, diberhentikan atau berhenti untuk menjalani masa pensiunnya. Terhadap hal tersebut maka diperlukan tenaga pengganti melalui penerimaan pegawai baru.

During an employee's career, some may leave mid-career due to voluntary resignation, termination, or retirement. To address this, replacement staff must be secured through the hiring of new employees.

PEDOMAN DASAR REKRUTMEN PEGAWAI BERDASARKAN BUKU PEDOMAN SDM BANK NTT
BASIC GUIDELINES FOR EMPLOYEE RECRUITMENT BASED ON THE BANK NTT HR MANUAL

Penerimaan pegawai baru harus secara langsung dapat menunjang program perbaikan kinerja *(performance)* bank. The hiring of new employees must directly support the bank's performance improvement programs.	• Bank mendahulukan pegawai yang terampil. jujur dan loyal kepada Bank untuk mengisi posisi-posisi penting dalam rangka perbaikan sarana performance (terutama dalam bentuk sistem dan proses manajemen) serta dapat bekerja secara efektif di dalam organisasi yang lebih efisien. • Proses penerimaan pegawai baru membantu mencapai tujuan tersebut dengan cara menerima pegawai baru yang tepat dan memiliki karakteristik pribadi yang baik dan dapat mencerminkan kultur organisasi Bank.	• The Bank prioritizes skilled, honest, and loyal employees to fill key positions in order to improve performance (particularly in terms of management systems and processes) and to work effectively within a more efficient organization. • The new employee recruitment process helps achieve these objectives by hiring the right new employees who possess good personal characteristics and can reflect the bank's organizational culture.
Penerimaan pegawai baru, proses dan penatalaksanaannya didorong oleh kebutuhan Bank untuk memperbaiki mutu pegawai. New employee recruitment, its process, and implementation are driven by the Bank's need to improve employee quality.	Pegawai yang ada perlu ditingkatkan mutunya untuk dapat memenangkan di dalam persaingan antar Bank. Juga pegawai baru yang diterima melalui proses penerimaan pegawai harus dapat memperlihatkan kemampuannya di dalam bekerja sehingga mutunya akan sama dengan pegawai yang ada yang berkualitas	The quality of existing employees needs to be improved to win the competition among banks; similarly, new employees hired through the recruitment process must demonstrate their ability to perform so that their quality matches that of existing high-quality employees.

PEDOMAN DASAR REKRUTMEN PEGAWAI BERDASARKAN BUKU PEDOMAN SDM BANK NTT BASIC GUIDELINES FOR EMPLOYEE RECRUITMENT BASED ON THE BANK NTT HR MANUAL		
Penerimaan pegawai baru harus mentargetkan memperoleh tenaga profesional. The recruitment of new employees should focus on hiring professionals.	Pegawai Bank yang berpengalaman dan profesional didalam bidangnya dibutuhkan untuk mengisi berbagai posisi penting di Bank. Aktivitas penerimaan pegawai baru harus memperhatikan tujuan tersebut sejak awal penerimaan calon pegawai.	Experienced and professional bank employees in their respective fields are needed to fill various key positions at the bank. The new employee recruitment process must keep these objectives in mind from the very beginning of the candidate selection process.
Agar dapat memperoleh staf/pegawai berkualitas baik. penerimaan pegawai baru harus merupakan proses yang aktif yang menjangkau calon potensial. To secure high-quality staff, the new em-ployee recruitment process must be an ac-tive effort to reach out to potential candi-dates.	Calon pegawai yang potensial jumlahnya terbatas sedang banyak perusahaan lain yang memiliki kelebihan (contoh didalam memberikan gaji & fasilitas) yang juga mencari calon yang sama. maka Bank harus berani bersaing dan aktif mencarinya	The number of potential candidates is lim-ited, while many other companies—which may offer better salaries and benefits—are also seeking the same candidates; therefore, the bank must be willing to compete and ac-tively seek them out.
Kebutuhan-kebutuhan penerimaan pegawai baru akan dipenuhi melalui pemanfaatan seluruh sumber yang ada. The need for new hires will be met by utiliz-ing all available sources.	Calon pegawai yang terbaik tidak ditemukan pada satu atau dua lembaga pendidikan. Calon-calon tersebut dapat ditemukan pada banyak lembaga. Usaha penerimaan pegawai baru. harus dilakukan secara aktif dengan berusaha menembus sumber-sumber di mana calon yang baik tersebut berada. guna mendapatkan yang diinginkan	The best candidates are not found at just one or two educational institutions. These candi-dates can be found at many institutions. Ef-forts to recruit new employees must be con-ducted actively by reaching out to the sources where these qualified candidates are located to secure the desired candidates.
Proses penerimaan pegawai baru merupakan suatu proses yang tersusun dan terarah. The new employee recruitment process is a structured and targeted process.	Proses penerimaan pegawai harus tersusun dan terarah agar memungkinkan untuk perencanaan dan pengendalian. sehingga penerimaan pegawai baru dapat lebih efisien	The recruitment process must be structured and focused to enable planning and control, so that the hiring of new employees can be more efficient
Demi kepentingan dinas Bank dengan mengesampingkan proses penerimaan pegawai. Direksi berwenang mengangkat pegawai baru untuk dipekerjakan di Bank. In the best interests of the Bank, the Board of Directors has the authority to appoint new employees to be hired at the bank, even if this bypasses the standard recruitment process.		
Persyaratan posisi jabatan yang jelas dan relevan merupakan dasar penyeleksian pegawai yang bermutu tinggi. Clear and relevant job requirements form the basis for selecting high-quality employees.	Persyaratan posisi atau jabatan sebagaimana ditulis dalam uraian jabatan (Job Description) harus dibahas secara teliti oleh Bagian Penerimaan Pegawai (di Divisi SDM) dengan Unit Pemakai yang selanjutnya akan merupakan target dari jenis calon pegawai yang akan diterima	Job requirements as outlined in the job de-scription must be thoroughly discussed by the Recruitment Department (within the HR Di-vision) with the hiring unit, which will subse-quently determine the type of candidates to be recruited.

Keputusan seleksi harus didasarkan pada evaluasi hasil test secara bijaksana dan dilakukan oleh pihak yang kompeten.
Selection decisions must be based on a prudent evaluation of test results and conducted by competent personnel.

PROFIL SDM BANK NTT TAHUN BUKU 2025

Perkembangan industri perbankan semakin pesat menuntut Bank NTT untuk dapat menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Untuk itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, tangguh dan berintegritas memegang peranan yang penting sehingga dapat mendorong Bank NTT untuk semakin kompetitif dalam menghadapi tantangan zaman serta mampu menjaga keseimbangan bisnis agar sejalan dengan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun NTT.

Pendekatan *Human Capital* digunakan oleh manajemen dalam menempatkan pegawai sebagai aset yang paling berharga bagi perusahaan. Upaya mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi sesuai dengan bidang tugas dan unit kerja masing-masing serta melakukan pengelolaan SDM secara profesional dalam memberikan rasa nyaman serta kebanggaan sebagai pegawai Bank NTT.

BANK NTT HUMAN RESOURCES PROFILE FOR FISCAL YEAR 2025

The rapid growth of the banking industry demands that Bank NTT provide human resources capable of withstanding intense competition. Therefore, competent, resilient, and ethical human resources play a crucial role in driving Bank NTT's performance to become increasingly competitive in facing contemporary challenges, while maintaining business balance in alignment with the local government's direction and policies for developing NTT.

Management employs a Human Capital approach, viewing employees as the company's most valuable asset. Efforts to optimize existing HR are carried out by enhancing employee competencies through various education, training, and certification programs tailored to their respective job functions and work units, as well as by professionally managing and organizing HR to foster a sense of comfort and pride among Bank NTT employees.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees by Gender

JENIS KELAMIN	2023	2024	2025	GENDER
Pria	964	979	954	Male
Wanita	1.011	1.074	1.051	Women
TOTAL	**1.975**	**2.053**	**2.005**	TOTAL

Jumlah Pegawai Berdasarkan Range Usia

Number of Employees by Age Range

USIA PEGAWAI	2023	2024	2025	EMPLOYEE AGE
17 – 19	0	1	0	17 – 19
20 – 29	543	571	443	20 – 29
30 - 39	940	931	964	30 - 39
40 – 49	384	441	486	40 – 49
50 – 60	108	109	112	50 – 60
TOTAL	**1.975**	**2.053**	**2.005**	TOTAL

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees by Education Level

TINGKAT PENDIDIKAN	2023	2024	2025	EDUCATIONAL LEVEL
SD	2	0	0	Elementary School
SLTP	4	3	3	Junior High School
SLTA	402	386	342	High School
Sarjana Muda	97	130	99	Associate Degree
Sarjana	1.396	1.460	1.481	Bachelor's Degree
Pasca Sarjana	74	74	80	Graduate
TOTAL	**1.975**	**2.053**	**2.005**	TOTAL

Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Number of Employees by Length of Service

MASA KERJA	2023	2024	2025	LENGTH OF SERVICE
0 - 5 Tahun	617	643	550	0–5 Years
6 - 10 Tahun	450	510	529	6–10 Years
11 - 15 Tahun	627	618	574	11–15 years
16 - 20 Tahun	180	173	240	16–20 years
21 - 25 Tahun	49	67	81	21–25 years
26 - 30 Tahun	30	24	16	26–30 years
31 - 35 Tahun	22	18	15	31–35 years
TOTAL	**1.975**	**2.053**	**2.005**	TOTAL

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Number of Employees by Employment Status

STATUS PEGAWAI	2023	2024	2025	EMPLOYEE STATUS
Pegawai Tetap	1.569	1.811	1.840	Permanent Em-ployees
Pegawai Bulanan	0	1	0	Monthly Employ-ees
Pegawai Kontrak	406	241	165	Contract Employ-ees
TOTAL	**1.975**	**2.053**	**2.005**	TOTAL

Jumlah Pegawai yang Direkrut

Number of Employees Recruited

KATEGORI PEGAWAI	2023	2024	2025	EMPLOYEE CATEGORY
Special Hire	0	0	0	Special Hire
Pegawai Marketing	9	86	0	Marketing Staff
Pegawai Trainee Umum	0	21	0	General Trainee
Pegawai Kontrak Administrasi - Teller	20	24	0	Contract Administrative Staff - Teller
Pegawai Kontrak Programmer	0	2	0	Contract Programmer
Pegawai Kontrak Mekanikal Elektrikal (ME)	9	0	10	Contract Mechanical and Electrical (ME) Staff
TOTAL	**38**	**133**	**10**	TOTAL

Jumlah Pegawai yang Pensiun

Number of Retired Employees

KETERANGAN	2023	2024	2025	NOTES
Pria	12	17	14	Men
Wanita	4	2	4	Women
TOTAL	**16**	**19**	**18**	TOTAL

Jumlah Pegawai yang Meninggal Dunia

Number of Employees Who Died

KETERANGAN	2023	2024	2025	NOTES
Pria	1	3	1	Men
Wanita	3	0	4	Women
TOTAL	**4**	**3**	**5**	TOTAL

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Number of Employees by Position in 2025

Keterangan	Jumlah Total	Notes
Kepala Divisi	15	Division Heads
Dana Pensiun	1	Pension Fund
Wakil Kepala Divisi	2	Deputy Division Head
Pemimpin Cabang. Cabang Utama & Cabang Khusus	23	Branch Manager. Main Branch & Special Branch
Pemimpin Cabang.	21	Branch Manager
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)	1	Head of the Procurement Service Unit (PSU)
Wakil Pemimpin Cabang	21	Deputy Branch Manager
Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis	2	Deputy Branch Manager for Business
Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional	2	Deputy Branch Manager for Operations
Kepala Sub Divisi	56	Subdivision Head
Supervisi Pelayanan & Kas	3	Service & Cashier Supervisor
Pemimpin Cabang Pembantu	46	Assistant Branch Manager
Wakil Pemimpin Cabang Pembantu	42	Assistant Branch Deputy Manager
Kepala Kantor Kas Titipan BI	8	Head of BI Cash Deposit Office
Officer di Kantor Pusat	46	Officer at the Head Office
Supervisi di Kantor Pusat	4	Supervisor at the Head Office
Kepala Kantor Kas	0	Cash Office Manager
Supervisi Dana	23	Fund Supervision
Supervisi Kredit	24	Credit Supervision
Supervisi Administrasi Keuangan & Akuntansi	2	Financial Administration & Accounting Supervision
Supervisi Administrasi Kredit	3	Credit Administration Supervision
Junior Supervisi Pelayanan & Administrasi	3	Junior Service & Administration Supervisor
Kepala Kantor Fungsional	117	Head of Functional Office
Kepala Teller	27	Teller Manager
Pejabat Fungsional	57	Functional Officer
Staf Direksi	14	Executive Staff
Inspektur Wilayah	4	Regional Inspector
Internal Auditor	13	Internal Auditor
Risk Control	36	Risk Control
Programmer	6	Programmer
Sekretaris	6	Secretary
Staf/Pelaksana	1.398	Staff/Administrative
Total	**2.005**	**Total**

Jumlah Pegawai Pensiun

Number of Retired Employees

KETERANGAN	2023	2024	2025	NOTES
Pria	12	17	14	Men
Wanita	4	2	4	Women
TOTAL	**16**	**19**	**18**	TOTAL

Jumlah Pegawai *Outsourcing*

Number of Outsourced Employees

Keterangan	Jumlah	Notes
Security	642	Security
TBU/ OB	126	TBU/OB
Sopir	112	Drivers
Staf/Pelaksana	1.398	TOTAL
Total	**2.005**	**Total**

Jumlah Pegawai yang Keluar

Number of Employees Who Left

KETERANGAN	2023	2024	2025	NOTES
Mengundurkan Diri	15	13	14	Resignations
Berakhir Masa Kontrak	1	0	0	End of Contract
Diberhentikan / PHK	12	35	19	Terminated / Laid Off
TOTAL	**28**	**48**	**33**	TOTAL

PERSENTASE MANAJEMEN SENIOR DARI MASYARAKAT LOKAL

Sampai dengan saat ini, Bank NTT belum menerapkan penggunaan tenaga kerja asing pada tingkat manajemen senior (pejabat yang berada satu tinggat dibawah Direksi). Seluruh tenaga kerja Bank NTT merupakan warga negara Indonesia atau berasal dari masyarakat lokal.

PERCENTAGE OF SENIOR MANAGEMENT FROM THE LOCAL COMMUNITY

To date, Bank NTT has not employed foreign workers at the senior management level (officials one rank below the Board of Directors). All Bank NTT employees are Indonesian citizens or members of the local community.

PRAKTEK KETENAGAKERJAAN YANG HUMANIS

Bank NTT terus berupaya menjalankan praktek pengelolaan SDM dan hubungan ketenagakerjaan yang humanis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang ketenagakerjaan.

HUMANE LABOR PRACTICES

Bank NTT continues to strive to implement humane human resources management and labor relations practices in accordance with applicable laws and regulations, particularly labor laws.

STANDAR UPAH PEGAWAI

Dalam memberikan imbalan kerja bagi pegawai/ karyawati Bank NTT menerapkan imbalan finansial yang layak diatas standar Upah Minimum Regional termasuk pegawai *enrty level* di semua wilayah operasional Bank NTT.

EMPLOYEE WAGE STANDARDS

In providing compensation for its employees, Bank NTT applies financial compensation that is above the Regional Minimum Wage standard, including for entry-level employees in all of Bank NTT's operational regions.

Perbandingan Upah Minimum Regional dan Gaji Entry Level Terendah
Comparison of Regional Minimum Wage and Lowest Entry-Level Salary

Wilayah Region	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	Gaji Entry Level Pegawai Terendah Lowest Entry-Level Employee Salary
Nusa Tenggara Timur	Rp. 2.328.969,-	Rp.2.396.797,-

KESETARAAN DAN NON DISKRIMINASI

Bank NTT menerapkan kesempatan yang setara dan non diskriminasi tanpa memperhatikan Suku. Agama. Ras serta Jenis Kelamin kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan karier, hal ini termasuk dalam kriteria pemberian gaji dan remunerasi yang setara antara pria dan wanita untuk seluruh jenjang kepangkatan yang ada diseluruh wilayah operasional Bank NTT terbukti dengan tidak adanya laporan insiden diskriminasi yang dialami oleh pegawai Bank NTT di sepanjang tahun 2025.

EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION

Bank NTT upholds equal opportunity and non-discrimination regardless of ethnicity, Religion, Race, and Gender to all employees in career development. This includes criteria for equal pay and remuneration between men and women across all ranks throughout Bank NTT's operational areas, evidenced by the absence of reported discrimination incidents experienced by Bank NTT employees throughout 2025.

PEKERJA ANAK DAN PEKERJA MUDA

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah perlindungan anak maka Bank NTT tidak memperkerjakan pekerja anak dan pemuda yang berusia di bawah 18 Tahun, penerapan ini diberlakukan di seluruh wilayah operasional bank. Hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan yang memiliki risiko signifikan berkaitan dengan insiden yang melibatkan tenaga kerja anak dan pemuda yang berada dibawah usia 18 tahun sepanjang tahun 2025.

CHILD LABOR AND YOUTH EMPLOYMENT

As a demonstration of its commitment to child protection, Bank NTT does not employ child labor or youth under the age of 18. This policy is enforced across all of the bank's operational regions. This is evidenced by the absence of reports at regarding significant risks associated with incidents involving child labor or youth under the age of 18 throughout 2025.

PEKERJA PAKSA

Bank NTT menerapkan praktek kerja yang manusiawi di seluruh wilayah operasional Bank NTT sesuai dengan batas kewajaran, dengan tidak menerapkan praktek kerja paksa atau kewajiban paksa. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 tidak terdapat laporan yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden yang berkaitan dengan kerja paksa. Kondisi ini didukung dengan komitmen Bank NTT untuk tidak menerapkan kerja paksa atau wajib kerja.

FORCED LABOR

Bank NTT implements humane labor practices across all its operational areas in accordance with reasonable standards, without engaging in forced labor or compulsory labor. Consequently, as of the end of 2025, there were no reports related to operational activities posing significant risks of incidents involving forced labor. This situation is supported by Bank NTT's commitment to not engage in forced labor or compulsory labor.

KONSEP DAN PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dijalankan Bank NTT mengacu pada Buku Manual Pedoman SDM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 129 Tahun 2018 Tentang Buku Pedoman Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- Buku I tentang Budaya Perusahaan.
- Buku II tentang Penataan dan Penerimaan Pegawai.
- Buku III tentang Penghasilan. Fasilitas dan Pendidikan Pelatihan Pegawai.
- Buku IV tentang Pengelolaan Jalur Karier/*Career Path.*
- Buku V tentang Penilaian Kinerja Pegawai / *Key Performance Indicator* (KPI)
- Buku VI tentang Tata Tertib. Sanksi Adiminstrasi. Hukuman Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja

.

Bank NTT berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas, kompetensi, karier maupun kesejahteraan seluruh pegawai sebagai suatu landasan yang kuat dalam mewujudkan Visi dan Misi perusahaan. Komitmen Bank NTT terhadap pengembangan SDM dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas SDM secara optimal.

Di tengah persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat diperlukan suatu persiapan dan perencanaan yang matang terkait peningkatan kualitas SDM yang dimiliki sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan pemerintah daerah serta mampu beradaptasi terhadap model bisnis dan transformasi digital dalam memberikan nilai tambah terhadap produk dan layanan yang diberikan. Bank NTT memposisikan peningkatan kualitas SDM yang profesional. kompeten dan berintegritas sebagai salah satu prioritas utama dalam menunjang aktivitas bisnis dan operasional bank.

Penataan SDM Bank NTT didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen, career path, dan *job grading* serta didukung oleh program Pendidikan. Pelatihan dan Sertifikasi yang mendukung bisnis Bank secara teratur dan berkesinambungan.

HR CONCEPT AND MANAGEMENT

Bank NTT's human resources management is based on the Human Resources Manual as stipulated in Board of Directors Decision No. 129 of 2018 Regarding the Human Resources Manual of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, as follows:

- Book I on Corporate Culture.
- Book II on Staffing and Recruitment.
- Book III on Compensation, Benefits, and Employee Training.
- Volume IV on Career Path Management.

- Book V on Employee Performance Evaluation / Key Performance Indicators (KPIs)
- Book VI on Rules and Regulations, Administrative Sanctions, Disciplinary Actions, and Termination of Employment.

Bank NTT is committed to continuously improving the quality, competence, career development, and well-being of all employees as a strong foundation for realizing the company's Vision and Mission. Bank NTT's commitment to human resource development begins with the optimal planning, organizing, implementing, and controlling of HR activities.

Amid increasingly intense competition in the banking sector, thorough preparation and planning are essential regarding the enhancement of the quality of our human resources so that they can provide the best possible service to the public and local governments and adapt to business models and digital transformation to add value to the products and services offered. Bank NTT prioritizes the development of professional, competent, and ethical human resources as a key focus in supporting the bank's business and operational activities.

Bank NTT's human resources management is supported by policies and the implementation of recruitment, career paths, , and job grading, as well as by education, training, and certification programs that support the bank's business on a regular and ongoing basis.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank NTT Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

Bank NTT's Human Resource Development Program for Fiscal Year 2025 is as follows:

NO	PROGRAM KERJA	WORK PROGRAM
1.	Kerja Sama Pihak ketiga dengan Rumah Sakit/ Klinik/Laboratorium dan Psikiater/Psikolog terkait Pelaksanaan Test Kesehatan dan Psikologi Calon Pegawai Bank NTT.	Third-Party Collaboration with Hospitals/Clinics/ Laboratories and Psychia-trists/Psychologists regarding the Implementation of Health and Psychological Tests for Bank NTT Employee Candidates.
2.	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM BANK NTT) melalui : • Pengembangan lanjutan modul kepegawaian dan penambahan modul penggajian pada aplikasi SIM Bank NTT guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas. dimana seluruh data dan aktivitas kepegawaian diakses melalui satu aplikasi sehingga sistem informasi manajemen terintegrasi dan memudahkan manajemen dalam proses perencanaan. penataan maupun pengembangan sumber daya manusia. • Pengembangan lanjutan sistem penilaian pegawai dengan melakukan pembaruan/ penyesuaian indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu secara objektif dan terukur dalam tujuan mencapai target bisnis bank sesuai arah dan rencana strategis yang telah ditetapkan. • Pengembangan aplikasi e-recruitment untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perekrutan yang dapat memungkinkan bank memperoleh calon pegawai/ kandidat yang lebih potensial dan berkualitas serta dapat meningkatkan citra bank yang modern dan inovatif.	Development of the Human Resources Management Information System (SIM BANK NTT) through: • Further development of the personnel management module and the addition of a payroll module to the SIM Bank NTT application to enhance efficiency and effectiveness. This ensures that all personnel data and activities are accessed through a single application, thereby creating an integrated management information system that facilitates management in the processes of planning, organizing, and developing human resources. • Further development of the employee evaluation system by updating/adjusting the indicators used to objectively and measurably evaluate individual performance, with the aim of achieving the bank's business targets in line with established strategic directions and plans. • Development of an e-recruitment application to improve the effectiveness and efficiency of the recruitment process, enabling the bank to attract more promising and qualified candidates while enhancing the bank's image as modern and innovative.
3.	Penyusunan dan pengkinian Kebijakan Divisi Sumber Daya Manusia melalui : • Reviu pedoman Penataan & Rekruitmen Pegawai • Penyusunan Pedoman Alih Daya • Penyusunan Pedoman Mutasi • Review Buku Pedoman SDM dan ketentuan SDM lainnya sesuai ketentuan eksternal terkini.	Formulation and updating of Human Resources Division Policies through: • Reviewing guidelines for employee placement and recruitment • Drafting of Outsourcing Guidelines • Development of Transfer Guidelines • Review of the HR Manual and other HR regulations in accordance with the latest external regulations.
4.	Peningkatan Kompetensi Hard Skill dan Soft Skill aktivitas perbankan melalui : • Pelaksanakan pendidikan dan pelatihan hard skill dan soft skill pada semua lini aktivitas perbankan dengan melibatkan kantor cabang dan kantor pusat. • Program keahlian khusus bagi pegawai pada bidang digitalisasi perbankan. pertanian. peternakan. perikanan kelautan dan teknologi informasi melalui program vokasi. • Pelaksanaan Sertifikasi pada unit/bidang kerja sebagaimana diatur oleh regulator.	Enhancement of Hard and Soft Skills competencies in banking activities through:: • Implementation of hard skills and soft skills training across all areas of banking operations, involving both branch offices and headquarters. • Specialized training programs for employees in the fields of banking digitalization, agriculture, livestock, fisheries and marine affairs, and information technology through vocational programs. • Implementation of certification in units/work areas as regulated by the regulator.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Upah minimum yang diberikan kepada pegawai *entry level* Bank NTT di tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.396.797,- telah berada di atas upah minimum yang berlaku di wilayah NTT sebesar Rp. 2.328.969,- .

Selain itu, Bank NTT juga memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan cuti, tunjangan sandang, tunjangan risiko, tunjangan kesejahteraan, tunjangan keluarga, tunjangan kedukaan, penghargaan atas masa dinas serta mengikut sertakan pegawai tetapnya dalam program tunjangan hari tua, program pensiun imbalan pasti, serta melindungi pegawai dari risiko-risiko kesehatan dan kecelakaan kerja melalui kepersertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kontribusi perusahaan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk penghasilan maupun tunjangan – tunjangan seperti tersebut di atas pada tahun 2025 mencapai Rp. 535.92 miliar mengalami penurunan sebesar Rp. 12.14 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp.548.07 miliar.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan paska kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bakti dan penghargaan masa bakti proporsional, dihitung berdasarkan peraturan perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020.

Sehubungan dengan imbalan pensiun. Bank NTT memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh pegawai tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Bank NTT dimana pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat No.KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris secara berkala.

Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh pegawai pada saat pensiun dimana biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

EMPLOYEE WELFARE

The minimum wage provided to entry-level employees at Bank NTT in 2025 is Rp 2,396,797, which is above the minimum wage applicable in the NTT region of Rp 2,328,969.

In addition, Bank NTT also provides health allowances, religious holiday allowances, leave allowances, clothing allowances, risk allowances, welfare allowances, family allowances, bereavement allowances, service awards, and enrolls its permanent employees in a retirement allowance program, a defined-benefit pension program, and protects employees from health and workplace accident risks through participation in the BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan programs.

The company's contributions to employees in the form of income and allowances—such as those listed above—in 2025 reached Rp 535.92 billion, a decrease of Rp 12.14 billion from the 2024 figure of Rp 548.07 billion.

Long-term employment benefits and post-employment benefits, such as pensions, long-term paid leave, length-of-service awards, and proportional length-of-service awards, are calculated in accordance with company regulations that have been aligned with the Labor Law No. 13/2003 and the Job Creation Law No. 11 of 2020.

Regarding pension benefits, Bank NTT has a defined-benefit pension program for all its permanent employees, managed by the Bank NTT Pension Fund, whose establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia via Letter No. KEP-479/KM.17/1996 dated December 30, 1996.

The defined benefit pension program is funded through payments to the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, determined based on periodic actuarial calculations.

A defined benefit program is a pension plan that specifies the amount of pension benefits an employee will receive upon retirement, which typically depends on one or more factors such as age, length of service, and compensation amount. The employee's contribution to

Jumlah kontribusi pegawai dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar pegawai yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh bank.

Sejak tahun 2024 bank telah melakukan perubahan kebijakan dari program Pensiun Imbalan Pasti ke program Pensiun Iuran Pasti yang pengelolaannya dilakukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Jawa Barat dan Banten (BjB) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Program Pensiun Iuran Pasti Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bagi Pegawai Bank NTT, yang pemberlakuannya mulai diterapkan kepada pegawai tetap yang diangkat pada tahun 2024.

INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Sejalan dengan perkembangan bank maka semakin disadari bahwa budaya kerja (*Corporate Culture*) memiliki peranan penting dalam mendukung visi misi perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai apabila seluruh pegawai dapat memahami dan menerapkannya dalam seluruh aktivitas bank.

Corporate Culture yang dimiliki Bank NTT sejak tahun 2023 adalah **"BINTANG"** yang merupakan akronim dari *Business Oriented, Independent, Infinite & Integrity, Networking, Trust & Team Work, Adaptive, New Technology, Growth & Sustainable.*

Budaya kerja Bank NTT dirumuskan dengan menggali nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh pegawai sebagai nilai-nilai unggul yang dapat mendukung pencapaian kinerja terbaik bagi bank sehingga dapat menjawab tantangan di masa mendatang.

PENGELOLAAN JALUR KARIER

Standar Grade dan Jabatan

Standar Grade dan Jabatan diatur dalam Surat Keputusan Direksi pada Pedoman Sistem Grading dan Penggajian Bank NTT.

Pedoman Dasar Proses Pengelolaan Jalur Karier

Menciptakan suatu sistem SDM yang terencana akan kebutuhan kader pemimpin di Bank NTT.

Pengelolaan Jalur Karier dengan fokus menciptakan kader-kader dengan kualitas yang baik bagi Bank NTT dan menjawab kebutuhan perusahaan akan kader-

this pension program is set at 5% of the employee's base salary, with the remainder covered by the bank.

Since 2024, the bank has changed its policy from a Defined Benefit Pension program to a Defined Contribution Pension program, which is managed by the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Jawa Barat and Banten (BjB) through Board of Directors Decree No. 29 of 2023 regarding the Defined Contribution Pension Program at the Financial Institution Pension Fund for Bank NTT Employees, the implementation of which began to apply to permanent employees appointed in 2024.

INTERNALIZATION OF CORPORATE CULTURE

In line with the bank's development, it is increasingly recognized that corporate culture plays a vital role in supporting the company's vision and mission. This can be achieved if all employees understand and apply it in all the bank's activities.

The corporate culture adopted by Bank NTT since 2023 is "**BINTANG**," which stands for An acronym for Business-Oriented, Independent, Infinite & Integrity, Networking, Trust & Teamwork, Adaptive, New Technology, Growth & Sustainable.

Bank NTT's work culture is defined by identifying the values held by all employees as core principles that support the bank's achievement of top performance, thereby enabling it to meet future challenges.

CAREER PATH MANAGEMENT

Grade and Position Standards

Grade and Position Standards are regulated in a Board of Directors' Decision within the Bank NTT Grading and Pay System Guidelines.

Basic Guidelines for the Career Path Management Process

Creating a well-planned HR system to meet the need for leadership cadres at Bank NTT.

Career Path Management focuses on developing high-quality leadership candidates for Bank NTT and addressing the company's need for candidates

kader yang mempunyai integritas. kompetensi. attitude dan skill yang baik.

Fokus Pengelolaan Jalur Karier

Membantu penempatan pegawai secara optimal dalam membantu manajemen untuk mencapai potensinya secara maksimal.

Manfaat Pengelolaan Jalur Karir Bagi Pegawai :

1. Sebagai media mengembangkan potensi kemampuan dan keterampilan.
2. Mengetahui jalur pengembangan Karier dalam perusahaan.
3. Mendapatkan pelatihan sesuai dengan arah pengembangan karier.
4. Memperoleh kepuasan dalam bekerja karena pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keinginan atau minat pegawai.

Manfaat Pengelolaan Jalur Karier Bagi Organisasi :

a. Meminimalkan tingkat keluar masuk pegawai (*turnover*)
b. Membantu terlaksananya proses kaderisasi sehingga untuk jangka panjang Bank NTT dapat memperoleh kader yang mempunyai kualitas yang baik yang pada waktunya dapat mendukung pertumbuhan dan profitabilitas bank NTT secara berkelanjutan.
c. Menempatkan orang sesuai dengan potensi dan bakatnya (prinsip *the right man on the right place*).

Sasaran Jalur Karier

Karier adalah suatu proses yang tidak statis dalam perjalanan pekerjaan seorang pegawai. Ada perjalanan karier yang cepat dan ada yang lambat.

Jalur Karier adalah pola urutan pekerjaan (*pattern of work sequence*) yang harus dilalui oleh seorang pegawai untuk mencapai suatu tujuan akhir dari proses perjalanan kariernya sehingga sasaran jalur karier memberikan peluang untuk semua pegawai sesuai dengan kompetensi, skill, integritas, berdaya saing dan attitudenya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai tujuan kariernya. Oleh karena itu manajemen melalui Divisi SDM mengatur secara jelas jalur karier sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan karier pegawai dimaksud.

possessing integrity, competence, the right attitude, and strong skills.

Focus of Career Path Management

To assist in the optimal placement of employees to help management achieve their full potential.

Benefits of Career Path Management for Employees:

1. Serves as a platform for developing potential abilities and skills.
2. To understand career development paths within the company.
3. Receiving training aligned with career development goals.
4. Gaining job satisfaction because the work performed aligns with the employee's preferences or interests.

Benefits of Career Path Management for Organizations:

a. Minimizing employee turnover
b. Supporting the implementation of succession planning so that, in the long term, Bank NTT can secure high-quality successors who will eventually support the bank's sustainable growth and profitability.
c. Placing people according to their potential and talents (the principle of the right person in the right place).

Career Path Objectives

A career is a dynamic process in an employee's professional journey. Some career paths progress quickly, while others move more slowly.

A career path is a pattern of work sequence that an employee must follow to reach the ultimate goal of their career journey, ensuring that the career path objectives provide opportunities for all employees based on their competencies, skills, integrity, competitiveness, and attitude, so they have equal opportunities to achieve their career goals. Therefore, management, through the HR Division, clearly defines career paths in accordance with the requirements and conditions that must be met to achieve the employee's career goals.

SISTEM PENGELOLAAN JALUR KARIER BANK NTT

BANK NTT CAREER PATH MANAGEMENT SYSTEM

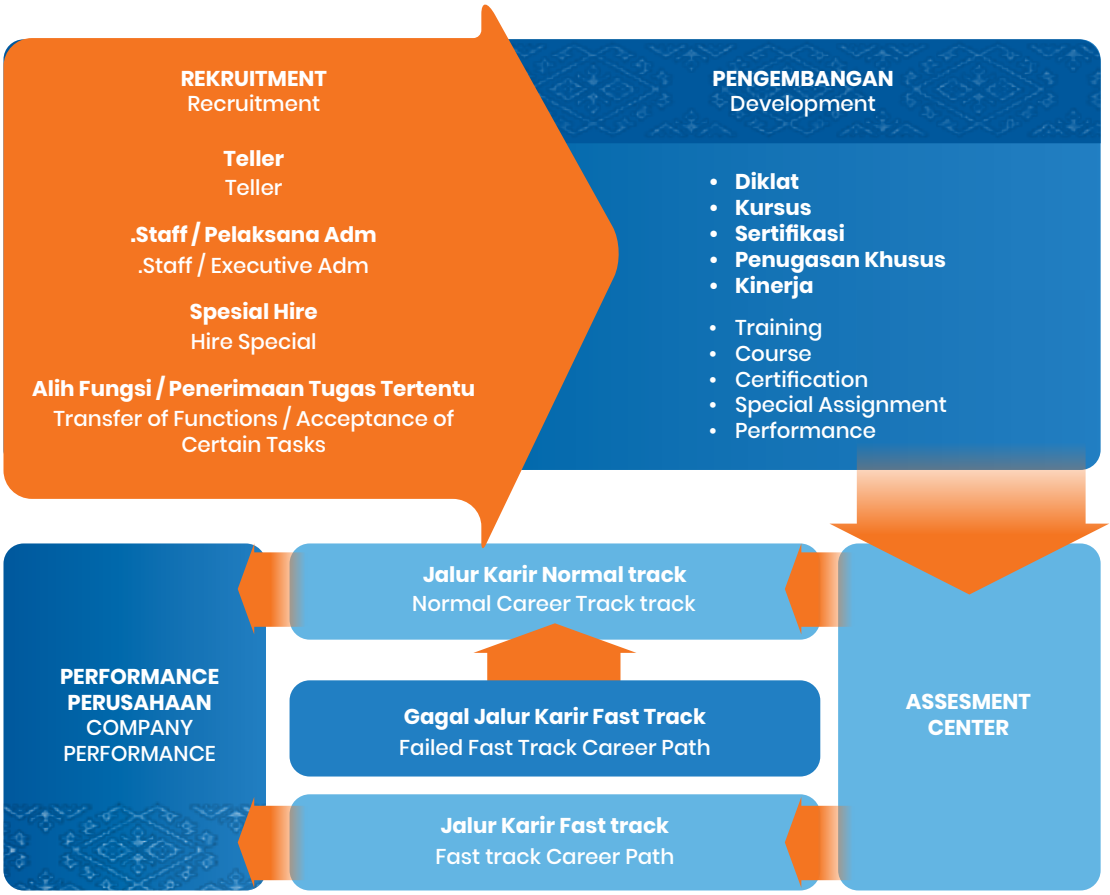

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

Sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai, setiap tahun perusahaan memberikan penghargaan berupa uang tunai kepada pegawai yang telah mengabdi di bank NTT selama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun, dengan syarat pegawai tersebut tidak sedang menjalani hukuman dinas atau tidak bermasalah dengan bank. Jumlah pegawai yang menerima penghargaan selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

EMPLOYEE RECOGNITION

As a form of recognition for employees, the company annually awards cash prizes to employees who have served at Bank NTT for 15, 20, 25, and 30 years, provided that the employee is not currently serving a disciplinary suspension or has no outstanding issues with the bank. The number of employees receiving awards over the past five years is as shown in the following table:

MASA BHAKTI	2021	2022	2023	2024	2025	LENGTH OF SERVICE
15 Tahun	6	27	14	80	121	15 Years
20 Tahun	9	29	20	18	92	20 years
25 Tahun	27	-	-	3	4	25 Years
30 Tahun	8	12	1	6	6	30 Years
Jumlah	**50**	**68**	**35**	**107**	**223**	**Total**

PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM

Kebijakan Pelatihan

Pendidikan. pelatihan dan sertifikasi kepada pegawai terus dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi seiring dengan tuntutan regulasi, perubahan pola bisnis perbankan. perubahan struktur organisasi bank serta rencana strategis bank, sehingga bank mampu beradaptasi terhadap persaingan bisnis dan menjaga keberlangsungan bisnis bank untuk jangka panjang.

Tujuan

Dengan adanya pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh bank akan memberikan manfaat yang diperoleh dalam strategi perusahaan meningkatkan kinerja pegawai yaitu :

a. Tersedianya sumber daya manusia yang berintegritas. berkompetensi, berdaya saing global dan memiliki sikap dasar pengabdian serta profesionalisme.
b. Memenuhi persyaratan jabatan yang sedang maupun yang akan dipangku.
c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku kerja dan wawasan segenap pegawai.
d. Meningkatkan rasa puas dan menumbuhkan semangat kerja serta rasa percaya diri pada pegawai.
e. Memperbaiki metode dan sistem kerja sehingga dapat memperlancar proses kerja dan efisiensi waktu.
f. Mengurangi kesalahan dalam bekerja sehingga mengurangi beban pemborosan.
g. Komunikasi dan kerjasama antar pegawai menjadi lebih baik sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman

Sasaran

Penyusunan Rencana Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi untuk pegawai adalah terwujudnya pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas guna mewujudkan pegawai yang profesional, berdaya saing global. mampu mengembangkan potensi diri secara terus menerus serta mampu memberi kontribusi positif terhadap kinerja bank.

TRAINING & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Training Policy

Management continues to provide education, training, and certification to employees to enhance their competencies in line with regulatory requirements, changes in banking business models, changes in the bank's organizational structure, and the bank's strategic plans, thereby enabling the bank to adapt to business competition and ensure the bank's long-term sustainability.

Objectives

The education, training, and certification programs conducted by the bank will yield benefits aligned with the company's strategy to improve employee performance, namely:

a. The availability of human resources who possess integrity, competence, global competitiveness, and a fundamental attitude of dedication and professionalism.
b. Meeting the requirements of current and future positions.
c. Enhancing the knowledge, skills, work behavior, and perspective of all employees.
d. Increasing employee satisfaction and fostering a strong work ethic and self-confidence.
e. Improving work methods and systems to streamline work processes and enhance time efficiency.
f. To reduce errors in work, thereby minimizing waste.
g. Improve communication and cooperation among employees to create a comfortable work environment.

Objectives

The development of Education, Training, and Certification Plans for employees aims to cultivate employees with competence and integrity, thereby fostering a professional workforce that is globally competitive, capable of continuously developing their potential in alignment with their career paths, and able to make positive contributions to the bank's performance.

Anggaran Pelatihan dan Pengembangan SDM

Anggaran biaya pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk mendukung terlaksananya pengembangan SDM yang berkualitas dan berintegritas minimal adalah sebesar 3,5% dari total kotor biaya tenaga kerja pada tahun sebelumnya.

Anggaran pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM sepenuhnya berasal dari anggaran murni PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan asas prioritas dan asas pemerataan serta disesuaikan dengan kebutuhan bank sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dan *Corporate Plan*.

Training and Human Resources Development Budget

The budget for education, training, and competency certification to support the implementation of high-quality and integrity-driven human resource development is a minimum of 3.5% of the total gross labor costs from the previous year, as regulated by the Financial Services Authority.

The budget for human resources education, training, and competency certification is entirely derived from the independent budget of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, and its implementation is carried out while adhering to the principles of priority and equity, and is aligned with the bank's needs as outlined in the Bank's Business Plan and Corporate Plan.

POLA PELATIHAN CALON PEGAWAI

TRAINING MODEL FOR PROSPECTIVE EMPLOYEES

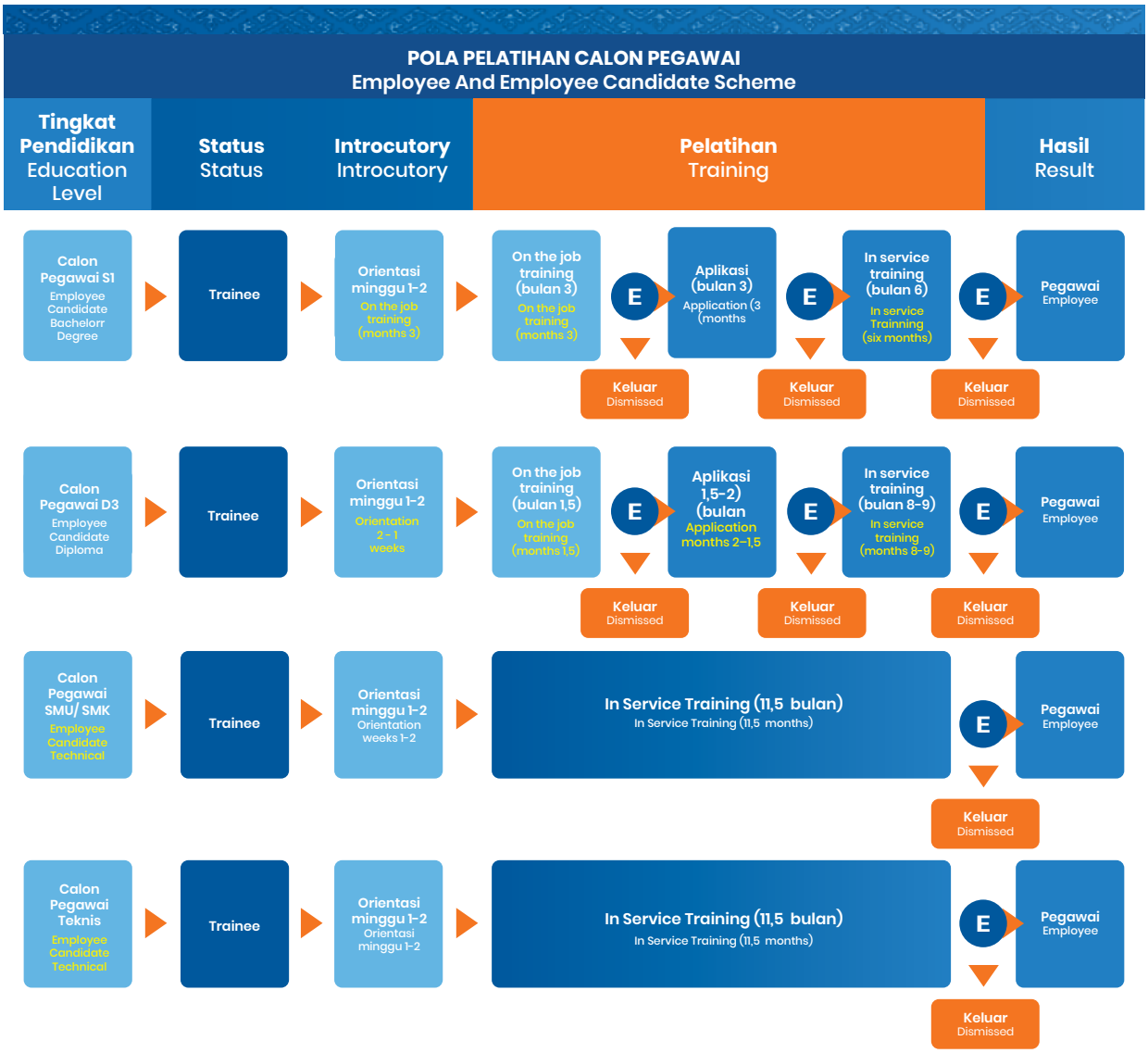

POLA PELATIHAN PEGAWAI

EMPLOYEE TRAINING PROGRAM

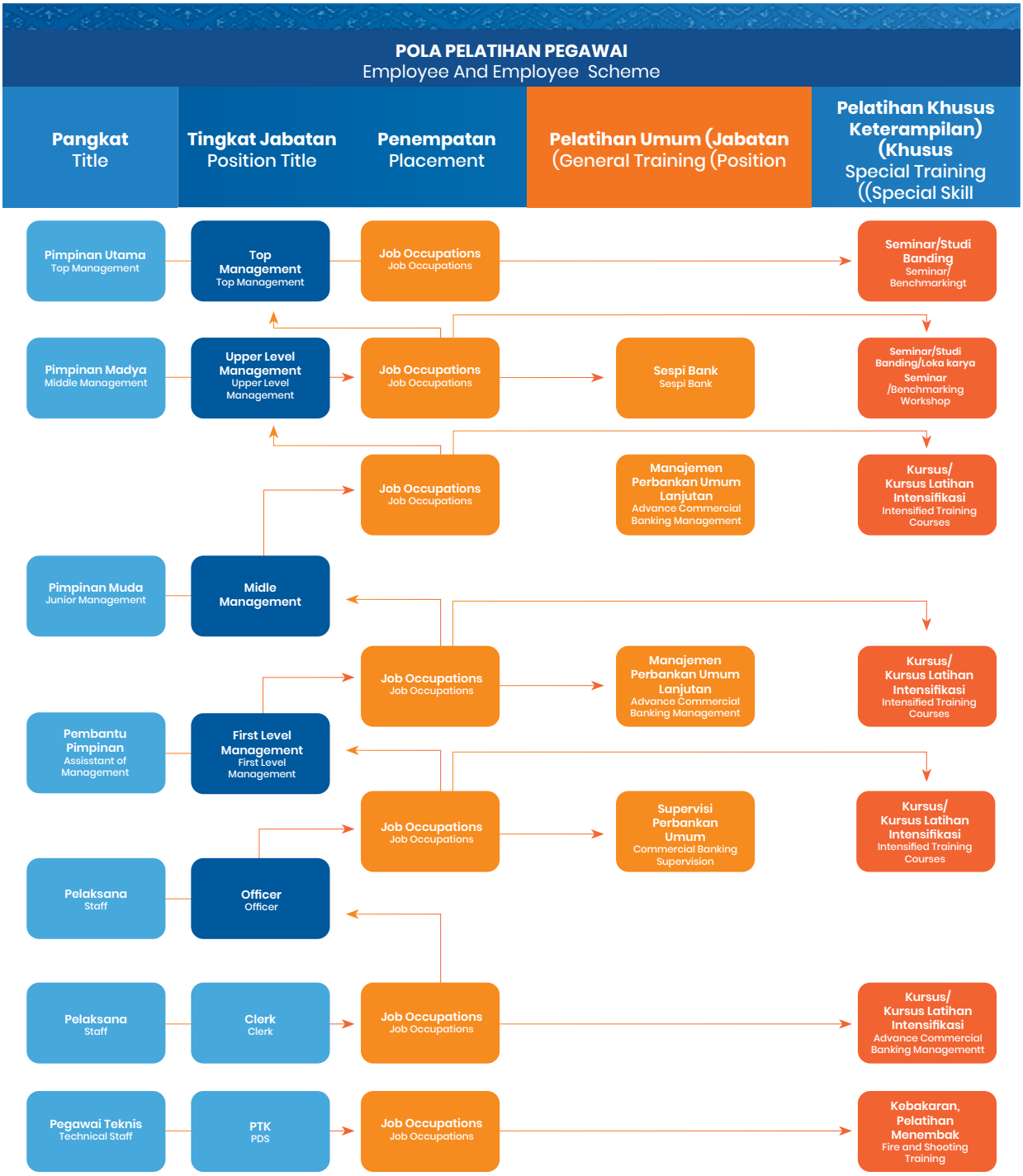

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT telah melakukan program pengembangan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi yang dilakukan sebanyak 167 kali dengan alokasi biaya sebesar Rp 16.67 miliar.

EDUCATION AND TRAINING COSTS

Throughout 2025, Bank NTT has implemented human resource development programs through education, training, and certification, conducted 167 times with a budget allocation of Rp 16.67 billion.

Biaya Diklat Bank NTT Tahun Buku 2025

Bank NTT Training Costs for Fiscal Year 2025

*dalam jutaan *in millions

Tahun Tahun	Biaya Diklat (Rp) Training Costs (Rp)
2017	10.407
2018	15.639
2019	11.745
2020	4.879
2021	7.915
2022	20.554
2023	11.786
2024	21.596
2025	16.667

ROAD MAP SDM

Road Map pengelolaan dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank NTT didasarkan pada Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021- 2025 yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni SDM Profesional. Berintegritas dan Berdaya Saing Global.

HR ROADMAP

Bank NTT's Human Resources (HR) management and development roadmap is based on the 2021–2025 Financial Services Sector HR Development Blueprint prepared by the Financial Services Authority, which focuses on professional, integrity-driven, and globally competitive human resources.

2023-2024

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di seluruh bidang bisnis dan non bisnis.
2. Pengembangan sistem informasi bank.
3. Pendidikan dan pelatihan Bank Devisa.
4. Penyusunan dan pengkinian kebijakan SDM.
5. Pendidikan dan pelatihan hard skill dan soft skill.

1. Enhancement of education and training across all business and non-business sectors.
2. Development of the bank's information systems.
3. Education and training for the Foreign Exchange Bank.
4. Formulation and updating of HR policies.
5. Hard skills and soft skills education and training.

2024-2025

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang bisnis dan non bisnis.
2. Peningkatan program sertifikasi keahlian.
3. Pembentukan karakter melalui perubahan *corporate culture*.
4. Penyesuaian KPI dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDM.

1. Enhancement of education and training in business and non-business fields.
2. Expansion of professional certification programs.
3. Character development through changes in corporate culture.
4. Adjustment of KPIs and Implementation of the Human Resources Management Information System.

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan hardskill dan soft skill.
2. Pengembangan dan penambahan menu penggajian pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen.
3. Peningkatan program sertifikasi keahlian.
4. Jenjang karier melalui promosi jabatan sesuai dengan penilaian kinerja yang melekat pada masing-masing pegawai.

2025-2026

1. Enhancement of education and training in hard skills and soft skills.
2. Development and addition of payroll features to the HR Management Information System application.
3. Expansion of professional certification programs.
4. Career progression through job promotions based on performance evaluations specific to each employee.

1. Pengembangan kompetensi di bidang teknologi dan digitalisasi.
2. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dalam rangka sertifikasi keahlian.
3. Penyempurnaan struktur organisasi sesuai dengan rencana strategis dan kompleksitas bisnis bank.
4. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bank.

2026-2027

1. Development of competencies in technology and digitalization.
2. Collaboration with professional certification bodies for skills certification.
3. Refinement of the organizational structure in line with the strategic plan and the complexity of the bank's business.
4. Improvement of the Bank's Management Information System application.

PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bank NTT mengedepankan terbinanya hubungan yang harmonis dan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh jajaran manajemen dan pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank NTT membina Hubungan Industrial yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis dan operasional bank.

Pengelolaan Hubungan Industrial di Bank NTT selama tahun 2025 merujuk kepada Anggaran Dasar Perusahaan yang mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pegawai Bank NTT secara jelas dan komprehensif. Dalam pola Hubungan Industrial tersebut. seluruh entitas Bank NTT memiliki keterwakilan dan hak untuk menyampaikan pendapat secara setara melalui mekanisme-mekanisme yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT

Bank NTT prioritizes the establishment of harmonious relationships and a conducive work environment for all levels of management and employees. To achieve this objective, Bank NTT fosters Industrial Relations that accommodate the interests of all parties involved in the bank's business and operational activities.

The management of Industrial Relations at BankNTT throughout 2025 refers to the Company's Articles of Association, which clearly and comprehensively outline the rights and obligations of each BankNTT employee. Within this framework of Industrial Relations, all entities of BankNTT have representation and the right to express their opinions on an equal footing through mechanisms agreed upon by both parties.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis perbankan menuntut Bank NTT untuk terus melakukan penyesuaian pada sistem teknologi informasi yang dimiliki agar tetap *survive* dalam mendukung kompleksitas bisnis sesuai dengan model bisnis bank terkini melalui digitalisasi.

The rapid advancement in the utilization of information technology within the banking industry requires Bank NTT to continuously adapt its information technology systems to remain sustainable in supporting increasing business complexity, in line with the Bank's evolving business model through digitalization.

Manajemen memandang digitalisasi sebagai strategi jangka panjang terhadap keberlangsungan bisnis bank seiring dengan perubahan pola konsumsi, gaya hidup, dan cara bertransaksi masyarakat saat ini. Sistem teknologi informasi yang handal sangat dibutuhkan guna memastikan aktivitas kanal-kanal digital yang dijalankan Bank NTT dapat beroperasi dengan baik.

Management views digitalization as a long-term strategy to sustain the Bank's business amid evolving consumption patterns, lifestyles, and transaction behaviors of society. A reliable information technology system is essential to ensure that the Bank NTT's digital channels operate effectively and efficiently.

Terhadap hal tersebut maka manajemen telah menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Bank NTT 2025-2030 sebagai *blue print* penataan dan pengembangan sistem teknologi informasi Bank NTT untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Selain itu manajemen juga telah membentuk Komite Teknologi Informasi sebagai forum pembahasan, evaluasi dan penyelesaian hal-hal terkait sistem teknologi informasi bank yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 061 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Aktivitas teknologi informasi Bank NTT dibagi dalam 4 proses, yaitu Perencanaan *(Planning)*, Pengembangan (Development), Operasional Teknologi Informasi dan Pengamanan (Security).

In this regard, Management has formulated the Bank NTT Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2025–2030 as a blueprint for the structuring and development of the Bank's information technology systems over the next five years.

In addition, Management has established an Information Technology Committee as a forum for discussion, evaluation, and resolution of matters related to the Bank's information technology systems, as stipulated in the Board of Directors Decree of Bank NTT No. 061 of 2024 concerning the Establishment of the Information Technology Steering Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

The Bank NTT's information technology activities are categorized into four processes: Planning, Development, Information Technology Operations, and Security.

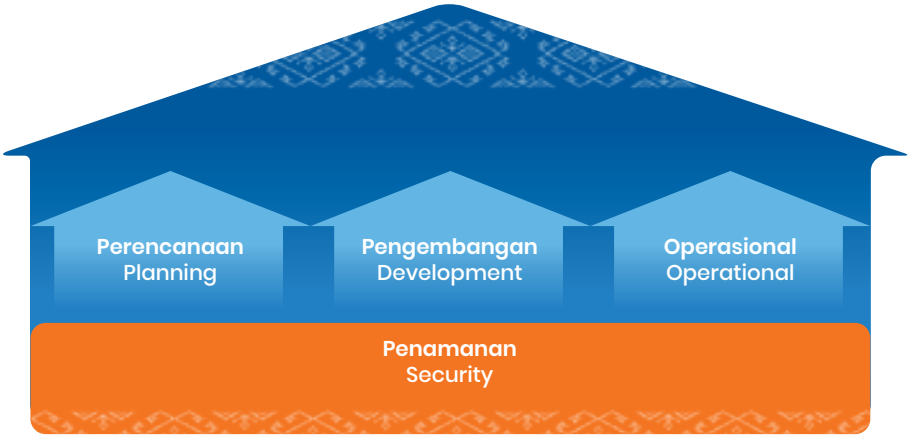

Digitalisasi yang dilaksanakan Bank NTT turut memunculkan risiko terkhususnya risiko keamanan, Meningkatnya kejahatan siber, *fraud* dan kebocoran data menempatkan aspek Pengamanan (*security*) sebagai fondasi utama berjalannya aktivitas operasional sistem informasi Bank NTT.

Penanganan aspek keamanan sistem informasi Bank NTT dilakukan oleh manajemen dibawah pengawasan internal maupun regulator yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan melalui surat, pengawasan secara tidak langsung melalui kuisioner, visitasi, *coaching clinic* maupun pertemuan secara daring guna melakukan kontrol dalam memastikan kondisi Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) Bank NTT berada dalam keadaan optimal.

The digitalization initiatives implemented by Bank NTT have also introduced risks, particularly security risks. The rise in cybercrime with increasingly diverse methods, as well as fraud and data breaches, positions the Security aspect as the primary foundation for the operation of Bank NTT's information systems.

Management of Bank NTT's information system security is carried out by management under the supervision of internal auditors as well as regulators, namely Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK). Bank Indonesia and the Financial Services Authority routinely provide guidance and oversight through letters, indirect supervision via questionnaires, site visits, coaching clinics, and online meetings to monitor and evaluate the condition of Bank NTT's Information System Security and Cybersecurity (KKS) to ensure it remains in optimal condition.

Menyikapi pentingnya tingkat keamanan sistem teknologi informasi yang dimiliki maka manajemen telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 068 Tahun 2025 tentang Pedoman (Kebijakan, Standar dan Prosedur) Pengelolaan Security Operation Center PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai panduan pengelolaan Security Operation Center dalam memitigasi risiko serangan siber.

Langkah-langkah yang telah ditempuh manajemen melalui Divisi Teknologi Informasi sepanjang tahun 2025 dalam meningkatkan ketahanan keamanan sistem teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Mendukung kebijakan regulasi dan otritas terhadap keamanan informasi serta memperkuat sistem Teknologi Informasi terhadap ketahanan dan keamanan siber baik di level kebijakan, teknologi dan sumber daya manusia.
2. Melakukan peremajaan dan upgrade di level infrastruktur untuk perangkat server-server yang operating systemnya telah memasuki masa end of life dan end of support sehingga bisa menjadi cela keamanan dalam operasional bank, dimana telah dilakukan pengadaan upgrade proswitch engine baik di level Operating System. Database dan Engine untuk aplikasi Proswitch ATM, CAM, CMS dan Biller Bank NTT, dimana untuk memperkuat ketahanan dan keamanan siber terhadap serangan siber dan agar nasabah dan pengguna layanan perbankan dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.
3. Memperkuat sisi *security operasional* di level *end point* (PC/Laptop) dengan mengimplementasikan teknologi *Active Directory* di seluruh PC dan Laptop telah onboarding ke *Active Directory* sebagai salah satu rekomendasi terkait Penguatan Keamanan Informasi.
4. Memperkuat security/keamanan informasi di level endpoint (PC/Laptop) dengan mengimplementasikan Endpoint Detection Response (EDR) di seluruh PC dan Laptop pegawai kantor operasional Bank NTT sebanyak 1200 endpoint (PC/Laptop) telah terlindungi antivirus dengan Endpint Detection Response (EDR) sebagai salah satu rekomendasi terkait Penguatan Keamanan Informasi.
5. Melakukan penetration testing dan *vulnerability assessment* secara berkala dimana dilakukan penetration testing pada Web aolikasi T24 dengan ruang lingkup modul CS dan Teller sehingga bank dapat mengukur kelemahan dan celah keamanan yang mungkin dapat digunakan sebagai serangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan agar nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman

Recognizing the importance of the security level of the information technology systems in place, management has issued Board of Directors Decision No. 068 of 2025 regarding Guidelines (Policies, Standards, and Procedures) for the Management of the Security Operation Center at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as a guide for managing the Security Operation Center in mitigating the risk of cyberattacks.

The steps taken by management through the Information Technology Division throughout 2025 to enhance the security resilience of the information technology system are as follows:

1. Support regulatory policies and authorities regarding information security, and strengthen information technology systems to enhance cybersecurity and resilience at the policy, technological, and human resources levels.
2. Conducting infrastructure renewal and upgrades for server devices whose operating systems have reached end-of-life and end-of-support, which could potentially become security vulnerabilities in the bank's operations. By 2025, upgrades to the Proswitch engine have been implemented at the Operating System, Database, and Engine levels for the Proswitch ATM, CAM, CMS, and Biller applications of Bank NTT to strengthen cyber resilience and security against cyberattacks, thereby ensuring customer comfort and security during transactions.
3. Strengthening operational security at the endpoint level (PCs/laptops) by implementing Active Directory technology on all PCs and laptops that have been onboarded to Active Directory, as one of the recommendations related to Information Security Enhancement.
4. Strengthened information security at the endpoint level (PCs/Laptops) through the implementation of Endpoint Detection and Response (EDR) across all employee PCs and laptops at Bank NTT's operational offices. A total of 1,200 endpoints (PCs/Laptops) are now protected by antivirus integrated with Endpoint Detection and Response (EDR) as part of the Bank's information security enhancement initiatives.
5. Conducting regular penetration testing and vulnerability assessments, including penetration testing on the T24 web application covering the CS Teller and Business Internet Banking (IBB) modules, encompassing front-end, back-end, internal, and external network environments, so that the bank can identify security weaknesses and vulnerabilities that could potentially be exploited as attack vectors by malicious actors.

6. Melakukan penetration testing dan vulnerability assessment secara berkala dimana dilakukan penetration testing pada Internet Banking Bisnis (IBB) dengan ruang fronted, backend, jaringan internal dan eksternal sehingga bank dapat mengukur kelemahan dan celah keamanan yang mungkin dapat digunakan sebagai serangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan agar nasabah dan pengguna layanan dapat beertransik dengan aman dan nyaman.
7. Melakukan penetration testing dan vulnerability assessment secara berkala, dimana dilakukan penetration testing pada infrastruktur network dan middleware igate channel dengan ruang fronted, backend, jaringan internal dan eksternal pada perangkat server dan jaringan komunikasi, sehingga bank dapat mengukur kelemahan dan celah keamanan yang mungkin dapat digunakan sebagai serangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di level infrastruktur middleware Igate Channel.
8. Melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan standar untuk Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi sehingga terjadi keselarasan dalam menjalankan aspek operasional dan bisnis serta penguatan keamanan informasi serta penguatan keamanan informasi di Bank NTT
9. Melakukan surveillance Audit ISO/IEC 27001 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur secara berkala untuk mendukung sistem manajemen keamanan informasi sehingga bank memiliki rekomendasi terkait Keamanan Informasi
10. Melakukan Simulasi Phising ke seluruh pegawai Bank NTT yang bertujuan meningkatkan dan melatih awareness dan kesadaran serta peran aktif pegawai Bank NTT dalam menhadapi serta merespon kejahatan siber melalui phising yang sedang tren saat ini yang dapat merugikan nasabah dan juga reputasi Bank NTT
11. Setelah diperoleh hasil simulasi phising maka selanjutnya dilakukan security awareness dengan tema "mengenal dan mencegah phising' kepada pegawai yang terkena serangan maupun yang tidak terkena phising dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya keamanan informasi bagi seluruh pegawai Bank NTT dimana tema "mengenal dan mencegah phising" sebagai bentuk mitigasi terhadap pencurian data di lingkup Bank NTT
12. Melakukan Table Top Exercises bagi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang bertujuan untuk melatih, meningkatkan dan memberikan pengetahuan apabila terjadi insiden siber maka para anggota

6. Conducting penetration testing and vulnerability assessments on the network infrastructure and Igate Channel middleware, covering the frontend, backend, internal, and external networks on server devices and communication networks to identify weaknesses and potential security vulnerabilities at the Igate Channel middleware infrastructure level.
7. Conducted periodic penetration testing and vulnerability assessments, including penetration testing on network infrastructure and the iGate channel middleware, covering front-end, back-end, internal and external networks, as well as servers and communication network devices. These activities enable the Bank to identify and measure potential vulnerabilities and security gaps that could be exploited by unauthorized parties at the iGate channel middleware infrastructure level.
8. Conducting periodic ISO/IEC 27001 surveillance audits at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur to support the information security management system, ensuring the bank receives recommendations regarding information security.
9. Conducting phishing simulations for all Bank NTT employees to enhance their awareness and active role in addressing and responding to cybercrime through phishing.
10. Conducted phishing simulation exercises for all Bank NTT employees aimed at enhancing awareness, strengthening vigilance, and encouraging active employee participation in identifying and responding to increasingly prevalent phishing-related cyber threats, which may potentially harm customers and the Bank's reputation.
11. Following the phishing simulation results, the Bank conducted a security awareness program themed 'Recognizing and Preventing Phishing' for all employees, both those who were affected and those who were not. This initiative aims to enhance employees' understanding and awareness of the importance of information security, serving as a mitigation measure against potential data breaches within Bank NTT.
12. Conducting Proof of Concept (Cyber Threat Intelligence) so that the bank can understand and identify data that has been exposed on the dark web, as well as conducting cyber patrols to mitigate

tim TTIS memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal

13. Melakukan Proof of Concept *(Cyber Threat Intelligence)* sehingga bank dapat memahami dan mengetahu data-data yang telah terekspos di darkweb serta melakukan patrol siber untuk memitigasi adanya reputasi buruk di dalam social media engineering.
14. Mendukung semua layanan produk digitalisasi bank, baik produk dana dan produk kredit yang diperuntukkan bagi nasabah
15. Melakukan diklat bidang security Teknologi Informasi dalam proses sistem manajemen keamanan informasi dan menambah referensi terkait mitigasi terhadap pengelolaan aset-aset security yang dikelola oleh Bank NTT
16. Melakukan workshop terkait optimalisasi Endpoint Detection Response (EDR), Security Operation Center (SCO) dan Next Generation Firewall di Bank NTT yang bertujuan meningkatkan kemampuan dasar personil security TI dalam pengelolaan operasional Endpoint Detection Response, Security Operation Center dan Firewall di lingkungan Bank NTT.
17. Melaksanakan Training in House terkait Implementasi dan Internal Audit untuk Certificate ISO 27001:2022 untuk Keamanan Informasi dan Perlindungan data Bank NTT dengan tujuan memberikan pengetahuan, wawasan, keahlian serta kecakapan kepada seluruh pegawai Bank NTT
18. Melakukan diklat bidang operasional Teknologi Informasi yaitu Diklat Operasional Channel dan Core Banking dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan channel dan core banking untuk operasional Teknologi Informasi

Untuk memitigasi risiko maka manajemen melalui Divisi Manajemen Risiko secara periodik juga melakukan self assessment terhadap Information Technology Risk Rating Bank NTT dengan ruang lingkup penilaian mencakup Arsitektur TI, Keamanan TI, Manajemen Data,Pengembangan Perangkat Lunak, Pengelolaan Proyek TI, Kesiapan Krisis dan Pemulihan Bencana, Ketahanan dan Keamanan Siber dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sementara itu terhadap digitalisasi yang dilakukan oleh Bank NTT, Divisi Manajemen Risiko secara berkala juga melakukan self assessment terhadap Tingkat Maturitas Digital Bank dengan ruang lingkup meliputi aspek Tata Kelola, Arsitektur, Manajemen Risiko, Ketahanan dan Keamanan Siber, Teknologi, Data, Kolaborasi dan Pelindungan Konsumen.

negative reputational risks arising from social engineering attacks.

13. Conducted a Proof of Concept (Cyber Threat Intelligence) to enable the Bank to identify and understand data exposures on the dark web, as well as to perform cyber patrol activities to mitigate potential reputational risks arising from social engineering on social media.
14. Supported all digital banking product services, including both funding and lending products, provided to customers.
15. Conducted training in the field of Information Technology security, focusing on the Information Security Management System (ISMS), to enhance knowledge and broaden references related to mitigation in managing the Bank's security assets.
16. Conducted workshops on the optimization of Endpoint Detection and Response (EDR), Security Operations Center (SOC), and Next Generation Firewall at Bank NTT, aimed at enhancing the fundamental capabilities of IT security personnel in managing the operations of EDR, SOC, and firewall systems within the Bank's environment.
17. Conducted in-house training on the implementation and internal audit of ISO 27001:2022 for Information Security and Data Protection at Bank NTT, aimed at enhancing employees' knowledge, insight, expertise, and competencies.
18. Conducted training programs in the field of Information Technology operations, including Channel Operations and Core Banking, aimed at improving the knowledge of employees involved in managing channels and core banking systems for IT operations.

To mitigate risks, Management, through the Risk Management Division, periodically conducts self-assessments of Bank NTT's Information Technology Risk Rating. The scope of assessment includes IT Architecture, IT Security, Data Management, Software Development, IT Project Management, Crisis Readiness and Disaster Recovery, Cyber Resilience and Security, and Human Resource Competency.

In relation to the Bank's digitalization initiatives, the Risk Management Division also regularly conducts self-assessments of the Bank's Digital Maturity Level, covering aspects such as Governance, Architecture, Risk Management, Cyber Resilience and Security, Technology, Data, Collaboration, and Consumer Protection.

Sebagai upaya mitigasi terhadap bencana alam maupun kejadian-kejadian yang berada diluar kendali maka manajemen telah menggunakan Data Center Tier 4 dan DRC Tier 3 dengan teknologi mirroring di mana apabila terjadi masalah pada Data Center (DC) maka otomatis transaksi dialihkan ke Disaster Recovery Center (DRC), dikarenakan kondisi data di DC dan DRC sama (mirroring).

As part of mitigation efforts against natural disasters and other unforeseen events, Management has implemented a Tier 4 Data Center and a Tier 3 Disaster Recovery Center (DRC) with mirroring technology. In the event of a disruption at the Data Center (DC), transactions are automatically redirected to the DRC, as the data at both the DC and DRC are synchronized through mirroring.

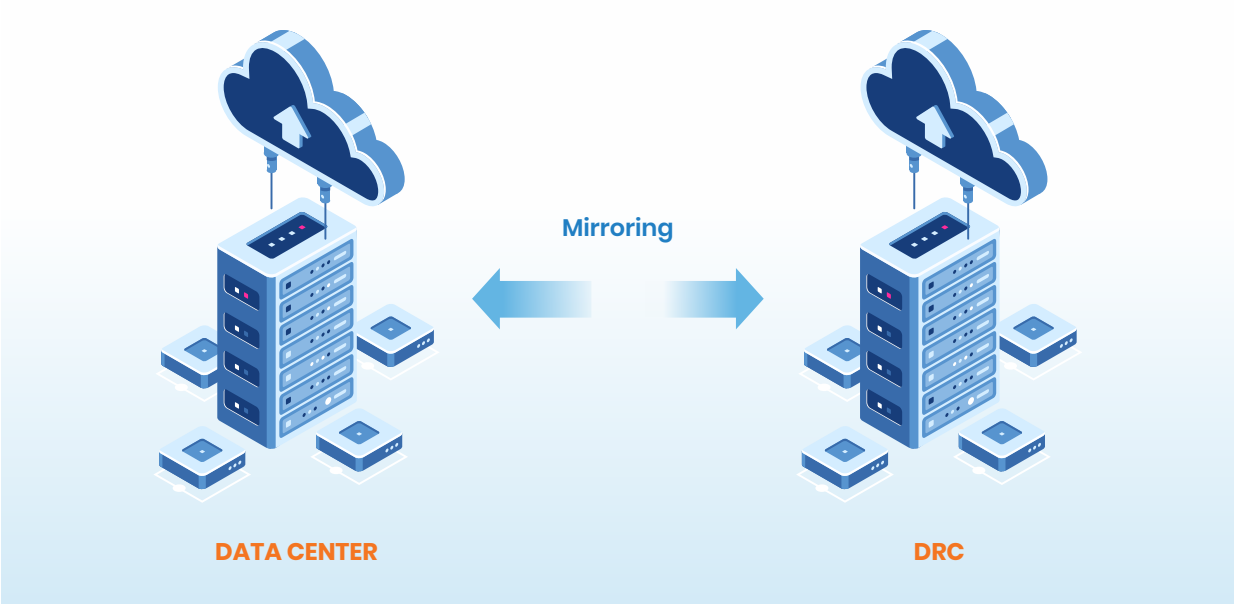

PROGRAM KERJA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI BANK NTT TAHUN 2025

WORK PROGRAM OF THE INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION OF BANK NTT FOR 2025

	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	STRATEGIC OBJECTIVES / TARGETS
1	**Peningkatan dan Penguatan Struktur TI** Improvement and Strengthening of IT Infrastructure		
a.	Revitalisasi perangkat pendukung TI Revitalization of IT Support Equipment	Review dan Peningkatan spesifikasi Hardware/Software Pendukung Operasional	Review and Upgrade of Hardware/ Software Specifications Operational Support
b.	Maintenance Proswitching	Pengelolaan proswitching system	Management of the Proswitching System
c.	Pengadaaan SD-WAN SD-WAN Procurement	Meningkatkan dan memperkuat performa network dan manajemen jaringan high availabilty (HA)	Improving and strengthening network performance and high availabil-ity (HA) network management
d.	Pengadaan NDR (Network Detection Response) NDR (Network Detection and Response) Procurement	Meningkatkan pro-aktif security network untuk visibility dan analisis forensik terhadap serangan	Enhancing proactive network security for visibility and forensic analy-sis of attacks

	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	STRATEGIC OBJECTIVES / TARGETS
e.	Pengadaan Network Access Control (NAC) Network Access Control (NAC) Deployment	Penyediaan Kontrol Akses Jaringan untuk seluruh perangkat/endpoint bank	Providing Network Access Control for all bank devices/endpoints
f.	Active Directory Manager	Pengelolaan active directory bank	Management of the bank's Active Directory
g.	Patch Management	Memperkuat security IT dan pencegahan terhadap serangan cyber (server) termasuk aplikasi	Strengthening IT security and prevention against cyber attacks (servers) including applications
h.	Jasa Konsultan Teknis Security IT IT Security Technical Consulting Services	Pemenuhan POJK 11/POJK.03/22 penerapan TI oleh Bank Umum terkait Keamanan Siber untuk Threat Intelligance dan Penetration Testing	Compliance with POJK 11/POJK.03/22 on IT implementation by Commercial Banks regarding Cybersecurity for Threat Intelligence and Penetration Testing
i.	Jasa Konsultan Sertifikasi ISO 27001 & 27701 ISO 27001 & 27701 Certification Consulting Services	Pemenuhan POJK 11/POJK.03/22 penerapan TI oleh Bank Umum terkait Implementasi Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Pembayaran serta Perlindungan Data Nasabah	Compliance with POJK 11/POJK.03/22 on the Application of Infor-mation Technology by Commercial Banks Regarding the Implementa-tion of Information Security Management and Payment Systems, as well as Customer Data Protection
j.	Pengadaan Mesin ATM 5 (lima) unit Procurement of 5 (five) ATM machines	Meningkatkan layanan digital kepada nasabah	Improving digital services for customers
k.	Aplikasi Tarik Jurnal ATM / CRM ATM/CRM Journal Retrieval Application	Otomatisasi penarikan jurnal untuk data - data transaksi dari ATM	Automation of journal retrieval for transaction data from ATMs
l.	Mobile Device Management Mobile Device Management	Untuk mengamankan perangkat mobile (handphone/tablet) Bank NTT	To secure Bank NTT's mobile devices (phones/tablets)
m.	Penerapan 2 Factor Authentication (2FA) Implementation of 2-Factor Authentication (2FA)	Untuk pengamanan aplikasi / transaksi	For application/transaction security
n.	Penyimpanan database core banking Core banking database storage	Agar bank mempunyai backup database sendiri	So that the bank has its own database backup
o	Rencana review core banking dan surrounding Plan for a review of the core banking system and surrounding systems	Untuk melakukan review secara berkala pada core banking terhadap operasional bank	To conduct periodic reviews of the core banking system regarding bank operations
p.	Jasa Konsultan Teknis Security IT IT Security Technical Consulting Services	Pemenuhan POJK 11/POJK.03/22 penerapan TI oleh Bank Umum terkait Keamanan Siber untuk Threat Intelligence dan Penetration Testing	Compliance with POJK 11/POJK.03/22 on IT implementation by Com-mercial Banks regarding Cybersecurity for Threat Intelligence and Pen-etration Testing
q.	Jasa Konsultan Sertifikasi ISO 27001 & 27701 ISO 27001 & 27701 Certification Consulting Services	Pemenuhan POJK 11/POJK.03/22 penerapan TI oleh Bank Umum terkait Implementasi Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Pembayaran serta Perlindungan Data Nasabah	Compliance with POJK 11/POJK.03/22 on IT implementation by Com-mercial Banks regarding the Implementation of Information Security Management and Payment Systems as well as Customer Data Protec-tion
r.	Pengadaan Mesin ATM 5 unit Procurement of 5 ATM Machines	Meningkatkan Layanan Digital kepada nasabah	Enhancing Digital Services for Customers

	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	STRATEGIC OBJECTIVES / TARGETS
s.	Aplikasi Tarik Jurnal ATM / CRM ATM/CRM Journal Retrieval Application	Otomatisasi penarikan jurnal untuk data - data transaksi dari ATM	Automation of journal retrieval for transaction data from ATMs
t.	Mobile Device Management	Untuk mengamankan perangkat mobile (handphone/tablet) bank NTT	To secure NTT Bank's mobile devices (phones/tablets)
u.	Penerapan 2 Factor Authentication (2FA) Implementation of Two-Factor Authentication (2FA)	Untuk pengamanan aplikasi / transaksi	For application/transaction security
v.	Penyimpanan database corebanking Core banking database storage	Agar bank memiliki backup database sendiri	So that the bank has its own database backup
w.	Rencana review core banking dan surrounding Plan for a review of the core banking system and related systems	Untuk melakukan review secara berkala pada core banking terhadap operasional bank	To conduct periodic reviews of the core banking system regarding bank operations
2	**Peningkatan dan Penguatan Struktur TI** **Development of IT Policies**		
	Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Pengadaan Barang/Jasa TI Procurement of Consulting Services to Assist in the Procurement of IT Goods and Services	Pendampingan konsultan teknis untuk pengadaan barang/jasa yang membutuhkan keahlian khusus sesuai PBJ Bank NTT	Technical consultant support for the procurement of goods and services requiring specialized expertise in accordance with Bank NTT's Procurement Regulations
3	**Peningkatan Kompentensi SDM Bidang TI** **Enhancement of IT Human Resource Competencies**		
	Pendidikan, Diklat serta Sertifikasi bidang TI Education, training, and certification in the IT field	Meningkatkan kualitas SDM pejabat dan staf untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang TI	Improving the quality of human resources among officials and staff to support the implementation of IT-related tasks

Sistem teknologi informasi yang dimiliki Bank NTT memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung aktivitas bisnis dan operasional serta kelancaran layanan kanal-kanal digital yang dioperasikan.

The information technology systems owned by Bank NTT play a significant role in supporting business and operational activities, as well as ensuring the smooth delivery of services across the Bank's digital channels."

Ruang lingkup Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Bank NTT 2025 -2030 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang dimiliki.
2. Aplikasi dan Sistem Perbankan.
3. Manajemen Data dan Analisis.
4. Keamanan dan Manajenen Risiko TI.
5. Tata Kelola dan Kepatuhan TI.
6. Pengembangan SDM dan Kompetensi TI.
7. Inovasi Teknologi.

Scope of the Bank NTT Information Technology Strategic Plan (RSTI) 2025-2030:

1. Development of existing Information Technology (IT) infrastructure.
2. Banking Applications and Systems.
3. Data Management and Analysis.
4. IT Security and Risk Management.
5. IT Governance and Compliance.
6. Human Resources Development and IT Competencies.
7. Technological Innovation.

Menghadapi tantangan zaman seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam sistem keuangan dan bisnis perbankan maka manajemen telah merumuskan cetak biru Transformasi Digital Bank NTT 2023-2027 untuk dapat mengembangkan dan menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

In response to digitalization in the financial system and banking business, management has formulated the Bank NTT Digital Transformation Blueprint 2023-2027 to develop and deliver digital-oriented products and services to meet the needs of the public and local governments.

Untuk mencapai transformasi digital yang dilakukan tersebut diperlukan inisiatif-inisiatif dalam empat pilar transformasi digital, yaitu: *Customer Experience, Operational Excellence, New Business Model,* dan *Human Resources and Leadership*.

To achieve this digital transformation, initiatives are required that have been established within the four pillars of Bank NTT's digital transformation: Customer Experience, Operational Excellence, New Business Model, and Human Resources and Leadership.

Blue Print Transformasi Digital Bank NTT
Bank NTT Digital Transformation Blue Print

Dalam menyukseskan agenda Transformasi Digital tersebut manajemen juga telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee) melalui Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 061 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Hal ini dipandang sangat fundamental mengingat keberhasilan transformasi digital akan sangat bergantung pada kehandalan sistem Teknologi Informasi yang dimiliki Bank NTT.

To ensure the successful implementation of the Digital Transformation agenda, Management has established an Information Technology Steering Committee through the Board of Directors Decree of Bank NTT No. 061 of 2024 concerning the Establishment of the Information Technology Steering Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. This initiative is considered fundamental, given that the success of digital transformation is highly dependent on the reliability of the Bank's information technology systems.

Keberadaan Komite Pengarah Teknologi Informasi diharapkan menjadi media dalam memberikan masukan dan evaluasi terkait rencana, pengembangan, dan implementasi sistem Teknologi Informasi yang dimiliki.

The establishment of the Information Technology Steering Committee is expected to serve as a platform for providing input and evaluation related to the planning, development, and implementation of the Bank's information technology systems.

ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI BANK NTT TAHUN 2025

Pengembangan, pembenahan dan pengkinian sistem teknologi informasi Bank NTT terus dilakukan baik terhadap perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) maupun perangkat jaringan (*network*) beserta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bank NTT.

INFORMATION TECHNOLOGY ARCHITECTURE OF BANK NTT – 2025

The development, enhancement, and continuous upgrading of Bank NTT's information technology systems are carried out across hardware, software, and network infrastructure, along with ongoing improvements in the competency of the Bank's human resources.

Topologi Jaringan Data Center

Data Center Network Topology

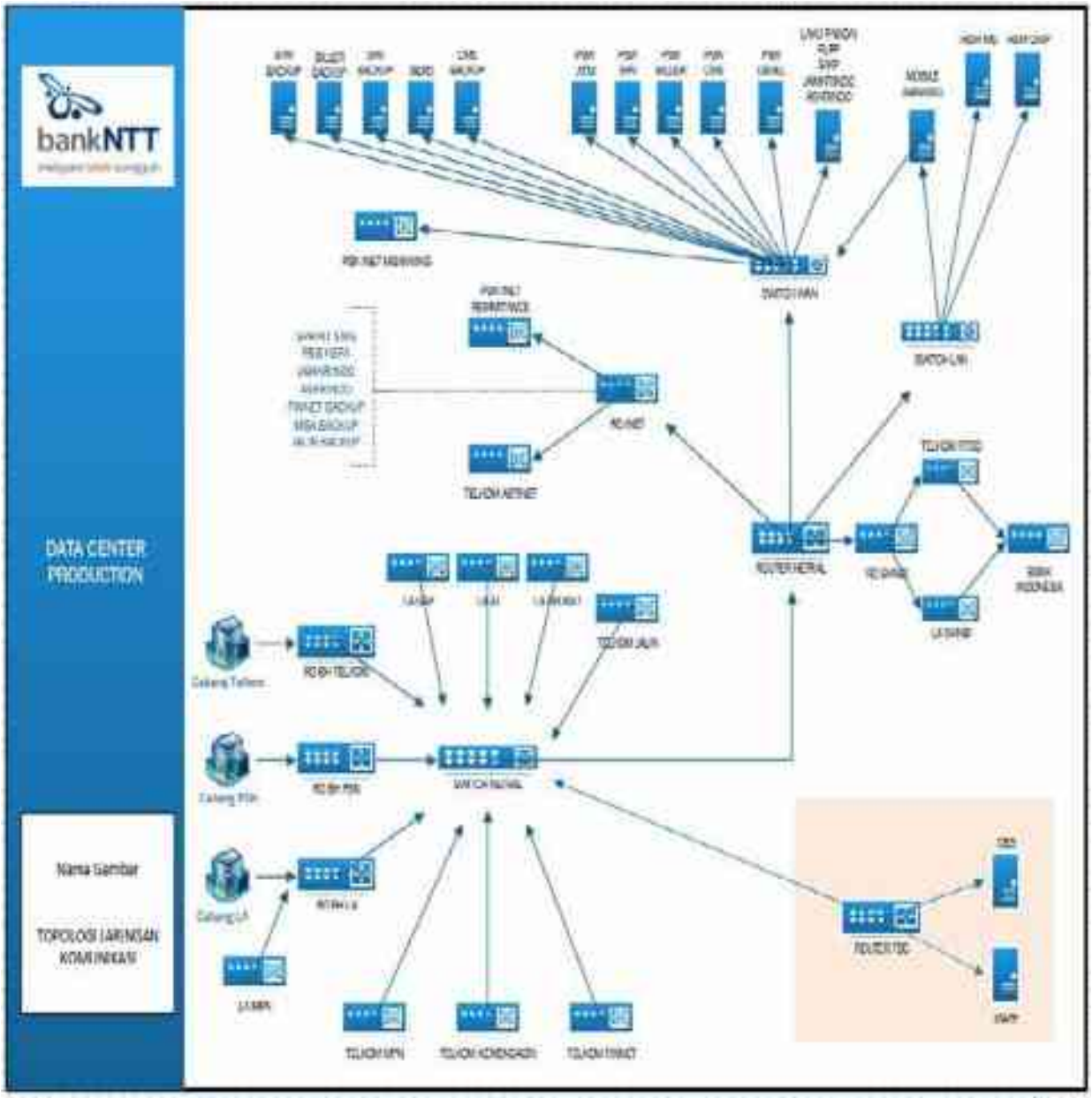

Topologi Jaringan Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center Network Topology

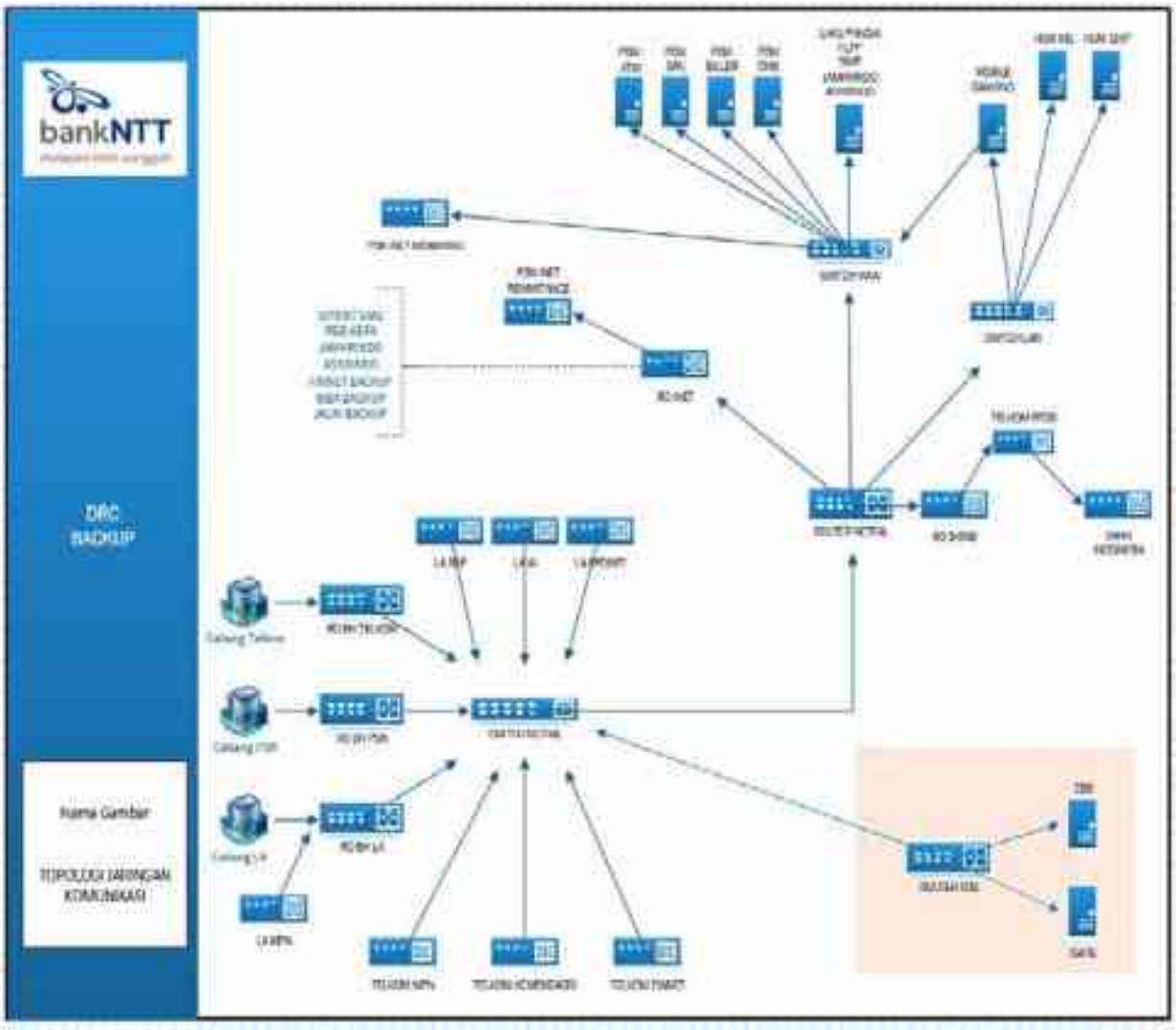

Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi Bank NTT Tahun 2025

Menunjuk Surat Keputusan Direksi Nomor 033 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maka berikut adalah Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi Bank NTT :

Organizational Structure of Bank NTT's Information Technology Division for 2025

Pursuant to Board of Directors Decision No. 033 of 2023 regarding the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, the following is the Organizational Structure of Bank NTT's Information Technology Division:

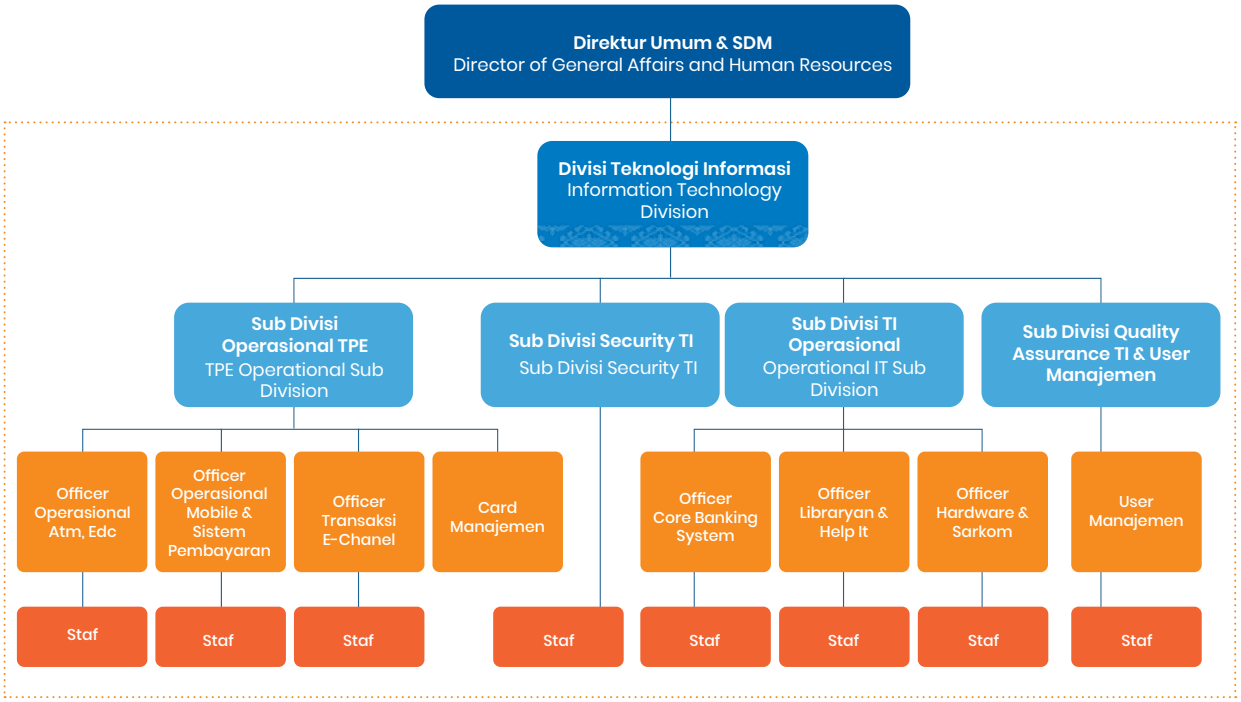

Sampai dengan tahun 2025 untuk menjamin kehandalan sistem Teknologi Informasi Bank NTT, manajemen telah menerbitkan sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi sebagai berikut :

- SOP terkait Jaringan Komunikasi
  - Kebijakan Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Perancangan Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pengelolaan Perubahan Konfigurasi Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pengamanan Fisik Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pengamanan Fisik Core Router dan Switch
  - Prosedur Pengamanan Fisik Distribution Switch-Hub dan Access Point
  - Prosedur Pengamanan Fisik Kabel Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pengamanan Logika Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pengamanan Logika Router dan Switch
  - Prosedur Pengamanan Logika Layanan Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pemantauan Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Pemeliharaan Jaringan Komunikasi
  - Prosedur Penanganan Insiden dan-atau Masalah Jaringan Komunikasi

Through 2025, to ensure the reliability of Bank NTT's Information Technology systems, management has issued a number of Standard Operating Procedures (SOPs) established via Board of Directors Decisions as follows:

- SOPs related to Communication Networks
  - Communication Network Policy
  - Communication Network Design Procedures
  - Procedures for Managing Communication Network Configuration Changes
  - Communication Network Physical Security Procedures
  - Procedures for the Physical Security of Core Routers and Switches
  - Physical Security Procedures for Distribution Switches, Hubs, and Access Points
  - Physical Security Procedures for Communication Network Cables
  - Communication Network Logical Security Procedures
  - Logical Security Procedures for Routers and Switches
  - Logical Security Procedures for Communication Network Services
  - Communication Network Monitoring Procedures
  - Communication Network Maintenance Procedures
  - Procedures for Handling Communication Network Incidents and/or Problems

- Prosedur Pengukuran Kinerja Jaringan Komunikasi
- Prosedur Perencanaan Kapasitas Jaringan Komunikasi
- Standar Jaringan Komunikasi

- SOP terkait Operasional Teknologi Informasi (TI)
  - Kebijakan Operasional TI
  - Prosedur Pemantauan DC-DRC
  - Prosedur Perencanaan Kapasitas Perangkat TI
  - Prosedur Pengelolaan Perangkat Keras TI
  - Prosedur Pengelolaan Perangkat Lunak TI
  - Prosedur Pemeliharaan Berkala Infrastruktur DC-DRC
  - Prosedur Pengendalian Akses ke DC-DRC
  - Prosedur Backup dan Restore Data
  - Prosedur Pengelolaan Perubahan Perangkat TI
  - Prosedur Penanganan Insiden dan-atau Masalah TI
  - Prosedur Database dan Data Warehouse Cleansing
  - Prosedur Pengelolaan Pustaka TI
  - Prosedur Pengelolaan Hubungan dengan Penyedia Jasa TI
  - Standar Operasional TI

- SOP terkait Pengamanan Informasi
  - Kebijakan Pengamanan Informasi
  - Prosedur Pengelolaan Perangkat Keras TI
  - Prosedur Pengelolaan Perangkat Lunak TI
  - Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik
  - Prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - Prosedur Pengamanan Fisik dan Lingkungan
  - Prosedur Pengamanan Fisik DC-DRC
  - Prosedur Pengamanan Lingkungan DC-DRC
  - Prosedur Pengamanan Fisik Ruang ATM-CDM
  - Prosedur Pengamanan Lingkungan Ruang ATM-CDM
  - Prosedur Pemantauan DC-DRC
  - Prosedur Pengamanan Logika
  - Prosedur Pengamanan Logika Sistem Aplikasi
  - Prosedur Pengamanan Logika Sistem Database
  - Prosedur Pengamanan Logika terhadap Malware
  - Prosedur Pengamanan Logika MD-PS
  - Prosedur Pengelolaan User
  - Prosedur Penanganan Insiden dan-atau Masalah Keamanan TI
  - Prosedur Reviu Hak Akses
  - Prosedur Reviu Audit Trail

- Communication Network Performance Measurement Procedures
- Communication Network Capacity Planning Procedures
- Communication Network Standards

- SOPs Related to Information Technology (IT) Operations
  - IT Operational Policies
  - DC-DRC Monitoring Procedures
  - IT Equipment Capacity Planning Procedures
  - IT Hardware Management Procedures
  - IT Software Management Procedures
  - DC-DRC Infrastructure Periodic Maintenance Procedures
  - DC-DRC Access Control Procedure
  - Data Backup and Restore Procedures
  - IT Equipment Change Management Procedures
  - Procedures for Handling IT Incidents and/or Issues
  - Database and Data Warehouse Cleansing Procedures
  - IT Library Management Procedures
  - Procedures for Managing Relationships with IT Service Providers
  - IT Operational Standards

- SOPs Related to Information Security
  - Information Security Policy
  - IT Hardware Management Procedures
  - IT Software Management Procedures
  - Procedures for Managing Electronic Data and Information
  - Human Resources Management Procedures
  - Physical and Environmental Security Procedures
  - DC-DRC Physical Security Procedures
  - DC-DRC Environmental Security Procedures
  - Physical Security Procedures for ATM-CDM Rooms
  - ATM-CDM Room Environmental Security Procedures
  - DC-DRC Monitoring Procedures
  - Logical Security Procedures
  - Application System Logic Security Procedures
  - Database System Logic Security Procedures
  - Logic Security Procedures Against Malware
  - MD-PS Logic Security Procedures
  - User Management Procedures
  - Procedures for Handling IT Security Incidents and/or Issues
  - Access Rights Review Procedures
  - Audit Trail Review Procedure

- Prosedur Penetration Testing
- Standar Pengamanan Informasi

- SOP terkait Pengembangan dan Pengadaan TI
  - Kebijakan Pengembangan dan Pengadaan TI
  - Prosedur Perencanaan Pengembangan Sistem Aplikasi
  - Prosedur Perencanaan Pengadaan Perangkat TI
  - Prosedur Manajemen Proyek TI
  - Prosedur Pendefinisian Kebutuhan Sistem Aplikasi
  - Prosedur Perancangan Sistem Aplikasi
  - Prosedur Pemrograman Sistem Aplikasi
  - Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Aplikasi
  - Prosedur Penerapan Sistem Aplikasi
  - Prosedur Kaji Ulang Pascapenerapan Sistem Aplikasi
  - Prosedur Pemeliharaan Sistem Aplikasi
  - Prosedur Pendefinisian Kebutuhan Perangkat TI
  - Prosedur Pemeriksaan Perangkat TI Baru
  - Standar Pengembangan dan Pengadaan TI

- SOP terkait Tata Kelola dan Manajemen TI
  - Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen TI
  - Prosedur Penyusunan RSTI
  - Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Tahunan TI
  - Prosedur Manajemen Risiko TI
  - Prosedur Pengukuran dan Pelaporan Kinerja TI
  - Standar Tata Kelola dan Manajemen TI

Per 31 Desember 2025 jumlah pegawai pada Divisi Teknologi Informasi Bank NTT adalah sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Penetration Testing Procedures
- Information Security Standards

- SOPs Related to IT Development and Procurement
  - IT Development and Procurement Policies
  - Application System Development Planning Procedures
  - IT Equipment Procurement Planning Procedures
  - IT Project Management Procedures
  - Application System Requirements Definition Procedure
  - Application System Design Procedures
  - Application System Programming Procedures
  - Application System Inspection and Testing Procedures
  - Application System Implementation Procedures
  - Post-Implementation Review Procedures for Application Systems
  - Application System Maintenance Procedures
  - Procedures for Defining IT Equipment Requirements
  - Procedures for Inspecting New IT Equipment
  - IT Development and Procurement Standards

- SOPs Related to IT Governance and Management
  - IT Governance and Management Policies
  - Procedures for Preparing the IT Work Plan
  - Procedures for Preparing the Annual IT Work Plan
  - IT Risk Management Procedures
  - Procedures for IT Performance Measurement and Reporting
  - IT Governance and Management Standards

As of December 31, 2025, the number of employees in the Information Technology Division of Bank NTT was 33, with the following details:

Analisa & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN REGIONAL

National and Regional Economy

Sepanjang tahun 2025 kondisi perekonomian nasional masih tetap terjaga meskipun ketidakstabilan ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara lain. Hal ini semakin menciptakan ketidakpastian seiring dengan belum berakhirnya perang antara Ukraina dan Rusia serta konflik antara Israel dengan sejumlah negara di Timur Tengah.

Throughout 2025, national economic conditions remained relatively stable despite global economic volatility triggered by the trade tensions between the United States and China, as well as tariff policies imposed by the United States on other countries. This uncertainty was further heightened by the ongoing war between Ukraine and Russia and the conflicts involving Israel and several countries in the Middle East.

Kuatnya sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara pemerintah dan Bank Indonesia mampu mendukung kinerja perekonomian Indonesia tetap tangguh dan berdaya tahan. Kebijakan fiskal pemerintah yang berhati-hati dengan defisit dibawah 3% PDB ditempuh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal untuk mendorong investasi dan program perlindungan sosial agar dapat menopang konsumsi masyarakat. Sedangkan

Strong synergy in the national economic policy mix between the Government and Bank Indonesia has supported Indonesia's economic performance, enabling it to remain resilient and robust. The Government's prudent fiscal policy, with a deficit maintained below 3% of GDP, has been directed toward supporting economic growth through capital expenditure to stimulate investment and social protection programs to sustain household consumption. Meanwhile, Bank Indonesia's

bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh secara optimal untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan melalui kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah serta kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit /pembiayaan perbankan dan kebijakan sistem pembayaran terhadap digitalisasi ekonomi-keuangan nasional yang inklusif dan efisien dapat berjalan baik.

Sementara itu perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur pada penutupan tahun 2025 tumbuh 5.14% sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5.11 %. Pertumbuhan ekonomi provinsi NTT tetap positif seiring dengan meningkatnya realisasi investasi sektor swasta pada sektor hotel, restoran dan kafe. Kinerja ekonomi NTT juga masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang baik serta pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi serta tetap kuatnya pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dalam menopang kinerja ekonomi NTT.

Peningkatan kinerja perekonomian dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha sepanjang triwulan IV tahun 2025 merupakan pendukung utama peningkatan pertumbuhan ekonomi NTT pada keseluruhan tahun 2025 sedangkan tingkat inlasi ekonomi provinsi NTT pada Triwulan IV tahun 2025 tercatat sebesar 2.39% yoy namun masih dalam berada dalam target sasaran inflasi nasional 2.5 ± 1 % serta berada dibawah capaian inflasi nasional yakni 2.92%.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam bisnis bank mengingat terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dihadapi bank. Agar terhindar dari kerugian baik secara materiil maupun immateriil maka bank perlu menetapkan strategi dalam mengelola risiko-risiko tersebut sehingga tidak berdampak signifikan pada terganggunya ketahanan modal dan rusaknya reputasi bank yang dapat berujung pada kemungkinan terburuk yaitu kebangkrutan.

policy mix has been implemented optimally to maintain stability and promote growth, through monetary policy aimed at controlling inflation and stabilizing the rupiah exchange rate, macroprudential policy to encourage banking credit/financing, and payment system policies to advance an inclusive and efficient digital financial economy.

Meanwhile, the economy of East Nusa Tenggara Province recorded growth of 5.34% at the end of 2025, in line with national economic growth of 5.39%. This growth was supported by increased realization of private sector investment, particularly in the hotel, restaurant, and café sectors. The region's economic performance was also underpinned by strong household consumption and government spending, as well as growth in key sectors such as agriculture, forestry, fisheries, and construction, along with continued strength in the wholesale and retail trade sectors.

The improvement in economic performance from both the expenditure and business sector perspectives during the fourth quarter of 2025 was a key driver of overall economic growth in East Nusa Tenggara for the full year. Meanwhile, the province's inflation rate in the fourth quarter of 2025 was recorded at 2.39% year-on-year, remaining within the national inflation target range of 2.5 ± 1% and below the national inflation rate of 2.92%.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Risk management is a critical aspect of banking operations, given that banks face eight distinct risks. To avoid both material and immaterial losses, banks must establish strategies to manage these risks so that they do not significantly undermine capital adequacy or damage the bank's reputation—which could lead to the worst-case scenario: bankruptcy.

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif maka bank perlu menyiapkan langkah-langkah strategis secara dini melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sebelum risiko tersebut terjadi mengingat bank merupakan lembaga jasa keuangan vital berdampak sistemik yang dapat menyebabkan tidak hanya instabilitas sistem keuangan daerah namun juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Through the implementation of effective risk management, banks can prepare strategic measures early on through identification, measurement, monitoring, and control before these risks materialize. This is a crucial point, given that banks are vital financial institutions with systemic impact that can cause not only instability in the regional financial system but also disrupt the stability of the national financial system.

Untuk memastikan bisnis yang dijalankan oleh bank tetap dilaksanakan secara *prudent* dan berada di jalur yang tepat sesuai dengan regulasi internal dan eksternal maka kebijakan yang diambil oleh manajemen wajib memperoleh kajian risiko.

To ensure that the bank's business operations are conducted prudently and remain on the right track in accordance with internal and external regulations, the policies established by management for all of the bank's business activities must undergo a risk assessment.

Bentuk penerapan manajemen risiko yang ditempuh oleh manajemen pada tahun 2025 adalah melalui penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, melakukan *self assesment* terhadap Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan bank secara periodik, menempatkan dan melakukan koordinasi intensif dengan petugas *Risk Control* (RC) pada setiap kantor cabang dalam mengawasi seluruh aspek bisnis dan operasional, melakukan *stress test* terhadap risiko yang kemungkinan terjadi melalui pilihan-pilihan skenario dari kemungkinan terbaik hingga kemungkinan terburuk dan korelasinya terhadap ketahanan permodalan, melakukan pemantauan berbasis digital melalui apliasi *Fraud Detection System* (FDS) untuk memonitor terjadinya fraud, melakukan pemantauan terhadap penggunaan aplikasi *Risk Appetite Statement* (RAS), memberikan tinjauan berbasis manajemen risiko terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan kesesuaian dengan *Corporate Plan*, internalisasi budaya sadar risiko kepada seluruh jenjang jabatan dan unit kerja, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat berjalan dengan baik di seluruh lini dan unit kerja bank serta melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko terhadap implementasi manajemen risiko.

The forms of risk management implemented by management in 2025 include establishing Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits through a Board of Directors' Resolution; conducting periodic self-assessments of the bank's Risk Profile and Financial Health; and deploying and coordinating closely with Risk Control (RC) officers at each branch office to oversee all business and operational aspects. Conducting stress tests on potential risks using various scenarios ranging from best-case to worst-case scenarios and their correlation with capital adequacy. Implementing digital monitoring through the Fraud Detection System (FDS) application to detect fraud. Monitoring the use of the Risk Appetite Statement (RAS) application. Conducting reviews of the implementation of the Bank's Business Plan (RBB) and its alignment with the Corporate Plan. Instilling a risk-aware culture across all job levels and business units. Ensuring the effective implementation of good corporate governance principles across all lines and business units of the bank, and maintaining effective communication and coordination with the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee regarding risk management implementation.

Seiring dengan program Transformasi Digital yang sedang dilaksanakan maka manajemen juga secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas sistem Teknologi Informasi dalam mendukung kelancaran operasional layanan digital Bank NTT melalui *self assessment* terhadap Tingkat Maturitas Digital bank.

In line with the ongoing Digital Transformation program, management also regularly monitors the development of the quality of the Information Technology (IT) system to support the smooth operation of Bank NTT's digital services through self-assessments of Bank NTT's Digital Maturity Level and self-assessments of risk management practices and the reliability of the IT infrastructure.

Agar mitigasi risiko terhadap seluruh aktivitas bisnis dan operasional Bank NTT dapat berjalan lancar maka manajemen telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang bertugas untuk membantu Direksi dalam membahas permasalahan yang dihadapi dalam sistem manajemen risiko bank, menjadi wadah komunikasi dalam pengambilan kebijakan manajemen risiko, melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap potensi maupun efektivitas penerapan sistem manajemen risiko Bank NTT. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Manajemen Risiko diwajibkan untuk selalu bertindak independen dan menghindari *conflict of interest*.

To ensure that risk mitigation for all of Bank NTT's business and operational activities runs smoothly, management has issued a Board of Directors' Decision regarding the Formation of the Risk Management Committee, which is tasked with assisting the Board of Directors in addressing issues encountered within the bank's risk management system; serving as a forum for communication in the formulation of risk management policies; and conducting monitoring and evaluation of the potential and effectiveness of the implementation of Bank NTT's risk management system. In carrying out its duties, the Risk Management Committee is required to always act independently and avoid conflicts of interest.

Efektivitas dari praktik manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Bank NTT akan nampak pada hasil penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank NTT oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 4 (empat) indikator utama yaitu: Profil Risiko, Tata Kelola/*Good Corporate Governance*, Rentabilitas serta Permodalan.

The effectiveness of the risk management practices implemented by Bank NTT will be evident in the results of the Financial Services Authority's assessment of Bank NTT's Health Level based on four (4) key indicators: Risk Profile; Governance/Good Corporate Governance; Profitability; and Capital Adequacy.

PERLUASAN JARINGAN KANTOR BARU

Selama tahun 2025 Bank NTT menitikberatkan perluasan jaringan layanan tanpa kantor dengan melakukan penetrasi pasar terhadap pemanfaatan kanal-kanal digital Bank NTT seperti Mobile Banking, SMS Banking, EDC, Agen Laku Pandai Bank NTT, mesin ATM dan CRM, Agen Laku Pandai, *Digital Loan*, *Internet Banking* (IB), dan *Internet Business Banking* (IBB), layanan BI *Fast* serta QRIS *Merchant*.

EXPANSION OF NEW BRANCH NETWORK

Throughout 2025, Bank NTT will focus on expanding its branchless service network by penetrating the market through the use of Bank NTT's digital channels, such as Mobile Banking, SMS Banking, EDC, Bank NTT Laku Pandai Agents, ATMs and CRM, Digital Loans, Internet Banking (IB), and Internet Business Banking (IBB).

Bank NTT juga terus mendukung penguatan layanan elektronifikasi keuangan pemerintah daerah melalui pemanfaatan produk-produk digital Bank NTT melalui CMS Siskuedes, CMS Surat Perintah Pencairan Dana Online (SP2D), Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Daerah (KKI), layanan sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan FLPP (SiKasep), pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT Online, pembayaran 9 (sembilan) pajak daerah melalui EDC dalam mendukung reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*).

Bank NTT also continues to support the strengthening of local government financial digitalization services through the utilization of Bank NTT's digital products via the Siskuedes CMS, the Online Fund Disbursement Order (SP2D) CMS, the Local Government Segment Indonesia Credit Card (KKI), the FLPP Housing Subsidy Mortgage Information System (SiKasep), motor vehicle tax payments via Bank NTT's SAMSAT Online, and payments for 9 (nine) local taxes via EDC as part of efforts to support transparent and accountable local financial management (good governance).

Pada tahun 2025 Bank NTT tidak melakukan penambahan jaringan kantor fisik. Kebijakan yang diambil manajemen terkait jaringan kantor fisik adalah dengan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap unit kantor mulai dari kantor cabang sampai dengan kantor fungsional *existing*. Manajemen melakukan penutupan unit kantor yang dipandang

In 2025, Bank NTT will not expand its physical branch network. The management's policy regarding the physical branch network is to continuously evaluate the performance of each branch unit, from branch offices to functional offices. Management closes office units deemed unproductive, relocates the " " office to more strategic locations, and upgrades or downgrades office

tidak produktif, relokasi kantor ke titik-titik yang lebih strategis serta meningkatkan atau menurunkan status kantor dimana semuanya dilaksanakan berbasis kinerja dan data yang telah diakomodir oleh sistem *core banking* Bank NTT serta melalui perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran Rencana Bisnis Bank. Sementara itu kebijakan manajemen terhadap pembukaan jaringan kantor fisik baru adalah dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), faktor risiko, potensi ekonomi wilayah serta tingkat kejenuhan bank di wilayah setempat sebagai indikator *feasibility study*

status—all based on actual financial performance data captured by Bank NTT's core banking system and compared against targets set in the Bank's Business Plan budget. Meanwhile, the policy for opening new physical branch networks is carried out while continuing to consider the prudential principle, risk factors, regional economic potential, and the level of bank saturation in the local area as indicators for the feasibility study in expanding the physical branch network.

Posisi jaringan kantor Bank NTT per 31 Desember 2025 sebagaimana berikut :

The status of Bank NTT's branch network as of December 31, 2025, is as follows:

PENGEMBANGAN JARINGAN KANTOR	2023	2024	2025	BRANCH NETWORK DEVELOPMENT
Jaringan Kantor Fisik				Physical Office Network
Kantor Pusat	1	1	1	Headquarters
Kantor Cabang Utama	1	1	1	Main Branch Office
Kantor Cabang Khusus	1	1	1	Special Branch Office
Kantor Cabang	22	21	21	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	46	46	46	Branch Office
Kantor Fungsional	116	117	117	Functional Office
Payment Point	25	26	26	Payment Point
Kas Mobil	8	8	8	Car Cash
Jumlah Jaringan Kantor Fisik	219	221	221	Number of Physical Branch Offices
Jaringan Kantor Non Fisik				Network of Virtual Offices
Elektronic Data Capture	1.140	1.014	948	Electronic Data Capture
Agen Laku Pandai	1.807	1.820	1.476	Laku Pandai Agents
Jumlah Mesin ATM & CRM	248	248	248	Total ATM & CRM Machines
Agen Di@ Bisa	8.258	13.100	13.190	Agent Di@ Can
QRIS Merchant Bank NTT	18.203	21.977	24.733	QRIS Merchant Bank NTT

EVALUASI RENCANA BISNIS

Manajemen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank melalui rapat evaluasi setiap triwulan guna membahas realisasi target bisnis, kendala yang dihadapi, masukan dan sinergitas program lintas divisi serta langkah-langkah penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi. Rapat evaluasi triwulanan dilakukan oleh Direksi bersama Dewan Komisaris dengan para Kepala Divisi serta seluruh Pemimpin Cabang.

BUSINESS PLAN EVALUATION

Management monitors and evaluates the implementation of the Bank's Business Plan through quarterly evaluation meetings to discuss the achievement of business targets, challenges faced, feedback, and cross-divisional program synergies, as well as steps to resolve the challenges encountered. Quarterly evaluation meetings are conducted by the Board of Directors together with the Board of Commissioners, Division Heads, and all Branch Managers.

PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT terus melakukan pengembangan dan penguatan sistem teknologi

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS

Throughout 2025, Bank NTT continues to develop and strengthen its information technology systems to

Informasi dalam mendukung berjalannya aktivitas operasional bank dan menjaga ketahanan serta keamanan sistem teknologi informasi yang dimiliki terhadap serangan siber dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan dan penguatan infrastruktur teknologi Informasi baik dari sisi *hardware* maupun *software* sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan ketentuan regulator.
2. Penyusunan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi.
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang teknologi informasi.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi sistem teknologi informasi.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan kompleksitas bisnis yang dijalankan dan untuk mendukung pengembangan kompetensi seluruh pegawai Bank NTT dan penataan pegawai sesuai bidang kerja maka pada tahun 2025 manajemen telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan, pelatihan *hardskill* dan *soft skill* serta Sertifikasi keahlian sesuai bidang kerja.
2. Pengembangan dan penambahan fitur-fitur baru pada aplikasi pengelolaan dan penataan kepegawaian (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
3. Implementasi *career path* pegawai.
4. Penyusunan dan pengkinian pedoman kebijakan sumber daya manusia diataranya terkait rekruitmen, alih daya, promosi dan mutasi.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan fungsi kepatuhan di Bank NTT merupakan fungsi *ex ante* atau upaya preventif terhadap pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional yang bertentangan dengan ketentuan internal dan ketentuan regulator.

Tujuan penerapan fungsi kepatuhan adalah memastikan bahwa seluruh proses bisnis maupun operasional yang dilakukan oleh Bank NTT di seluruh lini dan tingkatan unit kerja telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi bank maupun permasalahan hukum di kemudian hari.

support the Bank's operational activities, particularly ensuring the stability of digital channels and safeguarding information technology systems against cyberattacks and data breaches by implementing the following strategic measures::

1. Upgrading and strengthening information technology infrastructure, both hardware and software, in line with the latest technological developments and regulatory requirements.
2. Formulation of IT governance and risk management policies.
3. Enhancing the competencies of human resources in the field of information technology.
4. Monitoring and evaluating the implementation of information technology systems.
5. Collaborating with third parties to improve the quality of information technology systems.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

In line with the complexity of the business operations and to support the competency development of all Bank NTT employees, management has taken the following strategic steps for 2025:

1. Enhancing education, hard skills and soft skills training, as well as professional certifications relevant to job roles.
2. Development and addition of new features to the employee management and administration application (Human Resources Management Information System).
3. Implementation of employee career paths.
4. Drafting and updating human resources policy guidelines, including those related to recruitment, outsourcing, promotions, and transfers.

IMPLEMENTATION OF THE COMPLIANCE FUNCTION

The implementation of the compliance function at Bank NTT serves as an ex ante function or preventive measure against business and operational activities that conflict with internal regulations and regulatory requirements.

The objective of implementing the compliance function is to ensure that all business and operational processes carried out by Bank NTT across all lines and levels of work units comply with applicable regulations, thereby preventing losses to the bank or legal issues in the future.

Fungsi Kepatuhan di Bank NTT dilaksanakan oleh Divisi Kepatuhan yang bertindak secara independen terhadap seluruh aktivitas bisnis bank. Sepanjang tahun 2025 manajemen telah menerapkan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian program kerja guna memastikan terciptanya BUDAYA PATUH kepada seluruh pegawai Bank NTT.

Fungsi Kepatuhan bank dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 tahun 2017, yaitu :

a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Berikut merupakan program kerja yang telah dilakukan manajemen pada tahun 2025 dalam menerapkan fungsi kepatuhan :

The Compliance Function at Bank NTT is carried out by the Compliance Division, which operates independently with respect to all of the bank's business activities. Throughout 2025, management has implemented policies through a series of work programs to ensure the creation of a CULTURE OF COMPLIANCE among all Bank NTT employees.

The bank's compliance function is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 46 of 2017, namely:

a. Ensuring the implementation of a culture of compliance at all levels of the organization and in the bank's business activities.
b. Managing compliance risks faced by the bank.
c. Ensuring that the policies, regulations, systems, procedures, and business activities carried out by the bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and applicable laws and regulations.
d. Ensuring the bank's compliance with commitments made by the bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.

The following are the work programs implemented by management in 2025 to carry out compliance functions:

	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	STRATEGIC OBJECTIVES / TARGETS
1	Pengembangan Serta Pengendalian Gratifikasi Dan APU PPT Development and Control of Gratuities and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing		
a.	Pengembangan Sistim APU PPT Bank NTT Development of the Bank NTT Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing System	Meningkatkan dan memperlancar pelaporan ke PPATK	Improving and streamlining reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)
b.	Pemantauan dan Evaluasi APU PPT & UPG serta Budaya Patuh pada unit kerja di lingkungan Bank NTT Monitoring and Evaluation of APU PPT & UPG as well as a Culture of Compliance within Bank NTT's operational units		
2	Membangun Budaya Patuh dan Anti Gratifikasi Building a Culture of Compliance and Anti-Graft		
a.	Pembuatan Pamflet Membudayakan Gerakan Patuh. Creating Pamphlets to Promote a Culture of Compliance..	Meningkatkan Kesadaran Anti Gratifikasi dan Anti Penyuapan di lingkungan Bank NTT & Meningkatkan Budaya Patuh	Raising Awareness of Anti-Graft and Anti-Bribery within Bank NTT & Strengthening a Culture of Compliance
b.	Surveillance ISO SMAP 37001:2016.	Audit Pemeliharaan untuk melihat penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar ISO 37001:2016	Maintenance Audit to assess the implementation of the Anti-Bribery Management System in accordance with ISO 37001:2016 standards

	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	STRATEGIC OBJECTIVES / TARGETS
c.	E-Learning.	Membudayakan kepatuhan kepada seluruh unit kerja sebagai acuan dalam berperilaku dan bekerja agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan atau nilai-nilai yang ditetapkan, melalui program E-Learning Quiz.	Fostering a culture of compliance across all work units as a guide for behavior and work practices to ensure alignment with applicable regulations and laws and/or established values through an E-Learning Quiz program.
3	**Reviu Aturan Internal dan Eksternal** **Review of Internal and External Regulations**		
a.	Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan standar internal yang ada. Analyze and evaluate existing internal policies, procedures, and standards.	Memastikan kebijakan, prosedur, dan standar internal yang ada telah sesuai dengan peraturan eskternal yang berlaku. Memastikan kebijakan, prosedur, dan standar internal yang ada telah sesuai dengan peraturan eskternal yang berlaku.	Ensuring that existing internal policies, procedures, and standards comply with applicable external regulations. Ensuring that existing internal policies, procedures, and standards comply with applicable external regulations.
b.	Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan badan regulasi lainnya. Verifying compliance with regulations and laws established by government agencies and other regulatory bodies.		
4	Pengadaan Aplikasi Pelindungan Data Pribadi Procurement of Personal Data Protection Applicationsi	Memenuhi undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	Compliance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection
5	Peningkatan Kompetensi SDM Human Resource Competency Development	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan Kompetensi SDM Divisi Kepatuhan	Enhancing insights and knowledge to develop the competencies of the Compliance Division's human resources

Untuk memastikan seluruh unit kerja memahami regulasi internal maupun eksternal serta mematuhinya dalam aktivitas bisnis dan operasional maka Divisi Kepatuhan secara triwulanan melaksanakan *e-learning quiz* dengan materi quiz berupa peraturan internal dan eksternal dimana nilai yang diperoleh dan pemahaman terhadap ketentuan dimaksud menjadi salah satu item penilaian terhadap *Key Performance Indicator* pegawai Bank NTT setiap tahun.

Sementara itu terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang. Pencegahan Pendanaan Terorisme. dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal Di Sektor Jasa Keuangan manajemen melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

A. Pengawasan Aktif Komisaris dalam Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi.

2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

To ensure that all work units understand and comply with both internal and external regulations in their business and operational activities, the Compliance Division conducts quarterly e-learning quizzes on internal and external regulations. The scores obtained and the level of understanding of these regulations serve as one of the evaluation criteria for the Key Performance Indicators of Bank NTT employees each year.

Meanwhile, regarding the Implementation of the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector, management has taken the following strategic steps:

A. Active Oversight by the Board of Commissioners in the Implementation of the APU PPT and PPPSPM Programs

1. The Board of Commissioners approves the policies and procedures for the implementation of the APU PPT and PPPSPM programs proposed by the Board of Directors.
2. The Board of Commissioners evaluates the policies and procedures for the implementation of

3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM.

4. Dewan Komisaris memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Pengawasan Aktif Direksi dalam Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM

1. Direksi telah membentuk unit kerja khusus (Unit Kerja Khusus) sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT dan PPPSPM kantor pusat Bank NTT sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Direksi telah menetapkan Pedoman Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM Di lingkungan Bank NTT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direksi memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan di Bank NTT sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
4. Direksi memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Direksi memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi.

C. Kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank NTT yang mencakup prosedur teknis sebagai berikut:

1. *Customer Due Diligence* (CDD).
   Dalam rangka melaksanakan kegiatan Identifikasi Calon Nasabah/Nasabah dan Pengkinian Data Nasabah, termasuk metode penilaian risiko nasabah (*Risk Customer Profiling*) terhadap potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, identifikasi *Beneficial Owner*. Identifikasi *Walk In Customer* dan penyaringan data nasabah terhadap database Anti *Money Laundering Watchlist* yang terdiri dari DTTOT. Daftar PPSPM serta *Adverse Info* (berita negatif);
   a. Pengukuran Risiko APU PPT dan PPPSPM dilakukan dengan menggunakan indikator/ parameter *Risk Based Approach* (RBA),

the APU PPT and PPPSPM programs.

3. The Board of Commissioners oversees the Board of Directors' fulfillment of its responsibilities regarding the implementation of the APU PPT and PPPSPM programs.
4. The Board of Commissioners ensures that discussions regarding the implementation of the APU PPT and PPPSPM programs take place during meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

B. Active Oversight by the Board of Directors in the Implementation of the AML, CFT, and PPT Programs

1. The Board of Directors has established a special working unit (Special Working Unit) to be responsible for the implementation of the AML, CFT, and MLPFP programs at Bank NTT's head office in accordance with applicable regulations.
2. The Board of Directors has established Guidelines for the Implementation of the AML, CFT, and MLPFP programs within Bank NTT based on the approval of the Board of Commissioners.
3. The Board of Directors ensures that the implementation of the APU, PPT, and PPPSPM programs at Bank NTT is carried out in accordance with established written policies and procedures.
4. The Board of Directors ensures that officials and/or employees, particularly employees from relevant work units and new employees, have attended training related to the implementation of the APU, PPT, and PPPSPM programs at least once a year.
5. The Board of Directors ensures that discussions regarding the implementation of the APU PPT and PPPSPM programs take place during Board of Directors meetings.

C. Risk-Based APU PPT and PPPSPM Policies and Procedures in Line with the Complexity of Bank NTT's Business, Including the Following Technical Procedures::

1. Customer Due *Diligence* (CDD).
   In order to carry out the identification of prospective customers/customers and the updating of customer data, including methods for assessing customer risk (Risk Customer Profiling) regarding the potential for money laundering and terrorist financing, identification of Beneficial Owners, identification of Walk-In Customers, and screening of customer data against the Anti-Money Laundering Watchlist database, which consists of DTTOT, the PPSPM List, and Adverse Info (negative news).
   a. Risk measurement for APU PPT and PPPSPM is conducted using Risk-Based Approach

yang mencakup penilaian risiko nasabah (*Customer Risk Rating*) dan Penilaian risiko inheren atas PT Bank/Asuransi/*Multifinance* (*AML Risk Rating*).

b. Pengendalian dan Pengelolaan Risiko APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan melalui pelaksanaan proses *Customer Due Deligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk mengetahui profil Nasabah serta analisa terhadap kesesuaian transaksi dengan profil Nasabah/ WIC serta sosialisasi kebijakan dan prosedur, pelatihan kepada seluruh pegawai Bank, evaluasi terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang.
c. Pemantauan dan analisa secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil Nasabah, termasuk penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi dalam rangka penerapan APU PPT dan PPPSPM.
d. Identifikasi dan penilaian risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait produk dan layanan dan aktivitas baru pada AML Risk Rating, termasuk pembukaan *electronic channel*.
e. Identifikasi dan Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL) dan Sistem Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) ke PPATK.
f. Prosedur penyaringan karyawan baru dan monitoring aktivitas transaksi karyawan sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).
g. Penatausahaan dokumen CDD dan dokumen lainnya terkait APU PPT dan PPPSPM.
h. Tindak lanjut hasil evaluasi serta Pelaporan eksposur risiko APU PPT dan PPPSPM kepada manajemen senior, komite, dan regulator.
i. Aktivitas Pengendalian internal (Internal control), meliputi:
    1. Penyiapan proses dan aktivitas pengendalian sebagai pedoman unit bisnis sekaligus memastikan kepatuhan serta pemahaman terhadap program APU PPT dan PPPSPM, aktivitas pengendalian internal tertuang di dalam kebijakan dan prosedur (SOP) APU PPT dan PPPSPM.

(RBA) indicators/parameters, which include customer risk assessment (Customer Risk Rating) and inherent risk assessment of the Bank/Insurance/Multifinance Company (AML Risk Rating).

b. Risk control and management for APUPPT and PPPSPM are carried out through the implementation of the Customer Due Diligence (CDD) or Enhanced Due Diligence (EDD) process to determine the customer profile, as well as analysis of the alignment of transactions with the customer profile/WIC, and dissemination of policies and procedures, training for all bank employees, and evaluation of the implementation of APUPPT and PPPSPM at branch offices.
c. Continuous monitoring and analysis to identify the alignment between customer transactions and customer profiles, including the termination of business relationships and the rejection of transactions in the context of implementing APU PPT and PPPSPM.
d. Identification and assessment of the risk of money laundering and terrorist financing related to new products, services, and activities in the AML Risk Rating, including the opening of electronic channels.
e. Identification and reporting of Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM), Cash Transaction Reports (LTKT), Foreign Financial Transaction Reports (LTKL), and the Integrated Service User System (SIPESAT) to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
f. Procedures for screening new employees and monitoring employee transaction activities as part of the implementation of Know Your Employee (KYE).
g. Maintenance of CDD documents and other documents related to APU PPT and PPPSPM.
h. Follow-up on evaluation results and reporting of APU PPT and PPPSPM risk exposures to senior management, committees, and regulators.
i. Internal Control activities include:
    1. Establishing control processes and activities as guidelines for business units while ensuring compliance and understanding of the APU PPT and PPPSPM programs. Internal control activities are outlined in the APU PPT and PPPSPM policies

2. Proses testing untuk memastikan bahwa Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait telah menerapkan APU PPT dan PPPSPM sesuai Kebijakan dan Prosedur yang berlaku.
3. Penilaian indikator risiko yang didasarkan pada pertimbangan risiko dan Metodologi yang tepat serta pendokumentasian.

D. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU PPT dan PPPSPM

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, diterapkan prosedur *self-assessment* di kantor cabang maupun unit bisnis yang kemudian divalidasi oleh Unit Kerja Kepatuhan kantor pusat. Melakukan pemeriksaan secara independen untuk memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM baik Pihak Internal dalam hal ini Divisi Pengawasan dan SKAI maupun pihak Eksternal baik OJK, PPATK dan KAP.

e. Sistem Informasi Manajemen dalam Rangka Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM

Untuk memitigasi Bank NTT tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusana massal baik itu transaksi rupiah maupun valas maka Bank NTT telah memiliki sistem APU PPT yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah, memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu dan memiliki serta memelihara profil *Walk in Customer* sejak tahun 2020. Aplikasi ini dilengkapi dengan parameter dan *threshold*, yang secara berkesinambungan dievaluasi sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aplikasi ini juga memiliki fungsi untuk pelaksanaan proses *screening* terhadap *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional (antara lain *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List, United Nation (UN) List.*

Screening Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi, daftar *Politically Exposed Person* (PEP) maupun pemberitaan negatif (*adverse news*), *Screening* ulang juga dilakukan ulang atas seluruh nasabah *existing* pada setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *watchlist* dari LPP, serta pelaporan LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT dan SIPENDAR.

and standard operating procedures (SOPs).
2. Testing processes to ensure that relevant Branches and Business Units have implemented APU PPT and PPPSPM in accordance with applicable Policies and Procedures.
3. Assessment of risk indicators based on appropriate risk considerations and methodologies, as well as documentation.

D. Internal controls to evaluate the adequacy and effectiveness of the APU PPT and PPPSPM programs

To ensure that the implementation of the APU and PPT programs aligns with established policies, self-assessment procedures are conducted at branch offices and business units, which are subsequently validated by the Central Office's UKK. Independent audits are conducted to ensure the proper implementation of the APU PPT and PPPSPM programs, involving both internal parties—specifically the Supervision Division and SKAI—and external parties such as the OJK, PPATK, and KAP.

e. Management Information System for the Implementation of the APU, PPT, and PPPSPM Programs

To prevent Bank NTT from being used as a vehicle for money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction—whether in rupiah or foreign currency transactions—Bank NTT has implemented an AML/CFT system capable of effectively identifying, analyzing, monitoring, and reporting on the characteristics of customer transactions. The bank maintains integrated customer profiles and has maintained profiles for walk-in customers since 2020. This application is equipped with parameters and thresholds that are continuously evaluated in line with evolving money laundering and terrorist financing methods. It also includes functions for conducting screening processes against watchlists commonly used in international best practices (including the Office of Foreign Assets Control (OFAC) List, the United Nations (UN) List

The List of Suspected Terrorists and Terrorist- t Organizations (DTTOT), the Proliferation List, the Politically Exposed Person (PEP) list, and adverse news reports also trigger re-screening of all existing customers whenever there is an update or addition to the watchlists from the LPP, as well as reporting for LTKM, LTKT, LTKL, SIPESAT, and SIPENDAR.

Bank NTT secara berkesinambungan juga terus melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang digunakan untuk menambahkan berbagai fungsi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem termasuk penyesuaian sistim terhadap perubahan regulasi.

Bank NTT also continuously improves the applications used to add various functions to enhance the system's effectiveness and efficiency, including adapting the system to regulatory changes.

F. Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Program APU PPT dan PPPSPM

a. Prosedur penyaringan untuk memastikan standar yang tinggi pada penerimaan pegawai baru (*pre-employee screening*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk pejabat senior, tenaga ahli, dari mulai tingkat paling rendah sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (*know your employee*), baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, termasuk tenaga ahli, dari mulai level paling rendah sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
c. Pelatihan APU PPT dan PPPSPM wajib diikuti oleh semua karyawan secara berkala, dengan metode pelatihan dilakukan baik Luring, daring maupun melalui e-learning dilakukan secara berkesinambungan serta dilakukan evaluasi pemahaman karyawan terhadap program APU PPT dan PPPSPM melalui quis e-learning.
d. Bank telah menyelenggarakan pelatihan/ sosilisasi yang berkesinambungan terkait ketentuan, pengetahuan tentang teknik dan tipologi APU PPT dan PPPSPM, serta kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM baik dilakukan bagi petugas APU PPT dan PPPSPM maupun bagi karyawan bank NTT secara keseluruan.
e. Pelatihan/sosialisasi secara berkesinambungan untuk petugas APU PPT dan PPPSPM dilakukan minimal 1 kali setiap 1 tahun.
f. Mengikutsertakan Unit Kerja Kepatuhan pada setiap sosilisasi ketentuan eksternal berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh BI, OJK, PPATK, KPK, dan lembaga lain yang berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM.

F. F. Human Resources in Support of the APU PPT and PPPSPM Programs

a. a. Screening procedures to ensure high standards in the hiring of new employees (pre-employment screening), including both permanent and non-permanent staff, as well as senior officials and experts, from the lowest level up to one level below the Board of Directors and the Board of Commissioners.
b. Identification and monitoring of employee profiles (know your employee) for both permanent and non-permanent employees, including experts, from the lowest level up to the Board of Directors and Board of Commissioners.
c. APU PPT and PPPSPM training must be attended by all employees on a regular basis, with training methods conducted both in-person, online, and through e-learning on an ongoing basis, and an evaluation of employees' understanding of the APU PPT and PPPSPM programs is conducted through e-learning quizzes.
d. The Bank has conducted ongoing training/ awareness sessions regarding regulations, knowledge of APU PPT and PPPSPM techniques and typologies, as well as policies and procedures for implementing the APU PPT and PPPSPM programs, both for APU PPT and PPPSPM officers and for all NTT Bank employees.
e. Specifically, training/socialization for APU PPT and PPPSPM officers is conducted at least once a year on an ongoing basis.
f. UKK must participate in every external awareness session regarding the implementation of APU PPT and PPPSPM conducted by BI, OJK, PPATK, KPK, and other institutions related to the implementation of APU PPT and PPPSPM.

G. Uji Kepatuhan dan Pemberian Opini Terkait APU PPT Dan PPPSPM dalam setiap Kebijakan, Prosedur, Produk/Aktivitas/*Channel*

G. Compliance Testing and Issuance of Opinions Regarding APU PPT and PPPSPM UKK Reviews Policies, Procedures, Products, Activities, and

Untuk memastikan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait APU PPT dan PPPSPM. maka Unit Kerja Kepatuhan wajib memberikan opini kepada unit kerja bisnis dan unit kerja lainnya terkait berbagai pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM.

H. Pelaporan dan Pemenuhan Permintaan Data Kepada Regulator/Penegak Hukum Dalam Rangka Program APU PPT dan PPPSPM

Penerapan APU PPT dan PPPSPM, pada bank NTT telah dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik. Dalam mendukung pelaporan APU PPT Bank NTT telah mengembangkan Aplikasi Pelaporan APU PPT yang dapat mempermudah petugas atau pegawai baik di Kantor Cabang. Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Pusat dalam menyampaikan laporan kepada PPATK.

Guna menjamin implementasi program APUPPT dan PPSDM manajemen telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 27 tahun 2023 tentang Kebijakan Prosedur Penetapan Program APUPPT dan PPPSPM di Lingkungan Bank NTT.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Adanya unit kerja yang melakukan audit internal merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Fungsi audit internal di Bank NTT dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Sepanjang tahun 2025 Divisi Pengawasan & SKAI secara rutin melakukan audit terhadap kinerja operasional bank baik pada kantor pusat maupun kantor cabang dan unit kerja dibawahnya.

Audit dilakukan diantaranya terhadap implementasi sistem pembayaran yang dijalankan dan kondisi sistem teknologi informasi yang digunakan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dan kompeten serta telah terdaftar pada *Self Regulatory Organization* dalam hal ini Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (action plan) hasil pemeriksaan internal maupun temuan regulator serta pihak eksternal lainnya pada setiap unit kerja, melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan fraud, mengadakan audit investigasi terhadap fraud dan pelanggaran terhadap ketentuan internal dan eksternal bank, melaksanakan Audit Umum. Audit Tujuan Tertentu maupun *Surprise* Audit, melakukan

Channels

To ensure compliance with applicable laws and regulations regarding AML/CFT and Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) measures. Additionally, the UKK provides guidance to business units and other departments regarding various questions and issues related to the implementation of AML/CTF measures.

H. Reporting and Fulfilling Data Requests to Regulators/Law Enforcement Authorities in the Context of the AML and CFT Program

The implementation of APU PPT and PPPSPM at Bank NTT has been carried out and is running well. To support APU PPT reporting, Bank NTT has developed the " " APU PPT Reporting Application, which facilitates officers or employees at Branch Offices, Sub-Branch Offices, and the Head Office in submitting reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

To ensure the effective implementation of the APUPPT and PPSDM programs, management has issued Board of Directors Decree No. 27 of 2023 concerning the Policy and Procedures for the Establishment of APUPPT and PPPSPM Programs within Bank NTT.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT FUNCTIONS

The existence of a unit that conducts internal audits is one form of good corporate governance. The internal audit function at Bank NTT is carried out by the Supervision Division & Internal Audit Unit (SKAI).

Throughout 2025, the Supervision Division & SKAI routinely conducted audits of the bank's operational performance at both the head office and branch offices, as well as their subordinate units.

Audits were conducted, among other things, on the implementation of the payment systems in operation and the condition of the information technology systems used, involving independent and competent third parties registered with the Self-Regulatory Organization, in this case the Indonesian Payment Systems Association (ASPI); monitoring the follow-up (action plans) of internal audit findings as well as findings from regulators and other external parties across all units; conducting awareness campaigns regarding fraud prevention and eradication; conducting investigative audits into cases of fraud and violations of the bank's internal and external regulations,

pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank maupun *Corporate Plan*, serta melakukan komunikasi secara berkala dengan regulator. Dewan Komisaris, Direksi, serta auditor independen. Divisi Pengawasan & SKAI juga secara rutin melakukan penilaian terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal bank baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Guna meningkatkan pengawasan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pegawai, stakeholders dan juga masyarakat luas maka Divisi Pengawasan & SKAI membuka akses penerapan *Whistle Blowing System* dimana siapa saja dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Bank NTT berupa korupsi, fraud, penipuan, kecurangan penyusunan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, pembocoran informasi rahasia, gratifikasi dan tindakan lain yang berhubungan dengan fraud disertai bukti-bukti pendukung. dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Kebijakan ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kredibilitas Bank NTT.

Pada tanggal 1-21 Juli 2025 Divisi Pengawasan dan SKAI telah melakukan Kaji Ulang terhadap Piagam Satuan Kerja Audit Bank NTT (SKAI) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk menilai efektivitas tugas, kewenangan, kode etik dan tanggung jawab SKAI. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Piagam SKAI baru Bank NTT yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank NTT Nomor 148/DK-PTBPDNTT/IX/2025.

Divisi Pengawasan dan SKAI pada tahun 2025 juga telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004 Tahun 2025 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pedoman ini menjadi acuan kepada seluruh pegawai Bank NTT untuk tetap menjaga integritas dan merupakan upaya edukatif dan preventif terhadap potensi fraud yang dapat terjadi.

Komposisi pegawai pada Divisi Pengawasan & SKAI tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kepala Divisi	: 1 (satu) orang
Inspektur Wilayah I	: 1 (satu) orang
Inspektur Wilayah II	: 1 (satu) orang
Inspektur Wilayah III	: 1 (satu) orang
Inspektur Wilayah IV	: 1 (satu)norang
Kepala Sub Divisi Anti Fraud. Administrasi & Pemantauan	: 1 (satu) orang

performing General Audits, Special Purpose Audits, and Surprise Audits, overseeing the implementation of the Bank's Business Plan and Corporate Plan, and maintaining regular communication with regulators, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Independent Auditors.

The Supervision & SKAI Division also routinely assesses the effectiveness of the bank's Internal Control System, both quantitatively and qualitatively. To enhance participatory oversight by involving all employees, stakeholders, and the general public, the Supervision & SKAI Division has implemented a Whistleblowing System, through which anyone can report violations committed by Bank NTT employees, including corruption, fraud, deception, financial statement fraud, asset misappropriation, disclosure of confidential information, gratification, and other fraud-related acts, accompanied by supporting evidence. The Supervision & SKAI Division guarantees the confidentiality of the reporter's identity. This policy is implemented to further enhance Bank NTT's credibility as a healthy, strong, and trustworthy financial institution, in line with Bank NTT's vision.

From July 1–21, 2025, the Supervision and SKAI Division conducted a review of the Charter of the Bank NTT Audit Unit (SKAI), carried out by the public accounting firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, to assess the effectiveness of the SKAI's duties, authorities, code of ethics, and responsibilities. The results of this review subsequently served as the basis for evaluating and refining the latest Bank NTT SKAI Charter, which was established through Bank NTT Board of Commissioners Decision No. 148/DK-PTBPDNTT/IX/2025.

In 2025, the Supervision and SKAI Division also issued Board of Directors Decision No. 004 of 2025 regarding the Anti-Fraud Strategy Guidelines of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. These guidelines serve as a reference for all Bank NTT employees to maintain integrity and represent an educational and preventive effort against potential fraud that may occur.

The composition of staff in the Supervision & SKAI Division in 2025 is as follows:

Division Head	: 1 (one) person
Regional Inspector I	: 1 (one) person
Regional Inspector II	: 1 (one) person
Regional Inspector III	: 1 (one) person
Regional Inspector IV	: 1 (one) person
Head of the Anti-Fraud Subdivision	

Internal Auditor	: 13 (tiga belas) orang
Staf pelaksana	: 2 (dua) orang

Untuk semakin meningkatkan kompetensi dari para Auditor Internal dalam melaksanakan fungsinya maka manajemen telah mengikutsertakan Satuan Kerja Audit Internal pada sejumlah pendidikan, pelatihan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan pada tahun buku 2025 sebagai berikut :

1. Sertifikasi Internal Auditor terkait *Certified Forensic Auditor* (CFrA)
2. Pemeliharaan CfrA
3. Sertifikasi Internal Auditor PIA
4. Pemeliharaan QIA
5. Resertifikasi QIA
6. Workshop Teknis Bidang Operasional, Bisnis TI, Anti Fraud dan Pengadaan Barang & Jasa
7. Pelatihan Teknik Audit Berbasis ISO 19011
8. BSMR Jenjang 5,6 dan 7
9. *In House Training* pengakuan dan pengukuran Sewa Perbankan dalam PSAK 73 dan Sosialisasi dari Divisi SDM
10. Seminar *Internal liquidity adequacy asessment process* (ILAAP), using ILAAP for a sustainable Bank
11. *Refreshment* Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Jenjang 5
12. Pelatihan Trading Surat Berharga
13. Pelatihan aktivitas Treasury
14. Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDHN)
15. Pelatihan *Treasury Risk Management for Risk Manager*

EFISIENSI TERHADAP OPERASIONAL BANK

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan usaha, sepanjang tahun 2025 Kantor Pusat melaksanakan berbagai program efisiensi penggunaan sumber daya yang meliputi kertas, air, bahan bakar (bensin dan solar), serta listrik.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Perusahaan mendorong penerapan digitalisasi melalui aplikasi surat menyurat In Office dalam proses administrasi dan korespondensi internal guna mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kertas. Pencetakan dokumen dilakukan secara

Administration & Monitoring	: 1 (one) person
Internal Auditor	:13(thirteen) people
Operational staff	: 2 (two) people

To further enhance the competence of Internal Auditors in performing their duties, management has enrolled the Internal Audit Unit in a number of education and training programs conducted in fiscal year 2025 as follows:

1. Internal Auditor Certification related to Certified Forensic Auditor (CFrA)
2. CfrA Maintenance
3. PIA Internal Auditor Certification
4. QIA Maintenance
5. QIA Recertification
6. Technical Workshops on Operations, IT Business, Anti-Fraud, and Procurement of Goods & Services
7. ISO 19011-Based Audit Techniques Training
8. BSMR Levels 5, 6, and 7
9. In-House Training on the Recognition and Measurement of Banking Leases under PSAK 73 and a Briefing by the HR Division
10. Internal Seminar on the Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP). Using ILAAP for a Sustainable Bank
11. Refresher Course on the Rupiah Payment and Management System (SPPUR) Level 5
12. Securities Trading Training
13. Treasury Activities Training
14. Information Session on the Compliance Assessment Report (LHPK) for Bank Indonesia's Payment Systems and Financial Market Infrastructure, and the National Blacklist Management Office (SP & FMI BI and KPDHN)
15. Treasury Risk Management Training for Risk Managers

OPERATIONAL EFFICIENCY IN BANKING ACTIVITIES

As part of the Company's commitment to environmental responsibility and sustainable business practices, throughout 2025 the Head Office implemented various resource-efficiency initiatives covering paper, water, fuel (gasoline and diesel), and electricity consumption.

.

Paper Usage Efficiency

The Company promotes digitalization through the In Office correspondence application for administrative processes and internal communications to reduce reliance on paper. Document printing is carried out

selektif, hanya untuk kebutuhan tertentu yang bersifat wajib, dengan penerapan pencetakan dua sisi serta pemanfaatan kembali kertas bekas untuk keperluan internal. Upaya ini bertujuan menekan konsumsi kertas sekaligus mengurangi limbah perkantoran.

Efisiensi Penggunaan Air

Dalam rangka mendukung konservasi air, Bank NTT menerapkan penggunaan air secara hemat dan bertanggung jawab di seluruh area kerja. Perusahaan melakukan pemeriksaan rutin terhadap instalasi air untuk mencegah kebocoran serta mendorong penggunaan fasilitas sanitasi yang lebih efisien.

Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar

Penggunaan bahan bakar bensin dan solar untuk kendaraan operasional diatur secara lebih efisien dengan menyesuaikan kebutuhan perjalanan dinas, penggunaan kendaraan operasional, penertiban kendaraan operasional diprioritaskan untuk kebutuhan operasional yang benar-benar diperlukan. Perusahaan mendorong penggunaan kendaraan operasional yang efektif, pemantauan konsumsi bahan bakar secara berkala, serta pemeliharaan kendaraan operasional guna menjaga efisiensi dan mengurangi emisi yang dihasilkan.

Efisiensi Penggunaan Listrik

Perusahaan mengoptimalkan penggunaan listrik melalui pengendalian pemakaian peralatan elektronik dan penerapan perilaku hemat energi di lingkungan Bank NTT. Penggunaan AC, lampu, dan perangkat elektronik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional (himbauan untuk mematikan peralatan elektronik apabila tidak digunakan), serta dilakukan pemantauan konsumsi listrik secara berkala.

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang penting untuk diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar

selectively, limited to mandatory requirements, with double-sided printing and reuse of scrap paper for internal purposes. These measures aim to reduce paper consumption while minimizing office waste.

Water Usage Efficiency

To support water conservation, Bank NTT implements prudent and responsible water usage across all work areas. The Company conducts regular inspections of water installations to prevent leaks and promotes the use of more efficient sanitation facilities.

Fuel Usage Efficiency

The use of gasoline and diesel for operational vehicles is managed more efficiently by aligning it with official travel needs and prioritizing vehicle use strictly for essential operational purposes. The Company encourages effective utilization of operational vehicles, periodic monitoring of fuel consumption, and regular maintenance to ensure efficiency and reduce emissions

Electricity Usage Efficiency

The Company optimizes electricity consumption through controlled use of electronic equipment and the promotion of energy-saving practices within Bank NTT. The use of air conditioning, lighting, and other electronic devices is adjusted according to operational needs (including reminders to switch off equipment when not in use), with regular monitoring of electricity consumption.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies that must be consistently applied in the preparation of financial statements as of December 31, 2025, and 2024, are as follows:

Statement of Compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which include Financial Accounting Standards Statements (PSAK) and Financial Accounting

Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (mulai tanggal 1 Januari 2013 BAPEPAM-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No.VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", serta Surat Edaran BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Untuk Semua Jenis Industri di Pasar Modal di Indonesia".

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan diklasifikasikan ke dalam arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Perubahan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut :

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran. Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.
- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi

Standards Interpretations (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (DSAK-IAI) and Regulation of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (effective January 1, 2013, BAPEPAM-LK became the Financial Services Authority (OJK)) No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies." as well as BAPEPAM-LK Circular Letter No. SE-17/BL/2012 dated December 21, 2012, regarding "The Use of a Financial Statement Disclosure Checklist for All Types of Industries in the Indonesian Capital Market."

Basis for the Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared on an accrual basis, except for the cash flow statement, which uses the historical cost concept, except for certain accounts valued using other measurement bases as described in the accounting policies for those accounts.

The cash flow statement is prepared using the direct method and classified into cash flows based on operating, investing, and financing activities. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents consist of demand deposits at Bank Indonesia and demand deposits at other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and Bank Indonesia Certificates maturing within 3 (three) months from the date of acquisition, provided they are not used as collateral for loans received and their use is not restricted.

Changes to Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

The following are the amendments and interpretations effective as of January 1, 2025:

- Amendment to PSAK 221: "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding non-convertible currencies. The amendment requires the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of convertible currencies. The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Early adoption is permitted where entities are required to disclose such information. The effective date is the beginning of the annual period in which the entity first applies the amendment.

- Amendment to PSAK 117: "Insurance Contracts" regarding insurance contracts

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi, PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Republik Indonesia No. 27 tahun 1998. selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjamin Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.017/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No179/KMK.017/2000 tentang Syarat. Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005, sebagai pengganti UP3.

A new comprehensive accounting standard for insurance contracts covering recognition, measurement, presentation, and disclosure. Upon becoming effective, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of life and non-life insurance contracts, direct insurance, and reinsurance, regardless of the entity issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with non-binding participation features; certain scope exclusions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact on the financial statements for the current period or prior years.

GOVERNMENT GUARANTEES ON COMMERCIAL BANK PAYMENT OBLIGATIONS

Pursuant to Presidential Decree of the Republic of Indonesia No.15 of 2004 regarding the termination of duties and dissolution of the National Banking Restructuring Agency (BPPN). the government guarantee program for the payment obligations of Commercial Banks, which was originally carried out by the BPPN pursuant to Decree of the Republic of Indonesia No. 26 of 1998 and Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 26 of 1998 and Decree of the Republic of Indonesia No. 27 of 1998, is subsequently implemented by the Minister of Finance through the Government Guarantee Implementation Unit (UP3) as regulated by Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 17 of 2004. This was further regulated by Ministry of Finance Decision No. 84/KMK.017/2004 dated February 27, 2004, regarding Amendments to Ministry of Finance Decision of the Republic of Indonesia No. 179/KMK.017/2000 on the Terms, Procedures, and Conditions for the Implementation of Government Guarantees for Commercial Bank Payment Obligations.

The Government Guarantee Program through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005, regarding the Calculation and Payment of Premiums for the Guarantee Program for Commercial Bank Payments for the period from July 1 to September 21, 2005. As a replacement for UP3.

Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Berdasarkan undang-undang No.24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.03 (Perpu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008. LPS dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Hingga saat ini Bank NTT adalah peserta dalam program LPS.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp.2.000.000.000.- untuk per nasabah per bank.

Per 31 Desember 2025 simpanan nasabah dalam rupiah dijamin oleh LPS apabila suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,5 % sedangkan untuk simpanan nasabah dalam valuta asing dijamin apabila suku bunganya sama dengan atau dibawah 2 %.

The government has established an independent institution, namely the Deposit Insurance Corporation (LPS). Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective as of September 22, 2005, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 03 (Perpu No. 3/2008) dated October 13, 2008. The LPS was established to guarantee certain obligations of commercial banks under the applicable guarantee program, the coverage amount of which may change if certain applicable criteria are met. To date, Bank NTT is a participant in the LPS program.

Pursuant to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13, 2008, regarding deposit coverage limits, the amount of deposits guaranteed by the LPS is up to Rp. 2,000,000,000 per customer per bank.

As of December 31, 2025, customer deposits in rupiah are guaranteed by the LPS if the interest rate is equal to or below 3.5%, while customer deposits in foreign currency are guaranteed if the interest rate is equal to or below 2%.

PERJANJIAN KERJASAMA SEPANJANG TAHUN 2025

COOPERATION AGREEMENTS THROUGHOUT 2025

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
1	9-1-2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Pertanggungan Kredit Ekowisata, Agrowisata dan Industri Kreatif (Kreasi)	Credit Guarantees for Ecotourism, Agrotourism, and Creative Industries (KREASI)
2	17-1-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Kredit Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Guarantee of Credit for Water Supply and Sanitation Systems
3	20-1-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Kredit Mikro Merdeka	Micro Credit Guarantee – Merdeka Program
4	22-1-2025	Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI	Pengelolaan Kas Negara	State Treasury Management
5	31-1-2025	BP Tapera	Penerbitan NCD Bank NTT I Tahun 2024	Issuance of Bank NTT Negotiable Certificate of Deposit (NCD) I – 2024
6	4-2-2025	PT Bali Internasional Teknologi	Perjanjian Kerahasiaan	Non-Disclosure Agreement (NDA)
7	4-2-2025	PT Timor Media Grafika	Penerbitan Publikasi Promosi Produk dan Layanan Jasa Perbankan	Publication of Promotional Materials for Banking Products and Services
8	11-2-2025	PT Krisolis Jaya Mandiri	Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan/Medical Check Up	Medical Check-Up Services Agreement

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
9	11-2-2025	PT Timor Express Intermedia	Penerbitan Publikasi Promosi Produk dan Layanan Jasa Perbankan	Publication of Promotional Materials for Banking Products and Services
10	11-2-2025	PT VBL Media (Harian Umum Victory News)	Penerbitan Publikasi Promosi Produk dan Layanan Jasa Perbankan	Penerbitan Publikasi Promosi Produk dan Layanan Jasa Perbankan
11	13-2-2025	CV Darvesh	Media Promosi Pemasangan Baliho/Billboard PT BPD NTT	Promotional Media Placement of Banners/Billboards for PT BPD NTT
12	18-2-2025	PT Indoraya Kupang	Media Promosi Pemasangan Baliho/Billboard PT BPD NTT	Promotional Media Placement of Banners/Billboards for PT BPD NTT
13	26-2-2025	PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk	Pekerjaan Pengadaan 16.850 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Kartu ATM Berbasis Chip	Procurement of 16,850 (Sixteen Thousand Eight Hundred Fifty) Chip-Based ATM Cards
14	27-2-2025	PT Integra Teknologi Solusi	Perjanjian Kerahasiaan (NDR)	Non-Disclosure Agreement (NDR)
15	28-2-2025	CV Kasih Bunda	Pekerjaan Pembangunan Rumah Panel Bank NTT Kantor Pusat	Construction of a Panel Building at Bank NTT Head Office
16	11-3-2025	Kap Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Jasa Konsultansi KAP untuk Periode 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024	Public Accounting Firm (KAP) Consulting Services for the Periods Ending 30 June 2024 and 31 December 2024
17	17-3-2025	PT BNI Tbk	Penyaluran Transaksi Remittance	Remittance Transaction Processing
18	20-3-2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Pertanggungan Kredit Ekowisata, Agrowisata dan Industri Kreatif (Kreasi)	Credit Coverage for Ecotourism, Agrotourism, and Creative Industries (KREASI)
19	23-3-2025	Koperasi Jasa Karyawan Primadona Bank NTT	Pekerjaan Sewa Kendaraan Toyota Hilux Dc 2.4 G Untuk KC Betun	Vehicle Rental Services for Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G for Betun Branch (KC Betun)
20	16-4-2025	Kementerian Dalam Negeri RI	Pelaksanaan SPPD Secara Online Pada Aplikasi SIPD	Online Implementation of (SPPD) via the SIPD Application
21	16-4-2025	PT Telkomsel Ind, PT Finnet Ind	Distribusi & Penjualan Produk Telkomsel	Distribution and Sales of Telkomsel Products
22	28-4-2025	Dirjen Paud, PD, PMKPDM	Pemanfaatan Data & Informasi Pada Aplikasi BOSP Salur	Utilization of Data and Information in the BOSP Salur Application
23	7-5-2025	LPPI	Penyelenggaraan Jasa Asessemen Calon Pemimpin Cabang Bank NTT Tahun 2025	Assessment Services for Prospective Branch Leaders of Bank NTT for 2025
24	14-5-2025	PT Sentra Finansial Teknologi	Layanan Virtual Account (Host To Host) Terintegrasi Dengan Sistem Aplikasi Edufin	Virtual Account Services (Host-to-Host) Integrated with the Edufin Application System
25	19-5-2025	PT BRI Danaresa Sekuritas	Pemberian Jasa Konsultan Keuangan (Arranger) Dalam Rangka Penerbitan NCD Tanpa Warkat	Financial Advisory Services (Arranger) for the Issuance of Scripless Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
26	20-5-2025	Dr Ir Yahyah M. Si	Probility Advice/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Periode Bulan April 2025 s/d Bulan Maret 2026	Procurement Advisory and Assistance Services for Goods and Services April 2025 – March 2026 Period
27	21-5-2025	LPPI	Penyelenggaraan Program PC Tahun 2025	Implementation of the PC Program for 2025

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
28	23-5-2025	PT Sarana Pactindo	Perjanjian Novasi	Novation Agreement
29	12-6-2025	PT Metalogic Infomitra	Upgrade Proswitch Engine	Upgrade Proswitch Engine
30	12-6-2025	PT Mitra Edukasi Nusantara	Layanan Bank NTT Virtual Account Online Atas PBJ Pemda Melalui Marketplace Tokogramedia Com	Bank NTT Online Virtual Account Services for Local Government Procurement (PBJ) via Tokogramedia Marketplace
31	12-6-2025	PT Mitra Edukasi Nusantara	Layanan Bank NTT Virtual Account Online Atas PBJ di Sekolah Melalui Marketplace Tokogramedia Com	Bank NTT Online Virtual Account Services for School Procurement (PBJ) via Tokogramedia Marketplace
32	16-6-2025	PT Nationalnobu Tbk	Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI)	Indonesian Master Derivatives Agreement (PIDI)
33	24-6-2025	PT Venturium System Indonesia	Jasa Maintenance Aplikasi Swiftallance	Maintenance Services for the Swiftallance Application
34	30-6-2025	PT BPD Jatim	Perjanjian Pernyataan & Pengambilalihan Saham Bersyarat	Conditional Share Subscription and Acquisition Agreement
35	7-7-2025	PT Charson Timor Land Estate	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Provision of Commercial Mortgage Loan Facilities (KPR) and Subsidized Housing Loans (KPR) by PT BPD NTT
36	7-7-2025	PT Griya Lontar Permai	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT
37	7-7-2025	PT Helong Persada Makmur	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Provision of Commercial Mortgage Loan Facilities (KPR) and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR) by PT BPD NTT
38	7-7-2025	PT Pembangunan Sehat Sejahtera	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Provision of Commercial Mortgage Loan Facilities (KPR) and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR) by PT BPD NTT
39	7-7-2025	PT Sahabat Pasaraya Citramodern	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Provision of Commercial Mortgage Loan Facilities (KPR) and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR) by PT BPD NTT
40	7-7-2025	PT Themindo Bangun Mandiri	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Provision of Commercial Mortgage Loan Facilities (KPR) and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR) by PT BPD NTT
41	7-7-2025	PT Timor Sarana Pembangunan Nekmese	Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Komersil (KPR Komersil) dan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT BPD NTT	Provision of Commercial Mortgage Loan Facilities (KPR) and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR) by PT BPD NTT
42	14-7-2025	PT Telkomsel Ind, PT Finnet Ind	Distribusi & Penjualan Produk Telkomsel	Distribution and Sales of Telkomsel Products

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
43	17-7-2025	Direktorat Operasi Keamanan Siber Badan Siber & Sandi Negara	Perjanjian Kerahasiaan Tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Dini Ancaman Siber	Confidentiality Agreement on the Implementation of Early Cyber Threat Information Exchange
44	29-7-2025	Pemerintah Provinsi NTT	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah & Retribusi Daerah Melalui Kanal Transaksi PT BPD NTT	Acceptance of Regional Tax and Levy Payments through PT BPD NTT Transaction Channels
45	4-8-2025	PT Aplikanusa Lintasarta	Addendum Ketiga Perjanjian Berlangganan Sistem Jaringan Komunikasi Data	Third Addendum to the Data Communication Network Subscription Agreement
46	4-8-2025	PT Mutiara Bintang Abadi	Switching Aggregator Pembayaran Tagihan Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Gerai Tokopedia	Payment Switching Aggregator for Regional Tax and Levy Bills at Tokopedia Outlets
47	4-8-2025	PT Mutiara Bintang Abadi	Switching Aggregator Pembayaran Tagihan Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Gerai Alfamart	Payment Switching Aggregator for Regional Tax and Levy Bills at Alfamart Outlets
48	4-8-2025	PT Mutiara Bintang Abadi	Switching Aggregator Pembayaran Tagihan Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Gerai Indomaret	Payment Switching Aggregator for Regional Tax and Levy Bills at Indomaret Outlets
49	5-8-2025	PT Flamboyan Prima Konstruksi	Pekerjaan Penambahan Ruangan Kerja Direksi Dan Komisaris Bank NTT	Office Space Expansion Works for the Board of Directors and Commissioners of Bank NTT
50	6-8-2025	PT Espay Debit Indonesia Koe	Perjanjian Kerahasiaan	Non-Disclosure Agreement (NDA)
51	6-8-2025	PT Anugerah Timor Pratama	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi
52	6-8-2025	PT Cahaya Putri Mandato	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi	Provision of Commercial and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR)
53	6-8-2025	PT Danang Mandiri	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi	Provision of Commercial and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR)
54	6-8-2025	PT Eza Timor Jaya	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi	Provision of Commercial and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR)
55	6-8-2025	PT Timor Real Estate	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi	Provision of Commercial and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR)
56	6-8-2025	PT Satria Indra Jaya	Penyediaan Fasilitas KPR Komersil & KPR Bersubsidi	Provision of Commercial and Subsidized Mortgage Loan Facilities (KPR)
57	11-8-2025	Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Periode 30 Juni 2025 dan Periode 31 Desember 2025	Public Accounting Firm (KAP) Consulting Services for the Periods Ending 30 June 2025 and 31 December 2025

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
58	11-8-2025	PT Infotech Global Indonesia	Jasa Pendampingan & Tranfser Knowledge Audit Teknologi Informasi (TI) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	IT Audit Assistance and Knowledge Transfer Services for PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
59	12-8-2025	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Jasa Konsultan Analisis Restrukturisasi Struktur Organisasi Pengurus Bank NTT	Consulting Services for Organizational Structure Restructuring Analysis of Bank NTT Management
60	12-8-2025	LPPI	Pendidikan dan Pelatihan Program Pemimpin Cabang Angkatan 206 Tahun 2025	Training and Education Program for Branch Leadership Development – Batch 206 (2025)
61	26-8-2025	Jamkrindo	Penjaminan KUR	People's Business Credit (KUR)
62	26-8-2025	Askrida	Asuransi Kredit Serbaguna Pada Program Kredit Konsumtif	Multi-Purpose Credit Insurance under the Consumer Credit Program
63	27-8-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan KPR dan Kredit Properti Komersil	Penjaminan KPR dan Kredit Properti Komersil
64	27-8-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Konversi Produk Kredit	Mortgage (KPR) and Commercial Property Credit
65	28-8-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Host To Host Data Penjaminan	Utilization of Information Technology for Host-to-Host Guarantee Data System Integration
66	1-9-2025	PT Penjaminan Kredit Indonesia	Penjaminan Bank Garansi	Bank Guarantee Assurance Services
67	1-9-2025	PT Penjaminan Kredit Indonesia	Penjaminan Kredit Konstruksi Dan Pengadaan Barang/Jasa	Guarantee for Construction Credit and Procurement of Goods and Services
68	1-9-2025	PT Penjaminan Kredit Indonesia	Penjaminan Kredit Mikro Merdeka	Micro Credit Guarantee – Merdeka Program Guarantee
69	1-9-2025	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Pada PT BPD NTT Tahun 2025	Distribution of Housing Down Payment Subsidy Assistance through PT BPD NTT for 2025
70	1-9-2025	PT BPD Kalimantan Barat	GMRA	GMRA
71	11-9-2025	PT Aplikanusa Lintasarta	Berlangganan Sistem Jaringan Komunikasi Data	Berlangganan Sistem Jaringan Komunikasi Data
72	22-9-2025	PT Indomobil Cahaya Prima	Pekerjaan Pengadaan 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Air Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka	Data Communication Network Subscription Services
73	24-9-2025	PT Metalogic Infomitra	Maintenance Proswitching Selama 6 (Enam) Bulan	Proswitch System Maintenance Services for Six (6) Months
74	24-9-2025	PT Chubb Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerahasiaan	Non-Disclosure Agreement (NDA)
75	26-9-2025	BPD Jawa Timur	Implementasi Teknis Pada Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholder Agreement)	Technical Implementation under the Shareholders' Agreement

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
76	26-9-2025	PT Primadona Jasa Mandiri	Pengelolaan Tenaga Kerja Outsourching	Outsourced Workforce Management Services
77	2-10-2025	Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bildad Torino M. Thonak Sh & Rekan	Jasa Penasehat Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Legal Advisory Services for PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT)
78	7-10-2025	PT Sarana Pactindo	Addendum II Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Lumpsum Untuk Pengadaan Infrastuktur BI Fast	Second Addendum to the Lump-Sum Contract Agreement for BI-FAST Infrastructure Procurement
79	8-10-2025	KSO Pani5a Tour De Entete 2025 Sebagai Pelaksana Teknis Tour De Entete Tahun 2025	Event Tour De Entete 2025	Event Tour De Entete 2025
80	14-10-2025	Perumda Air Minum Kota Kupang	Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Pembayaran Jasa Tagihan Air Minum Secara Online	Provision of Online Payment Collection Services for Water Utility Bills
81	21-10-2025	PT Adikarya Tata Informasi	Jasa Konsultasi Pendampingan Pengadaan Penyedia Core Banking System	Consulting and Advisory Services for Core Banking System Provider Procurement
82	21-10-2025	PT Asuransi Jiwa Taspen	Pemasaran Produk Asuransi Taspen Hospital Cash Plan Bagi Nasabah PT BPD NTT Dengan Modal Blink Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank	Marketing of Taspen Hospital Cash Plan Insurance Products for PT BPD NTT Customers on a Referral Basis (Non-Bank Product Arrangement)
83	30-10-2025	PT Sinergy Informasi Pratama	Pengadaan Maintenance Web Aplication Firewall (WAF)	Procurement of Web Application Firewall (WAF) Maintenance Services
84	31-10-2025	PT Eureka Book House	Layanan Bank NTT Virtual Account Online	Bank NTT Online Virtual Account Services
85	3-11-2025	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Pertanggungan Asuransi Umum	General Insurance Coverage
86	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Multipurpose Financing	Multipurpose Financing Guarantee
87	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Kredit Produktif	Productive Credit Guarantee
88	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Kredit Konstruksi Dan Pengadaan Barang/Jasa	Guarantee for Construction Credit and Procurement of Goods and Services
89	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan KKB	Vehicle Ownership Loan (KKB) Guarantee
90	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan KPR Bersubsidi	Subsidized Mortgage (KPR) Guarantee
91	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan KPR & Kredit Properti Komersik	Mortgage (KPR) and Commercial Property Credit Guarantee
92	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Kredit Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Penjaminan Kredit Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

No	Tanggal PKS Date	Entitas Entity	Perihal	Subject
93	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)	Guarantee for Water Supply and Sanitation System Credit
94	4-11-2025	PT Penjaminan Kredit Daerah NTT	Penjaminan Pemanfaatan TI Sistem Digital Loan	Guarantee for Digital Loan System IT Utilization
95	5-11-2025	PT BPD Jawa Timur Tbk	Kerjasama Layanan Prioritas	Priority Banking Services Cooperation
96	6-11-2025	PT BPD Jawa Timur Tbk	Penggunaan Jasa Kustodian	Custodian Services Utilization
97	7-11-2025	Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Sewa Langganan Data Terminal Bloomberg	Bloomberg Terminal Data Subscription Services
98	1-12-2025	LPPI	Pendidikan Dan Pelatihan Program Pemimpin Cabang Angkatan 207	Training and Education Program for Branch Leadership Development – Batch 207
99	11-12-2025	PT Flobamora Mega Properti	Sewa Rumah Dinas Direktur Utama	Official Residence Rental for the President Director
100	11-12-2025	PT Flobamora Mega Properti	Sewa Rumah Dinas Direktur Keuangan Dan Treasury	Official Residence Rental for the Director of Finance and Treasury
101	15-12-2025	PT Inti Tullet Prebon Indonesia	Perjanjian Pemberian Jasa Money Broker	Money Broker Service Agreement
102	16-12-2025	PT Ekasurya Yasa Consulat	Jasa Konsultan Pajak Dalam Rangka Proses Gugatan Pajak Tahun 2023 di Pengadilan Pajak	Tax Consultant Services for Tax Litigation Process for Fiscal Year 2023 at the Tax Court
103	17-12-2025	PT Global Sarana Lintas Artha	Perjanjian Pemberian Jasa Money Broker	Money Broker Service Agreement
104	19-12-2025	PT Amstel Indonesia	Perjanjian Pemberian Jasa Money Broker	Money Broker Service Agreement
105	22-12-2025	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Disbursement of Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) Funds through Sejahtera Mortgage Loans for Low-Income Communities
106	29-12-2025	PT Pilar Dana	Perjanjian Pemberian Jasa Money Broker	Money Broker Service Agreement
107	30-12-2025	CV Natalia	Pengadaan Kalender Bank NTT Tahun 2026	Pengadaan Kalender Bank NTT Tahun 2026

TINJAUAN PER SEGMEN USAHA

REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Semakin ketatnya persaingan dalam sistem keuangan seiring dengan hadirnya bank-bank swasta dan bank BUMN, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun lembaga jasa keuangan nonbank seperti koperasi dan perusahaan *leasing* di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah tantangan sekaligus kesempatan. Oleh karena itu Bank NTT dituntut untuk terus melakukan pembenahan baik melalui sisi pelayanan yang *excellent*, menghadirkan produk dan layanan yang semakin variatif seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat melalui fitur-fitur baru pada kanal digital yang dimiliki, menjalankan prinsip-prinsip tata kelola secara baik serta memperkuat struktur permodalan dalam menghadapi kemungkinan risiko yang dapat terjadi.

As competition in the financial sector intensifies with the entry of private banks, state-owned banks, Rural Credit Banks (BPRs), and non-bank financial institutions such as cooperatives and leasing companies in the province of East Nusa Tenggara, Bank NTT is required to continue improving its operations—through excellent service, offering increasingly diverse products and services to meet the evolving needs of the public through new features on its digital channels, adhering to sound governance principles, and strengthening its capital structure to address potential risks that may arise.

SEGMEN PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

Sampai dengan 31 Desember 2025 Bank NTT berhasil mencatatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 15.93 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp 3.94 triliun atau naik 73.12 persen dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 sebesar Rp 11.99 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada Deposito sebagai indikator antusiasme masyarakat maupun korporasi atas imbal hasil yang dapat diperoleh melalui penempatan dana yang dimiliki pada instrument Deposito. Namun hal tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan giro dan tabungan.

THIRD-PARTY FUND DEPOSIT SEGMENT

As of December 31, 2025, Bank NTT successfully recorded Third-Party Funds (DPK) of Rp 15.93 trillion, an increase of Rp 3.94 trillion or a 73.12 percent rise compared to the 2024 figure of Rp 11.99 trillion. This increase was driven by growth in deposits, reflecting the enthusiasm of both individuals and corporations regarding the returns available through placing their funds in deposit instruments.

*) dalam jutaan rupiah *) in millions of rupiah

	2023	2024	2025	PERTUMBUHAN GROWTH	%	JUMLAH NoA TOTAL NoA 2025	JUMLAH NoA TOTAL NoA 2025
DANA PIHAK KETIGA THIRD-PARTY FUNDS	12.895.747	11.987.255	15.929.812	3.942.557	73.12	2.040.556	1.998.404
GIRO CHECKING	2.474.435	2.426.074	2.416.862	(9.212)	(0.38)	48.504	48.611
TABUNGAN SAVINGS	4.080.621	4.150.106	4.234.086	83.980	2.02	1.984.074	1.941.965
DEPOSITO DEPOSITS	6.340.691	5.411.075	9.278.864	3.867.789	71.48	7.978	7.828

Jenis Giro yang dimiliki oleh Bank NTT yaitu :

Giro Pemerintah Pusat :
fasilitas Rekening Giro yang diperuntukan bagi instansi pemerintah pusat, instansi vertikal yang merupakan perwakilan pemerintah pusat, Kementerian dan Instansi Lainnya.

Giro Pemerintah Daerah :
merupakan Fasilitas Rekening Giro yang diperuntukkan bagi Instansi / Lembaga di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam pengelolaan keuangan Kasda / Non Kasda.

Giro Swasta :
merupakan Fasilitas Giro yang diperuntukkan bagi perorangan, Badan Usaha, Koperasi atau Yayasan dan lain-lain.

Giro Valas :
merupakan Fasilitas Giro yang diperuntukkan bagi perorangan atau Badan Usaha dalam mata uang asing.

The types of demand deposits held by Bank NTT are:

Central Government Checking Account:
A checking account facility intended for central government agencies, vertical agencies acting as representatives of the central government, ministries, and other agencies

Local Government Giro:
A demand deposit account facility intended for agencies/institutions within the Regional Apparatus Organization. Provincial/City/Regency governments in the management of non-Kasda/non-Regional General Treasury funds.

Private Checking Account:
A checking account facility intended for individuals, business entities, cooperatives, foundations, and others.

Foreign Currency Checking Account:
A checking account facility intended for individuals or business entities in foreign currencies.

SUKU BUNGA GIRO BANK NTT PER 31 DESEMBER 2025

NTT BANK CURRENT ACCOUNT INTEREST RATES AS OF DECEMBER 31, 2025

TINGKATAN SALDO	2023	2024	2025	BALANCE LEVELS
Saldo s/d Rp. 5 juta	0.00 % pa	0.00 % pa	0.00 % pa	Balance up to Rp. 5 million
Saldo di atas Rp. 5 juta s/d Rp. 500 juta	0.25 % pa	0.25 % pa	0.25 % pa	Balances over Rp. 5 million up to Rp. 500 million
Saldo di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 10 miliar	0.50 % pa	0.50 % pa	0.50 % pa	Balances over Rp. 500 million to Rp. 10 billion
Saldo di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	0.75 % pa	0.75 % pa	0.75 % pa	Balances over Rp. 10 billion to Rp. 50 billion
Saldo di atas Rp. 50 miliar	1.00 % pa	1.00 % pa	1.00 % pa	Balances over Rp. 50 billion
Khusus Giro Swasta :				Special Private Checking Accounts:
Saldo di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	0.75 % pa	2.00 % pa	2.00 % pa	Balance over Rp. 10 billion up to Rp. 50 billion
Saldo di atas Rp. 50 miliar	1.00 % pa	2.50 % pa	2.50 % pa	Balances over Rp. 50 billion
TIERING SALDO GIRO VALAS :				FOREIGN CURRENCY CHECKING ACCOUNT BALANCE TIERING:
≤ USD 100	0.50% pa	0.50% pa	0.50% pa	≤ USD 100
>USD 100 s/d ≤10.000	0.75% pa	0.75% pa	0.75% pa	>USD 100 s/d ≤10.000
> USD 10.000	1.00% pa	1.00% pa	1.00% pa	> USD 10.000
Setoran Awal	500 USD	500 USD	500 USD	Setoran Awal

REALISASI GIRO TAHUN 2025

2025 CURRENT ACCOUNT REALIZATION

*)dalam jutaan *)in millions

NO	JENIS GIRO	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	TYPE OF DEPOSIT
1.	Giro Pemerintah Pusat	21.016	5.609	3.891	(9.203)	(30.63)	Central Government Checking Account
2.	Giro Pemerintah Daerah	1.749.950	1.695.724	1.724.714	28.990	1.71	Local Government Checking Accounts
3.	Giro Swasta	703.469	724.741	688.257	(36.484)	(5.03)	Private Checking Accounts
4.	Giro Valas	-	16	25	9	56.25	Foreign Currency Checking
TOTAL GIRO		2.474.435	2.426.090	2.416.887	(9.203)	(0.38)	TOTAL CHECKS

RENCANA PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Giro pemerintah daerah masih mendominasi portofolio Giro Bank NTT sepanjang tahun 2025. Kedepannya Bank NTT akan terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui sosialisasi khususnya terkait percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan pemerintah daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan produk-produk digital Bank NTT seperti *Cash Management System* (CMS) Surat Perintah Pencairan Dana Online (SP2D Online), pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah, pembayaran pajak kendaraan melalui Mobile Banking Bank NTT atau melalui Payment Point SAMSAT Bank NTT, pembayaran 9 (Sembilan) Pajak Daerah dan pembayaran PDAM melalui *Electronic Data Capture* (EDC) dan *Mobile Banking* Bank NTT.

Potensi pasar dari produk-produk giro lainnya juga akan terus dimaksimalkan untuk menambah penghimpunan Giro khususnya giro swasta dan giro valas melalui program-program kreatif/gimmick yang menarik.

TABUNGAN

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), jika memenuhi persyaratan yang disepakati, namun penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

DEVELOPMENT PLAN AND MARKETING STRATEGY

Local government demand deposits continued to dominate Bank NTT's demand deposit portfolio throughout 2025. Moving forward, Bank NTT will continue to strengthen its collaboration with local governments through outreach efforts, particularly regarding the acceleration and expansion of local government financial digitalization, to achieve transparent and accountable government financial management through the use of Bank NTT's digital products such as the Cash Management System (CMS), Online Fund Disbursement Order (SP2D Online), and the use of the Indonesia (KKI) for the Local Government Segment, Vehicle Tax Payments via Bank NTT Mobile Banking or through Bank NTT's SAMSAT Payment Points, and Payment of 9 (Nine) Local Taxes via Bank NTT's Electronic Data Capture (EDC).

The market potential of other checking account products will also continue to be maximized to increase checking account deposits through creative and engaging programs.

SAVINGS

Savings are customer deposits that can only be withdrawn at the counter and through ATMs if the agreed-upon requirements are met. However, withdrawals cannot be made using checks or other equivalent instruments..

Realisasi penghimpunan Tabungan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The projected savings collection for 2025 is as follows:

*)dalam jutaan *)dalam jutaan

PRODUK	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp)	%	PRODUCT
TABUNGAN	4.080.621	4.150.106	4.234.086	83.980	2.02	**SAVINGS**
Tabungan Simpeda	1.088.469	1.088.469	1.084.316	(4.153)	(0.38)	**Simpeda Savings**
Tabungan Flobamora	1.503.152	1.503.152	1.496.452	(6.700)	(0.45)	**Flobamora Savings**
Tabungan Khusus PNS	1.030.458	1.030.458	1.078.135	47.677	4.63	**Special Savings for Civil Servants**
Tabungan Pensiun	16.437	16.437	34.547	18.110	110.18	**Retirement Savings**
Tabungan Flobamora Valas	1.249	1.249	2.231	982	78.61	**Flobamora Foreign Currency Savings**
Tabungan Simpel	63.105	63.105	67.577	4.472	7.09	**T Simpel Combination**
Tabungan Pesiar	327	327	462	135	41.28	**Cruise Savings**
TabunganKu	446.909	446.909	470.366	23.457	5.25	**My Savings**

SUKU BUNGA TABUNGAN PER 31 DESEMBER 2025

SAVINGS INTEREST RATES AS OF DECEMBER 31, 2025

TINGKATAN SALDO	2023	2024	2025	BALANCE BRACKETS
Saldo s/d Rp. 50.000	0.00 % pa	0.00 % pa	0.00 % pa	Balance up to Rp. 50,000
Saldo di atas Rp. 50.000 s/d Rp. 5 juta	0.25 % pa	0.25 % pa	0.25 % pa	Balances over Rp. 50,000 up to Rp. 5 million
Saldo di atas Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta	0.30 % pa	0.30 % pa	0.30 % pa	Balances over Rp. 5 million to Rp. 100 million
Saldo di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 1 miliar	0.50 % pa	0.50 % pa	0.50 % pa	Balances over Rp. 100 million to Rp. 1 billion
Saldo di atas Rp. 1 miliar	1.00 % pa	1.00 % pa	1.00 % pa	Balances over Rp. 1 billion
Khusus Tabungan Tenun:				Special for Tenun Savings:
Saldo s/d Rp. 50.000	0.00% pa	0.00% pa	0.00% pa	Balance up to Rp. 50,000
Saldo diatas Rp. 50.000 s/d Rp. 5 juta	0.25% pa	1.00% pa	0.75% pa	Balance over Rp. 50,000 up to Rp. 5 million
Saldo diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta	0.30% pa	2.00% pa	2.00% pa	Balances over Rp. 5 million to Rp. 100 million
Saldo diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 1 miliar	0.50% pa	3.00% pa	3.00% pa	Balances over Rp. 100 million to Rp. 1 billion
Saldo diatas Rp. 1 miliar	1.00% pa	6.00% pa	4.00% pa	Balances over Rp. 1 billion
TIERING SALDO TABUNGAN VALAS :				FOREIGN CURRENCY SAVINGS ACCOUNT TIERING:
≤ USD 100	0.25% pa	0.25% pa	0.25% pa	≤ USD 100
>USD 100 - ≤ USD 10.000	0.50% pa	0.50% pa	0.50% pa	>USD 100 - ≤ USD 10.000
>USD 10.000 - ≤ USD 200.000	0.75% pa	0.75% pa	0.75% pa	>USD 10.000 - ≤ USD 200.000
>USD 200.000	1.00% pa	1.00% pa	1.00% pa	>USD 200.000
Setoran Awal	USD 100	USD 100	USD 100	Setoran Awal
Saldo Minimum	USD 100	USD 100	USD 100	Saldo Minimum

Produk Tabungan yang dimiliki Bank NTT hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

The savings products offered by Bank NTT through 2025 are as follows::

Tabungan Simpeda

Tabungan SIMPEDA atau Simpanan Pembangunan Daerah merupakan tabungan milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang diluncurkan pada bulan April 1990.

Simpeda Savings

SIMPEDA Savings, or Regional Development Savings, is a savings product of Regional Development Banks (BPD) launched in April 1990. SIMPEDA Savings was designed

Tabungan SIMPEDA dirancang sebagai alat pemersatu Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.

Tabungan Flobamora

Merupakan produk Tabungan Bank NTT yang fungsi serta keunggulannya sama dengan Tabungan Simpeda namun berbeda dalam hal undian berhadiah.

Tabungan Ziarah

Diluncurkan pada tahun 2008 dengan nama awal Tabungan Ziarah sebelum diganti dengan *call name*: Tabungan Pesiar, merupakan Tabungan yang khusus disiapkan bagi umat beragama untuk menabung sesuai rencana pelaksanaan ibadah sucinya atau diperuntukkan bagi nasabah yang merencanakan perjalanan wisata ke kota-kota suci seperti Jerusalem, Vatikan dan sebagai Tabungan Haji bagi yang beragama Muslim.

TabunganKu

Merupakan Tabungan Nasional program Bank Indonesia, yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa dan masyarakat menengah kebawah dengan setoran awal minimal Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

Tabungan Simpel

Merupakan Tabungan Nasional "Simpanan Pelajar" produk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diperuntukan bagi pelajar sejak usia dini /PAUD hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan setoran awal minimal Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Tabungan Pensiun

Merupakan tabungan berjangka yang pengendapan dan simpanannya sampai dengan jangka waktu batas usia pensiun (BUP), tidak dikenakan biaya administrasi dan suku bunga menarik. Tabungan Pensiun Bank NTT, singkatan/call name "TENUN NTT" merupakan pengembangan produk baru simpanan tabungan Bank NTT.

Tabungan Flobamora Valas

Merupakan produk tabungan dalam mata uang asing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

RENCANA PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Dengan semakin beragamnya produk tabungan yang dimiliki Bank NTT menghadirkan banyak pilihan variatif bagi masyarakat untuk menabung sesuai dengan kebutuhan. Promosi, sosialisasi, program-program khusus/gimmick, pemberian voucher tabungan Bank NTT bekerjasama dengan sekolah, restaurant, café,

as a unifying tool for Regional Development Banks (BPD) throughout Indonesia.

Flobamora Savings

This is a Bank NTT savings product with the same functions and advantages as the Simpeda Savings Account, but differs in terms of prize draws.

Pesiar Savings

Launched in 2008 under the original name Pilgrimage Savings, this savings account is specifically designed for religious believers to save for their planned religious pilgrimages or for customers planning trips to holy cities such as Jerusalem and the Vatican, and serves as a Hajj savings account for Muslims.

TabunganKu

This is a National Savings program by Bank Indonesia intended for students and the lower-middle class, with a minimum initial deposit of Rp. 20,000 (twenty thousand rupiah).

Simpel Savings

This is the "Student Savings" National Savings product from the Financial Services Authority (OJK). It is intended for students from early childhood education (PAUD) through high school (SMU) with a minimum initial deposit of Rp. 5,000 (five thousand rupiah).

Retirement Savings

This is a fixed-term savings account where deposits are held until the retirement age limit (RAL); there are no administrative fees and the interest rate is attractive. Bank NTT's Retirement Savings Account, known as "TENUN NTT," is a new savings product developed by Bank NTT.

Flobamora Foreign Currency Savings

This is a foreign currency savings product guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

DEVELOPMENT PLAN AND MARKETING STRATEGY

With the increasing variety of savings products offered by Bank NTT, the public now has a wide range of options to save according to their needs. Promotions, outreach, special programs/gimmicks, and the distribution of Bank NTT savings vouchers in collaboration with schools, restaurants, cafes, and shopping centers can serve as a

tempat wisata/hiburan maupun pusat perbelanjaan dapat menjadi media untuk menarik simpati masyarakat menjadi nasabah Bank NTT.

DEPOSITO

Merupakan simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi Perorangan. Pemerintah maupun Badan Usaha dengan jangka waktu bervariasi antara 1 bulan sampai dengan 24 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*) sesuai konfirmasi awal dan dapat dijadikan jaminan kredit (*cash collateral*).

Bank NTT memiliki produk Deposito dalam mata uang rupiah dan dalam mata uang /valuta asing.

means to attract the public's interest in becoming Bank NTT customers.

TIMED DEPOSITS

These are time deposits intended for individuals, the government, and business entities with terms ranging from 1 month to 24 months and can be automatically renewed (automatic rollover) in accordance with the initial agreement and can be used as loan collateral (cash collateral).

As of December 31, 2025, Bank NTT offers deposit products in Indonesian rupiah and in foreign currencies.

SUKU BUNGA DEPOSITO BANK NTT

BANK NTT DEPOSIT INTEREST RATES

JANGKA WAKTU DEPOSITO RUPIAH	2023	2024	2025	RUPIAH DEPOSIT TERMS
Jangka Waktu 1 Bulan	3.00% pa	3.00% pa	3.00% pa	1-Month Term
Jangka Waktu 3 Bulan	3.00% pa	3.00% pa	3.00% pa	3-Month Term
Jangka Waktu 6 Bulan	3.25% pa	3.25% pa	3.25% pa	6-Month Term
Jangka Waktu 9 Bulan	3.25% pa	3.25% pa	3.25% pa	9-Month Term
Jangka Waktu 12 Bulan	3.75% pa	3.75% pa	3.75% pa	12-Month Term
Jangka Waktu 24 Bulan	3.75% pa	3.75% pa	3.75% pa	24-Month Term
JANGKA WAKTU DEPOSITO VALAS				FOREIGN CURRENCY DEPOSIT TERM
Jangka Waktu 1 Bulan	2.25% pa	2.25% pa	3.00% pa	1-Month Term
Jangka Waktu 3 Bulan	2.50% pa	2.50% pa	3.00% pa	3-Month Term
Jangka Waktu 6 Bulan	2.75% pa	2.75% pa	3.25% pa	6-Month Term
Jangka Waktu 12 Bulan	3.00% pa	3.00% pa	3.75% pa	12-Month Term
Jangka Waktu 24 Bulan	3.00% pa	3.00% pa	3.75% pa	24-Month Term
MINIMAL PEMBUKAAN AWAL ≥ USD 500				MINIMUM INITIAL DEPOSIT ≥ USD 500

REALISASI DEPOSITO RUPIAH DAN VALAS TAHUN 2025

RUPIAH AND FOREIGN CURRENCY DEPOSIT REALIZATION FOR 2025

*)dalam jutaan *)in millions

PRODUK	2023	2024	2025	PERTUMBUHAN GROWTH	%	Product
DEPOSITO RUPIAH	6.340.691	5.410.855	9.278.634	3.867.779	71.48	RUPIAH DEPOSITS
DEPOSITO VALAS *) dalam rupiah	32	219	230	11.29	5.15	**FOREIGN CURRENCY DEPOSITS***) in rupiah
TOTAL DEPOSITO RUPIAH+VALAS	6.340.723	5.411.074	9.278.864	3.867.790	71.48	**TOTAL DEPOSITS**

RENCANA PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Strategi dalam pemasaran produk Deposito selain melalui promosi, sosialisasi dan pemberian *special rate* untuk penempatan dana dalam jangka waktu tertentu melalui pemberian pemahaman terhadap deposito

DEVELOPMENT PLAN AND MARKETING STRATEGY

SIn addition to promotions, outreach, and special rates for deposits over specific terms, the marketing strategy for deposit products involves educating customers about deposits as an investment tool and as a liquid

sebagai alat investasi dan juga sebagai alat berjaga-jaga yang *liquid* untuk dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan.

safety net, as prospective customers can choose deposit terms that align with their desired timeframes.

SEGMEN KREDIT

CREDIT SEGMENTS

KREDIT YANG DISALURKAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

LOANS DISBURSED BY ECONOMIC SECTOR

*)dalam jutaan *)in millionsn

NO	SEKTOR EKONOMI	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	ECONOMIC SECTOR
1.	Rumah tangga	9.916.205	10.873.539	12.320.477	1.446.938	13.31	Households
2.	Perdagangan besar dan eceran	766.298	645.007	532.748	(112.259)	(17.40)	Wholesale and retail trade
3.	Konstruksi	877.206	491.555	460.484	(31.071)	(6.32)	Construction
4.	Industri pengolahan	363.319	213.850	121.121	(92.729)	(43.36)	Manufacturing
5.	Real estate. usaha persewaan dan perusahaan jasa	135.451	38.343	202.719	164.376	428.70	Real estate, rental businesses, and service companies
6.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	159.622	126.278	111.240	(15.038)	(11.91)	Provision of accommodation and food and beverage services
7.	Pertanian. perburuan dan kehutanan	105.984	76.998	39.946	(37.052)	(48.12)	Agriculture, hunting, and forestry
8.	Jasa kemasyarakatan. sosial budaya. hiburan dan perorangan lainnya	1.990	76.103	55.283	(20.820)	(27.36)	Community services. Social, cultural, entertainment, and other personal services
9.	Perikanan	33.674	32.902	26.381	(6.521)	(19.82)	Fisheries
10.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	19.514	23.476	20.712	(2.764)	(11.77)	Health care and social servicesl
11.	Transportasi. pergudangan dan komunikasi	28.601	19.912	14.568	(5.344)	(36.68)	Transportation, warehousing, and communications
12.	Listrik. gas dan air	23.894	19.681	13.824	(5.857)	(29.76)	Electricity, gas, and water
13.	Jasa pendidikan	20.209	11.992	10.151	(1.841)	(18.14)	Education servicesn
14.	Pertambangan dan Penggalian	21.360	20.854	15.899	(4.955)	(23.76)	Mining and Quarrying
15.	Perantara keuangan	884	96.097	150	(9.595)	(99.84)	Financial intermediaries
	JUMLAH	12.474.211	12.766.585	13.945.702	1.179.117	9.24	TOTAL
	Penyisihan kerugian penurunan nilai	(262.691)	(347.945)	(466.590)	(118.645)	(34.10)	Provision for losses impairment
	JUMLAH BERSIH	**12.211.520**	**12.418.640**	**13.479.113**	**1.060.473**	8.54	**NET TOTAL**

SUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK) TAHUN 2025

BASIC LENDING RATE (BLR) FOR 2025

PERIODE	KREDIT KORPORASI Corporate Loans (%)	KREDIT RITEL Retail Loans (%)	KREDIT MIKRO Micro Loans (%)	KREDIT KONSUMSI (%)		PERIOD
				KPR Mortgage	NON KPR Non-Mortgage	
31 Januari 2025	8.75	0.00	9.74	8.68	8.88	January 31, 2025
28 Februari 2025	8.72	0.00	9.75	8.76	8.78	February 28, 2025
31 Maret 2025	8.16	0.00	8.95	8.08	8.08	March 31, 2025
30 April 2025	9.02	0.00	9.96	8.70	8.70	April 30, 2025
31 Mei 2025	7.78	0.00	8.55	7.77	7.94	May 31, 2025
30 Juni 2025	7.78	0.00	8.53	7.72	7.90	June 30, 2025
31 Juli 2025	10.66	0.00	12.02	10.34	10.90	July 31, 2025
31 Agustus 2025	10.55	0.00	11.89	10.23	10.76	August 31, 2025
30 September 2025	10.48	0.00	11.90	10.15	10.63	September 30, 2025
31 Oktober 2025	10.63	0.00	12.09	10.28	10.78	October 31, 2025
30 November 2025	11.25	0.00	12.88	10.88	10.88	November 30, 2025
31 Desember 2025	11.09	0.00	12.70	10.92	10.92	December 31, 2025

REALISASI PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT TAHUN 2025

CREDIT DISBURSEMENT BY CREDIT TYPE IN 2025

*dalam jutaan *)in millions

	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	
Kredit	12.474.212	12.766.586	13.945.702	1.179.116	9.24	Credit
Modal Kerja	1.495.795	940.308	972.101	31.793	3.38	Working Capital
Investasi	348.772	129.435	289.226	159.791	123.45	Investments
Sindikasi	713.803	462.611	365.235	(97.376)	(21.05)	Syndication
Konsumsi	9.471.936	10.760.481	11.822.597	1.062.116	9.87	Consumption
Karyawan	443.906	473.751	496.543	22.792	4.81	Internal Employees

*dalam jutaan *)in millions

	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	
Kredit	12.474.212	12.766.586	13.945.702	1.179.116	9.24	Kredit
Modal Kerja	1.495.795	940.308	972.101	31.793	3.38	Modal Kerja
Investasi	1.062.575	592.046	654.461	62.415	10.54	Investasi
Konsumsi	9.915.842	11.234.232	12.319.140	1.084.908	9.66	Konsumsi

KREDIT YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS TAHUN 2025

LOANS GRANTED BASED ON COLLECTIBILITY IN 2025

*)dalam jutaan *)in millions

KOLEKTIBILITAS	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp)	%	COLLECTIBILITY
KREDIT PER KOLEKTIBILITAS :	12.474.212	12.766.585	13.945.703	1.179.118	9.24	**LOANS BY COLLECTIBILITY::**
Lancar	11.609.198	11.869.553	13.008.455	1.138.902	9.60	**Smooth**
Dalam Perhatian Khusus	506.773	457.917	474.624	16.707	3.65	**Under Special Attention**
Kurang Lancar	4.816	2.736	6.782	4.046	147.88	**Less Fluent**
Diragukan	10.308	9.488	22.984	13.496	142.24	**Doubtful**
Macet	343.117	426.891	432.858	5.967	1.40	**Traffic**

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI TAHUN 2025

PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES FOR 2025

*)dalam jutaan *)in millions

ASET	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp)	%	ASSETS
CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	(262.729)	(347.978)	(466.597)	(118.619)	(34.09)	ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSESI
Kredit Yang Diberikan	(262.691)	(347.945)	(466.589)	(118.644)	(34.10)	Loans Granted
Aset Lainnya	(28)	(29)	(8)	(21)	(72.41)	Other Assets
Surat Berharga	(10)	(4)	0	(4)	(100)	Securities

TREASURY

Aktivitas Treasury merupakan salah satu komponen penting dalam bisnis bank khususnya dalam mengatur likuiditas, melakukan pemenuhan Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia serta melakukan aktivitas bisnis yang mendatangkan pendapatan bagi bank di pasar modal dan pasar uang.

Sejak memperoleh status sebagai Bank Devisa pada tahun 2024 melalui surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-62/D.03/2023 tentang Pemberian Izin untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing bagi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Agustus 2023 maka Bank NTT telah melaksanakan operasional bisnis Valuta Asing.

Kegiatan bidang Treasury yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penempatan Pasar Uang:
   a. Antar Bank
      1) *Deposito On Call*
      2) *Interbank Call Money*
      3) *Reverse Repo* Surat Berharga Negara

TREASURY

Treasury activities are a key element of banking operations, particularly in managing liquidity, meeting the Minimum Reserve Requirement at Bank Indonesia, and conducting business activities that generate revenue for the bank in the capital and money markets.

Since obtaining the status of a Foreign Exchange Bank in 2024 pursuant to the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-62/D.03/2023 regarding the Granting of a License to Conduct Foreign Exchange Business Activities for PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dated August 31, 2023, Bank NTT has been able to conduct foreign exchange business operations.

Treasury activities conducted in 2025 are as follows::

1. Money Market Placements:
   a. Interbank
      1) On-Call Deposits
      2) Interbank Call Money
      3) Reverse Repo of Government Securities

b. Operasi Moneter Bank Indonesia
   1) Deposit *Facility*
   2) *Term* Deposit
   3) *Reverse Repo* Surat Berharga Negara
   4) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)

2. Pemenuhan Likuiditas:
   a. Pinjaman : *Term Loan*
   b. Pinjaman : *Pooling Fund*
   c. Penerbitan *Negotiable Certificate of* Deposit (NCD)
3. Aktivitas Trading
   a. *Borrowing Placement* Pasar Uang Antar Bank
   b. Jual Beli Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)
4. Aktivitas Valuta Asing
   a. Jual Beli TT Valuta Asing : USD
   b. Jual Beli Bank Notes : AUD, CNY, EUR, JPY, MYR, SGD, USD
5. Kerjasama dengan *Counterparty*
   a. *Limit Counterparty*
   b. *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA)
   c. Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI)
   d. Kerjasama dengan *Broker*
6. Pelaporan
   a. Laporan Harian atas Aktivitas:
      - Laporan ABA/ABP
      - Laporan Proyeksi Arus Kas
      - Laporan *Loanable Fund*
      - Laporan *Bank Notes*
      - Laporan Aktivitas Divisi Treasury
   b. Laporan pada Regulator:
      - Laporan Likuiditas (AL/NCD & AL/DPK)
      - Laporan BI Antasena Harian
      - Laporan Kepelilikan Sertifkat Treasury
      - Laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
      - Laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
      - Laporan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB)
      - Laporan OBOX harian
      - Laporan Apolo Harian
      - Laporan *Maturity*
      - Laporan Rating Bank

b. Bank Indonesia Monetary Operations
   1) Deposit Facility
   2) Term Deposit
   3) Reverse Repo of Government Securities
   4) Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)

2. Liquidity Provision:
   a. Loans: Term Loans
   b. Loans: Pooling Fund
   c. Issuance of Negotiable Certificates of Deposit (NCD)
3. Trading Activities
   a. Borrowing Interbank Money Market Placements
   b. Trading of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)
4. Foreign Exchange Activities
   a. Foreign Currency TT Trading: USD
   b. Bank Note Trading: AUD, CNY, EUR, JPY, MYR, SGD, USD
5. Cooperation with Counterparties
   a. Counterparty Limits
   b. Global Master Repurchase Agreement (GMRA)
   c. Indonesian Master Derivatives Agreement (PIDI)
   d. Collaboration with Brokers
6. Reporting
   a. Daily Activity Reports:
      - ABA/ABP Reports
      - Cash Flow Projection Report
      - Loanable Funds Report
      - Bank Notes Report
      - Treasury Division Activity Report
   b. Reports to Regulators::
      - Liquidity Report (AL/NCD & AL/DPK)
      - Daily BI Antasena Report
      - Treasury Certificate Ownership Report
      - Liquidity Coverage Ratio (LCR) Report
      - Net Stable Funding Ratio (NSFR) Report
      - Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Report
      - Daily OBOX Report
      - Daily Apolo Report
      - Maturity Report
      - Bank Rating Report

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

KINERJA KEUANGAN BANK NTT TAHUN 2025

Financial Performance of Bank NTT for the Year 2025

LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2025

2025 INCOME STATEMENT

LABA (RUGI)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	PROFIT (LOSS)
Pendapatan Bunga	1.575.856	1.639.359	1.678.299	38.940	2.38	Interest Income
Beban Bunga	535.813	556.619	597.016	40.397	7.26	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	1.040.043	1.082.740	1.081.283	(1.457)	(0.13)	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	126.428	134.630	144.025	9.395	6.98	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	1.017.481	991.652	1.041.700	50.048	5.05	Other Operating Expenses
Laba Operasional	148.990	225.717	183.608	(42.109)	(18.66)	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(445)	5.391	(11.778)	(17.169)	(318.48)	Non-Operating Income (Expense)
Laba Sebelum Pajak	148.545	231.109	171.831	(59.278)	(25.65)	Profit Before Tax
Pajak Penghasilan	38.392	54.272	79.213	24.941	45.96	Income Tax
Laba Bersih Setelah Pajak	110.151	176.837	92.618	(84.219)	(47.63)	Net Income After Tax
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	(5.579)	4.423	(35.344)	(39.767)	(899.10)	Other Comprehensive Income (Expense) Not Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Laba Komprehensif	104.573	180.287	148.479	(31.808)	(17.64)	Total Comprehensive Income
Laba Bersih Perlembar Saham (Rp.)	543	851	431	(420)	(49.35)	Net Income Per Share (Rp.)

PENDAPATAN BUNGA TAHUN 2025

INTEREST INCOME FOR 2025

*)dalam jutaan *)in millions

PENDAPATAN BUNGA	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	INTEREST INCOME
Kredit yang diberikan	1.393.014	1.454.499	1.502.917	48.419	3.33	Loans granted
Penempatan pada bank lain	28.396	34.361	24.564	(9.797)	(28.51)	Placements with other banks
Efek-efek untuk tujuan investasi	118.358	109.409	115.310	5.901	5.39	Securities held for investment purposes
Penempatan Pada Bank Indonesia	36.088	41.090	35.508	(5.581)	(13.58)	Placements with Bank Indonesia
Total Pendapatan Bunga	1.575.856	1.639.358	1.678.299	38.941	2.38	Total Interest Income

PENDAPATAN BUNGA KREDIT BERDASARKAN JENIS KREDIT TAHUN 2025

LOAN INTEREST INCOME BY LOAN TYPE IN 2025

*)dalam jutaan *)in millions

PENDAPATAN BUNGA KREDIT	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	LOAN INTEREST INCOME
Kredit Konsumsi	11.234.232	12.319.140	1.084.908	9.66	Consumer Credit	
Kredit Modal Kerja	940.308	972.101	31.793	3.38	Working Capital Loans	
Kredit Investasi	592.046	654.461	62.415	10.54	Investment Loans	
Jumlah Pendapatan Bunga Berdasarkan Jenis Kredit	12.766.586	13.945.702	1.179.116	9.24	Total Interest Income by Loan Type	

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA TAHUN 2025

OTHER OPERATING INCOME FOR 2025

*)dalam jutaan *)in millionsn

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	OTHER OPERATING REVENUE
Provisi & komisi selain dari kredit yang diberikan	50.371	58.194	65.250	7.056	12.12	Fees and commissions other than those from loans granted
Lain-lain	76.056	76.435	78.775	2.340	3.06	Other
Total Pendapatan Operasional Lainnya	126.427	134.629	144.025	9.396	6.98	Total Other Operating Income

BEBAN BUNGA YANG HARUS DIBAYARKAN TAHUN 2025

INTEREST EXPENSE PAYABLE IN 2025

*)dalam jutaan *)in millions

BEBAN BUNGA	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	Interest Expense
Giro	19.731	26.916	24.337	(2.579)	(9.58)	Current Accounts
Tabungan	36.619	35.313	34.766	(547)	(1.55)	Savings Accounts
Deposito	383.708	384.502	405.676	21.174	5.51	Time Deposits
Simpanan Dari Bank Lain	2.709	18.055	1.191	(16.864)	(93.40)	Deposits from Other Banks
Efek-Efek Yg Diterbitkan	12.921	4.351	14.924	10.573	243	Debt Securities Issued
Premi Asuransi Untuk Program Penjaminan Dana Nasabah	25.852	28.615	27.824	(791)	(2.76)	Insurance Premiums for Deposit Guarantee Program
Pinjaman Yg Diterima	26.236	30.801	59.736	28.935	93.94	Borrowings Received
Lain-Lain	28.036	28.065	28.562	497	1.77	Others
Total Beban Bunga	**535.812**	**556.618**	**597.016**	**40.398**	7.26	**Total Interest Expenses**

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA TAHUN 2025

OTHER OPERATING EXPENSES FOR 2025

*)dalam jutaan *)in millions

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	OTHER OPERATING EXPENSES
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset	208.857	135.865	184.730	48.865	23.40	Provision for Impairment Losses on Assets
Beban Tenaga Kerja	474.990	548.071	535.926	(12.145)	(2.56)	Labor Costs
Beban Umum dan Administrasi	333.634	307.716	321.044	13.328	3.99	General and Administrative Expenses
Total Beban Operasional Lainnya	1.017.481	991.652	1.041.700	50.048	4.92	Total Other Operating Expenses

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL TAHUN 2025

NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) FOR 2025

*)dalam jutaan *)dalam jutaan

Keterangan	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	Keterangan
Pendapatan (Beban) Non Operasional	14.513	30.180	9.877	(20.303)	(67.27)	Pendapatan (Beban) Non Operasional

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman diterima yang masih dikelola Bank NTT sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

LOANS RECEIVED

Loans received that are still managed by Bank NTT through 2025 are as follows:

*)dalam jutaan *)in millions

LIABILITAS	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	LIABILITIES
Pinjaman yang Diterima :	1.074.913	905.345	745.109	(160.236)	(9.58)	PT. North Sumatra Regional Development Bank
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	200.000	300.000	100	50	PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)	398.893	250.083	249.944	(0.14)	(0.06)	Assets Under Management
Dana Kelolaan	176.019	175.262	195.165	19.903	11.36	PT. East Java Regional Development Bank
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	-	280.000	-	(280)	(100)	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Loans received are funds received from third parties with an obligation to repay in accordance with the terms of the loan agreement.

ASET ASSET

*)dalam jutaan *)in millions

ASET	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas	526.952	594.934	687.296	92.362	15.52	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.616.684	1.510.735	997.936	(512.799)	(33.94)	Current accounts at Bank Indonesia
Giro pada bank lain	16.087	18.092	16.070	(2.022)	(11.18)	Checking accounts at other banks
Penempatan pada BI & bank lain	1.344.804	399.492	3.137.850	2.738.358	685.46	Placements with BI & other banks
Kredit yang diberikan	12.474.212	12.766.585	13.945.702	1.179.117	9.24	Loans granted
Penyisihan kerugian penurunan nilai :	(262.719)	(347.945)	(466.598)	(118.620)	34.09	Provision for impairment loss:
- Kredit yang diberikan	(262.691)	(347.945)	(466.590)	(118.645)	34.10	- Loans granted
- Aset Surat Berharga	(10)	(4)	-	(4)	(100)	- Marketable Securities
- Aset lainnya	(28)	(29)	(8)	(21)	(72.41)	- Other assets
Efek-efek untuk tujuan investasi	985.053	907.845	941.920	34.075	3.75	Securities held for investment purposes
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		-	258.791	258.791	100	Securities purchased under resale agreements
TOTAL ASET LANCAR	16.701.073	15.849.705	19.518.967	3.669.262	23.15	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap	623.111	658.129	700.793	42.664	6.48	Fixed Assets
- Akumulasi penyusutan aset tetap	(336.540)	(397.841)	(377.116)	20.725	(5.21)	- Accumulated depreciation of fixed assets
Aset tidak berwujud	14.036	15.250	15.567	317	2.08	Intangible assets
- Akumulasi penyusutan aset tidak berwujud	(12.999)	(13.252)	(13.773)	(521)	3.93	- Accumulated depreciation of intangible assets
Aset pajak tangguhan	37.634	47.692	51.623	3.931	8.24	Deferred tax assets
Aset lain-lain	299.129	274.329	196.824	(77.505)	(28.25)	Other assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**624.371**	584.307	573.918	(10.389)	(1.78)	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	17.325.444	16.434.012	20.092.885	3.658.873	22.26	TOTAL ASSETS

EKUITAS

EQUITY

*)dalam jutaan *)in millions

Ekuitas	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	Equity
Modal ditempatkan & disetor penuh	2.045.186	2.114.551	2.209.537	94.986	4.49	Paid-in Capital
Tambahan modal disetor :	12.714	11.747	5.247	(11.742)	(55.33)	Additional paid-in capital::
- Modal Sumbangan	247	247	247	0	0	- Contributed Capital
- Dana Setoran Modal	12.467	11.500	5.000	(6.500)	(56.52)	- Capital Contribution Fund
Keuntungan(kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(71.674)	(68.224)	95.792	27.568	40.41	Actuarial gain (loss) defined benefit plan
Cadangan Umum	451.791	465.559	487.664	22.105	4.75	General Reserve
Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-	Last Year's Profit
Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak	110.151	176.837	92.618	(84.219)	(47.63)	Net Income for the Current Year
JUMLAH EKUITAS	**2.548.168**	**2.700.470**	**2.811.274**	**110.804**	**4.10**	**TOTAL EQUITY**

Modal Ditempatkan dan Disetor serta Tambahan Modal Disetor

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendominasi kepemilikan saham Seri A sebesar 23.76 % selaku Pemegang Saham Utama, Pemerintah Kota Kupang dengan kepemilikan saham sebesar 5.88 %, Bank Jatim Tbk sebesar 3.23 % serta Pemerintah Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur menguasai kepemilikan dengan persentase saham sebesar 67.07 % dari total jumlah saham sedangkan sisanya sebesar 0.06% dimiliki oleh perorangan dalam bentuk saham Seri B.

Paid-in Capital and Additional Paid-in Capitalr

In 2025, the East Nusa Tenggara Provincial Government held a 23.76% stake in Series A shares as the Major Shareholder, the Kupang City Government held a 5.88% stake, Bank Jatim Tbk with 3.23%, and the Regency Governments throughout East Nusa Tenggara held a combined 67.07% of the total shares, while the remaining 0.06% was held by individuals in the form of Series B shares.

Susunan Pemegang Saham Bank NTT per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

The composition of Bank NTT's shareholders as of December 31, 2025, is as follows:

*)dalam jutaan *)in millions

SAHAM SERI A SERIES A SHARES	LEMBAR SAHAM SHARES	PERSENTASE PERCENTAGE (%)	NOMINAL (Rp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Provincial Government	52.500.755	23.76	525.007.550.000
Pemerintah Kota Kupang Kupang City Government	13.000.000	5.88	130.000.000.000
Pemerintah Kabupaten : Regency Government:			
Pemerintah Kabupaten Kupang Kupang Regency Government	12.500.000	5.66	125.000.000.000

*)dalam jutaan *)in millions

SAHAM SERI A SERIES A SHARES	LEMBAR SAHAM SHARES	PERSENTASE PERCENTAGE (%)	NOMINAL (Rp)
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara North Central Timor Regency Government	11.565.422	5.23	115.654.220.000
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur East Manggarai Regency Government	10.058.282	4.55	100.582.820.000
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan South Central Timor Regency Government	10.006.577	4.53	100.065.770.000
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Southwest Sumba Regency Government	9.678.175	4.38	96.781.750.000
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur East Sumba Regency Government	9.228.066	4.18	92.280.660.000
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat West Sumba Regency Government	9.034.031	4.09	90.340.310.000
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Rote Ndao Regency Government	9.027.261	4.09	90.272.610.000
Pemerintah Kabupaten Malaka Malaka Regency Government	7.904.141	3.58	79.041.410.000
Pemerintah Kabupaten Belu Belu Regency Government	7.387.172	3.34	73.871.720.000
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Central Sumba Regency Government	6.642.283	3.01	66.422.830.000
Pemerintah Kabupaten Manggarai Manggarai Regency Government	6.140.811	2.78	61.408.110.000
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat West Manggarai Regency Government	5.719.967	2.59	57.199.670.000
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Sabu Raijua Regency Government	5.649.283	2.56	56.492.830.000
Pemerintah Kabupaten Lembata Lembata Regency Government	5.396.088	2.44	53.960.880.000
Pemerintah Kabupaten Ende Ende Regency Government	5.261.653	2.38	52.616.530.000
Pemerintah Kabupaten Nagekeo Nagekeo Regency Government	4.469.967	2.02	44.699.670.000
Pemerintah Kabupaten Sikka Sikka Regency Government	3.572.463	1.62	35.724.630.000
Pemerintah Kabupaten Flores Timur Flores Timur Regency Government	3.529.859	1.60	35.298.590.000
Pemerintah Kabupaten Ngada Ngada Regency Government	2.705.737	1.22	27.057.370.000
Pemerintah Kabupaten Alor Alor Regency Government	2.702.105	1.22	27.021.050.000
JUMLAH SAHAM PEMERINTAH KABUPATEN & KOTA TOTAL SHARES OF REGENCY & MUNICIPAL GOVERNMENTS	**161.179.343**	**72.95**	**1.611.793.430.000**
BANK JATIM. Tbk BANK JATIM Tbk	7.142.857	3.23	71.428.570.000
JUMLAH SAHAM SERI A TOTAL SERIES A SHARES	**220.822.955**	**99.94**	**2.208.229.550.000**
Ch. Amos Corputty Ch. Amos Corputty	95.744	0.04	957.440.000
L. O. Wila Huky L. O. Wila Huky	23.321	0.01	233.210.000
Johan Christian Tallo Johan Christian Tallo	11.660	0.01	116.600.000

*)dalam jutaan *)in millions

SAHAM SERI A SERIES A SHARES	LEMBAR SAHAM SHARES	PERSENTASE PERCENTAGE (%)	NOMINAL (Rp)
JUMLAH SAHAM SERI B TOTAL SERIES B SHARES	**130.725**	**0.06**	**1.307.250.000**
JUMLAH SAHAM SERI A dan B TOTAL SHARES OF SERIES A AND B	**220.953.680**	**100**	**2.209.536.800.000**

*)dalam jutaan *)in millions

Lainnya	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	Lainnya
Arus kas bersih dr aktivitas operasi	208.338	798.924	2.323.374	1.524.450	190.81	Arus kas bersih dr aktivitas operasi
Arus kas bersih dr aktivitas investasi	5.855	53.211	256.994	203.783	382.97	Arus kas bersih dr aktivitas investasi
Arus kas bersih dr aktivitas pendanaan	207.426	239.113	265.448	26.335	11.01	Arus kas bersih dr aktivitas pendanaan
Kenaikan (penurunan) bersih kas & setara kas	4.944	984.826	2.314.921	1.330.095	135.06	Kenaikan (penurunan) bersih kas & setara kas
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.504.722	3.504.722	2.523.673	(981.049)	(27.99)	Kas dan setara kas pada awal tahun
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3.509.666	1.538.848	4.839.441	3.300.593	214.48	Kas dan setara kas pada akhir tahun

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG SERTA RASIO KEUANGAN LAINNYA

Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Rasio solvabilitas yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki aset yang cukup untuk melunasi semua kewajibannya.

DEBT PAYMENT CAPACITY, RECEIVABLES COLLECTIBILITY RATE, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Solvency is a ratio that indicates a bank's ability to meet its long-term and short-term obligations relative to its assets. A good solvency ratio indicates that the bank has sufficient assets to settle all its obligations.

SOLVABILITAS	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	PERTUMBUHAN Growth (%) +/-	SOLVABILITAS
Liabilitas terhadap total Aset	85.29	83.40	86.31	2.91	Liabilitas terhadap total Aset
Liabilitas terhadap Ekuitas	579.92	508.54	614.73	106.19	Liabilitas terhadap Ekuitas

RASIO KECUKUPAN MODAL

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) dihitung sesuai profil risiko bank. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada setiap aktivitas bisnis dan operasional.

CAPITAL ADEQUACY RATIO

The Minimum Capital Requirement (KPMM) or Capital Adequacy Ratio (CAR) is calculated based on the bank's risk profile. Its primary objective is to ensure that the bank maintains sufficient capital to cover the inherent risks associated with all business and operational activities.

Rasio KPMM Bank NTT per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 26.81%, turun sebesar 0.24% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024 sebesar 27.05%.

Bank NTT's CAR as of December 31, 2025, stood at 26.81%, a decrease of 0.24% compared to the December 31, 2024, figure of 27.05%.

	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	PERTUMBUHAN GROWTH (%) +/-	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	25.35	27.05	26.81	0.24	Minimum Capital Requirement (MCR)

NON PERFORMING LOAN (NPL)

NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kualitas kredit Bank NTT. Sepanjang tahun 2025 manajemen telah berupaya untuk menurunkan persentase NPL melalui Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit dengan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Melakukan Restrukturisasi dengan berpedoman pada 3 (tiga) pilar yaitu: Kemampuan membayar debitur, Jaminan dan Kredibilitas Manajemen. Kebijakan restrukturisasi dilakukan dengan melakukan *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring.* Pilihan kebijakan atau strategi restrukturisasi kredit diambil dengan melakukan kajian mendalam (*deep analysis*) terhadap pemasalahan dan kondisi yang dialami debitur.
2. Melakukan penagihan terhadap kredit NPL, Subrogasi, dan Hapus Buku melalui Satuan Tagih Kredit (STK).
3. Melakukan penjualan secara sukarela maupun melalui lelang terhadap Agunan Yang Diambil Alih.
4. Melakukan gugatan sederhana kepada debitur wanprestasi melalui kantor Pengadilan setempat.
5. Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perkreditan untuk mencegah penyaluran kredit yang tidak layak, memastikan pengikatan agunan secara sempurna, analisis kredit yang *prudent* serta tata kelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendukung upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit.
7. Melakukan pertemuan secara rutin dengan Direksi dan Dewan Komisaris dalam membahas permasalahan di bidang kredit khususnya melalui Komite Kredit.

NON PERFORMING LOAN (NPL)

NPL, or non-performing loans, is a key indicator for assessing the credit quality of Bank NTT. Throughout 2025, management has sought to reduce the NPL ratio through the Loan Recovery and Resolution Division by implementing the following strategic measures:

1. Conducting Restructuring based on 3 (three) pillars, namely: Debtor's Ability to Pay, Collateral, and Management Credibility. Restructuring policies are implemented through Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring. The choice of credit restructuring policies or strategies is made by conducting a deep analysis of the problems and conditions faced by the debtor.
2. Collecting on NPL loans, pursuing subrogation, and writing off loans through the Credit Collection Unit (STK).
3. Conducting voluntary sales or auctions of repossessed collateral.
4. Collaborate with third parties to support credit recovery and resolution efforts.
5. Evaluating and improving credit policies to prevent the disbursement of unsuitable loans, ensuring proper collateralization, prudent credit analysis, and the governance of the recovery and resolution of non-performing loans.
6. Establish cooperation with third parties to support credit recovery and resolution efforts.
7. Conduct regular meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners to discuss credit-related issues, particularly through the Credit Committee.

NON PERFORMING LOAN	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	PERTUMBUHAN (%) +/-	NON PERFORMING LOAN
NPL Gross	2.87	3.44	3.32	(0.12)	NPL Gross
NPL Net	1.23	1.21	0.74	(0.47)	NPL Net

RENTABILITAS

Pencapaian laba bank dan efektivitas penerapan strategi yang diambil sepanjang tahun 2025 dapat dilihat melalui sejumlah Rasio sebagai berikut:

PROFITABILITY

The bank's profit performance and the effectiveness of the strategies implemented throughout 2025 can be assessed through the following ratios:

RENTABILITAS	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	PERTUMBUHAN GROWTH (%) +/-	PROFITABILITY
Return On Asset (ROA)	1.85	1.33	0.97	(27.07)	Return On Asset (ROA)
Return On Equity (ROE)	12.03	7.45	3.88	(47.92)	Return On Equity (ROE)
Net Interest Margin (NIM)	6.23	6.50	6.36	(2.15)	Net Interest Margin (NIM)
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81.40	87.28	89.92	3.02	Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO)

GIRO DAN TABUNGAN TERHADAP TOTAL DANA PIHAK KETIGA (CASA)

Per 31 Desember 2025 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank NTT mengalami kenaikan positif yang signifikan yakni dari Rp 15.93 triliun pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp 11.99 triliun di tahun 2024. Namun peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan Deposito sebesar 71.48% atau naik Rp 3.87 triliun pada tahun 2025 sebesar Rp 9.28 Triliun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 5.41 Triliun.

CHECKING AND SAVINGS ACCOUNTS AS A PERCENTAGE OF TOTAL THIRD-PARTY FUNDS (CASA)

As of December 31, 2025, Bank NTT's Third-Party Funds (DPK) saw a significant increase, rising to Rp 15.93 trillion in 2025 from Rp 11.99 trillion in 2024. However, this increase was driven by a 71.48% growth in deposits, or an increase of Rp 3.87 trillion in 2025 to Rp 9.28 trillion, compared to the 2024 figure of Rp 5.41 trillion.

*)dalam jutaan *)in millions

Lainnya	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	Others
DANA PIHAK KETIGA	**12.895.747**	**11.987.255**	**15.929.812**	**3.942.557**	**73.12**	**THIRD-PARTY FUNDS (TPF)**
GIRO	2.474.435	2.426.074	2.416.862	(9.212)	(0.38)	Current Accounts
TABUNGAN	4.080.621	4.150.106	4.234.086	83.980	2.02	Savings Accounts
GIRO + TABUNGAN	6.576.180	6.576.180	6.650.948	74.768	1.14	Current + Savings Accounts
DEPOSITO	6.340.691	5.411.075	9.278.864	3.867.789	71.48	Deposits

PERBANDINGAN CASA TERHADAP DANA PIHAK KETIGA TAHUN 2025

CASA to Third-Party Funds Ratio in 2025

	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERSENTASE TERHADAP TOTAL DPK (%)	
DANA PIHAK KETIGA	11.987.255	15.929.812		THIRD-PARTY FUNDS (TPF)
GIRO	2.426.074	2.416.862	15.17	Current Accounts
TABUNGAN	4.150.106	4.234.086	26.58	Savings Accounts
GIRO + TABUNGAN	6.576.180	6.650.948	1.14	Current + Savings Accounts
DEPOSITO	5.411.075	9.278.864	58.25	Deposits

STRUKTUR MODAL (*CAPITAL STRUCTURE*) DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR PERMODALAN (*CAPITAL STRUCTURE POLICY*)

STRUKTUR MODAL

Manajemen Permodalan merupakan upaya manajemen untuk memperkuat modal yang dimiliki bank sehingga mampu untuk menyerap kerugian yang terjadi. Permodalan yang baik merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank. Dengan permodalan yang kuat maka bank dapat lebih kompetitif dan mampu mendukung pertumbuhan dan kompleksitas bisnis untuk jangka panjang.

Bank NTT wajib memiliki modal yang cukup besar sesuai dengan profil risiko dan nilai Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) serta wajib mentaati peraturan OJK yang berlaku dimana OJK menentukan dan mengawasi kebutuhan modal yang diwajibkan oleh Bank. Per 31 Desember 2025 rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank NTT adalah sebesar 26.81 % jauh lebih tinggi dari ambang batas yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MODAL YANG DIWAJIBKAN REGULATOR

Manajemen menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/ SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

Modal Inti (Tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

CAPITAL STRUCTURE

Capital management is the management's effort to strengthen the bank's capital so that it is capable of absorbing any losses that occur. Adequate capital is one of the indicators of a bank's financial health. With strong capital, the bank can be more competitive and capable of supporting business growth and complexity in the long term.

Bank NTT is required to maintain a sufficiently large capital base commensurate with its risk profile and Risk-Weighted Assets (RWA) and must comply with applicable OJK regulations, under which the OJK determines and oversees the capital requirements mandated for the Bank. As of December 31, 2025, Bank NTT's Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) stood at 26.81%, significantly higher than the threshold set by the Financial Services Authority.

REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS

Management calculates capital requirements based on Financial Services Authority Regulation No. 27 of 2022 regarding the "Minimum Capital Adequacy Ratio for Commercial Banks" and OJK Circular Letter No. 43/ SEOJK.03/2016 regarding "Transparency and Publication of Reports by Conventional Commercial Banks," wherein the capital required by the regulator is analyzed in two tiers as follows:

Core Capital (Tier 1) consists of primary core capital and supplementary core capital. Primary core capital includes paid-in and fully paid-up capital. Additional paid-in capital. General reserves. Retained earnings from prior years and the current period/year (100%). Other comprehensive income in the form of potential gains/losses arising from changes in the fair value of financial assets in the available-for-sale category. The shortfall in the allowance for impairment of earning assets in accordance with Bank Indonesia regulations and the permitted allowance for impairment losses on earning assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill), and investments (100%) are the primary factors reducing core capital.

Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.

Modal Pelengkap (Tier 2), meliputi surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi serta penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank NTT tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK. Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Additional core capital consists of, among other things, preferred shares, subordinated securities, and subordinated loans, all of which are non-cumulative after deducting buybacks.

Supplementary Capital (Tier 2) includes subordinated securities and subordinated loans, as well as provisions for the write-off of productive assets in accordance with Financial Services Authority regulations.

Bank NTT does not have any other additional capital that meets the Tier 3 capital criteria in accordance with applicable OJK regulations.

The Bank's Risk-Weighted Assets ("RWA") are determined based on established requirements that reflect various levels of risk associated with assets and exposures not reflected in the statement of financial position. In accordance with OJK regulations, the Bank is required to consider credit risk, market risk, and operational risk when measuring its RWA.

Management uses the capital ratios mandated by the regulator to monitor the Bank's capital, and these capital ratios remain the industry standard for measuring capital adequacy. The OJK's approach to this measurement is primarily based on monitoring the relationship between the Bank's risk profile and the availability of capital. The Bank is required to maintain a minimum capital level commensurate with its risk profile.

KOMPONEN MODAL	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (%)	CAPITAL COMPONENTS
MODAL INTI (Tier 1)	2.336.861	2.480.232	2.659.690	7.24	TIER 1 CAPITAL
MODAL PELENGKAP (Tier 2)	93.003	91.485	98.213	7.35	SUPPLEMENTARY CAPITAL (Tier 2)
Total Modal Inti + Modal Pelengkap	2.429.864	2.571.717	2.757.904	7.24	Total Core Capital + Supplementary Capital
ATMR Untuk Risiko Kredit	7.440.230	7.318.818	7.857.039	7.35	ATMR for Credit Risk
ATMR Untuk Risiko Operasional	2.146.574	2.186.950	2.317.683	5.98	ATMR for Operational Risk
ATMR Untuk Risiko Pasar	-	-	110.339	100	ATMR for Market Risk
Rasio KPMM Untuk Risiko Kredit & Risiko Operasional	9.586.804	9.505.768	10.174.722	7.04	KPMM Ratio for Credit Risk & Operational Risk
Rasio KPMM Untuk Risiko Kredit. Risiko Operasional Dan Risiko Pasar	9.586.804	9.505.768	10.285.061	8.20	KPMM Ratio for Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk

KEBIJAKAN PERMODALAN MANAJEMEN

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum maka Bank NTT diwajibkan untuk memiliki Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp 3 triliun paling lambat per 31 Desember 2024. Menindaklanjuti ketentuan tersebut maka Bank NTT telah melakukan kerjasama dengan Bank Jatim dalam bentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).

Manajemen menetapkan kebijakan untuk terus memperkuat aspek permodalan. Permodalan yang kuat akan menjaga kepercayaan pemegang saham dan pasar serta untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank NTT juga memahami perlunya menjaga keseimbangan tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen selalu melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemegang saham untuk melakukan setoran modal organik maupun penyertaan modal melalui metode inbreng untuk terus memperkuat permodalan Bank NTT.

BELANJA BARANG MODAL DAN IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Bank NTT sepanjang tahun 2025 melakukan pembelian barang modal dengan tujuan untuk memehuhi kebutuhan operasional. Pembelian setiap barang selanjutnya wajib dibukukan pada aplikasi ACTIVO yang dikelola oleh Divisi Umum sehingga tidak terjadi selisih lebih maupun selisih kurang dengan pencatatan pada core banking Bank NTT.

Adapun pembelian Barang Modal oleh Bank NTT pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

CAPITAL MANAGEMENT POLICY

Following the issuance of Financial Services Authority Regulation No. 12 of 2020 on the Consolidation of Commercial Banks, Bank NTT is required to maintain a Minimum Core Capital (MIM) of Rp 3 trillion by December 31, 2024, at the latest. In accordance with these provisions, Bank NTT has entered into a partnership with Bank Jatim in the form of a Banking Business Group (KUB).

Management has established a policy to continuously strengthen the capital base. A strong capital base will maintain the confidence of shareholders and the market, as well as support future business growth. The impact of capital levels on returns to shareholders is also taken into account, and Bank NTT understands the need to maintain a balance between high returns—made possible by higher leverage—and the benefits and security derived from a strong capital position.

Management consistently maintains good communication and coordination with shareholders to facilitate both organic capital contributions and capital injections through in-kind contributions to continuously strengthen Bank NTT's capital base.

CAPITAL GOODS EXPENDITURES AND MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Throughout 2025, Bank NTT made capital asset purchases to meet operational needs. Each
must be recorded in the ACTIVO application managed by the General Division to prevent discrepancies with the records in Bank NTT's core banking system.

The purchases of capital assets by Bank NTT in 2025 are as follows:

*)dalam jutaan *)dalam jutaan

ASET TETAP FIXED ASSETS	2023	2024	2025	PERTUMBUHAN GROWTH	KETERANGAN	DESCRIPTION
Tanah Land	8.022	-	-	-	• Tujuan : kelancaran operasional bank • Sumber Dana : Modal • Mata Uang : Rupiah • Langkah perlindungan : Asuransi	• Purpose: to ensure the bank's operational efficiency • Funding Source: Capital • Currency: Rupiah • Protection Measures: Insurance
Bangunan Buildings	11.060	181	-	(181)	• Tujuan : kelancaran operasional bank • Sumber Dana : Modal • Mata Uang : Rupiah • Langkah perlindungan : Asuransi	• Purpose: to ensure the bank's operational efficiency • Funding Source: Capital • Currency: Rupiah • Protection measures: Insurance
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	414	487	285	(202)	• Tujuan : kelancaran operasional bank • Sumber Dana : Modal • Mata uang : Rupiah • Langkah perlindungan : asuransi	• Purpose: to ensure the bank's operational efficiency • Funding Source: Capital • Currency: Rupiah • Protection measures: insurance
Perlengkapan & Perabot Kantor Office Equipment & Furniture	18.933	9.297	7.213	(2.084)	• Tujuan: kelancaran Operasional Bank • Sumber dana : Modal • Mata Uang : Rupiah • Langkah perlindungan : Asuransi	• Purpose: to ensure the smooth operation of the Bank's operational • Source of funds: Capital • Currency: Rupiah • Protection measure: Insurance
Aset Dalam Penyelesaian Assets Under Settlement	19.542	12.827	13.191	364	12.827	12.827
A Aset Sewa Pembiayaan Perlengkapan dan Perabot Kantor Leased Assets for Office Equipment and Furniture	64.536	16.476	16.100	(376)	• Tujuan: kelancaran Operasional Bank • Sumber dana : Modal • Mata Uang : Rupiah • Langkah perlindungan : Asuransi	• Purpose: Ensuring smooth bank operations • Source of funds: Capital • Currency: Indonesian Rupiah (IDR) • Protection measures: Insurance coverage
TOTAL	122.505	35.017	36.789	1.772		

MATERIALITAS PENINGKATAN USAHA

Rincian laporan Laba Rugi selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagaimana dibawah ini :

MATERIALITY OF BUSINESS GROWTH

The details of the Income Statement for the last 4 (four) years are as follows:

*)dalam jutaan *)in millions

LABA RUGI	2022	2023	2024	2025	PERTUMBUHAN GROWTH	%	INCOME STATEMENT
Pendapatan Bunga	1.518.696	1.575.856	1.639.358	1.678.299	38.941	2.38	Interest Income
Beban Bunga	488.778	535.813	556.617	597.016	40.399	7.26	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	1.069.918	1.040.043	1.082.740	1.081.283	(1.458)	(0.13)	Net Interest Income

*)dalam jutaan *)in millions

LABA RUGI	2022	2023	2024	2025	PERTUMBUHAN GROWTH	%	INCOME STATEMENT
Pendapatan Operasional Lainnya	123.604	126.428	134.630	144.025	9.395	6.98	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	874.457	1.017.481	991.652	1.041.700	50.048	5.05	Other Operating Expenses
Laba (Rugi) Operasional	319.065	148.990	225.717	183.608	(42.109)	(18.66)	Operating Profit (Loss)
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(13.712)	(445)	5.391	(11.778)	(17.169)	(318.48)	Non-Operating Income (Expense)
Laba Sebelum Pajak	305.353	148.545	231.109	171.831	(59.278)	(25.65)	Profit Before Tax
Pajak Penghasilan	74.422	38.392	54.272	79.213	24.941	45.96	Income Tax
Laba Bersih Setelah Pajak	228.931	110.153	176.837	92.618	(84.219)	(47.63)	Net Income After Tax
Penghasilan Komprehensif Lain Yang Tidak Direklasifikasikan Ke Laba Rugi	(25.616)	(5.579)	3.450	55.861	52.411	1.519.16	Other Comprehensive Income Not Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Laba Komprehensif	203.315	104.574	180.287	148.479	(31.808)	(17.64)	Total Comprehensive Income
Laba Bersih Per Saham	1.195	543	851	431	(420)	(49.35)	Earnings Per Share

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN 2025 DENGAN HASIL YANG DICAPAI PADA AKHIR TAHUN 2025 DAN TARGET TAHUN 2026

COMPARISON BETWEEN THE TARGETS AT THE BEGINNING OF 2025 AND THE RESULTS ACHIEVED AT THE END OF 2025 AND THE 2026 TARGETS

*)dalam jutaan *)in millionst

POS-POS	Target RAKP Tahun 2025 2025 RAKP Targets (Rp)	Realisasi Tahun 2025 2Actual 2025 (Rp)	Pencapaian Achievement (%)	Target RAKP Tahun 2026 2025 RAKP Targets (Rp)	Items
Pendapatan Bunga	1.569.757	1.678.299	106.91	1.664.794	Interest Income
Beban Bunga	500.381	597.016	119.31	505.258	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	1.069.376	1.081.283	101.11	1.159.536	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	224.495	144.025	64.16	235.409	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	1.066.593	1.041.700	97.67	1.151.568	Other Operating Expenses
Laba Operasional	227.278	183.068	80.55	243.377	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Non Operasional	4.465	11.778	263.78	5.761	Non-Operating Income (Expense)
Laba Sebelum Pajak	231.743	171.831	74.15	237.616	Profit Before Tax
Pajak Penghasilan	50.983	79.213	155.37	52.275	Income Tax
Laba Bersih Setelah Pajak	180.760	92.618	51.24	185.341	Net Income After Tax
Aset Lancar	17.189.256	19.518.967	110.08	18.922.015	Current Assets
Aset Tidak Lancar	317.679	573.918	180.66	1.196.685	Non-Current Assets
TOTAL ASET	18.076.702	20.092.885	111.15	19.223.922	TOTAL ASSETS
Liabilitas Jangka Pendek	14.979.387	17.281.610	15.37	16.349.766	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-	-	Long-Term Liabilities

*)dalam jutaan *)in millionst

POS-POS	Target RAKP Tahun 2025 2025 RAKP Targets (Rp)	Realisasi Tahun 2025 2Actual 2025 (Rp)	Pencapaian Achievement (%)	Target RAKP Tahun 2026 2025 RAKP Targets (Rp)	Items
TOTAL LIABILITAS	15.862.151	17.281.610	108.95	16.862.871	TOTAL LIABILITIES
Ekuitas	2.214.551	2.811.274	126.95	2.361.051	Equity
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	18.076.702	20.092.885	111.15	19.223.922	**TOTAL LIABILITIES & EQUITY**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang mempengaruhi kinerja bank.

MATERIAL INFORMATION AND EVENTS OCCURRING AFTER THE REPORTING DATE

There is no material information or facts occurring after the date of the auditor's report that affect the bank's performance.

PROSPEK USAHA BANK NTT

BUSINESS OUTLOOK OF BANK NTT

SASARAN STRATEGIS MANAJEMEN TAHUN 2026

MANAGEMENT'S STRATEGIC TARGETS FOR 2026

ASPEK	SASARAN STRATEGIS	TARGET ASUMSI	PERSPEKTIF BSC	PROGRAM
ASPEK BISNIS BUSINESS ASPECT	Kredit dan Pembiayaan Loans and Financing	Pertumbuhan Kredit 7.5% yoy Loan Growth of 7.5% Year-on-Year (YoY)	Financial	1. tPengendalian pendapatan bunga kredit dan suku bunga kompetitif. 2. Pembiayaan Program Kredit Linkage dengan koperasi. 1. Control of loan interest income and maintenance of competitive interest rates 2. Financing of Linkage Credit Programs in collaboration with cooperatives
		NPL gross secara konsolidasi ≤ 3.0 %	Internal Process	1. Optimalisasi jaringan kantor untuk pertumbuhan portofolio kredit. 2. Pengendalian dan penyelamatan aset bermasalah : a. Pengendalian kualitas portofolio dan penyelesaian NPL , hapus buku dan subrogasi ≥ 15%. b. Pembentukan Task Force kredit bermasalah untuk mempercepat penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah di seluruh kantor cabang. 3. Penguatan sistem, prosedur dan tata kelola kredit. 4. Pembenahan sistem dan prosedur perkreditan, termasuk pembaharuan dan penyempurnaan SOP perkreditan, tata kelola serta manajemen risiko kredit. 5. Implementasi pembiayaan berkelanjutan dan pelaporan Enviromental Social Government (ESG). 6. Cross selling dan kegiatan sosialisasi produk penyaluran dana (lending). 7. Pengembangan produk lending inovatif sesuai dengan kebutuhan bisnis. Optimalisasi

ASPEK	SASARAN STRATEGIS	TARGET ASUMSI	PERSPEKTIF BSC	PROGRAM
		Consolidated Gross NPL ≤ 3.0%	Internal Processes	1. Optimization of the branch network to support loan portfolio growth. 2. Management and recovery of non-performing assets: a. Control of portfolio quality and resolution of NPLs, write-offs, and subrogation of ≥ 15%. b. Establishment of a Non-Performing Loan (NPL) Task Force to accelerate recovery and resolution of problem loans across all branch offices. 3. Strengthening of credit systems, procedures, and governance. 4. Enhancement of credit systems and procedures, including the revision and refinement of credit SOPs, governance frameworks, and credit risk management. 5. Implementation of sustainable financing and Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting. 6. Cross-selling initiatives and socialization activities for lending products. 7. Development of innovative lending products in line with business needs.
	Dana dan Fee Based Income Funds and Fee-Based Income	Pertumbuhan DPK ≤ 6.5% yoy khususnya CASA Third Party Funds (TPF) growth ≤ 6.5% YoY, with a focus on CASA	Financial	1. Optimalisasi pricing DPK. 2. Program khusus peningkatan CASA ≥ 55%. 1. Optimization of deposit pricing 2. Special program to increase CASA (Current Account and Savings Account) to ≥ 55%
		Fee based income ≥ 15% yoy Fee based income ≥ 15% yoy	Customer	1. Pengembangan produk Giro, Tabungan dan Deposito berbasis digital (lifestyle). 2. Optimalisasi kanal layanan peningkatan transaksi electronic channel : a. Perluasan layanan inklusif (Agen Laku Pandai, ATM/CRM, EDC, Mobile Banking, IBB dan QRIS. b. Optimalisasi penggunaan layanan transaksi kanal digital dan elektronik. 3. Cross selling dan kegiatan inklusi keuangan /sosialisasi produk Penghimpunan Dana dan kanal elektronik. 1.Development of digital-based (lifestyle-oriented) Current Account, Savings, and Time Deposit products. 2.Optimization of service channels to increase electronic transaction volumes: a. Expansion of inclusive services (Laku Pandai Agents, ATM/CRM, EDC, Mobile Banking, Internet Banking, and QRIS). b. Optimization of the use of digital and electronic transaction channels. 3.Cross-selling initiatives and financial inclusion activities / product outreach for funding products and electronic channels..
		Pertumbuhan pengguna digital banking ≥ 25%. Digital banking user growth ≥ 25%	Internal Process	1. Diversifikasi produk dan simplikasi layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan nasabah saat ini. 2. Sinergisitas layanan Treasury dalam ekosistem KUB. 1. Diversification of products and simplification of banking services in line with current customer needs. 2. Synergistic development of Treasury services within the KUB ecosystem.

ASPEK	SASARAN STRATEGIS	TARGET ASUMSI	PERSPEKTIF BSC	PROGRAM
	Treasury dan Likuiditas Treasury and Liquidity	Peningkatan pendanaan jangka panjang Enhancement of long-term funding	Financial	1. Pendanaan jangka panjang melalui penerbitan Obligasi / NCD. 2. Pengembangan produk Treasury , trade finance dan payment gateway. 1. Long-term funding through the issuance of Bonds / Negotiable Certificates of Deposit (NCD). 2. Development of Treasury products, trade finance, and payment gateway services.
			Customer	1. Pengembangan layanan Bank Devisa (remitansi, transaksi valas, pembayaran internasional. 2. Dukungan fasilitas trade finance bagi UMKM dan korporasi lokal. 1. Development of foreign exchange banking services (remittances, foreign exchange transactions, and international payments). 2. Provision of trade finance facilities to support MSMEs and local corporates..
			Internal Process	Sinergi layanan treasury dalam ekosistem KUB Synergy of Treasury Services within the KUB Ecosystem
Aspek Support Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Support Aspect for Provincial, Regency, and City Governments	Kredit Pembiayaan Credit and Financing	Kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah Strategic Partnership with Local Governments	Customer	1. Peningkatan pembiayaan daerah : a. Pembiayaan pembangunan dan infrastruktur. b. Penyaluran KUR pada segmen usaha kecil, mikro dan menengah dalam mendorong pertumbuhan UMKM. c. Pengembangan bisnis industri lokal di kota dan kabupaten melalui program One Village One Product (OVOP). d. Women Entrepreuner Program, dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha perempuan (UMKM Lokal). 2. Penyediaan fasilitas akses pasar untuk UMKM (ritel/industri lokal) dalam entitas rantai pasok perdagangan NTT Mart. 3.Kolaborasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Strategis Nasional Makanan Bergizi Gratis melalui dukungan ekosistem supplier pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan. 4. Implementasi Pelayanan Digitalisasi transaksi keuangan daerah (penerimaan dan pengeluaran) guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 1. Increase in regional financing: a. Financing for development and infrastructure projects. b. Distribution of People's Business Credit (KUR) to micro, small, and medium enterprise segments to support MSME growth. c. Development of local industry businesses in cities and regencies through the One Village One Product (OVOP) program. d. Women Entrepreneur Program, providing financing and mentoring support for women-led MSMEs. 2. Provision of market access facilities for MSMEs (retail/local industry) within the NTT Mart trading supply chain ecosystem. 3. Collaboration with the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) under the National Strategic Program for Free Nutritious Meals, through support for an ecosystem of suppliers in agriculture, plantations, livestock, and trade sectors. 4. Implementation of digital financial transaction services for regional governments (revenue and expenditure) to support the increase of Regional Original Revenue (PAD)..
	Permodalan Capital	Penguatan Permodalan Capital Strengthening	Internal Process	Kemitraan Strategis Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penambahan penyertaan modal (organik dan inbreng) Strategic Partnership with Provincial/Regency/City Governments for Additional Capital Participation (organic and in-kind contributions)

ASPEK	SASARAN STRATEGIS	TARGET ASUMSI	PERSPEKTIF BSC	PROGRAM
Aspek SDM Human Resources (HR) Aspect	SDM Human Resources (HR)	100% pegawai mengikuti pelatihan kompetensi terkhususnya digitalisasi. Indeks Kompetensi SDM ≥ 90% pejabat mengikuti program leadership 100% of employees participate in competency training, particularly in digitalization. Human Resource Competency Index ≥ 90% At least 90% of officers participate in leadership development programs.	Learning and Growth	1. Pengembangan Kompetensi SDM : a. Penyusunan cetak biru SDM (human capital blueprint). b. Implementasi kamus kompetensi SDM. c. Implementasi Key Performance Indicator (Unit dan Individu). d. Program pengembangan SDM (digital academy, e-learning, sertifikasi kompetensi perbankan) e. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang : • Treasury • Kredit • Akuntansi dan Perpajakan • TI/Digitalisasi • Kepatuhan • Manajemen Risiko • SDM • Marketing • Trade Finance • Sertifikasi Auditor • Alignment dengan Bank Jatim/KUB f. Peningkatan skill dan keterampilan kerja pegawai melalui program pelatihan berkelanjutan dan berbasis kompetensi serta kebutuhan jabatan. g. Kerjasama pengembangan SDM bersama Bank Jatim pada semua lini aktivitas perbankan. 2. Penguatan leadership dan Transformasi Digital Organisasi : a. Kaderisasi kepemimpinan level menengah dan bawah untuk keberlanjutan organisasi. b. Program leadership untuk board of directors dan pejabat eksekutif (executive coaching, strategic foresight). c. Transformasi Digital Organisasi melalui talent mapping dan learning management system. 3. Joint Training dan knowledge sharing dengan Bank Jatim dan bank anggota KUB lainnya terkait proses bisnis, operasional, jaringan kantor dan Bank Devisa. 1. Human Resource Competency Development: a. Preparation of a Human Capital Blueprint. b. Implementation of a Human Resource Competency Dictionary. c. Implementation of Key Performance Indicators (unit and individual levels). d. Human resource development programs (Digital Academy, e-learning, and banking competency certification). e. Training and certification programs in the following areas: • Treasury • Credit • Accounting and Taxation • IT/Digitalization • Compliance • Risk Management • Human Resources • Marketing • Trade Finance • Auditor Certification • Alignment with Bank Jatim/KUB f. Enhancement of employees' skills and capabilities through continuous, competency-based training aligned with job requirements. g. Collaboration on human resource development with Bank Jatim across all banking activities. 2. Strengthening Leadership and Organizational Digital Transformation: a. Succession planning for middle and lower-level leadership to ensure organizational continuity. b. Leadership programs for the Board of Directors and executive officers (executive coaching and strategic foresight). c. Organizational digital transformation through talent mapping and Learning Management System (LMS). 3. Joint training and knowledge sharing with Bank Jatim and other KUB member banks covering business processes, operations, branch networks, and foreign exchange banking activities.

ASPEK	SASARAN STRATEGIS	TARGET ASUMSI	PERSPEKTIF BSC	PROGRAM
	Budaya Perusahaan Corporate Culture	Budaya Perusahaan Corporate Culture	Internal Process	1. Penguatan tata kelola SDM berbasis profesionalisme, integritas dan kinerja tinggi. 2. Penguatan budaya kerja adaptif dan digital mindset di seluruh level organisasi, melalui program pelibatan pegawai (employee engagement) , kampanye nilai perusahaan (internal branding) serta monitoring pelaksanaan budaya kerja. 3. Pembentukan lingkungan kerja yang professional, efisien serta kolaboratif di seluruh unit kerja. 1. Strengthening human resource governance based on professionalism, integrity, and high performance. 2. Enhancing an adaptive work culture and digital mindset across all levels of the organization through employee engagement programs, internal branding of corporate values, and monitoring the implementation of work culture. 3. Establishing a professional, efficient, and collaborative work environment across all business units.
	3.Re-organisasi Reorganization	Struktur organisasi sesuai dengan strategi bisnis dan kebutuhan organisasi perbankan modern Organizational structure aligned with business strategy and the needs of a modern banking institution.	Internal Process	Restrukturisasi organisasi sesuai dengan arah bisnis dan penyelerasan fungsi kerja. Organizational restructuring aligned with business direction and functional alignment.
Aspek TI/ Digitalisasi IT/ Digitalization Aspect	Teknologi Informasi dan Digitalisasi Information Technology and Digitalization	Integrasi core banking. Keamanan cyber terjaga. Core Banking Integration. Cybersecurity is maintained.	Internal Process	1. Penguatan infrastruktur dan integrasi sistem : a. Kerjasama dan sinergi penguatan teknologi informasi, digitalisasi dan manajemen sistem informasi yang terintegrasi. b. Integrasi core banking dengan mobile/internet banking, API dan open banking. 2. Data Warehouse : a. Penyediaan dashboard data keuangan secara terpusat, tersistem dan akurat. b. Implementasi Enterprise Datawarehouse. 1. Strengthening Infrastructure and System Integration: a. Collaboration and synergy in strengthening information technology, digitalization, and integrated information system management. b. Integration of core banking with mobile/internet banking, APIs, and open banking. 2. Data Warehouse: a. Provision of a centralized, systematic, and accurate financial data dashboard. b. Implementation of an Enterprise Data Warehouse.
	2.Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance	Penguatan tata kelola kepatuhan dan manajemen risiko Risk Management and Compliance	Internal Process	1. Penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 dan cyber resilience framework. 2. Persiapan early warning system sebagai alat deteksi dini kredit bermasalah. 1. Implementation of ISO 27001 information security standards and a cyber resilience framework. 2. Preparation of an early warning system as a tool for early detection of non-performing loans (NPLs)..

ASPEK	SASARAN STRATEGIS	TARGET ASUMSI	PERSPEKTIF BSC	PROGRAM
	Layanan dan Pemasaran Nasabah (digital channel) Customer Service and Marketing (Digital Channels)	Optimalisasi kanal digital. Peningkatan kualitas data. Optimization of digital channels. Improvement of data quality.	Customer	Optimalisasi kanal digital : a. Pengembangan implementasi Supper Apps untuk mempercepat implementasi layanan digital end-to-end. b. Implementasi Loan Originating System (LOS) untuk mempercepat proses pengajuan kredit. c. Smart Card Program : "Smart Spending Card" untuk sektor transportasi dan pariwisata sebagai produk sinergi digital dan daerah. Optimization of Digital Channels: a. Development and implementation of a Super App to accelerate end-to-end digital service delivery. b. Implementation of the Loan Originating System (LOS) to expedite the loan application process. c. Smart Card Program: "Smart Spending Card" for the transportation and tourism sectors as a digital and regional synergy product.
Aspek Customer , Layanan dan Operasional Customer, Service, and Operational Aspects	Layanan dan Pemasaran Nasabah Customer Service and Marketing	Indeks Kepuasan Nasabah ≥ 85% Customer Satisfaction Index ≥ 85%	Customer	1. Service Excellence dan Customer Experience. 2. Perluasan layanan inklusif (agen ATM/EDC, mobile, QRIS). 3. Program retensi ASN/PNS/PPPK (loyalty payroll + kredit) 4. Customer Feedback Program 5. melalui : Survei Kepuasan Debitur, Nasabah serta Layanan secara berkala berbasis digital. 6. Customer Gathering disetiap kabupaten/kota untuk memperkuat hubungan dan retensi dengan nasabah utama. 7. Social Event dan Community Engangement untuk membangun kedekatan sosial dan citra positif bank. 1. Service Excellence and Customer Experience: 2. Expansion of inclusive services (ATM/EDC agents, mobile banking, QRIS). 3. Retention Program for Civil Servants (ASN/PNS/PPPK) (loyalty payroll + credit). 4. Customer Feedback Program through: 5. Regular Debtor, Customer Satisfaction, and Service Surveys based on digital platforms. 6. Customer Gatherings in each district/city to strengthen relationships and retention with key clients. 7. Social Events and Community Engagement to build social connections and enhance the bank's positive image.

PEMASARAN

Market Share Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Bank NTT di Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut :

MARKETING

The market share of Third-Party Funds (DPK) and Bank NTT loans for the 2025 fiscal year is as follows:

*)dalam jutaan *)in millionsn

NO	POS	TAHUN 2024 Items		TAHUN 2025 Items		KOMPOSISI 2024 COMPOSITION	KOMPOSISI 2025 COMPOSITION	Items
		PERBANKAN DI NTT BANKING IN NTT (Rp)	BANK NTT NTT BANK (Rp)	PERBANKAN DI NTT BANKING IN NTT (Rp)	BANK NTT NTT BANK (Rp)	2024 (%)	2025 (%)	
1.	DANA PIHAK KETIGA (DPK)	35.038.534	11.987.255	40.804.429	15.929.812	34.21	39.04	THIRD-PARTY FUNDS (DPK)
	GIRO	4.347.499	2.426.074	4.805.260	2.416.862	55.80	50.30	CHECKING
	TABUNGAN	20.701.063	4.150.106	21.993.644	4.234.086	20.05	19.25	SAVINGS
	DEPOSITO	9.989.972	5.411.075	14.005.525	9.278.864	54.16	66.25	DEPOSITS
2.	KREDIT	52.060.468	12.766.585	55.150.017	13.945.702	24.52	25.29	CREDIT
	MODAL KERJA	18.122.516	940.308	17.646.620	972.101	5.19	5.51	WORKING CAPITAL
	INVESTASI	5.534.266	592.045	5.878.349	289.226	10.70	4.92	INVESTMENT
	KONSUMSI	28.403.686	11.234.232	31.625.047	11.822.597	39.55	37.38	CONSUMPTION

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividen merupakan hak seluruh pemegang saham Bank NTT sebagai bentuk imbalan atas investasi/penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di NTT dalam periode 1 (satu) tahun buku.

Dividen yang diperoleh dari Bank NTT oleh pemerintah daerah selanjutnya dicatatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan sebagai dana pembangunan di berbagai sektor di wilayah pemerintah daerah setempat.

Untuk mengatur pembagian dividen maka manajemen telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 151 Tahun 2025 tentang Pedoman Dividen pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

DIVIDEND POLICY

Dividends are the right of all Bank NTT shareholders as a form of compensation for the investment/capital contribution made by the local government in NTT during a single fiscal year.

Dividends received from Bank NTT by the local government are subsequently recorded as Local Original Revenue (PAD), which will be used as development funds across various sectors within the local government's jurisdiction.

To regulate the distribution of dividends, management has issued Board of Directors' Decision No. 151 of 2025 regarding Dividend Guidelines at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

PERKEMBANGAN DIVIDEN				
KETERANGAN KETERANGAN	**DIVIDEN (Rp)**	**TANGGAL REALISASI PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM** DATE OF DIVIDEND PAYMENT TO SHAREHOLDERS	**DASAR PENETAPAN DIVIDEN**	**BASIS FOR DIVIDEND DETERMINATION**
Dividen TB 2010	112.327.742.480.-	04 Juli 2011	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2010tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.28 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto. S.H. Notaris di Kupang	Minutes of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders dated June 10, 2011, as stated in Notarial Deed No. 28 by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notary in Kupang
Dividen TB 2011	135.117.703.180.-	11 April 2012	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2011 tanggal 4 April 2012 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.9 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto. S.H. Notaris di Kupang	Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders dated April 4, 2012, as recorded in Notarial Deed No. 9 by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notary in Kupang
Dividen TB 2012	164.550.934.184.-	25 Juni 2013	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2012 tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.66 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto. S.H. Notaris di Kupang	Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders dated June 20, 2013, as recorded in Notarial Deed No. 66 by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H. Notary in Kupang
Dividen TB 2013	196.963.921.217.-	18 Juni 2014	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2013 tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.76 oleh Silvester Joseph Mambaitfeto. S.H. Notaris di Kupang	Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on June 12, 2014, as recorded in Notarial Deed No. 76 by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notary in Kupang
Dividen TB 2014	213.744.916.614.-	17 Juni 2015	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2014 tanggal 12Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.18 oleh Bil'id Muhdin. S.H. Notaris di Surabaya.	Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders dated June 12, 2015, as recorded in Notarial Deed No. 18 by Bil'id Muhdin, S.H., Notary in Surabaya.
Dividen TB 2015	230.579.863.595.-	01 Juni 2016	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2015 tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam akta Notaris No.7 oleh Lalu Muhamad Supriandi.S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Manggarai Barat - Labuan Bajo.	Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders dated May 27, 2016, as recorded in Notarial Deed No. 7 by Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., Notary in West Manggarai Regency - Labuan Bajo.

KETERANGAN KETERANGAN	PERKEMBANGAN DIVIDEN			
	DIVIDEN (Rp)	TANGGAL REALISASI PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM DATE OF DIVIDEND PAYMENT TO SHAREHOLDERS	DASAR PENETAPAN DIVIDEN	BASIS FOR DIVIDEND DETERMINATION
Dividen TB 2016	204.613.582.250.-	31 Meret 2017	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2016 tanggal 25 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam akta Notaris No.12 oleh Theresia Dewi Koroh Dimu.S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Manggarai Barat - Labuan Bajo	Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders dated March 25, 2017, as recorded in Notarial Deed No. 12 by Theresia Dewi Koroh Dimu, S.H., M.Kn., Notary in West Manggarai Regency - Labuan Bajo
Dividen TB 2017	215.456.075.630.-	29 Juni 2018	Berita Acara RUPS Tahunan TB 2017 tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam akta Notaris No.78 oleh Robertino Valentino Mambaitfeto. S.H. M.Kn. Notaris di Kupang	Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders dated May 25, 2018, as recorded in Notarial Deed No. 78 by Robertino Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn., Notary in Kupang
Dividen TB 2018	219.464.400.275.-	11 April 2019	Berita Acara RUSP Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 11 April 2019 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 16 oleh Albert Wilson Riwukore. SH	Minutes of the Annual General Meeting for the 2018 Fiscal Year dated April 11, 2019, as recorded in Notarial Deed No. 16 by Albert Wilson Riwukore, SH
Dividen TB 2019	206.915.998.286	06 Mei 2020	BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.17 oleh Serlina Sari Dewi Darmawan. S.H	Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2019 dated May 6, 2020, as stated in Notarial Deed No. 17 by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H.
Dividen TB 2020	206.753.393.503.-	26 April 2021	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 26 April 2021 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.23 oleh Serlina Sari Dewi Darmawan. S.H..M.Kn	Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 on April 26, 2021, as recorded in Notarial Deed No. 23 by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn
Dividen TB 2021	114.134.132.856.-	17 Maret 2022	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.22 oleh Serlina Sari Dewi Darmawan. S.H..M.Kn.	Minutes Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2021 on March 17, 2022, as stated in Notarial Deed No. 22 by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.
DIvIden TB 2022	200.314.654.961	20 Maret 2023	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023. tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.25 oleh Serlina Sari Dewi Darmawan. S.H..M.Kn.	Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023, dated March 20, 2023, as recorded in Notarial Deed No. 25 by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.
Dividen TB 2023	96.382.440.859	08 Mei 2024	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023. tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.25 oleh Serlina Sari Dewi Darmawan. S.H..M.Kn.	Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held on March 20, 2023, as recorded in Notarial Deed No. 25 by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.
Dividen TB 2024	154.731.973.785,-	19 Mei 2025	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 14 Mei 2025, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.9 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H., M.Kn.	Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024, dated May 14, 2025, as recorded in Notarial Deed No. 9 by Serlina Sari Darmawan, S.H., M.Kn.
Dividen TB 2025	*)sampai dengan Laporan Tahunan ini disusun PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025			As of the preparation of this Annual Report, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur has not yet conducted the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year.

LAPORAN KOMITMEN KONTIJENSI

Komitmen dan kontijensi merupakan rekening administratif yang timbul dari transaksi kredit. Komitmen mengacu pada komitmen penyediaan. pembiayaan dari instrument keuangan yang mengakibatkan pengakuan aktiva dan/atau kewajiban selama periode tertentu. Kontijensi merupakan probabilitas aset dan/atau kewajiban yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kejadian sehubungan dengan kredit dan transaksi akseptasi di Bank NTT.

CONTINGENCY COMMITMENT REPORT

Commitments and contingencies are administrative accounts arising from credit transactions. Commitments refer to commitments to provide financing from financial instruments that result in the recognition of assets and/or liabilities during a certain period. Contingencies are the probability of assets and/or liabilities that may arise as a result of certain events related to credit and acceptance transactions at Bank NTT.

POS-POS	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	PERTUMBUHAN GROWTH (Rp) +/-	%	Items
Tagihan Komitmen	-	-	-	-	-	Commitment Bill
Kewajiban Komitmen	208.383	208.383	184.471	(23.912)	(11.47)	Commitment Liabilities
Tagihan Kontinjensi	12.789	123.142	155.148	32.006	25.99	Contingency Charges
Kewajiban Kontinjensi	78.808	78.808	39.942	(38.866)	(49.32)	Contingent Liabilities
Kewajiban Komitmen & Kontinjensi Bersih	(274.402)	(164.049)	(69.265)	(94.784)	(57.77)	Commitment Liabilities & Net Contingent Liabilities

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 setelah dikurangi dengan biaya emisi, telah digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit. Pada tanggal 21 Desember 2025 Obligasi Seri D telah jatuh tempo sehingga dengan demikian Bank NTT tidak lagi memiliki Surat Berharga yang Diterbitkan.

UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

The proceeds from the 2018 Phase I Bank NTT Continuous Bond I public offering, after deducting issuance costs, have been fully utilized for credit expansion. On December 21, 2025, Bank NTT Series D Bonds matured; consequently, Bank NTT no longer holds any issued securities.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN

Bank NTT tidak memiliki saham untuk pegawai dan/atau untuk manajemen.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAMS IMPLEMENTED BY THE COMPANY

Bank NTT does not have a stock ownership program for employees and/or management.

DIVESTASI

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT tidak melakukan kegiatan divestasi.

DIVESTITURE

Throughout 2025, Bank NTT did not engage in any divestment activities.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha.

BUSINESS MERGERS/ACQUISITIONS

Throughout 2025, Bank NTT did not undergo any mergers or business consolidations.

AKUISISI

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT tidak melakukan kegiatan akuisisi.

ACQUISITIONS

Throughout 2025, Bank NTT did not engage in any acquisition activities.

RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT tidak melakukan restrukturisasi utang/modal.

DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Throughout 2025, Bank NTT did not undertake any debt/capital restructuring.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN /ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST

Throughout 2025, there were no material transactions involving conflicts of interest.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIU ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Dari semua transaksi yang terkait dengan pihak berelasi, manajemen memandang bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar. Dalam kegiatan usaha. Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Manajemen telah melakukan mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

COMPANY POLICY REGARDING THE REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELEVANT REGULATIONS

Regarding all transactions with related parties, management considers that all transactions remain within reasonable limits. In its business operations, the Bank conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships based on terms agreed upon by both parties, where such terms are equivalent to those applied in transactions with unrelated parties.

All transactions with related parties have been conducted in accordance with mutually agreed-upon policies and terms. Management has implemented a review mechanism for transactions with related parties through an audit process conducted by both internal and external auditors.

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Bank NTT melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga. Bank NTT tidak memiliki alasan khusus terkait pemberian transaksi dengan pihak berelasi. Pemberian transaksi secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang sama terhadap transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

FAIRNESS AND REASONS FOR CONDUCTING TRANSACTIONS

Bank NTT conducts certain transactions with related parties under the same terms and conditions as those applicable to third parties. Bank NTT has no specific rationale regarding the conduct of transactions with related parties. Transactions are conducted fairly in accordance with applicable regulations and serve the same purpose as transactions with other third parties.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan bank apabila :

1. Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (b) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Bank.
2. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan bank.
3. Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana bank sebagai venture.
4. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci bank.
5. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam poin 1 (satu) atau 4 (empat).
6. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam poin 4 (empat) atau 5 (lima).
7. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari bank atau entitas terkait bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan.

INFORMASI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan operasional Bank NTT melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Bank conducts transactions with related parties. In these financial statements, the term "related party" is defined in accordance with PSAK 224 regarding "Disclosure of Related Parties." A party is considered a related party of the Bank if:

1. A party that, directly or indirectly through one or more intermediaries, (a) controls, is controlled by, or is under common control with the Bank; (b) has significant influence over the Bank; or (c) has joint control over the Bank.
2. A party that is part of the same business group as the Bank.
3. A party that is a joint venture in which the Bank is a partner.
4. A party is a member of the Bank's key management personnel.
5. A party is a close family member of an individual described in point 1 (one) or 4 (four).
6. A party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by one or more entities, directly or indirectly, or by individuals as described in points 4 (four) or 5 (five).
7. A party is a post-employment benefit plan for employment benefits from the bank or a bank-related entity.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the relevant financial statements, and the details are presented in the form of notes to the financial statements.

INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In its operational activities, Bank NTT conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been conducted in accordance with mutually agreed policies and terms.

No.	PIHAK BERELASI	SIFAT DARI HUBUNGAN NATURE OF RELATIONSHIP	RELATED PARTY
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	Deposits & interest expense
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	Deposits & interest expense
3	PT. Flobamor	Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama Controlled by the same ultimate shareholder	Deposits & interest expense
4	Dana Pensiun PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai pendiri. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as the founder.	Deposits & interest expense
5	Badan Kesejahteraan Pegawai	PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai pendiri. PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as the founder.	Deposits & interest expense
6	Pegawai Kunci (*Key Person*)	Direksi, Komisaris, Kepala Divisi dan Pemimpin Cabang serta anggota keluarga dekat dengan pejabat tersebut. Board of Directors, Board of Commissioners, Division Heads, and Branch Managers, as well as close family members of these officials.	t

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 2025 Bank menerapkan perubahan dan interpretasi Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sebagai berikut :

1. Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.
   Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.
2. Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi.
   Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Changes to financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards.

As of January 1, 2025, the Bank implemented the following changes and interpretations to Financial Accounting Standards (PSAK) that are effective as follows:

1. Amendment to PSAK 221: "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding non-convertible currencies.
   This amendment requires the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of convertible currencies. The amendment applies to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Early adoption is permitted, in which case the entity is required to disclose such information. The effective date is the beginning of the annual period in which the entity first applies the amendment.
2. Amendment to PSAK 117: "Insurance Contracts" regarding insurance contracts.
   A new comprehensive accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation, and disclosure. Upon becoming effective, PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts—life, non-life, direct insurance, and reinsurance—regardless of the entity issuing

menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

them, as well as to certain guarantees and financial instruments with non-binding participation features. Certain scope exclusions will apply . The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan diperiode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of these standards does not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and has no impact on the financial statements for the current period or prior years.

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk Bank dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025.

PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan". Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur non-recource dan instrument yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amandemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu dan jumlah arus kas kontraktual.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

IMPACT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES ON FINANCIAL STATEMENTS

The following is an overview of the PSAKs and ISAKs issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and the Sharia Accounting Standards Board (DSAS) – IAI that are relevant to the Bank and its Subsidiaries; however, they are not yet effective for consolidated financial reporting as of December 31, 2025.

PSAK 109. "Financial Instruments" and PSAK 107 "Financial Instruments: Disclosures on the Classification and Measurement of Financial Instruments." These amendments add and clarify provisions in PSAK 109 regarding the derecognition of financial liabilities, as well as clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with non-recourse features and contractually linked instruments such as tranches. This amendment also modifies the provisions in PSAK 107 regarding disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions regarding financial instruments with contractual terms that alter the timing and amount of contractual cash flows.

Currently, the Bank is evaluating and has not yet determined the impact of the implementation of these standards and their effect on the consolidated financial statements.

JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjamin Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.017/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No179/KMK.017/2000 tentang Syarat. Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005, sebagai pengganti UP3.

Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Berdasarkan undang-undang No.24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005. sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.03 (Perpu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008. LPS dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Hingga saat ini Bank NTT adalah peserta dalam program LPS.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan. jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp.2.000.000.000.- untuk per nasabah per bank.

GOVERNMENT GUARANTEES ON COMMERCIAL BANK PAYMENT OBLIGATIONS

Pursuant to Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 15 of 2004 on the termination of duties and dissolution of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). the government guarantee program for the payment obligations of Commercial Banks, which was originally carried out by the BPPN pursuant to Decree of the Republic of Indonesia No. 26 of 1998 and Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 26 of 1998 and Decree of the Republic of Indonesia No. 27 of 1998, is subsequently implemented by the Minister of Finance through the Government Guarantee Implementation Unit (UP3) as regulated by Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 17 of 2004. This was further regulated by Ministry of Finance Decision No. 84/KMK.017/2004 dated February 27, 2004, regarding Amendments to Ministry of Finance Decision of the Republic of Indonesia No. 179/KMK.017/2000 on the Terms, Procedures, and Conditions for the Implementation of Government Guarantees for Commercial Bank Payment Obligations.

The Government Guarantee Program through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005, regarding the Calculation and Payment of Premiums for the Government Guarantee Program ( ) for Commercial Bank Payments for the period from July 1 to September 21, 2005. as a replacement for UP3.

The government has established an independent institution, namely the Deposit Insurance Corporation (LPS). Pursuant to Law No. 24 dated September 22, 2004, effective as of September 22, 2005, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 03 (Perpu No. 3/2008) dated October 13, 2008. The LPS was established to guarantee certain obligations of commercial banks under the applicable deposit insurance program, the coverage amount of which may change if specific applicable criteria are met. To date, Bank NTT is a participant in the LPS program.

Pursuant to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13, 2008, regarding the amount of deposit coverage, the amount of deposits guaranteed by the LPS is up to Rp. 2,000,000,000.00 per customer per bank.

Per 31 Desember 2025 simpanan nasabah dalam rupiah dijamin oleh LPS apabila suku bunganya sama dengan atau dibawah 3.5 % sedangkan untuk simpanan nasabah dalam valuta asing dijamin apabila suku bunganya sama dengan atau dibawah 2 %.

As of December 31, 2025, customer deposits in rupiah are guaranteed by the LPS if the interest rate is equal to or below 3.5%, while customer deposits in foreign currency are guaranteed if the interest rate is equal to or below 2%.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LEGISLATION THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

NO	Peraturan Baru New Regulation	Tentang	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Regarding
1	PADG NOMOR 1 TAHUN 2025	Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment	23 Januari 2025	23 Januari 2025	Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 17 of 2023 on the Operation of Bank Indonesia-Fast Payment
2	PADG NOMOR 2 TAHUN 2025	Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Menggunakan Rupiah dan Dirham melalui Bank	24 Januari 2025	31 Januari 2025	Settlement of Bilateral Transactions between Indonesia and the United Arab Emirates Using the Rupiah and Dirham through Banks
3	PBI NOMOR 2 TAHUN 2025	Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri \"For The Children of The World\" Tahun Emisi 1999 dari Peredaran.	30 Januari 2025	31 Januari 2025	Withdrawal and Recall of Special "For The Children of The World" Series Rupiah Banknotes Issued in 1999 from Circulation.
4	PBI NOMOR 1 TAHUN 2025	Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024	30 Januari 2025	30 Januari 2025	Quantity and Face Value of Rupiah Banknotes Destroyed in 2024
5	PADG NOMOR 3 TAHUN 2025	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.	19 Februari 2025	19 Februari 2025	Third Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 21/18/PADG/2019 on the Implementation of the National Standard for Quick Response Code- s for Payments. Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 7 of 2023 on Export Proceeds and Import Payment Foreign Exchange
6	PBI NOMOR 3 TAHUN 2025	Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor	28 Februari 2025	1 Maret 2025	Third Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 21/18/PADG/2019 on the Implementation of the National Standard for Quick Response Code- s for Payments.
7	PADG NOMOR 5 TAHUN 2025	Perubahan atas PADG Nomor 23/12/PADG/2021 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank	21 Maret 2025	27 Maret 2025	Amendment to PADG No. 23/12/PADG/2021 concerning the Settlement of Bilateral Transactions between Indonesia and Malaysia Using the Rupiah and Ringgit through Banks

NO	Peraturan Baru New Regulation	Tentang	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Regarding
8	PADG NOMOR 8 TAHUN 2025	Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	1 Maret 2025	26 Maret 2025	Third Amendment to Board of Governors Regulation No. 24/8/PADG/2022 on Implementing Regulations for the Fulfillment of Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units
9	PBI NOMOR 6 TAHUN 2025	Pengelolaan Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	27 Maret 2025	27 Maret 2025	Liquidity Management to Support Sustainable Economic Growth
10	PBI NOMOR 4 TAHUN 2025	Kebijakan Sistem Pembayaran	27 Maret 2025	27 Maret 2025	Payment System Policy
11	PADG NOMOR 10 TAHUN 2025	Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/21/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rekening Giro di Bank Indonesia	8 Mei 2025	8 Mei 2025	Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 24/21/PADG/2022 concerning Implementing Regulations on Current Accounts at Bank Indonesia
12	PADG NOMOR 11 TAHUN 2025	Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional. Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	1 Juni 2025	1 Juni 2025	Eighth Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 21/22/PADG/2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks, and Islamic Business Units
13	PADG NOMOR 12 TAHUN 2025	Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank	01 Agustus 2024	01 Agustus 2024	Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 7 of 2024 concerning Implementing Regulations on Foreign Funding Ratios of Banks
14	PADG NOMOR 13 TAHUN 2025	Penyelenggara Sarana Transaksi.	10 Juni 2025	10 Juni 2025	Transaction Facility Providers.
15	SE OJK NOMOR 14/SEOJK.03/2025 TAHUN 2025	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	24 Juni 2025	24 Juni 2025	Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks
16	POJK NOMOR 7 TAHUN 2025	Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian	27 Maret 2025	27 Desember 2025	Report on Commercial Banks as Custodians
17	PADG NOMOR 14 TAHUN 2025	Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Second Amendment to Board of Governors Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Bank Indonesia-Fast Payment
18	PADG NOMOR 16 TAHUN 2025	Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang	20 Juni 2025	01 Oktober 2025	Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 13 of 2024 on Money Market Transactions
19	POJK NOMOR 18 TAHUN 2025	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	08 Agustus 2025	08 Agustus 2025	Transparency and Publication of Bank Reports
20	PADG NOMOR 17 TAHUN 2025	Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Renminbi melalui Bank	08 September 2025	08 September 2025	Settlement of Bilateral Transactions between Indonesia and China Using the Rupiah and Renminbi through Banks
21	SE OJK NOMOR 20/SEOJK.08/2025 TAHUN 2025	Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan	08 September 2025	1 Januari 2027	Publication of Complaint Handling and Complaint Service Reports

NO	Peraturan Baru New Regulation	Tentang	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Regarding
22	POJK NOMOR 19 TAHUN 2025	Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	28 Agustus 2025	2 November 2025	Ease of Access to Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises
23	POJK NOMOR 5 TAHUN 2025	Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan	26 Februari 2025	03 Maret 2025	Supporting Professions in the Financial Services Sector
24	PADG NOMOR 18 TAHUN 2025	Kriteria. Persyaratan. dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Criteria, Requirements, and Use of Securities in Monetary Operations
25	PADG NOMOR 20 TAHUN 2025	Operasi Moneter Rupiah	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Rupiah Monetary Operations
26	PADG NOMOR 22 TAHUN 2025	Perubahan atas PADG Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensiona	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Amendment to PADG No. 21 of 2023 concerning Implementing Regulations on Short-Term Liquidity Loans for Conventional Commercial Banks
27	PADG NOMOR 19 TAHUN 2025	Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Monetary Operations Infrastructure and Participation
28	PADG NOMOR 21 TAHUN 2025	Operasi Moneter Valuta Asing	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Foreign Exchange Monetary Operations
29	POJK NOMOR 24 TAHUN 2025	Pengelolaan Rekening pada Bank Umum	4 November 2025	10 November 2025	Management of Accounts at Commercial Banks
30	PADG NOMOR 23 TAHUN 2025	Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional. Bank Umum Syariah. dan Unit Usaha Syariah (PADG RIM PLM)	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks, and Islamic Business Units (PADG RIM PLM)
31	PADG NOMOR 24 TAHUN 2025	Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	31 Oktober 2025	31 Oktober 2025	Conduct of Instant Fund Settlement through the Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement System
32	POJK NOMOR 22 TAHUN 2025	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	15 September 2025	2 Oktober 2025	Reporting by Commercial Banks Through the Financial Services Authority Reporting System
33	PADG NOMOR 26 TAHUN 2025	Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	28 November 2025	1 Desember 2025	Financial Derivatives with Underlying Assets in the Form of Money Market and Foreign Exchange Market Products
34	PBI NOMOR 9 TAHUN 2025	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial	26 November 2025	1 Desember 2025	Macroprudential Liquidity Incentive Policy
35	PADG NOMOR 27 TAHUN 2025	Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM)	1 Desember 2025	1 Desember 2025	Regulations on the Implementation of the Macroprudential Liquidity Incentive Policy (PADG KLM)
36	PADG NOMOR 29 TAHUN 2025	Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Operasi Moneter Valuta Asing	16 Desember 2025	16 Desember 2025	Amendment to Regulation of the Board of Governors No. 21 of 2025 on Foreign Exchange Monetary Operations

TINJAUAN BISNIS BANK NTT

BUSINESS REVIEW OF BANK NTT

Pengembangan bisnis Bank NTT diarahkan pada pencapaian 2 (dua) grand target strategis yaitu:

1. Berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro. kecil dan menengah.
2. Mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.

Bank NTT's business development is focused on achieving two strategic grand targets, namely:

1. 1Playing an active role in programs to reduce poverty and unemployment in NTT through financing productive businesses at the micro, small, and medium enterprise levels.
2. To drive accelerated economic growth through financing for public service infrastructure and the industrialization of key commodities in NTT.

Langkah-langkah strategis yang dilaksanakan Manajemen untuk Tahun Buku 2025 – 2027 sebagai berikut :

The strategic steps implemented by Management for the 2025–2027 fiscal years are as follows:

No	Arah New Regulation	Kebijakan Strategis Strategic Policy	Target/Indikator	Target/Indicator
1	Melanjutkan penguatan struktural permodalan Continue strengthening the capital structure	Peningkatan setoran pemegang saham Increase in shareholder contributions	• Komitmen pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah. • Peningkatan modal disetor melalui metode inbreng. • Peningkatan profitabilitas bank	• Commitment to meeting paid-in capital requirements by local governments. • Increase in paid-in capital through the inbreng method. • Improving the bank's profitability
2	Meningkatkan kemampuan bank sebagai *Agent of Regional Development* Enhancing the bank's capacity as an Agent of Regional Development	Peningkatan pertumbuhan Penyaluran Kredit Increasing credit disbursement growth	• Meningkatkan pertumbuhan dan penyaluran kredit konsumer sebagai *core* utama bank. • Meningkatkan pertumbuhan dan penyaluran kredit UMKM. • Melanjutkan pengelolaan kualitas asset; fokus pada *recovery* NPL, *Loan at Risk* (LAR) dan pengendalian biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). • Peningkatan sinergitas dan kerjasama Peningkatan SDM dan tata kelola bidang kredit	• Increasing the growth and disbursement of consumer loans as the bank's core business. • Increasing the growth and disbursement of SME loans. • Continuing asset quality management; focusing on NPL recovery, Loans at Risk (LAR), and controlling the cost of the Allowance for Impairment Losses (AIL). • Enhancing synergy and collaboration Enhancing human resources and credit management
		Peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Increasing growth in Third-Party Funds (TPF)	• Peningkatan dana murah (CASA) dan mengurangi portofolio dana mahal. • Optimalisasi transaksi treasury dan aktivitas bisnis bank devisa. • Optimalisasi dan pengembangan layanan digital untuk peningkatan penghimpunan DPK • Peningkatan fee based income dari layanan transaksi kanal digital Bank NTT.	• Increasing low-cost funding (CASA) and reducing the high-cost funding portfolio. • Optimizing treasury transactions and foreign exchange banking activities. • Optimizing and developing digital services to boost TDF collection • Increasing fee-based income from Bank NTT's digital channel transaction services.
		Peningkatan kolaborasi dan sinergitas kerjasama korporasi untuk pengembangan bisnis bank. Enhancing collaboration and synergy in corporate partnerships to support the bank's business development.	• Peningkatan sinergitas dan kerjasama *stakeholders;* sinergi KUB, pemerintah daerah, korporasi dan swasta lainnya.	• Enhancing synergy and cooperation among stakeholders; fostering collaboration between KUB, local governments, corporations, and other private entities.

No	Arah New Regulation	Kebijakan Strategis Strategic Policy	Target/Indikator	Target/Indicator
3	Meningkatkan daya saing dan penguatan strategi pendukung pengembangan bisnis Enhancing competitiveness and strengthening business development support strategies	Peningkatan kualitas SDM dan internalisasi budaya perusahaan. Optimalisasi teknologi informasi dan digitalisasi untuk mendukung bisnis dan operasional. Improving human resource quality and internalizing corporate culture. Optimizing information technology and digitalization to support business and operations.	• Memperkuat organisasi dan peningkatan kapabilitas SDM melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan. • Penyesuaian struktur organisasi berdasarkan hasil temuan Otoritas dan perkembangan bisnis bank. • Melanjutkan internalisasi budaya perusahaan. • Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung operasional dan bisnis • Memperluas jangkauan layanan digitalisasi dengan memanfaatkan akses jaringan kantor. • Memperkuat sistem keamanan data dan security IT. • Melanjutkan program efisiensi.	• Strengthening the organization and enhancing human resource capabilities through education and training activities. • Adjusting the organizational structure based on the findings of the Authority and the bank's business developments. • Continuing the internalization of corporate culture. • Optimizing the use of digitalization to support operations and business • Expanding the scope of digital services by leveraging office network access. • Strengthening data security and IT security systems. • Continuing efficiency programs.
4	Peningkatan tata kelola bank Improving bank governance	Peningkatan GRC (*Good Corporate Governance. Risk Management* dan *Compliance)* Improving GRC (Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance)	• Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank komposit 2 (Sehat) • Memperkuat mitigasi risiko. ancaman siber dan security bank. • Peningkatan tata kelola. manajemen risiko dan pengawasan internal bank • Mitigasi dan pengendalian fraud.	• Maintaining the Bank's Composite Health Level 2 (Healthy) • Strengthening risk mitigation, cyber threats, and bank security. • Improving corporate governance, risk management, and internal oversight • Fraud mitigation and control

KONTRIBUSI BANK NTT TERHADAP PEMERINTAH

Kontribusi Bank NTT terhadap Pemerintah adalah dalam bentuk pembayaran pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Dividen

Dividen merupakan hak dari setiap pemegang saham yang ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham diambil dari hasil pembagian laba bersih. Dividen yang diterima oleh para pemegang saham dalam hari pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten dari Bank NTT dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan di wilayah masing-masing pemerintah daerah.

Penggunaan laba bersih PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun buku 2025 belum ditetapkan sampai dengan Laporan Tahunan ini disusun karena belum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan per 31 Desember 2025 yang dibayarkan Bank NTT adalah sebesar Rp79.21 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp24.94 miliar atau naik 45.95 % dari tahun 2024 sebesar Rp54.27 miliar.

BANK NTT'S CONTRIBUTION TO THE GOVERNMENT

Bank NTT's contribution to the government takes the form of tax payments and Local Own-Source Revenue (PAD) in the form of dividends distributed to shareholders each fiscal year.

Dividends

Dividends are the right of every shareholder, as determined and decided at the General Meeting of Shareholders (GMS). Dividends distributed to shareholders are derived from the distribution of net profit. Dividends received by shareholders in provincial/city/regency local governments from Bank NTT are recorded as Local Own-Source Revenue (PAD) and used for development in the respective local government areas.

The appropriation of net profit of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the 2025 financial year has not yet been determined as of the preparation of this Annual Report, as the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year has not yet been convened.

Income Tax (PPh)

The income tax paid by Bank NTT as of December 31, 2025, amounted to Rp 79.21 billion, an increase of Rp 24.94 billion or 45.95% from Rp 54.27 billion in 2024..

*)dalam jutaan *)in millions

KONTRIBUSI BANK NTT TERHADAP PEMERINTAH		
TAHUN BUKU FISCAL YEAR	**PAJAK** TAX **(Rp)**	**DIVIDEN** DIVIDENDS **(Rp)**
2013	85.333.648.506.-	196.963.921.217.-
2014	88.428.537.814.-	213.744.916.614.-
2015	119.850.098.290.-	230.579.863.595.-
2016	88.082.989.221.-	204.613.582.250.-
2017	95.402.433.371.-	215.456.075.630.-
2018	91.253.731.830	219.464.400.275.-
2019	87.038.728.948.-	206.915.998.286.-
2020	87.653.947.704.-	206.753.393.503-
2021	74.241.636.959.-	114.134.132.866.-
2022	76.421.783.906.-	158.172.908.741.-
2023	38.392.368.567.-	96.382.440.859.-
2024	54.272.128.296.-	96.382.440.859.-
2025	79.212.511.657.-	*)

*) sampai dengan Laporan Tahunan ini disusun belum diselenggarakan RUPS Tahunan TB 2025

As of the preparation of this Annual Report, the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2025 financial year has not yet been held.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai entitas bisnis. Bank NTT tidak hanya berfokus pada usaha mengejar profit namun juga terlibat aktif dalam upaya memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan di Nusa Tenggara Timur.

Manajemen menyadari bahwa keberhasilan bisnis yang berkelanjutan bertumpu pada keberadaan taraf hidup masyarakat dan lingkungan sekitar yang lebih baik oleh karena itu manajemen telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 128 Tahun 2025 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Taraf hidup masyarakat dan lingkungan hidup yang baik merupakan satu mata rantai dari siklus bisnis pendukung bagi Bank NTT dalam jangka panjang. Melalui program CSR Bank NTT Peduli manajemen berharap Bank NTT dapat berkontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan iklim ekosistem ekonomi kewilayahan yang berdampak positif bagi pertumbuhan kinerja bisnis Bank NTT.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

As a business entity, Bank NTT does not merely focus on pursuing profits but is also actively involved in efforts to have a positive impact on the development of communities and the environment in East Nusa Tenggara.

Management recognizes that sustainable business success depends on improving the quality of life for the community and the surrounding environment; therefore, management has issued Board of Directors Decision No. 128 of 2025 regarding the Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines for PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

A good standard of living for the community and a healthy environment are integral links in the long-term business support cycle for Bank NTT. Through the Bank NTT Peduli CSR program, management hopes that Bank NTT can contribute to fostering a climate of " " within the regional economic ecosystem, which will positively impact the growth of Bank NTT's business performance.

Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank NTT berfokus pada 7 (tujuh) bidang yaitu:

- Bidang Pendidikan
- Bidang Olahraga
- Bidang Budaya
- Bidang Kesehatan
- Bidang Ekonomi
- Bidang Sosial
- Bidang Lingkungan

Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) Bank NTT Tahun 2025 sepenuhnya berasal dari anggaran murni PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendapat persetujuan seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengelolaaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank NTT dikelompokan dalam 2 (dua) kategori yakni : *Planned* dan *Unplanned* dimana penyalurannya dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

The scope of Bank NTT Peduli's Corporate Social Responsibility focuses on 7 (seven) areas, namely:

- Education
- Sports
- Culture
- Health
- Economy
- Social Sector
- Environmental Sector

The Bank NTT Peduli Corporate Social Responsibility (CSR) Fund for 2025 is entirely sourced from the core budget of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and has been established in the Bank's Business Plan (RBB) and approved by all shareholders at the General Shareholders' Meeting (GSM).

The management of Bank NTT's Corporate Social Responsibility Fund is categorized into 2 (two) categories: Planned and Unplanned, with disbursements carried out through coordination with the local government.

LOGO TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BANK NTT

BANK NTT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) LOGO

ARTI LOGO TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BANK NTT

Guna membedakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank NTT dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank NTT yang memiliki nilai filosofis.

NAMA DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

Teks " bank NTT" menunjukan identitas sebagai lembaga resmi perbankan yang menjalankan program Tanggung Jawab Sosial perusahaan.

Penggunaan warna biru dan abu-abu pada teks "**bank NTT**" memberikan kesan profesionalisme, kepercayaan dan stabilitas sebagai ciri khas dari lembaga keuangan perbankan.

Kata "**PEDULI**" ditulis dengan huruf KAPITAL dan berwarna oranye menekankan semangat empati, kepedulian sosial dan keterlibatan aktif Bank NTT dalam membantu masyarakat, Warna oranye melambangkan energi, antusiasme,dan kehangatan selaras dengan nilai-nilai pelayanan sosial.

Teks "**Corporate Social Responsibility**" ditulis menggunakan huruf kecil dibawah kata PEDULI. menunjukkan program ini merupakan program resmi CSR Bank NTT. Warna putih diatas latar oranye memperjelas tulisan dan memberi kesan bersih serta tulus.

Gambar Dua Tangan

Tangan biru dan tangan oranye saling menjangkau dan menyentuh melambangkan solidaritas kerjasama dan bantuan antara perusahaan dan masyarakat. Posisi tangan menunjukkan dukungan dan pemberdayaan dimana satu pihak membantu pihak lainnya.

Makna dari keseluruhan logo Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bank NTT menggambarkan semangat kepedulian sosial Bank NTT terhadap masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan yang humanis, kolaboratif, serta berorientasi pada kemajuan bersama sebagai bukti nyata kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Sepanjang tahun 2025 Bank NTT telah menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan senilai Rp 7.000.000.000.- (Tujuh Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

MEANING OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) LOGO OF BANK NTT

To distinguish Bank NTT's Corporate Social Responsibility activities from its corporate promotional activities, Bank NTT has designed and uses a special logo in every implementation of its Corporate Social Responsibility programs, which carries philosophical significance.

COMPANY NAME AND IDENTITY

The text "Bank NTT" signifies its identity as an official banking institution implementing Corporate Social Responsibility programs.

The use of blue and gray in the text "Bank NTT" conveys professionalism, trust, and stability—hallmarks of a banking institution.

The word "PEDULI" is written in ALL CAPS and in orange to emphasize the spirit of empathy, social responsibility, and Bank NTT's active involvement in helping the community. The color orange symbolizes energy, enthusiasm, and warmth, in line with the values of social service.

The text "Corporate Social Responsibility" is written in lowercase letters below the word PEDULI, indicating that this is Bank NTT's official CSR program. The white text on an orange background makes the text clear and conveys a sense of cleanliness and sincerity.

Image of Two Hands

The blue and orange hands reaching out and touching each other symbolize solidarity, cooperation, and mutual support between the company and the community. The positioning of the hands signifies support and empowerment, where one party assists the other.

The meaning of the entire Bank NTT Corporate Social Responsibility logo depicts Bank NTT's spirit of social concern for the community and the environment through a humanistic, collaborative approach oriented toward shared progress—as tangible evidence of the bank's contribution to sustainable economic, social, and environmental development in East Nusa Tenggara.

Throughout 2025, Bank NTT has disbursed Corporate Social Responsibility funds amounting to Rp 7,000,000,000.- (Seven Billion Rupiah) with the following details:

NO	NAMA PROGRAM	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/ KAB. GOVERNMENT REGION (PROV/ CITY/DISTRICT).	TANGGAL DATE	ANGGARAN CSR TB 2025 BUDGET CSR TB 2025	REALISASI CSR TW I - IV TB 2025 CSR Realization Q1–Q4 TB 2025	PROGRAM NAME
I	**BIDANG PENDIDIKAN** EDUCATION					
	RINCIAN					DETAILS :
1	Bantuan dana CSR dalam rangka Renovasi Ruang Kelas SD Inpres Ndetu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo	Pemkab Nagekeo	12/17/2025		Rp147.000.000	CSR funding for the renovation of classrooms at SD Inpres Ndetu in Nangaroro Subdistrict, Nagekeo Regency
	REALISASI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN BUDGET IMPLEMENTATION FOR THE EDUCATION SECTOR			Rp550.000.000	Rp147.000.000.-	
II	**BIDANG OLAHRAGA** SPORTS SECTOR					
	RINCIAN					DETAILS :
1	Bantuan Dana CSR UnPlan Turnamen Sepak Bola Liga IV – El Tari Memorial Cup Tahun 2025	Pemkot Kupang	3/10/2025		Rp250.000.000	UnPlan CSR Funding for the 2025 El Tari Memorial Cup Fourth Division Soccer Tournament
2	Bantuan Dana CSR Humba Berlari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur	Pemkab Sumba Timur	5/27/2025		Rp50.000.000	CSR Funding Assistance from Humba Berlari, East Sumba Regency Government
3	Bantuan Dana *CSR* dalam rangka Turnamen Sepak Bola Falentino Cup III 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)	Pemkab TTU	7/29/2025		Rp75.000.000	CSR Funding Assistance for the 2025 Falentino Cup III Soccer Tournament North Central Timor Regency (TTU) Government
4	Bantuan Dana CSR Tim Persebata Dalam Ajang Liga 3 Nasional	Pemkab Lewoleba	8/29/2025		Rp500.000.000	Persebata Team Receives CSR Funding for the National League 3 Tournament
5	Bantuan Dana CSR Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk Pembangunan Lapangan Sepak Bola dan Joging Track di Area Civic Center Kantor Bupati Kupang	Pemkab Kupang	9/3/2025		Rp110.200.000	CSR Funding Assistance to the Kupang Regency Government for the Construction of a Soccer Field and Jogging Track in the Civic Center Area of the Kupang Regent's Office
6	Bantaun Dana CSR Unplan CSR Unplan Bank NTT Pada Kegiatan POPDA Provinsi NTT Tahun 2025	Pemprov NTT	9/18/2025		Rp50.000.000	Unplan Bank NTT's CSR Fund Support for the 2025 NTT Provincial POPDA Event
	REALISASI ANGGARAN BIDANG OLAHRAGA BUDGET IMPLEMENTATION FOR SPORTS			Rp800.000.000	Rp1.035.200.000.-	
III	**BIDANG BUDAYA** CULTURE SECTOR			**Rp550.000.000**	**Rp-**	
	RINCIAN					DETAILS :
	REALISASI ANGGARAN BIDANG BUDAYA BUDGET IMPLEMENTATION FOR THE CULTURE		-	-	-	
IV	**BIDANG KESEHATAN** HEALTH SECTOR					
	RINCIAN:					RINCIAN

NO	NAMA PROGRAM	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/ KAB. GOVERNMENT REGION (PROV/ CITY/DISTRICT).	TANGGAL DATE	ANGGARAN CSR TB 2025 BUDGET CSR TB 2025	REALISASI CSR TW I - IV TB 2025 CSR Realization Q1–Q4 TB 2025	PROGRAM NAME
1	Bantuan Dana CSR Penanganan Stunting. Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah	Pemkab Sumba Tengah	6/30/2025		Rp217.700.000	CSR Funding for Addressing Stunting, Malnutrition, and Undernutrition: Central Sumba Regency Government
	REALISASI ANGGARAN BIDANG KESEHATAN HEALTH SECTOR BUDGET IMPLEMENTATION			Rp800.000.000	Rp217.700.000	
V	**BIDANG EKONOM** ECONOMIC SECTOR I					
	RINCIAN :					DETAILS :
1	Bantuan CSR Tangki Fiber Kabupaten Ngada	Pemkab Ngada	7/31/2025		Rp350.000.000	CSR Assistance for Fiberglass Tanks in Ngada Regency
2	Bantuan Dana CSR dalam rangka Peningkatan Gizi & Penggerak UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao	Pemkab Rote Ndao	9/10/2025		Rp250.000.000	CSR Funding Assistance for Nutrition Improvement & SME Development by the Rote Ndao Regency Government
3	Bantuan Dana CSR Pelaksanaan Penataan dan Pengambangan Obyek Wisata Pemkab Belu	Pemkab Belu	2711/2025		Rp500.000.000	CSR Funding Assistance for the Development and Improvement of Tourist Attractions in Belu Regency
4	Bantuan Dana CSR Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemkab SBD	Pemkab SBD	11/28/2025		Rp370.000.000	CSR Funding Assistance for Tourism and Creative Economy Human Resources Training, SBD Regency Government
5	Bantuan Dana CSR Pembuatan Selasar/ Kanopi dalam Mendukung Pelaku UMKM	Pemkab TTU	10/9/2025		Rp350.000.000	CSR Funding Assistance for the Construction of Walkways/Canopies to Support MSME Actors
	REALISASI ANGGARAN BIDANG EKONOMI BUDGET IMPLEMENTATION FOR THE ECONOMIC SECTOR			Rp550.000.000	Rp1.820.000.000 .-	
VI	**BIDANG SOSIAL** SOCIAL SECTOR					
	RINCIAN :					DETAILS :
1	Bantuan Dana CSR Paskah Oekumene & Prosesi Paskah Pemuda GMIT Tahun 2025	Kota Kupang	4/16/2025		Rp250.000.000	CSR Funding for the Ecumenical Easter Celebration & GMIT Youth Easter Procession in 2025
2	Bantuan Dana CSR Perayaan Paskah bagi Pemkab Kupang	Pemkab Kupang	4/25/2025		Rp300.000.000	CSR Funding for the Kupang Regency Government's Easter Celebration
3	Bantuan Dana CSR Pembangunan Gedung Gereja Paroki ST. Yoseph Pekerja Penfui ST. Yesus Maria Yosep (YMY) Liliba Tahap II	Kota Kupang	6/10/2025		Rp250.000.000	CSR Funding Assistance for the Construction of the St. Joseph Workers' Parish Church of St. Jesus, Mary, and Joseph (YMY) in Liliba, Phase II
4	Bantuan Dana CSR pada kegiatan Konven Kaum Bapa Sinode GMIT Pemkab TTS Tahun 2025	Pemkab TTS	7/16/2025		Rp100.000.000	CSR Funding Assistance for the 2025 TTS Regency Government GMIT Synod Fathers' Convention

NO	NAMA PROGRAM	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/ KAB. GOVERNMENT REGION (PROV/ CITY/DISTRICT).	TANGGAL DATE	ANGGARAN CSR TB 2025 BUDGET CSR TB 2025	REALISASI CSR TW I - IV TB 2025 CSR Realization Q1–Q4 TB 2025	PROGRAM NAME
5	Bantuan Dana CSR Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Pembangunan Sarana Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Alor	Pemkab Alor	8/26/2025		Rp100.000.000	CSR Funding Assistance for Addressing Extreme Poverty and Developing Local Government Social Infrastructure in Alor Regency
6	Bantuan Dana CSR Renovasi Bangunan Gereja St. Yosef Paroki Reweng. Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat	Pemkab Manggarai Barat	9/26/2025		Rp100.000.000	CSR Funding Assistance for the Renovation of St. Joseph Church, Reweng Parish, South Lembor, West Manggarai Regency
7	Bantuan Dana CSR 1 Unit tangki Air bagi Pemkab Malaka	Pemkab Malaka	11/5/2025		Rp573.000.000	CSR Funding Assistance: 1 Water Tank for the Malaka Regency Government
8	Bantuan Dana CSR Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Pasang Baru Listrik	Pemkab Manggarai Timur	11/27/2025		Rp330.400.000	CSR Funding for Solar-Powered Public Street Lighting and New Electricity Installations
	REALISASI ANGGARAN BIDANG SOSIAL BUDGET IMPLEMENTATION FOR SOCIAL AFFAIRS			Rp1.900.000.000	Rp2.003.400.000.-	
VII	BIDANG LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL SECTOR					
	RINCIAN :					DETAILS :
1	Bantuan Dana CSR Prasarana. Sarana dan Utilitas (PSU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat	Pemkab Sumba Barat	5/26/2025		Rp295.000.000	CSR Funding for Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU) from the West Sumba Regency Government
2	Bantuan CSR Kontainer Sampah dan Kendaraan Pengangkut Sampah Kabupaten Ende	Pemkab Ende	8/6/2025		Rp270.000.000	CSR Assistance for Waste Containers and Waste Collection Vehicles in Ende Regency
	REALISASI ANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL BUDGET IMPLEMENTATION			Rp1.850.000.000	Rp565.000.000 .-	
	TOTAL REALISASI DANA CSR PER 31 DESEMBER 2025			Rp7.000.000.000	Rp7.000.000.000	

bankNTT
bankNTT

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

PENDAHULUAN
Introduction

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disingkat PT. Bank NTT (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraTimur disingkat PT. Bank NTT (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan ketentuan baru terkait penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dengan tujuan utama penguatan penerapan tata kelola dalam operasional Bank yang dituangkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan penunjangnya melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal

The Financial Services Authority has established new regulations regarding the implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, with the primary objective of strengthening the application of corporate governance in the Bank's operations, as set forth in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, and supported by Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025, regarding

24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berdasarkan peraturan ini, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Bank dinilai melalui 3 (tiga) pilar atau komponen utama yaitu struktur (organ perusahaan), proses (penerapan prinsip) dan *outcome* (hasil tata kelola). Mekanisme pengelolaan Bank diterapkan untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, standar, nilai etika dan praktek yang berlaku umum.

Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah memiliki peran mendorong pertumbuhan perekonomian daerah di segala bidang berlandaskan tata kelola yang baik yang juga mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial serta budaya yang ada sehingga manajemen Bank NTT terus berupaya melakukan inovasi dalam mengelola bank serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota. Peningkatan terus dilakukan Bank NTT untuk terus menunjukan komitmen dan dedikasi bagi pembangunan di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan visi dan misi Bank. Bank NTT terus merealisasikan pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan produk-produk pembiayaan bank sesuai dengan potensi-potensi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan untuk tercapainya visi Bank NTT "Menjadi Bank yang sehat, kuat dan terpercaya".

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DI BANK NTT

Penerapan tata kelola yang baik merupakan hal yang penting diperlukan dalam menghadapi tantangan dan persaingan sehingga dapat mendorong pencapaian rencana bisnis dalam perbankan. Bank NTT berkomitmen untuk terus melanjutkan dan berupaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* di setiap aktivitas bisnisnya.

Suatu proses dan mekanisme tata kelola Bank NTT dengan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* (CoC)

the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks. Based on these regulations, good corporate governance (*GCG*) in banks is assessed through three (3) pillars or main components, namely structure (corporate organization), process (application of principles), and outcome (results of governance). The Bank's management mechanisms are implemented to ensure the conduct of the Bank's business operations takes into account the interests of all relevant stakeholders, creating and optimizing the Bank's corporate value in a sustainable manner based on applicable laws and regulations, standards, ethical values, and generally accepted practices.

As a Regional Development Bank, Bank NTT plays a role in driving regional economic growth across all sectors based on good governance that also takes into account existing environmental, social, and cultural aspects; consequently, Bank NTT's management continues to strive for innovation in managing the bank and fostering good relations with the Provincial Government, as well as Regency and City Governments. Bank NTT is continuously making improvements to demonstrate its commitment and dedication to development in East Nusa Tenggara in line with the Bank's vision and mission. Bank NTT continues to provide financing to enhance the welfare of the people of NTT through banking products tailored to the potential of East Nusa Tenggara Province. Bank NTT continues to strive to improve and refine the implementation of good corporate governance on a sustainable basis to achieve Bank NTT's vision of "Becoming a healthy, strong, and trustworthy bank."

OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT BANK NTT

The implementation of good governance is essential in facing challenges and competition so that it can drive the achievement of business plans in banking. Bank NTT is committed to continuing and striving to improve the quality *of good corporate governance* in all of its business activities.

The processes and mechanisms for the governance of Bank NTT aimed at implementing *Good Corporate Governance* are set forth in the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 89 of 2022 regarding the

dan *Code of Corporate Governance* (CoCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dimana penetapan penerapan *Good Corporate Governance* Bank NTT, yaitu:

1. Mendorong pengelolaan Bank NTT secara profesional dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan secara optimal;
2. Mendorong manajemen Bank NTT agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
3. Meningkatkan daya saing Bank NTT karena telah dikelola dengan prinsip yang sehat dan beretika;
4. Meningkatkan peran Bank NTT sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah secara khusus dan nasional secara umum.

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dikenal atau disingkat dalam kata **TARIF** yang dijabarkan sebagai berikut:

Guidelines for *the Code of Conduct* (CoC) and *the Code of Corporate Governance* (CoCG) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, which establishes the implementation of *Good Corporate Governance* at Bank NTT, namely:

1. Promoting the professional management of Bank NTT based on the principles *of Good Corporate Governance* (GCG) to optimally enhance corporate value;
2. Encouraging Bank NTT management to make decisions and take actions grounded in high moral values, compliance with applicable laws and regulations, and an awareness of the company's social responsibility toward stakeholders as well as the preservation of the environment surrounding the company;
3. To enhance Bank NTT's competitiveness by ensuring it is managed according to sound and ethical principles;
4. To strengthen Bank NTT's role as a Regionally Owned Enterprise to maximize sources of Local Original Revenue;
5. To foster a business climate conducive to the development of regional investment in particular and national investment in general.

PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Based on Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023. The implementation of the principles of *Good Corporate Governance (GCG)* is known by the acronym **TARIF,** which is explained as follows:

1. Transparansi *(Transparency)*
   Mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan. pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan kepada stakeholders;
2. Akuntabilitas *(Accountability)*
   Mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban;
3. Pertanggungjawaban *(Responsibility)*
   Mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan perundang-undangan. nilai etika standar. prinsip dan praktek;
4. Independensi *(Independency)*
   Mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak manapun;
5. Kewajaran *(Fairness)*
   Mencakup kesetaraan. keseimbangan dan keadilan dalam memenuhi hak stakeholders;

1. Transparency
   Includes openness in decision-making, disclosure, and the provision of relevant information to stakeholders;
2. Accountability
   Includes clarity regarding functions and the fulfillment of responsibilities;
3. Responsibility
   Includes compliance of management with legal provisions, ethical standards, principles, and practices;
4. Independence
   Includes being managed independently and professionally, free from conflicts of interest and influence from any party;
5. Fairness
   Ensuring equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders;

VISI Vision

Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"

"To Become a Healthy, Strong and Trustworthy Bank"

MISI Mission

- **Pelopor penggerak ekonomi rakyat.**
- **Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.**
- **Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.**
- **Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.**

- **Pioneer of the people's economy.**
- **Exploring sources of regional potential to be cultivated productively for the welfare of the people of NTT.**
- **Increase local revenue sources.**
- **Optimizing the bank's intermediary function through the collection and distribution of funds to the community in the form of credit.**

2 Grand Strategis

1. **Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal dan berorientasi industri.**
2. **Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan infrastruktur & industrialisasi komiditi unggulan.**

1. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal dan berorientasi industri.
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan infrastruktur & industrialisasi komiditi unggulan.

Langkah-langkah Strategis Manajemen

Kebijakan manajemen di Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

Strategic Management Measures

Management policies for Fiscal Year 2025 are as follows:

No	Arah Direction	Kebijakan Strategis Strategic Policy	Target/Indikator Target/Indicator
1	Melanjutkan penguatan struktural permodalan Continue strengthening capital structure	Peningkatan setoran modal organik dari pemegang saham Increase in organic capital from share share	a. Komitmen pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah; b. Peningkatan modal disetor melalui metode inbreng; c. Peningkatan profitabilitas Bank; a. Commitment to paid-in paid-in by the Local Government; b. Increase in paid-in capital through the inbreng method; c. Improvement of the Bank's profitability;
2	Meningkatkan kemampuan Bank sebagai *Agent of Regional Development* *Enhancing the Bank's capacity as an Agent of Regional Development*	1. Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit Increasing credit disbursement growth	a. Meningkatkan pertumbuhan dan penyauran kredit consumer sebagai core utama bank; b. Meningkatkan pertumbuhan dan penyaluran kredit UMKM; c. Melanjutkan pengelolaan kualitas asset, fokus pada *recovery* NPL, *Loan at Risk* (LAR) dan pengendalian biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); d. Peningkatan sinergitas dan kerjasama peningkatan SDM dan tata kelola bidang kredit; a. Increasing growth and consumer credit disbursement as the bank's core business; b. Increasing the growth and disbursement of SME loans; c. Continuing asset quality management, focusing on NPL *recovery*, *Loans at Risk* (LAR), and controlling the cost of the Allowance for Impairment Losses (AIL); d. Enhancing synergy and collaboration improving human resources and credit management;

No	Arah Direction	Kebijakan Strategis Strategic Policy	Target/Indikator Target/Indicator
		2. Peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK); Increasing the growth of (DPK);	a. Peningkatan dana murah (CASA) dan mengurangi portofolio dana mahal; b. Optimalisasi transaksi *treasury* dan aktivitas bisnis Bank Devisa; c. Optimalisasi dan pengembangan layanan digita untuk peningkatan penghimpunan DPK; d. Peningkatan *fee base income* dan layanan transaksi kanal digital Bank NTT; a. Increasing low-cost funds (CASA) and reducing the high-cost fund portfolio; b. Optimizing treasury transactions and the business activities of the Foreign Exchange Bank; c. Optimizing and developing digital services to increase TDF collection; d. Increase in, fee based, income, and Bank NTT's digital channel transactions;
		3. Peningkatan kolaborasi dan sinergitas kerjasana korporasi untuk pengembangan bisnis Bank. Enhancing collaboration and synergy in corporate partnerships for the development the Bank's business	Peningkatan sinergitas dan kerjasama stakeholders; sinergi KUB, pemerintah daerah, korporasi dan swasta lainnya; Enhancing synergy and cooperation among stakeholders; synergy between KUB, local governments, corporations, and other private entities;
3	Meningkatkan daya saing dan penguatan strategi pendukung pengembangan bisnis; Enhancing competitiveness and strengthening strategies to support business development;	1. Peningkatan kualitas SDM dan internalisasi budaya perusahaan; 2. Peningkatan teknologi informasi dan digitalisai untuk mendukung bisnis dan operasional; 1. Improving the quality of human resources and internalizing corporate culture; 2. Improving information technology and digitalization to support business and operations;	a. Memperkuat organisasi dan peningkatan kapabilitas SDM melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan; b. Penyesuaian struktur organisasi berdasarkan hasil temuan Otoritas dan perkembangan bisnis Bank; c. Melanjutkan internalisasi budaya perusahaan; d. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung operasional dan bisnis; e. Memperluas jangkauan layanan digitalisasi dengan memanfaatkan akses jaringan kantor; f. Memperkuat sistem keamanan data dan *security* IT; g. Melanjutkan program efisiensi; a. Strengthening the organization and enhancing human resource capabilities through education and training activities; b. Adjusting the organizational structure based on the findings of the Authority and the Bank's business developments; c. Continuing the internalization of corporate culture; d. Optimizing the use of digitalization to support operations and business; e. Expanding the scope of digitalization by leveraging office network access; f. Strengthening data security and IT security IT security; g. Continuing efficiency programs;
4	Peningkatan tata kelola Bank Improving the Bank's governance	Peningkatan GRC (*Good Corporate Governance, Risk Management* dan *Compliance*). Improving GRC (Good Corporate Governance, Risk Management, and Compliance).	a. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank komposit 2 (Sehat); b. Memperkuat mitigasi risiko, ancaman siber dan *security* Bank; c. Memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan pengawasan internal Bank; d. Mitigasi dan pengendalian fraud. a. Maintaining Level Health Composite Bank 2 (Sound); b. Strengthening risk mitigation, cyber threats, and security; c. Strengthening the Bank's governance, risk management, and internal oversight; d. Fraud mitigation and control.

DASAR PENILAIAN TATA KELOLA

Ketentuan yang mendasari penilaian Tata Kelola Bank NTT:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
4. Peraturan Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penyampaian laporan emiten dan perusahaan publik;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 06/POJK,03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum, beserta perubahannya;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

BASIS FOR GOVERNANCE ASSESSMENT

Provisions underlying the assessment of NTT Bank's governance:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1992 on Banking, as amended by Law No. 10 of 1998;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2003 on the Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 No. 106; Supplement to the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 4656);
4. Bapepam-LK Regulation No. Kep-431/BL/2012 dated August 1, 2012, concerning the submission of reports by issuers and public companies;
5. Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.03/2016 on Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 06/POJK.03/2015 dated March 31, 2015, on Transparency and Publication of Bank Reports;
6. Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016, regarding the Assessment of Commercial Bank Soundness;
7. Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 on Bank Business Plans, as amended;
8. Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Requirements for Commercial Banks, as amended;
9. Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Issuers or Public Companies, as amended;
10. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 on Transparency and Publication of Bank Reports, as amended;
11. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 dated July 30, 2021, regarding Commercial Banks;
12. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;

13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
14. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 14 November 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
16. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur beserta perubahannya.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Struktur dalam *Corporate Governance* terdiri dari Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite di bawah Direksi dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Struktur PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 033 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang dijabarkan sebagai berikut:

13. Financial Services Authority Circular Letter No. 43/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016, regarding Transparency and Publication of Reports of Conventional Commercial Banks;
14. Financial Services Authority Letter No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, regarding the Assessment of the Soundness of Commercial Banks;
15. Financial Services Authority Circular Letter No. 14 of 2025 dated November 14, 2025, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
16. The Articles of Association of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and its amendments.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, the *corporate governance* structure consists of Shareholders and the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, committees under the Board of Commissioners, the Board of Directors, andunder the Board of Directors, and the Corporate Secretary. The structure of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur is stipulated in Board of Directors' Resolution No. 033 of 2023 regarding the Organizational Structure and Operational Procedures of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, which is outlined as follows:

STRUKTUR ORGANISASI BANK NTT

Struktur Organisasi Bank NTT

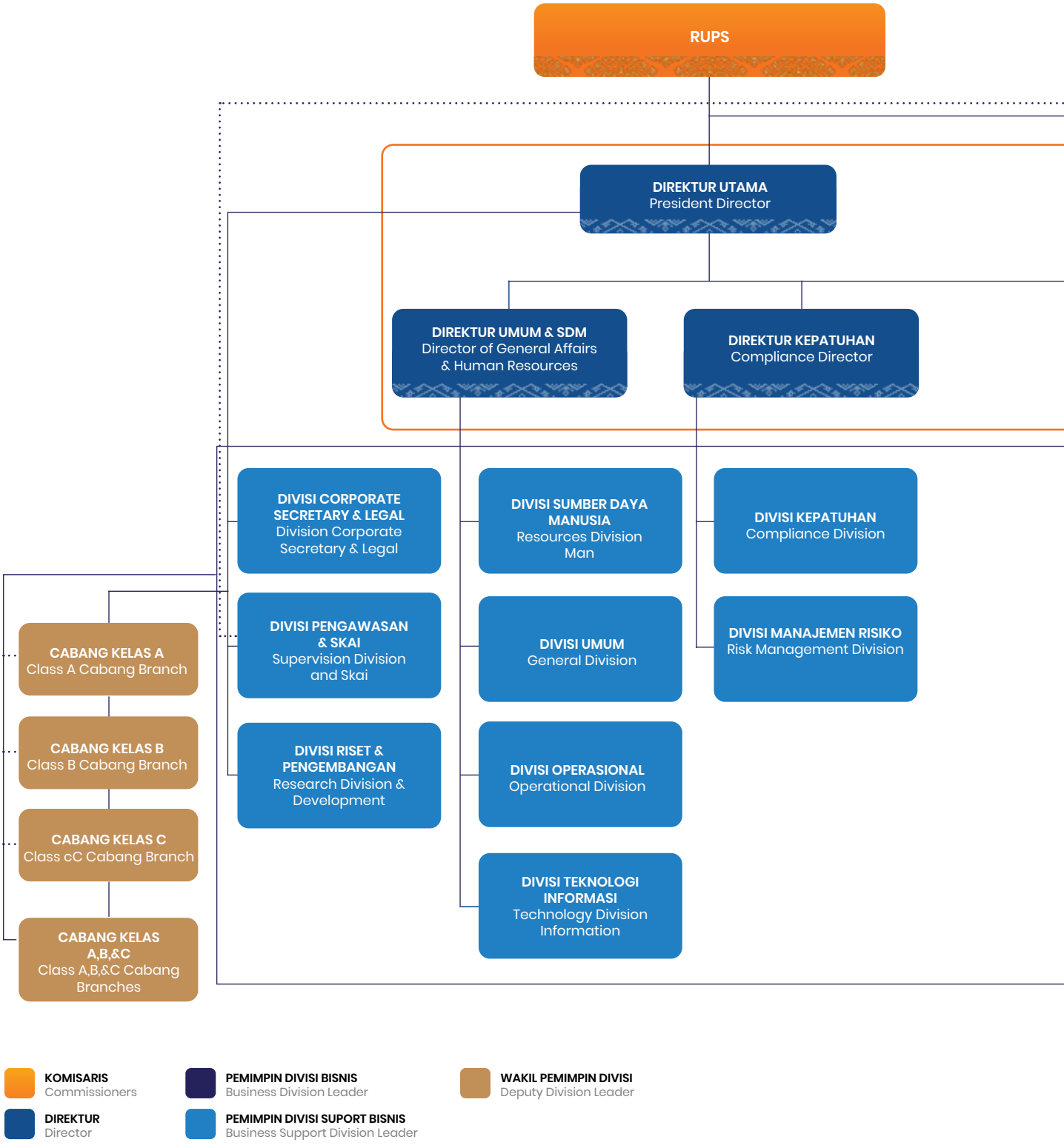

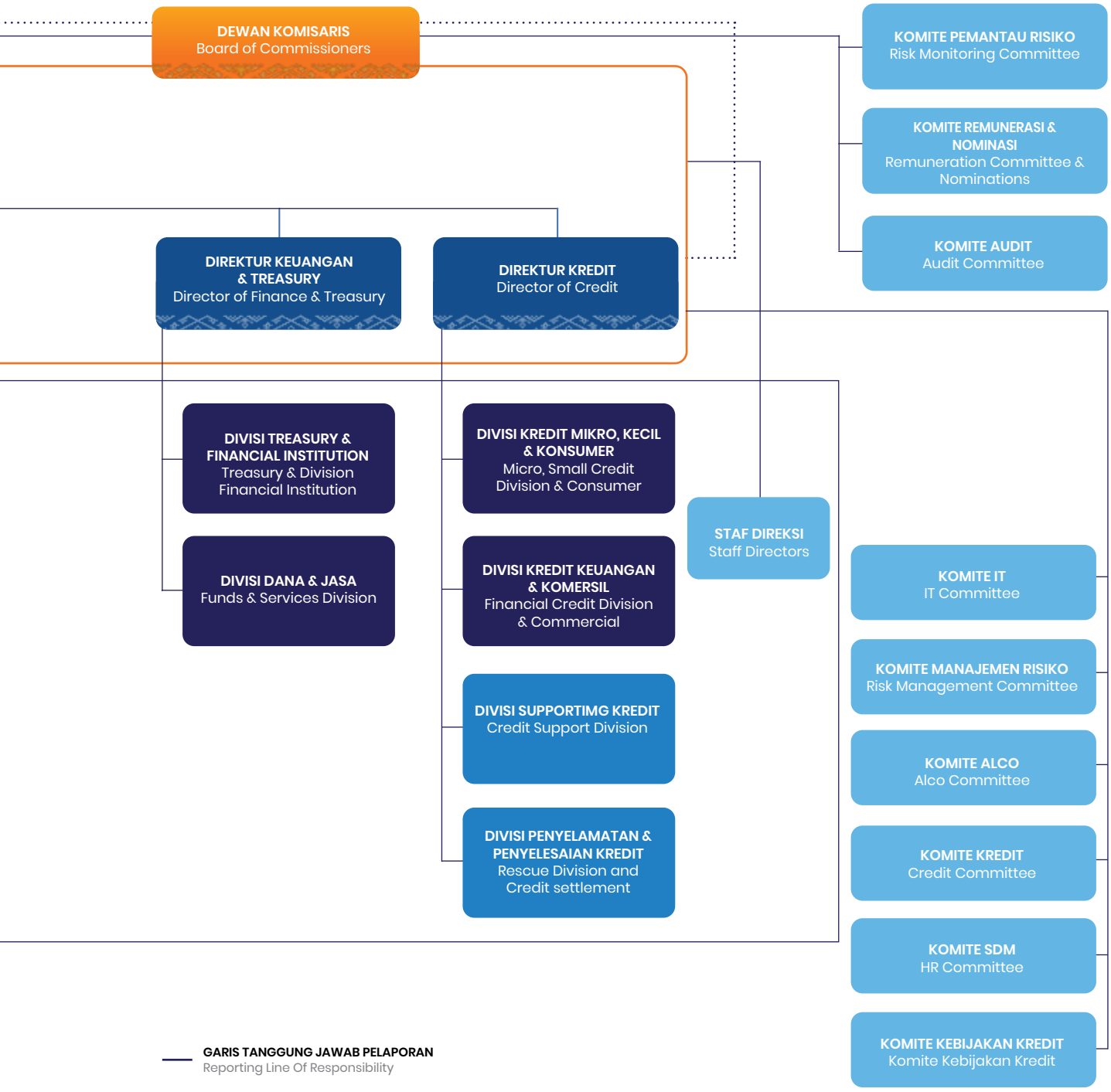
DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
KOMITE PEMANTAU RISIKO
Risk Monitoring Committee
KOMITE REMUNERASI & NOMINASI
Remuneration Committee & Nominations
KOMITE AUDIT
Audit Committee
DIREKTUR KEUANGAN & TREASURY
Director of Finance & Treasury
DIREKTUR KREDIT
Director of Credit
DIVISI TREASURY & FINANCIAL INSTITUTION
Treasury & Division Financial Institution
DIVISI DANA & JASA
Funds & Services Division
DIVISI KREDIT MIKRO, KECIL & KONSUMER
Micro, Small Credit Division & Consumer
DIVISI KREDIT KEUANGAN & KOMERSIL
Financial Credit Division & Commercial
DIVISI SUPPORTIMG KREDIT
Credit Support Division
DIVISI PENYELAMATAN & PENYELESAIAN KREDIT
Rescue Division and Credit settlement
STAF DIREKSI
Staff Directors
KOMITE IT
IT Committee
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee
KOMITE ALCO
Alco Committee
KOMITE KREDIT
Credit Committee
KOMITE SDM
HR Committee
KOMITE KEBIJAKAN KREDIT
Komite Kebijakan Kredit
GARIS TANGGUNG JAWAB PELAPORAN
Reporting Line Of Responsibility
GARIS SUPERVISI, KOMUNIKASI, KOORDINASI
Line Of Supervision, Communication, Coordination

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Mechanism

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham adalah perorangan atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan, Pemegang Saham terbagi atas Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B. Saham Seri A untuk BUMD hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Saham Seri B adalah Saham Biasa yang dimiliki oleh Badan/ Perorangan.

Seluruh Pemegang Saham Bank memiliki kesetaraan dalam memperoleh dan menjalankan haknya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Bank. Setiap Pemegang Saham Bank menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Bank dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan.

a) Pemegang Saham Bank dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
   1) Pemegang Saham Seri A adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan juga seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (22 Kabupaten) yang memiliki Saham Seri A dengan hak istimewa berupa:
   2) Memiliki hak suara khusus (Saham Seri A) dalam mengajukan usul pencalonan Anggota Direksi dan Komisaris menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan atau perubahan bentuk badan hukum;

b) Membubarkan dan melikuidasi Perseroan,
   Pemegang Saham Seri B adalah publik (orang persero atau badan) yang diakui Perseroan sebagai pemilik saham.

Hak Pemegang Saham

a) Meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan sewaktu-waktu dapat meminta kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengadakan rapat guna memperoleh informasi mengenai keadaan perusahaan;

SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities that legally own one or more shares in the company; Shareholders are divided into Series A Shareholders and Series B Shareholders. Series A shares for Regional Owned Enterprises (BUMD) may only be held by the Regional Government, and Series B shares are Common Shares held by Entities or Individuals.

All Bank Shareholders are equal in exercising their rights in accordance with the provisions set forth in the Law and the Bank's Articles of Association. Every Bank Shareholder is legally bound by the Bank's Articles of Association and all decisions validly adopted at the General Meeting of Shareholders, as well as by applicable laws and regulations.

a) The Bank's shareholders are grouped into 2 (two) categories, namely:
   1) The Series A Shareholders are the East Nusa Tenggara Provincial Government as the Majority Shareholder, as well as all regencies and cities within the East Nusa Tenggara Province (22 regencies) that hold Series A Shares with the following special rights:
   2) Having special voting rights (Series A Shares) in proposing candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners; convening a General Meeting of Shareholders in the event that the Board of Directors and/or Board of Commissioners fails to hold an Annual General Meeting and/or an Extraordinary General Meeting; and carrying out mergers, consolidations, takeovers, spin-offs, or changes in legal form;

b) Dissolving and liquidating the Company,
   Series B Shareholders are the public (individuals or entities) recognized by the Company as shareholders.

Shareholder Rights

a) Request the convening of a General Meeting of Shareholders and, at any time, request the Board of Commissioners and the Board of Directors to hold a meeting to obtain information regarding the company's condition;

b) Memperoleh informasi dan data yang menyeluruh dan benar mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
c) Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
d) Hak lainnya berdasarkan peraturan yang mendasari pendirian perusahaan dan peraturan perundang-undangan,

Wewenang Pemegang Saham

a) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
b) Menetapkan ketentuan mengenai sistem pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
c) Menetapkan gaji dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
d) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
e) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perseroan;
f) Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
g) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal;
h) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;

Tanggung Jawab Pemegang Saham

a) Menjalankan wewenang dengan prinsip *Good Corporate Governance;*
b) Wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme RUPS;
c) Menjaga independensi dengan tidak mencampuri kegiatan operasional Bank dan menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan mengenai hal penting yang dapat mempengaruhi keberadaan Bank;
d) Tidak membuat keputusan dan kebijakan yang bersifat operasional Bank yang menjadi tanggung jawab Direksi,

b) Receive comprehensive and accurate information and data regarding the company in a timely and regular manner;
c) To receive a distribution of the company's profits allocated for Local Government Revenue in accordance with applicable regulations and provisions;
d) Other rights based on the regulations governing the establishment of the company and applicable laws and regulations;

Shareholder Powers

a) To appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
b) Establishing provisions regarding the system for the appointment and removal of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
c) Setting the salaries and remuneration of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
d) Approving and ratifying the Supervisory Report of the Board of Commissioners;
e) Approve and ratify the Board of Directors' Report on the implementation of the Company's management;
f) Approve and ratify the Bank's Business Plan and Annual Work Plan and Budget;
g) Approve and ratify the Annual Financial Statements audited by the External Auditor;
h) Deciding on the use of net profit, including determining the amount of provisions for reserves;

Shareholders Responsibilities

a) Exercising authority in accordance with the principles of *Good Corporate Governance;*
b) Must comply with applicable laws and regulations and implement decisions made through the General Meeting of Shareholders;
c) Maintain independence by not interfering in the Bank's operational activities and avoiding conflicts of interest in decision-making regarding matters of significance that may affect the Bank's existence;
d) Does not make operational decisions or policies regarding the Bank that fall under the responsibility of the Board of Directors,

Tanggung Jawab Bank Dalam Memenuhi Hak Pemegang Saham

a) Bank harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank;
b) Bank harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank;
c) Bank harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
d) Bank tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya, Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya;
e) Bank harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan RUPS.

The Bank's Responsibility in Fulfilling Shareholders Rights

a) The Bank must protect the rights of shareholders in accordance with applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association;
b) The Bank must maintain a proper shareholder registry in accordance with applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association;
c) The Bank must provide timely, accurate, and regular information regarding the company to shareholders, except for matters of a confidential nature;
d) The Bank must not show favoritism toward specific shareholders by providing information not disclosed to other shareholders; information must be provided to all shareholders regardless of the type and classification of shares they hold;
e) The Bank must be able to provide complete explanations and accurate information during the conduct of the General Meeting of Shareholders.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting Of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Anggaran Dasar. Segala prosedur terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 258 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019.

1. Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris,
3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan,
4. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit,
5. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan,
6. Mengubah Anggaran Dasar, Membubarkan perseroan,

Penyelanggaraan RUPS terdiri atas 3 (tiga) ketentuan yaitu:

1. RUPS Tahunan,
2. RUPS Luar Biasa dan
3. RUPS Luar Biasa dalam rangka menyetujui perbuatan Direksi.

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.

Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS-LB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the GMS, is a corporate body that holds authority not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits prescribed by the Articles of Association. All procedures related to the General Meeting of Shareholders (GMS) are regulated in Board of Directors Resolution No. 258 of 2019 concerning Guidelines for the Conduct of the General Meeting of Shareholders of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, which was enacted on December 27, 2019.

1. The authorities not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:
2. Appointing and dismissing members of the Board of Directors and Board of Commissioners,
3. Approving mergers, consolidations, takeovers, or spin-offs,
4. Approving the filing of a petition for the company to be declared bankrupt,
5. Approving the extension of the company's duration,
6. Amending the Articles of Association, Dissolving the company,

The conduct of the General Meeting of Shareholders consists of 3 (three) provisions, namely:

1. Annual General Meeting,
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders, and
3. An Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the actions of the Board of Directors.

The Annual General Meeting must be held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, while an Extraordinary General Meeting may be held at any time as needed for the Bank's interests.

The Board of Directors or the Board of Commissioners must convene and hold an EGM upon a written request from 1 (one) or more Shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with valid voting rights. Such written request must be submitted by registered mail, specifying the matters to be discussed along with the reasons therefor.

Penyelenggaraan RUPS diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan protokol RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Bank, Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Bank dan/atau Pengurus Bank, sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai:

1) Panggilan untuk RUPS yang mencakup rincian agenda dan penjelasannya;
2) Agenda lain - lain yang akan diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
3) Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
4) Risalah RUPS/ Akta Berita Acara RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta, yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung;
5) Penghasilan serta fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat;
6) Informasi keuangan dan lain-lain menyangkut Bank yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan,

Prosedur dan pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank. Transaksi Material yang dilakukan oleh Bank harus mendapatkan persetujuan RUPS sesuai peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank.

Wewenang RUPS

a) Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
b) Mengambil keputusan mengenai penggunaan laba bersih termasuk penyisihan cadangan umum;
c) Mengangkat Direksi dan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan hasil *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan;

The General Meeting of Shareholders is convened and conducted in accordance with the General Meeting of Shareholders protocol based on the provisions set forth in the Law and the Bank's Articles of Association. At the General Meeting of Shareholders, Shareholders are entitled to receive information regarding the Bank and/or the Bank's Management, provided it relates to the agenda of the General Meeting of Shareholders and does not conflict with the Bank's interests. Every Shareholder is entitled to receive a complete and accurate explanation and information regarding:

1) The notice of the GMS, which includes details of the agenda and explanations;
2) Other agenda items to be provided before and/or during the GMS;
3) Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted through transparent and fair procedures;
4) Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) or the GMS Minutes for each Shareholder upon request, containing both supporting and opposing opinions;
5) Compensation and benefits for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as details regarding the salaries and allowances received by the current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
6) Financial and other information regarding the Bank contained in the Annual Report and Financial Statements;

The procedures and conduct of the General Meeting of Shareholders are carried out in accordance with applicable regulations and the Bank's Articles of Association. Material Transactions conducted by the Bank must obtain approval from the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations and the Bank's Articles of Association.

Authority of the General Meeting of Shareholders

a) Making decisions regarding amendments to the Articles of Association;
b) Making decisions regarding the use of net income, including the allocation of general reserves;
c) Appointing the Board of Directors and Commissioners based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, taking into account the results of *the fit and proper test* conducted by the Financial Services Authority;

d) Memberhentikan Direksi dan/atau Komisaris;
e) Menyetujui atau menolak usulan rotasi Direksi dan Komisaris;
f) Menyetujui atau menolak kinerja Komisaris dan Direksi secara individual maupun kolektif melalui mekanisme RUPS Tahunan;
g) Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi;
h) Menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Komisaris atau Komite Audit;
i) Menandatangani kontrak manajemen dengan setiap calon anggota Direksi yang akan menduduki jabatannya di Perusahaan untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan perbankan, anggaran dasar, dan peraturan lainnya;
j) Untuk efisiensi waktu dan biaya, RUPS dapat mendelegasikan beberapa wewenang RUPS kepada Pemegang Saham Pengendali atau Dewan Komisaris.

Pelaksanaan RUPS

1. RUPS dimulai dengan pemanggilan yang dilakukan Direksi dan/ atau Komisaris dengan surat tercatat, yang harus dikirimkan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum RUPS diselenggarakan;
2. RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali, Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah satu Pemegang Saham yang diberikan kuasa oleh Pemegang Saham Pengendali atau seseorang yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir dalam rapat;
3. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan Pegawai Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa;
4. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham pengendali, Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka keputusan berdasarkan suara terbanyak;
5. Hasil keputusan RUPS dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat, Penandatanganan Berita Acara Rapat tidak perlu dilakukan apabila Berita Acara Rapat tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris, Risalah tersebut harus mencerminkan adanya dinamika rapat, antara lain memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung keputusan RUPS;

d) Removing Directors and/or Commissioners;
e) Approving or rejecting proposals for the rotation of Directors and Commissioners;
f) Approving or rejecting the performance of Commissioners and Directors, both individually and collectively, through the Annual General Meeting mechanism;
g) Determining the remuneration of Commissioners and Directors;
h) Appointing an External Auditor from candidates proposed by the Board of Commissioners or the Audit Committee;
i) Signing management contracts with each prospective Board member who will assume their position at the Company to meet the targets set by the AGM, laws and regulations in the field of limited liability companies and banking, the articles of association, and other regulations;
j) For the sake of time and cost efficiency, the GMS may delegate certain powers of the GMS to the Controlling Shareholder or the Board of Commissioners.

Conduct of the GMS

1. The GMS begins with a notice issued by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners via registered mail, which must be sent no later than 14 (fourteen) days before the GMS is held;
2. The General Meeting of Shareholders is chaired by the Controlling Shareholder. In the event that the Controlling Shareholder is unable to attend, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a Shareholder authorized by the Controlling Shareholder or a person selected by and from among the Shareholders present at the meeting;
3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company are prohibited from acting as proxies;
4. Decisions of the GMS are made by consensus among the controlling shareholders. In the event that consensus cannot be reached, decisions are made by majority vote;
5. The results of the GMS decisions are recorded in the Minutes of the Meeting signed by the Chair of the Meeting; signing of the Minutes is not required if the Minutes are prepared in the form of a notarial deed; the Minutes must reflect the dynamics of the meeting, including containing opinions both supporting and opposing the GMS decisions;

6. Setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena Tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris;
7. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi dalam manajemen;
8. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Every shareholder has the right to file a lawsuit against the company in District Court if they suffer harm due to actions by the company that are deemed unfair and without reasonable grounds as a result of a decision by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or the Board of Commissioners;
7. Shareholders do not interfere in management;
8. A General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders representing more than half of the total number of shares with valid voting rights.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Conduct Of The General Meeting Of Shareholders (GMS)

Sepanjang tahun buku 2025, PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan RUPS sebanyak 4 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 14 Mei 2025

Sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 09 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang, rapat diadakan di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT. BPD NTT dengan agenda rapat sebagai berikut:

a. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan Tahun Buku 2024 oleh Dewan Direksi dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Tahun Buku 2024 dan Penetapan Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2024;

b. Laporan Rencana Bisnis Bank, Rencana Kerja dan Anggaran Buku Tahun 2025-2027, *Recovery Plan* (Rencana Pemulihan Tahun Buku 2024), termasuk Pembagian Dividen dan Penyisihan Biaya Jasa Produksi Tahun Buku 2025;

c. Penawaran Saham Seri A dan Pengesahan Rencana Tambahan Setoran Modal untuk Tahun Buku 2025;

d. Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Persetujuan Penambahan Setoran Modal Tahun 2025 dalam Bentuk Mata Uang dan Bentuk Lainnya;

e. Pemberian Kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit Tahun Buku 2025;

f. Lain-lain.

During the 2025 fiscal year, PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur held 4 (four) General Meetings of Shareholders, with the following details:

1. Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 on May 14, 2025

As stated in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 09 dated May 14, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang, the meeting was held in the Fernandez Hall on the 4th Floor of the East Nusa Tenggara Governor's Office and was chaired by the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT. BPD NTT with the following meeting agenda:

a. Financial Performance Accountability Report for the 2024 Fiscal Year by the Board of Directors and Accountability Report of the Board of Commissioners on the Performance of Supervisory Functions for the 2024 Fiscal Year and the Determination of the Distribution of Net Profit for the 2024 Fiscal Year;

b. The Bank's Business Plan, Work Plan, and Budget for the 2025–2027 Fiscal Years, the Recovery *Plan* (for the 2024 Fiscal Year), including the Dividend Distribution and Allocation of Production Service Costs for the 2025 Fiscal Year;

c. Offering of Series A Shares and Approval of the Additional Capital Contribution Plan for Fiscal Year 2025;

d. Granting of Authority to the Board of Commissioners by the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Approval of Additional Capital Contributions for the 2025 Fiscal Year in the Form of Currency and Other Forms;

e. Granting of Authority by the General Meeting of Shareholders (GMS) to the Board of Commissioners for the appointment and designation of a Public Accounting Firm to conduct the Audit for Fiscal Year 2025;

f. Miscellaneous.

Adapun hasil keputusan rapat ini sebagai berikut:

a. Untuk agenda pertama:
   1) Laporan diterima dengan baik dan dengan itu mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 19 Maret 2025 dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material, dengan beberapa catatan perbaikan yang perlu diperbaiki;
   2) Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan cara pembayaran dividen termasuk segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.

b. Untuk agenda kedua:
   1) Menyetujui Laporan Rencana Bisnis Bank, Rencana Kerja dan Anggaran TB 2025-2027 dan akan disempurnakan setelah pelantikan pengurus yang baru dan kemudian akan diputuskan dalam RUPS;
   2) Menyetujui *Recovery Plan* (Rencana Pemulihan) TB 2024;
   3) Menyetujui pembagian dividen dan penyisihan biaya jasa produksi TB 2025 dengan pembagian dividen/laba TB 2024 sebagai berikut:
      a) Dividen 87,5%;
      b) Cadangan Umum 12,5%

      Penyisihan Biaya Jasa Produksi TB 2025 adalah:
      a) Jasa produksi Pegawai 18%;
      b) Jasa produksi Pengurus 5%;

c. Untuk agenda ketiga:
   1) Menyetujui penawaran Saham Seri A dan Seri B dengan syarat-syarat yang disampaikan;
   2) Menyetujui tambahan setoran modal untuk TB 2025 berupa pemambahan setoran modal oleh:
      a) Pemerintah Kabupaten Malaka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
      b) Pemerintah Kabupaten Ngada sebesar Rp. 2.057.370.000,- (dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

d. Untuk agenda keempat:
   Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan penambahan Setoran Modal TB 2025 dalam bentuk uang dan bentuk lainnya;

The results of this meeting are as follows:

a. Regarding the first agenda item:
   1) The report was accepted and thereby approved the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, which were audited by the Public Accounting Firm as set forth in its report dated March 19, 2025, with an unqualified opinion in all material respects, subject to certain corrective actions that need to be addressed;
   2) The Board of Directors is authorized, with the right of substitution, to determine the method of dividend payment, including all necessary actions in connection therewith, including the payment schedule.

b. For the second agenda item:
   1) To approve the Bank's Business Plan Report, Work Plan, and Budget for the 2025–2027 Fiscal Years, which will be refined following the inauguration of the new management and subsequently decided upon at the General Meeting of Shareholders;
   2) Approve *the Recovery Plan* for the 2024 Fiscal Year;
   3) Approve the distribution of dividends and the allocation of production service costs for TB 2025 with the distribution of dividends/profits for TB 2024 as follows:
      a) Dividends 87.5%;
      b)General Reserve 12.5%

      The allocation of production service costs for the 2025 fiscal year is:
      a) Employee production services 18%;
      b) Management production services 5%;

c. For the third agenda item:
   1) Approve the offering of Series A and Series B Shares under the terms presented;
   2) To approve an additional capital contribution for the 2025 fiscal year in the form of an increased capital contribution by:
      a) The Malaka Regency Government in the amount of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah);
      b) The Ngada Regency Government in the amount of Rp. 2,057,370,000 (two billion fifty-seven million three hundred seventy thousand rupiah);

d. For the fourth agenda item:
   To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve an increase in TB 2025 capital contributions in the form of cash and other forms;

e. Untuk agenda kelima:
Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk TB 2025, menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang professional dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan usulan yang disampaikan Direksi.

e. For the fifth agenda item:
Approve granting authority to the Board of Commissioners for TB 2025 to appoint and designate a professional Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, while taking into account the proposals submitted by the Board of Directors.

Rekapitulasi kehadiran pada RUPS Tahunan TB 2024 adalah sebagai berikut:

The attendance summary for the 2024 TB Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
1.	Emanuel Melkiades Laka Lena	Gubernur NTT Governor of NTT	Hadir Present	Seri A	52.500.755
2.	Yosef Lede	Bupati Kupang Regent of Kupang	Hadir Present	Seri A	12.500.000
3.	Christian Widodo	Walikota Kupang Mayor of Kupang	Hadir Present	Seri A	12.500.000
4.	Umbu Lili Pekuwali	Bupati Sumba Timur Regent East East	Hadir Present	Seri A	9.228.066
5.	Yohanis Dade	Bupati Sumba Barat Regent of West Sumba	Hadir Present	Seri A	9.034.031
6.	Paulus Henuk	Bupati Rote Ndao Regent of Rote Ndao	Hadir Present	Seri A	9.027.261
7.	Eduard Markus Lioe	Bupati Timor Tengah Selatan Regent Central South	Hadir Present	Seri A	10.006.577
8.	Yosep Falentinus Delasalle Kebo	Bupati Timor Tengah Utara Regent Timor North Central	Hadir Present	Seri A	11.565.422
9.	Willybrodus Lay	Bupati Belu Regent of Belu	Hadir Present	Seri A	7.387.172
10.	Agas Andreas	Bupati Manggarai Timur Regent Manggarai East	Hadir Present	Seri A	10.058.282
11.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla	Bupati Sumba Barat Daya Regent of West Sumba Daya	Hadir Present	Seri A	9.678.175
12.	Herybertus Geradus Laju Nabit	Bupati Manggarai Regent of Manggarai	Hadir Present	Seri A	6.140.811
13.	Edistasius Endi	Bupati Manggarai Barat Regent Manggarai West	Hadir Present	Seri A	5.719.967
14.	Simplisius Donatus	Bupati Nagekeo Regent of Nagekeo	Hadir Present	Seri A	4.469.967
15.	Drs. Paulus S. K. Limu	Bupati Sumba Tengah Regent Central Central	Hadir Present	Seri A	6.642.283
16.	P. Kanisius Tuaq	Bupati Lembata Regent of Lembata	Hadir Present	Seri A	5.396.088
17.	Antonius Doni Dihen	Bupati Flores Timur Regent of East Flores	Hadir Present	Seri A	3.529.859
18.	Krisman Bernard Riwu Kore	Bupati Sabu Raijua Regent of Sabu Raijua	Hadir Present	Seri A	5.649.283

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
19.	Yosef Benediktus Badeoda	Bupati Ende Regent of Ende	Hadir Present	Seri A	5.261.653
20.	Stefanus Bria Seran	Bupati Malaka Regent of Malaka	Hadir Present	Seri A	7.404.141
21.	Juventus Prima Yoris Kago	Bupati Sikka Regent of Sikka	Hadir Present	Seri A	3.572.463
22.	Iskandar Lakamau	Bupati Alor Regent of Alor	Hadir Present	Seri A	2.702.105
23.	Raymundus Bena	Bupati Ngada Regent of Ngada	Hadir Present	Seri A	2.500.000
24.	Welem Nunuhitu	Kuasa dari Pemegang Saham an. Charles Amos Corputty Authority from Shareholder Charles AmosCorputty	Hadir Present	Seri B	95.744
25.	Djami Maxin Wila Huky	Ahli Waris dari Luther Oktovianus Wila Huky (Alm) Expert Waris of Luther Oktovianus Wila Huky (deceased)	Hadir Present	Seri B	23.321
26.	Novi Maria Porsiana	Kuasa Pemegang Saham an. Johan Christian Tallo Authorized Shareholders, a.k.a. Johan Christian Tallo	Hadir Present	Seri B	11.660
27.	Yohanis Landu Praing	Direktur TI dan Operasional merangkap Plt. Direktur Utama Bank NTT Director IT and Operations and Acting Director of Bank NTT	Hadir Present	-	-
28.	Hilarius Minggu	Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Director of Funds and Treasury, Bank NTT	Hadir Present	-	-
29.	Christofel S. M. Adoe	Direktur Kepatuhan Bank NTT Director of Compliance Bank NTT	Hadir Present	-	-
30.	Frans Gana	Komisaris Independen Bank NTT Commissioner Independent Bank NTT	Hadir Present	-	-

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Mei 2025

Sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 10 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang, rapat diadakan di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT. BPD NTT dengan agenda rapat sebagai berikut:

a. Perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai syarat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahan jumlah jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Penentuan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
d. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) membantu Pemegang Saham Pengendali dan Para Pemegang Saham untuk proses pengisian jabatan Pengurus (Komisaris dan Direksi);
e. Perubahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2024 tentang Direktur Kredit berasal dari Bank Jawa Timur sesuai *Share Holders Agreement* (SHA) Pasal 7 Ayat (4).

Hasil Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 14 Mei 2025

a. Untuk agenda rapat yang pertama:
   Memperpanjang masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit terhitung tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 14 Agustus 2025 atau sampai dengan adanya penetapan Direktur Utama dan Direktur Kredit Defenitif;
b. Untuk agenda rapat yang kedua:
   Merubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (4) huruf a, b dan c yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

DIREKSI PASAL 12

(1) Pengurus

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on May 14, 2025

As stated in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 10 dated May 14, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang, the meeting was held in the Fernandez Hall on the 4th Floor of the East Nusa Tenggara Governor's Office and chaired by the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT. BPD NTT with the following agenda:

a. Extension of the terms of office of the Acting President Director and Acting Director of Credit of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
b. Amendments to the Company's Articles of Association regarding the qualifications for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as changes to the number of positions on the Board of Directors and the Board of Commissioners;
c. Appointment of Commissioners and Directors of the Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
d. The Remuneration and Nomination Committee (KRN) assists the Controlling Shareholder and the Shareholders in the process of filling Executive positions (Commissioners and Directors);
e. Amendment to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 16, 2024, regarding the Credit Director being appointed from Bank Jawa Timur in accordance with Article 7, Paragraph (4) of *the Shareholders Agreement* (SHA).

Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on May 14, 2025

a. For the first agenda item:
   Extending the terms of office of the Acting President Director and Acting Credit Director effective May 14, 2025, until August 14, 2025, or until the appointment of the definitive President Director and Credit Director;
b. For the second agenda item:
   Amending the Company's Articles of Association in Article 12, paragraph (1), subparagraph (b), and Article 12, paragraph (4), subparagraphs (a), (b), and (c), which shall henceforth read as follows:

BOARD OF DIRECTORS ARTICLE 12

b. Management

a. Direksi terdiri paling banyak 7 (tujuh) orang Direktur dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

(4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Direksi

a. Persyaratan Umum

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
5. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan setempat dan surat keterangan tidak pernah terpidana;
7. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi/ Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
8. Mempunyai integritas yang meliputi syarat:
   a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
   d) Cakap melakukan perbuatan hukum;
   e) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
9) Memiliki reputasi keuangan yang baik yang dibuktikan dengan:
   a) Tidak memiliki kredit macet maupun kredit pembiayaan macet;

a. The Board of Directors consists of a maximum of 7 (seven) Directors, one of whom is appointed as President Director.

(4) Requirements for appointment as a Member of the Board of Directors

a. General Requirements

1. To be devout to God Almighty;
2. Loyal and obedient to the state and the government of the Republic of Indonesia;
3. Not involved, either directly or indirectly, in acts of treason against the Unitary State of the Republic of Indonesia;
4. Physically and mentally fit, as evidenced by a medical certificate from a government hospital;
5. Educated and holding at least a Bachelor's degree (S1), as evidenced by a certified copy of the diploma authenticated by an authorized official;
6. Not deprived of voting rights based on a local court decision and a certificate stating no prior criminal convictions;
7. Has never served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a corporation to be declared bankrupt;
8. Possess integrity, including the following requirements:
   a) Possess good character and morals, as demonstrated by compliance with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal offense that harmed the State and/or was related to the financial sector;
   b) Commitment to complying with laws and regulations and supporting the policies of the Financial Services Authority (OJK);
   c) Having a commitment to the development of sound bank operations;
   d) Being legally competent;
   e) Is not listed as a party prohibited from becoming a Principal Party;
9) Has a good financial reputation, as evidenced by:
   a) Having no delinquent loans or delinquent financing;

b) Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah termasuk pinjaman online;
c) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah
d) menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan;
e) Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;

10. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:
    a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    b) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
    c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;

b. Persyaratan Khusus
    1. Usia pada saat melamar sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
    2. Bagi Direksi yang akan berakhir masa jabatan dan masa jabatan masih dapat diperpanjang 1 (satu) periode lagi, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan pengurus tersebut berakhir maka Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) akan melakukan evaluasi kinerja kerja;
    3. Khusus untuk Direktur Utama dapat menjabat sebagai Direksi untuk periode ketiga kalinya, dengan syarat yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta berprestasi luar biasa;
    4. Wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank;
    5. Wajib Memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau profesi yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang disesuaikan dengan aturan yang

b) Having no overdue or problematic debts, including online loans;
c) Has never been declared bankrupt and has never served as a Shareholder, Member of the Board of Commissioners, or Member of the Board of Directors who was found guilty
d) causing a company to be declared bankrupt based on a court ruling within the last 5 (five) years prior to nomination, and;
e) Having a commitment to take the necessary measures should the bank face capital or liquidity difficulties;

10) Possess competencies that include the following requirements:
    a) Sufficient knowledge in the banking sector relevant to the position;
    b) Experience in the banking and/or financial sector;
    c) The ability to carry out strategic management for the development of a sound bank;

b. Special Requirements
    1. Must be at least 30 (thirty) years of age at the time of application;
    2. For members of the Board of Directors whose term is about to expire and whose term may be extended for one (1) additional term, the Remuneration and Nomination Committee (KRN) shall conduct a performance evaluation no later than six (6) months before the expiration of the director's term;
    3. Specifically, the President Director may serve as a member of the Board of Directors for a third term, provided that the individual is in good physical and mental health and has demonstrated exceptional performance;
    4. Must have at least 5 (five) years of experience in the operational field as a bank executive;
    5. Must hold a risk management certificate issued by a certification or professional body approved by the Financial Services Authority (OJK) or in accordance with currently applicable

berlaku saat ini. Apabila Calon Direksi belum memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang dipersyaratkan diatas namun telah memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko tersebut dengan biaya sendiri dan dibuktikan tanda kelulusan sehingga sepanjang tidak menunda target tanggal penyampaian dokumen calon ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan;

6. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan;
7. Bersedia menetap di Wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Direksi yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai;
8. Menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan riwayat hidup (*curriculum vitae*) dan visi misi;
9. Tidak sedang menjalani skorsing dan masa hukuman selama 2 (dua) tahun terakhir;
10. Khusus untuk Calon Direksi penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut minimal baik, atau dibuktikan dengan surat rekomendasi/ surat keterangan kinerja dari pimpinan perusahaan dimana calon bekerja;
11. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

c. Persyaratan Lainnya

1. Sebelum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK, maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan (umum, khusus, lainnya) serta memiliki integritas, reputasi keuangan, kesesuaian jabatan yang dituju dan kompetensi terhadap Calon Anggota Direksi yang

regulations. If a Board Candidate does not yet possess the risk management certificate as required above but has met all general requirements and other specific requirements, the candidate in question is permitted to undergo the risk management certification process at their own expense and provide proof of passing, provided that this does not delay the target date for submitting the candidate's documents to the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of competence and suitability;

6. Not serving as an officer or member of a political party at the time of nomination and during the term of office as a Company Officer;
7. Be willing to reside in the Kupang City area and its surroundings during the term of office as a Director, as stated in writing and signed on a stamped document;
8. Submit an application letter addressed to the Remuneration and Nomination Committee (KRN), complete with all required documents, and include a resume (*curriculum vitae*) and a statement of vision and mission;
9. Not currently serving a suspension or sentence within the last 2 (two) years;
10. Specifically for Board of Directors candidates, the Key Performance Indicator (KPI) or performance evaluation for the last 3 (three) consecutive years must be at least "good," or evidenced by a letter of recommendation or performance statement from the company's management where the candidate is employed;
11. Pass the Competency and Fitness Assessment in accordance with Financial Services Authority (OJK) regulations;

c. Other Requirements

1. Before undergoing the competency and suitability assessment at the OJK, candidates must first pass an assessment by the KRN regarding compliance with requirements (general, specific, other) as well as possess integrity, financial reputation, suitability for the targeted position, and competence regarding the Prospective Board Member

akan diajukan sebagaimana tercakup dalam SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank;

2. Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-2 (dua) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
3. Khusus untuk Calon Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan wajib memenuhi syarat:
   a) Memiliki Integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
   b) Mempunyai independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum;

to be nominated as covered in OJK Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Competency and Fit and Proper Test for Controlling Shareholders, Prospective Board Members, and Members of the Board of Commissioners of Banks;

2. There must be no family relationship up to the second degree—whether by direct or collateral line, including sons-in-law and brothers-in-law—among members of the Board of Directors or between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Specifically, candidates for the position of Director overseeing compliance functions must meet the following requirements:
   a) Possess integrity and sufficient knowledge of Bank Indonesia regulations, Financial Services Authority regulations, and other applicable laws and regulations;
   b) Possess independence, meaning they have no financial, managerial, shareholding, and/or family relationships up to the second degree with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or relationships with banks that could impair their ability to act independently as stipulated in the provisions regarding the implementation of *Good Corporate Governance* for commercial banks;

Merubah Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 15 ayat (4) huruf a, b dan c, yang selanjutnya

PASAL 15

(4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris
   a. Persyaratan Umum
      1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah Republik Indonesia;
      3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;

Amend the Company's Articles of Association in Article 15, paragraph (4), letters a, b, and c, as follows

ARTICLE 15

(4) Requirements for appointment as a Member of the Board of Commissioners
   a. General Requirements
      1. To be devout to God Almighty;
      2. Loyal and obedient to the state and government of the Republic of Indonesia;
      3. Has not been involved, either directly or indirectly, in acts of treason against the Unitary State of the Republic of Indonesia;
      4. Physically and mentally healthy, as evidenced by a medical certificate from a government hospital;

5. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan setempat dan surat keterangan tidak pernah terpidana;
7. Mempunyai integritas yang meliputi syarat:
   a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   c) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasioenal bank yang sehat;
   d) Cakap melakukan perbuatan hukum;
   e) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
8) Memiliki reputasi keuangan yang baik yang dibuktikan dengan:
   a) Tidak memiliki kredit macet maupun kredit pembiayaan macet;
   b) Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah termasuk pinjaman online;
   c) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
9) Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:
   a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   b) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;

b. Persyaratan Khusus
   1. Bagi Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatan dan masa jabatan masih dapat diperpanjang 1 (satu) periode lagi, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

5. Holds a minimum of a Bachelor's degree (S1), evidenced by a notarized copy of the diploma issued by an authorized official;
6. Not deprived of voting rights based on a local court decision and a certificate stating that the applicant has never been convicted of a crime;
7. Possess integrity, which includes the following requirements:
   a) Possessing good character and morals, as demonstrated, among other things, by compliance with applicable regulations, including never having been convicted of has been found guilty of a criminal offense that causes harm to the State and/or is related to the financial sector;
   b) Committed to complying with laws and regulations and supporting the policies of the Financial Services Authority (OJK);
   c) Committed to the development of sound bank operations;
   d) Legally competent;
   e) Is not included among parties prohibited from becoming a Principal Party;
8) Possess a good financial reputation, as evidenced by:
   a) Having no non-performing loans or non-performing financing;
   b) Having no overdue or problematic debts, including online loans;
   c) Has never been declared bankrupt and has never served as a Shareholder, Member of the Board of Commissioners, or Member of the Board of Directors who was found guilty of causing a corporation to be declared bankrupt based on a court ruling within the last 5 (five) years prior to nomination;
9) Possessing competencies that include the following requirements:
   a) Sufficient knowledge of banking relevant to the position;
   b) Experience in the banking and/or finance sector;

b. Special Requirements
   2. For members of the Board of Commissioners whose terms are about to expire and may be extended for one (1) additional term, the Remuneration and Nomination Committee

masa jabatan pengurus tersebut berakhir maka Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) akan melakukan evaluasi kinerja kerja dan dilanjutkan dengan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Wajib Memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau profesi yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku saat ini. Apabila Calon Direksi belum memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang dipersyaratkan diatas namun telah memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko tersebut dengan biaya sendiri dan dibuktikan tanda kelulusan sehingga sepanjang tidak menunda target tanggal penyampaian dokumen calon ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan;
4. Bersedia menetap di Wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Direksi yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai;
5. Menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan riwayat hidup (curriculum vitae) dan visi misi;
6. Sebelum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK, maka terlebih dahulu melewati penilaian/ *assessment* oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sesuai jabatan yang dituju terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam SEOJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank;
7. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan OJK;

(KRN) shall conduct a performance evaluation no later than six (6) months before the expiration of their term, followed by the procedures in accordance with applicable regulations;

2. Must hold a risk management certificate issued by a certification body or professional association approved by the Financial Services Authority (OJK) or in accordance with current regulations. If a Director Candidate does not yet possess the risk management certificate as required above but has met all general requirements and other specific requirements, the candidate in question is permitted to undergo the risk management certification process at their own expense and provide proof of passing, provided that this does not delay the target date for submitting the candidate's documents to the Financial Services Authority (OJK) for the assessment of competence and suitability;
3. Not serving as an officer or member of a political party at the time of nomination and during their tenure as a Company Officer;
4. Is willing to reside in the Kupang City area and its surroundings during their tenure as a Director, as stated in writing and signed on a stamped document;
5. Submit an application letter addressed to the Remuneration and Nomination Committee (KRN), accompanied by all required documents, including a resume (*curriculum vitae*) and a statement of vision and mission;
6. Before undergoing the fit and proper assessment at OJK, candidates must first pass an assessment by the RNC regarding the fulfillment of requirements for integrity, financial reputation, and competence appropriate to the targeted position for the Proposed Board of Commissioners Member, as covered in SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Assessment of Competency and Suitability for Candidates for Controlling Shareholders, Candidates for Members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners of a bank;
7. Pass the Competency and Suitability Assessment in accordance with OJK regulations;

8. Calon Komisaris Independen harus memiliki:

   a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan sebagai Komisaris Independen;
   b) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;

c. Persyaratan Lainnya
   1. Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar;
   2. Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud pada ketentuan penerapan tata kelola bagi bank umum;
   3. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, dan masa tunggu bagi mantan Direktur Utama dan mantan Anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada bank yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan;
   4. Sebelum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK, maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan (umum, khusus, lainnya) serta memiliki integritas, reputasi keuangan, kesesuaian jabatan yang dituju dan kompetensi terhadap Calon Anggota Direksi yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang

8. Candidates for Independent Commissioners must possess:

   a) Adequate and relevant knowledge in the banking sector as an Independent Commissioner;
   b) Experience in the banking and/or financial sector;

c. Other Requirements
   1. There shall be no family relationship up to the second degree, either in the direct line or the collateral line, including sons-in-law, daughters-in-law, parents-in-law, and siblings-in-law, among members of the Board of Commissioners or between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
   2. Specifically, candidates for Independent Commissioners must possess independence, meaning they must have no financial, managerial, shareholding, and/or family relationships up to the second degree with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Head of the Bank, nor any relationships with the bank that could affect their ability to act independently, as stipulated in the corporate governance regulations for commercial banks;
   3. Former members of the Board of Directors or Executive Officers of a bank, or parties having a relationship with the bank that could affect their ability to act independently, must undergo a waiting period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at the relevant bank, and the waiting period for former Chief Executive Officers and former Board Members overseeing supervisory functions or Executive Officers performing supervisory functions at the relevant bank must be at least 6 (six) months before becoming an Independent Commissioner at the relevant bank;
   4. Before undergoing the fit and proper assessment at the OJK, candidates must first pass an assessment by the KRN regarding compliance with requirements (general, specific, other) as well as integrity, financial reputation, suitability for the intended position, and competence for the proposed Board of Directors candidates, as covered in SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank;

5. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
6. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.

c. Untuk agenda rapat yang ketiga:
   1) Membatalkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 13, tanggal 08 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) dimana telah diangkat calon komisaris utama atas nama Saudara COSMAS D LANA dan calon komisaris Independen atas nama Saudara ALO LILIWERI;
   2) Menyetujui Standar Operasional Prosedur 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak diganti tetapi disempurnakan dan disesuaikan dengan mandatori berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023;
   3) Memutuskan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki usia sekurang-kurangnya 30 tahun, mempunyai sertifikasi dan mempunyai pengalaman di bidang perbankan tidak harus di Bank NTT;
   4) Calon yang sudah diterima oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) diminta untuk melengkapi syarat-syarat sesuai aturan OJK;
   5) Penentuan nama Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Assessment of Competency and Suitability for Controlling Shareholders, Proposed Board of Directors and Board of Commissioners Members of Banks;

5. A Non-Independent Commissioner may transition to an Independent Commissioner after meeting the requirements for an Independent Commissioner and must obtain OJK approval through a fit and proper assessment;
6. Non-Independent Commissioners who will transition to become Independent Commissioners as referred to in the point above must undergo a waiting period of at least 1 (one) year.

c. For the third agenda item:
   1) To revoke the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 13, dated May 8, 2024, whereby Mr. COSMAS D LANA was appointed as a candidate for Lead Commissioner and Mr. ALO LILIWERI was appointed as a candidate for Independent Commissioner;
   2) Approving the 2023 (two thousand twenty-three) Standard Operating Procedures, which shall not be replaced but rather refined and adjusted in accordance with the mandatory requirements under Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023;
   3) Resolved that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners must be at least 30 years of age, hold relevant certifications, and have experience in the banking sector, which need not be at Bank NTT;
   4) Candidates who have been accepted by the Remuneration and Nomination Committee (KRN) are required to fulfill the requirements in accordance with OJK regulations;
   5) The list of candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Komisaris Utama	S. Donny H. Heatubun	Lead Commissioner
Komisaris Independen	Frans Gana (posisi tetap)	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Eko Setyo Budi Irianto	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Yosef Juwa Dobe Ngole	Independent Commissioner
Komisaris Non Independen	Dari Bank Jatim	Non-Independent Commissioner

Direksi Board of Directors		
Direktur Utama	Charlie Paulus dan Yohanis Landu Praing	President Director
Direktur Kredit	Aloysius R. A. Geong	Director of Credit
Direktur Umum dan SDM	Yohanis Landu Praing dan Rahmat Saleh	General and Human Resources Director
Direktur TI	Sonny G. S. Pellokila	Director of IT
Direktur Dana	Siti Arianty Sulifa Aksa	Director of Funds
Direktur Keuangan dan Treasury	Heru Helbianto	Director of Finance and Treasury
Direktur Kepatuhan	Revi Adiana Silawati	Director of Compliance

d. Untuk agenda rapat yang keempat:
Menyetujui penegasan pemberian kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk melanjutkan proses pengisian jabatan Pengurus untuk Komisaris dan Direksi ketahapan selanjutnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

e. Untuk agenda rapat yang kelima:
Menyetujui untuk merubah Keputusan RUPS LB tanggal 16 November 2024 tentang Direktur Kredit berasal dari Bank Jatim sesuai SHA Pasal 7 ayat 4, yang berbunyi: *"Kewenangan Bank Jatim sebagai perusahaan induk yaitu untuk "mengusulkan dan menunjuk Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris Perseroan untuk diajukan dan ditetapkan dalam RUPS Perseroan sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai perwakilan pihak kedua""*.

d. For the fourth agenda item:
Approve the delegation of authority to the Remuneration and Nomination Committee (KRN) to proceed with the process of filling executive positions for Commissioners and Directors to the next stage with the Financial Services Authority (OJK);

e. For the fifth agenda item:
Approve the amendment to the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution dated November 16, 2024, regarding the Credit Director from Bank Jatim in accordance with Article 7, Paragraph 4 of the Articles of Association, which reads: *"The authority of Bank Jatim as the parent company is to 'propose and appoint candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to be submitted and appointed at the Company's General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association as the representative of the second party'"*.

Rekapitulasi kehadiran pada RUPS Luar Biasa tanggal 14 Mei 2025 adalah sebagai berikut:

The attendance summary for the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 14, 2025, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
1.	Emanuel Melkiades Laka Lena	Gubernur NTT Governor of NTT	Hadir Present	Seri A	52.500.755
2.	Yosef Lede	Bupati Kupang Regent of Kupang	Hadir Present	Seri A	12.500.000
3.	Christian Widodo	Walikota Kupang Mayor of Kupang	Hadir Present	Seri A	12.500.000
4.	Umbu Lili Pekuwali	Bupati Sumba Timur Regent East East	Hadir Present	Seri A	9.228.066
5.	Yohanis Dade	Bupati Sumba Barat Regent of West Sumba	Hadir Present	Seri A	9.034.031

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
6.	Paulus Henuk	Bupati Rote Ndao Regent of Rote Ndao	Hadir Present	Seri A	9.027.261
7.	Eduard Markus Lioe	Bupati Timor Tengah Selatan Regent Central South	Hadir Present	Seri A	10.006.577
8.	Yosep Falentinus Delasalle Kebo	Bupati Timor Tengah Utara Regent Timor North Central	Hadir Present	Seri A	11.565.422
9.	Willybrodus Lay	Bupati Belu Regent of Belu	Hadir Present	Seri A	7.387.172
10.	Agas Andreas	Bupati Manggarai Timur Regent Manggarai East	Hadir Present	Seri A	10.058.282
11.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla	Bupati Sumba Barat Daya Regent of West Sumba Daya	Hadir Present	Seri A	9.678.175
12.	Herybertus Geradus Laju Nabit	Bupati Manggarai Regent of Manggarai	Hadir Present	Seri A	6.140.811
13.	Edistasius Endi	Bupati Manggarai Barat Regent Manggarai West	Hadir Present	Seri A	5.719.967
14.	Simplisius Donatus	Bupati Nagekeo Regent of Nagekeo	Hadir Present	Seri A	4.469.967
15.	Drs. Paulus S. K. Limu	Bupati Sumba Tengah Regent Central Central	Hadir Present	Seri A	6.642.283
16.	P. Kanisius Tuaq	Bupati Lembata Regent of Lembata	Hadir Present	Seri A	5.396.088
17.	Antonius Doni Dihen	Bupati Flores Timur Regent of East Flores	Hadir Present	Seri A	3.529.859
18.	Krisman Bernard Riwu Kore	Bupati Sabu Raijua Regent of Sabu Raijua	Hadir Present	Seri A	5.649.283
19.	Yosef Benediktus Badeoda	Bupati Ende Regent of Ende	Hadir Present	Seri A	5.261.653
20.	Stefanus Bria Seran	Bupati Malaka Regent of Malaka	Hadir Present	Seri A	7.404.141
21.	Juventus Prima Yoris Kago	Bupati Sikka Regent of Sikka	Hadir Present	Seri A	3.572.463
22.	Iskandar Lakamau	Bupati Alor Regent of Alor	Hadir Present	Seri A	2.702.105
23.	Raymundus Bena	Bupati Ngada Regent of Ngada	Hadir Present	Seri A	2.500.000
24.	Welem Nunuhitu	Kuasa dari Pemegang Saham an. Charles Amos Corputty Authority from Shareholder Charles AmosCorputty	Hadir Present	Seri B	95.744
25.	Djami Maxin Wila Huky	Ahli Waris dari Luther Oktovianus Wila Huky (Alm) Expert Waris of Luther Oktovianus Wila Huky (deceased)	Hadir Present	Seri B	23.321
26.	Novi Maria Porsiana	Kuasa Pemegang Saham an. Johan Christian Tallo Authorized Shareholders, a.k.a. Johan Christian Tallo	Hadir Present	Seri B	11.660

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
27.	Yohanis Landu Praing	Direktur TI dan Operasional merangkap Plt. Direktur Utama Bank NTT Director IT and Operations and Acting Director of Bank NTT	Hadir Present	-	-
28.	Hilarius Minggu	Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Director of Funds and Treasury, Bank NTT	Hadir Present	-	-
29.	Christofel S. M. Adoe	Direktur Kepatuhan Bank NTT Director of Compliance Bank NTT	Hadir Present	-	-
30.	Frans Gana	Komisaris Independen Bank NTT Commissioner Independent Bank NTT	Hadir Present	-	-

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 4 September 2025

Sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 10 tanggal 4 September 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang, rapat diadakan secara *video conference* dan dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT. BPD NTT dengan agenda rapat sebagai berikut:

a. Pengesahan Bank Jatim sebagai Pemegang Saham Baru dan Penetapan Bank Jatim sebagai Pemegang Saham Pengendali Kedua (PSP-2);
b. Laporan Progres Pemenuhan Struktur Pengurus/ Pencalonan Pengurus;
c. Pengangkatan Sdr. Hilarius Minggu sebagai Direktur Dana dengan masa jabatan sampai dengan adanya Direktur Dana Definitif;
d. Penegasan dan penetapan masa jabatan pengurus, perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kredit dan Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi.

Hasil Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 4 September 2025

a. Untuk agenda rapat pertama:
   1) Menyetujui dan menetapkan setoran modal yang akan dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dalam bentuk tunai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan harga sebesar Rp. 14.000,-

3. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on September 4, 2025

As stated in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 10 dated September 4, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang, the meeting was held via *video conference* and chaired by the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT. BPD NTT with the following agenda:

a. Approval of Bank Jatim as a New Shareholder and Designation of Bank Jatim as the Second Controlling Shareholder (PSP-2);
b. Progress Report on the Fulfillment of the Management Structure/Nomination of Management;
c. The appointment of Mr. Hilarius Minggu as Acting Director of Funds, with a term of office until a permanent Director of Funds is appointed;
d. Confirmation and determination of the terms of office for the management, extension of the Acting President Director and Acting Director of Credit, and appointment of the Acting Board of Directors.

Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on September 4, 2025

a. For the first agenda item:
   1) Approving and determining the capital contribution to be made by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk in cash in the amount of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) at a price of Rp.

(empat belas ribu rupiah) per lembar sahamnya sehingga jumlah kepemilikan saham Seri A oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah sejumlah 7.142.857 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 71.428.570.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selisih atas kelebihan setoran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan nilai nominal saham tersebut dijadikan Agio Saham;

2) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS) atas setoran modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tersebut;

3) Menetapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Penetapan ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

b. Untuk agenda rapat kedua:
Setuju menunggu proses fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan;

c. Untuk agenda rapat ketiga:
Menyetujui pengangkatan Sdr. Hilarius Minggu sebagai Direktur Dana dengan masa jabatan sampai dengan adanya Direktur Dana definitif;

d. Untuk agenda rapat keempat:

1) Menyetujui penetapan nomenklatur jabatan Bpk. Yohanis Landu Praing yang semula Direktur Teknologi Informasi dan Operasional berubah menjadi Direktur Umum dan SDM sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor 10, tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Serlina Sari Dewi Darmawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, Notaris di Kota Kupang;

2) Perpanjangan Plt. Direktur Utama dan Plt. Direktur Kredit sebagai berikut:

a) Plt. Direktur Utama adalah Yohanis Landu Praing dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 14 Februari 2026 atau sampai dengan adanya Direktur Utama Definitif;

14,000 (fourteen thousand rupiah) per share, so that the total ownership of Series A shares by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk is 7,142,857 (seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven) shares with a par value of Rp. 71,428,570,000 (seventy-one billion four hundred twenty-eight million five hundred seventy thousand rupiah). The difference between the excess capital contribution of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk and the par value of the shares shall be treated as share premium;

2) Authorizing the Board of Commissioners to implement the General Meeting of Shareholders' (GMS) resolution regarding the capital contribution of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

3) Designating PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk as the Second Controlling Shareholder (PSP) and the Parent Bank of the Banking Business Group (KUB) in accordance with the provisions of Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 12/POJK.03/2020 on the Consolidation of Commercial Banks. This designation shall take effect upon obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK);

b. For the second meeting agenda:
Agreed to await the results of the fit and proper test from the Financial Services Authority;

c. For the third meeting agenda:
Approved the appointment of Mr. Hilarius Minggu as Director of Funds with a term of office until a permanent Director of Funds is appointed;

d. For the fourth meeting agenda:

1) Approves the designation of the position of Mr. Yohanis Landu Praing, previously Director of Information Technology and Operations, to be changed to General Director and Human Resources in accordance with the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 10, dated May 14, 2025, drawn up before Serlina Sari Dewi Darmawan, Bachelor of Law, Master of Notarial Law, Notary in the City of Kupang;

2) Extension of the Acting President Director and Acting Director of Credit as follows:

a) The Acting President Director is Yohanis Landu Praing with a term of office effective from August 15, 2025, until February 14, 2026, or until a Permanent President Director is appointed;

b) Plt. Direktur Kredit adalah Hilarius Minggu dengan masa dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan 14 Februari 2026 atau sampai dengan adanya Direktur Kredit Definitif;

3) Penetapan Plt. Direksi dengan masa jabatan 6 bulan atau sampai dengan adanya Direktur Definitif sebagai berikut:
   a) Plt. Direktur Teknologi Informasi adalah Hilarius Minggu;
   b) Plt. Direktur Keuangan dan Treasury adalah Yohanis Landu Praing.

b) The Acting Director of Credit is Hilarius Minggu, with a term of office effective from August 15, 2025, until February 14, 2026, or until a permanent Director of Credit is appointed;

3) Appointment of Acting Directors with a term of 6 months or until a permanent Director is appointed, as follows:
   a) The Acting Director of Information Technology is Hilarius Minggu;
   b) The Acting Director of Finance and Treasury is Yohanis Landu Praing.

Rekapitulasi kehadiran pada RUPS Luar Biasa tanggal 4 September 2025 adalah sebagai berikut:

The attendance summary for the Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 4, 2025, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
1.	Emanuel Melkiades Laka Lena	Gubernur NTT Governor of NTT	Hadir Present	Seri A	52.500.755
2.	Yosef Lede	Bupati Kupang Regent of Kupang	Hadir Present	Seri A	12.500.000
3.	Christian Widodo	Walikota Kupang Mayor of Kupang	Hadir Present	Seri A	12.500.000
4.	Umbu Lili Pekuwali	Bupati Sumba Timur Regent East East	Hadir Present	Seri A	9.228.066
5.	Yohanis Dade	Bupati Sumba Barat Regent of West Sumba	Hadir Present	Seri A	9.034.031
6.	Paulus Henuk	Bupati Rote Ndao Regent of Rote Ndao	Hadir Present	Seri A	9.027.261
7.	Eduard Markus Lioe	Bupati Timor Tengah Selatan Regent Central South	Hadir Present	Seri A	10.006.577
8.	Yosep Falentinus Delasalle Kebo	Bupati Timor Tengah Utara Regent Timor North Central	Hadir Present	Seri A	11.565.422
9.	Willybrodus Lay	Bupati Belu Regent of Belu	Hadir Present	Seri A	7.387.172
10.	Agas Andreas	Bupati Manggarai Timur Regent Manggarai East	Hadir Present	Seri A	10.058.282
11.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla	Bupati Sumba Barat Daya Regent of West Sumba Daya	Hadir Present	Seri A	9.678.175
12.	Herybertus Geradus Laju Nabit	Bupati Manggarai Regent of Manggarai	Hadir Present	Seri A	6.140.811
13.	Edistasius Endi	Bupati Manggarai Barat Regent Manggarai West	Hadir Present	Seri A	5.719.967
14.	Simplisius Donatus	Bupati Nagekeo Regent of Nagekeo	Hadir Present	Seri A	4.469.967

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Kepemilikan Saham Shareholding Shares	Jumlah Saham Number of Shares
15.	Drs. Paulus S. K. Limu	Bupati Sumba Tengah Regent Central Central	Hadir Present	Seri A	6.642.283
16.	P. Kanisius Tuaq	Bupati Lembata Regent of Lembata	Hadir Present	Seri A	5.396.088
17.	Antonius Doni Dihen	Bupati Flores Timur Regent of East Flores	Hadir Present	Seri A	3.529.859
18.	Krisman Bernard Riwu Kore	Bupati Sabu Raijua Regent of Sabu Raijua	Hadir Present	Seri A	5.649.283
19.	Yosef Benediktus Badeoda	Bupati Ende Regent of Ende	Hadir Present	Seri A	5.261.653
20.	Stefanus Bria Seran	Bupati Malaka Regent of Malaka	Hadir Present	Seri A	7.404.141
21.	Juventus Prima Yoris Kago	Bupati Sikka Regent of Sikka	Hadir Present	Seri A	3.572.463
22.	Iskandar Lakamau	Bupati Alor Regent of Alor	Hadir Present	Seri A	2.702.105
23.	Raymundus Bena	Bupati Ngada Regent of Ngada	Hadir Present	Seri A	2.500.000
24.	Welem Nunuhitu	Kuasa dari Pemegang Saham an. Charles Amos Corputty Authority from Shareholder Charles AmosCorputty	Hadir Present	Seri B	95.744
25.	Djami Maxin Wila Huky	Ahli Waris dari Luther Oktovianus Wila Huky (Alm) Expert Waris of Luther Oktovianus Wila Huky (deceased)	Hadir Present	Seri B	23.321
26.	Novi Maria Porsiana	Kuasa Pemegang Saham an. Johan Christian Tallo Authorized Shareholders, a.k.a. Johan Christian Tallo	Hadir Present	Seri B	11.660
27.	Yohanis Landu Praing	Direktur TI dan Operasional merangkap Plt. Direktur Utama Bank NTT Director IT and Operations and Acting Director of Bank NTT	Hadir Present	-	-
28.	Hilarius Minggu	Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Director of Funds and Treasury, Bank NTT	Hadir Present	-	-
29.	Christofel S. M. Adoe	Direktur Kepatuhan Bank NTT Director of Compliance Bank NTT	Hadir Present	-	-
30.	Frans Gana	Komisaris Independen Bank NTT Commissioner Independent Bank NTT	Hadir Present	-	-

4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 12 November 2025

Sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 09 tanggal 12 November 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang, rapat diadakan di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT. BPD NTT dengan agenda rapat sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai hasil *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan;
b. Penyampaian Rencana Bisnis PT. BPD NTT Tahun 2026.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 12 November 2025

a. Untuk agenda pertama:
   1) Memberhentikan dengan hormat Sdr. Yohanis Landu Praing dari jabatannya sebagai Direktur Umum & SDM merangkap Plt. Direktur Utama dan Plt. Direktur Keuangan & Treasury Bank NTT;
   2) Memberhentikan dengan hormat Sdr. Hilarius Minggu dari jabatannya sebagai Direktur Dana merangkap Plt. Direktur Kredit dan Plt. Direktur Teknologi Informasi Bank NTT;
   3) Menyetujui pengangkatan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 12 November 2025, yaitu:
      a) Direktur Utama adalah Charlie Paulus;
      b) Direktur Umum dan SDM adalah Rahmat Saleh;
      c) Direktur Keuangan dan Treasury adalah Heru Helbianto;
      d) Direktur Kredit adalah Aloysius R. A. Geong;
      e) Direktur Kepatuhan adalah Revi Adiana Silawati perwakilan Bank Jatim yang berlaku efektif setelah mendapat keputusan OJK untuk disetujui dan memenuhi syarat sebagai Direktur Kepatuhan dan setelah mendapat persetujuan ijin KUB antara Bank

4. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on November 12, 2025

As stated in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 09 dated November 12, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang, the meeting was held in the Fernandez Hall on the 4th Floor of the East Nusa Tenggara Governor's Office and chaired by the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT. BPD NTT with the following meeting agenda:

a. Appointment of the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur in accordance with the results of *the* Financial Services Authority's *fit and proper test*;
b. Presentation of the 2026 Business Plan of PT. BPD NTT.

Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) held on November 12, 2025

a. For the first agenda item:
   1) To respectfully dismiss Mr. Yohanis Landu Praing from his position as General Director & HR, concurrently serving as Acting President Director and Acting Director of Finance & Treasury of Bank NTT;
   2) To honorably dismiss Mr. Hilarius Minggu from his position as Director of Funds, concurrently serving as Acting Director of Credit and Acting Director of Information Technology at Bank NTT;
   3) To approve the appointment of the Company's Board of Directors effective November 12, 2025, namely:
      a) The CEO is Charlie Paulus;
      b) The General and Human Resources Director is Rahmat Saleh;
      c) The Director of Finance and Treasury is Heru Helbianto;
      d) The Director of Credit is Aloysius R. A. Geong;
      e) The Compliance Director is Revi Adiana Silawati, a representative of Bank Jatim, effective after receiving a decision from the OJK approving her and confirming her eligibility as Compliance Director, and after the OJK approves the KUB agreement

Jatim dan Bank NTT oleh OJK. Selama yang bersangkutan belum mendapat keputusan dari OJK maka Sdr. Christofel S. M. Adoe tetap menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan selanjutnya pengangkatan Revi Adiana Silawati akan disahkan melalui RUPS;

4) Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sehak tanggal 12 November 2025, yaitu:
   a) Komisaris Utama adalah S. Donny H. Heatubun;
   b) Komisaris Independen adalah Yosef Juwa Dobe Ngole, yang berlaku efektif setelah mendapat keputusan OJK untuk disetujui dan memenuhi syarat sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya pengangkatan Yosef Juwa Dobe Ngole akan disahkan melalui RUPS;
5) Menyetujui untuk pihak manajemen Bank NTT bersurat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat untuk meminta petunjuk dan arahan terkait dengan:
   a) Apakah ada insentif bagi pemegang saham yang membantu meningkatkan kinerja Bank NTT di daerah (seperti mencapai target yang dipenuhi);
   b) Bapak Yohanis Landu Praing apakah dapat diangkat langsung otomatis sebagai Direksi untuk jabatan yang kosong seperti Direktur TI;
   Sehubungan dengan hal ini paling lambat 1 bulan sejak surat tersebut disampaikan kepada OJK Pusat dan setelah mendapatkan jawaban dari OJK Pusat maka akan dilakukan RUPS kembali terkait dengan pengisian 2 jabatan yang masih kosong;

b. Untuk agenda kedua:
   Semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Direktur Utama Bapak Charlie Paulus akan dirangkum oleh para Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris), dibuatkan jawaban secara tertulis untuk disampaikan kepada para Pemegang Saham dan selanjutnya akan didiskusikan dalam RUPS.

between Bank Jatim and Bank NTT. Until such time as the OJK issues a decision, Mr. Christofel S. M. Adoe will continue to serve as Compliance Director, and the appointment of Revi Adiana Silawati will subsequently be ratified through the General Meeting of Shareholders;

4) Approves the appointment of the Company's Board of Commissioners effective as of November 12, 2025, as follows:
   a) President Commissioner: S. Donny H. Heatubun;
   b) Independent Commissioner: Yosef Juwa Dobe Ngole, effective upon receiving a decision from the OJK approving his appointment and confirming his eligibility as an Independent Commissioner. Furthermore, the appointment of Yosef Juwa Dobe Ngole will be ratified through the General Meeting of Shareholders;
5) Approve the management of Bank NTT to write to the Financial Services Authority (OJK) Headquarters to request guidance and instructions regarding:
   a) Whether there are incentives for shareholders who help improve Bank NTT's performance in the region (such as meeting targets);
   b) Whether Mr. Yohanis Landu Praing can be automatically appointed as a member of the Board of Directors to fill a vacant position such as Director of IT;
   In this regard, no later than 1 month after the letter is submitted to the OJK Headquarters and after receiving a response from the OJK Headquarters, a General Meeting of Shareholders will be held again regarding the filling of the 2 vacant positions;

b. For the second agenda item:
   All questions submitted to the President Director, Mr. Charlie Paulus, will be summarized by the Management (Board of Directors and Board of Commissioners), written responses will be prepared to be submitted to the Shareholders, and subsequently discussed at the GMS.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Struktur Organisasi Dewan Komisaris

Struktur Organisasi Dewan Komisaris berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dimana didalamnya mengatur tentang Fungsi, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris, Lembaga Penunjang Dewan Komisaris, Rapat, Pembagian Tugas, serta seluruh hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Organizational Structure of the Board of Commissioners

The organizational structure of the Board of Commissioners is based on Decision No. 02 of 2020 of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dated June 3, 2020, regarding the Rules of Procedure of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, which sets forth the functions, duties, obligations, Rights, and Authorities of the Board of Commissioners, Supporting Bodies of the Board of Commissioners, Meetings, Division of Duties, and all matters related to the Board of Commissioners as follows:

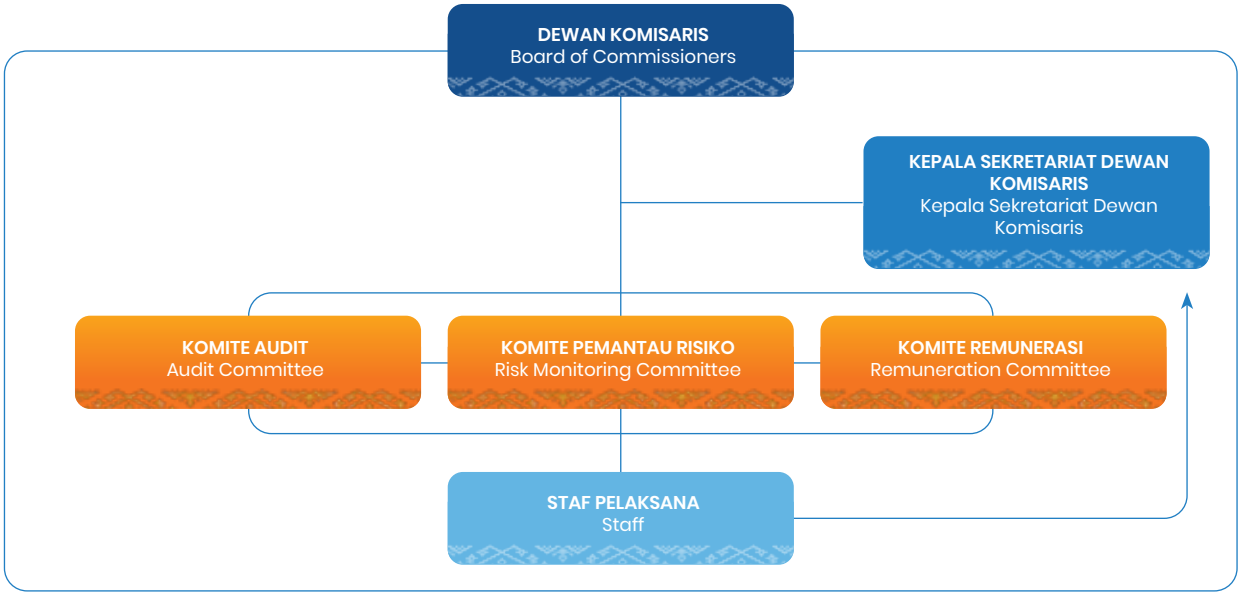

Komposisi Dewan Komisaris

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab IV Pasal 35 ayat (1), maka telah ditetapkan bahwa jumlah keanggotaan Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Composition of the Board of Commissioners

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Chapter IV, Article 35, paragraph (1), it has been determined that the Board of Commissioners shall consist of 3 (three) members.

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sehingga dinilai belum memenuhi komposisi minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab IV Pasal 35 ayat (1) "Bank wajib memiliki Anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dimana Komisaris yang dimiliki Bank NTT terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Non Ipndependen dan 1 (satu) orang Komisaris Independen dengan komposisi 66,67% dari jumlah Dewan Komisaris minimal. Jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Bank NTT telah memenuhi ketentuan GCG bank yang menyatakan bahwa jumlah anggota Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada.

Berdasarkan kriteria Tata Kelola Perusahaan bagian *Governance Structure* bahwa "Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tata Kelola Bank Umum, yaitu: a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c) Komisaris...". Pada Bank NTT tidak terjadi perangkapan jabatan pada anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris Bank NTT di tahun buku 2025 diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 10 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang;

The Board of Commissioners consists of 2 (two) members, which is deemed not to meet the minimum composition as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Chapter IV, Article 35, paragraph (1): "A bank must have a Board of Commissioners consisting of at least 3 (three) members and no more than the number of members of the Board of Directors, wherein the Board of Commissioners of Bank NTT consists of 1 (one) Non-Independent Commissioner and 1 (one) Independent Commissioner, constituting 66.67% of the minimum required number of Board of Commissioners members. The number of members of the Board of Commissioners at Bank NTT complies with the bank's GCG provisions, which state that the number of Independent Commissioners must be at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.

Based on the Corporate Governance criteria under the *Governance Structure* section, which state that "Members of the Board of Commissioners may not hold concurrent positions except in cases specified in the Financial Services Authority (POJK) on Commercial Bank Governance, namely: a) holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an executive officer at one (1) non-financial institution or company; or b) holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an executive officer performing supervisory functions at one (1) non-bank subsidiary controlled by the Bank; c) Commissioners...". At Bank NTT, there is no dual role among members of the Board of Commissioners.

The composition of Bank NTT's Board of Commissioners for the 2025 fiscal year is governed by the following provisions:

1. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 10 dated May 14, 2025, prepared by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn, in Kupang;

2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 10 tanggal 4 September 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang;
3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 09 tanggal 12 November 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 387/KEP/HK/2024 tanggal 16 November 2024 tentang Pengangkatan Saudara Frans Gana sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 427/KEP/HK/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara Stefanus Donny H. Heatubun sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Sehingga komposisi Dewan Komisaris dapat dinyatakan sebagai berikut:

2. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 10 dated September 4, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang;
3. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 09 dated November 12, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang;
4. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 387/KEP/ HK/2024 dated November 16, 2024, regarding the Appointment of Mr. Frans Gana as an Independent Commissioner of the Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
5. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 427/KEP/ HK/2025 dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. Stefanus Donny H. Heatubun as President Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Thus, the composition of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office
S. Donny H. Heatubun	Komisaris Utama (Non Independen) Lead Commissioner (Non-Independent)	12 November 2025 – 11 November 2030 November 12, 2025 – November 11, 2030
Frans Gana	Komisaris Independen Independent Commissioner	16 November 2024 – 10 Juni 2029 November 16, 2024 – June 10, 2029

Semua anggota Dewan Komisaris Bank NTT memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan uji kompetensi yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *fit and proper test* serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

1. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS;
3. Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.

All members of the Board of Commissioners of Bank NTT possess integrity, competence, and a good reputation, as evidenced by the competency assessment required by the Financial Services Authority (OJK) through *a fit and proper test* and by their compliance with OJK regulations, including:

1. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia;
2. Replacement and/or appointment of the Board of Commissioners by the General Meeting of Shareholders;
3. All members of the Board of Commissioners have passed the competency and suitability assessments; and
4. No member of the Board of Commissioners has a family relationship up to the second degree with another member of the Board of Commissioners and/or a member of the Board of Directors.

Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sejalan dengan pemberian rekomendasi tersebut, maka Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Kriteria utama Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003 Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank NTT, sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum:
   1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
   3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
   4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter;
   5. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan serta melampirkan surat keterangan dari pengadilan setempat dan surat keterangan tidak pernah terpidana;
   7. Mempunyai integritas yang meliputi syarat:
      1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
      2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
      3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
      4) Cakap melakukan perbuatan hukum;
      5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

Criteria for the Board of Commissioners

Every appointment and/or replacement of a member of the Board of Commissioners is always made in accordance with the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, to be subsequently decided by the General Meeting of Shareholders (GMS), and in line with the issuance of such recommendations, the Remuneration and Nomination Committee has established the main criteria for the Board of Commissioners through Board of Commissioners Resolution No. 003 of 2025 dated May 26, 2025, regarding the Improvement of Operational Standards and Procedures for the Election and/or Replacement of Members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors of Bank NTT, as follows:

A. General Requirements:
   1. Fear God Almighty;
   2. Loyal and obedient to the State and the Government of the Republic of Indonesia;
   3. Not involved, either directly or indirectly, in acts of treason against the State;
   4. Physically and mentally healthy, as evidenced by a certificate of complete medical examination results from a doctor;
   5. Educated and holding at least a Bachelor's degree (S1), evidenced by a notarized copy of the diploma issued by an authorized official;
   6. Not having had their right to vote revoked by a court decision, and attaching a certificate from the local court and a certificate stating they have never been convicted of a crime;
   7. Possesses integrity, which includes the following requirements:
      1) Possessing good character and morals, as demonstrated, among other things, by a commitment to complying with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal offense that caused financial loss to the State and/or was related to the financial sector;
      2) Having a commitment to comply with laws and regulations and support OJK policies;
      3) Having a commitment to the development of sound bank operations;
      4) Being legally competent;
      5) Not being classified as a party prohibited from becoming a Principal Party;

8. Memiliki reputasi keuangan antara lain dibuktikan dengan:
   1) Tidak memiliki kredit macet;
   2) Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
   3) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
9. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:
   1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   2) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

B. Persyaratan Khusus Calon Anggota Dewan Komisaris:
1. Usia pada saat melamar untuk pertama kali tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun,
2. Bagi Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatan dan masa jabatan masih dapat diperpanjang 1 (satu) periode lagi, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan pengurus tersebut berakhir maka KRN akan melakukan evaluasi kinerja kerja, Hasil evaluasi kinerja dilaporkan ke PSP untuk mendapat persetujuan atau keputusan lebih lanjut, Apabila keputusan PSP menyetujui atau tidak menyetujui maka akan dilanjutkan dengan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau profesi yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku saat ini. Apabila Calon Komisaris belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan namun telah memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko dengan biaya sendiri dan dibuktikan tanda kelulusan sehingga tidak menunda target tanggal penyampaian dokumen calon ke OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan;
4. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan pada saat menjabat;

8. Possess a sound financial reputation, as evidenced by, among other things:
   1) Having no non-performing loans;
   2) Having no overdue or problematic debts;
   3) Has never been declared bankrupt and has never served as a Shareholder, Member of the Board of Commissioners, or Member of the Board of Directors who was found guilty of causing a corporation to be declared bankrupt based on a court ruling within the last 5 (five) years prior to nomination; and
9. Possess competencies that include the following requirements:
   1) Sufficient knowledge in the banking sector relevant to the position;
   2) Experience in the banking and/or financial sector.

B. Special Requirements for Candidates for the Board of Commissioners:
1. Age at the time of the initial application shall not exceed 60 (sixty) years,
2. For members of the Board of Commissioners whose term is about to expire and may be extended for one (1) additional term, KRN will conduct a performance evaluation no later than six (6) months before the expiration of the member's term; the results of the performance evaluation shall be reported to the PSP for approval or further decision. If the PSP decides to approve or disapprove, the process shall proceed in accordance with applicable regulations;
3. Must hold a risk management certificate issued by a certification body or professional organization recognized by the Financial Services Authority (OJK) or in accordance with current regulations. If a Commissioner Candidate does not yet possess the required certificate but has met all general requirements and other specific requirements, the candidate in question is permitted to undergo the risk management certification process at their own expense and must provide proof of passing the certification to avoid delaying the target date for submitting the candidate's documents to the OJK for assessment of competence and suitability;
4. Not serving as an officer or member of a political party at the time of nomination or while in office;

5. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Dewan Komisaris yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai;
6. Menyampaikan surat lamaran kepada KRN yang dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan riwayat hidup (*curriculum vitae)* dan visi misi;
7. Komisaris Independen dapat mencalonkan diri sebagai Komisaris Utama;
8. Sebelum mengikuti tes uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan, maka terlebih dahulu melewati penilaian/assessment oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank;
9. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
10. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
    a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan Komisaris Independen;
    b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

C. Persyaratan Lainnya Calon Anggota Dewan Komisaris:
1. Antara sesama Anggota Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar;
2. Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Umum;

5. Willing to reside in the Kupang City area and its surroundings for the duration of their term on the Board of Commissioners, as stated in writing and signed on a stamped document;
6. Submit an application letter to KRN, complete with all required documents, and attach a resume (*curriculum vitae)* and a statement of vision and mission;
7. Independent Commissioners may nominate themselves as Chairman of the Board;
8. Before taking the competency and suitability test at the Financial Services Authority, candidates must first undergo an assessment by KRN regarding the fulfillment of requirements for integrity, financial reputation, and competence for the proposed Board of Commissioners members, as outlined in Financial Services Authority Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Assessment of Competency and Suitability for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Board of Commissioners of Banks;
9. Pass the Competency and Suitability Assessment in accordance with Financial Services Authority regulations;
10. Candidates for Independent Commissioners must possess:
    a. Sufficient knowledge in the banking sector that is relevant to the position of Independent Commissioner;
    b. Experience in the banking and/or financial sector.

C. Other Requirements for Prospective Members of the Board of Commissioners:
1. There must be no family relationship up to the second degree among Board of Commissioners members or between Board of Commissioners members and members of the Board of Directors, whether by direct or collateral line, including sons-in-law, daughters-in-law, parents-in-law, and siblings-in-law;
2. Specifically, candidates for Independent Commissioners must possess independence, meaning they must have no financial, managerial, shareholding, and/or family relationships up to the second degree with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Senior Management, nor any relationships with the Bank that could affect their ability to act independently, as stipulated in the corporate governance implementation provisions for Commercial Banks;

3. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu *(cooling off)* paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, dan masa tunggu bagi Mantan Direktur Utama dan Mantan Anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan pada bank yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan;
4. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajin memperoleh persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
5. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, wajib menjalani masa tunggu *(cooling off)* paling singkat 1 (satu) tahun.

Fungsi, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing–masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Fungsi, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT. BPD NTT Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Fungsi dan Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan, pemberian nasihat dan persetujuan serta fungsi lain yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

3. Former members of the Board of Directors or executive officers of the Bank, or parties having a relationship with the Bank that could affect their ability to act independently, must undergo a *cooling-off* period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at the Bank in question, and the cooling-off period for former Chief Executive Officers and former members of the Board of Directors who oversaw supervisory functions at the relevant bank must be at least 6 (six) months before becoming an Independent Commissioner at the relevant bank;
4. A Non-Independent Commissioner may transition to become an Independent Commissioner after meeting the requirements for an Independent Commissioner and must obtain OJK approval through an assessment of competence and fitness;
5. A Non-Independent Commissioner who is to transition to an Independent Commissioner as referred to in the point above must undergo a *cooling-off* period of at least 1 (one) year.

Functions, Duties, Obligations, Rights, and Authorities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a corporate body that is collectively responsible for exercising general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association and for providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners does not participate in operational decision-making. The status of each member of the Board of Commissioners, including the Chairman of the Board of Commissioners, is equal. The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. The functions, duties, obligations, rights, and authorities of the Board of Commissioners are regulated in the Decision of the Board of Commissioners of PT. BPD NTT Number: 02 of 2020 concerning the Rules of Procedure of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as follows:

Functions and Duties of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners has supervisory, advisory, and approval functions, as well as other functions assigned in accordance with the Articles of Association, provisions, and laws and regulations.

2. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas:
   a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB)/Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), pengembangan bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal;

   c. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan pada Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;

   d. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut;
   e. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank (RBB)/ Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar;
   f. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
   g. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
   h. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

   i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;
   j. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank;

2. In carrying out its functions, the Board of Commissioners is tasked with:
   a. Overseeing the management of the Bank by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including regarding the Bank's Business Plan (RBB)/Annual Work and Budget Plan (RKAT), the Bank's development, the implementation of the provisions of the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and/or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), and applicable laws and regulations;
   b. Carrying out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and/or Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) effectively and efficiently, and ensuring effective communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the External Auditor, and the Banking or Capital Market Supervisory Authority;
   c. Safeguarding the Bank's interests while considering the interests of Shareholders and being accountable to the General Meeting of Shareholders;
   d. Reviewing and examining the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing said Annual Report;
   e. Providing opinions and recommendations on the Bank's Business Plan (RBB)/Annual Work and Budget Plan (RKAT) proposed by the Board of Directors and approving them in accordance with the provisions of the Articles of Association;
   f. Monitoring the progress of the Bank's activities;
   g. Provide opinions and recommendations to Shareholders regarding matters deemed important for the Bank's management;
   h. Immediately report to the General Meeting of Shareholders (GMS) if there are signs of a decline in the Bank's performance, accompanied by recommendations regarding corrective measures to be taken;
   i. Notify the Financial Services Authority (OJK) no later than 7 (seven) business days from the discovery of (a) violations of laws and regulations in the financial and banking sectors; and (b) circumstances or anticipated circumstances that could jeopardize the Bank's business continuity;
   j. Proposing to the General Meeting of Shareholders the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) and a Public Accountant to audit the Bank's books;

3. Agar supaya fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:
   a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan internalisasi visi, misi dan budaya dan nilai-nilai Bank;
   b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
   c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan SDM;
   d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko;
   e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Corporate Plan* dan penjabarannya ke dalam RBB/RKAT Bank;
   f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan *Prudential Banking Practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*);
   g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
   h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik;
   i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB/RKAT bank dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RBB/RKAT bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham;
   k. Melakukan pengawasan atas mutu/kualitas pelayanan Bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
   l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*;
   m. Menyusun Program Kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program kerja komite-komite penunjang Dewan Komisaris,

3. To ensure that the supervisory and advisory functions referred to in paragraph (1) are carried out effectively, the Board of Commissioners is also tasked with:
   a. Provide opinions and advice to management regarding the internalization of the Bank's vision, mission, culture, and values;
   b. Conducting reviews and providing opinions on the business strategies implemented by the Bank;
   c. Conducting assessments, providing opinions and advice on the human resources management system;
   d. Conducting assessments, providing opinions and advice on the risk management system;
   e. Conducting assessments, providing opinions and advice on *the Corporate Plan* Draft and its elaboration into the Bank's RBB/RKAT;
   f. Approving draft strategic business decisions or policies that comply with laws and regulations, the Articles of Association, and General Shareholders' Meeting Resolutions, as well as *Prudential Banking Practices*, including a commitment to avoid any *conflicts of interest*;
   g. Conducting assessments of internal and external audit reports and providing advice to management on matters requiring follow-up;
   h. Conducting periodic oversight and providing advice to management regarding the implementation of good corporate governance;
   i. Conducting periodic oversight of the implementation of the bank's RBB/RKAT and providing opinions/approval on changes to the bank's RBB/RKAT in accordance with applicable regulations;
   j. Submitting oversight reports to the OJK and Shareholders;
   k. Monitor the quality of the Bank's services to customers and provide necessary advice to management;
   l. Conducting assessments, providing opinions and advice on the implementation of risk management, including matters related to *fraud* control;
   m. Develop the Board of Commissioners' Work Program, which includes the work programs of the Board of Commissioners' supporting committees,

4. Setiap Komisaris harus memperhatikan tugas, tanggung jawab dan batasan-batasan sebagaimana diatur berikut:
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
   b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 108 ayat (4), yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;
   c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
   d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

Kewajiban Dewan Komisaris

1. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RBB/RKAT;
2. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan *prudential banking practices*;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang ditempuh;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan;
6. Menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
7. Memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Melepaskan atau menghapus aktiva bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

4. Each Commissioner must observe the duties, responsibilities, and limitations as set forth below:
   a. Law No. 7 of 1992 on Banking, as amended by Law No. 10 of 1998;
   b. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 108(4), which states that a Board of Commissioners consisting of 1 (one) member constitutes a body, and each member of the Board of Commissioners may not act individually but must act in accordance with a resolution of the Board of Commissioners;
   c. Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector;
   d. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks

Duties of the Board of Commissioners

1. Approve and oversee the implementation of the RBB/RKAT;
2. To follow up on the results of supervision and recommendations provided in the event of deviations from applicable laws and regulations, the articles of association, and *prudent banking practices*;
3. Monitor the Bank's operations and, if the Bank shows signs of decline, promptly convene a General Meeting of Shareholders to report to the Shareholders, accompanied by recommendations regarding corrective measures to be taken;
4. Provide opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders regarding any matters deemed important for the management of the Bank;
5. Perform other supervisory duties as determined by the General Meeting of Shareholders and applicable laws and regulations;
6. Foster an *anti-fraud* culture and awareness throughout the Bank's organizational structure;
7. Provide guidance in credit consultations and reviews of credit approvals exceeding a certain amount agreed upon by the Board of Commissioners and the Board of Directors;

Rights and Powers of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is authorized to provide written approval of the Board of Directors' decisions regarding the following actions:
   a. Disposing of or writing off the Bank's movable assets that exceed a certain amount determined by the Board of Commissioners;

b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
c. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
d. Mengambil bagian dalam kepemilikan baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Bank atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perseroan atau badan-badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
f. Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang pokok macet yang dihapusbukukan yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh RUPS;
g. Kebijakan dan/atau tindakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria, pendelegasian wewenang sehubungan dengan pengurusan, pengelolaan dan penyelesaian piutang Bank;

h. Perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dengan mengindahkan ketentuan pada huruf (g),

2. Setiap Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
3. Tindakan dalam hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut;
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank;
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran dibawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan;

6. Setiap Komisaris dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan putusan;

b. Entering into management contracts with a term of more than 3 (three) years;
c. Establishing an organizational structure up to one level below the Board of Directors;
d. Acquiring ownership, either in part or in full, or participating in the Bank or other entities, or establishing a new company not for the purpose of debt recovery;

e. Divesting the Bank's equity interest, in whole or in part, in corporations or other entities not for the purpose of debt recovery;
f
. Acting to cease collection of written-off non-performing principal receivables, the amount of which is determined from time to time by the General Meeting of Shareholders;
g. Policies and/or actions of the Board of Directors regarding the establishment of mechanisms, criteria, and delegation of authority in connection with the administration, management, and settlement of the Bank's receivables;
h. Other actions in connection with the resolution of non-performing loans, subject to the provisions of subparagraph (g);

2. Each Commissioner, either jointly or individually, shall at all times have the right to enter the buildings, premises, or other locations used or controlled by the Bank and shall have the right to inspect books, supporting documents, inventories, inspect and reconcile cash balances for verification purposes, and review securities, as well as ascertain all actions taken by the Board of Directors;

3. Actions in the matters referred to in point (2) must be carried out in the capacity of the Board of Commissioners and must be reported at a Board of Commissioners meeting regarding such actions;

4. If deemed necessary, the Board of Commissioners may seek the assistance of experts in performing its duties for a limited period at the Bank's expense;
5. Each Commissioner has the right to request an explanation regarding any matter from the Board of Directors or from all personnel under its authority, and the Board of Directors is obligated to provide such an explanation;
6. Each Commissioner may attend meetings held by the Board of Directors or its subordinate units without participating in decision-making;

7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank;
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu;
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri,

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Secara garis besar, sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap realisasi RBB yang secara aktif dilaporkan secara Tahunan dan pada periode Tahun 2025 ini disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 Februari 2026 melalui surat Dewan Komisaris Nomor: 014/DK-PTBPDNTT/II/2026;
2. Melakukan pertangungjawaban pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang diadakan pada tanggal 14 Mei 2025 yang dituangkan melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Nomor: 09 Tahun 2025 oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan;
3. Melakukan penetapan Tim Assessor Pelaksanaan Assessment Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025;
4. Melakukan penyempurnaan terhadap penetapan Tim Assessor Pelaksanaan Assessment Calon Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025;

7. The Board of Commissioners, by a majority vote, has the right at any time to temporarily suspend one or more members of the Board of Directors if they are found to have acted contrary to the Articles of Association, have neglected their duties, or if there are urgent reasons for the Bank;
8. Such temporary suspension must be notified in writing to the person concerned, accompanied by the reasons for the action;
9. Within 90 (ninety) days after the date of such temporary suspension, the Board of Commissioners is required to convene a General Meeting of Shareholders to decide whether the relevant member of the Board of Directors shall be permanently dismissed or reinstated, during which the person concerned shall be given the opportunity to attend and defend themselves,

Performance of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Broadly speaking, throughout 2025 the Board of Commissioners has carried out several matters related to the performance of its duties and responsibilities, including:

1. Conducting oversight of the implementation of the RBB, which is actively reported annually; for the 2025 fiscal year, this report was submitted to the Head of the Financial Services Authority of East Nusa Tenggara Province on February 4, 2026, via Board of Commissioners Letter No. 014/DK-PTBPDNTT/II/2026;
2. Providing accountability at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on May 14, 2025, as documented in the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 09 of 2025 by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan;
3. Appointing the Assessment Team for the Evaluation of Candidates for the Management of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur through Board of Commissioners Resolution No. 01 of 2025 dated January 13, 2025;
4. Revised the appointment of the Assessment Team for the Evaluation of Candidates for the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur through Board of Commissioners Resolution No. 02 of 2025 dated May 8, 2025;

5. Melakukan penetapan tentang Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03 Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025.

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris

1. Transparansi Dewan Komisaris
   Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Hubungan Keuangan
   Tidak terdapat hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dan sesama Dewan Komisaris Bank NTT, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank;
3. Hubungan Keluarga
   Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali;
4. Larangan
   Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Test*

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

5. Issuing a resolution regarding the Revision of Operational Standards and Procedures for the Election and/or Replacement of Members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur through Board of Commissioners Resolution No. 03 of 2025 dated May 26, 2025.

Transparency, Financial Relations, Management and Family, and Prohibitions of the Board of Commissioners

1. Transparency of the Board of Commissioners
   Members of the Bank's Board of Commissioners do not hold shares in Bank NTT, other banks, non-bank financial institutions, or other companies located either within or outside the Province of East Nusa Tenggara;
2. Financial Relationships
   There are no financial relationships between the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners of Bank NTT, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders (PSP) of the Bank;
3. Family Relationships
   Members of the Board of Commissioners do not have family relationships up to the second degree among fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Controlling Shareholders;
4. Prohibitions
   Members of the Board of Commissioners shall not use the Bank for personal, family, and/or other parties' interests that harm or reduce the Bank's profits, nor shall they take and/or receive personal benefits from the Bank.

Compliance with Fit & Proper Test Requirements

All members of the Board of Commissioners have passed the *fit and proper test* conducted by the Financial Services Authority, with the following details:

Nomor Number	Tanggal Date	Keterangan Descripton
KEPR-142/D.03/2025	10 September 2025 September 10, 2025	Menyetujui Pencalonan Sdr. S. Donny H. Heatubun sebagai Komisaris Utama Non Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Approving the Nomination of Mr. S. Donny H. Heatubun as Non-Independent President Commissioner of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Nomor Number	Tanggal Date	Keterangan Descripton
SR-116/PB.12/2019	16 Mei 2019 May 16, 2019	Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus (Sdr. Izhak Eduard, Sdr. Juvenille Jodjana dan Sdr. Frans Gana) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Announcement of the Decision on the Results of the Fit and Proper Test for the Nomination of Management (Mr. Izhak Eduard, Mr. Juvenille Jodjana, and Mr. Frans Gana) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* (CoC) dan *Code of Corporate Governance* (CoCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi. Bank NTT terus mendorong pengembangan kompetensi bagi seluruh jajaran termasuk Dewan Komisaris sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas yang diemban. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dijabarkan sebagai berikut:

Board of Commissioners Competency Development Program

Pursuant to Board of Directors Resolution No. 89 of 2022 dated June 30, 2022, regarding the Guidelines for *the Code of Conduct* (CoC) and *Code of Corporate Governance* (CoCG) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, the Board of Commissioners is required to participate in competency development programs. Bank NTT continues to promote competency development for all levels of management, including the Board of Commissioners, so that they are capable of supporting the performance of their duties. The competency development of the Board of Commissioners is outlined as follows:

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Manual Board*) Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan manual board diperlukan komitmen bersama Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya yang diatur dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 03 Juni 2020. Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektifitas dan kinerja Komisaris.

Guidelines and Rules of Procedure (Board Manual) for the Board of Commissioners

In implementing the Board Manual, a shared commitment from the Commissioners and the Board of Directors is required to manage the company in the best interests of shareholders and stakeholders in general, as regulated by the Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 02 of 2020 regarding the Rules of Procedure of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara dated June 3, 2020. With clarity regarding the primary duties and functions of each party, it is expected that this will enhance the effectiveness and performance of the Commissioners.

Informasi mengenai Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kriteria penentuan Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bank melalui Keputusan Dewan Komisaris sebelumnya yaitu Nomor 001 tahun 2023 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank NTT dimana khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud pada ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Umum.

Status Independensi Dewan Komisaris

Kriteria Komisaris Independen Bank NTT telah sesuai dengan definisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Information regarding Independent Commissioners

Criteria for determining Independent Commissioners

As a company that has issued bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the company is subject to regulations issued by the regulator regarding the criteria for appointing Independent Commissioners. The presence of Independent Commissioners has been regulated by the Bank through a previous Board of Commissioners' Resolution, namely No. 001 of 2023 regarding Operational Standards and Procedures for the Election and/or Replacement of Members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors of Bank NTT, wherein specifically for Independent Commissioner Candidates, they must possess independence—meaning they must not have financial, managerial, shareholding, and/or family relationships up to the second degree with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the PSP, or relationships with the Bank that could affect the ability to act independently as referred to in the provisions on the application of corporate governance for Commercial Banks.

Independence Status of the Board of Commissioners

The criteria for Independent Commissioners of Bank NTT are in accordance with the definitions set forth in Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks and POJK No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 21, as follows:

1. Does not hold any shares, either directly or indirectly, in the Issuer or Public Company;
2. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, the Commissioners, the Board of Directors, or the Major Shareholders of the Issuer or Public Company;
3. Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

To avoid conflicts of interest, all members of the Board of Commissioners of Bank NTT have no financial, management, shareholding, or family relationships up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders that could affect their ability to act independently.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen:

Statement on the Independence of Independent Commissioners:

Aspek Independensi Aspects of Independence	S. Donny H. Heatubun	Frans Gana
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di Bank NTT, None affiliation affiliation with the Directors and/or members of the Board of Commissioners at Bank NTT,	✓	✓
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank NTT Does not serve as a member of the Board of Directors at the Company affiliated with Bank NTT	✓	✓
Tidak bekerja pada lembaga Pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun Not currently employed by a government agency the past 3 years	✓	✓
Tidak bekerja di Bank NTT atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not currently employed by Bank NTT or its affiliates within the last three years	✓	✓
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Bank NTT dan afiliasinya Has no financial ties, either direct or indirect, with Bank NTT or other companies that provide and products to Bank NTT and its affiliates	✓	✓
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di- lingkup Bank NTT, Free from business interests and activities or other relationships that could hinder or interfere with the Board of Commissioners' ability to act or think freely within the scope of Bank NTT,	✓	✓

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum Pasal 55 ayat (1) menyatakan "**Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan**", Sedangkan pada tahun 2025 ini Rapat Dewan Komisaris diadakan sebanyak 1 (satu) kali yang dijabarkan sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Pursuant to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 on Corporate Governance for Commercial Banks, Article 55(1) states: "**The Board of Commissioners is required to hold Board of Commissioners meetings on a regular basis at least once every two months**," Meanwhile, in 2025, the Board of Commissioners' meeting was held 1 (one) time, as detailed below:

JADWAL RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

SCHEDULE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS FOR 2025

No	Tanggal Date	Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025 Materi Subject	Kode Peserta* Participant Code* 1	 2
1.	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. Pembahasan terkait Tata Kelola – Progres Pencalonan Pengurus; 2. Tindak Lanjut Surat Dirkep – Review Ketentuan Dekom terkair Remunerasi dan Perjalanan Dinas Pengurus; 3. Tindak Lanjut RUPS LB 12 November 2025 – Surat OJK; 4. Komposisi Komite Dewan Komisaris; 5. Rencana Pelaksanaan Rapat Pengurus; 6. Lain-lain. 1. Discussion on Governance – Progress on Executive Board Nominations; 2. Follow-up on the Director General's Letter – Review of Dekom Regulations Regarding Executive Remuneration and Business Travel; 3. Follow-up on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 12, 2025 – Letter from the OJK; 4. Composition of the Board of Commissioners Committee; 5. Plan for the Executive Board Meeting; 6. Miscellaneous.	✓	✓

*Keterangan Kode Nama Peserta
1) *S. Donny H. Heatubun*
2) *Frans Gana*

*Code Explanation Participant Name
1) *S. Donny H. Heatubun*
2) *Frans Gana*

*Keterangan kehadiran :
✓ = Hadir
- = *Tidak Hadir*
DL = Dinas Luar
BM = Belum Menjabat
TM = Tidak Menjabat

*Attendance record:
✓ = Present
- = *Absent*
DL = Out of Office
BM = Not Yet in Office
TM = Not in Office

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris dapat terlihat di dalam tabel berikut:

Attendance Frequency at Board of Commissioners Meetings

Meeting results are recorded in the meeting minutes and properly documented. The physical attendance rate of Board of Commissioners members at Board of Commissioners meetings can be seen in the following table:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	% Kehadiran Attendance Rate
S. Donny H. Heatubun	1	100%
Frans Gana	1	100%

DIREKSI
Board of Directors

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Komposisi Direksi pada tahun 2025 ini didasarkan pada:

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 09 tanggal 12 November 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn di Kupang;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 437/KEP/HK/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Saudara **Christofel Semuel Melianus Adoe sebagai Direktur Kepatuhan** Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 29 Desember 2021 – 28 Desember 2026;
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 428/KEP/HK/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara **Charlie Paulus sebagai Direktur Utama** Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 429/KEP/HK/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara **Rahmat Saleh sebagai Direktur Umum dan SDM** Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 430/KEP/HK/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara **Heru Helbianto sebagai Direktur Keuangan dan Treasury** Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Composition, Criteria, and Independence of the Board of Directors

The composition of the Board of Directors in 2025 is based on:

1. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" No. 09 dated November 12, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn in Kupang;
2. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT, East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 437/KEP/ HK/2021 dated December 29, 2021, regarding the Appointment of Mr. **Christofel Semuel Melianus Adoe as Compliance Director** of East Nusa Tenggara Regional Development Bank Limited for the Term of Office from December 29, 2021 – December 28, 2026;
3. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 428/KEP/HK/2025 dated November 12, 2025 regarding the Appointment of Mr. **Charlie Paulus as President Director** of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank;
4. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 429/KEP/ HK/2025 dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. **Rahmat Saleh as General Director and Head of Human Resources** of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
5. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 430/KEP/ HK/2025 dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. **Heru Helbianto as Director of Finance and Treasury** of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank;

6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 431/KEP/HK/2025 tanggal 12 November 2025 tentang Pengangkatan Saudara **Aloysius Rahmat Aliman Geong sebagai Direktur Kredit** Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

6. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholder of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 431/KEP/ HK/2025 dated November 12, 2025, regarding the Appointment of Mr. **Aloysius Rahmat Aliman Geong as Director of Credit** of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank;

Dengan demikian komposisi dan nomenklatur Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dijabarkan sebagai berikut:

Thus, the composition and nomenclature of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank are outlined as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office
Charlie Paulus	Direktur Utama President Director	12 November 2025 – 11 November 2030 November 12, 2025 – November 11, 2030
Rahmat Saleh	Direktur Umum & SDM Director of General Affairs & HR	12 November 2025 – 11 November 2030 November 12, 2025 – November 11, 2030
Heru Helbianto	Direktur Keuangan dan Treasury Director of Finance and Treasury	12 November 2025 – 11 November 2030 November 12, 2025 – November 11, 2030
Aloysius Rahmat Aliman Geong	Direktur Kredit Director of Credit	12 November 2025 – 11 November 2030 November 12, 2025 – November 11, 2030
Christofel Semuel Melianus Adoe	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	29 Desember 2021 – 28 Desember 2026 December 29, 2021 – December 28, 2026

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 9 tanggal 12 November 2025, jumlah anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang sehingga dinilai telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab III Pasal 6 ayat (1) "Bank wajib memiliki Anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang". Komposisi Direksi PT. BPD NTT saat ini terdiri atas:

1. Direktur Utama: Bpk. Charlie Paulus
2. Direktur Keuangan & Treasury: Bpk. Heru Helbianto, dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 tanggal 13 November 2025 membidangi Divisi Dana
3. Direktur Kredit: Bpk. Aloysius R. A. Geong
4. Direktur Umum & SDM: Bpk. Rahmat Saleh, dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor 1187.A/ DK-PTBPDNTT/XI/2025 tanggal 13 November 2025 membidangi Divisi IT
5. Direktur Kepatuhan: Bpk. Christofel S. M. Adoe, sampai diterbitkannya hasil fit and proper test atas pencalonan Ibu Revi Adiana Silawati sebagai perwakilan dari Bank Jatim.

1Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) as set forth in Minutes No. 9 dated November 12, 2025, the Board of Directors consists of 5 (five) members, thereby fulfilling Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Chapter III, Article 6, paragraph (1): "A bank must have a Board of Directors consisting of at least 3 (three) members." The current composition of the Board of Directors of PT. BPD NTT consists of:

1. President Director: Mr. Charlie Paulus
2. Director of Finance & Treasury: Mr. Heru Helbianto, and based on Board of Commissioners Letter No. 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 dated November 13, 2025, overseeing the Funds Division
3. Director of Credit: Mr. Aloysius R. A. Geong
4. General Director & Human Resources: Mr. Rahmat Saleh, and pursuant to Board of Commissioners Letter No. 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 dated November 13, 2025, overseeing the IT Division
5. Director of Compliance: Mr. Christofel S. M. Adoe, until the results of the fit and proper test for the nomination of Ms. Revi Adiana Silawati as a representative of Bank Jatim are issued.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Manual Board*) Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan jadwal rapat yaitu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02 Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Tugas dan Tanggungjawab serta Wewenang Direksi

Dalam mengelola perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 02 Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dapat berjalan baik dan optimal.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan prinsip kolegial, yaitu bahwa masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan wewenangnya. Selain dari hak dan wewenang tersebut di atas, Direksi juga mempunyai hak dan wewenang lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku namun pelaksanaan tugas oleh masing – masing Direktur tetap merupakan tanggungjawab bersama.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Otoritas (BI, OJK) serta perundang-undangan yang berlaku;

Guidelines and Rules of Procedure (Board Manual) for the Board of Directors

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors adheres to the provisions governing work ethics, working hours, and meeting schedules as stipulated in Board of Commissioners Decision No. 02 of 2022 dated April 12, 2022, regarding the Duties, Authorities, and Responsibilities as well as the Work Procedures of the Members of the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

In managing the company, the Board of Directors consistently adheres to the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 02 of 2022 dated April 12, 2022, regarding the Duties, Authorities, and Responsibilities, as well as the Work Procedures for Members of the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. By adhering to these provisions, the Board of Directors, as the corporate body responsible for managing the company in the company's best interests and for its objectives, and representing the company both in and out of court in accordance with the Articles of Association, can perform its duties effectively and optimally.

The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities based on the principle of collegiality, meaning that each Director may act and make decisions in accordance with their respective rights and authorities. In addition to the aforementioned rights and authorities, the Board of Directors also possesses other rights and authorities related to the management of Bank NTT in accordance with the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and applicable laws and regulations; however, the performance of duties by each Director remains a shared responsibility.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1. The Board of Directors is obligated to manage the Bank in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Bank's Articles of Association and regulations of the relevant authorities (BI, OJK) as well as applicable laws and regulations;

2. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (GCG) dalam dan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Direksi bertugas dan bertanggungjawab untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan termasuk segala hal dan dalam segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, kecuali dalam hal:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan selain maksud penyediaan dan pemberian fasilitas kredit sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang perkreditan;
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta penyertaan modal pada perusahaan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini, para anggota Direksi harus mengusahakan:
   a. Terpeliharanya Tingkat Kesehatan Bank atau *Risk Base Bank Rating* (RBBR) sesuai dengan prinsip kehati-hatian/*prudential* dan kriteria yang ditetapkan oleh OJK atau regulator lainnya yang sah di Indonesia;
   b. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko dan kepatuhan;
   c. Tercapainya imbal-hasil (*return*) berupa Dividen yang wajar bagi Pemegang Saham sesuai keputusan RUPS;
   d. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara patut dan wajar;
   e. Terlaksananya kepemimpinan profesional dan kontinuitas manajemen di semua unit kerja (divisi/cabang),
5. Untuk pelaksanaan dengan sebaik-baiknya tugas Direksi sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini, maka Direksi menetapkan hal-hal sebagai berikut,
   a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan/Bank;
   b. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang/*corporate plan* maupun rencana kerja dan anggaran tahunan/Rencana Bisnis Bank (RBB);

2. The Board of Directors is obligated to implement good corporate governance (GCG) principles in the Bank's business operations at all organizational levels;
3. The Board of Directors is tasked with and responsible for representing the company in and out of court, including all matters and in all instances binding the company to other parties, as well as carrying out all actions, whether regarding management or ownership, except in the following cases:
   a. Borrowing or lending money on behalf of the company other than for the purpose of providing and granting credit facilities as stipulated in the regulations governing credit;
   b. Establishing a new business or participating in the capital of another company in accordance with applicable laws and regulations;
4. In carrying out the duties of the Board of Directors as referred to in paragraphs (1) through (3) of this article, the members of the Board of Directors must endeavor to:
   a. Maintenance of the Bank's Health Level or *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) in accordance with *prudential* principles and criteria established by the OJK or other authorized regulators in Indonesia;
   b. The effective implementation of internal controls, risk management, and compliance;
   c. Achieving a reasonable return in the form of dividends for shareholders in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders;
   d. The protection of *stakeholders*' interests in a proper and reasonable manner;
   e. The implementation of professional leadership and management continuity in all work units (divisions/branches);
5. To ensure the best possible execution of the Board of Directors' duties as outlined in paragraphs (1) through (4) of this article, the Board of Directors establishes the following:
   a. The company's/Bank's vision, mission, and values;
   b. Business, strategies, plans long-term/*corporate plan* as well as annual work plans and budgets/ Bank Business Plan (RBB);

c. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan POJK, PBI dan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
d. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit dalam organisasi Bank dan SDM nya;
e. Struktur organisasi yang mampu beradaptasi dan mendukung tercapainya sasaran usaha bank,

6. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali sebulan tentang perkembangan usaha bank dan laporan-laporan lainnya yang diminta Dewan Komisaris yang menjadi perhatian khusus dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan;

7. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada OJK dan BI sesuai POJK/PBI;

8. Direksi berkewajiban mengumumkan Neraca Publikasi secara tepat waktu kepada masyarakat melalui media massa sesuai POJK;

9. Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku;

10. wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS;

11. Direksi wajib memastikan *Core Banking System* dapat menyajikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa data dan informasi keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu/*real time* kepada OJK, BI dan Pengurus Bank NTT;

12. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Pengawasan dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), maupun auditor eksternal, temuan audit dan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, sesuai *timeline* yang disepakati;

13. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi menurut bidang tugas Direktorat masing-masing, diatur sebagai berikut:

c. Policies regarding compliance with POJK, PBI, and applicable laws and regulations, the Articles of Association, and *prudent banking practices*, including a commitment to avoid any form of *conflict of interest*;
d. The Bank's policies and evaluation methods, its organizational units, and its human resources;
e. An organizational structure capable of adapting and supporting the achievement of the Bank's business objectives;

6. The Board of Directors is obligated to submit periodic reports to the Board of Commissioners at least once a month regarding the Bank's business developments and other reports requested by the Board of Commissioners that are of particular concern in the context of performing supervisory functions;
7. The Board of Directors is obligated to submit periodic reports to the OJK and BI in accordance with POJK/PBI;
8. The Board of Directors is obligated to announce the Financial Statements to the public in a timely manner through the media in accordance with POJK;
9. The Board of Directors is obligated to hold Annual General Meetings (AGMs) and Extraordinary General Meetings (EGMs) in accordance with applicable regulations;
10. The Board of Directors is required to be accountable for the performance of its duties to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders;
11. The Board of Directors is required to ensure that *the Core Banking System* can provide a Management Information System (MIS) in the form of accurate, relevant, and *timely/real-time* financial data and information to the OJK, BI, and the Management of Bank NTT;
12. The Board of Directors is required to follow up on audit findings and recommendations from the Supervision Division and the Internal Audit Unit (SKAI), as well as external auditors, audit findings and recommendations from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Supreme Audit Agency (BPK), and/or the results of supervision by other authorities, in accordance with the agreed *timeline*;
13. The division of duties and responsibilities of the Board of Directors according to the respective Directorates' areas of responsibility is regulated as follows:

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Direktur Utama	1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja pada Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Utama, sesuai struktur organisasi yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi aktif antar anggota Direksi penetapan kebijakan strategis dan aktivitas operasional serta pengelolaan bank secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan dan pembinaaan terhadap Divisi-Divisi Kantor Pusat, KCU, KCK dan Kantor Cabang serta Unit Kerja di bawah Kantor Cabang; 3. Melakukan koordinasi aktif terhadap bidang tugas yang diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja bank; 4. Mengusahakan dan membuat Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja profesional berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG), meliputi TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Fairness) dan masing-masing anggota Direksi mampu berperan sebagai Anggota Tim sesuai dengan bidang tugas yang diemban; 5. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama bertanggung jawab kepada RUPS; 6. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan sementara karena sebab apapun juga, khususnya sakit, cuti, dinas 5 (lima) hari kerja berturut-turut. Hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi pasal 5 secara otomatis bertindak sebagai Direktur yang menjalankan tugas Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan, namun tetap berkoordinasi dengan Direktur lainnya serta wajib berkonsultasi dan melaporkan kepada Direktur Utama, terutama hal-hal yang bersifat penting, segera dan strategis.	1. Divisi Pengawasan & SKAI; 2. Divisi Riset dan Pengembangan; 3. Divisi Corporate Secretary & Legal.
Chief Executive Officer	1. Plan, lead, coordinate, and directly supervise the execution of tasks and performance achievements within the Division under the coordination of the President Director, in accordance with the applicable organizational structure; 2. Actively coordinate among members of the Board of Directors regarding the formulation of strategic policies and operational activities, as well as the effective and efficient management of the bank, and oversee and provide guidance to the Divisions of the Head Office, Regional Offices, Branch Offices, and Work Units under the Branch Offices; 3. Actively coordinate the areas of responsibility outlined in the bank's organizational structure and operational procedures; 4. Striving to establish the Board of Directors as a collegial body capable of working professionally based on the principles of good corporate governance (GCG), including TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness), and ensuring that each member of the Board of Directors is able to function as a team member in accordance with their assigned responsibilities; 5. In performing their duties, the President Director is accountable to the General Meeting of Shareholders; 6. In the event that the President Director is absent or temporarily unable to perform duties for any reason, particularly due to illness, leave, or official business for 5 (five) consecutive working days. This need not be proven to third parties; in such cases, another member of the Board of Directors, as stipulated in the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors under Article 5, shall automatically act as the Director performing the duties of the President Director, and shall have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors as well as represent the company, but must coordinate with other Directors and are required to consult with and report to the CEO, particularly regarding matters that are important, urgent, and strategic.	1. the Supervision & SKAI Division; 2. the Research and Development; 3. the Corporate Secretary & Legal Division.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Direktur Kepatuhan	1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas dan pencapaian Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Kepatuhan sesuai struktur organisasi yang berlaku; 2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan anti gratifikasi serta sadar risiko dalam setiap lini organisasi; 3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan dan menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan bank dan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari POJK, PBI dan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Meminimalkan/memitigasi 8 (delapan) risiko bank, menetapkan limit, selera dan toleransi risiko; 6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan yakni melakukan checklist risiko pemberian kredit dan pengadaan barang/jasa; 7. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Kepatuhan bertanggung jawab kepada RUPS; 8. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; 9. Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; 10. Melaporkan secara tertulis kepada OJK apabila terdapat indikasi kebijakan Direksi yang dapat merugikan bank; 11. Memantau Tingkat Kesehatan Bank dengan melakukan *self assessment* secara periodic setiap 6 (enam) bulan/semester; 12. Melakukan monitoring kecukupan modal/CAR bank termasuk monitoring komitmen setoran modal oleh Pemegang Saham dalam rangka menjaga kecukupan Modal Inti 13. Apabila Direktur Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, maka tugas di bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 5) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya kembali; 14. Penggantian sementara jabatan Direktur Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK oleh Direktur Utama dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.	1. Divisi Kepatuhan; 2. Divisi Manajemen Risiko.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Direktur Kepatuhan	1. Plans, leads, coordinates, and directly supervises the execution of tasks and performance of Divisions under the coordination of the Compliance Director in accordance with the applicable organizational structure; 2. Formulating strategies to foster a culture of compliance, anti-graft, and risk awareness across all organizational levels; 3. Proposing compliance policies or principles and establishing compliance systems and procedures to be adopted by the Board of Directors; 4. Ensuring that all policies, regulations, systems, and procedures, as well as the bank's business operations, comply with POJK, PBI, and applicable laws and regulations; 5. Minimizing/mitigating the bank's 8 (eight) risks, setting limits, risk appetite, and risk tolerance; 6. Performing other duties related to the compliance function, namely conducting risk checklists for credit granting and the procurement of goods and services; 7. In performing these duties, the Compliance Director is accountable to the General Meeting of Shareholders; 8. The duties and responsibilities of the Compliance Director set forth above do not preclude the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Board of Directors under Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 regarding decisions required for specific actions by all members of the Bank's Board of Directors; 9. The Compliance Director is required to report on the performance of his duties and responsibilities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, at least quarterly; 10. Report in writing to the OJK if there are indications that a Board of Directors' policy may harm the bank; 11. Monitor the Bank's Financial Health by conducting periodic self-assessments every 6 (six) months/semester; 12. Monitoring the bank's capital adequacy ratio (CAR), including monitoring shareholders' capital contribution commitments to maintain Core Capital adequacy 13. If the Compliance Director is temporarily unable to perform his or her duties for more than 7 (seven) consecutive working days, the duties in the areas of Compliance and Risk Management shall be handled by one of the Directors as stipulated in the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 5) and shall automatically act in accordance with the handover report until the Compliance Director is able to resume his or her duties; 14. The temporary replacement of the Compliance Director must be reported to the OJK by the President Director with the knowledge of the Board of Commissioners.	1. Compliance Division; 2. Risk Management Division.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Direktur Kredit	1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pencapaian kinerja Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Kredit sesuai struktur organisasi yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem operasional dan sistem pelayanan kredit bank dengan kualitas *prudential* tinggi, cepat, aman dan mudah; 3. Dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS; 4. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kredit di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kredit sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; 5. Direktur Kredit wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; 6. Direktur Kredit wajib memastikan penyaluran kredit dilakukan secara prudent menjaga portofolio dan kualitas kredit dalam ambang sehat, serta memastikan tata kelola perkreditan bank tidak ada fraud; 7. Apabila Direktur Kredit berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka tugas di bidang kredit ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris tentang pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 5) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Kredit dalam menjalankan tugas jabatannya kembali.	1. Divisi Supporting Kredit; 2. Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer; 3. Divisi Kredit Komersil dan Menengah; 4. Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
Director of Credit	1. Plans, leads, coordinates, and directly supervises the implementation of duties, responsibilities, and performance achievements of the Divisions under the coordination of the Director of Credit in accordance with the applicable organizational structure; 2. Coordinating with other Directors to establish the bank's operational and credit service systems with high prudential quality, speed, security, and ease; 3. In performing his duties, he is accountable to the General Meeting of Shareholders; 4. The duties and responsibilities of the Credit Director as described above do not preclude the rights and obligations of the Credit Director as a member of the Board of Directors under Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 regarding decisions required for specific actions by all members of the Bank's Board of Directors; 5. The Credit Director is required to report on the performance of his duties and responsibilities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, at least quarterly; 6. The Credit Director is required to ensure that credit disbursement is conducted prudently, maintaining the credit portfolio and credit quality within the limits sound, and ensure that the bank's credit management is free from fraud; 7. If the Director of Credit is temporarily unable to perform his duties for 5 (five) consecutive days, then credit-related duties shall be handled by one of the Directors as stipulated in the Board of Commissioners' Decree regarding the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 5), who shall automatically act based on the handover report until the Director of Credit at resumes his duties his duties.	1. Credit Support Division; 2. Micro, Small, and Consumer Credit Division; 3. Commercial and Medium-Sized Credit Division; 4. Rescue Credit Recovery and Loan Resolution.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Direktur Keuangan & Treasury	1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas, dan pencapaian kinerja Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Keuangan & Treasury sesuai struktur organisasi yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem operasional dan sistem pelayanan dana & treasury dengan kualitas tinggi *prudential* tinggi, cepat, aman dan mudah; 3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS; 4. Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan & Treasury di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Dana & Treasury sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi; 5. Direktur Keuangan & Treasury wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; 6. Direktur Keuangan & Treasury wajib memastikan kecukupan DPK guna mendukung penyaluran kredit atau aktiva produktif bank, terutama perolehan dana; 7. Direktur Keuangan & Treasury wajib memastikan setiap *placement* kelebihan DPK pada antar bank maupun pasar modal telah melakukan *due diligence* yang komprehensif; 8. Direktur Keuangan & Treasury wajib kecukupan likuiditas bank dalam ambang sehat/ LDR yang sehat; 9. Apabila Direktur Keuangan & Treasury berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka tugas di bidang dana & treasury ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris tentang pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 5) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Keuangan & Treasury dapat menjalankan tugas jabatannya kembali. 10. *Sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 tanggal 13* November 2025 Perihal Penyampaian terkait Pembidangan Direktorat, yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas hasil RUPS LB tanggal 12 November 2025, pembidangan untuk Divisi Dana berada di bawah koordinasi Direktur Keuangan & Treasury.	1. Divisi Dana; 2. Divisi *Treasury & Financial Institution.*

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Director of Finance & Treasury	1. Plans, leads, coordinates, and directly supervises the execution of duties and performance achievements of the Divisions under the coordination of the Director of Finance & Treasury in accordance with the applicable organizational structure; 2. Coordinating with other Directors to create high-quality, prudent, fast, secure, and user-friendly operational and fund & treasury service systems; 3. In performing his duties, he is accountable to the General Meeting of Shareholders; 4. The duties and responsibilities of the Director of Finance & Treasury set forth above do not preclude the rights and obligations of the Director of Finance & Treasury as a member of the Board of Directors under Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 regarding decisions required for specific actions by all members of the Board of Directors; 5. The Director of Finance & Treasury must report on the performance of his or her duties and responsibilities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, at least quarterly; 6. The Director of Finance & Treasury must ensure the adequacy of third-party funds to support the bank's credit disbursement or productive assets, particularly fund acquisition; 7. The Director of Finance & Treasury must ensure that every placement of excess DPK in the interbank market or capital market has undergone comprehensive due diligence; 8. The Director of Finance & Treasury must ensure the bank's liquidity remains within a healthy threshold/LDR; 9. If the Director of Finance & Treasury is temporarily unable to perform his or her duties for 5 (five) consecutive days, duties in the area of finance and treasury shall be handled by one of the other Directors, as stipulated in the Board of Commissioners' Decision regarding the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 5) and shall automatically act in accordance with the handover report until the Director of Finance & Treasury is able to resume his or her duties. 10. In accordance with the Board of Commissioners' letter No. 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 dated 13 November 2025 regarding the Communication on Directorate Division of Responsibilities, which was issued as a follow-up to the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 12 November 2025, the division of responsibilities for the Funds Division falls under the coordination of the Director of Finance & Treasury.	1. Funds Division; 2. Treasury & Financial Institutions Division.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Direktur Umum & SDM	1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pencapaian kinerja Divisi yang berada dalam koordinasi Direktur Umum & SDM sesuai struktur organisasi yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan Direktur lainnya dalam rangka terciptanya sistem TI dan Operasional serta sistem pelayanan bank yang handal dengan *Prudential* tinggi, cepat, aman dan mudah; 3. Dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS; 4. Tugas dan tanggung jawab Direktur Umum & SDM di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Teknologi Informasi (TI) & Operasional sebagai anggota Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank; 5. Direktur Umum & SDM wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan; 6. Direktur Direktur Umum & SDM wajib memastikan CBS yang digunakan adaptif terhadap setiap regulasi yang ada oleh OJK/BI serta pastikan output pelaporan keuangan bank dan laporan wajib lainnya dapat dipertanggungjawabkan validitasnya; 7. Direktur Umum & SDM wajib memastikan tata kelola SDM bank memiliki kapasitas dan integritas tinggi semenjak *recruitment*, pemeliharaan, promosi/mutasi hingga purna tugas tertata dengan baik; 8. Apabila Direktur Umum & SDM berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama 5 (lima) hari berturut-turut, maka tugas Direktur Umum & SDM ditangani oleh salah satu Direktur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direksi (Pasal 5) secara otomatis bertindak berdasarkan berita acara serah terima tugas sampai dengan Direktur Umum & SDM dalam menjalankan tugas jabatannya kembali; 9. *Sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 tanggal 13* November 2025 Perihal Penyampaian terkait Pembidangan Direktorat, yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas hasil RUPS LB tanggal 12 November 2025, pembidangan untuk Divisi IT berada di bawah koordinasi Direktur Umum dan SDM.	1. Divisi TI; 2. Divisi SDM; 3. Divisi Umum; 4. Divisi Operasional.

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	Pembidangan Division
Director of General Affairs & Human Resources	1. Plan, lead, coordinate, and directly supervise the implementation of tasks, responsibilities, and performance achievements of the Divisions under the coordination of the Director of General Affairs & HR in accordance with the applicable organizational structure; 2. Coordinating with other Directors to establish a reliable IT and operational system as well as a banking service system that is highly prudent, fast, secure, and user-friendly; 3. In performing their duties, they are accountable to the General Meeting of Shareholders; 4. The duties and responsibilities of the General Director & HR Director set forth above do not preclude the rights and obligations of the Director of Information Technology (IT) & Operations as a member of the Board of Directors under Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 in cases where a decision is required regarding specific actions by all members of the Bank's Board of Directors; 5. The Director of General Affairs & Human Resources is required to report on the performance of his duties and responsibilities to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, at least quarterly; 6. The Director of General Affairs & Human Resources is required to ensure that the CBS used is adaptable to all existing regulations issued by the OJK/BI and ensure the output of financial reporting The bank's reports and other mandatory reports must be verifiable; 7. The Director of General Affairs & Human Resources must ensure that the bank's human resources management has high capacity and integrity, from *recruitment*, retention, promotion/transfer, to retirement, all of which are well-organized; 8. If the General Director & HR Director is temporarily unable to perform his or her duties for 5 (five) consecutive days, the duties of the General Director & HR Director shall be handled by one of the Directors as stipulated in the Board of Commissioners' Decision regarding the delegation of duties and responsibilities of the Board of Directors (Article 5) and shall automatically act in accordance with the handover report until the General Director & HR resumes the performance of his/her duties; 9. *In accordance with the Board of Commissioners' letter No. 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 dated November 13, 2025* November 2025 regarding the Division of Directorates, which was established as a follow-up to the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 12 November 2025, the IT Division falls under the coordination of the General Director and HR.	1. IT Division; 2. HR Division; 3. General Affairs Division; 4. Operations Division.

Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan operasional Bank sehari-hari sesuai bidang tugasnya masing-masing dan berdasarkan batas kewenangan persetujuan yang akan ditetapkan tersendiri berupa Surat Keputusan Direksi;
2. Direksi berwenang menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasional bank sehari-hari, namun Direksi dilarang memberikan kewenangan yang terlalu besar/tidak wajar kepada pihak lain/bawahan termasuk pemberian limit persetujuan/kewenangan biaya/anggaran yang berakibat pada ketiadaan atau penghindaran kewenangan Direksi yang seharusnya menjadi tugas/tanggung jawab/wewenang Direksi, koordinasi lintas direktorat jika diperlukan;
3. Direksi berwenang mewakili Bank di depan dan di luar Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab hukum dan kepentingan Bank;
4. Direksi wajib bertanggung jawab dan mematuhi serta menjalankan semua keputusan yang diambil bersama secara kolektif dengan Direksi lain/ bawahan dijalankan secara penuh sesuai SOP yang berlaku;

Wewenang Direksi menurut bidang tugas direktorat masing-masing diatur sebagai berikut:

Authority of the Board of Directors

1. The Board of Directors is authorized to sign letters, documents, and other instruments related to the Bank's daily operations in accordance with their respective areas of responsibility and based on the limits of approval authority to be separately established in the form of a Board of Directors' Decision;
2. The Board of Directors is authorized to make decisions related to the Bank's day-to-day operations, however, the Board of Directors is prohibited from delegating excessive or unreasonable authority to other parties or subordinates, including the granting of approval limits, expense authority, or budgetary authority that results in the absence or circumvention of the Board's authority—which should be the Board's duties, responsibilities, and authority—and cross-directorate coordination if necessary;
3. The Board of Directors is authorized to represent the Bank in and out of court in the context of fulfilling the Bank's legal responsibilities and interests;
4. The Board of Directors is obligated to be accountable for, comply with, and fully implement all decisions made collectively with other Board members or subordinates in accordance with applicable SOPs;

The authority of the Board of Directors, in accordance with the respective responsibilities of each directorate, is set forth as follows:

Jabatan Position	Kewenangan Authority	Pembidangan Divisions
Direktur Utama	1. Menyetujui rencana kebijakan strategis tentang pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai untuk ditetapkan dalam rapat Direksi; 2. Memberikan persetujuan atas kebijakan/keputusan di bidang SDM setelah adanya persetujuan/rekomendasi dari Direktur yang membidangi; 3. Memberikan persetujuan kredit dan restrukturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Komite Kredit yang berlaku, serta buku manual Pemberian Kredit Bank; 4. Memberikan persetujuan atas pengajuan program kerjasama dengan pihak ketiga; 5. Menetapkan rencana strategis bank, termasuk Kebijakan Umum Direksi (KUD) bersama anggota Direksi lainnya; 6. Memberikan persetujuan atas pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan Direktur Utama setelah adanya persetujuan/ rekomendasi Direktur yang membidangi; 7. Memberikan persetujuan atas kebijakan/keputusan di bidang SDM setelah adanya persetujuan/rekomendasi Direktur yang membidangi; 8. Memberikan persetujuan atas penempatan dana pada bank/ lembaga keuangan lain yang menjadi kewenangan Direktur Utama setelah adanya persetujuan/rekomendasi dari Direktur yang membidangi; 9. Memberikan persetujuan di bidang IT. akuntansi termasuk penggunaan *CBS* yang menjadi kewenangan Direktur Utama setelah adanya persetujuan/rekomendasi dari Direktur yang membidangi; 10. Memberikan persetujuan pemberian suku bunga khusus dana pihak ketiga yang menjadi kewenangannya, setelah adanya persetujuan/ rekomendasi dari Direktur yang membidangi; 11. Memberikan persetujuan dalam pelaksanaan penghapusan kredit macet setelah adanya persetujuan/rekomendasi oleh direktur yang membidangi, dengan sepengetahuan Dewan Komisaris guna dilaporkan dalam RUPS.	1. Divisi Pengawasan & SKAI; 2. Divisi Riset dan Pengembangan; 3. Divisi Corsec & Legal
Chief Executive Officer	1. Approves strategic policy plans regarding human resource development, education and training, and employee welfare, to be be adopted at the Board of Directors meeting; 2. Granting approval on HR policies/decisions following approval/recommendation from the relevant Director; 3. Granting credit approvals and credit restructurings within its authority, as regulated and stipulated by the applicable Credit Committee and the Bank's Credit Granting Manual; 4. Approving proposals for cooperation programs with third parties; 5. Establishing the bank's strategic plan, including the General Policy of the Board of Directors (KUD), together with other members of the Board of Directors; 6. Approve the procurement of goods and services under the authority of the President Director following approval/recommendation from the relevant Director; 7. Grant approval for policies/decisions in the field of human resources following approval/recommendation from the relevant Director; 8. Granting approval for the placement of funds in banks or other financial institutions, which falls under the authority of the CEO, following approval or recommendation from the relevant Director; 9. Granting approval in the areas of IT and accounting, including the use of CBS, which falls under the authority of the CEO, following approval/recommendation from the relevant Director; 10. Grant approval for special interest rates on third-party funds within his authority, following receiving approval/recommendation from the relevant Director; 11. Granting approval for the write-off of non-performing loans following approval/recommendation by the relevant director, with the knowledge of the Board of Commissioners to be reported at the General Meeting of Shareholders.	1. Supervision & SKAI Division; 2. Research Research and Development; 3. Corporate Security & Legal Division.

Jabatan Position	Kewenangan Authority	Pembidangan Divisions
Direktur Kepatuhan	1. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan, dan apabila terdapat hal-hal yang dapat dan/atau merugikan bank; 2. Memberikan persetujuan dan distribusi laporan transaksi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta pemenuhan data keuangan nasabah kepada PPATK dan kepada KPK apabila diperlukan; 3. Menyetujui usulan Direktur bidang tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai, promosi/ mutasi serta kebijakan strategis di bidang SDM lainnya bersama Direktur lainnya dalam rapat Direksi; 4. Memberikan pendapat tentang risiko atas usulan persetujuan kredit baru sebelum pencairan atau perpanjangan jangka waktu kredit atau restrukturisasi untuk limit kredit yang menjadi kewenangan keputusan Direksi; 5. Merekomendasikan rencana strategis bank di bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk Kebijakan Umum Direksi, bersama anggota Direksi lainnya.	1. Divisi Kepatuhan; 2. Divisi Manajemen Risiko
Compliance Director	1. Reporting to the Financial Services Authority in the event of compliance violations, and in the event of matters that may and/or harm the bank; 2. Provide approval and distribution suspicious transaction reports and cash transactions and the submission of customer financial data to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and to the Corruption Eradication Commission (KPK) when required; 3. Approving proposals from the Director of Human Resources regarding the appointment and dismissal of employees, promotions/transfers, and other strategic HR policies in consultation with other Directors during Board of Directors meetings; 4. Providing opinions on risks regarding proposals for new credit approvals prior to disbursement or credit term extensions or restructuring for credit limits within the Board of Directors' decision-making authority; 5. Recommend the bank's strategic plan in the areas of Compliance and Risk Management, including the Board of Directors' General Policy, together with other members of the Board of Directors.	1. Compliance Division; 2. Risk Management Division.
Direktur Kredit	1. Memberi persetujuan permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu kredit/restrukturisasi kredit dan Bank Garansi sesuai dengan limit/ batas kewenangannya, sebagaimana telah diatur dalam Komite Kredit serta buku manual perkreditan yang berlaku; 2. Menyetujui besaran persentase suku bunga kredit dan provisi dan biaya administrasi yang berlaku dengan memperhitungkan *Cost Of Fund* dan Keputusan rapat; 3. Menyetujui rencana kerja Direktorat Kredit; 4. Merekomendasikan rencana strategis Bank di bidang pendanaan, termasuk KUD, bersama anggota Direksi lainnya.	1. Divisi Supporting Kredit; 2. Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer; 3. Divisi Kredit Komersil dan Menengah; 4. Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit
Credit Director	1. Approves new loan applications, loan term extensions/loan restructurings, and Bank Guarantees in accordance with their authority limits, as stipulated by the Credit Committee and the applicable credit manual; 2. Approve the applicable loan interest rates, fees, and administrative charges, taking into account the Cost of Funds and meeting resolutions; 3. Approves the Credit Directorate's work plan; 4. Recommending the Bank's strategic plans in the area of funding, including KUD, together with other members of the Board of Directors.	1. Credit Support Division; 2. Micro, Small, and Consumer Credit Division; 3. Commercial and Medium-Sized Credit Division; 4. Credit Recovery and Resolution Division.

Jabatan Position	Kewenangan Authority	Pembidangan Divisions
Direktur Keuangan & Treasury	1. Menyetujui program pengembangan produk-produk baru dan layanan baru dalam penghimpunan DPK. sistem dan prosedur penghimpunan dana dan aktivitas Treasury; 2. Memutus kebijakan-kebijakan strategis dalam penghimpunan dana termasuk penetapan segmen prioritas penghimpunan dana, tingkat suku bunga, biaya-biaya, kebijakan mitigasi risiko; 3. Menyetujui kebijakan dalam pengelolaan likuiditas dan analisa data serta peningkatan hubungan institusional di pasar keuangan; 4. Merekomendasikan rencana strategis bank di bidang pendanaan termasuk KUD, bersama anggota Direksi lainnya. 5. Sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal Penyampaian terkait Pembidangan Direktorat, yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas hasil RUPS LB tanggal 12 November 2025, pembidangan untuk Divisi Dana berada di bawah koordinasi Direktur Keuangan & Treasury.	1. Divisi Dana; 2. Divisi Treasury & Financial Institution
Director of Finance & Treasury	1. Approves new product and service development programs for deposit mobilization, as well as systems, procedures for fund mobilization, and Treasury activities; 2. Making strategic decisions regarding deposit mobilization, including determining priority deposit segments, interest rates, fees, and risk mitigation policies; 3. Approves policies regarding liquidity management, data analysis, and the enhancement of institutional relationships in the financial markets; 4. Recommend the bank's strategic plans in the area of funding, including KUD, together with other members of the Board of Directors; 5. In accordance with Board of Commissioners Letter No. 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 dated November 13, 2025 November 2025 regarding the Submission related to the The division of directorates, established as a follow-up to the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 12, 2025, places the Fund Division under the coordination of the Director of Finance & Treasury.	1. Funds Division; 2. Treasury & Financial Institutions Division.
Direktur Umum & SDM	1. Menyetujui rencana kebijakan strategis tentang operasional dan penerapan sistem akuntansi, produk dan layanan sesuai dengan batas kewenangannya; 2. Menyetujui pengadaan barang/jasa sesuai dengan batas limit kewenangannya; 3. Menyetujui perubahan sistem/core banking, aplikasi pendukung/ tambahan yang menjadi kewenangannya dan berkoordinasi serta melaporkan kepada Direktur Utama; 4. Menyetujui kebijakan bidang SDM sesuai dengan batas kewenangannya; 5. Merekomendasikan rencana strategis Bank termasuk KUD bersama anggota Direksi lainnya; 6. Menyetujui rencana kebijakan strategis bank yang ditetapkan dalam rapat Direksi atau keputusan secara sirkuler. 7. Sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 1187.A/DK-PTBPDNTT/ XI/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal Penyampaian terkait Pembidangan Direktorat, yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas hasil RUPS LB tanggal 12 November 2025, pembidangan untuk Divisi IT berada di bawah koordinasi Direktur Umum & SDM.	1. Divisi TI; 2. Divisi SDM; 3. Divisi Umum; 4. Divisi Operasional

Jabatan Position	Kewenangan Authority	Pembidangan Divisions
Director of General Affairs & Human Resources	1. Approves strategic policy plans regarding operations and the implementation of accounting systems, products, and services within the scope of his authority; 2. Approves the procurement of goods/services within the limits of his authority; 3. Approves changes to the core banking system and supporting/additional applications within his authority, coordinates with, and reports to the President Director; 4. Approve HR policies within the scope of his/her authority; 5. Recommend the Bank's strategic plans, including the Credit Union (KUD), together with other members of the Board of Directors; 6. Approve the Bank's strategic policy plans established in Board of Directors meetings or by circular resolution; 7. In accordance with the Board of Commissioners' letter No. 1187.A/DK-PTBPDNTT/XI/2025 dated November 13, 2025 November 2025 regarding the Submission related to the Division of Directorates, which was established as a follow-up to the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 12 November 2025, the IT Division falls under the coordination of the Director General & HR.	1. IT Division; 2. HR Division; 3. General Division; 4. Operations Division.

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Test*

Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Compliance with *Fit and Proper Test* Requirements

All members of the Board of Directors have passed *the fit and proper test* conducted by the Financial Services Authority, with the following details:

Nomor Number	Tanggal Date	Keterangan Description
KEPR-180/D.03/2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Menyetujui Pencalonan Sdr. Charlie Paulus sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Approving the Nomination of Mr. Charlie Paulus as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
KEPR-210/D.03/2025	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Menyetujui Pencalonan Sdr. Heru Helbianto sebagai Direktur Keuangan & Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Approval of the Nomination of Mr. Heru Helbianto as Director of Finance & Treasury of PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur
KEPR-177/D.03/2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Menyetujui Pencalonan Sdr. Aloysius R. A. Geong sebagai Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Approve the Nomination of Mr. Aloysius R. A. Geong as Credit Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
KEPR-178/D.03/2025	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Menyetujui Pencalonan Sdr. Rahmat Saleh sebagai Direktur Umum & SDM PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Approval of the Nomination of Mr. Rahmat Saleh as General Director & Head of Human Resources of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank East Nusa Tenggara
SR-321/PB.12/2021	20 Desember 2021 December 20, 2021	Penetapan Sdr. Christofel Melianus Adoe sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Appointment of Mr. Christofel Melianus Adoe as Director of Compliance at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tersebut, maka seluruh anggota Direksi Bank NTT dinyatakan memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang memenuhi kriteria sehingga dapat bertindak dan bekerja secara professional.

Based on the results of *the fit and proper* test, all members of the Bank NTT Board of Directors are deemed to possess the competence, integrity, character, and moral standards that meet the criteria, enabling them to act and work professionally.

Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2025 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut:

Board of Directors Training and Seminar Program

Throughout 2025, the Board of Directors participated *in* several *training sessions, seminars, and workshops* organized by external parties, as follows:

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Lembaga Penyelenggara Institution Organizer	Waktu Pelaksanaan Date Implementation	Tempat Location
Charlie Paulus	Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris Executive Training APUPPT and PPPSPM and Risk Management for Board Members and Board Members	PT. Ultima Bersama Olingga	3-4 Desember 2025 December 3–4 2025	Le Méridien, Jakarta, (Offline)
Heru Helbianto	Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris Executive Training APUPPT and PPPSPM and Risk Management for Board of Directors and Board Members	PT. Ultima Bersama Olingga	3-4 Desember 2025 December 3–4 2025	Le Méridien, Jakarta, (Offline)
Aloysius R. A. Geong	1. Pembatalan Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) Cancellation of General Management Pension Fund (MUDP)	Perkumpulan ADPI	10-12 Juni 2025 June 10–12 2025	Jakarta, (Offline)
	2. Penawaran Program Pengembangan SDM dan Undangan Pertemuan Human Resource Development Program Offer and Invitation Meeting	LPPI, Jakarta	2-3 Juli 2025 July 2–3, 2025	LPPI, Jakarta, (Offline)
	3. Pelatihan Metode Pengukuran Kinerja dengan Key Performance Indicator (KPI) Training on Performance Measurement Methods Using Key Performance Indicators (KPI)	PT. Calamus Rotana Cattail	5-7 Agustus 2025 August 5–7 2025	Surabaya, (Offline)
	4. Diklat Data-Driven GRC For Corporate Integrity Data-Driven GRC Training for Corporate Integrity	LPPI	16-17 September 2025 16–17 September 2025	Hotel Cordela, Jakarta, (Offline)
	5. Training "Melihat Lebih Dalam Potensi Karyawan Melalui Assessment yang Terukur dan Obyektif" Training: "Gaining Deeper Insights into Employee Potential Through Measurable and Objective Assessments"	SkillNest	29-30 Oktober 2025 October 29–30 2025	Wizzmie Menteng, Jl Raden Saleh Cikini, Jakarta, (Offline)
	6. Diklat Simulasi Tabletop Exercise/Fase I Perencanaan & Persiapan Tabletop Exercise Simulation Training/ Phase I Planning & Preparation	Temika Cyber	5 November 2025 November 5 2025	Ruang Kerja Peserta/Bebas, (Online)

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Lembaga Penyelenggara Institution Organizer	Waktu Pelaksanaan Date Implementation	Tempat Location
	7. Diklat Simulasi Tabletop Exercise/Lanjutan Fase I Perencanaan & Persiapan Tabletop Exercise Simulation Training/ Phase I Continuation: Planning & Preparation	Temika Cyber	11 November 2025 November 11 2025	Ruang Kerja Peserta/Bebas, (Online)
	8. Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris Executive Training APUPPT and PPPSPM and Risk Management for Board of Directors and Board Members	PT. Ultima Bersama Olingga	3-4 Desember 2025 December 3–4 2025	Le Méridien, Jakarta, (Offline)
	9. Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7 Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	Efektif Pro	16 Desember 2025 16 Desember 2025	Swiss BeLiNN Hotel, Surabaya (Offline)
Rahmat Saleh	1. Kegiatan Pengelompokkan Aset Hapus Buku & Tata Cara Lelang Inventaris Activity Classification of Written-Off Assets & Procedures Inventory Auction	Lembaga Pusat Pengembangan Kajian	24-25 Maret 2025 March 24–25 2025	Hotel Asyana Kemayoran, Jakarta (Offline)
	2. Diklat Simulasi Tabletop Exercise/Fase I Perencanaan & Persiapan Tabletop Exercise Simulation Training/ Phase I Planning & Preparation	Temika Cyber	5 November 2025 November 5 2025	Ruang Kerja Peserta/Bebas, (Online)
	3. Diklat Simulasi Tabletop Exercise/Lanjutan Fase I Perencanaan & Persiapan Tabletop Exercise Simulation Training/ Phase I Continuation: Planning & Preparation	Temika Cyber	11 November 2025 November 11 2025	Ruang Kerja Peserta/Bebas, (Online)
	4. Pelatihan Eksekutif APUPPT dan PPPSPM dan Manajemen Risiko Bagi Direksi dan Komisaris Executive Training APUPPT and PPPSPM and Risk Management for the Board of Directors and Board of Commissioners	PT. Ultima Bersama Olingga	3-4 Desember 2025 December 3–4 2025	Le Méridien, Jakarta, (Offline)
	5. Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7 Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	Efektif Pro	16 Desember 2025 16 Desember 2025	Swiss BeLiNN Hotel, Surabaya (Offline)

Nama Name	Jenis Pelatihan Type of Training	Lembaga Penyelenggara Institution Organizer	Waktu Pelaksanaan Date Implementation	Tempat Location
Chirstofel S. M. Adoe	1. Workshop Teknis Penyusunan Laporan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) OJK bagi BPD se Indonesia Technical Workshop on the Preparation of the OJK's Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) Report for Regional Development Banks (BPDs) Indonesia	ASBANDA	2-3 Juni 2025 June 2–3, 2025	Ballroom Hotel Papandayan, Bandung (Offline)
	2. Guide to CAFP & CAFP Examination Guide to CAFP & CAFP Examination	Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM)	19-20 Agustus 2025 August 19–20 2025	Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin, (Offline)
	3. Program Pembekalan Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 6 Compliance Certification Training Program Level 6	Efektif Pro	27-28 November 2025 November 27–28 2025	Ruang Kerja Peserta, (Online)
	4. Uji Kompetensi Bidang Kepatuhan Perbankan Uji Kompetensi Bidang Kepatuhan Perbankan	LSPP	11 Desember 2025 11 Desember 2025	Hotel Sotis, Kupang (Offline)
	5. Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7 Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang Kualifikasi 7	Efektif Pro	16 Desember 2025 16 Desember 2025	Swiss BeLiNN Hotel, Surabaya (Offline)
Yohanis Landu Praing	1. Guide to CAFP & CAFP Examination Guide to CAFP & the CAFP Examination	Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM)	19-20 Agustus 2025 August 19–20 2025	Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin, (Offline)
	2. Diklat Data-Driven GRC For Corporate Integrity Data-Driven GRC Training for Corporate Integrity	LPPI	16-17 September 2025 16–17 September 2025	Hotel Cordela, Jakarta, (Offline)

Rapat Direksi

Rapat Direksi dalam ketentuan POJK 17 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (1) menyatakan "***Direksi wajib melaksanakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan***". Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis:

Board of Directors Meeting

Board of Directors Meetings under POJK 17 of 2023, Article 30, paragraph (1), state: "***The Board of Directors is required to hold Board of Directors meetings on a regular basis at least once every month***." The Board of Directors may hold meetings outside of the schedule mentioned above based on a written request:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Komisaris,
3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham,

1. One or more members of the Board of Directors
2. A written request from one or more members of the Board of Commissioners,
3. A written request from one (1) or more Shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) of the total number of shares,

Direksi telah melakukan beberapa kali pertemuan/ rapat, baik rapat Direksi (Direksi sendiri) maupun rapat koordinasi (Direksi dengan unit terkait). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis. Tabel di bawah ini menguraikan tentang jadwal dan agenda Rapat Direksi selama tahun 2025 sebagai berikut:

The Board of Directors has held several meetings, including Board of Directors meetings (the Board itself) and coordination meetings (the Board with relevant units). Board of Directors meetings serve to establish policies for strategic decision-making. The table below outlines the schedule and agenda for Board of Directors meetings during 2025 as follows:

No	Tanggal Date	Materi Agenda	Kode Peserta Participant Code						
			1	2	3	4	5	6	7
1	10 Januari 2025 January 10, 2025	1. Progres KUB Bank NTT dan Bank Jatim; 2. Kinerja Bank NTT Desember 2024. 1. Progress of KUB Bank NTT and Bank Jatim; 2. Bank NTT Performance in December 2024.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
2	20 Februari 2025 February 20, 2025	1. Kinerja Akhir Tahun 2025; 2. Progres KUB Bank NTT dan Bank Jatim; 3. RBB TW I 2025; 4. Lain-lain. 1. 2025 Year-End Performance; 2. Progress of KUB Bank NTT and Bank Jatim; 3. First Quarter 2025 Budget; 4. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
3	7 Maret 2025 March 7, 2025	1. Pembahasan terkait hasil Prudential Meeting OJK (Kamis, 06 Maret 2025); 2. Action Plan GCG 3. Progress KUB BNTT dan Bank Jatim; 4. Persiapan Materi Rapat Bersama Komisi III DPRD Provinsi NTT (Selasa, 11 Maret 2025); 5. Lain-lain. 1. Discussion regarding the results of the OJK Prudential Meeting (Thursday, March 6, 2025); 2. GCG Action Plan 3. Progress of KUB BNTT and Bank Jatim; 4. Preparation of Materials for the Joint Meeting with Commission III of the NTT Provincial DPRD (Tuesday, March 11, 2025); 5. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
4	10 April 2025 April 10, 2025	1. Kinerja TW I Tahun 2025; 2. Rencana Evaluasi Kinerja TW 1 bersama Kepala Divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu melalui zoom meeting (setelah proses pelaporan selesai) minggu ke 2 bulan April Tahun 2025; 3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit Intern dan Ekstern; 6. Progres proses Perpanjang CBS; 7. Laporan Hasil Assessment LPPI; 8. Review Laporan Pengaduan Nasabah yang berulang (pada hari libur); 9. Tindak lanjut hasil pertemuan BUMD dengan Bapak Gubernur & Wakil Gubernur; 10. Progress KUB & NCD; 11. Lain lain.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓

No	Tanggal Date	Materi Agenda	Kode Peserta Participant Code						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Q1 2025 Performance; 2. Plan for Q1 Performance Evaluation with Division Heads, Branch Managers, and Assistant Branch Managers via Zoom meeting (after the reporting process is complete) in the second week of April 2025; 3. Follow-up Evaluation of Internal and External Audit Results; 6. Progress of the CBS Renewal Process; 7. LPPI Assessment Results Report; 8. Review Report Repeated Customer Complaints (on holidays); 9. Follow-up on the results of the meeting between the Regional-Owned Enterprises (BUMD) and the Governor & Deputy Governor; 10. Progress on KUB & NCD; 11. Miscellaneous.							
5	19 Mei 2025 May 19, 2025	1. Menindaklanjuti hasil RUPS; 2. Progress KUB; 3. Struktur Organisasi; 4. Lain lain. 1. Follow-up on the results of the General Meeting of Shareholders; 2. KUB Progress; 3. Organizational Structure; 4. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
6	4 Juni 2025 June 4, 2025	1. Pembahasan Progres KUB; 2. Perubahan RBB Bulan Juni; 3. Lain lain. 1. Discussion on KUB Progress; 2. June RBB Changes; 3. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
7	10 Juni 2025 June 10, 2025	1. Pencapaian Kinerja Keuangan Posisi Mei 2025; 2. Penetapan Nilai Saham yang akan di tawarkan ke Bank Jatim; 3. Lain lain. 1. Financial Performance Achievements as of May 2025; 2. Determination of the Share Value to be Offered to Bank Jatim; 3. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
8	22 Juli 2025 July 22, 2025	1. Pencapaian Kinerja Keuangan Posisi Triwulan II TB 2025; 2. Progres KUB; 3. Tindak Lanjut Permohonan PC Borong; 4. Lain-lain. 1. Financial Performance Achievements for the Second Quarter of Fiscal Year 2025; 2. KUB Progress; 3. Follow-up on the PC Borong Request; 4. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
9	8 Agustus 2025 August 8, 2025	1. Kinerja Bulan Juli 2025; 2. Progres KUB Bank NTT dan Bank Jatim. 1. July 2025 Performance; 2. Progress of KUBs at Bank NTT and Bank Jatim.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
10	12 September 2025 September 12 2025	1. Pembahasan Struktur Organisasi Bank NTT; 2. Lain-lain. 1. Discussion on the Organizational Structure of Bank NTT; 2. Miscellaneous.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓
11	1 Oktober 2025 1 Oktober 2025	1. Perubahan/Penyesuaian Struktur Organisasi PT. Bank NTT; 2. Kinerja Bulan Agustus 2025 dan Prediksi Bulan September 2025; 3. Pembentukan Cadangan Biaya Sewa CBS Masa Transisi; 4. Lain-lain.	BM	BM	BM	BM	✓	✓	✓

No	Tanggal Date	Materi Agenda	Kode Peserta Participant Code						
			1	2	3	4	5	6	7
		1. Changes/Adjustments to the Organizational Structure of PT. Bank NTT; 2. August 2025 Performance and September 2025 Forecast; 3. Establishment of a Transition Period CBS Lease Expense Reserve; 4. Miscellaneous.							
12	25 November 2025 November 25 2025	1. Finalisasi RBB TB 2026; 2. RAKB Tahun 2026 dan Recovery Plan 2025; 3. Proyeksi Keuangan November 2025; 4. Lain-lain. 1. Finalization of the 2026 Budget; 2. RAKB 2026 and Recovery Plan 2025; 3. November 2025 Financial Projections; 4. Miscellaneous.	✓	✓	✓	DL	✓	TM	TM
13	17 Desember 2025 December 17 2025	1. Natal Bersama Bank NTT; 2. Penanganan Isu Eksternal dan Risiko Hukum; 3. Negosiasi Kontrak dan Manajemen Vendor TI; 4. Kebijakan Internal dan Efisiensi Operasional; 5. Pengelolaan SDM; 6. Kebcoran Informasi Internal; 7. Evaluasi Sistem Teknologi Informasi dan Digital Banking; 8. Perkembangan Restrukturisasi Kredit WBW (PT. Wakita Bumi Wira); 9. Aspek Hukum dan Administrasi (Akta dan Sistem Kemenkum). 1. Christmas Celebration with Bank NTT; 2. Handling External Issues and Legal Risks; 3. Contract Negotiation and IT Vendor Management; 4. Internal Policies and Operational Operational Efficiency; 5. Human Resource Management; 6. Internal Information Leakage; 7. Evaluation of Information Technology Systems and Digital Banking; 8. Progress on the Loan Restructuring of WBW (PT. Wakita Bumi Wira); 9. Legal and Administrative Aspects (Deeds and the Ministry of Law and Human Rights System).	✓	✓	✓	✓	✓	TM	TM

*Keterangan Kode Nama Peserta
1) Charlie Paulus
2) Heru Helbianto
3) Rahmat Saleh
4) Aloysius R. A. Geong
5) Christofel S. M. Adoe
6) Yohanis Landu Praing
7) Hilarius Minggu

*Keterangan kehadiran :
✓ = Hadir
- = Tidak Hadir
DL = Dinas Luar
TM = Tidak Menjabat
BM = Belum Menjabat

*Code Description Participant Name
1) Charlie Paulus
2) Heru Helbianto
3) Rahmat Saleh
4) Aloysius R. A. Geong
5) Christofel S. M. Adoe
6) Yohanis Landu Praing
7) Hilarius Minggu

*Attendance notes:
✓ = Present
- = Absent
DL = Out of Office
TM = Not in Office
BM = Not Yet in Office

Tabel dibawah mengungkapkan frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi di dalam setiap pertemuan/rapat sepanjang tahun 2025:

The table below shows the frequency and attendance rate of the Board of Directors at each meeting throughout 2025:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	% Kehadiran Attendance Rate
1	Charlie Paulus	2	100%
2	Heru Helbianto	2	100%
3	Rahmat Saleh	2	100%
4	Aloysius R. A. Geong	1	50%
5	Christofel S. M. Adoe	13	100%
6	Yohanis Landu Praing	11	100%
7	Hilarius Minggu	11	100%

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus/ Gabungan)

Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Pengurus) diselenggarakan secara berkala, **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan**, yang pada akhir tahun 2025 ini dinilai telah memenuhi ketentuan POJK 17 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (2) dimana menyatakan "***Direksi wajib melaksanakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan***". Tabel di bawah ini menguraikan tentang jadwal dan agenda Rapat Direksi selama tahun 2025 sebagai berikut:

Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (Joint Meeting)

Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors (Management) are held periodically, **at least once every 4 (four) months**, which by the end of 2025 is deemed to have met the provisions of POJK 17 of 2023 Article 30 paragraph (2), which states that "***The Board of Directors is required to hold meetings with the Board of Commissioners periodically at least once every 4 (four) months***." The table below outlines the schedule and agenda of Board of Directors meetings for the year 2025 as follows:

No	Hari / Tanggal Day / Date	Materi Agenda	Kode Peserta* Participant Code*								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10 Januari 2025 January 10, 2025	1. Progres KUB; 2. Kinerja Bank Posisi Desember 2024; 3. Pemenuhan Struktur Pengurus; 4. Lain-lain. 1. KUB Progress; 2. Bank Performance as of December 2024; 3. Compliance with Management Structure; 4. Miscellaneous.	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓
2	23 April 2025 April 23, 2025	1. Laporan Hasil Audit KAP per 31 Desember 2024; 2. Pencapaian RBB TW I 2025; 3. Persiapan RUPS Tahunan TB 2024 dan RUPSLB Tahun 2025; 4. Lain-lain. 1. Report CPA Audit Report as of December 31 December 2024; 2. RBB Q1 2025; 3. Preparation for the Annual General Meeting TB 2024 and 2025 Extraordinary General Meeting; 4. Miscellaneous.	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓

No	Hari / Tanggal Day / Date	Materi Agenda	Kode Peserta* Participant Code*								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	10 Juni 2025 June 10, 2025	1. Pencapaian Kinerja Keuangan Posisi Mei 2025; 2. Penetapan Nilai Saham yang Akan Ditawarkan ke Bank Jatim; 3. Lain-lain. 1. Performance Achievements Financial Position as of May 2025; 2. Determination of Share Value to Be Offered to Bank Jatim; 3. Other	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓
4	20 Juni 2025 June 20, 2025	1. Tindak Lanjut Penawaran Saham kepada Bank Jatim; 2. Progres Pencalonan Pengurus; 3. Tindak Lanjut Hasil Rapat dengan PemProv NTT terkait Perseroda; 4. Lain-lain. 1. Action Proceed with the Stock Offering to Bank Jatim; 2. Progress of Board Candidate Nominations; 3. Follow-up on the Results of the Meeting with the Provincial Government of NTT regarding the State-Owned Enterprise; 4. Miscellaneous.	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓
5	26 Agustus 2025 August 26, 2025	1. Pencapaian Kinerja TW III 2025 – Posisi Agustus 2025; 2. Progres KUB; 3. Persiapan RUPSLB Tanggal 4 September 2025; 4. Lain-lain. 1. Achievements Q3 2025 Performance – Position August 2025; 2. KUB Progress; 3. Preparations Extraordinary General Meeting of Shareholders on 4 September 2025; 4. Miscellaneous.	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓
6	3 September 2025 September 3, 2025	1. Koordinasi Persiapan RUPSLB Tanggal 4 September 2025; 2. Lain-Lain 1. Preparation Coordination Extraordinary General Meeting Date 4 September 2025; 2. Miscellaneous	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓
7	5 November 2025 November 5, 2025	1. Persiapan RUPSLB Tanggal 12 November 2025 dan Kunjungan Kerja Gubernur NTT; 2. Lain-lain. 1. Preparations Extraordinary General Meeting Date, 2025 2025 and the Working Visit of the Governor of NTT; 2. Miscellaneous.	BM	✓	BM	BM	BM	BM	BM	✓	✓
8	17 Desember 2025 17 Desember 2025	1. Pembahasan Surat OJK terkait Penyampaian Tanggapan; 2. Progres Pencalonan Pengurus; 3. Komposisi Komite Dewan Komisaris; 4. *Review* Remunerasi Pengurus; 5. Lain-lain. 1. Pembahasan Surat OJK terkait Penyampaian Tanggapan; 2. Progres Pencalonan Pengurus; 3. Komposisi Komite Dewan Komisaris; 4. *Review* Remunerasi Pengurus; 5. Lain-lain.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TM	TM

No	Hari / Tanggal Day / Date	Materi Agenda	Kode Peserta* Participant Code*								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	23 Desember 2025 23 Desember 2025	1. Pembahasan Lanjutan Review Remunerasi Pengurus; 2. Review Ketentuan Perjalalanan Dinas Pengurus; 3. Pembahasan Terkait Staf Ahli; 4. Lain-lain. 1. Pembahasan Lanjutan Review Remunerasi Pengurus; 2. Review Ketentuan Perjalalanan Dinas Pengurus; 3. Pembahasan Terkait Staf Ahli; 4. Lain-lain.	✓	✓	✓	✓	✓	DL	✓	TM	TM

*Keterangan Kode Nama Peserta
1) S. Donny H. Heatubun
2) Frans Gana
3) Charlie Paulus
4) Heru Helbianto
5) Rahmat Saleh
6) Aloysius R. A. Geong
7) Christofel S. M. Adoe
8) Yohanis Landu Praing
9) Hilarius Minggu

*Code Description Participant Name
1) S. Donny H. Heatubun
2) Frans Gana
3) Charlie Paulus
4) Heru Helbianto
5) Rahmat Saleh
6) Aloysius R. A. Geong
7) Christofel S. M. Adoe
8) Yohanis Landu Praing
9) Hilarius Minggu

*Keterangan kehadiran :
✓ = Hadir
- = *Tidak Hadir*
DL = Dinas Luar
TM = Tidak Menjabat
BM = Belum *Menjabat*

*Attendance record:
✓ = Present
- = Absent
DL = Out of Office
TM = Not in Office
BM = Not Yet in Office

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris di dalam setiap pertemuan/rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025, terungkap pada tabel berikut:

The frequency and attendance rates of the Board of Directors and Board of Commissioners at each meeting held throughout 2025 are shown in the following table:

No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Number Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	S. Donny H. Heatubun	2	100%
2	Frans Gana	7	100%
3	Charlie Paulus	2	100%
4	Heru Helbianto	2	100%
5	Rahmat Saleh	2	100%
6	Aloysius R. A. Geong	1	50%
7	Christofel S. M. Adoe	9	100%
8	Yohanis Landu Praing	7	100%
9	Hilarius Minggu	7	100%

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika terjadi ketidaksesuaian maka dilaksanakan pemungutan suara dan semua hasil rapat direksi telah dicatat dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan cukup baik.

HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK NTT

Dalam tata kelola Bank NTT hubungan Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., Notaris di Kota Kupang, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22.2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40.80.2014 Tahun 2014, dimana dalam hubungan tersebut dikenal adanya prinsip-prinsip:

1. Saling menghormati akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, baik itu tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan nasihat terhadap seluruh kebijakan Direksi maupun tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Bank NTT;
2. Bahwa hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme tertulis atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Bank NTT secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
4. Bahwa Direksi bertanggung jawab atas ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris;
5. Bahwa dalam hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur maka Dewan Komisaris dan Direksi wajib membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal-hal yang belum ditetapkan tersebut.

Decisions made at Board of Directors meetings are reached through consensus. In the event of a disagreement, a vote is taken, and all outcomes of the Board of Directors meetings are recorded in the meeting minutes and are adequately documented.

RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF BANK NTT

In the governance of Bank NTT, the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 No. 106; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4756) and the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as stipulated in Articles of Association No. 122 dated April 12, 1999, executed before Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., Notary in the City of Kupang, as amended several times and most recently by the Deed of Declaration of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 61 dated July 10, 2014, drawn up by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH., which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Notification of Changes to Company Data No. AHU-34837.40.22.2014 dated October 9, 2014, and has been registered in the Company Register No. AHU-0104499.40.80.2014 of 2014, wherein the following principles are recognized:

1. Mutual respect for each other's responsibilities and authorities, whether those of the Board of Commissioners in overseeing and advising on all policies of the Board of Directors or those of the Board of Directors in managing Bank NTT;
2. That the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a written mechanism or accountable correspondence;
3. That the Board of Commissioners is entitled to receive information regarding Bank NTT in a timely, measurable, and complete manner;
4. That the Board of Directors is responsible for the timeliness, accuracy, and completeness of the information provided to the Board of Commissioners;
5. That in working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors that have not yet been regulated, the Board of Commissioners and the Board of Directors are required to first reach an agreement regarding such unregulated matters.

KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Under The Board of Commissioners

Sebagaimana Struktur Organisasi Dewan Komisaris yang berpedoman pada:

1. Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dimana didalamnya mengatur tentang Fungsi, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris; dan
2. Keputusan Direksi Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* (CoC) dan *Code of Corporate Governance* (CoCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*,

Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan kepengurusan dari masing-masing Komite masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang anggota Komisaris dapat menjabat di dua Komite yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* Bank NTT, bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainya.

Komposisi Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Komposisi keanggotaan Komite pada Dewan Komisaris mulai 7 Agustus 2024 hingga tanggal 7 Agustus 2025 diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 131 Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut:

In accordance with the Organizational Structure of the Board of Commissioners, which is based on:

1. Resolution of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 02 of 2020 dated June 3, 2020, regarding the Rules of Procedure of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, which regulates the Functions, Duties, Obligations, Rights, and Authorities of the Board of Commissioners; and
2. Board of Directors Decision No. 89 of 2022 dated June 30, 2022, regarding the Guidelines for *the Code of Conduct* (CoC) and *Code of Corporate Governance* (CoCG) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur: Adoption of *the Code of Conduct* and *Code of Corporate Governance* Manual,

The Board of Commissioners is supported by an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, and a Remuneration and Nomination Committee. The composition of each Committee is still being determined, and positions are held concurrently by several members of the Board of Commissioners, so that a single Commissioner may serve on two different Committees. This does not conflict with the Bank NTT *Good Corporate Governance* Code of Conduct (BPP), which stipulates that a committee chair may concurrently hold the position of chair on no more than one other committee.

The composition of the Board of Commissioners' Committees at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur is as follows:

1. The composition of the Board of Commissioners' committees from August 7, 2024, to August 7, 2025, is regulated by Board of Directors' Resolution No. 131 of 2024 dated August 5, 2024, with the following details:

1.	**Komite Audit** **Audit Committee**		
	Ketua/ Chair	:	Frans Gana
	Anggota/ Members	:	- Yosef Juba Dobe Ngole
			- Fauziyah Lamaya
2.	**Komite Pemantau Risiko** **Risk Monitoring Committee**		
	Ketua/ Chair	:	--
	Anggota/ Members	:	- Ahmad Atang
			- Stanis Man

3. Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee		
Ketua/ Chair	:	Frans Gana
Anggota/ Members	:	Kepala Divisi SDM

2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 137 Tahun 2025 tentang Komposisi Komite pada Dewan Komisaris PT. BPD NTT dijabarkan sebagai berikut:

2. Pursuant to PT. BPD NTT Board of Directors Decision No. 137 of 2025 regarding the Composition of the Committee within the Board of Commissioners of PT. BPD NTT, the composition is as follows:

1. Komite Audit Audit Committee		
Ketua/ Chair	:	Frans Gana
Anggota/ Members	:	- Jonas Salean
		- Stanis Man
2. Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee		
Ketua/ Chair	:	--
Anggota/ Members	:	- Ahmad Atang
		- Agustinus Tetiro
3. Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee		
Ketua/ Chairs	:	Frans Gana
Anggota/ Members	:	Kepala Divisi SDM

3. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan aturan pihak otoritas akan tetapi masih ada kekosongan pada Anggota Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;

3. The Board of Commissioners has established an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, and a Remuneration Committee and Nominations in accordance with the regulations of the relevant authorities; however, there are still vacancies for members of the Audit Committee, the Chair of the Risk Monitoring Committee, and members of the Remuneration and Nominations Committee;

4. Kekosongan pada jabatan anggota Komite Audit disebabkan oleh proses pengunduran diri yang dilakukan Bpk. Jonas Salean melalui surat tanggal 15 Desember 2025 yang telah ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris melalui surat kepada Direktur Utama serta Direktur Umum & SDM Bank NTT tanggal 16 Desember 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Direksi dan saat ini masih dalam proses tindak lanjut untuk mengisi kekosongan tersebut;

4. The vacancy in the position of Audit Committee member was caused by the resignation process initiated by Mr. Jonas Salean via a letter dated December 15, 2025, which was followed up by the Board of Commissioners via a letter to the President Director and the Director of General Affairs & Human Resources of Bank NTT dated December 16, 2025, regarding the Request for the Issuance of a Board of Directors' Decision, and is currently still in the follow-up process to fill the vacancy;

5. Kekosongan jabatan pada komposisi Ketua Komite Pemantau Risiko seperti yang tergambar pada tabel komposisi komite di halaman atas dimana **tidak sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17 Tahun 2023 Paragraf 2 Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan: *"Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit: a. 1 (satu) orang Komisaris***

5. The vacancy in the composition of the Risk Monitoring Committee, as shown in the committee composition table on the previous page, **does not comply with the provisions of POJK 17 of 2023, Paragraph 2 of Article 65(1), which states: *"The Risk Monitoring Committee must consist of at least: a. 1 (one) Independent Commissioner, b.***

Independen, b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan".

6. Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi juga dinilai tidak sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023 Pasal 66 bahwa wajib beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 1(satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai bank. Dalam hal ini bank memiliki 1 (satu) orang Komisaris Non Independen yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama tetapi belum dimasukkan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi;

7. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pengangkatan maupun pemberhentian anggotanya wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Bagian Ketiga "Komite Dewan Komisaris" Pasal 63 ayat (1) dan (5).

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
c. POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

1 (one) independent party with expertise in risk management; and c. 1 (one) independent party with expertise in finance."

6. The composition of the Remuneration & Nomination Committee is also deemed non-compliant with POJK 17 of 2023, Article 66, which stipulates that the committee must include at least 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Non-Independent Commissioner, and 1 (one) Executive Officer responsible for human resources functions or 1 (one) employee representative of the bank. In this case, the bank has 1 (one) Non-Independent Commissioner who currently serves as the Lead Commissioner but has not yet been included in the membership of the Remuneration and Nomination Committee;
7. This Committee, established by the Board of Commissioners, is accountable to the Board of Commissioners, and the appointment and dismissal of its members must be carried out by the Board of Directors based on a resolution of the Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions set forth in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 regarding Part Three "Board of Commissioners Committees" Article 63 paragraphs (1) and (5).

1. Audit Committee

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur based on:

a. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007, on Limited Liability Companies;
b. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015, on the Establishment and Guidelines for the Operation of the Audit Committee;
c. OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated January 29, 2019, on the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks;
d. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
e. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;

f. Anggaran Dasar Bank NTT beserta perubahannya;

Segala hal tentang Komite Audit berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Agustus 2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

f. The Articles of Association of Bank NTT and its amendments;

All matters concerning the Audit Committee are governed by Board of Commissioners Decree No. 004 of 2023 regarding the Rules of Procedure of the Audit Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dated August 21, 2023, and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit ditetapkan sebagai berikut:
Anggota Komite Audit:
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 64 menyatakan "Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen dan paling sedikit beranggotakan: 1 (satu) orang Komisaris Independen dan pihak independen yang terdiri dari: 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi dan 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang hukum atau perbankan"

Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit berdasarkan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 64 ayat (5). Keanggotaan Komite Audit pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Audit Committee Membership

The membership of the Audit Committee is as follows:
Audit Committee Members:
Pursuant to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Article 64 states "All members of the Audit Committee must be independent and consist of at least: 1 (one) Independent Commissioner and independent parties comprising: 1 (one) person with expertise in finance or accounting and 1 (one) person with expertise in law or banking"

Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the Audit Committee pursuant to POJK 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Article 64, paragraph (5). The composition of the Audit Committee in 2025 is outlined as follows:

Susunan Komposisi Komite Audit Composition of the Audit Committee		
Jabatan **Position**	**Komposisi Komite** **7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2025** **Committee Composition** **August 7, 2024 – August 7, 2025** **Nama** **Name**	**Komposisi Komite** **1 September 2025 – 1 September 2026** **Committee Composition** **September 1, 2025 – September 1, 2026** **Nama** **Name**
Ketua Chair	Frans Gana	Frans Gana
Anggota Members	Yosef Juba Dobe Ngole	Jonas Salean
	Fauziyah Lamaya	Stanis Man

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:

a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan;
d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan non audit pada Bank NTT dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota komite;
e. Tidak memiliki saham Bank NTT baik langsung maupun tidak langsung;
f. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank NTT, Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank NTT;
g. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT.

Kewenangan Komite Audit:

a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
c. Meminta laporan hasil pemeriksaan auditor intern/ Divisi Pengawasan dan SKAI dan auditor ekstern serta institusi pengawasan/pemeriksa lainnya;
d. Meminta auditor intern/Divisi Pengawasan dan SKAI dan atau auditor ekstern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Mengakses dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
f. Melibatkan pihak independen diluar Anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
g. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee Membership Requirements:

a. Must possess high integrity, good character and morals, as well as adequate skills, knowledge, and experience commensurate with their educational background, and be able to communicate effectively;
b. Possess sufficient knowledge to read and understand financial statements;
c. Possess adequate knowledge of Capital Market laws and regulations and regulations related to the banking business;
d. Must not be an insider of a Public Accounting Firm that has provided audit and non-audit services to Bank NTT within the past 1 (one) year prior to being appointed as a committee member;
e. Does not hold shares in Bank NTT, either directly or indirectly;
f. Has no affiliation with Bank NTT, its Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders;
g. Has no business relationship, either direct or indirect, with Bank NTT.

Authority of the Audit Committee:

a. Provide opinions to the Board of Commissioners regarding the Financial Statements and/or other matters presented by the Board of Directors;
b. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those performing internal audit, risk management, and accounting functions, regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee
c. Requesting audit reports from internal auditors/the Supervision Division and SKAI, as well as external auditors and other supervisory/auditing institutions;
d. Requesting the internal auditor/Supervision Division and SKAI and/or external auditors to conduct special audits/investigations if there is strong suspicion of fraud, legal violations, and violations of applicable laws and regulations;
e. Access documents, data, and information from the Issuer or Public Company regarding employees, funds, assets, and corporate resources as required;
f. Engage independent parties outside the Audit Committee as necessary to assist in the performance of its duties (if necessary);
g. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 71 menyatakan: "**Komite Audit wajib bertugas dan bertanggungjawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. Perncanaan dan pelaksanaan audit; dan b. Pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan**".

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Audit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Agustus 2023, tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagai berikut:

a. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
   1. Menentukan Rencana Kerja Tahunan;
   2. Menentukan jadwal rapat tahunan;
   3. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
   4. Membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Audit;
b. Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab di antaranya untuk:
   1. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
   2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
   3. Menghadiri rapat;
   4. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan komite;
   5. Membuat risalah rapat;
   6. Melakukan kunjungan kerja ke lapangan, jika diperlukan;
c. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
   1. Melakukan pemantauan atas kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses dalam pembuatan laporan keuangan, efektivitas kerja dari internal dan eksternal auditor untuk aktivitas bank baik transaksi rupiah maupun transaksi valuta asing;
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of the Audit Committee:

Pursuant to POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Article 71 states: "**The Audit Committee is obligated to monitor and evaluate: a. The planning and conduct of audits; and b. The follow-up on audit results, to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the** financial **reporting process**."

Pursuant to Board of Commissioners' Resolution No. 004 of 2023 regarding the Rules of Procedure of the Audit Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dated August 21, 2023, the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

a. The Committee Chair is tasked with and responsible for coordinating all audit committee activities to fulfill the committee's objectives in accordance with its establishment, including being responsible for the following:
   1. Determining the Annual Work Plan;
   2. Determining the annual meeting schedule;
   3. Preparing periodic reports on the Audit Committee's activities and matters deemed necessary for the Board of Commissioners' attention;
   4. Conducting *a self-assessment* of the effectiveness of the Audit Committee's activities;
b. Members of the Audit Committee are tasked with and responsible for, among other things:
   1. Conducting regular meetings;
   2. Reviewing meeting materials in advance;
   3. Attending meetings;
   4. Actively participating and contributing to every committee activity;
   5. Preparing meeting minutes;
   6. Conducting field visits, if necessary;
c. In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:
   1. Monitor the adequacy of internal controls, the adequacy and accuracy of the financial reporting process, and the effectiveness of internal and external auditors' work regarding the Bank's activities, including both rupiah and foreign currency transactions;
2. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners;

3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris meliputi Laporan keuangan, *Internal control, Compliance*, Internal audit, Eksternal audit, Tata kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko, Hubungan kerja, Rapat, Pelaporan, Masa tugas dan kompensasi, Hari dan waktu kerja efektif serta Kerahasiaan bank.

Independensi Komite Audit ini tercantum pada tabel berikut:

3. Developing concepts and analyses related to the functions of the Audit Committee and performing other duties assigned by the Board of Commissioners, including financial reporting, *internal control, compliance*, internal audit, external audit, *corporate governance* (GCG), risk management, labor relations, meetings, reporting, term of office and compensation, effective working days and hours, and bank confidentiality.

The independence of the Audit Committee is outlined in the following table:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Frans Gana	Yosef Juba Dobe Ngole	Fauziyah Lamaya	Jonas Salean	Stanis Man
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Has no management ties to Bank NTT, its subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT Has no ownership interest in Bank NTT	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or fellow members of the Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Does not hold a position as a party official , or local government official	✓	✓	✓	✓	✓

Aktivitas Rapat Komite Audit

Pelaksanaan rapat Komite Audit dilaksanakan berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Bagian Kelima Pasal 77 yang menyatakan "***Rapat komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit:***

...b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk Komite Audit...". Sepanjang tahun 2025, Komite Audit mengadakan 11 (sebelas) kali rapat, Rincian rapat tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Audit Committee Meeting Activities

Audit Committee meetings are conducted in accordance with POJK No. 17 of 2023, Part Five, Article 77, which states: "***Audit Committee meetings shall be held as needed by the Bank, at a minimum:***

...b. once a month for the Audit Committee...". Throughout 2025, the Audit Committee held 11 meetings. The details of these meetings are outlined in the table below:

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Agenda	*Kode Peserta *Participant Code				
			1	2	3	4	5
1	22 Januari 2025 January 22 2025	1. Pemenuhan Komitmen OJK terutama yang berkaitan dengan penilaian SKAI oleh Komite Audit yang jatuh tempo Maret 2025; 2. Penunjukkan Auditor Publik untuk kepentingan audit tahunan oleh Komite Audit, minimal berdasarkan penawaran Kantor Akuntan Publik; 3. Penilaian terhadap kinerja Direktorat Kepatuhan yang telah jatuh tempo Desember 2024; 4. Temuan-temuan audit yang masih pending penyelesainnya; 5. Pembahasan Rencana Kerja Audit Tahunan SKAI 2025; 6. Lain-lain.	✓	-	✓	BM	BM
		1. Fulfillment of OJK commitments, particularly those related to the Audit Committee's assessment of the SKAI, due in March 2025; 2. Appointment of a Public Auditor for the annual audit by the Audit Committee, based at a minimum on proposals from Public Accounting Firms; 3. Assessment of the Compliance Directorate's performance, due in December 2024; 4. Audit findings that are still pending resolution; 5. Discussion of the SKAI 2025 Annual Audit Work Plan; 6. Miscellaneous.					
2.	11 Maret 2025 March 11, 2025	1. Pemenuhan komitmen OJK terutama yang berkaitan dengan penilaian SKAI oleh Komite Audit yang jatuh tempo Maret 2025; 2. Penunjukkan akuntan public untuk kepentingan Audit Tahunan oleh Komite Audit, minimal berdasarkan penawaran 3 kantor akuntan publik; 3. Temuan-temuan audit yang masih pending penyelesainnya; 4. Pembahasan hasil audit tahun TB 2024 oleh KAP; 5. Lain-lain.	✓	✓	✓	BM	BM
		1. Fulfillment of OJK commitments, particularly those related to the Audit Committee's assessment of the SKAI, due in March 2025; 2. Appointment of a public accountant for the Annual Audit by the Audit Committee, based on at least three proposals from public accounting firms; 3. Audit findings that are still pending resolution; 4. Discussion of the 2024 fiscal year audit results by the public accounting firm; 5. Other matters.					
3.	29 April 2025 April 29, 2025	1. Progres Report Pemenuhan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2024; 2. Lain-lain.	✓	✓	✓	BM	BM
		1. Progress Report Compliance Results of the 2024 OJK Inspection; 2. Miscellaneous					
4.	19 Mei 2025 May 19, 2025	1. Hasil Pemeriksaan OJK atas IT Bank NTT; 2. Hasil Audit SP2D Pemerintah Daerah dengan Bank NTT; 3. Evaluasi Kinerja KAP TB. 2024; 4. Lain-lain.	✓	-	✓	BM	BM
		1. OJK Audit Results on NTT Bank's IT Systems; 2. Results of the Audit of Local Government SP2Ds with Bank NTT; 3. Performance Evaluation of KAP TB. 2024; 4. Miscellaneous.					
5.	30 Juni 2025 June 30, 2025	1. Pembahasan Hasil Audit Bulan April 2025; 2. Lain-lain	✓	TM	✓	BM	BM
		1. Discussion of the April 2025 Audit Results; 2. Miscellaneous					

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Agenda	*Kode Peserta *Participant Code				
			1	2	3	4	5
6.	16 Juli 2025 July 16, 2025	1. Progres KUB; 2. Pembahasan Hasil Audit Bulan Mei 2025; 3. Pembahasan CRC Cabang Bulan Juni 2025; 4. Lain-lain. 1. KUB Progress; 2. Discussion of the May 2025 Audit Results; 3. Discussion of the June 2025 Branch CRC; 4. Miscellaneous.	✓	TM	✓	BM	BM
7.	29 Agustus 2025 August 29 2025	1. Pembahasan Hasil Audit Bulan Juni 2025; 2. Lain-lain. 1. Discussion of the June 2025 Audit Results; 2. Miscellaneous.	✓	TM	✓	BM	BM
8.	16 September 2025 September 16 2025	1. Pembahasan Hasil Audit Bulan Juli 2025; 2. Pembahasan Progres Temuan Internal dan Eksternal; 3. Lain-lain. 1. Discussion of the July 2025 Audit Results; 2. Discussion of Progress on Internal and External Findings; 3. Miscellaneous.	✓	TM	TM	✓	✓
9.	20 Oktober 2025 October 20 2025	1. Pembahasan Profil Risiko dan Hasil Audit Bulan Agustus 2025; 2. Lain-lain. 1. Discussion of the Risk Profile and Audit Results for August 2025; 2. Miscellaneous.	✓	TM	TM	-	✓
10.	27 November 2025 November 27 2025	1. Pembahasan Hasil Audit Bulan September 2025; 2. Tindak Lanjut Temuan Internal dan Eksternal sampai dengan Tahun 2025; 3. Lain-lain. 1. Discussion of the September 2025 Audit Results; 2. Action on Findings Internal and External Findings through 2025; 3. Miscellaneous.	✓	TM	TM	-	✓
11.	11 Desember 2025 December 11 2025	1. Update Informasi terkait Audit; 2. Follow Up Hasil Rapat Komite Audit tanggal 27 November 2025; 3. Lain-lain. 1. Update on Audit-Related Information; 2. Follow-up on the Results of the Audit Committee Meeting on November 27, 2025; 3. Miscellaneous.	✓	TM	TM	-	✓

*Keterangan Kode Nama Peserta
1) Frans Gana
2) Yosef Juba Dobe Ngole
3) Fauziyah Lamaya
4) Jonas Salean
5) Stanis Man

*Kode Kehadiran :
✓ = Hadir
- = Tidak Hadir
BM = Belum menjabat
TM = *Tidak Menjabat*

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

*Code Description Participant *Name*
1) Frans Gana
2) Yosef Juba Dobe Ngole
3) Fauziyah Lamaya
4) Jonas Salean
5) Stanis Man

*Attendance Code:
✓ = Present
- = Absent
BM = Not yet in office
TM = *Not in Office*

The attendance rate of each member at Audit Committee meetings, both internal and coordination meetings, is as follows:

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Komite Audit Number of Audit Committee Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	% Kehadiran Attendance %
1	Frans Gana	11	11	100%
2	Yosef Juba Dobe Ngole	4	2	50%
3	Fauziyah Lamaya	7	7	100%
4	Jonas Salean	4	1	25%
5	Stanis Man	4	4	100%

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

The results of the Committee's meeting decisions are based on consensus and recorded in meeting minutes signed by all Committee members present, and are properly documented, including any *dissenting opinions* expressed during the meeting along with the reasons for such opinions. The results of the Committee's meeting serve as recommendations that can be effectively utilized by the Board of Commissioners.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

2. Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities regarding the supervision of and provision of advice to the Board of Directors, in order to obtain reasonable assurance that the Bank's risk management practices continue to meet the requirements for adequate risk management procedures and methodologies, so that the Bank's business activities remain within acceptable limits and are beneficial to the Bank.

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

a. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
d. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur serta perubahannya.

The basis for the establishment of the Risk Monitoring Committee is as follows:

a. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016, regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
b. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
c. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
d. The Articles of Association of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and its amendments.

Seluruh aktivitas Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 005 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

All activities of the Risk Monitoring Committee are guided by the Decision of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 005 of 2023 regarding the Rules of Procedure of the Risk Monitoring Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 65 ayat (1) dan (3), komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

a. Seorang Komisaris Independen;
b. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko;
c. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian bidang keuangan;
d. Keahlian pihak independen yang dimaksud dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite;
e. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Composition of the Risk Monitoring Committee

Pursuant to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Article 65, paragraphs (1) and (3), the composition of the Risk Monitoring Committee consists of:

a. One Independent Commissioner;
b. One independent member with expertise in risk management;
c. One independent member with expertise in finance;
d. The expertise of the independent parties referred to must be evidenced by the mandatory possession of a risk management certificate as applicable to the Board of Directors and a competency certificate supporting the performance of the committee's functions and responsibilities;
e. Members of the Board of Directors are prohibited from serving as members of the Risk Monitoring Committee.

Susunan Komposisi Komite Pemantau Risiko
Composition of the Risk Monitoring Committee

Jabatan Position	Komposisi Komite 7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2025 Committee Composition August 7, 2024 – August 7, 2025 Nama Name	Komposisi Komite 1 September 2025 – 1 September 2026 Committee Membership September 1, 2025 – September 1, 2026 Nama Name
Ketua Chair	--	--
Anggota Member	Ahmad Atang	Ahmad Atang
	Stanis Man	Agustinus Tetiro

Kekosongan jabatan pada komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko seperti yang tergambar pada tabel komposisi komite di halaman atas dimana tidak sesuai dengan ketentuan dalam POJK 17 Tahun 2023 Paragraf 2 Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan: **"Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit: a. 1 (satu) orang Komisaris Independen, b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan".**

Vacancies in the composition of the Risk Monitoring Committee membership, as shown in the committee composition table on the previous page, do not comply with the provisions of POJK 17 of 2023, Paragraph 2, Article 65, Subparagraph (1), which states: **"The Risk Monitoring Committee must consist of at least: a. 1 (one) Independent Commissioner, b. 1 (one) independent party with expertise in risk management; and c. 1 (one) independent party with expertise in finance."**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 72 menyatakan: "**Komite Pemantau Risiko wajib bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank; dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko".**

Uraian Tugas Komite Pemantau Risiko diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 005 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Pemantau Risiko PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite pemantau risiko untuk memenuhi tujuan komite diantaranya:
   a. Menentukan rencana kerja tahunan;
   b. Menentukan jadwal rapat tahunan;
   c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasa perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
   d. Membuat *self assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan komite pemantau risiko
2. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk:
   a. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
   b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
   c. Menghadiri rapat;
   d. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan komite;
   e. Membuat risalah rapat;
   f. Melakukan kunjungan kerja ke lapangan, jika dipandang perlu;
3. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberi nasihat kepada Direksi dan melaksanakan tugas-tugas lain meliputi:
   a. Aktivitas Bank baik transaksi rupiah maupun transaksi valuta asing;
   b. Evaluasi terkait ketidaksesuaian kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

Based on POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Article 72 states: **"The Risk Monitoring Committee shall have the duty and responsibility to, at a minimum, evaluate the alignment between risk management policies and the Bank's policy implementation; and to monitor and evaluate the performance of the risk management committee and the risk management unit."**

The Terms of Reference for the Risk Monitoring Committee are set forth in Resolution No. 005 of 2023 of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur regarding the Rules of Procedure for the Risk Monitoring Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, as follows:

1. The Committee Chair is tasked with and responsible for coordinating all activities of the Risk Monitoring Committee to fulfill the committee's objectives, including:
   a. Determining the annual work plan;
   b. Determining the annual meeting schedule;
   c. Preparing periodic reports on the activities of the Risk Monitoring Committee and matters deemed necessary for the attention of the Board of Commissioners;
   d. Conducting *a self-assessment* of the effectiveness of the Risk Monitoring Committee's activities
2. Committee members are tasked with and responsible for:
   a. Conducting regular meetings;
   b. Reviewing meeting materials in advance;
   c. Attending meetings;
   d. Actively participating and contributing to every committee activity;
   e. Preparing meeting minutes;
   f. Conducting field visits, as deemed necessary;
3. Performing supervisory and advisory duties to the Board of Directors and carrying out other duties, including:
   a. The Bank's activities, including both rupiah and foreign currency transactions;
   b. Evaluations regarding discrepancies between the Bank's risk management policies and their implementation

c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Manajemen Risiko yang terdiri dari;

   - Laporan Profil Risiko Bank;
   - Laporan Tingkat Kesehatan bank berbasis risiko (RBB);
   - Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko;

d. Memantau Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko
e. Melakukan evaluasi kepatuhan bank terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko

4. Pelaksanaan hubungan kerja Komite Pemantau Risiko yaitu:
   a. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan memperoleh dokumen laporan yang diperlukan
   b. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan Komite Lain
5. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan
6. Menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko dianggap telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum maupun Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana dalam isi dari ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan Tata Kelola Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

c. Monitoring and evaluation of the Risk Management Division's performance, which consists of:
   - Bank Risk Profile Report;
   - Risk-Based Bank Health (RBB) Report;
   - Other reports related to the management of 8 (eight) types of risk;

d. Monitoring the adequacy of risk management processes for identification, measurement, monitoring, control, and information systems
e. Conducting evaluations of the bank's compliance with the Articles of Association, regulations of the Banking and Capital Markets Supervisory Authority, and other laws and regulations related to risk management

4. Implementation of the working relationship of the Risk Monitoring Committee, namely:
   a. Communicate with other departments to obtain information, clarifications, and the necessary reports
   b. Coordinate with the Audit Committee and other committees
5. Prepare periodic reports on the activities of the risk monitoring committee at least once every 6 (six) months
6. Maintain confidentiality regarding all documents and matters related to the Committee's duties

All members of the Risk Monitoring Committee are deemed to have met the criteria of independence, expertise, integrity, and good moral character as required by Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, as well as the Board of Directors' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 89 of 2022 regarding *the Code of Conduct* and *Code of Corporate Governance* Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, the provisions of which establish the objectives of implementing corporate governance at Bank NTT and other related regulations and provisions.

TABEL INDEPENDENSI Independence Table			
Aspek Independensi **Aspects of Independence**	**Ahmad Atang**	**Staniz Man**	**Agustinus Tetiro**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No have financial financial with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship with Bank NTT, subsidiaries, companies, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT, Has no shareholding relationship with Bank NTT,	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Board of Supervisors among fellow members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors of the Committee Risk Monitoring Committee	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Does not serve as a party official, local government official	✓	✓	✓

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor 004 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Komite Pemantau Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan "***Rapat komite Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit: ...b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk Komite Pemantau Risiko...***". Rincian rapat tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Risk Monitoring Committee Meeting Activities

Based on Board of Commissioners Decree No. 004 of 2023 concerning the Rules of Procedure of the Risk Monitoring Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and POJK No. 17 of 2023 Article 77 paragraph (1) which states "***Board of Commissioners committee meetings shall be held in accordance with the Bank's needs, at least: ...b. once every 3 (three) months for the Risk Monitoring Committee***...". Details of these meetings are outlined in the table below:

No	**Hari, Tanggal** **Day, Date**	**Agenda**	***Kode Peserta** ***Participant Code**		
			1	**2**	**3**
1	9 Januari 2025 January 9, 2025	1. Pembahasan Program Kerja KPR Tahun 2025; 2. Lain-lain. 1. Discussion of the 2025 Mortgage Work Program; 2. Miscellaneous.	✓	✓	BM
2.	26 Februari 2025 February 26 2025	1. Pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank TW IV 2024; 2. Pembahasan Permasalahan LED yang paling signifikan; 3. Pembahasan Kecukupan Mitigasi Risiko Cyber; 4. Lain-lain. 1. Discussion of the Bank's Risk Profile and Soundness Level for the Fourth Quarter of 2024; 2. Discussion Issues LED the most significant; 3. Discussion on the Adequacy of Cyber Risk Mitigation; 4. Miscellaneous.	✓	✓	BM

No	Hari, Tanggal Day, Date	Agenda	*Kode Peserta *Participant Code		
			1	2	3
3.	20 Maret 2025 March 20, 2025	1. Pembahasan Risiko Strategis, Risiko Inheren, Risiko IT dan Mitigasi Risiko; 2. Lain-lain. 1. Discussion Strategic Strategic, Inherent Risk, IT Risk, and Risk Mitigation; 2. Others.	✓	✓	BM
4.	28 April 2025 April 28, 2025	1. Pembahasan Profil Risiko TW I 2025; 2. Pembahasan Risiko Strategis; 3. Lain-lain. 1. Discussion of the Risk Profile for the First Quarter of 2025; 2. Strategic Risk Discussion; 3. Miscellaneous.	✓	✓	BM
5.	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Pembahasan Profil Risiko Cabang dan Loss Event Database (LED); 2. Lain-lain. 1. Discussion of Branch Risk Profiles and the Loss Event Database (LED); 2. Miscellaneous.	✓	✓	BM
6.	30 Juni 2025 June 30, 2025	1. Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan IT Tahun 2024 dan Pemeriksaan Ketahanan dan Keamanan Siber Tahun 2025; 2. Lain-lain. 1. Discussion on Follow-Up Actions for the 2024 IT Audit and the 2025 Cybersecurity and Resilience Audit; 2. Miscellaneous.	✓	✓	BM
7.	16 Juli 2025 July 16, 2025	1. Progres KUB; 2. Pembahasan Hasil Audit Bulan Mei 2025; 3. Pembahasan CRC Cabang Bulan Juni 2025; 4. Lain-lain. 1. KUB Progress; 2. Discussion of the May 2025 Audit Results; 3. Discussion of the June 2025 Branch CRC; 4. Miscellaneous.	✓	✓	BM
8.	29 Agustus 2025 August 29 2025	1. Pembahasan Riko Operasional, IT, Kredit dan Reputasi serta Isu Strategis Bank; 2. Penguatan Manajemen Risiko untuk Mencegah Fraud; 3. Lain-lain. 1. Discussion of Operational, IT, Credit, and Reputation Matters, as well as Strategic Issues at the Bank; 2. Strengthening Risk Risk to Prevent Fraud; 3. Miscellaneous	✓	✓	BM
9.	16 September 2025 September 16 2025	1. Pembahasan Terkait Risiko-Risiko Strategis; 2. Lain-lain. 1. Discussion on Strategic Risks; 2. Other matters.	✓	TM	✓
10.	20 Oktober 2025 (bersama Komite Audit) October 20 2025 (together with the Audit Committee)	1. Pembahasan Profil Risiko dan Hasil Audit Bulan Agustus 2025; 2. Lain-lain. 1. Discussion of the Risk Profile and Audit Results for August 2025; 2. Other matters.	-	TM	✓
11.	26 November 2025 November 26 2025	1. Pembahasan Estimasi Profil Risiko Bank TW IV dan Self Assessment Periode Desember 2025; 2. Pembahasan Recovery Plan 2025; 3. Lain-lain. 1. Discussion of the Q4 Bank Risk Profile Estimate and Self-Assessment for the December 2025 Period; 2. Discussion of the 2025 Recovery Plan; 3. Other matters.	✓	TM	✓

No	Hari, Tanggal Day, Date	Agenda	*Kode Peserta *Participant Code		
			1	2	3
12.	15 Desember 2025 December 15 2025	1. Pembahasan Risiko Operasional Terkait Fraud, Risiko Reputasi, Risiko IT dan Keamanan Siber, Kecenderungan Penurunan Pendapatan dan Tingkat Kesehatan Bank terjait GCG Struktur; 2. Lain-lain. 1. Discussion of Operational Risks Related to Fraud, Reputational Risks, IT and Cybersecurity Risks, Trends in Declining Revenue, and Bank Health Levels Related to GCG Structure; 2. Other matters.	✓	TM	-

*Keterangan Kode Nama Peserta
1. Ahmad Atang
2. Stanis Man
3. Agustinus Tetiro

*Code Description Participant *Name*
1. Ahmad Atang
2. Staniz Man
3. Agustinus Tetiro

*Kode Kehadiran :
✓ = Hadir
- = Tidak Hadir
DL = Dinas Luar
BM = Belum Menjabat
TM = Tidak Menjabat

*Attendance Code:
✓ = Present
- = Absent
DL = Out of Office
BM = Not Yet in Office
TM = Not in Office

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

The attendance rates of each member in both internal Risk Monitoring Committee meetings and coordination meetings are as follows:

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Meetings Risk Monitoring Committee	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
1	Ahmad Atang	12	11	91,67%
2	Stanis man	8	8	100%
3	Agustinus Tetiro	4	3	75%

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

The results of the Committee's meeting decisions are based on consensus and recorded in meeting minutes signed by all Committee members present; these minutes are properly documented, including any *dissenting opinions* expressed during the meeting along with the reasons for such opinions. The results of the Committee's meeting serve as recommendations that the Board of Commissioners may effectively utilize.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan mengacu pada:

3. Remuneration and Nomination Committee

In order to realize good corporate governance (*GCG*) in accordance with:

a. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

d. Anggaran Dasar Bank NTT beserta perubahannya;

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keseluruhan kegiatan komite berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002 Tahun 2023 tentang pemberian remunerasi dan hak-hak bagi pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
   - Mempunyai integritas, objektivitas dan etika yang tinggi;
   - Mempunyai kompetensi yang tinggi dalam hal:
     - Mempunyai pengetahuan yang memadai termasuk ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
     - Memahami konsep SDM secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan bank*,
   - Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

a. OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 dated December 28, 2015, regarding the Implementation of Governance in the Granting of Remuneration for Commercial Banks;
b. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
c. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 dated June 24, 2025 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
d. The Articles of Association of Bank NTT and its amendments;

The Board of Commissioners is required to establish a Remuneration and Nomination Committee to support the effective performance of its duties and responsibilities. All committee activities are guided by Board of Commissioners Decree No. 05 of 2020 regarding the Rules of Procedure for the Remuneration and Nomination Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and Board of Commissioners Decree No. 002 of 2023 regarding the provision of remuneration and benefits for the management of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Membership of the Remuneration and Nomination Committee

a. Members of the Remuneration and Nomination Committee must meet at least the following qualifications:
   - Possess high integrity, objectivity, and ethics;
   - Possess high competence in the following areas:
     - Possess adequate knowledge, including applicable provisions, regulations, and laws;
     - Comprehensively understand HR concepts and possess knowledge of *the bank's* remuneration and/or nomination provisions and systems, as well as *its succession plan*;
   - Be capable of acting independently, meaning they can perform their duties professionally without conflicts of interest or influence/pressure from any party that is inconsistent with applicable laws and regulations and sound corporate principles;

b. Anggota Komite Remunerasi:

b. Members of the Remuneration Committee:

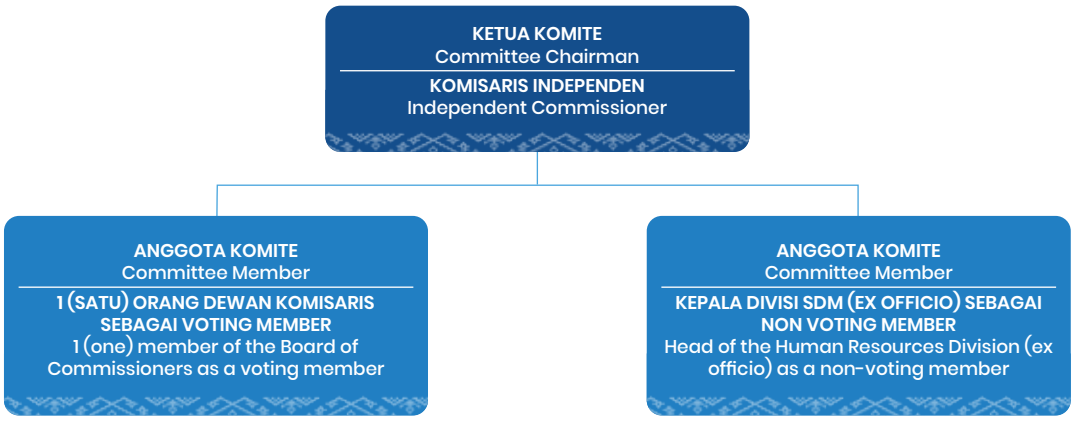

- Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
- Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank NTT;
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

- If the Remuneration and Nomination Committee consists of more than 3 (three) members, then the Board of Independent Commissioners must include at least 2 (two) members;
- If necessary, the Remuneration and Nomination Committee may appoint members from outside the Bank who are independent of Bank NTT;
- Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed by the Board of Directors based on a resolution of the Board of Commissioners,

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT, sebagai berikut:

The structure and composition of the Remuneration and Nomination Committee of Bank NTT are as follows:

Susunan Komposisi Komite Pemantau Risiko
Composition of the Risk Monitoring Committee

Jabatan Position	Komposisi Komite 7 Agustus 2024 – 7 Agustus 2025 Committee Composition August 7, 2024 – August 7, 2025 Nama Name	Komposisi Komite 1 September 2025 – 1 September 2026 Committee Composition September 1, 2025 – September 1, 2026 Nama Name
Ketua Chair	Frans Gana	Frans Gana
Anggota Member	Kepala Divisi SDM Head of the HR Division	Kepala Divisi SDM Head of the Human Resources Division
	--	--

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

None of the members of the Remuneration and Nomination Committee has any financial, management, shareholding, and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or the Bank that could affect their ability to act independently.

TABEL INDEPENDENSI Independence Table		
Aspek Independensi **Aspects of Independence**	**Frans Gana**	**Aloysius R. A. Geong (Kepala Divisi SDM)** **(Head of the HR Division)**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no relationship financial ties with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship with Bank NTT, its subsidiaries, or affiliates	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT Has no shareholding relationship with Bank NTT	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Not serving as a political party official, local government officials	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   - Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite Remunerasi dan Nominasi;
   - Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah Dewan Komisaris dan Direksi;
   - Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum SDM bank;
   - Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai tingkat di bawah Direksi, termasuk persetujuan Pejabat Eksekutif;
   - Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dan *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
   - Jika dimungkinkan oleh regulasi membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai antara lain opsi pemilikan saham bank serta pengawasan pelaksanaannya;

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

a. The Committee is tasked with and responsible for carrying out the following:
   - Developing concepts and analyses related to the functions of the Remuneration and Nomination Committee;
   - Assisting the Board of Commissioners in providing recommendations regarding the number of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
   - Assisting the Board of Commissioners in establishing the bank's general human resources policies;
   - Recommending approval of changes to the organizational structure up to the level below the Board of Directors, including the approval of Executive Officers;
   - Assisting the Board of Commissioners in obtaining and analyzing data on prospective Board members and the *talent pool*
   - officers one level below the Board of Directors; Where permitted by regulations, assist the Board of Commissioners in providing recommendations regarding options to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees, including bank stock ownership options and oversight of their implementation;

- Memiliki database dan *talent pool* calon-calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai Sistem Operasional Prosedur (SOP) pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapat persetujuan RUPS;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta Komite Pemantau Risiko,

b. Ketua Komite bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat;
c. Anggota komite bertugas dan bertanggungjawab dalam:
   - Menyelenggarakan rapat secara teratur ;
   - Mempelajari materi rapat terdahulu ;
   - Menghadiri rapat ;
   - Memberikan kontribusi dan berperan aktif ;
   - Membuat risalah rapat (sekretaris).

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan **sesuai** POJK 17 Tahun 2023 Bagian Kelima Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan "***Rapat komite Dewan Komisaris diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit: ...b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk Komite Remunerasi dan Nominasi...***". Selama tahun 2025,

- Maintain a database and *talent pool* of prospective members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- Conduct evaluations of compensation policies and provide written recommendations to the Board of Commissioners regarding: compensation policies for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS), and compensation policies for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;
- Drafting and providing recommendations regarding Standard Operating Procedures (SOPs) for the election and/or replacement of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders (GMS) to obtain GMS approval;
- Providing recommendations regarding candidates for the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders;
- Provide recommendations regarding independent parties to serve as members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee;

b. The Committee Chair is tasked with and responsible for coordinating the conduct of committee meetings and proposing the agenda and meeting materials;
c. Committee members are tasked with and responsible for:
   - Conducting meetings on a regular basis;
   - Reviewing materials from previous meetings;
   - Attending meetings;
   - Contribute and play an active role;
   - Preparing meeting minutes (secretary).

Activities of the Remuneration and Nomination Committee

Meetings of the Remuneration and Nomination Committee have been held as needed by Bank NTT and may only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members, including one Independent Commissioner and an Executive Officer. Meetings of the Remuneration and Nomination Committee are held **in accordance with** POJK 17 of 2023, Part Five, Article 77, paragraph (1), which states: "***Meetings of the Board of Commissioners' committees shall be held as needed by the Bank, at least: ...b. once every three months for the Remuneration and Nomination Committee...***". During 2025, the

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan Bank yaitu:

Remuneration and Nomination Committee conducted discussions and provided recommendations covering various important activities carried out by the Bank, namely:

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Agenda Agenda	*Kode Peserta *Participant Code	
			1	2
1	13 Januari 2025 January 13 2025	1. Pembahasan Perpanjangan Pendaftaran Calon Pengurus; 2. Finalisasi SOP KRN; 3. Lain-lain. 1. Discussion on the Extension of Registration for Executive Committee Candidates; 2. Finalization of KRN SOP; 3. Miscellaneous.	✓	✓
2.	23 April 2025 April 23, 2025	1. Pembahasan SOP Terkait Rekrutmen Calon Pengurus; 2. Lain-lain. 1. Discussion of SOPs Related to the Recruitment of Prospective Board Members; 2. Miscellaneous.	✓	✓
3.	28 April 2025 April 28, 2025	1. Pembahasan Tim Assessor dalam Pelaksanaan Assessment Calon Pengurus; 2. Lain-lain. 1. Discussion Team Assessor in the Implementation of the Assessment of Prospective Board Members; 2. Miscellaneous.	✓	✓
4.	5 Mei 2025 May 5, 2025	1. Pembahasan tentang Kenaikan Jasa Produksi; 2. Lain-lain. 1. Discussion regarding Increase Production Services; 2. Miscellaneous.	✓	✓ (Pgs)
5.	14 Mei 2025 May 14, 2025	Pembahasan Pelaksanaan Assessment Calon Pengurus Discussion on the Implementation of the Assessment for Prospective Board Members	✓	✓ (Pgs)
6.	11 Agustus 2025 August 11 2025	1. Progres Pencalonan Pengurus; 2. Lain-lain. 1. Progress on Executive Board Nominations; 2. Miscellaneous.	✓	✓ (Pgs)
7.	6 Oktober 2025 October 6 2025	1. Pembahasan Biaya Perjalanan Dinas dan Remunerasi Pengurus; 2. Lain-lain. 1. Discussion on Business Travel Expenses and Executive Compensation; 2. Miscellaneous.	✓	✓ (Pgs)
8.	3 November 2025 November 3 2025	1. Pembahasan Terkait Calon Pengurus; 2. Lain-lain. 1. Discussion Regarding Candidate Board Members; 2. Miscellaneous.	✓	✓ (Pgs)
9.	28 November 2025 November 28 2025	1. Pembahasan Terkait Asuransi Pengurus, Tunjangan Transportasi dan Perumahan Direksi serta Biaya Komunikasi Dekom; 2. Lain-lain. 1. Discussion Regarding Directors' Insurance, Transportation and Housing Allowances for the Board of Directors, and Communication Expenses for the Board of Commissioners; 2. Miscellaneous.	✓	✓ (Pgs)

*Keterangan Kode Nama Peserta
1. Frans Gana
2. Kepala Divisi SDM (Aloysius R. A Geong) dan mulai pada rapat ke-4 diisi oleh Plt. Kepala Divisi SDM selaku Pgs. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Hans Arnoldus).

*Kode Kehadiran:
✓ = Hadir
- = Tidak Hadir
DL = Dinas Luar
BM = Belum menjabat
TM = Tidak Menjabat

*Code Description Participant Name
1. Frans Gana
2. Head of the HR Division (Aloysius R. A Geong) and, starting from the 4th meeting, filled by the Acting Head of the HR Division as Acting Member of the Remuneration and Nomination Committee (Hans Arnoldus).

*Attendance Code:
✓ = Present
- = Absent
DL = Out of Office
BM = Not yet in office
TM = Not in office

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi adalah sebagai berikut :

The attendance rate of each member in the Remuneration and Nomination Committee meetings, both internal and coordination meetings, is as follows:

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko Number of Monitoring Committee Meetings Risk	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
1	Frans Gana	9	9	100%
2	Kepala Divisi SDM Head of the Human Resources Division	9	9	100%

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Bab V Pasal 77 ayat (4) menyatakan "Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau 1 (satu) orang pegawai". Keputusan Rapat Komite remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, Bila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat, maka akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan.

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Chapter V, Article 77, paragraph (4) states: "A meeting of the Remuneration and Nomination Committee shall be held if attended by a majority of committee members, including the presence of 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Executive Officer responsible for HR functions or 1 (one) employee." Decisions of the Remuneration and Nomination Committee meeting are made by consensus. In the event that such consensus is not reached, decisions are made by majority vote. If there is *a dissenting opinion* during the meeting, it shall be clearly recorded in the meeting minutes along with the reasons for the dissenting opinion, signed by all Committee members present, and documented.

KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Committees Under The Board of Directors

1. Komite Asset & Liability (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas Bank NTT yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko suku bunga yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Bank NTT (*Aset and liabilities management*).

Susunan keanggotaan ALCO dan SSG-ALCO Bank diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: 099 Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang *Aset Liability Committee* (ALCO) dan *Staf Supporting Group – Asset Liability Committee* (SSG-ALCO) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Asset & Liability Committee (ALCO)

The Asset & Liability Committee (ALCO) is a standing committee under the Board of Directors with the mission of achieving optimal profitability for Bank NTT while maintaining controlled liquidity and interest rate risks, through the establishment of policies and strategies for Bank NTT's assets and liabilities (*Asset and Liability Management*).

The composition of the ALCO and SSG-ALCO members is regulated by Board of Directors Decision No. 099 of 2022 dated July 18, 2022, regarding *the Asset Liability Committee* (ALCO) and *the Staff Supporting Group – Asset Liability Committee* (SSG-ALCO) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, as detailed below:

Ketua Chairperson	:	Direktur Utama	President Director
Ketua I First Vice Chair	:	Direktur Dana & Treasury	Director of Funds & Treasury
Ketua II Vice Chairman II	:	Direktur Kredit	Director of Credit
Ketua III Vice Chair III	:	Direktur Teknologi Informasi & Operasional	Director of Information Technology & Operations
Ketua IV Chairperson IV	:	Direktur Kepatuhan	Director of Compliance
Sekretaris I Secretary I	:	Kepala Divisi Treasury & Internasional	Head of the Treasury & International Division
Sekretaris II Second Secretary	:	Kepala Divisi Dana	Head of the Funds Division
Anggota Member	:	1. Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal; 2. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI; 3. Kepala Divisi Riset & Pengembangan; 4. Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer; 5. Kepala Divisi Kredit Menengah & Komersil; 6. Kepala Divisi Supporting Kredit; 7. Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit; 8. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia; 9. Kepala Divisi Umum; 10. Kepala Divisi Operasional; 11. Kepala Divisi Teknologi Informasi; 12. Kepala Divisi Kepatuhan; 13. Kepala Divisi Manajemen Risiko;	1. Head of the Corporate Secretary & Legal Division; 2. Head of the Supervision & SKAI Division; 3. Head of Research & Development Division; 4. Head of Micro, Small & Consumer Credit Division; 5. Head of the Medium & Commercial Credit Division; 6. Head of the Credit Support Division; 7. Head of the Credit Recovery & Resolution Division; 8. Head of the Human Resources Division; 9. Head of General Affairs Division; 10. Head of Operations Division; 11. Head of the Information Technology Division; 12. Head of the Compliance Division; 13. Head of the Risk Management Division;

Tugas ALCO yaitu sebagai forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Aset dan Liabilitas, Likuiditas, Tingkat Suku Bunga dan Kebijakan Strategis Lainnya.

The ALCO's role is to serve as the highest decision-making forum for the management of Assets and Liabilities, Liquidity, Interest Rates, and Other Strategic Policies.

Sedangkan Susunan Keanggotaan SSG-ALCO adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the composition of the SSG-ALCO membership is as follows:

1.	Koordinator Coordinator	:	Kepala Sub Divisi ALMA & Likuiditas	Head of the ALMA & Liquidity Subdivision
2.	Anggota Member	:	1. Kepala Sub Divisi ALMA & Likuiditas; 2. Kepala Sub Divisi Internasional; 3. Kepala Sub Divisi Financial Institution; 4. Kepala Sub Divisi Pengembangan & Kebijakan Produk Dana Jasa; 5. Kepala Sub Divisi Edukasi Promosi & Monev Produk Dana Jasa; 6. Kepala Sub Divisi Layanan Priority & Marketing; 7. Kepala Sub Divisi Digital Funding Business; 8. Kepala Sub Divisi Corporate Legal; 9. Inspektur Wilayah IV; 10. Kepala Sub Divisi Supervisi & Evaluasi Kinerja; 11. Kepala Sub Divisi Program & Anggaran; 12. Kepala Sub Divisi Riset & Strategy; 13. Kepala Sub Divisi Analys Produk; 14. Kepala Sub Divisi Kredit Konsumer; 15. Kepala Sub Divisi Kredit Sektor P3 KAP; 16. Kepala Sub Divisi Kredit Sektor PEK DB; 17. Kepala Sub Divisi Kredit Sektor Lainnya; 18. Kepala Sub Divisi Kredit Sindikasi & Pinjaman Daerah; 19. Kepala Sub Divisi Kredit Menengah; 20. Kepala Sub Divisi Kredit Komersil; 21. Kepala Sub Divisi Pengembangan Produk & Digital Loan; 22. Kepala Sub Divisi Kebijakan & SOP Kredit; 23. Kepala Sub Divisi Monitoring Evaluasi Kredit & PPN; 24. Kepala Sub Divisi Legal Bisnis; 25. Kepala Sub Divisi Administrasi Kredit & Appraisal; 26. Kepala Sub Divisi Penyelesaian Kredit; 27. Kepala Sub Divisi Sistem Prosedur & Pelaporan Kepatuhan; 28. Kepala Sub Divisi Kajian Risiko; 29. Kepala Sub Divisi Manajemen Aset; 30. Kepala Sub Divisi Financial & Akuntansi; 31. Kepala Sub Divisi Settlement; 32. Kepala Sub Divisi Kebijakan dan Standar Operasional; 33. Kepala Sub Divisi Quality Assurance IT & User Management; 34. Kepala Sub Divisi TI Operasional.	1. Head of the ALMA & Liquidity Subdivision; 2. Head of the International Subdivision; 3. Head of the Financial Institutions Subdivision; 4. Head of the Fund and Services Product Development & Policy Subdivision; 5. Head of the Education, Promotion, and Monitoring & Evaluation Subdivision for Fund and Service Products; 6. Head of the Priority Services & Marketing Subdivision; 7. Head of the Digital Funding Business Subdivision; 8. Head of the Corporate Legal Subdivision; 9. Regional Inspector IV; 10. Head of the Performance Supervision & Evaluation Subdivision; 11. Head of the Programs & Budget Subdivision; 12. Head of the Research & Strategy Subdivision; 13. Head of the Product Analysis Subdivision; 14. Head of Consumer Credit Subdivision; 15. Head of the P3 KAP Sector Credit Subdivision; 16. Head of the PEK DB Sector Credit Subdivision; 17. Head of the Other Sectors Credit Subdivision; 18. Head of the Syndicated Loans & Regional Loans Subdivision; 19. Head of the Medium-Term Credit Subdivision; 20. Head of Commercial Credit Subdivision; 21. Head of the Product Development & Digital Loans Subdivision; 22. Head of the Credit Policy & SOP Subdivision; 23. Head of the Credit Monitoring, Evaluation, and VAT Subdivision; 24. Head of the Business Legal Subdivision; 25. Head of Credit Administration & Appraisal Subdivision; 26. Head of the Credit Settlement Subdivision; 27. Head of the Systems, Procedures, and Compliance Reporting Subdivision; 28. Head of the Risk Assessment Subdivision; 29. Head of the Asset Management Subdivision; 30. Head of the Financial & Accounting Subdivision; 31. Head of the Settlement Subdivision; 32. Head of the Policy and Operational Standards Subdivision; 33. Head of the IT Quality Assurance & User Management Subdivision; 34. Head of the IT Operations Subdivision.

Tugas SSG-ALCO, yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi (*Collection*)
   Merupakan proses pengumpulan data dan informasi, baik data internal Bank NTT maupun eksternal yang digunakan dalam proses pengelolaan *Aset & liability*, likuiditas, tingkat suku bunga dan kebijakan strategis lainnya pada Rapat ALCO di Bank NTT;
2. Mengolah data dan informasi (*Proccess*)
   Merupakan proses pengelompokkan dan pengolahan data dan informasi awal menjadi data dan informasi yang siap untuk dilakukan analisa dalam rangka Rapat ALCO di Bank NTT;
3. Analisis data dan informasi
   Merupakan proses analisa atas data dan informasi sehingga menunjang pembuatan materi dan bahan rapat yang akan digunakan pertemuan dan pengambilan keputusan pada Rapat ALCO;
4. Laporan (*Report*)
   Membuat laporan atas hasil analisa data dan informasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan pada bahan rapat ALCO;
5. Rekomendasi (*Recommend*)
   Merupakan proses penyampaian berbagai usulan atau rekomendasi berdasarkan analisa data dan laporan sesuai dengan tujuan pengelolaan Aset & liability, likuiditas, tingkat suku bunga dan kebijakan strategis lainnya pada Rapat ALCO.

The duties of the SSG-ALCO are as follows:

1. Collecting data and information (*Collection*)
   This involves the collection of data and information—both internal data from Bank NTT and external data—used in the management of *assets and liabilities*, liquidity, interest rates, and other strategic policies during ALCO meetings at Bank NTT;
2. Processing data and information (*Process*)
   This is the process of grouping and processing initial data and information into data and information ready for analysis in preparation for the ALCO Meeting at Bank NTT;
3. Data and information analysis
   This is the process of analyzing data and information to support the preparation of meeting materials and documents to be used for discussions and decision-making at the ALCO Meeting;
4. Report
   Preparing reports on the results of data and information analysis to facilitate decision-making regarding ALCO meeting materials;
5. Recommendations
   This is the process of presenting various proposals or recommendations based on data analysis and reports in accordance with the objectives of asset and liability management, liquidity, interest rates, and other strategic policies at the ALCO Meeting.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja ALCO selama tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite ALCO mengadakan 4 (empat) kali rapat yang dijabarkan sebagai berikut:

ALCO Work Program Activities/ Implementation for 2025

During 2025, the ALCO Committee held 4 (four) meetings, detailed as follows:

No.	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda	Agenda
1	18 Maret 2025 March 18 2025	Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT 5th Floor Auditorium, Bank NTT Headquarters	1. Evaluasi Keputusan ALCO Desember 2024; 2. Tinjauan Ekonomi; 3. Analisa Kinerja Keuangan; 4. Analisa Suku Bunga; 5. Manajemen Aset dan Kewajiban; 6. Lainnya; 7. Rekomendasi,	1. Review of the December 2024 ALCO Decision; 2. Economic Review; 3. Financial Performance Analysis; 4. Interest Rate Analysis; 5. Asset and Liability Management; 6. Other; 7. Recommendations,
2	24 Juli 2025 July 24, 2025	Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT 5th Floor Auditorium, NTT Bank Headquarters	1. Evaluasi Keputusan ALCO 18 Maret 2025 2. Analisa Kinerja Keuangan; 3. Analisa Suku Bunga; 4. Manajemen Aset; 5. Lainnya; 6. Rekomendasi,	1. Evaluation of ALCO Decision March 18, 2025 2. Financial Performance Analysis; 3. Interest Rate Analysis; 4. Asset Management; 5. Other; 6. Recommendations,

No.	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda	Agenda
3	8 Agustus 2025 August 8 2025	Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT 5th Floor Auditorium, NTT Bank Headquarters	1. Evaluasi Keputusan ALCO 24 Juli 2025; 2. Tinjauan Ekonomi; 3. Analisa Kinerja Keuangan; 4. Analisa Suku Bunga; 5. Manajemen Aset dan Kewajiban; 6. Lainnya;	1. Review of the ALCO Decision of July 24, 2025; 2. Economic Review; 3. Financial Performance Analysis; 4. Interest Rate Analysis; 5. Asset and Liability Management; 6. Other;
4	12 Desember 2025 December 12 2025	Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT 5th Floor Auditorium, NTT Bank Headquarters	1. Evaluasi Keputusan ALCO 8 Agustus 2025; 2. Tinjauan Ekonomi; 3. Analisa Kinerja Keuangan; 4. Analisa Suku Bunga; 5. Manajemen Aset dan Kewajiban; 6. Lainnya; 7. Rekomendasi,	1. Review of the ALCO Decision of August 8, 2025; 2. Economic Review; 3. Financial Performance Analysis; 4. Interest Rate Analysis; 5. Asset and Liability Management; 6. Other; 7. Recommendations,

2. Komite Kredit

Lembaga Komite kredit adalah lembaga pemutus kredit di kantor pusat yang ditetapkan dengan keputusan Direksi, Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat ditetapkan dalam Surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 129 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keanggotaan Komite Kredit Kantor Pusat

A. Keanggotaan Komite Kredit Kantor Pusat untuk kewenangan memutus pencairan kredit baru/ perpanjangan kredit:
   a. Kredit dengan plafond kewenangan memutus adalah Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah diputus oleh Komite Kredit yang diketuai oleh Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah sebagai Pemegang Limit Tertinggi (PLT) dengan keanggotaan:
      1) Kepala Divisi Kredit Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer;
      2) Salah satu Kepala Sub Divisi Kredit Komersil dan Menengah;
      3) Salah satu Kepala Sub Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer;
      4) Kepala Divisi Supporting Kredit atau salah satu Kepala Sub Divisi Supporting Kredit yang ditunjuk (Sekretaris).
   b. Kredit dengan plafond kewenangan memutus adalah Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer diputus oleh Komite Kredit diketuai oleh Kepala Divisi Mikro, Kecil dan Konsumer sebagai Pemegang Limit Tertinggi (PLT) dengan keanggotaan:

2. Credit Committee

The Credit Committee is a credit decision-making body at the head office established by a Board of Directors' resolution. The Head Office Credit Committee was established under East Nusa Tenggara Regional Development Bank Decree No. 129 of 2023 dated July 31, 2023, regarding the Head Office Credit Committee of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

Membership of the Head Office Credit Committee

A. Membership of the Head Office Credit Committee for the authority to approve new loans/loan extensions:
   a. Loans with an approval limit are decided by the Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division through the Credit Committee, chaired by the Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division as the Highest Limit Holder (PLT), with the following membership:
      1) Head of the Micro, Small, and Consumer Credit Division;
      2) One of the Heads of the Commercial and Medium-Sized Business Credit Subdivision;
      3) One of the Heads of the Micro, Small & Consumer Credit Subdivision;
      4) The Head of the Credit Support Division or one of the designated Heads of the Credit Support Sub-Divisions (Secretary).
   b. Loans with a decision-making authority ceiling are decided by the Micro, Small, and Consumer Credit Division, through a Credit Committee chaired by the Head of the Micro, Small, and Consumer Credit Division as the Highest Limit Holder (PLT), with the following membership:

1) Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah;

2) Salah satu Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer;
3) Salah satu Kepala Sub Divisi Kredit Komersil & Menengah;
4) Kepala Divisi Supporting Kredit atau salah satu Kepala Sub Divisi Supporting Kredit yang ditunjuk (Sekretaris).

B. Keanggotaan Komite Kredit Kantor Pusat untuk kewenangan memutus restrukturisasi kredit yang membutuhkan putusan KPK +1:
   a. Kredit dengan plafond kewenangan memutus adalah Divisi Kredit Komersil dan Menengah diputus oleh Komite Kredit yang diketuai oleh Direktur Kredit sebagai Pemegang Limit Tertinggi (PLT) dengan keanggotaan:
      1) Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit;
      2) Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer;

      3) Kepala Divisi Supporting Kredit atau salah satu Kepala Sub Divisi Supporting Kredit yang ditunjuk (Sekretaris);
      4) Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah sebagai anggota komite tanpa hak suara.

   b. Kredit dengan plafond kewenangan memutus adalah Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer diputus oleh Komite Kredit yang diketuai oleh Direktur Kredit sebagai Pemegang Limit Tertinggi (PLT) dengan keanggotaan:
      1) Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit;
      2) Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah;

      3) Kepala Divisi Supporting Kredit atau salah satu Kepala Sub Divisi Supporting Kredit yang ditunjuk (Sekretaris);
      4) Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer sebagai anggota komite tanpa hak suara.

   c Kredit dengan plafond kewenangan memutus adalah Kepala Cabang diputus oleh Komite Kredit yang beranggotakan:
      1) Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit (PLT);
      2) Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer;

      3) Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah;

      4) Salah satu kepala sub Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

1) Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division;
2) One of the Heads of the Micro, Small & Consumer Credit Division;
3) One of the Heads of the Commercial & Medium Credit Sub-Divisions;
4) Head of the Credit Support Division or one of the appointed Heads of the Credit Support Sub-Divisions (Secretary).

B. Membership of the Head Office Credit Committee for the authority to decide on credit restructuring requiring a KPK +1 decision:
   a. Loans with an approval limit of the Commercial and Medium-Sized Business Credit Division are approved by the Credit Committee, chaired by the Credit Director as the Highest Limit Holder (PLT), with the following members:
      1) Head of the Credit Recovery & Settlement Division;
      2) Head of the Micro, Small & Consumer Credit Division;
      3) Head of the Credit Support Division or one of the Heads of the Credit Support Subdivisions (Secretary);
      4) Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division as a non-voting committee member.
   b. Loans with a decision-making authority ceiling of the Micro, Small, and Consumer Credit Division are decided by the Credit Committee chaired by the Director of Credit as the Highest Limit Holder (PLT) with the following membership:
      1) Head of the Credit Recovery & Settlement Division;
      2) Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division;
      3) Head of the Credit Support Division or one of the appointed Heads of the Credit Support Sub-Divisions (Secretary);
      4) The Head of the Micro, Small, and Consumer Credit Division serves as a non-voting member of the committee.
   c. Loans with an approval limit of the Branch Manager are decided by the Credit Committee, which consists of:
      1) Head of the Credit Recovery & Settlement Division (Acting);
      2) Head of the Micro, Small, and Consumer Credit Division;
      3) Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division;
      4) One of the Heads of the Credit Recovery and Settlement Sub-Divisions

5) Kepala Divisi Supporting Kredit atau salah satu Kepala Sub Divisi Supporting Kredit yang ditunjuk (Sekretaris).

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Kredit Tugas Komite Kredit adalah sebagai berikut:

a. Mengadakan rapat komite untuk membahas usulan kredit yang diajukan kepada Komite (berlaku hanya untuk kredit produktif);
b. Menggali informasi yang berkaitan dengan kredit yang diusulkan untuk diputus oleh Komite;
c. Mengambil keputusan atas usulan kredit yang diajukan kepada Komite.

Wewenang Komite Kredit adalah sebagai berikut:
a. Memutus proposal di atas limit kewenangan Pemimpin Cabang;
b. Memberikan pertimbangan dan pendapat serta keputusan atas proposal yang diajukan;
c. Memerintahkan kepada sponsor untuk melengkapi data/dokumen yang diperlukan dalam hal terdapat kekurangan dalam pembahasan/analisa;
d. Menyetujui/menolak usulan proposal yang diajukan kepada Komite berdasarkan kemahiran profesional sesuai dengan batas wewenang yang diberikan kepadanya.

Sekretaris Komite mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut:
a. Meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan sponsor;
b. Mengembalikan dokumen kredit apabila tidak lengkap;
c. Menunjuk dan mengundang rapat anggota komite;
d. Menyusun notulen rapat;
e. Membuat memorandum Komite Kredit;
f. Sekretaris Komite mengundang rapat seluruh anggota Komite minimal 2 (dua) hari kerja sebelum Komite dilaksanakan dengan menyerahkan copy dokumen proposal kredit yang diusulkan Cabang dengan lampiran pendukung kredit.

Sponsor memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Mengajukan proposal kredit kepada komite yang telah mendapat persetujuan dari Komite Kantor Cabang;
b. Mempresentasikan proposal kredit kepada komite;
c. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran atau keakuratan data – data yang disampaikan;

5. Head of the Credit Support Division or one of the designated Heads of the Credit Support Sub-Divisions (Secretary).

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Credit Committee The duties of the Credit Committee are as follows:

a. Convening a committee meeting to discuss loan proposals submitted to the Committee (applies only to productive loans);
b. Gathering information related to the proposed loans to be decided by the Committee;
c. Making decisions on loan proposals submitted to the Committee.

The Credit Committee's authority is as follows:
a. Deciding on proposals exceeding the Branch Manager's authority limit;
b. Providing considerations, opinions, and decisions on submitted proposals;
c. Directing the sponsor to complete the necessary data/documents in the event of deficiencies in the discussion/analysis;
d. To approve or reject proposals submitted to the Committee based on professional judgment within the scope of authority granted to him or her.

The Committee Secretary has the following duties and authority:
a. Reviewing the completeness of documents submitted by the sponsor;
b. Return credit documents if they are incomplete;
c. Convening and inviting committee members to meetings;
d. Preparing meeting minutes;
e. Preparing Credit Committee memoranda;
f. The Committee Secretary shall convene a meeting of all Committee members at least 2 (two) business days prior to the Committee meeting by distributing copies of the credit proposal submitted by the Branch along with supporting credit documentation.

The sponsor has the following duties and responsibilities:
a. Submit credit proposals to the committee that have been approved by the Branch Office Committee;
b. Presenting the credit proposal to the committee;
c. Take full responsibility for the truthfulness or accuracy of the data submitted;

d. Atas perbedaan hasil analisa antara sponsor Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maka analisa Kantor Pusat dan Kantor Cabang diberikan kesempatan dalam rapat Komite untuk mempresentasikan proposal kredit pada lembaga Komite;
e. Apabila hasil analisa Kantor Pusat sama dengan usulan Kantor Cabang maka yang mempresentasikan kepada lembaga Komite Kredit adalah Analis Kantor Pusat didampingi oleh Analis Kantor Cabang.

Masing-masing anggota Komite bertanggung jawab secara professional terhadap keputusan yang diambil.

Keputusan Lembaga Komite Kredit

a. Keputusan usulan proposal selain restrukturisasi dinyatakan setuju apabila:
   1) Seluruh anggota rapat Komite setuju; atau
   2) Minimal 51% Anggota Komite menyatakan setuju termasuk Pemegang Limit Tertinggi (PLT), Komite Cabang pengusul dihitung sebagai 1 (satu) suara dalam perhitungan keputusan ini dengan catatan seluruh Anggota Komite Cabang menyatakan setuju,
b. Keputusan proposal dinyatakan naik banding apabila:
   1) Ketua (PLT) setuju namun anggota komite lainnya tidak setuju;
   2) Ketua (PLT) tidak setuju namun 50% dari anggota komite lainnya setuju;
   3) Banding diajukan untuk mendapat putusan satu tingkat diatas PLT,
c. Keputusan proposal dinyatakan ditolak apabila:
   1) Seluruh anggota rapat Komite tidak setuju; atau
   2) Anggota Komite yang menyatakan setuju kurang dari 51%,
d. Keputusan usulan proposal restrukturisasi dinyatakan setuju apabila:
   1) Seluruh anggota rapat Komite setuju; atau
   2) Minimal 51% Anggota Komite menyatakan setuju, Komite Cabang pengusul dihitung sebagai 1 (satu) suara dalam perhitungan keputusan ini dengan catatan seluruh Anggota Komite Cabang menyatakan setuju,
e. Banding atas putusan restrukturisasi apabila:
   1) Salah satu Kepala Divisi selain pemegang limit menyatakan tidak setuju dan anggota lainnya menyatakan setuju;
   2) Satu satu Kepala Divisi selain pemegang limit menyatakan setuju dan anggota lainnya menyatakan tidak setuju;

d. In the event of discrepancies in analysis results between the Head Office and the Branch Office, both the Head Office and the Branch Office are given the opportunity during the Committee meeting to present the credit proposal to the Credit Committee;
e. If the Head Office's analysis results align with the Branch Office's proposal, the Head Office Analyst, accompanied by the Branch Office Analyst, shall present the proposal to the Credit Committee;

Each Committee member is professionally responsible for the decisions made.

Decisions of the Credit Committee

a. A decision on a proposed resolution other than restructuring is approved if:
   1) All members of the Committee meeting agree; or
   2) At least 51% of Committee members express their approval, including the Highest Limit Holder (PLT); the proposing Branch Committee is counted as 1 (one) vote in the calculation of this decision, provided that all members of the Branch Committee express their approval;
b. A proposal decision is subject to appeal if:
   1) The Chair (PLT) agrees but other Committee members do not agree;
   2) The Chair (PLT) does not agree but 50% of the other committee members agree;
   3). An appeal is filed to obtain a decision one level above the PLT,
c. The proposal decision is deemed rejected if:
   1) All members of the Committee meeting disagree; or
   2) If fewer than 51% of Committee members vote in favor,
d. The proposed restructuring proposal is approved if:
   1) All members present at the Committee meeting agree; or
   2) At least 51% of Committee members vote in favor; the proposing Branch Committee counts as 1 (one) vote in this decision, provided that all members of the proposing Branch Committee vote in favor;
e. An appeal against the restructuring decision may be filed if:
   2) One Division Head other than the limit holder expresses disagreement and the other members express agreement;
   3) One Division Head other than the limit holder agrees and the other members disagree;

3) Banding diajukan untuk mendapatkan putusan Komite Kredit Direksi,

f. Anggota Komite wajib memberikan pendapat secara tertulis pada lembar memorandum Komite Kredit atas putusan setuju atau tidak setuju atas proposal yang diajukan sponsor;

g. Keputusan anggota komite harus dituangkan dalam suatu Memorandum Komite

h. Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam risalah rapat oleh sekretaris komite dan wajib ditandatangani seluruh anggota komite serta didokumentasikan secara baik;

i. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

3) An appeal is filed to obtain a decision from the Board of Directors' Credit Committee,

f. Committee members are required to provide their written opinions on the Credit Committee's memorandum form regarding whether they approve or disapprove of the proposal submitted by the sponsor;

g. The decisions of the committee members must be recorded in a Committee Memorandum

h. The results of the Committee meeting as referred to must be recorded in the meeting minutes by the Committee secretary and must be signed by all Committee members and properly documented;

i. Any *dissenting opinions* arising during the Committee meeting must be clearly stated in the meeting minutes.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite Kredit

Selama tahun 2025, Komite kredit mengadakan 19 (sembilan belas) kali rapat secara bersama-sama dalam satu tempat atau secara virtual terkait permohonan kredit baru, perpanjangan maupun restrukturisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

Activities/Implementation of the Credit Committee's Work Program

During 2025, the Credit Committee held 19 (nineteen) meetings, either in person or virtually, regarding new credit applications, extensions, and restructurings, as detailed below:

No,	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	10 Januari 2025 January 10, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. CV. Sahabat Nagekeo/ Romanus Babo	Credit Approval Committee for CV. Sahabat Nagekeo/Romanus Babo
2	31 Januari 2025 January 31, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. PT. Mitra Bangun Timor/ Michael Tamara	Credit Approval Committee for PT. Mitra Bangun Timor/Michael Tamara
3	18 Februari 2025 February 18, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. PT. Deltacom/ Bonevantura K. B. Sutrisno	Credit Approval Committee for PT. Deltacom/ Bonevantura K. B. Sutrisno
4	9 April 2025 April 9, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. PT. Tunas Baru Abadi/ Rofinus Fanggidae	Credit Approval Committee for PT. Tunas Baru Abadi/Rofinus Fanggidae
5	30 Juni 2025 June 30, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. KSP TLM Indonesia	Credit Approval Committee of KSP TLM Indonesia
7	1 Juli 2025 July 1, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. UD. Pagar Alam/ Humal Anwar	Credit Approval Committee for UD. Pagar Alam/Humal Anwar
8		Komite Persetujuan Kredit an. PT. Tunas Baru Abadi/ Rofinus Fanggidae	Credit Approval Committee for PT. Tunas Baru Abadi/Rofinus Fanggidae
9	10 Juli 2025 July 10, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. UD. Sang Surya/ Aji Abdulla	Credit Approval Committee for UD. Sang Surya/ Aji Abdulla
10	16 Juli 2025 July 16, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. Siti Masita Nia	Credit Approval Committee for Siti Masita Nia
11	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. CV. Ideal Timor Mandiri/ Ivandy Engelbert Layansarie	Credit Approval Committee for CV. Ideal Timor Mandiri/Ivandy Engelbert Layansarie
12	15 Agustus 2025 August 15, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. Toko Serendipity/ Lesly Narwasty Ndun	Credit Approval Committee for Toko Serendipity/Lesly Narwasty Ndun
13	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Abdi Tulus	Credit Approval Committee of the Indonesian Civil Servants Cooperative (KPRI) Abdi Tulus

No,	Tanggal Date	Agenda	Agenda
14	15 September 2025 September 15, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. UD. Risquina/ Sugiarto Firman Abdulsalam Azhari	Credit Approval Committee of UD. Risquina/ Sugiarto Firman Abdulsalam Azhari
15	19 September 2025 September 19, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. PT. Tunas Baru Abadi/ Rofinus Fanggidae	Credit Approval Committee for PT. Tunas Baru Abadi/Rofinus Fanggidae
16	21 November 2025 November 21, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. CV. Cahaya Abadi/ Dedy Chandra	Credit Approval Committee for CV. Cahaya Abadi/Dedy Chandra
17	1 Desember 2025 December 1, 2025	Komite Persetujuan Restrukturisasi Kredit an. CV. Elmylia	Credit Restructuring Approval Committee for CV. Elmylia
18		Komite Persetujuan Restrukturisasi Kredit an. PT. Waskita Bumi Wira (WBW)	Credit Restructuring Approval Committee for PT. Waskita Bumi Wira (WBW)
19	30 Desember 2025 December 30, 2025	Komite Persetujuan Kredit an. UD. Ngaso/ Marselina Kanni	Credit Approval Committee for UD. Ngaso/ Marselina Kanni

3. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dikelola Bank NTT. Penetapan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 107 Tahun 2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Struktur Keanggotaan dan Tata Kerja Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang diambil dan Toleransi Risiko, Kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank dan tidak efektifnya Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau mengambil posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

3. Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established to ensure that the risk management framework provides adequate protection against all risks managed by Bank NTT. The establishment of the Risk Management Committee is in accordance with Board of Directors Decree No. 107 of 2024 dated June 5, 2024, regarding the Membership Structure and Working Procedures of the Risk Management Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Authority and Responsibilities of the Risk Management Committee

Providing recommendations to the President Director, which include at a minimum:

1. The formulation of Risk Management policies and their amendments, including Risk Management strategies, Risk Levels and Risk Tolerance, the Risk Management Framework, and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. Periodic or ad hoc improvements to the risk management process resulting from external and internal changes at the Bank that affect capital adequacy, the Bank's risk profile, and the ineffectiveness of risk management implementation based on evaluation results;
3. The establishment of policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, such as significant business expansion exceeding the Bank's previously established Business Plan or taking risk positions/exposures that exceed established limits.

Tata Kerja Komite Manajemen Risiko

1. Mengadakan rapat terkait Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko pada umumnya minimal 3 (tiga) bulan sekali;
2. Mengadakan rapat insidentil di luar jadwal apabila diperlukan;
3. Quorum rapat KMR tercapai apabila minimal anggota tidak tetap dari divisi terkait dengan materi rapat;
4. Notulen/risalah keputusan rapat yang ditandatangani oleh semua peserta harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal rapat, keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan;
5. Keputusan rapat adalah merupakan keputusan Komite Manajemen Risiko yang masih harus diajukan kepada Rapat Direksi.

Risk Management Committee Operating Procedures

1. Convening meetings regarding the Bank's financial health and overall risk profile at least once every 3 (three) months;
2. Holding ad hoc meetings outside the schedule when necessary;
3. A quorum for the Risk Management Committee meeting is achieved if at least the non-permanent members from the divisions relevant to the meeting agenda are present;
4. Meeting minutes/resolutions signed by all participants must be finalized and received by committee members no later than 3 (three) business days after the meeting date; such decisions must be followed up as soon as possible by the relevant operational units;
5. Meeting decisions constitute decisions of the Risk Management Committee that must still be submitted to the Board of Directors meeting.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Membership of the Risk Management Committee

Ketua (merangkap anggota tetap) Chairperson (also serving as a permanent member)	:	Direktur Kepatuhan Director of Compliance
Anggota Tetap Permanent Member	:	1. Seluruh Direksi selain Direktur Utama 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 1. All members of the Board of Directors other than the CEO 2. Head of the Risk Management Division 3. Head of the Compliance Division 4. Head of the Supervision & SKAI Division
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	:	Kepala Divisi Lainnya Heads of Other Divisions

Rapat Komite Manajemen Risiko

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko

1. Mengadakan rapat Global Risk minimal 3 (tiga) bulan sekali
2. Mengadakan rapat insidentil di luar jadwal apabila diperlukan,
3. Quorum Rapat Komite Manajemen Risiko tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh Ketua dan Ketua Pengganti dan 50 % anggota plus 1 (satu),
4. Notulen/risalah Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat, Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan ,

Risk Management Committee Meeting

The following are some provisions regarding Risk Management Committee meetings

1. Hold a Global Risk meeting at least once every 3 (three) months
2. Hold ad hoc meetings outside the schedule as needed,
3. A quorum for the Risk Management Committee meeting is achieved if attended by at least the Chair, the Alternate Chair, and 50% of the members plus 1 (one),
4. The minutes of the meeting, signed by all attendees, must be finalized and received by committee members no later than 2 (two) business days after the meeting date, These decisions must be followed up as soon as possible by the relevant work units,

5. Keputusan Rapat adalah merupakan Keputusan Komite Manajemen Risiko yang masih harus diajukan ke Rapat Direksi,

5. Meeting Resolutions are Risk Management Committee Resolutions that must still be submitted to the Board of Directors Meeting,

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2025, Komite Manajemen Risiko mengadakan 1 (satu) kali rapat komite dengan rincian sebagai berikut:

Risk Management Committee Meeting

During 2025, the Risk Management Committee held 1 (one) committee meeting with the following details:

No.	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda
1.	5 Juni 2025 June 5, 2025	Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank NTT 5th Floor Auditorium, Bank NTT Headquarters	Draft Selera Risiko (Risk Appetite), Toleransi Risiko (Risk Tolerance) dan Limit Risiko (Risk Limit) Tahun 2025 Draft of Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits) for 2025

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi sejalan dengan strategi Bank NTT, Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki misi untuk meningkatkan kemampuan bersaing Bank NTT dan peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna,

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 200 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Keanggotaan Komite ini adalah sebagai berikut:

4. Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee was formed to ensure the implementation of information technology systems is in line with Bank NTT's strategy; the Information Technology Steering Committee has a mission to enhance Bank NTT's competitiveness and improve customer service through the appropriate use of information technology,

Membership of the Information Technology Steering Committee

The establishment of the Information Technology Steering Committee is governed by Board of Directors Resolution No. 200 of 2021, dated December 28, 2021, regarding the Establishment of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. The membership of this Committee is as follows:

Ketua 1 Chairperson 1	:	Direktur Teknologi Informasi & Operasional	Director of Information Technology & Operations
Ketua 2 Vice Chair 2	:	Direktur Kepatuhan	Director of Compliance
Sekretaris 1 Secretary 1	:	Kepala Divisi Teknologi Informasi	Head of the Information Technology Division
Sekretaris 2 Secretary 2	:	Kepala Divisi Operasional	Head of the Operations Division

Anggota Member	:	1. Kepala Divisi Umum 2. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 3. Kepala Divisi Riset & Pengembangan 4. Kepala Divisi Corporate Secretary & Legal 5. Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 6. Kepala Divisi Kredit Menengah & Komersil 7. Kepala Divisi Supporting Kredit 8. Kepala Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit 9. Kepala Divisi Treasury & International 10. Kepala Divisi Dana & Jasa 11. Kepala Divisi Manajemen Risiko 12. Kepala Divisi Kepatuhan	1. Head of General Affairs Division 2. Head of the Human Resources Division 3. Head of Research & Development Division 4. Head of the Corporate Secretary & Legal Division 5. Head of Micro, Small & Consumer Credit Division 6. Head of Medium & Commercial Credit Division 7. Head of the Credit Support Division 8. Head of the Credit Recovery & Resolution Division 9. Head of the Treasury & International Division 10. Head of Funds & Services Division 11. Head of Risk Management Division 12. Head of the Compliance Division

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait:

a. Sasaran Komite Pengarah TI adalah untuk membantu Direksi dalam mengawasi kegiatan terkait TI dan untuk menentukan tanggung jawab Komite Pengarah TI dalam ruang lingkup Piagam Komite Pengarah TI;
b. Menyelaraskan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) dengan Rencana Strategis Kegiatan Usaha Bank;
c. Perumusan kebijakan, standard dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Bank;
d. Memberikan rekomendasi terkait rencana strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan Rencana Bisnis Bank;
e. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank, misalnya pergantian *core banking system*, *server production* dan topologi jaringan;
f. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati, Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
g. Mengkaji efektivitas dan efisiensi roadmap TI (yang juga menjelaskan keadaan saat ini dan target sasaran) untuk mendukung strategis bisnis, SDM yang diperlukan, manfaat pada realisasi strategis TI serta tantangan pada rencana strategis TI;
h. Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank/yang mendukung kegiatan usaha bank;

Authority and Responsibilities

The authority and responsibilities *of the* Information Technology (*IT*) *Steering Committee* are to provide recommendations to the Board of Directors regarding:

a. The objectives of the IT Steering Committee are to assist the Board of Directors in overseeing IT-related activities and to define the responsibilities of the IT Steering Committee within the scope of the IT Steering Committee Charter;
b. *Al*igning the *Information Technology* Strategic *Plan* with the Bank's Business Strategic Plan;
c. Formulating key Information Technology policies, standards, and procedures, such as policies Information Security and Risk Management policies regarding the use of information technology at the Bank;
d. Providing recommendations regarding the Information Technology Strategic Plan that align with the Bank's Business Plan;
e. To ensure that approved Information Technology projects align with the Information Technology Strategic Plan, the IT Steering Committee also determines the priority status of critical IT projects that have a significant impact on the bank's operational activities, such as the replacement of *the core banking system*, *production servers*, and network topology;
f. To ensure alignment between the implementation of IT projects and the agreed-upon project plans, the IT Steering Committee must supplement its recommendations with analysis results from key IT projects, thereby enabling the Board of Directors to make decisions efficiently;
g. Review the effectiveness and efficiency of the IT roadmap (which also describes the current state and target objectives) to support business strategy, required human resources, benefits of IT strategy implementation, and challenges in the IT strategic plan;
h. Alignment between IT and the needs of the Management Information System and the needs of the bank's business activities or those supporting the bank's business activities;

i. Efektivitas langkah-langkah meminimalisir risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
j. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keuangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
k. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu;
l. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank,
m. Merekomendasikan kebijakan dan perubahan terkait Teknologi Informasi untuk dipertimbangkan oleh Dewan Direksi,

i. The effectiveness of measures to minimize risks associated with the Bank's investments in the IT sector so that such investments contribute to the achievement of the bank's business objectives;
j. Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance, such as financial monitoring of IT infrastructure and measuring the effectiveness and efficiency of the implementation of IT security policies;
k. Efforts to resolve various IT-related issues that cannot be effectively, efficiently, and timely resolved by user units and IT providers;
l. The adequacy and allocation of the bank's resources,
m. Recommending policies and changes related to Information Technology for consideration by the Board of Directors,

Frekuensi Pertemuan

Selama tahun 2025 Komite Pengarah TI melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dijabarkan sebagai berikut:

Meeting Frequency

During 2025, the IT Steering Committee held 2 (two) meetings, as detailed below:

No	Tanggal Date	Agenda	Agenda
1	25 November 2025 November 25, 2025	1. Status & Kronologis Pengadaan Core Banking System (CBS); 2. Pemaparan Hasil Review Konsultan Independen (HPS & Kontrak).	1. Status & Timeline of the *Core Banking System* (CBS) Procurement; 2. Presentation of the Results *of the* Independent Consultant's *Review* (HPS & Contract).
2	30 Desember 2025 December 30, 2025	1. Pemaparan Update Proses Core Banking System; 2. Pembahasan Rencana Pembangunan Data Warehouse; 3. Strategi Kedaulatan Data.	1. Presentation of *Core Banking System* Process Update; 2. Discussion of the Data *Warehouse* Development Plan; 3. Data Sovereignty Strategy.

5. Komite SDM

Komite ini merupakan komite yang bertugas membantu Direksi:

1. Merumuskan kebijakan terkait SDM dengan memperhatikan usulan kebijakan atau rancangan kebijakan yang dibuat oleh Divisi SDM yang selanjutnya diajukan ke Direksi untuk keputusannya;
2. Membahas hal-hal strategis terkait SDM Bank NTT dan diajukan ke Direksi Bank NTT;
3. Membahas usulan dari anggota Komite SDM dan/atau konsep yang disampaikan oleh Direksi yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja SDM Bank NTT dan tidak terbatas pada pengembangan dan evaluasi SDM lainnya;

5. HR Committee

This committee is tasked with assisting the Board of Directors:

1. Formulating HR-related policies by considering policy proposals or drafts prepared by the HR Division, which are subsequently submitted to the Board of Directors for decision;
2. Discuss strategic matters related to Bank NTT's human resources and submit them to the Bank NTT Board of Directors;
3. Discussing proposals from HR Committee members and/or concepts presented by the Board of Directors that affect the productivity and performance of Bank NTT's human resources, including but not limited to other HR development and evaluation matters;

4. Tindak lanjut temuan pemeriksa internal dan/atau pemeriksa eksternal yang dipandang perlu untuk mendapat masukan dari Komite SDM;
5. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Direksi atas keberatan yang diajukan oleh pegawai yang dikenakan sanksi pelanggaran disiplin;
6. Komite SDM bertanggung jawab kepada Direksi,

4. Follow up on findings from internal and/or external auditors that are deemed necessary to obtain input from the HR Committee;
5. Providing recommendations to the Board of Directors regarding objections raised by employees subject to disciplinary sanctions;
6. The HR Committee is accountable to the Board of Directors;

Dalam melaksanakan tugas, Komite ini bertanggungjawab kepada Direksi dan dalam masalah khusus, Direksi dapat menetapkan pejabat lain dengan Surat Penunjukan Direksi tersendiri. Pada tahun 2025 ini Komite SDM belum mengadakan rapat.

In carrying out its duties, this Committee is accountable to the Board of Directors, and in specific matters, the Board of Directors may appoint other officials via a separate Board of Directors Appointment Letter. As of 2025, the HR Committee has not held any meetings.

Susunan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia diatur dalam SK Direksi Nomor 124 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

The composition of the Human Resources Committee is regulated in Board of Directors Decree No. 124 of 2020 concerning the Establishment of the Human Resources (HR) Committee of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as follows:

1.	Ketua Chair	:	Kepala Divisi SDM	Head of the Human Resources Division
2.	Wakil Ketua Vice Chair	:	Kepala Divisi Kepatuhan	Head of the Compliance Division
3.	Sekretaris Secretary	:	Kasubdiv Admin Personalia	Deputy Head of the Personnel Administration Subdivision
4.	Anggota Member	:	1. Kepala Divisi Perencanaan, Corporate & Secretary 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 4. Kepala Divisi Dana 5. Kepala Divisi Supporting Kredit 6. Kepala Divisi Operasional	1. Head of Planning, Corporate & Secretary Division 2. Head of the Risk Management Division 3. Head of the Supervision & SKAI Division 4. Head of the Funds Division 5. Head of Credit Support Division 6. Head of Operations Division

6. Komite Kebijakan Kredit

Komite Kebijakan Perkreditan yang selanjutnya disingkat KKP adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pembentukan komite ini diputuskan dalam Keputusan Direksi Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024.

6. Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee, hereinafter referred to as KKP, is a committee formed by the Board of Directors for the purpose of managing credit policies aimed at supporting sound credit granting and incorporating elements of internal control from the initial stage of the credit process through to the credit monitoring stage, while adhering to the principle of prudence. The establishment of this committee was decided in Board of Directors Decision No. 184 of 2024 dated December 13, 2024.

Komposisi Komite Kebijakan Kredit

Komposisi keanggotaan Komite Kebijakan Kredit dijbarkan sebagai berikut:

Composition of the Credit Policy Committee

The composition of the Credit Policy Committee is as follows:

1.	Ketua Chair	:	Direktur Utama	Chief Executive Officer
2.	Wakil Ketua Vice Chairperson	:	1. Direktur Kredit 2. Direktur Kepatuhan	1. Director of Credit 2. Compliance Director
3.	Sekretaris Secretary	:	Kepala Divisi Supporting Kredit	Head of Credit Support Division
4.	Anggota Member	:	1. Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer 2. Kepala Divisi Kredit Komersil dan Menengah 3. Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit 4. Kepala Divisi Manajemen Risiko 5. Kepala Divisi Kepatuhan 6. Kepala Divisi Corporate Secretary dan Legal 7. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI	1. Head of the Micro, Small, and Consumer Credit Division 2. Head of the Commercial and Medium-Sized Credit Division 3. Head of the Credit Recovery and Resolution Division 4. Head of the Risk Management Division 5. Head of the Compliance Division 6. Head of the Corporate Secretary and Legal Division 7. Head of the Supervision & SKAI Division

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank;
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
5. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
6. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
7. Memastikan arah kebijakan perkreditan sejalan Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB)
8. Memberikan rekomendasi atas penawaran kerjasama penyaluran Kredit Program;
9. Pelaksanaan ketentuan BMPK;
10. Pemantau dalam kecukupan Bank dalam pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai;

Functions of the Credit Policy Committee

1. Provide input to the Board of Directors in the formulation of the Bank's Credit Policy, particularly regarding the formulation of prudential principles in lending;
2. Ensuring that the Bank's Credit Policy is consistently applied and implemented, and formulating solutions if there are obstacles or challenges in the implementation of the Bank's Credit Policy;
3. Conducting periodic reviews of the Bank's Credit Policy and providing recommendations to the Board of Directors if changes or improvements to the Bank's Credit Policy are necessary;
4. Monitor and evaluate the overall development and quality of the credit portfolio;
5. Monitor and evaluate the proper exercise of credit approval authority;
6. Monitor and evaluate the accuracy of the process of granting, the development, and the quality of credit extended to parties related to the Bank and certain large borrowers;
7. Ensuring that the direction of credit policy aligns with the Bank's Corporate Plan and Business Plan (RBB);
8. Provide recommendations on offers of cooperation for the distribution of Program Loans;
9. Implementation of BMPK provisions;
10. Monitoring the Bank's adequacy in meeting loan loss reserves;

11. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
12. Melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan azas perkreditan yang sehat;
13. Membuat kebijakan pelaksanaan kewenangan memutus kredit dan mengawasi memastikan pelaksanaan pemberian persetujuan kredit telah sesuai dengan limit kewenangannya;
14. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perkreditan dan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pemberian kredit.

11. Conducting evaluations and ensuring that loans granted comply with the Maximum Credit Limit (BMPK);
12. Evaluating the implementation of corporate governance to uphold sound lending principles;
13. Establishing policies for the exercise of credit approval authority and overseeing to ensure that the granting of credit approvals is in accordance with the limits of such authority;
14. Compliance with credit regulations, laws, and other applicable rules in the granting of credit.

ASSESSMENT TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment of The Performance of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Prosedur Pelaksanaan Assessment

Prosedur asesmen/penilaian atas kinerja Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui RUPS, Bank NTT melalui Pemegang Saham telah menerapkan mekanisme evaluasi atas kinerja Direksi, pendekatan tersebut adalah dalam implementasi strategi dan penilaian kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank NTT untuk memastikan bahwa strategi terfokus dan berjalan dengan baik, sasaran strategis diterjemahkan menjadi *Key Performance Indicators* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah, Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi di Tahun 2025 dilakukan berdasarkan parameter kinerja kolegial yang dilakukan oleh Pemegang saham melalui forum RUPS.

Kriteria/Indikator Assessment

Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Sementara kriteria/indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2024;

Assessment Implementation Procedures

The assessment procedure for the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted through the General Meeting of Shareholders (GMS). Bank NTT, through its shareholders, has implemented an evaluation mechanism for the performance of the Board of Directors, focusing on strategy implementation and performance evaluation. This aligns with Bank NTT's policy to ensure that strategies are focused and executed effectively; strategic objectives are translated into *Key Performance Indicators* (KPIs) agreed upon by the Board of Directors and cascaded down to the lowest levels. The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025 is conducted based on collegial performance parameters carried out by the Shareholders through the GMS forum.

Assessment Criteria/Indicators

The criteria for assessing the performance of the Board of Commissioners are the Board of Commissioners' execution of its duties in overseeing the management of the Company's operations and providing advice to the Board of Directors for the Company's interests and objectives, as well as the execution of duties specifically assigned to it pursuant to the Articles of Association and/or based on GMS resolutions within the framework of applicable laws and regulations,

Meanwhile, the performance criteria/indicators for measuring the performance of the Board of Directors include:

1. The performance of duties and responsibilities by each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association;
2. Implementation of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;

3. Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif, Lebih lanjut, dasar dari pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dapat tercermin dari Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup aspek Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Pihak yang Melaksanakan Assessment

Pihak yang melakukan Asesmen terhadap Kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator pencapaian kinerja Direksi sebagaimana uraian di atas. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2024 termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2025.

3. This performance evaluation has taken into account both quantitative and qualitative factors. Furthermore, the basis for measuring the Board of Directors' performance success is reflected in the Company's Health Index, which encompasses aspects of Risk Profile, Governance, Profitability, and Capitalization.

Party conducting the Assessment

The General Meeting of Shareholders (GMS) is responsible for assessing the performance of the Board of Commissioners, while the Board of Commissioners and the GMS are responsible for evaluating the performance of the Board of Directors. In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the performance indicators for the Board of Directors as described above. The Board of Commissioners and the Board of Directors are accountable for their performance achievements for the 2024 period, including the fulfillment of their duties and responsibilities, at the GMS to be held in 2025.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Disclosure of Affiliate Relationships of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Ketiga anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi, Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

None of the three members of the Board of Commissioners has any financial, management, shareholding, and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners or with the Board of Directors. Family and financial relationships are shown in the following table:

Nama Pengurus Name of Officer	Hubungan Keluarga Family Relationship						Hubungan Keuangan Financial Relationship						Keterangan Bila Ada Hubungan Keluarga/ Keuangan Remarks If Any Relationship Family/Finance
	Dekom Dekom		Direksi Direksi		PSP PSP		Dekom Dekom		Direksi Direksi		PSP* PSP		
	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	Ya Yes	Tdk No	
S. Donny H. Heatubun		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Frans Gana		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Charlie Paulus		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Heru Helbianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Rahmat Saleh		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Aloysius R. A. Geong		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Christofel S. M. Adoe		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Yohanis Landu Praing		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-
Hilarius Minggu		✓		✓		✓		✓		✓		✓	-

Keterangan: *) PSP (Pemegang Saham Pengendali)

Notes: *) PSP (Controlling Shareholder)

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Tidak terdapat anggota Komisaris yang merangkap jabatan pada lembaga lainnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut,

Concurrent Positions on the Board of Commissioners

No members of the Board of Commissioners hold concurrent positions at other institutions, as shown in the table below:

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Positions				
	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Institution Government	Anak Perusahaan Subsidiary Company	Perusahaan Lain Other Companies	Keterangan Description
S. Donny H. Heatubun	-	-	-	-	-
Frans Gana	-	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lainnya, Jabatan rangkap anggota Direksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Concurrent Board Membership

Members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors at other companies. Concurrent positions held by members of the Board of Directors are shown in the table below,

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Positions				
	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Institution Government	Anak Perusahaan Subsidiary Company	Perusahaan Lain Other Companies	Keterangan Description
Charlie Paulus	-	-	-	-	-
Heru Helbianto	-	-	-	-	-
Rahmat Saleh	-	-	-	-	-
Aloysius R. A. Geong	-	-	-	-	-
Christofel S. M. Adoe	-	-	-	-	-
Yohanis Landu Praing	-	-	-	-	-
Hilarius Minggu	-	-	-	-	-

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya, Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Shareholdings of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company requires members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to disclose their shareholdings, both in the Company and in other companies, located domestically and abroad, in a report that must be updated annually. The details of the shareholdings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Nama Name	Kepemilikan Saham Shareholdings				
	Bank NTT	Lembaga Pemerintah Institution Government	Anak Perusahaan Subsidiary Company	Perusahaan Lain Other Companies	Keterangan Description
S. Donny H. Heatubun	-	-	-	-	-
Frans Gana	-	-	-	-	-
Charlie Paulus	-	-	-	-	-
Heru Helbianto	-	-	-	-	-
Rahmat Saleh	-	-	-	-	-
Aloysius R. A. Geong	-	-	-	-	-
Christofel S. M. Adoe	-	-	-	-	-
Yohanis Landu Praing	-	-	-	-	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transactions Involving Conflicts of Interest

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank, manajemen Bank NTT sering dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dalam hal proses penetapan suatu arah kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan harapan dan kepentingan dari masing-masing unit kerja, sehingga akan berdampak pada kualitas keputusan dan kinerja dari hasil keputusan. Untuk mengelola dan mengendalikan kualitas keputusan sehingga terhindar dari risiko dan kerugian bank, maka diperlukan peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen untuk menangani perbedaan kepentingan dimaksud. Pada tahun buku 2024 Bank NTT telah merumuskan dan menerbitkan peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 193 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024.

In carrying out the bank's intermediary functions, Bank NTT's management frequently faces challenges and obstacles in the process of setting policy directions. This is due to differing expectations and interests among the various departments, which can impact the quality of decisions and the performance resulting from those decisions. To manage and control the quality of decisions to avoid risks and losses to the bank, regulations are needed to serve as guidelines for management in addressing these conflicting interests. In the 2024 fiscal year, Bank NTT formulated and issued regulations regarding guidelines for handling conflicts of interest, as stipulated in the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 193 of 2024 dated December 31, 2024.

Ketentuan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan perusahaan;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya perusahaan yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

These provisions govern the basic principles for handling conflicts of interest, namely:

1. Prioritizing the interests of the company;
2. Ensuring transparency in the management and oversight of conflicts of interest;
3. Promoting personal responsibility and exemplary conduct;
4. Creating and fostering a corporate culture that does not tolerate conflicts of interest.

Prinsip ini diaplikasikan secara terus menerus, melalui peningkatan profesionalisme terkait kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam ketentuan kode etik dan tingkah laku (*code of conduct*) Bank NTT, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 89 Tahun 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* (CoC) dan *Code of Corporate Governance* (CoCG) PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu Nilai-nilai budaya Perusahaan yaitu BINTANG. Makna BINTANG dijabarkan sebagai berikut:

This principle is applied on an ongoing basis through the enhancement of professionalism regarding the awareness to uphold the ethical values contained in the provisions of Bank NTT's *Code of Conduct*, as stipulated in the Board of Directors' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 89 of 2022 regarding the Guidelines for *the Code of Conduct* (CoC) and *Code of Corporate Governance* (CoCG) of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, namely the Company's cultural values known as BINTANG. The meaning of BINTANG is explained as follows:

1. **B: *BUSINESS ORIENTED***
   Berorientasi pada Kepentingan & Kebutuhan Customer dan Bisnis:
   - Berorientasi pada Profit
   - Mengutamakan Efektivitas hasil dan Efisiensi
   - Kerjakan segala sesuatu yang benar hingga tuntas
2. **I: *INDEPENDENT, INFINITE & INTEGRITY***
   a. INDEPENDENT: Merdeka, berdikari, tidak tergantung pada orang lain, kemampuan menyelesaikan tugas dan kerja
   b. INFINITE: tak terbatas: Cinta Melayani bukan dilayani, Peduli adalah seutuhnya manusiawi, kerendahan hati
   c. INTEGRITY: berasal dari kata Latin Integer yang sama dengan terintegrasi dan bulat, tidak terdapat jarak antara niat dan tindakan, ketika ia utuh, menyatu, sama luar-dalam, satu kata satu perbuatan. Konsistensi atas Standar, Nilai-nilai, Ketentuan yang diyakini, menjunjung tinggi Komitmen dan Profesionalisme serta Akhlak.
      - Profesionalisme, mampu menyelesaikan Tugas, Tingkatkan Kompetensi
      - Melayani bukan dilayani, peduli, Rendah Hati
      - Mengutamakan Kejujuran, Konsistensi satu kata dan Perbuatan untuk memberikan hasil terbaik
3. **N: *NETWORKING***
   Jaringan, membangun suatu koneksi dgn orang lain, hubungan antar bagian-bagian, komunikasi, Manfaat networking: informasi luas, kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri, mengembangkan ide, mendapat bantuan, peluang baru, pengembangan karier.
   Sinergitas, Kerjasama & Kolaborasi meliputi:
   - Terbuka, Kreatif, membangun Kerja sama
   - Berpikir Positif, Komunikasi, menghargai Perbedaan
   - Mengembangkan diri, meningkatkan Rasa Percaya Diri
4. **T: *TRUST & TEAM WORK***
   a. TRUST: *Confidence, Belief, Faith, Reliance, Credence*. Bahasa Indonesia: Kepercayaan/ mempercayai, berharap, menaruh kepercayaan, yakin, harapan, tanggungjawab. Kata *Truth* bermakna sebagai *believe in the reliability, truth, ability, or strength of* yaitu percaya pada sesuatu yang diandalkan, kebenaran, kemampuan, atau kekuatan. *Truth* juga bermakna *firm believe* yakni kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu.

1. **B: BUSINESS ORIENTED**
   Focused on Customer and Business Interests & Needs:
   - Profit-Oriented
   - Prioritizing Effectiveness of Results and Efficiency
   - Do everything right and see it through to completion
2. **I: INDEPENDENT, INFINITE & INTEGRITY**
   a. INDEPENDENT: Free, self-reliant, not dependent on others, capable of completing tasks and work
   b. INFINITE: Unlimited: Love to serve, not to be served; Caring is a truly human quality; Humility
   c. INTEGRITY: derived from the Latin word "integer," meaning "whole" and "complete"; there is no gap between intention and action; when one is whole, unified, and consistent inside and out—one's words and deeds align. Consistency with Standards, Values, and Principles; upholding Commitment, Professionalism, and Ethics.
      - Professionalism, the ability to complete tasks, and the enhancement of competence
      - Serving rather than being served, caring, humble
      - Prioritizing honesty and consistency between words and actions to deliver the best results
3. **N: NETWORKING**
   Networking: building connections with others, relationships between departments, and communication. Benefits of networking: access to a wide range of information, improved communication skills, increased self-confidence, developing ideas, receiving assistance, new opportunities, and career development.
   Synergy, Cooperation & Collaboration include:
   - Openness, Creativity, building cooperation
   - Positive Thinking, Communication, Respecting Differences
   - Self-development, boosting self-confidence
4. **T: TRUST & TEAMWORK**
   a. TRUST: *Confidence, Belief, Faith, Reliance, Credence*. Indonesian: Trust/to trust, hope, place trust in, be certain, expectation, responsibility. The word "*truth*" means *believing in the reliability, truth, ability, or strength of* something—that is, trusting in something that is dependable, true, capable, or strong. "*Truth*" also means *a firm belief*—that is, a strong trust or conviction in someone or something.

b. TEAM WORK: Kemampuan kerja tim, Sebuah proses secara kolaboratif dengan sekelompok orang untuk mencapai tujuan.
Manfaat: bekerja lebih efektif & produktif, mendapat lebih banyak ide dan sudut pandang, belajar dari rekan lain, saling mendukung dan mengandalkan. Skill penting: komunikasi, empati, mendengar, problem solving, saling menghargai, jujur, tanggungjawab. Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama dimana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain.
Menjaga Kepercayaan, Komitmen & Kekompakan Tim meliputi:
- Saling mempercayai, mampu mengelola Risiko
- Saling menghargai, Penuh Rasa Hormat
- Memiliki Komitmen, Tanggungjawab

5. **A**: ***ADAPTIVE***
Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, Proaktif mengakui tanggungjawab, tidak menyalahkan keadaan/kondisi. Inisiatif adalah bertindak sendiri bukan menunggu arahan. Mengambil inisiatif bukan berarti bersifat memaksa, menjengkelkan atau agresif, mengambil inisiatif berarti menyadari adanya tanggungjawab untuk mewujudkan sesuatu hal terjadi.
Selalu Menyesuaikan Diri Menghadapi Perubahan meliputi:
- Beradaptasi, cepat menyesuaikan diri atas setiap perubahan
- Proaktif dan mengambil Inisiatif

6. **N**: ***NEW TECHNOLOGY***
Identik dengan Inovasi yakni pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dari pengertian inovasi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah proses kreatif dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, Kreatif kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan, karya, ide, bekerja keras dan kerja cerdas.
Menyesuaikan Bisnis dengan Perkembangan Teknologi saat Ini meliputi:

b. TEAMWORK: The ability to work as a team; a collaborative process with a group of people to achieve a goal.
Benefits: working more effectively and productively, gaining more ideas and perspectives, learning from colleagues, supporting and relying on one another. Key skills: communication, empathy, active listening, problem-solving, mutual respect, honesty, and responsibility. A team is a group of people with complementary skills who are committed to achieving a common goal through a collaborative work process where they are mutually accountable to one another.
Maintaining Trust, Commitment, and Team Cohesion involves:
- Mutual trust, ability to manage risk
- Mutual respect, full of respect
- Commitment and Responsibility

5. **A: ADAPTIVE**
Easily adapts to circumstances, proactively takes responsibility, does not blame circumstances or conditions. Initiative means acting on one's own rather than waiting for instructions. Taking initiative does not mean being pushy, annoying, or aggressive; it means recognizing the responsibility to make something happen.

Always Adapting to Change includes:

- Adapting, quickly adjusting to every change
- Being proactive and taking initiative

6. **N: NEW TECHNOLOGY**
Innovation is synonymous with the introduction or adoption of new things, improvements, and new discoveries that differ from what already exists or was previously known. From this definition of innovation, it can be concluded that innovation is a creative process of making new discoveries that differ from what already exists. Creativity is a person's ability to produce something new in the form of concepts, works, or ideas, through hard work and smart work.

Adapting Business to Current Technological Developments includes:

- Inovatif, kreatif dalam menciptakan peluang, cara untuk pencapaian kinerja
- Belajar, mengembangkan ide-ide untuk Kemajuan diri dan Bank

7. ***G: GROWTH & SUSTAINABLE***
   Pertumbuhan yang berkelanjutan, tumbuh untuk meraih mimpi, impian, cita-cita, Pertumbuhan untuk menaikan kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang.
   Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan meliputi:
   - Menjaga Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis bank
   - Meningkatkan Produktivitas
   - Berkontribusi bagi Keluarga, Masyarakat, Pemilik, Bangsa untuk hari Esok

Dengan diimplementasikannya nilai-nilai dalam Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku diharapkan akan mampu mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan, Dalam menata kelola perusahaan sepanjang tahun buku 2025, Bank NTT tidak pernah mengalami adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, hal ini terungkap dalam tabel berikut:

- Being innovative and creative in creating opportunities and methods to achieve performance
- Learning, developing ideas for personal growth and the Bank

7. **G: GROWTH & SUSTAINABILITY**
   Sustainable growth: growing to achieve dreams, aspirations, and goals; growth to increase production capacity. Economic growth is a long-term increase in capacity.

   Sustainable Business Growth includes:
   - Maintaining the Growth and Sustainability of the Bank's Business
   - Improving Productivity
   - Contributing to Families, Society, Shareholders, and the Nation for Tomorrow

By implementing the values in the Code of Ethics and Conduct Guidelines, it is hoped that potential conflicts of interest in all activities—including decision-making—can be prevented. In managing the company throughout the 2025 fiscal year, Bank NTT has never experienced any transactions involving conflicts of interest, as shown in the following table:

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Transactions Involving Conflicts Of Interest

Tahun Year	Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position of the Party with a Conflict of Interest Conflict	Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position of the Party with a Conflict of Interest	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi Transaction Value	Keterangan Description
2025	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Implementation Of Compliance Functions

Memperhatikan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin beraneka ragam, maka Bank NTT senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan cara dan strategi mitigasi risiko, Upaya mitigasi risiko tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

In light of the increasingly diverse challenges and business risks faced by the Bank, Bank NTT continuously improves and enhances its risk mitigation methods and strategies. These risk mitigation efforts are carried out by strengthening compliance with applicable laws and regulations,

Unit Kerja Dibawah Direktur Kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko diatur dalam SK Direksi Nomor 033 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Struktur masing-masing unit yang berada di bawah Direktur Kepatuhan dijabarkan sebagai berikut:

Units Reporting to the Director of Compliance

In carrying out compliance functions, the Director of Compliance is assisted by the Compliance Division and the Risk Management Division. The organizational structure of the Compliance Division and the Risk Management Division is stipulated in Board of Directors Decree No. 033 of 2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. The structure of each unit under the Director of Compliance is outlined as follows:

Divisi Kepatuhan:

Compliance Division:

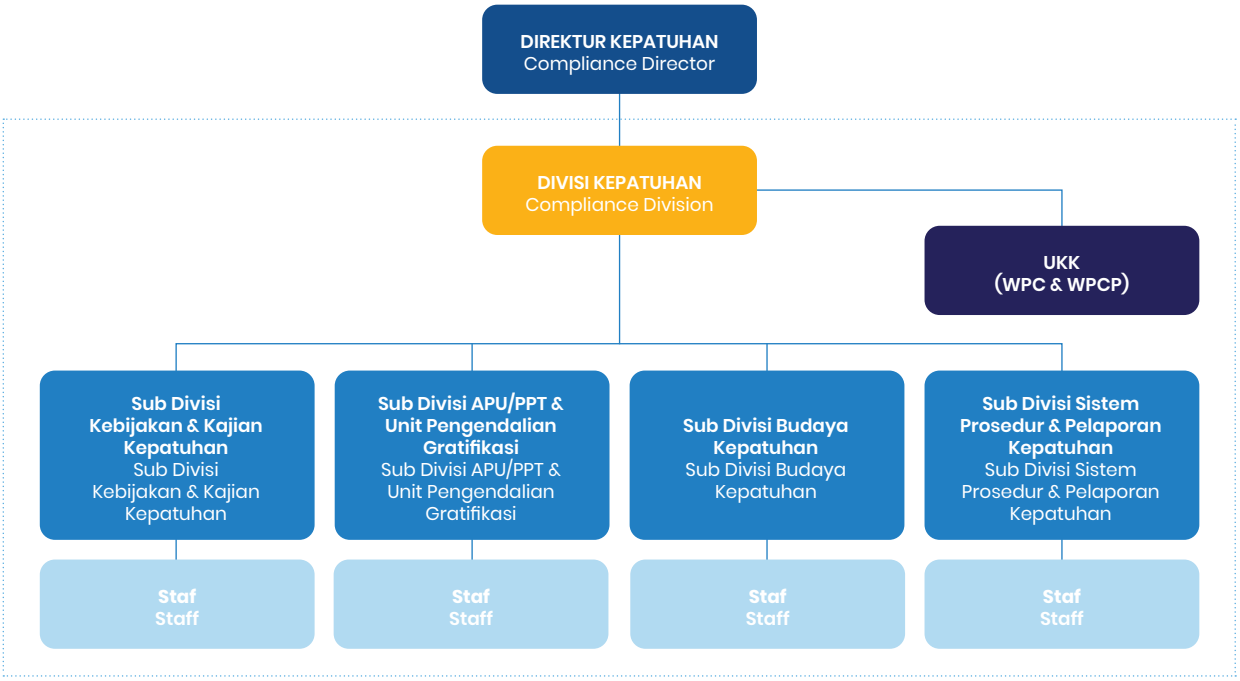

Divisi Manajemen Risiko: Risk Management Division:

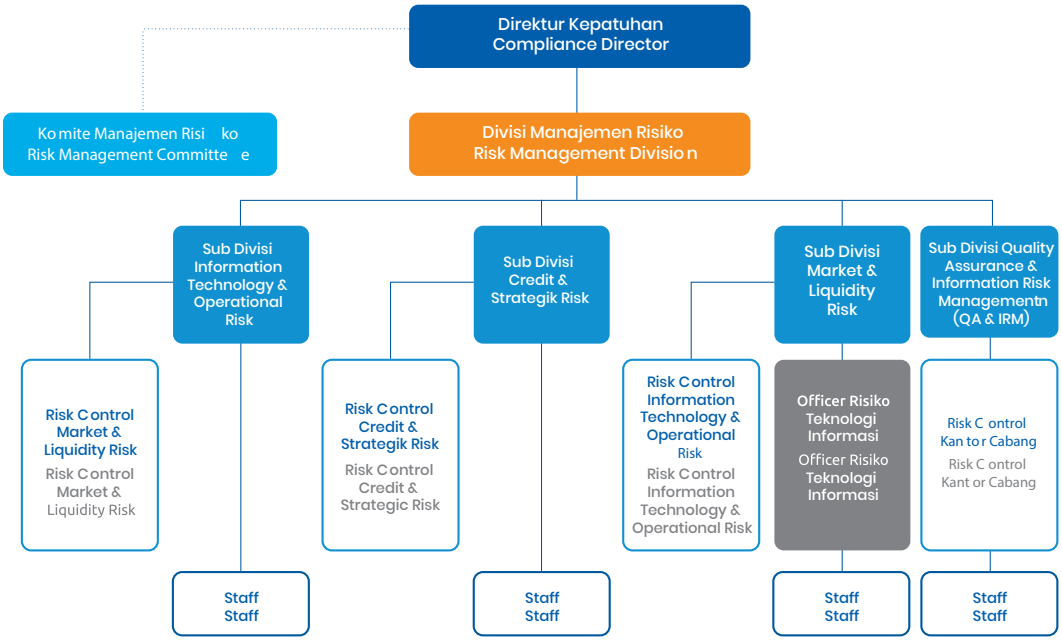

Penerapan fungsi kepatuhan terlihat melalui:

1. Pemberian kajian kepatuhan dan kajian risiko terhadap setiap produk dan aktivitas baru yang akan diselenggarakan oleh Bank, terlihat dari pemberian Kajian Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dilaksaksanakan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

The implementation of compliance functions is evident through:

1. The provision of compliance and risk assessments for every new product and activity to be conducted by the Bank, as evidenced by the Compliance and Risk Management Assessments carried out throughout 2025 as follows:

No.	Triwulan	Kajian Kepatuhan Compliance Review	Kajian Manajemen Risiko Risk Management Review	Quarter
1.	Triwulan I	42	33	First Quarter
2.	Triwulan II	50	49	Second Quarter
3.	Triwulan III	73	60	Third Quarter
4.	Triwulan IV	47	41	Fourth Quarter
	Total	**212**	**183**	**Total**

2. Pemberian surat terkait Fungsi Direktur Kepatuhan dalam tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

2. The issuance of letters related to the Compliance Director's duties in 2025 is detailed as follows:

No.	Triwulan	Bidang Kepatuhan Compliance Division	Bidang Manajemen Risiko Risk Management Division	Quarter
1.	Triwulan I	64	19	First Quarter
2.	Triwulan II	42	32	Second Quarter
3.	Triwulan III	22	14	Third Quarter
4.	Triwulan IV	45	25	Fourth Quarter
	Total	**173**	**89**	**Total**

3. Pemantauan Kepatuhan Atas Penyampaian Laporan Kepada Pihak Intern maupun Pihak Ekstern per triwulan;
4. Pemantauan pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui data laporan pemantauan Rencana Bisnis Bank meliputi pos - pos tertentu, rasio keuangan termasuk prinsip kehati-hatian antara lain Kewajiban Penyediaaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Giro Wajib Minimum (GWM), Agunan yang diambil Alih (AYDA) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per triwulan;
5. Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Transaksi Keuangan Dari dan Keluar Negeri yang dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sepanjang tahun 2025 ini dijabarkan sebagai berikut:

3. Monitoring of compliance with the submission of reports to internal and external parties on a quarterly basis;
4. Monitoring of the implementation of the principle of prudence through data from the Bank's Business Plan monitoring reports, covering specific items and financial ratios, including the principle of prudence such as the Minimum Capital Adequacy Requirement (MCAR), Quality of Earning Assets (QEA), Minimum Reserve Requirement (MRR), Foreclosed Assets (FA), and Maximum Credit Limit (MCL) on a quarterly basis;
5. Cash Financial Transactions (LTKT), Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM), and Inbound and Outbound Financial Transactions reported to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) for the year 2025 are broken down as follows:

No.	Triwulan	LTKT	LTKM	LTKL	Quarter
1.	Triwulan I	519	4	4	First Quarter
2.	Triwulan II	82	27	0	Second Quarter
3.	Triwulan III	99	26	1	Third Quarter
4.	Triwulan IV	106	3	0	Fourth Quarter
	Total	**806**	**60**	**5**	**Total**

6. Evaluasi terhadap Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank;
7. Pemantauan terhadap tindak lanjut komitmen Bank dengan Pihak Eksternal dan Pihak Internal yang dilaksanakan berdasarkan data temuan OJK dan SPOT Audit Intern SKAI dari Divisi Pengawasan & SKAI;

6. Evaluation of compliance risks faced by the Bank;
7. Monitoring of the Bank's follow-up on commitments to external and internal parties, conducted based on findings from the OJK and the SKAI Internal Audit Report from the Supervision & SKAI Division;

8. Pada tahun 2025, Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank yang pada Tahun 2025 ini tercantum dalam Surat Direktur Kepatuhan Nomor 1176/DIR-DKp/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 untuk Periode Juni 2025 dan Nomor 166/Dir-DKp/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 untuk periode Desember 2025, dengan Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan PT. BPD NTT.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati – hatian, adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya *non compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

Penyesuaian Dengan Peraturan Yang Ada

Sepanjang tahun 2025, Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, standar – standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional dan non operasional. Namun masih terdapat hal – hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik – praktik prinsip Tata Kelola dan praktek kepatuhan benar – benar melekat dalam kegiatan kerja sehari – hari. Upaya peningkatan kepatuhan juga diimplementasikan dengan cara menumbuhkan sifat patuh terhadap aturan yang berlaku bagi semua tingkatan organisasi, salah satu contohnya adalah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan, sosialisasi ketentuan, produk, layanan Bank dan pemberian penghargaan secara berkala dan tersistem seperti pengadaan Kuis *E-Learning* setiap Triwulan.

8. In 2025, the Bank has submitted periodic reports on the performance of its duties and responsibilities to the President Director, with copies sent to the Board of Commissioners or the relevant authorities in accordance with the Bank's organizational structure, which in 2025 is set forth in Compliance Director's Letter No. 1176/DIR-DKp/VII/2025 dated July 30, 2025, for the period ending June 2025, and No. 166/Dir-DKp/I/2026 dated January 22, 2026, for the period ending December 2025, regarding the Report on the Performance of Duties and Responsibilities of the Compliance Director of PT. BPD NTT.

In general, compliance implementation has been proceeding well, marked by improved adherence to the principles of prudence, accelerated completion times for compliance testing of draft procedures and policies, better analysis of the impact of external regulations on the Bank's internal policies through improved systems and frequency, and a reduction *in non-compliance issues* during compliance testing of draft business decisions.

Alignment with Existing Regulations

Throughout 2025, the Bank has strived to maintain compliance with applicable laws and regulations, other compliance standards established internally, provisions regarding good corporate governance, and the fulfillment of agreed-upon commitments, both to internal and external parties, particularly with respect to each operational unit by conducting periodic reviews of compliance across the majority of operational and non-operational units. However, there are still areas that need improvement, particularly regarding employees' understanding and adherence to the Bank's internal regulations and control systems for implementing applicable regulations; therefore, continuous improvements are being made to ensure that the principles of Corporate Governance and compliance practices are truly embedded in daily work activities. Efforts to enhance compliance are also implemented by fostering a culture of adherence to applicable rules across all organizational levels. One example is conducting education and training programs, disseminating information on Bank regulations, products, and services, and providing regular and systematic rewards, such as holding *E-Learning* Quizzes every quarter.

Kewajiban Penerapan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Upaya mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 08 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dilaksanakan Bank NTT dengan menerbitkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 207 tahun 2023 tentang Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Kebijakan Penerapan Program APU PPT Dan PPPSPM Di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur). Untuk meningkatkan pemahaman atas pedoman ini, Bank NTT selalu melaksanakan serangkaian sosialisasi kepada seluruh unit kerja yang ada pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Bank NTT akan terus memperbaiki berbagai kelemahan dalam hal kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK yang masih terkait dengan penerapan APU dan PPT.

Obligations Regarding the Implementation of AML and CFT (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing)

Efforts to implement Financial Services Authority Regulation No. 08 of 2023 dated June 14, 2023, regarding the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector, were carried out by Bank NTT through the issuance of a Board of Directors' Decision of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 207 of 2023 regarding the Policy on the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs within the East Nusa Tenggara Regional Development Bank (Policy on the Implementation of the AML, CFT, and PPTSP Programs within the Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank). To enhance understanding of these guidelines, Bank NTT consistently conducts a series of awareness-raising sessions for all operational units at the Head Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices. In addition, Bank NTT will continue to address various shortcomings regarding the obligation to submit Cash Transaction Reports to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), which are still related to the implementation of AML and CFT.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Implementation Of Internal Audit Functions

Pada Bank NTT, pelaksanaan fungsi audit intern tersebut dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI yang lingkup tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh unit kerja pada Bank NTT, Divisi Pengawasan & SKAI memiliki auditor intern yang ditempatkan di Kantor Pusat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengawasan & SKAI.

At Bank NTT, the internal audit function is carried out by the Supervision & SKAI Division, whose scope of duties includes examining the effectiveness of the internal control structure, risk management, and the performance of all work units at Bank NTT. The Supervision & SKAI Division has internal auditors stationed at the Head Office who, in the performance of their duties, report to the Head of the Supervision & SKAI Division.

Struktur Organisasi Divisi Pengawasan & Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT sesuai SK Direksi Nomor: 033 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama yang terlihat pada bagan di bawah ini:

Organizational Structure of the Supervision Division & Internal Audit Unit (SKAI)

Based on the Organizational Structure of Bank NTT pursuant to Board of Directors Decree No. 033 of 2023 dated March 20, 2023, regarding the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, SKAI operates directly under the supervision of the President Director, as shown in the chart below:

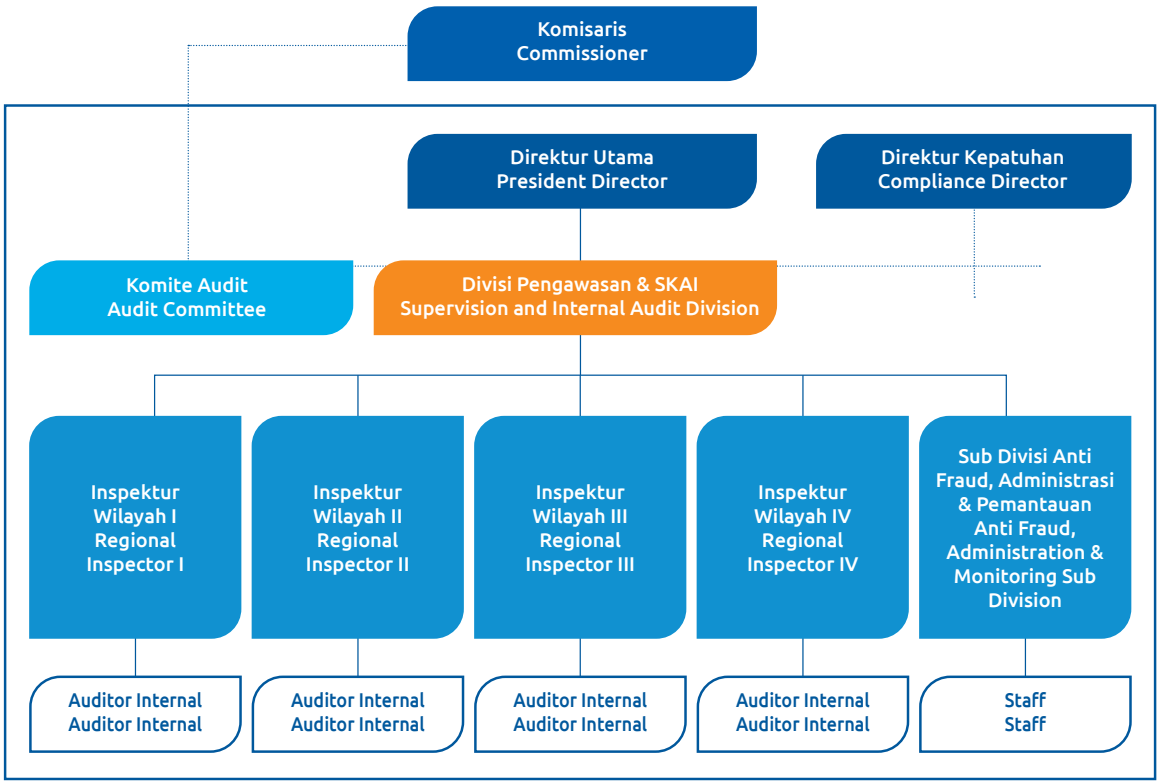

Profil Kepala SKAI

Max Daniel Siokain

Lahir di Kupang pada tanggal 25 Maret 1975. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI sejak tanggal 4 Juni 2024 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan mulai dari tanggal 7 Maret 2022. Memulai perjalanan karier pada PT. BPD NTT pada tahun 2002 dan terus mengalami perkembangan melalui jabatan Officer Administrasi Keuangan pada tahun 2008, Inspektur Wilayah pada tahun 2009, Pemimpin Cabang Rote Ndao pada tahun 2019, Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Kantor Cabang Utama Kupang pada tahun 2020 dan Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional pada Kantor Cabang Khusus Kupang pada tahun 2021. Memiliki kompetensi yang sangat memadai dalam menunjang tugas dan tanggungjawabnya seperti:

1. *Development Program Executive* (EDP)
2. Manajemen Risiko Jenjang 6
3. Kepatuhan Level 1 - Officer
4. Internal Auditor Tingkat Manajerial
5. *General Banking* Level 2

Komposisi Divisi Pengawasan & SKAI

Jumlah pegawai pada Divisi Pengawasan & SKAI PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Kepala Divisi;
2. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah I;
3. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah II;
4. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah III;
5. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah IV;
6. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Anti Fraud, Administrasi dan Pemantauan;
7. 13 (tiga belas) Internal Auditor Kantor Pusat;
8. 2 (tiga) orang Pelaksana.

Kualifikasi/Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Kualifikasi/sertifikasi yang dimiliki oleh pegawai pada Divisi Pengawasan & SKAI pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Profile of SKAI Head

Max Daniel Siokain

Born in Kupang on March 25, 1975. He has served as Head of the Supervision Division & SKAI since June 4, 2024, having previously served as Head of the Compliance Division starting March 7, 2022. He began his career at PT. BPD NTT in 2002 and continued to advance through the positions of Financial Administration Officer in 2008, Regional Inspector in 2009, Branch Manager of Rote Ndao in 2019, Deputy Branch Manager for Business at the Kupang Main Branch in 2020, and Deputy Branch Manager for Operations at the Kupang Special Branch in 2021. He possesses highly adequate competencies to support his duties and responsibilities, such as:

1. Executive Development Program (EDP)
2. Risk Management Level 6
3. Compliance Level 1 - Officer
4. Managerial-Level Internal Auditor
5. General Banking Level 2

Composition of the Supervision & SKAI Division

The number of employees in the Supervision & SKAI Division of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur in 2025 is 21 (twenty-one) people, consisting of:

1. 1 (one) Division Head;
2. 1 (one) Head of the Regional Inspectorate I Sub-Division;
3. 1 (one) Head of the Regional Inspectorate II Subdivision;
4. 1 (one) Head of the Regional Inspector Sub-Division III;
5. 1 (one) Head of the Regional Inspector Sub-Division IV;
6. 1 (one) Head of the Anti-Fraud, Administration, and Monitoring Subdivision;
7. 13 (thirteen) Internal Auditors at Headquarters;
8. 2 (two) Staff Members.

Qualifications/Certifications as an Internal Audit Professional

The qualifications and certifications held by employees in the Supervision & SKAI Division in 2025 are as follows:

No	Jenis kualifikasi/sertifikasi	Jumlah Number	Type of qualification/certification
1	Certified Forensic Auditor	4 orang 4 people	Certified Forensic Auditor
2	Certified Profesional Qualified Internal Auditor	5 orang 5 people	Certified Professional Qualified Internal Auditor
3	Certified Qualified Internal Auditor	5 orang 5 people	Certified Qualified Internal Auditor
4	Certified Anti Fraud Manager	2 orang 2 people	Certified Anti-Fraud Manager
5	Certified Practitioner Internal Auditor	11 orang 11 people	Certified Internal Auditor
6	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Uji Kompetensi Skema IT Auditor	3 orang 3 people	Competency-Based Training and Competency Assessment for the IT Auditor Scheme
7	Sertifikasi Kompetensi Level Auditor	14 orang 14 people	Auditor Level Competency Certification
8	Sertifikasi Kompetensi Level Audit Supervisor	12 orang 12 people	Audit Supervisor Competency Certification

Pendidikan dan Pelatihan

Diklat yang diikuti oleh Divisi Pengawasan & SKAI selama tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Internal Auditor terkait *Certified Forensic Auditor* (CFrA);
2. Pemeliharaan CfrA;
3. Sertifikasi Internal Auditor PIA;
4. Pemeliharaan QIA;
5. Resertifikasi QIA;
6. *Workshop* Teknis Bidang Operasional, Bisnis TI, Anti Fraud dan Pengadaan Barang & Jasa;
7. Pelatihan Teknik Audit Berbasis ISO 19011;
8. BSMR Jenjang 5,6 & 7;
9. *In House Training* pengakuan dan pengukuran Sewa Perbankan dalam PSAK 73 dan Sosialisasi dari Divisi SDM;
10. Seminar *Internal Liquidity Adequacy Asessment Process* (ILAAP);
11. Refreshment Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Jenjang 5;
12. Pelatihan Trading Surat Berharga;
13. Pelatihan aktivitas Treasury;
14. Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia serta Kantor Pengelola daftar Hitam Nasional (SP & FMI BI serta KPDHN);
15. Pelatihan *Treasury Risk Management for Risk Manager*.

Education and Training

The training programs attended by the Supervision & SKAI Division in 2025 are outlined as follows:

1. Internal Auditor Certification related to *Certified Forensic Auditor* (CFrA);
2. CfrA Maintenance;
3. PIA Internal Auditor Certification;
4. QIA Maintenance;
5. QIA recertification;
6. Technical *Workshops* on Operations, IT Business, Anti-Fraud, and Procurement of Goods & Services;
7. ISO 19011-Based Audit Techniques Training;
8. BSMR Levels 5, 6, and 7;
9. *In-House Training* on the Recognition and Measurement of Banking Leases under PSAK 73 and a Briefing from the HR Division;
10. *Internal* Seminar on the *Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP);
11. Refresher Course on the Rupiah Payment and Management System (SPPUR) Level 5;
12. Securities Trading Training;
13. Treasury Activities Training;
14. Outreach on the Compliance Assessment Report (LHPK) for Bank Indonesia's Payment Systems and Financial Market Infrastructure, as well as the National Blacklist Management Office (SP & FMI BI and KPDHN);
15. *Treasury Risk Management* Training *for Risk Managers*.

Program Kerja Divisi Pengawasan / SKAI tahun 2025

1. Program Audit:
   a. Spot audit Divisi Pengawasan & SKAI TB 2025 terhadap Kantor Cabang dan Kantor Pusat;
   b. Audit Bulanan (Desk Audit) oleh Internal Auditor Kantor Pusar terhadap Kantor Cabang dan Divisi;
   c. Audit Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) sebagai Bank pengelola Sistem Pembayaran Nasional (SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan BI-FAST) dan Daftar Hitam Nasional TB. 2024, pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat sesuai ketentuan Bank Indonesia;
   d. Audit Kas Titipan BI;
   e. Audit dengan tujuan tertentu (audit investigasi dengan *surprise audit*);
   f. Pemeriksaan atas kualitas data *Single Customer View* (SCV) dan keandalan sistem yang akan dilaporkan ke Lembaga Penjamin Simpanan;
   g. Pemeriksaan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2016);
   h. Pemeriksaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2021);
   i. Kaji ulang ketahanan *cyber* sesuai SEOJK Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum;
   j. Audit TI menyeluruh karena adanya pendampingan oleh auditor eksternal dalam rangka *transfer knowledge* ke auditor internal;
   k. Audit IT sistem pembayaran;
   l. Audit keamanan sistem informasi dan ketahanan siber;
   m. *Review* SKAI oleh pihak ekstern (periode Juli 2022 s/d Juni 2025) dan kaji ulang penerapan strategi anti *fraud* serta kaji ulang terhadap fungsi audit internal atas penyelenggaraan TI;
   n. Review SOP Strategi Anti Fraud & SOP SKAI;

2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Divisi Pengawasan & SKAI:
   a. Sertifikasi Internal Auditor terkait Certified Forensic Auditor (CFrA);
   b. Pemeliharaan CfrA;
   c. Sertifikasi Internal Auditor PIA;
   d. Pemeliharaan QIA;
   e. Resertifikasi QIA;
   f. Workshop Teknis Bidang Operasional, Bisnis TI, Anti Fraud dan Pengadaan Barang & Jasa;
   g. Pelatihan Teknik Audit Berbasis ISO 19011;
   h. BSMR Jenjang 5,6 & 7;

2025 Work Program of the Supervision Division / SKAI

1. Audit Program:
   a. Spot audit by the Supervision & SKAI Division for FY 2025 of Branch Offices and the Head Office;
   b. Monthly Audit (Desk Audit) by the Head Office Internal Auditor of Branch Offices and Divisions;
   c. Audit of the Compliance Assessment Report (LHPK) as the managing bank of the National Payment System (SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, and BI-FAST) and the 2024 National Blacklist, at Branch Offices and the Head Office in accordance with Bank Indonesia regulations;
   d. Audit of BI Cash Deposits;
   e. Special-purpose audits (investigative audits with surprise audits);
   f. Review of the quality of Single Customer View (SCV) data and the reliability of the system to be reported to the Deposit Insurance Corporation;
   g. Examination of the Anti-Bribery Management System (ABMS) (ISO 37001:2016);
   h. Audit of the Information Security Management System (ISO 27001:2021);
   i. Review of cyber resilience in accordance with OJK Regulation No. 29 of 2022 on Cyber Resilience and Security for Commercial Banks;
   j. Comprehensive IT audit due to the involvement of external auditors to facilitate knowledge transfer to internal auditors;
   k. IT audit of payment systems;
   l. Information system security and cybersecurity audits;
   m. External review of the SKAI (for the period July 2022 to June 2025) and a review of the implementation of anti-fraud strategies, as well as a review of the internal audit function regarding IT operations;
   n. Review of the Anti-Fraud Strategy SOP & SKAI SOP;
2. Improvement of the competencies of the Human Resources of the Supervision & SKAI Division:
   a. Certification of Internal Auditors as Certified Forensic Auditors (CFrA);
   b. Maintenance of CFrA certification;
   c. PIA Internal Auditor Certification;
   d. QIA Maintenance;
   e. QIA Recertification;
   f. Technical Workshops on Operations, IT Business, Anti-Fraud, and Procurement of Goods & Services;
   g. ISO 19011-Based Audit Techniques Training;
   h. BSMR Levels 5, 6, and 7;

Laporan Audit Internal

Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun 2025, Divisi Pengawasan & SKAI telah melakukan:

1. Spot Audit Divisi Pengawasan & SKAI TB. 2025 terhadap Kantor Cabang dan Kantor Pusat
   Spot audit dilaksanakan berdasarkan Risk based Audit dengan rencana dilakukan pada 10 (sepuluh) Kantor Cabang, dan telah dilaksanakan seluruhnya pada TW III 2025 sesuai Surat Tugas No. 045/DIRDPs/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, yaitu:
   a. KCU Kupang, 8 s/d 24 April 2025
   b. KC Khusus, 8 s/d 24 April 2025
   c. Cabang Waingapu, 10 s/d 16 Juni 2025
   d. Cabang Waibakul, 18 s/d 21 Juni 2025
   e. Cabang Waitabula, 23 s/d 27 Juni 2025
   f. Cabang Bajawa, 28 Juli s/d 2 Agustus 2025
   g. Cabang Ruteng, 4 s/d 9 Agustus 2025
   h. Cabang Mbay, 25 s/d 29 Agustus 2025
   i. Cabang Larantuka, 15 s/d 20 September 2025
   j. Cabang Betun, 22 s/d 26 September 2025
2. Audit Bulanan (Desk Audit) oleh Internal Auditor Kantor Pusat terhadap Kantor Cabang dan Divisi
3. Audit Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) sebagai Bank Pengelola Sistem Pembayran Nasional dan Daftar Hitam Nasional Tahun Buku 2024 pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat sesuai ketentuan Bank Indonesia;
4. Audit Kas Titipan BI;
5. Audit dengan tujuan tertentu (Audit Investigasi dengan Surprise Audit);
6. Pemeriksaan atas kualitas data Single Customer View (SCV) dan keandalan system yang akan dilaporkan ke LPS;
7. Pemeriksaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (ISO 37001:2016);
8. Pemeriksaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2021);
9. Kaji Ulang Ketahanan Cyber Sesuai SE OJK No 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum;
10. Audit TI menyeluruh karena adanya pendampingan oleh auditor eksternal dalam rangka transfer knowledge ke auditor internal;
11. Audit IT Sistem Pembayaran;
12. Audit Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber.

Internal Audit Report

In accordance with the 2025 annual audit work program, the Supervision & SKAI Division has conducted:

1. Spot Audit by the Supervision & SKAI Division for Fiscal Year 2025 of Branch Offices and the Head Office
   The spot audit was conducted based on a risk-based audit approach, with plans to audit 10 (ten) branch offices, and was fully carried out in the third quarter of 2025 in accordance with Assignment Letter No. 045/DIRDPs/III/2025 dated March 20, 2025, namely:
   a. KCU Kupang, April 8–24, 2025
   b. Special Branch Office, April 8–24, 2025
   c. Waingapu Branch, June 10–16, 2025
   d. Waibakul Branch, June 18–21, 2025
   e. Waitabula Branch, June 23–27, 2025
   f. Bajawa Branch, July 28–August 2, 2025
   g. Ruteng Branch, August 4–9, 2025
   h. Mbay Branch, August 25–29, 2025
   i. Larantuka Branch, September 15–20, 2025
   j. Betun Branch, September 22–26, 2025
2. Monthly Audit (Desk Audit) by the Head Office Internal Auditor of Branches and Divisions
3. Audit of the Compliance Assessment Report (LHPK) as the Bank Managing the National Payment System and the National Blacklist for Fiscal Year 2024 at Branch Offices and the Head Office in accordance with Bank Indonesia regulations;
4. Audit of BI Cash Deposits;
5. Special-purpose audits (Investigative Audits with Surprise Audits);
6. An audit of the quality of Single Customer View (SCV) data and system reliability to be reported to the LPS;
7. Audit of the Anti-Bribery Management System (ABMS) (ISO 37001:2016);
8. Audit of the Information Security Management System (ISO 27001:2021);
9. Cyber Resilience Review in accordance with OJK Circular Letter No. 29 of 2022 on Cyber Resilience and Security for Commercial Banks;
10. Comprehensive IT audit due to the involvement of external auditors to facilitate knowledge transfer to internal auditors;
11. IT Audit of Payment Systems;
12. Information System Security and Cyber Resilience Audit.

Pengembangan Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, pada tahun 2025 ini Bank telah mereview kebijakan tentang Piagam Audit Intern Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 148/DK-PTBPDNTT/IX/2025.

Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT bertujuan memberikan input dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah bagi perbaikan serta peningkatan kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern;
2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh aspek/kegiatan Bank NTT pada semua tingkatan manajemen pada seluruh unit kerja Bank NTT.

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI dalam perannya sebagai Auditor Internal melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola bank. Kegiatan ini disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank dengan dukungan sumber daya, metodologi, perangkat dan teknik audit yang memadaKedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT.

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;

Internal Audit Development

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019, regarding the Implementation of Internal Audit Functions at Commercial Banks, in 2025 the Bank has reviewed the policy regarding the Internal Audit Charter of the Internal Audit Unit (SKAI) of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 148/DK-PTBPDNTT/IX/2025.

Objectives and Scope of Activities of the Bank NTT Internal Audit Unit

1. The activities carried out by the Bank NTT Internal Audit Unit aim to provide valuable input and recommendations for improvements to enhance the quality and effectiveness of risk management, as well as the adequacy and effectiveness of internal controls;
2. The scope of activities of the Bank NTT Internal Audit Unit includes providing *assurance* and consultation regarding the effectiveness of the internal control structure, risk management, and performance of all aspects/activities of Bank NTT at all management levels across all Bank NTT work units.

Functions of the Internal Audit Unit (SKAI)

In its role as Internal Auditor, SKAI conducts assurance and consulting activities that are independent and objective, with the aim of enhancing value and improving the bank's operations through a systematic approach, by evaluating and enhancing the effectiveness of risk management, controls, and the bank's governance processes. These activities are tailored to the size, characteristics, and complexity of the bank's operations, supported by adequate resources, methodologies, tools, and audit techniques.

Status of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit of Bank NTT is structured to ensure the independence and objectivity of the performance of its duties and responsibilities as mandated by the regulations, as follows:

1. The Internal Audit Unit of Bank NTT is led by a Head who reports directly to the President Director;

2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
4. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit;
5. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit, hanya karena Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana diatur dalam ketentuan intern dan ekstern yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas dan bukan karena temuan hasil pemeriksaannya;
6. Sesuai Struktur Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT, Kepala SKAI dibantu oleh 4 (empat) orang Inspektur Wilayah serta Kepala Sub Divisi Anti Fraud, Administrasi dan Pemantauan beserta Internal Auditor dan staf auditor.

Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah :
   a. Mengembangkan Rencana Tahunan dengan menekankan pada bidang / kegiatan menggunakan metode audit berbasis risiko yang tepat untuk mengevaluasi prosedur/sistem kontrol yang ada untuk mendapatkan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan;
   b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana;
   c. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank NTT serta memberikan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan;

2. In carrying out its duties, the Internal Audit Unit submits reports to the President Director or the Board of Commissioners;
3. The reports referred to in paragraph (2) are submitted to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Director overseeing compliance functions;
4. The Head of the Internal Audit Unit (SKAI) of Bank NTT is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the audit committee;
5. The President Director may dismiss the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) of Bank NTT, after obtaining the approval of the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the audit committee, solely because the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) of Bank NTT does not meet the requirements and obligations as an auditor of the Internal Audit Unit (SKAI) as stipulated in applicable internal and external regulations and/or has failed or is incapable of performing their duties, and not due to the findings of their audit;
6. In accordance with the organizational structure of the Internal Audit Unit of Bank NTT, the Head of the Internal Audit Unit is assisted by four Regional Inspectors, as well as the Heads of the Anti-Fraud, Administration, and Monitoring Subdivisions, along with internal auditors and audit staff.

Duties and Responsibilities of the Bank NTT Internal Audit Unit

1. The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are:
   a. Developing an Annual Plan with a focus on specific areas/activities using appropriate risk-based audit methods to evaluate existing control procedures/systems to ensure that the company's objectives and goals can be achieved optimally and sustainably;
   b. Identifying all opportunities to improve and enhance the efficiency and effectiveness of resource and fund utilization;
   c. Testing and evaluating the effectiveness of the implementation of internal control systems and risk management systems in accordance with Bank NTT's Board of Directors' policies, as well as providing consultation to add value and improve the quality of risk management controls and corporate governance;

d. Membantu Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit;
e. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, bisnis, sumber daya manusia, Teknologi Sistem Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung;
f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Direktur Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang hasil audit kepada semua tingkatan manajemen;
h. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan baik oleh internal maupun eksternal;
i. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (bulan Juni dan Desember) dengan tembusan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi lainnya;
j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan;
k. Bekerja sama dengan Komite Audit;
l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya;
m. Memastikan fungsi audit internal dikelola dengan auditor yang profesional dan kompeten, dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang memadai untuk secara efektif melaksanakan rencana audit tahunan;
n. Menyusun program untuk menguji dan mengevaluasi kualitas audit yang dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan audit selanjutnya;
o. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi auditor;
p. Melakukan audit investigasi/pendalaman sesuai dengan permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut audit umum terhadap suatu objek atau persitiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau fraud apabila diperlukan.

d. Assist the CEO, the Board of Commissioners, and the Audit Committee in performing oversight and guidance by operationalizing the planning, implementation, and monitoring of follow-up actions on audit findings;
e. Conducting analyses and assessments in the areas of finance, accounting, operations, business, human resources, information systems technology, and other activities through direct and indirect examinations;
f. Preparing and submitting Audit Reports to the CEO, with copies to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Compliance Director on a periodic basis in accordance with applicable regulations;
g. Provide objective recommendations for improvement and information regarding audit findings to all levels of management;
h. Monitor, analyze, and report on the implementation of recommended corrective actions, whether suggested by internal or external parties;
i. Preparing Implementation Reports and Key Audit Findings and submitting them to the Financial Services Authority every semester (June and December), with copies to the President Director, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors;
j. Prepare and submit reports on any audit findings that are expected to disrupt the business continuity of Bank NTT to the Financial Services Authority;
k. Collaborate with the Audit Committee;
l. Develop written policies and procedures to serve as guidelines for Internal Auditors in performing their duties;
m. Ensure that the internal audit function is managed by professional and competent auditors with sufficient knowledge, skills, and experience to effectively implement the annual audit plan;
n. Developing programs to test and evaluate the quality of audits conducted to improve future audits;
o. Conducting ongoing training in accordance with the auditors' areas of responsibility and competencies;
p. Conduct investigative/in-depth audits as requested by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, or as a follow-up to a general audit of an object or event suspected of containing indications of violations and/or fraud, if necessary.

2. Wewenang Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT
   a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh fungsi/tingkatan organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga (bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
   b. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan mengalokasikan sumber daya dan dana, menentukan frekuensi, menentukan personil, menentukan teknik/metodologi audit, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan;
   c. Memiliki akses/jalur berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit maupun dengan Direksi;
   d. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
   e. Melakukan audit pendalaman (khusus/ investigasi) bila dianggap perlu;
   f. Memberikan rekomendasi baik itu berupa sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, atas suatu permasalahan yang diaudit;
   g. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan regulator terkait pelaksanaan tugas;
   h. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu;
   i. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit;
   j. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
   k. Melakukan Skorsing dan/atau non aktif dari jabatan kepada pegawai Bank NTT dalam rangka pemeriksaan.

Auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT harus menerapkan dan menjunjung tinggi Kode Etik sebagai berikut:

1. Integritas;
   a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, tekun, bertanggung jawab, dan terpercaya;
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan perundangan dan profesinya;
   c. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
   d. Menghindari benturan kepentingan;
   e. Memegang teguh prinsip-prinsip audit dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun;

2. Authority of the Bank NTT Internal Audit Unit
   a. Has unrestricted access to all functions/levels of the organization, records, employees, resources, funds, and other assets of Bank NTT, as well as third parties (when deemed necessary) related to the conduct of audits and consultations;
   b. To plan and conduct audits by allocating resources and funds, determining the frequency, assigning personnel, selecting audit techniques/ methodologies, choosing subjects, and defining the scope of audit activities as required;
   c. Have direct access/lines of communication with the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Board of Directors;
   d. Conducting regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
   e. Conducting in-depth (special/investigative) audits when deemed necessary;
   f. Provide recommendations, whether in the form of sanctions or necessary improvements, regarding issues identified during the audit;
   g. Coordinate with external auditors and regulators regarding the performance of duties;
   h. Engage external parties to conduct audits when deemed necessary;
   i. Conducting regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee regarding the implementation and follow-up of audit results;
   j. Attending strategic meetings;
   k. Imposing suspension and/or removal from office on Bank NTT employees in connection with an investigation.

Auditors of the Bank NTT Internal Audit Unit (SKAI) must apply and uphold the following Code of Ethics:

1. Integrity;
   a. Reliable, firm, honest, diligent, responsible, and trustworthy;
   b. Comply with the law and make disclosures in accordance with legal regulations and professional standards;
   c. Maintaining the confidentiality of information obtained in the performance of duties;
   d. Avoiding conflicts of interest;
   e. Adhering strictly to auditing principles and not being easily swayed by pressure from any party;

2. Obyektivitas;
   a. Tidak menerima apapun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap professional judgment auditor;
   b. Senantiasa menggunakan professional judgment dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun;
   c. Mengungkapkan semua fakta yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview;
3. Profesionalisme
   a. Auditor Satuan Kerja Audit Intern harus memiliki profesionalisme sebagai acuan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi :
      1) Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya serta pengetahuan/pemahaman tentang semua aspek bisnis dan operasional perusahaan.
      2) Berperilaku loyal terhadap profesi internal audit.
      3) Memiliki kemampuan untuk mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi yang berkelanjutan.
      4) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kemahiran profesinya secara cermat dan seksama.
      5) Memiliki kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif dengan pihak intern maupun ekstern.
   b. Auditor Satuan Kerja Audit Intern harus memiliki Sikap Mental dan Etika serta Tanggung jawab Profesi yang tinggi, sehingga kualitas kerjanya dapat dipertanggungjawabkan untuk terwujudnya perkembangan Bank NTT yang wajar dan sehat.
4. Independensi
   a. Tidak terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian secara objektif, termasuk kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan perusahaan.
   b. Auditor Satuan Kerja Audit Intern senantiasa memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta penilaian sesuai dengan profesi dan Standar Audit yang berlaku umum.

2. Objectivity;
   a. Not accepting anything that impacts or is suspected of impacting the auditor's professional judgment;
   b. Always exercise professional judgment in performing duties under any conditions and circumstances;
   c. Disclosing all known facts, the non-disclosure of which could distort the report on the reviewed activities;

3. Professionalism
   a. Internal Audit Unit auditors must demonstrate professionalism as a guiding principle in exercising their authority and fulfilling their responsibilities, which include:
      1) Sufficient knowledge in their field of work, namely knowledge of audit techniques and other disciplines relevant to their specialization, as well as knowledge/ understanding of all aspects of the company's business and operations.
      2) Demonstrating loyalty to the internal audit profession.
      3) Possessing the ability to maintain professional quality through continuing professional education.
      4) Possesses the ability to perform professional duties with precision and care.
      5) Possess the ability to interact and communicate effectively, both verbally and in writing, with internal and external parties.
   b. Internal Audit Unit auditors must possess a strong professional mindset, high ethical standards, and a strong sense of professional responsibility, so that the quality of their work can be held accountable for the realization of the sound and healthy development of Bank NTT.
4. Independence
   a. Not involved in any activities or relationships that could or might reasonably be expected to hinder objective judgment, including any activities or relationships that result in a conflict of interest with the company.
   b. Internal Audit Unit auditors must always maintain independence when conducting audits and expressing opinions and assessments in accordance with professional standards and generally accepted auditing standards.

c. Auditor Satuan Kerja Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari obyek yang diaudit, serta bebas dari pertentangan/benturan kepentingan;

5. Kerahasiaan
   a. Wajib mematuhi ketentuan rahasia bank yang berlaku.
   b. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
   c. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.

c. Internal Audit Unit auditors must not have the authority or responsibility to carry out activities related to the audited entity, and must be free from conflicts of interest;

5. Confidentiality
   a. Must comply with applicable bank secrecy regulations.
   b. Exercise caution in using and safeguarding information obtained in the performance of their duties.
   c. Not use information for the benefit of anyone and/or in any manner that would conflict with the law and/or company regulations.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Implementation Of The External Audit Function

Salah satu keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 antara lain memberikan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT, Penunjukkan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank NTT untuk Tahun Buku 2025. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan, Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun Buku 2025 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tanggal 31 Desember 2025 dengan opini yang sama dengan tahun 2023 yaitu **"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material".**

Eksternal Audit

Untuk pelaksanaan audit Bank oleh pihak eksternal, maka Dewan Komisaris dengan menggunakan amanah yang diberikan oleh RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas Laporan keuangan Bank NTT Tahun Buku 2025 dengan total biaya sebesar Rp. 672.000.000,-, sesuai Kontrak Kerja Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2025 antara PT. BPD NTT dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Atas penunjukkan ini KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tidak memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan Bank NTT.

One of the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (PAF) as an independent external auditor to examine Bank NTT's financial statements. The appointment of a PAF registered with Bank Indonesia/OJK is based on the recommendations of the Audit Committee. Based on this approval, the Board of Commissioners, in accordance with the Audit Committee's recommendation, appointed the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Partners to conduct the audit of Bank NTT's financial statements for the 2025 fiscal year. The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners is an entity registered with Bank Indonesia and BAPEPAM-LK, did not provide any other services to Bank NTT during that year, thereby avoiding any potential conflict of interest, and has not performed audit work on Bank NTT's financial statements for more than 5 (five) consecutive years. The appointed KAP submitted the audit results and *management letter* to the Bank in a timely manner, is capable of working independently, and complies with public accountant professional standards, the engagement agreement, and the defined scope of the audit, The audit results of Bank NTT's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year, submitted by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners on December 31, 2025, carried the same opinion as in 2023, namely **"Presented fairly in all material respects."**

External Audit

For the conduct of the Bank's audit by an external party, the Board of Commissioners, exercising the authority granted by the General Meeting of Shareholders, has appointed the Public Accounting Firm (PAF) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners to audit the financial statements of Bank NTT for the 2025 fiscal year, at a total cost of Rp. 672,000,000, in accordance with the Financial Statement Engagement Contract for PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur for the 2025 fiscal year between PT. BPD NTT and the Public Accounting Firm (PAF) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners. In connection with this appointment, the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners will provide no services other than the audit of Bank NTT's financial statements.

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berikut Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank NTT selama tahun 2021– 2025:

Public Accounting Firm (KAP)

The following Public Accounting Firms audited Bank NTT's financial statements for the years 2021–2025:

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Audit Lainnya Other Audits	Fee Audit (Rp) Audit Fee (IDR)	Opini Audit Audit Opinion
2025	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Rp. 672.000.000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material", "Presents a True and Fair View in All Material Aspects",
2024	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Audit Laporan Keuangan Audit of Financial Statements	Rp. 671.328.000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material", "Presented a True and Fair View in All Material Respects",
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Rp, 570,000,000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material", "Presented fairly in all material respects,"
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Rp, 480,000,000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Materia "Presented fairly in all material respects," I",
2021	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	Rp, 480,000,000,-	"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material", "Presents a True and Fair View in All Material Respects,"

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2025

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank NTT berada pada **peringkat 2 (PK-2)** yang menunjukkan bahwa Bank secara umum **Sehat** sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian berikut:

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT, INCLUDING INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Bank Health Rating for 2025

The Composite Bank Health Rating for Bank NTT is at **Level 2 (PK-2)**, indicating that the Bank **is** generally **healthy** and is therefore deemed capable of withstanding significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors, as reflected in the ratings of the following assessment factors

No	FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN	PERINGKAT INDIVIDUAL Individual Ranking	ASSESSMENT FACTORS
1,	Profil Risiko	2	Risk Profile
2,	Good Corporate Governance	3	Good Corporate Governance
3,	Rentabilitas	2	Profitability
4,	Permodalan	2	Capital
	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	2	Bank Health Rating

1. PROFIL RISIKO

Penilaian terhadap Profil Risiko Bank berada pada peringkat 2 (***Low to Moderate***) yang menunjukkan bahwa:

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong **rendah *(Low to Moderate)*** selama periode waktu tertentu di masa datang,

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit **Memadai *(Satisfactory)***, Terdapat kelemahan minor, dan kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian segera untuk ditindaklanjuti,

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian terhadap Good Corporate Governance Bank yaitu peringkat 3 (Cukup Baik) Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

3. RENTABILITAS

Rentabilitas Bank mendapat peringkat 2 (Memadai). Komponen yang mendukung Core Earning dinilai stabil yaitu rasio Core ROA posisi Desember 2025 sebesar 10.87% menurun dari Juni 2025 sebesar 16,99% dan meningkat dari posisi Desember 2024 sebesar 10,48%. Prospek Rentabilitas di masa datang juga dinilai memadai dan sedikit mengalami peningkatan dibandingkan posisi Desember 2024, dimana persentase Pendapatan Operasional terhadap Total Kewajiban selain modal Posisi Desember 2025 sebesar 8.25% meningkat dari posisi Juni 2025 sebesar 4,67% namun menurun dari posisi Desember 2024 sebesar 9,94% dan rasio CAR sebesar 26,70% berada di atas rasio yang diwajibkan regulator sesuai profil risiko 9% sampai dengan kurang dari 10%.

4. PERMODALAN

Permodalan Bank dinilai peringkat 2 (Memadai) yang tercermin dari kualitas dan kecukupan permodalan yang relatif memadai terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank, dan juga kualitas komponen permodalan pada umumnya

1. RISK PROFILE

The Bank's risk profile is rated at Level 2 (***Low to Moderate***), indicating that:

a. Considering the Bank's business activities, the likelihood of losses the Bank faces from composite inherent risks is classified as **low *(Low to Moderate)*** over a specific future period,

b. The quality of the Bank's risk management implementation ***is satisfactory*** overall; there are minor weaknesses, and these weaknesses require immediate attention for follow-up,

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The assessment of the Bank's Good Corporate Governance is a rating of 3 (Fairly Good), reflecting that the Bank's management has implemented corporate governance that is generally fairly good. This is reflected in the fairly adequate fulfillment of the principles of good corporate governance. Where there are weaknesses in the implementation of the principles of good corporate governance, these weaknesses are generally significant and require sufficient attention from the Bank's management.

3. PROFITABILITY

The Bank's profitability is rated 2 (Adequate). The components supporting core earnings are assessed as stable; specifically, the core ROA ratio as of December 2025 stood at 10.87%, down from 16.99% in June 2025 but up from 10.48% in December 2024. The outlook for future profitability is also assessed as adequate and shows a slight improvement compared to December 2024, where the ratio of Operating Income to Total Non-Equity Liabilities as of December 2025 stands at 8.25%, up from 4.67% in June 2025 but decreased from the December 2024 level of 9.94%, and the CAR ratio of 26.70% is above the regulator's required ratio of 9% to less than 10% based on the risk profile.

4. CAPITAL

The Bank's capital adequacy is rated at Level 2 (Adequate), as reflected by the quality and adequacy of its capital, which is relatively sufficient given its risk profile. This is supported by robust capital management aligned with the Bank's characteristics, business scale, and operational complexity, and the quality of its capital components

baik, permanen serta dapat menyerap kerugian. Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mendukung Permodalan Bank.

Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dimana secara rasio memenuhi persyaratan minimum serta dapat mengcover seluruh risiko yang dihadapi Bank. Hal tersebut tercermin dari rasio Modal terhadap ATMR sebesar 26,70% berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan REGULATOR sesuai profil Risiko yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10%.

is generally sound, permanent, and capable of absorbing losses. The Bank has good access to capital sources; in this regard, the Local Government is committed to supporting the Bank's capital.

The Bank has an adequate capital level, where the capital-to-ATMR ratio meets the minimum requirements and can cover all risks faced by the Bank. This is reflected in the Capital-to-ATMR ratio of 26.70%, which is above the minimum requirement set by the REGULATOR in accordance with the risk profile, namely 9% to less than 10%.

Laporan Profil Risiko

Hingga akhir tahun 2025 penilaian terhadap profil risiko Bank berada pada peringkat 2 ***(Low To Moderate)*** sesuai dengan hasil Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) jenis risiko, terdapat 1 (satu) jenis risiko yang berada pada peringkat *Moderate* dan 7 (tujuh) jenis risiko berada pada peringkat *Low To Moderate*. Peringkat Risiko Bank secara keseluruhan adalah *Low To Moderate* dengan trend Tetap/Stabil.

Risk Profile Report

As of the end of 2025, the Bank's risk profile is rated at Level 2 ***(Low to Moderate)*** according to the Financial Services Authority's assessment, which indicates that out of 8 (eight) risk categories, 1 (one) is rated *Moderate* and 7 (seven) are rated *Low to Moderate*. The Bank's overall risk rating is *Low to Moderate* with a Stable trend.

No	Profil Risiko Risk Profile	Periode Desember 2025 December 2025 Period			Periode Desember 2024 Period: December 2024		
		Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Quality Rating Risk Management	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Quality Rating Risk Management	Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating
1	Risiko Kredit Credit Risk	*Moderate (3)*	*Fair (3)*	*Moderate (3)*	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*
2	Risiko Pasar Market Risk	*Low To Moderate (2)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*
3	Risiko Likuiditas Liquidity Risk	*Low To Moderate (2)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*
4	Risiko Operasional Operational Risk	*Moderate (3)*	*Fair (3)*	*Moderate (3)*	*Moderate (3)*	*Fair (3)*	*Moderate (3)*
5	Risiko Hukum Legal Risk	*Low To Moderate (2)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*
6	Risiko Reputasi Reputational Risk	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*
7	Risiko Stratejik Strategic Risk	*Low To Moderate (2)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*
8	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Fair (3)*	*Low To Moderate (2)*
Peringkat Komposit Composite Rating		*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*	*Moderate (3)*	*Satisfactory (2)*	*Low To Moderate (2)*

Adapun hasil penilaian atau *self assessment* terhadap penerapan tata kelola perusahaan Bank NTT adalah sebagai berikut:

The results of the assessment or *self-assessment* of the implementation of corporate governance at Bank NTT are as follows:

HasiL Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG
OJK Assessment Results on GCG Implementation

Peringkat Rating	Desember 2023 December 2023	Desember 2024 December 2024	Desember 2025 December 2025
Individual	Hasil Penilaian terhadap penerapan tata kelola dinilai sama dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, potensi kerugian dan upaya perbaikan yang dilakukan The assessment results regarding the implementation of corporate governance are evaluated by considering the bank's business activities, potential losses, and corrective actions taken	Hasil Penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola Bank NTT masih dinilai sama dengan self assessment yang dilakukan oleh Bank dengan pertimbangan bahwa beberapa upaya perbaikan yang dilakukan belum menunjukkan outcome yang memuaskan The assessment results regarding the implementation of corporate governance at Bank NTT remain consistent with the self-assessment conducted by the Bank, taking into account that some of the corrective measures taken have not yet yielded satisfactory outcomes	Hasil Penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola Bank NTT masih dinilai sama dengan self assessment yang dilakukan oleh Bank dengan pertimbangan bahwa beberapa upaya perbaikan yang dilakukan belum menunjukkan outcome yang memuaskan The assessment results regarding the implementation of corporate governance at Bank NTT are still considered the same as the self-assessment conducted by the Bank, taking into account that some of the corrective actions taken have not yet shown satisfactory outcomes or that are satisfactory

Unit manajemen risiko sebagai lapisan kedua dari sistem *three lines of defence* tentunya memiliki fungsi utama yakni menjalankan fungsi *controlling* dan *monitoring* risiko secara keseluruhan atas penerapan pengelolaan kegiatan operasional (*risk enterprise management*), Fungsi *controlling* dan *monitoring* ini adalah penetapan kebijakan manajemen risiko yang meliputi beberapa elemen mendasar yaitu :

1. *Risk appetite* dapat diartikan sebagai selera risiko di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, dan memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada, *Risk appetite* lebih bersifat strategis,
2. *Risk tolerance*, dapat diartikan toleransi risiko yang berani diambil oleh suatu organisasi (*risk owner*) terhadap sejumlah risiko untuk mencapai tujuan, Risk tolerance lebih bersifat taktikal dan operasional, Selain itu fungsi *controlling* dan *monitoring* ini juga termasuk diantaranya adalah sebagai *counterpart* (rekan) dari masing-masing unit kerja untuk berkonsultasi mengenai implementasi dari risiko, Tentu saja fungsi reporting termasuk didalam *controlling* dan *monitoring*.

The risk management unit, as the second line *of defense* in *the three lines of defense* system, naturally has the primary function of *overseeing* and *monitoring* overall risk in the implementation of *enterprise risk management*. These *oversight* and *monitoring* functions involve establishing risk management policies that encompass several fundamental elements, namely:

1. *Risk appetite* can be defined as the organization's willingness to accept, monitor, defend against, and maximize opportunities through available avenues; *risk appetite* is more strategic in nature,

2. *Risk tolerance* can be defined as the level of risk an organization (*risk owner*) is willing to accept to achieve its objectives; risk tolerance is more tactical and operational. Additionally, these *controlling* and *monitoring* functions also include serving as a *counterpart* to each work unit for consultation regarding risk implementation. Of course, the reporting function is included within *controlling* and *monitoring*.

Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank berkaitan dengan risiko reputasi, Bank telah menetapkan *risk appetite, risk tolerance dan risk limit* yang ditetapkan dalam surat Keputusan Direksi Nomor 105 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

In determining the Bank's direction and policies regarding reputational risk, the Bank has established *a risk appetite, risk tolerance, and risk limits* as set forth in Board of Directors' Resolution No. 105 of 2025 dated June 30, 2025, regarding the Policy on the Determination of Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Proses Manajemen Risiko

1. Untuk Proses Manajemen Risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian telah dilakukan secara rutin dan berkala melalui laporan Pemantauan Limit, LED (Loss Event Database) dari setiap Cabang dan PRC (Profil Risiko Cabang) setiap bulannya. Proses manajemen risiko juga dilakukan melalui pemberian Credit Risk Checklist (CRC) untuk kredit dan Procurement Risk Checklist (Proc) untuk pengadaan barang/jasa oleh Risk Control (RC);

2. Bank telah melakukan penilaian terkait keamanan siber dan Penilaian tingkat maturitas keamanan siber adalah Satisfactory (2) dengan faktor penilaian: Kualitas penerapan proses ketahanan siber: peringkat Satisfactory (2). Hal ini disampaikan kepada OJK Provinsi NTT melalui surat Direksi Nomor: 058/DIR-DMR/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal: Penyampaian Hasil Penilaian Keamanan Siber PT. BPD NTT;

3. Berdasarkan hasil Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank yang disampaikan Bank kepada OJK Provinsi NTT melalui surat Direksi Nomor: 057/DIR-DMR/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal: Penyampaian Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank PT. BPD NTT, masih terdapat kekurangan yaitu Bank belum menerapkan kepemimpinan yang berorientasi digital dan belum memiliki kebijakan terkait layanan digital kepada penyandang disabilitas;
4. Bank terus meningkatkan Sumber Daya Manusia dan satuan kerja yang menangani risiko kepatuhan melalui pelatihan dan pendidikan (workshop) dengan tujuan menyamakan persepsi tentang penerapan manajemen risiko;
5. Dalam mengendalikan biaya pengeluaran operasional khususnya selain bunga agar dapat terlaksana secara efisien, aman, tertib, lancar dan adanya kepastian hukum Bank menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 018 Tahun 2023 tentang Limit Kewenangan Memutus/Persetujuan Panjar dan Biaya Operasional Selain Biaya Bunga Pada PT. BPD NTT dan Surat Direksi Nomor 1620/DIR-DUm/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penegasan Penarikan dan Pertanggungjawaban Panjar;
6. Bank NTT telah terverifikasi sebagai Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi pada sektor keuangan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia melalui sertifikat No. 468/CSIRT.01.03/BSSN/10/2024 pada tanggal 12 Desember 2024.

Risk Management Process

1. The risk management process—which includes identification, measurement, monitoring, and control—is conducted routinely and periodically through monthly Limit Monitoring reports, the Loss Event Database (LED) from each branch, and the Branch Risk Profile (PRC). The risk management process is also carried out through the provision of a Credit Risk Checklist (CRC) for credit and a Procurement Risk Checklist (Proc) for the procurement of goods and services by Risk Control (RC);
2. The Bank has conducted an assessment regarding cybersecurity, and the cybersecurity maturity level assessment is Satisfactory (2) with the following assessment factors: Quality of cybersecurity resilience process implementation: Satisfactory (2) rating. This was communicated to the OJK of NTT Province via a letter from the Board of Directors No. 058/DIR-DMR/I/2026 dated January 13, 2026, regarding: Submission of the Results of the Cybersecurity Assessment of PT. BPD NTT;
3. Based on the results of the Bank's Digital Maturity Level Assessment submitted by the Bank to the OJK of NTT Province via Board of Directors Letter No. 057/DIR-DMR/I/2026 dated January 13, 2026, Subject: Submission of the Digital Maturity Assessment of PT. BPD NTT, there are still shortcomings, namely that the Bank has not implemented digital-oriented leadership and does not yet have policies regarding digital services for people with disabilities;
4. The Bank continues to enhance the capabilities of its human resources and the units responsible for compliance risk through training and workshops, with the aim of aligning perspectives on the implementation of risk management;
5. To control operational expenses, particularly those other than interest, so that they can be carried out efficiently, safely, orderly, and smoothly, and to ensure legal certainty, the Bank issued Board of Directors Decree No. 018 of 2023 regarding the Authority Limit for Deciding/Approving Advances and Operational Expenses Other Than Interest Expenses at PT. BPD NTT and Board of Directors Letter No. 1620/DIR-DUm/IX/2024 dated September 30, 2024, regarding the Confirmation of Withdrawal and Accountability for Advances;
6. Bank NTT has been verified as an Organizational Cyber Incident Response Team (TTIS) in the financial sector by the National Cyber and Cryptography Agency (BSSN) and the National Cryptography Agency ( ) of the Republic of Indonesia through certificate No. 468/CSIRT.01.03/BSSN/10/2024 dated December 12, 2024.

Tata Kelola Risiko dan Kerangka Manajemen Risiko

1. Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank berkaitan dengan risiko operasional, Bank telah mereview kebijakan terkait risk appetite, risk tolerance dan risk limit yang selanjutnya telah ditetapkan dalam surat Keputusan Direksi Nomor 105 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025.
2. Bank juga melakukan pemantauan limit risiko melalui aplikasi *Risk Appetite System* (RAS) bertujuan untuk memantau setiap kejadian aktivitas operasional yang telah terjadi dan melakukan tindak lanjut untuk memitigasi potensi risiko yang ada.
3. Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan, Bank NTT membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut mendorong Bank NTT untuk memiliki pedoman pengadaan agar dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan juga dapat memitigasi risiko hukum akibat proses pengadaan barang/jasa. Sebelum penetapan calon pemenang dilakukan Procurement Risk Checklist (Proc) Pengadaan Barang/Jasa yang diberlakukan pada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat, kebijakan pengadaan meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi. Kebijakan pengadaan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 163 Tahun 2024 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Direksi Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pedoman Risk Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
4. Bank telah menetapkan dan mereview prosedur maupun pedoman sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko antara lain:

   Aktivitas Dana & Treasury:

   a. Keputusan Direksi Nomor: 1 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang SOP Hapus Buku Aset Produktif Divisi Treasury & FI PT BPD NTT;

   b. Keputusan Direksi Nomor: 3 Tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang SOP Kode Etik Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Surat Utang Dan Sukuk (PPE EBUS) PT BPD NTT;

   c. Keputusan Direksi Nomor: 29 Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang SOP Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Surat Utang Dan Sukuk (PPE-EBUS) PT BPD NTT;

Risk Governance and Risk Management Framework

1. In determining the Bank's direction and policies regarding operational risk, the Bank has reviewed policies related to risk appetite, risk tolerance, and risk limits, which were subsequently established in Board of Directors Decision No. 105 of 2025 dated June 30, 2025.
2. The Bank also monitors risk limits through the *Risk Appetite System* (RAS) application, which aims to monitor every operational activity that has occurred and take follow-up actions to mitigate potential risks.

3. To support its banking operations, Bank NTT requires the procurement of goods and services. These needs have prompted Bank NTT to establish procurement guidelines to ensure that goods and/or services of the expected quality are obtained in accordance with applicable regulations and the principles of good corporate governance, while also mitigating legal risks arising from the procurement process. Prior to the selection of the winning bidder, the Procurement Risk Checklist (Proc) for Goods and Services Procurement—which applies to all Branch Offices and the Head Office—is implemented. The procurement policy covers the procurement of goods and/or logistics and building-related services, as well as procurement related to information technology. These procurement policies have been set forth in Board of Directors Decree No. 163 of 2024 regarding the Regulations on the Procurement of Goods and Services of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur and Board of Directors Decree No. 208 of 2023 regarding the Risk Control Guidelines of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
4. The Bank has established and reviewed procedures and guidelines as a form of risk mitigation, including:

   Funds & Treasury Activities:

   1. Board of Directors Decision No. 1 of 2025 dated January 6, 2025, regarding the Standard Operating Procedure (SOP) for the Write-off of Productive Assets of the Treasury & FI Division of PT BPD NTT;
   b. Board of Directors Decision No. 3 of 2025 dated January 6, 2025, regarding the Standard Operating Procedure (SOP) on the Code of Ethics for Securities Dealers for Debt Securities and Sukuk (PPE EBUS) at PT BPD NTT;
   c. d. Board of Directors' Resolution No. 29 of 2025 dated March 4, 2025, regarding the Standard Operating Procedures (SOP) for Securities Dealers for Debt Securities and Sukuk (PPE-EBUS) of PT BPD NTT;

d. Keputusan Direksi Nomor: 147 Tahun 2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Akuntansi Transaksi Valuta Asing PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Aktivitas Operasional:

a. Keputusan Direksi Nomor: 4 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT BPD NTT;
b. Keputusan Direksi Nomor: 6 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pembukaan Kantor Fungsional Liliba PT BPD NTT;
c. Keputusan Direksi Nomor: 15 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Nasabah & Perlindungan Konsumen PT BPD NTT;
d. Keputusan Direksi Nomor: 16 Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang SOP Call Center PT BPD NTT;
e. Keputusan Direksi Nomor: 30 Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang SOP Pelayanan Frontliner PT BPD NTT;
f. Keputusan Direksi Nomor: 43 Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Customer Service PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
g. Keputusan Direksi Nomor: 44 Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Pemasaran Produk Melalui Sarana Komunikasi Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara;
h. Keputusan Direksi Nomor: 45 Tahun 2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Standar Formulir Dan Warkat Transaksi PT BPD NTT;
i. Keputusan Direksi Nomor: 47 Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang SOP Teller PT BPD NTT;
j. Keputusan Direksi Nomor: 51 Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang SOP Tabungan PT BPD NTT;
k. Keputusan Direksi Nomor: 52 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Inklusi Dan Keuangan PT BPD NTT;
l. Keputusan Direksi Nomor: 93 Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Dan Kesalahan Penyampaian Laporan Wajib Kepada Pihak Eksternal Maupun Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
m. Keputusan Direksi Nomor: 97 Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja

d. Board of Directors Decision No. 147 of 2025 dated October 2, 2025 regarding the Corporate Manual (BPP) on Foreign Exchange Transaction Accounting Policies of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Operational Activities:

a. Board of Directors Decision No. 4 of 2025 dated January 31, 2025, regarding the Anti-Fraud Strategy Guidelines of PT BPD NTT;
b. Board of Directors Decision No. 6 of 2025 dated February 10, 2025 regarding the Opening of the Liliba Functional Office of PT BPD NTT;
c. Board of Directors Decision No. 15 of 2025 dated February 14, 2025, regarding Guidelines for Customer Complaint Services & Consumer Protection at PT BPD NTT;
d. Board of Directors Decision No. 16 of 2025 dated February 24, 2025, regarding the Call Center SOP of PT BPD NTT;
e. Board of Directors Decision No. 30 of 2025 dated March 4, 2025, regarding the Frontline Service SOP of PT BPD NTT;
f. Board of Directors Decision No. 43 of 2025 dated February 24, 2025 regarding Standard Operating Procedures for Customer Service at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
g. Board of Directors Decision No. 44 of 2025 dated March 25, 2025, regarding Product Marketing Through Personal Communication Channels at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara;
h. Board of Directors Decision No. 45 of 2025 dated February 25, 2025, regarding Standard Forms and Transaction Documents of PT BPD NTT;
i. Board of Directors Decision No. 47 of 2025 dated March 26, 2025, regarding the Teller SOP of PT BPD NTT;
j. Board of Directors Decision No. 51 of 2025 dated March 26, 2025, regarding the Savings SOP of PT BPD NTT;
k. Board of Directors Decision No. 52 of 2025 dated March 27, 2025, regarding Guidelines for Activities to Improve Financial Inclusion and Literacy at PT BPD NTT;
l. Board of Directors Decision No. 93 of 2025 dated May 27, 2025, regarding Guidelines for Imposing Sanctions for Delays and Errors in the Submission of Mandatory Reports to External and Internal Parties of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
m. Board of Directors Decision No. 97 of 2025 dated June 16, 2025 regarding Guidelines for the

Sama Riset Kelayakan Pembukaan Kantor Dan/ Atau Jasa Layanan Bank NTT Di Luar Provinsi NTT;

n. Keputusan Direksi Nomor: 100 Tahun 2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
o. Keputusan Direksi Nomor: 105 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko tahun 2025;
p. Keputusan Direksi Nomor 131 Tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Promosi Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
q. Keputusan Direksi Nomor: 151 Tahun 2025 tanggal 6 September 2025 tentang Pedoman Dividen Pada PT BPD NTT;
r. Keputusan Direksi Nomor: 172 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Pedoman Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan ICOFR PT BPD NTT;

Aktivitas Kredit:

a. Keputusan Direksi Nomor: 5 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pedoman Pengajuan Assessment Kualitas Kredit & Penentuan Kualitas Kredit Bermasalah Berdasarkan 3 Pilar PT BPD NTT;
b. Keputusan Direksi Nomor: 34 Tahun 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang SOP Suku Bunga Dasar Kredit PT BPD NTT;
c. Keputusan Direksi Nomor: 53 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Penghapusan Aktiva Produktif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bulan Maret Tahun 2025;
d. Keputusan Direksi Nomor: 77 Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Penerapan PSAK 109 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Instrumen Keuangan & Aset Non Produktif PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
e. Keputusan Direksi Nomor: 96 Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Skim Produk Digital Loan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
f. Keputusan Direksi Nomor: 99 Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Skim Kredit Multiguna PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Implementation of Feasibility Studies for the Establishment of NTT Bank Branches and/or Services Outside the Province of NTT;

n. Board of Directors Decision No. 100 of 2025 dated June 25, 2025, regarding Guidelines for the Preparation of the Business Plan & Budget of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
o. Board of Directors Decision No. 105 of 2025 dated June 30, 2025, regarding the Policy on the Determination of Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits for 2025;
p. Board of Directors Resolution No. 131 of 2025 dated August 21, 2025 regarding Standard Operating Procedures for Corporate Promotions at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
q. Board of Directors Resolution No. 151 of 2025 dated September 6, 2025, regarding Dividend Guidelines at PT BPD NTT;
r. Board of Directors Decision No. 172 of 2025 dated December 24, 2025 regarding Guidelines for Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT BPD NTT;

Credit Activities:

a. Board of Directors Decision No. 5 of 2025 dated January 31, 2025, regarding Guidelines for Credit Quality Assessment Submissions and the Determination of Non-Performing Loans Based on the 3 Pillars of PT BPD NTT;
b. Board of Directors Decision No. 34 of 2025 dated March 12, 2025, regarding the Standard Operating Procedure (SOP) for the Base Lending Rate of PT BPD NTT;
c. Board of Directors Decision No. 53 of 2025 dated March 27, 2025 regarding the Write-off of Productive Assets for People's Business Credit (KUR) for March 2025;
d. Board of Directors Decision No. 77 of 2025 dated May 6, 2025 regarding the Accounting Policy for the Implementation of PSAK 109 Concerning Provisions for Impairment Losses on Financial Instruments & Non-Earning Assets of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
e. Board of Directors Decision No. 96 of 2025 dated June 11, 2025, regarding the Digital Loan Product Scheme of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
f. Board of Directors Decision No. 99 of 2025 dated June 24, 2025 regarding the Multipurpose Loan Scheme of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

g. Keputusan Direksi Nomor: 101 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Skim Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
h. Keputusan Direksi Nomor: 102 Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Skim Kredit Multiguna Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
i. Keputusan Direksi Nomor 121 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT BPD NTT;

j. Keputusan Direksi Nomor 143 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Penjaminan Kredit, Proses Klaim, Pemantauan Klaim dan Pengelolaan Subrogasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
k. Keputusan Direksi Nomor 144 Tahun 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Pedoman Komite Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
l. Keputusan Direksi Nomor: 167 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Skim Kredit Sistem Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi PT BPD NTT;

Aktivitas IT:

a. Keputusan Direksi Nomor: 68 Tahun 2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pedoman (Kebijakan, Standar Dan Prosedur) Pengelolaan Security Operation Center (SOC) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Aktivitas SDM:

a. Keputusan Direksi Nomor 114 Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
b. Keputusan Direksi Nomor 119 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pedoman Penataan & Rekrutmen Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
c. Keputusan Direksi Nomor 120 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Pedoman Mutasi & Rotasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

g. Board of Directors Decision No. 101 of 2025 dated June 26, 2025, regarding the Motor Vehicle Loan (KKB) Scheme of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
h. Board of Directors Decision No. 102 of 2025 dated June 26, 2025, regarding the Multipurpose Loan Scheme for Members of the Regional Representative Council of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
i. Board of Directors Decision No. 121 of 2025 dated July 31, 2025 regarding Guidelines for the Implementation of the People's Business Credit (KUR) at PT BPD NTT;
j. Board of Directors Decision No. 143 of 2025 dated September 26, 2025, regarding Standard Operating Procedures for Credit Guarantee Applications, Claim Processing, Claim Monitoring, and Subrogation Management at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
k. Board of Directors Decision No. 144 of 2025 dated September 26, 2025, regarding Guidelines for the Credit Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
l. Board of Directors Decision No. 167 of 2025 dated December 17, 2025 regarding the Credit Scheme for the Drinking Water Supply and Sanitation System of PT BPD NTT;

IT Activities:

a. Board of Directors Decision No. 68 of 2025 dated April 17, 2025 regarding Guidelines (Policies, Standards, and Procedures) for the Management of the Security Operation Center (SOC) of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

HR Activities:

a. Board of Directors Decision No. 114 of 2025 dated July 30, 2025, regarding Standard Operating Procedures for Termination of Employment at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
b. Board of Directors Decision No. 119 of 2025 dated July 31, 2025 regarding Guidelines for Staff Reorganization & Recruitment at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
c. Board of Directors Decision No. 120 of 2025 dated July 31, 2025 regarding Guidelines for Transfers and Rotations at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

d. Keputusan Direksi Nomor 128 Tahun 2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility) PT BPD NTT;
e. Keputusan Direksi Nomor: 158 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
f. Keputusan Direksi Nomor: 174 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Atau Luar Negeri PT BPD NTT.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Bank NTT, Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan Bank NTT dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan Bank NTT tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar volume usaha/skala Bank NTT semakin penting arti dari Pengendalian Internal. Pengendalian Internal di Bank NTT dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Aset* dan *Liabilities*, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara *of site* dan *on site* oleh setiap unit pengendalian internal pada setiap unit pengendalian pada setiap Divisi dan kantor operasional Bank NTT.

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di Bank NTT mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut *Three Lines Of Defense* yang dapat digambarkan sebagai berikut :

d. Board of Directors Decision No. 128 of 2025 dated August 11, 2025, regarding Guidelines for Corporate Social Responsibility (CSR) at PT BPD NTT;
e. Board of Directors Decision No. 158 of 2025 dated December 1, 2025, regarding the Company Regulations of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
f. Board of Directors Decision No. 174 of 2025, dated December 29, 2025, regarding the Regulations on Domestic and International Business Travel for PT BPD NTT.

Internal Control System

Internal control encompasses a unified methodology, policies, procedures, and organizational structure designed to identify, measure, monitor, and control risks arising from Bank NTT's activities. The approach used to measure, monitor, and control risks is based on a risk-based approach.

Internal control is a crucial component for achieving Bank NTT's objectives. Without internal control, Bank NTT's objectives cannot be achieved effectively and efficiently. The larger the business volume or scale of Bank NTT, the more significant the role of Internal Control becomes. Internal Control at Bank NTT encompasses all aspects of the business, including both *Assets* and *Liabilities*, with oversight conducted both *off-site* and *on-site* by each internal control unit within every division and operational office of Bank NTT.

Bank NTT's risk management and internal control framework adopts a multi-layered defense principle known as *the Three Lines of Defense*, which can be described as follows:

Bank NTT *Three Lines Of Defense*

Bank NTT Three Lines of Defense

First Level of Defense	Second Level of Defense	Third Level of defense
Kantor Cabang, Divisi Operasional, Divisi SDM, Divisi TI, Divisi Riset & Pengembangan, Divisi Dana, Divisi Umum, Divisi Supporting Kredit, Divisi Corporate Secretary & Legal, Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Divisi Kredit Komersil & Menengah, Divisi Kredit Mikro, Kecil & Konsumer, Divisi Treasury & Internasional Branch Offices, Operations Division, HR Division, IT Division, Research & Development Division, Funds Division, General Affairs Division, Credit Support Division, Corporate Secretary & Legal, Recovery and Credit Resolution, Commercial & Medium-Sized Credit Division, Micro, Small & Consumer Credit Division, Treasury & International Division	Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Sub Divisi Legal Compliance Division, Risk Management Division, Legal Subdivision	Divisi Pengawasan & SKAI Supervision & SKAI Division

Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern secara fungsional berada di bawah Divisi Pengawasan, Divisi Pengawasan berada di bawah Direktorat Utama, dengan memiliki 1 (satu) orang Kepala Divisi, 4 (empat) orang Kepala Sub Divisi Inspektorat (Inspektur Wilayah 1, 2, 3 dan 4), 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi Anti Fraud, Administrasi dan Pemantauan, 13 (tiga belas) orang Internal Auditor dan 2 (dua) orang Pelaksana, Pembagian Wilayah sebagai berikut:

Objectives of Internal Control

The Internal Control System functionally falls under the Supervision Division, which is under the Directorate General, comprising 1 (one) Division Head, 4 (four) Heads of the Inspectorate Subdivisions (Regional Inspectors 1, 2, 3, and 4), 1 (one) Head of the Anti-Fraud, Administration, and Monitoring Sub-Division, 13 (thirteen) Internal Auditors, and 2 (two) Staff Members. The territorial divisions are as follows:

No,	Inspektur Inspector	Cakupan Wilayah Audit Audit Territory Coverage	
		Cabang Branch	Divisi Division
1.	Wilayah I Region I	1. Cabang Labuan Bajo; 2. Cabang Ruteng; 3. Cabang Borong; 4. Cabang Bajawa; 5. Cabang Mbay; 6. Cabang Ende, 1. Labuan Bajo Branch; 2. Ruteng Branch; 3. Borong Branch; 4. Bajawa Branch; 5. Mbay Branch; 6. Ende Branch;	1. Divisi Corporate Secretary & Legal; 2. Divisi SDM; 3. Divisi Dana, 1. Corporate Secretary & Legal Division; 2. Human Resources Division; 3. Finance Division;

No,	Inspektur Inspector	Cakupan Wilayah Audit Audit Territory Coverage	
		Cabang Branch	Divisi Division
2.	Wilayah II Region II	1. Cabang Maumere; 2. Cabang Larantuka; 3. Cabang Lewoleba; 4. Cabang Kalabahi; 5. Cabang Atambua; 6. Cabang Betun, 1. Maumere Branch; 2. Larantuka Branch; 3. Lewoleba Branch; 4. Kalabahi Branch; 5. Atambua Branch; 6. Betun Branch;	1. Divisi Supporting Kredit; 2. Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer; 3. Divisi Kredit Komersil & Menengah, 1. Credit Support Division; 2. Micro, Small, and Consumer Credit Division; 3. Commercial & Medium-Sized Credit Division;
3.	Wilayah III Region III	1. Cabang Waingapu; 2. Cabang Waibakul; 3. Cabang Waikabubak; 4. Cabang Waitabula; 5. Cabang Sabu; 6. Cabang Rote; 1. Waingapu Branch; 2. Waibakul Branch; 3. Waikabubak Branch; 4. Waitabula Branch; 5. Sabu Branch; 6. Rote Branch;	1. Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit; 2. Divisi Kepatuhan; 3. Divisi Manajemen Risiko, 1. Credit Recovery & Settlement Division; 2. Compliance Division; 3. Risk Management Division;
4.	Wilayah IV Region IV	1. Cabang Kefa 2. Cabang Soe 3. Cabang Oelamasi 4. Cabang Utama Kupang 5. Cabang Khusus Kupang 6. Kantor Pusat 1. Kefa Branch 2. Soe Branch 3. Oelamasi Branch 4. Kupang Main Branch 5. Kupang Special Branch 6. Headquarters	1. Divisi Operasional; 2. Divisi Treasury & Internasional; 3. Divisi Umum; 4. Divisi IT; 5. Divisi Riset dan Pengembangan, 1. Operations Division; 2. Treasury & International Division; 3. General Division; 4. IT Division; 5. Research and Development Division;

Sistem Pengendalian Intern juga didukung dengan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional.

The Internal Control System is also supported by Operational Systems and Procedures (SOPs) that serve as guidelines for carrying out duties and responsibilities in each Division, Branch Office, Sub-Branch Office, and Functional Office.

Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Resident Inspektur menjadi Auditor dan Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka fungsi Internal Control (IC) diubah menjadi Risk Control (RC) sesuai Keputusan Direksi Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomenklatur dari Internal Control (IC) menjadi Risk Control (RC) yang mengatur Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Risk Control.

Pursuant to the Board of Directors' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 122 of 2015 dated December 2, 2015, regarding the Removal and Appointment from the Position of Resident Inspector to Auditor and Internal Control at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, the Internal Control (IC) function was changed to Risk Control (RC) in accordance with Board of Directors Decision No. 60 of 2019 regarding the Change of Nomenclature from Internal Control (IC) to Risk Control (RC), which regulates the Functions, Duties, Authorities,

Hal ini dituangkan dalam keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 208 tahun 2023 tentang Pedoman Risk Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko

Bank NTT telah menerapkan pengendalian risiko dalam pengelolaan risiko mencakup:

1. Menetapkan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit yang melakukan pengendalian internal dimana pada setiap Kantor cabang memiliki *Risk Control* (RC) yang melakukan fungsi internal audit dengan mekanisme kerja H-1 sebelum persetujuan kredit dan H-1 sebelum proses pencairan kredit,
2. Divisi Manajemen Risiko merupakan unit kerja independen yang membuat kebijakan Manajemen risiko, metodologi pengukuran dan penetapan limit risiko, Proses pengkajian terhadap model dilakukan oleh *Risk Control* (RC),
3. Setiap produk dan aktivitas baru serta kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dikaji dan dipantau pelaksanaannya oleh Divisi Manajemen Risiko,
4. Terdapat sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap proses dan kerangka manajemen risiko, Kecukupan sistem pengendalian intern dinilai cukup yang terlihat bahwa secara struktur organisasi, pengawasan melekat secara berjenjang terhadap kegiatan bank baik pada Risk Taking Unit (RTU), SKMR, SKK maupun SKAI antara lain:
    a. Kecukupan kaji ulang SKMR dan SKK yang terlihat melalui:
        i. Pemberian kajian/opini terkait PKS, SOP maupun setiap produk baru bank yang akan diterbitkan. Semua aktivitas/produk baru maupun kebijakan selalu mendapatkan kajian risiko, kepatuhan dan legal. Hal ini terlihat pada Triwulan IV 2025 ini terdapat 45 (empat puluh lima) Kajian Risiko, 47 (empat puluh tujuh) Kajian Kepatuhan;
        ii. Pemantauan profil risiko juga dilakukan Divisi Manajemen Risiko untuk setiap aktivitas Bank seperti aktivitas perkreditan, treasury, dana dan jasa, operasional serta SDM selama tahun 2025 ini dapat dilihat melalui surat Direktur Kepatuhan Nomor 1965/DIR-DMR/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 untuk periode data bulan Oktober 2025 dan Surat

and Responsibilities of Risk Control. This is set forth in the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 208 of 2023 regarding the Risk Control Guidelines of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Internal Control System for Risk Management

Bank NTT has implemented risk controls in risk management, including:

1. Establishing an organizational structure with a clear separation of functions between operational units and units performing internal control, wherein each branch office has *a Risk Control* (RC) unit that performs internal audit functions through a mechanism operating one day prior to credit approval and one day prior to the credit disbursement process,
2. The Risk Management Division is an independent unit responsible for developing risk management policies, measurement methodologies, and setting risk limits; the review of models is conducted by *Risk Control* (RC);
3. Every new product and activity, as well as policies to be issued, are reviewed and monitored for implementation by the Risk Management Division,
4. There is an independent and ongoing review system for risk management processes and frameworks, The adequacy of the internal control system is deemed sufficient, as evidenced by the organizational structure, which provides tiered oversight of the bank's activities across the Risk Taking Unit (RTU), SKMR, SKK, and SKAI, among others:

    a. The adequacy of the review of SKMR and SKK is evident through:
        i. The provision of reviews/opinions regarding PKS, SOPs, and any new bank products to be issued. All new activities, products, and policies always undergo risk, compliance, and legal reviews. This is evident in the fourth quarter of 2025, where there were 45 (forty-five) Risk Reviews and 47 (forty-seven) Compliance Reviews;
        ii. Risk profile monitoring is also conducted by the Risk Management Division for all Bank activities, such as lending, treasury, funds and services, operations, and human resources throughout 2025, as detailed in Compliance Director's Letter No. 1965/DIR-DMR/XII/2025 dated December 2, 2025, for the October 2025 data period, and the

Direktur Kepatuhan Nomor 2098/DIR-DMR/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 untuk periode data bulan November 2025;

iii. Bank telah menerapkan bentuk pengendalian melalui Aplikasi *Fraud Detection System* (FDS) yang diimplementasikan sejak tanggal 26 Juli 2023. Implementasi aplikasi FDS terdokumentasi dalam berita acara Go-Live Nomor: 319/FDS/VII/2023.

b. Kecukupan kaji ulang SKAI dilihat melalui:

i. Divisi Pengawasan & SKAI melakukan pemeriksaan secara rutin baik melalui SPOT Audit maupun desk audit yang ruang lingkupnya meliputi risiko hukum baik di unit bisnis maupun unit pendukung.

ii. Divisi Pengawasan & SKAI selalu melakukan pemantauan baik secara mandiri maupun dari Laporan LED dan Laporan Khusus Divisi Manajemen Risiko serta berupaya dalam mencegah terjadinya kesalahan operasional dan fraud yang berujung pada pemberian sanksi yaitu denda maupun sanksi lainnya seperti demosi, PHK dan sebagainya sesuai dengan skoring yang diberikan berdasarkan pemeriksaan dan putusan Tim PHJ;

Salah satu tugas dari *Risk Control* (RC) adalah menyampaikan Laporan Profil Risiko Cabang dan *Loss Event Database*. Aplikasi manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasional dengan menggunakan pelaporan secara sistem yang disampaikan oleh *Risk Control* (RC) yang ada pada masing-masing kantor cabang, Adapun aplikasi manajemen risiko yang digunakan oleh Bank NTT yaitu :

1. Aplikasi Loss Event Database (LED)

Aplikasi ini digunakan oleh *Risk Control* (RC) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut sebagai risk taking unit untuk melaporkan semua *risk event* yang terjadi pada unit kerja tersebut, Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 34/SEOJK,03/2016 tanggal 01 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mewajibkan pihak Bank untuk memiliki dan menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, serta didukung oleh sumber daya yang memadai,

Compliance Director's Letter No. 2098/DIR-DMR/XII/2025 dated December 19, 2025, for the November 2025 data period;

iii. The Bank has implemented controls through the *Fraud Detection System* (FDS) application, which has been in use since July 26, 2023. The implementation of the FDS application is documented in the Go-Live Minutes No. 319/FDS/VII/2023.

b. The adequacy of the SKAI review is assessed through:

i. The Supervision & SKAI Division conducts routine inspections through both spot audits and desk audits, the scope of which covers legal risks in both business units and support units.

ii. The Supervision & SKAI Division continuously monitors operations both independently and through LED Reports and Special Reports from the Risk Management Division, and strives to prevent operational errors and fraud that could result in sanctions such as fines or other penalties—including demotions, terminations, and so on—based on the scoring assigned following the PHJ Team's review and decision;

One of the duties of *Risk Control* (RC) is to submit Branch Risk Profile Reports and *the Loss Event Database*. This risk management application aims to minimize risks that may arise in operational activities by utilizing systematic reporting submitted by the *Risk Control* (RC) units at each branch office. The risk management applications used by Bank NTT are as follows:

1. Loss Event Database (LED) Application

This application is used by the *Risk Control* (RC) Department at Branch Offices, hereinafter referred to as the risk-taking unit, to report all *risk events* occurring within that unit, In accordance with Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, banks are required to have and implement a risk management system tailored to their internal and external environments and the complexity of their business activities, and supported by adequate resources.

Salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank adalah risiko operasional dimana untuk mengelolanya harus didukung dengan data yang akurat, update dan komprehensif, LED (*Loss Event Database*) merupakan aplikasi untuk menginventarisir data kerugian dan potensi kerugian bank dan perencanaan tanggapan risiko terkait dengan pengelolaan risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko sebagai yang mengawal manajemen risiko Bank telah mengimplementasikan pengelolaan *Loss Event Database* sebagai upaya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi dan monitoring kerugian dan risiko Cabang.

2. Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC)

Aplikasi Profil Risiko Cabang merupakan Aplikasi untuk mengelola risiko inherent dan KPMR pada masing-masing Cabang bank dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan aktivitas bank, Parameter didasarkan pada kompleksitas dan karakteristik usaha bank yang diturunkan kepada Kantor Cabang, Aplikasi ini juga merupakan wahana *Bussiness Process Alignment* antara Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi Pengawasan, dimana Laporan Profil Risiko Kantor Cabang yang dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dapat digunakan oleh Divisi Pengawasan sebagai referensi *Risk Based Audit* (RBA), aplikasi ini dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Berorientasi Risiko
   Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan, mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, dan memperhatikan arah (*trend*) risiko ke depan.
b) Komprehensif & Terstruktur
   Penilaian profil risiko dilakukan secara menyeluruh dan sistematis atas parameter jenis risiko untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari masing-masing parameter penilaian-penilaian terhadap kondisi usaha cabang.
c) Proposionalitas
   Penggunaan indikator atau parameter dalam tiap jenis risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha cabang.
d) Materialitas dan signifikansi
   Penentuan materialitas dan Signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai,

One of the risks that must be managed by the Bank is operational risk, the management of which must be supported by accurate, up-to-date, and comprehensive data. *The Loss Event Database* (LED) is an application designed to catalog data on actual and potential losses of the bank and to plan risk responses related to operational risk management. The Risk Management Division, as the entity overseeing the Bank's risk management, has implemented *the Loss Event Database* management system as an effort to identify, measure, mitigate, and monitor losses and risks at branches.

2. Branch Risk Profile (PRC) Application

The Branch Risk Profile Application is a tool for managing inherent risks and KPMR at each bank branch using parameters tailored to the bank's operations. These parameters are based on the complexity and characteristics of the bank's business, which are delegated to the branch offices. This application also serves as a platform for *Business Process Alignment* between the Risk Management Division and the Supervision Division, where the Branch Risk Profile Reports managed by the Risk Management Division can be used by the Supervision Division as a reference for *Risk-Based Audits* (RBA). This application can be utilized with the following considerations:

a) Risk-Oriented
   This is achieved by identifying the root causes of issues, assessing the impacts of the risks involved, and monitoring future risk *trends*.

b) Comprehensive & Structured
   Risk profile assessments are conducted thoroughly and systematically based on risk type parameters to determine the relationships and influences of each assessment parameter on the branch's business conditions.

c) Proportionality
   The use of indicators or parameters for each type of risk takes into account the characteristics and complexity of the branch's operations.

d) Materiality and Significance
   The determination of materiality and significance is based on an analysis supported by sufficient facts, data, and information;

Bank NTT menjalankan sistem pengendalian internal dengan berpatokan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu mencakup tiga hal pokok sebagai berikut :

a) Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi
   Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasional kantor sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan Bank NTT;
b) Tujuan pelaporan
   Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan akuntansi (transaksi keuangan) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya;
c) Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
   Bahwa pengendalian internal tersebut untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perpajakan maupun kebijakan entitas itu sendiri.

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil/output dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang ada.

Bank NTT operates an internal control system guided by the principle that the objectives of internal control encompass the following three key areas:

a) Operational objectives related to the effectiveness and efficiency of operations
   Internal controls are intended to improve the effectiveness and efficiency of all office operations so as to control costs aimed at achieving Bank NTT's objectives;

b) Reporting objectives
   Internal controls are intended to improve the reliability of data and accounting records (financial transactions) in the form of financial statements and management reports so that they do not mislead users of such reports and their accuracy can be verified;

c) Objectives regarding compliance with applicable laws and regulations
   Internal controls are intended to improve the bank's compliance with laws and regulations established by the government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), tax authorities, and the entity's own policies.

These three objectives of internal control are the results/outputs of effective internal control, which can be achieved by addressing the existing elements of internal control.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan efektivitas pengendalian internal Bank NTT, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem.

Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas sistem pengendalian internal yang digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian/prosedur/sistem.

Evaluation of the Effectiveness Level of the Internal Control System

The Internal Audit Unit (SKAI), which is part of the Internal Control System, conducts audits to ensure the effectiveness of Bank NTT's internal controls through an independent evaluation of the adequacy of and compliance with policies, procedures, and systems.

The results of the evaluation of the implementation of the internal control system serve as one of the foundations for management to determine the effectiveness of the internal control system, as reflected in the audit rating, which forms the basis for implementing improvements, including updates to procedures and systems.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan atau *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa Laporan Keuangan telah disusun secara andal dan bebas dari salah saji material sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai kepada pengguna Laporan Keuangan.

Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan di Bank NTT mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang selain bertujuan untuk memperkuat ketepatan, keandalan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan bank, sekaligus memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan didukung oleh pengendalian internal yang efektif.

Sebagai panduan dalam penerapan ICoFR, Bank NTT telah menetapkan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan / *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Tahun 2024, Bank NTT telah menunjuk Unit Kerja Khusus ICoFR di bawah Divisi Kepatuhan - Sub Divisi Sistem Prosedur & Pelaporan Kepatuhan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penerapan ICoFR di Bank NTT.

Laporan Manajemen terhadap Pengendalian Internal atas Proses Pelaporan Keuangan

Direksi Bank NTT bertanggung jawab untuk menerapkan Pengendalian Internal yang memadai dalam proses pelaporan keuangan yang diawasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit, serta dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank NTT untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan Bank.

Internal Control over Financial Reporting

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) is a process designed to provide reasonable assurance that financial statements have been prepared in a reliable and manner and are free from material misstatements, thereby providing greater assurance to users of financial statements.

The implementation of Internal Control over Financial Reporting at Bank NTT is based on Financial Services Authority Regulation No.15 of 2024 regarding the Integrity of Bank Financial Reporting, which aims not only to strengthen the accuracy, reliability, and transparency of financial information and bank financial statements, but also to ensure that the financial statement preparation process is supported by effective internal controls.

As a guide for the implementation of ICoFR, Bank NTT has established policies and procedures for Internal Control over Financial Reporting through Board of Directors' Decision No. 172 of 2025 regarding Guidelines for Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Furthermore, in accordance with the provisions of POJK No. 15 of 2024, Bank NTT has designated a Special ICoFR Unit under the Compliance Division—Compliance Systems, Procedures & Reporting Subdivision—which is responsible for coordinating the implementation of ICoFR at Bank NTT.

Management Report on Internal Control over the Financial Reporting Process

The Board of Directors of Bank NTT is responsible for implementing adequate internal controls in the financial reporting process, which is overseen by the Board of Commissioners through the Audit Committee and carried out by all levels of management and employees of Bank NTT to provide reasonable assurance regarding the Bank's financial information and financial statements.

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan ini disusun untuk mendukung tercapainya kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan dan memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Dalam menjalankan penilaian, Bank menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwey Commission* (COSO). Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, Direksi Bank NTT menyimpulkan bahwa Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Efektif.

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang melekat dimana proses ICoFR tidak dapat mencegah atau mendeteksi seluruh potensi salah saji, maka pengendalian internal atas pelaporan keuangan ini dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bukan untuk memberikan keyakinan absolut (*absolute assurance*). Oleh karena itu, Direksi Bank NTT berkomitmen untuk terus memperkuat budaya pengendalian, meningkatkan kualitas pemantauan serta memastikan tindak lanjut perbaikan atas temuan dilaksanakan secara konsisten.

PEMBERIAN REMUNERASI

Pengungkapan Prosedur dan Besaran remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero), Penghasilan Komisaris meliputi remunerasi dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan.

This Internal Control over Financial Reporting has been established to support the achievement of accuracy, accuracy, and transparency of Financial Information and Financial Statements, to improve operational efficiency and effectiveness in financial reporting, to ensure compliance with applicable laws and regulations in the financial reporting process, and to ensure that the Financial Statements have been prepared in accordance with financial accounting standards and the Financial Services Authority's regulations regarding the recording of financial transactions.

In conducting its assessment, the Bank used the criteria set forth in the Internal Control – Integrated Framework published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Based on the assessment conducted, the Board of Directors of Bank NTT concluded that the internal control over financial reporting for the period ended December 31, 2025, was effective.

Given the inherent limitations of the ICoFR process—which cannot prevent or detect all potential misstatements—this internal control over financial reporting is designed to provide reasonable assurance, not absolute assurance. Therefore, the Board of Directors of Bank NTT is committed to continuously strengthening the control culture, improving the quality of monitoring, and ensuring that corrective actions on findings are implemented consistently.

REMUNERATION PROVISION

Disclosure of Procedures and Amounts of Board of Commissioners' Remuneration

Remuneration for the Board of Commissioners is determined by the GMS in accordance with the Company's Shareholders' Resolution. Commissioners' income includes remuneration, allowances, and bonuses granted based on the Company's performance and achievements.

Komposisi Gaji Direksi dan Komisaris per bulan tahun 2025:

Monthly Salary Composition for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2025:

NO	NAMA Name	NOMINAL Amount (Rupiah)	KOMPOSISI Composition
	Direksi Board of Directors		
1	Direktur Utama President Director	83.376.896	-
2	Direktur Dana & Treasury Director of Funds & Treasury	75.039.206	90% dari Dirut 90% of the CEO
3	Direktur Teknologi Informasi & Operasional Director of Information Technology & Operations	75.039.206	90% dari Dirut 90% of the CEO
4	Direktur Kredit Director of Credit	75.039.206	90% dari Dirut 90% of the CEO
5	Direktur Kepatuhan Compliance Director	75.039.206	90% dari Dirut 90% of the CEO
	Komisaris Board of Commissioner		
1	Komisaris Utama Lead Commissioner	54.540.500	70% dari Dirut 70% of the CEO
2	Komisaris Independen Independent Commissioner	49.086.450	90% dari Komut 90% of the Managing Director

Ket*: Data Gaji diatas adalah Gaji Kotor tidak termasuk Tunjangan PPh 21

Note:*. The salary data above is gross salary, excluding Income Tax (PPh 21) allowances

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris:

Sepanjang tahun 2025, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Remuneration Policy Package and Other Benefits for the Board of Commissioners:

Throughout 2025, the total salaries and other allowances, including remuneration in kind and non-kind, provided to the Board of Commissioners are as follows:

NO	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN Type Of Remuneration And Other Benefits	JUMLAH KOMISARIS Amount Commissioner	NOMINAL (Rp) Amount (IDR)
1	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap)* Remuneration in non-in-kind form (salary and fixed income)*	2	3.805.345.861
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other benefits in kind or in cash (other non-fixed benefits, such as housing, transportation, health insurance, etc.) that are not can be owned	-	-
	JUMLAH/ Total	**2**	**3.805.345.861**

Ket: * Penghasilan Kotor setahun

Note: * Annual Gross Income

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2025 adalah 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

The number of Board of Commissioners members who received remuneration packages during 2025 was 2 (two) people, with the following details:

Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board Members	Remuneration Group Annual Amount
Di atas Rp 2 miliar	1	Over Rp 2 billion
Di atas Rp 1 miliar s,d 2 miliar	-	Over Rp 1 billion to Rp 2 billion
Di atas Rp 500 juta s,d Rp 1 miliar	-	Over Rp 500 million to Rp 1 billion
Rp 500 juta ke bawah	1	Up to Rp 500 million
Total	**2**	**Total**

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

Sepanjang tahun 2025, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah dijabarkan sebagai berikut:

Remuneration and Other Benefits Package for the Board of Directors

Throughout 2025, the total amount of salaries and other benefits, including remuneration in the form of in-kind and non-in-kind benefits provided to the Board of Directors, is detailed as follows:

NO	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN Type Of Remuneration And Other Benefits	JUMLAH DIREKSI Amount Board	NOMINAL (Rp) Amount (IDR)
1	Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap)* Remuneration in non-in-kind form (salary and fixed income)*	7	17.224.904.883
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other benefits in kind or non-in-kind (other non-fixed benefits, including housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned	7	190.857.003
	JUMLAH/ Total	**7**	**17.415.761.886**

Jumlah anggota yang menerima paket remunerasi selama tahun 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

The number of members who received remuneration packages during 2025 was 7 (seven) people, with the following details:

Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun	Jumlah Direksi Number of Board Members	1-Year Nominal Remuneration Group
Di atas Rp 2 miliar	3	Over Rp 2 billion
Di atas Rp 1 miliar s,d 2 miliar	-	Over Rp 1 billion to Rp 2 billion
Di atas Rp 500 juta s,d Rp 1 miliar	-	Over Rp 500 million to Rp 1 billion
Rp 500 juta ke bawah	4	Up to Rp 500 million
Total	**7**	**Total**

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/rasio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji Pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang terendah sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

SALARY RATIO AND EMPLOYEE COMPOSITION

Highest and Lowest Salary Ratios

For a comparison of the salary ratios between the highest and lowest salaries of the Board of Commissioners, the highest and lowest salaries of the Board of Directors, the highest and lowest salaries of employees, and between the highest salary of the Board of Directors and the salary of employees who have the lowest salary throughout the year 2025 can be seen in the following table:

NO	JABATAN Position	GAJI (DALAM RUPIAH) Salary (In Rupiah)		SKALA PERBANDINGAN Comparison Scale
		TERTINGGI * Highest *	TERENDAH * Lowest *	
1	Gaji Komisaris Commissioner's Salary	54.540.500	49.086.450	1,11
2	Gaji Direksi Salary Of The Board Of Directors	83.376.896	75.039.206	1,11
3	Gaji Kepala Divisi Division Head Salary	33.550.935	25.975.491	1,29
4	Gaji Pegawai** Employee Salary**	33.550.935	5.868.435	5,72
5	Gaji Direksi Tertinggi & Gaji Pegawai Terendah** Highest Executive Salary & Lowest Employee Salary**	83.376.896	5.868.435	14,21

NO	JABATAN Position	GAJI (DALAM RUPIAH) Salary (In Rupiah)		SKALA PERBANDINGAN Comparison Scale
		TERTINGGI * Highest *	TERENDAH * Lowest *	
6	Gaji Direksi Tertinggi & Gaji Pegawai Tertinggi** Highest Executive Salary & Highest Employee Salary**	83.376.896	33.550.935	2,49

Ket: * Termasuk Tunjangan BPJS (tidak termasuk tunjangan PPH 21)
** Gaji pegawai adalah gaji pegawai tetap (aktif)
Note: * Includes BPJS Allowance (excludes PPH 21 allowance)
** Employee salary refers to the salary of permanent (active) employees

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank dalam penyediaan dana, Bank telah menetapkan *risk appetite, risk tolerance dan risk limit* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 105 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Upaya perbaikan dan peningkatan dalam menetapkan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait terus dilakukan dengan langkah melakukan review atas kebijakan dan prosedur kebijakan BMPK, sementara untuk menekan laju pertumbuhan kredit bermasalah telah dibentuk Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian kredit bermasalah.

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND LARGE-SCALE FUNDING

In determining the Bank's direction and policies regarding the provision of funds, the Bank has established *risk appetite, risk tolerance, and risk limits* as stipulated in the Board of Directors' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 105 of 2025 dated June 30, 2025, regarding the Policy on the Determination of Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Efforts to improve and enhance the formulation of funding policies for relevant parties continue through the review of BMPK policies and procedures, while a Division for the Recovery and Resolution of Non-Performing Loans has been established to curb the growth rate of non-performing loans.

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI

Integrity of Reporting and Information Systems

Akses Informasi

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Bank NTT senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan, maupun pengembangan yang dilaksanakan.

Ada tiga media yang digunakan oleh Bank NTT sebagai sarana penyebaran data dan informasi perusahaan, yaitu media cetak, media online dan radio. Berkaitan dengan media cetak, Bank NTT menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan, Berita yang disebarkan mencakup segala kegiatan Bank yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu Bank NTT juga menyebarkan data dan informasi perusahaan melalui dokumen cetakan yang berupa *Annual Report*, *Company Profile* dan Brosur, Sementara melalui radio, Bank NTT menyebarluaskan data dan informasi perusahaan dalam bentuk pemasangan adlibs/spot radio, media cetak lokal, media online dan info Bank NTT. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.
Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang disajikan melalui home page Bank NTT (www.bpdntt.co.id) adalah sebagai berikut:

1. Produk Bank;
2. Layanan Bank;
3. Jaringan Kantor yang dimiliki Bank;
4. Inovasi yang dilakukan Bank;
5. Laporan CSR yang dilaksanakan Bank setiap tahunnya;
6. Berita maupun promo yang dilaksanakan oleh Bank;

Access to Information

In upholding the principles of corporate accountability and transparency, Bank NTT consistently provides and publishes all information related to its performance, changes, and initiatives.

Bank NTT uses three media channels to disseminate corporate data and information: print media, online media, and radio. Regarding print media, Bank NTT disseminates information to the public in the form of news articles and financial reports. The news coverage includes all of the Bank's activities that the public needs to know about. In addition, Bank NTT also disseminates corporate data and information through printed documents such as Annual Reports, Company Profiles, and brochures. Meanwhile, through radio, Bank NTT disseminates corporate data and information in the form of radio spots, local print media, online media, and Bank NTT updates. This collaboration is one form of the company's accountability and transparency toward its stakeholders.

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

The Bank has ensured transparency regarding its financial and non-financial conditions to its stakeholders, including the publication of financial reports, and has submitted these reports to relevant parties such as Bank Indonesia and stakeholders in accordance with applicable regulations.
The forms of disclosure regarding the Bank's financial and non-financial conditions presented on the Bank NTT homepage (www.bpdntt.co.id) are as follows:

1. Bank Products;
2. Bank Services;
3. The Bank's Branch Network;
4. Bank Innovations;
5. The Bank's annual CSR reports;
6. News and promotions carried out by the Bank;

7. Profil Bank seperti Sejarah singkat, Visi Misi, Logo, Struktur Organisasi, Budaya & Nilai Perusahaan;

8. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan seperti:
   a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit;
   b. Laporan Rasio Pengungkit;
   c. Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan;
9. Laporan Publikasi Tahunan seperti Laporan Tahunan dan Laporan GCG Tahunan,

Integritas Pelaporan

1. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*) yang tercantum dalam SK Direksi Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICOFR) PT. BPD NTT;
2. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan ini disusun untuk mendukung tercapainya kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam pelaporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan dan memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
3. Dalam menjalankan penilaian, Bank menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadwey Commission* (COSO). Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, Direksi Bank NTT menyimpulkan bahwa Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Efektif.
4. Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang melekat dimana proses ICoFR tidak dapat mencegah atau mendeteksi seluruh potensi salah saji, maka pengendalian internal atas pelaporan keuangan ini dirancang untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bukan untuk memberikan keyakinan absolut (*absolute assurance*). Oleh karena itu, Direksi Bank NTT berkomitmen untuk terus memperkuat budaya pengendalian, meningkatkan kualitas pemantauan serta memastikan tindak lanjut perbaikan atas temuan dilaksanakan secara konsisten.

7. Bank profiles such as a brief history, vision and mission, logo, organizational structure, and corporate culture and values;
8. Quarterly Financial Reports such as:
   a. Basic Credit Interest Rate Report;
   b. Leverage Ratio Report;
   c. Risk Exposure and Capital Report;
9. Annual Publications such as the Annual Report and the Annual GCG Report,

Reporting Integrity

1. The Bank has established internal control policies and procedures for the financial reporting process (Internal Control Over Financial Reporting) as set forth in Board of Directors Decree No. 172 of 2025 regarding Guidelines for Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) of PT. BPD NTT;
2. This Internal Control over Financial Reporting has been established to support the achievement of truthfulness, accuracy, and transparency of Financial Information and Financial Statements, to improve the efficiency and effectiveness of financial reporting operations, to ensure compliance with applicable laws and regulations in the financial reporting process, and to ensure that the Financial Statements have been prepared in accordance with financial accounting standards and the Financial Services Authority's regulations regarding the recording of financial transactions.
3. In conducting the assessment, the Bank used the criteria established in the Internal Control – Integrated Framework published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Based on the assessment conducted, the Board of Directors of Bank NTT concluded that the Internal Control over Financial Reporting for the period ending December 31, 2025, is Effective.
4. Given the inherent limitations whereby the ICoFR process cannot prevent or detect all potential misstatements, this internal control over financial reporting is designed to provide reasonable assurance, not absolute assurance. Therefore, the Board of Directors of Bank NTT is committed to continuously strengthening the control culture, improving the quality of monitoring, and ensuring that corrective actions on findings are implemented consistently.

5. Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan di Bank NTT mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang selain bertujuan untuk memperkuat ketepatan, keandalan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan bank, sekaligus memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan didukung oleh pengendalian internal yang efektif.
6. Sebagai panduan dalam penerapan ICoFR, Bank NTT telah menetapkan kebijakan dan prosedur Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan / *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Tahun 2024, Bank NTT telah menunjuk Unit Kerja Khusus ICoFR di bawah Divisi Kepatuhan - Sub Divisi Sistem Prosedur & Pelaporan Kepatuhan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penerapan ICoFR di Bank NTT.
7. Belum optimalnya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang ditunjukkan dengan adanya denda regulator.
8. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan Bank.
9. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang mengenai pelindungan data pribadi.
10. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.

5. The implementation of internal controls over financial reporting at Bank NTT is based on Financial Services Authority Regulation No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting, which aims not only to strengthen the accuracy, reliability, and transparency of the bank's financial information and financial statements, but also to ensure that the financial reporting process is supported by effective internal controls.
6. As a guide for the implementation of ICoFR, Bank NTT has established policies and procedures for Internal Control over Financial Reporting through Board of Directors Decree No. 172 of 2025 regarding Guidelines for Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Furthermore, in accordance with the provisions of POJK No. 15 of 2024, Bank NTT has designated a Special ICoFR Unit under the Compliance Division – Sub-Division of Systems, Procedures & Compliance Reporting, which is responsible for coordinating the implementation of ICoFR at Bank NTT.
7. Internal reporting that is comprehensive, accurate, and timely, supported by an adequate management information system, has not yet been optimized, as evidenced by the imposition of regulatory fines.
8. The Bank has ensured transparency regarding its financial and non-financial conditions to stakeholders, including by publishing quarterly financial reports and reporting to the Financial Services Authority or stakeholders in accordance with the Financial Services Authority's regulations on transparency and the publication of the Bank's financial reports.
9. The Bank discloses information regarding its products in accordance with Financial Services Authority regulations on the operation of commercial bank products and uses consumer and/or customer data in accordance with Financial Services Authority regulations on the protection of consumers and the public in the financial services sector and the Law on the protection of personal data.
10. The bank shall disclose to customers the procedures for filing complaints and resolving disputes in accordance with the Financial Services Authority Regulations on consumer and public protection in the financial services sector and the Financial Services Authority Regulations on consumer complaint services in the financial services sector.

11. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum Nomor 17 Tahun 2023.

12. Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.
13. Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (self- assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (self-assessment) serta paling sedikit mencakup:
    a. prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola Bank Umum serta hasil penilaian sendiri (self- assessment) atas penerapan tata kelola;

    b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Bank;

    c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Bank;

    d. frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
    e. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;
    f. permasalahan hukum;
    g. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
    h. pembelian kembali (buy back) saham dan/ atau obligasi Bank;
    i. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/ atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.

11. The bank has prepared a corporate governance implementation report with content and scope that meet, at a minimum, the requirements of OJK Regulation on Corporate Governance of Commercial Banks No. 17 of 2023.
12. In the event that the corporate governance implementation report does not reflect the Bank's actual conditions, the Bank shall immediately submit a complete revision to the Financial Services Authority and publish said revision on the Bank's website.

13. The governance implementation report accurately reflects the Bank's actual condition or aligns with the Bank's self-assessment results, is accompanied by the self-assessment results, and includes at least the following:
    a. the principles of Good Corporate Governance as referred to in the OJK Regulation on Corporate Governance of Commercial Banks and the results of the self-assessment of the implementation of corporate governance;
    b. shareholdings of Board of Directors members, as well as financial relationships and family relationships of Board of Directors members with other Board of Directors members, members of the Board of Commissioners, and/or the Bank's shareholders;
    c. shareholdings of members of the Board of Commissioners, as well as financial and family relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and/or shareholders of the Bank;
    d. the frequency of Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions;
    e. the number of instances of internal fraud that have occurred and the Bank's efforts to resolve them;
    f. legal issues;
    g. transactions involving conflicts of interest;

    h. buybacks of the Bank's shares and/or bonds;

    i. provision of funds for social and/or political activities, whether in the form of contributions or receipts.

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Jangka Pendek Tahun 2025

Beberapa target jangka pendek yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BANK STRATEGIC PLAN

Short-Term Plan for 2025

Some of the short-term goals that are a priority in business development for 2025 are as follows:

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
1	Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Rp. 3 triliun di tahun 2024. Meeting the Minimum Core Capital (MIM) requirement of Rp. 3 trillion by 2024.	Peningkatan daya saing dan daya tahan serta pemenuhan POJK Nomor 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Enhancing competitiveness and resilience resilience and compliance with POJK No. 12 of 2020 on Commercial Bank Consolidation.	1. Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan BPD (Bank Jatim) sebesar Rp. 50 miliar – Rp. 100 miliar; 2. Pertumbuhan Setoran Modal minimal 11.89% dari pemegang saham Seri A dan Seri B (existing) bank. 1. Bank Business Group (KUB) with BPD (Bank Jatim) of Rp. 50 billion – Rp. 100 billion; 2. Growth in Capital Contributions of at least 11.89% from the bank's existing Series A and Series B shareholders.	1. Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama BPD calon induk KUB; 2. Peningkatan modal disetor dari pemegang saham Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota; 3. Peningkatan profitabilitas bank untuk peningkatan cadangan tambahan modal 1. Cooperation between the Bank Business Group (KUB) with the Regional Development Bank (BPD) as the prospective parent of the KUB; 2. Increase in paid-in capital from shareholders of the Provincial, Regency/ Municipal Governments; 3. Improvement bank profitability to increase additional capital
2	Peningkatan pertumbuhan DPK dan peningkatan transaksional kanal layanan Increase growth in third-party funds and expansion of service channel transactions	Peningkatan pertumbuhan bisnis bank baik penghimpunan DPK, dan peningkatan transaksi kanal layanan bank Increased business growth bank both in deposit mobilization and an increase in transactions through the bank's service channels	1. Target pertumbuhan DPK minimal 5.73%; 2. Target peningkatan layanan transaksi kanal digital/ elektronifikasi minimal 20% untuk masing-masing kanal layanan; 3. Peningkatan fee base income; 4. Peningkatan market share DPK. 1. growth target of DPK of at least 5.73%; 2. Target for increasing transaction digital of digital/ electronic transactions of at least 20% for each service channel; 3. Increase in fee-based income; 4. Increase in DPK market share.	1. Meningkatkan rasio CASAdan peningkatan transaksi kanal layanan; 2. Rencana sinergi dan kolaborasi bisnis dengan Bank calon KUB; 3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama stakeholders; pemerintah daerah, korporasi dan swasta lainnya. 4. Pengembangan point reward bersama royalty pada mobile banking, program gimmick. 1. Increase the CASA and increase in transactions service channels; 2. Plans for synergy and business collaboration with prospective KUB banks; 3. Enhancing synergy and cooperation stakeholders, corporations, and other private entities. 4. Development reward reward in collaboration royalty in mobile banking, program gimmick.

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
3	Peningkatan pertumbuhan kredit. Increased credit growth.	Peningkatan pertumbuhan bisnis bank pertumbuhan kredit Increased bank business growth and credit growth	1. Target pertumbuhan kredit minimal 7.53%; 2. Target pengendalian Rasio NPL 3.60%; 3. Target penagihan kredit macet, subrogasi 4. dan hapus buku sebesar 15%; 5. Peningkatan market share kredit. 1. Target credit of at least 7.53%; 2. Target control NPL ratio at 3.60%; 3. Target collection of collection 4. and write-off of 15%; 5. Increase in credit market share.	1. Meningkatan pertumbuhan dan penyaluran kredit consumer sebagai core utama bank; 2. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyaluran kredit pensiunan; 3. Meningkatkan kredit produktif melalui peningkatan segment UMKM, Pinjaman Daerah, Program Chaneling dengan Koperasi; 4. Pengelolaan kualitas asset; fokus recovery NPL, Loan at Risk (LAR) dan pengendalian biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); 5. Melakukan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah: Implementasi program semangat tagih, program insentif penagihan, penjualan agunan dibawah tangan via bursa asset, eksekusi lewat KPKNL, gugatan sederhana, PKPU/ kepailitan, kerjasama dengan APH dan strategi penyelesaian lainnya; 6. Peningkatan sinergitas dan kerjasama stakeholders; pemerintah daerah, korporasi dan swasta lainnya. 1. Increase in and credit consumer as the bank's core business; 2. Collaboration with the third for the disbursement of retirement loans; 3. Increasing productive through expanding the MSME segment, Regional Loans, and the Channeling with Cooperatives; 4. asset quality management; focus on NPL recovery, Loans at Risk (LAR) and cost cost Provision for (CKPN);

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
				5. Conduct collection and settlement of: Implementation of collection drive, collection incentive program, direct sale of collateral through the asset exchange, and through the KPKNL, summary proceedings, PKPU/ bankruptcy, collaboration with law enforcement agencies and other; 6. Improvement synergy and collaboration stakeholders; local, corporations, and private.
4	Meningkatkan rentabilitas Improving profitability	Bank terus meningkatkan efisiensi terutama biaya non operasional the continuously improving efficiency especially non-operational non-operating	1. Minimal target ROA sebesar 1.34%; 2. Minimal target NIM sebesar 6.87%; 3. Minimal target BOPO sebesar 87.33% 1. Minimum ROA target of 1.34%; 2. Minimum NIM target of 6.87%; 3. Minimum BOPO target of 87.33%	1. Mengendalikan cost of fund. 2. Efisiensi biaya-biaya kegiatan yang kontra-produktif. 3. Pemantauan atas realisasi penggunaan anggaran. 4. Pengendalian biaya operasional selain bunga. 1. Control the cost of funds. 2. Efficiency costs operations that counterproductive. 3. Monitoring of the implementation budget utilization. 4. Control operational expenses excluding interest.
5	Pengelolaan dan penataan Sumber Daya Manusia dan organisasi Bank Management and Organization of Human and Organizational Structure	Bank terus berkomitmen meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia mengantisipasi tantangan dan persaingan lembaga jasa keuangan dan perbankan ke depan. The Bank remains committed to improving and developing human to anticipate future challenges and competition in the financial and banking sectors.	Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan. Continuously improving the competence and quality of human resources.	1. Melanjutkan program pengembangan sumber daya manusia; 2. Melakukan penataan system SDM 3. Melanjutkan program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi dalam bisnis dan operasional bank. 4. Review atas struktur organisasi sesuai hasil audit dan perkembangan bisnis bank. 1. Continuing the human resource development; 2. Implementing restructuring of the HR system 3. Continuing education, training, and certification in business and bank operations. 4. Review of the structure organization in accordance with the audit results and the bank's business development.

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
6	Peningkatan tata kelola, risk management, compliance dan pengawasan internal bank Improvement of the bank's governance, risk management, compliance, and internal oversight	Tingkat Kesehatan Bank sehat Bank Health Status: Healthy	1. Tingkat Kesehatan Bank 2 (SEHAT) 2. Pengendalian fraud internal 1. Bank Health Rating Bank 2 (HEALTHY) 2. Internal fraud control	1. Mempertahankn Tingkat Kesehatan Bank komposit 2 (Sehat); 2. Memperkuat mitigasi risiko, ancaman siber security dan IT bank. 3. Peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengawasan internal bank 4. Mengoptimalkan penerapan prinsip three lines of defense dalam rangka mitigasi dan pengendalian fraud 1. Maintain the composite Bank Health Level 2 (Healthy); 2. Strengthen risk mitigation, cybersecurity and IT threats to the bank. 3. Improvement of governance, risk management, and internal oversight of the bank 4. Optimizing the implementation the three lines of defense principles for the purpose of mitigation and control fraud

Rencana Jangka Menengah Tahun 2025

Beberapa target jangka menengah yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2025 Medium-Term Plan

Some of the medium-term targets of focus in business development for 2025 are as follows:

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
1	Melanjutkan pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Rp. 3 triliun. Continue the fulfillment of the Minimum Core Capital (MIM) of Rp. 3 trillion.	Peningkatan daya saing dan daya tahan serta pemenuhan POJK nomor 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum Enhancing competitiveness and resilience resilience as well as compliance with POJK No. 12 of 2020 on the Consolidation of Commercial Banks	Pertumbuhan Setoran Modal sesuai Peraturan Daerah tentang modal Growth Capital Contributions in accordance with Local Regulations on capital	1. Peningkatan modal disetor dari pemegang saham Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota; 2. Peningkatan profitabilitas bank untuk peningkatan cadangan tambahan modal 1. Increase in contributed by shareholders Provincial, Regency/Municipal Governments; 2. Increase in profitability of the bank to increase additional capital

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
2.	Peningkatan pertumbuhan DPK dan peningkatan transaksional kanal layanan Peningkatan Increase growth in third-party funds and expansion of service channel transactions	Peningkatan pertumbuhan bisnis bank baik penghimpunan DPK, dan peningkatan transaksi kanal layanan bank Increased business growth bank both in terms of deposit mobilization and an increase in transactions through the bank's service channels	1. Peningkatan pertumbuhan DPK; 2. Peningkatan layanan transaksi kanal digital/ elektronifikasi; 3. Peningkatan fee base income; 4. Peningkatan market share DPK. 1. Increase in deposit growth; 2. Increased digital channel transaction services/ electronification; 3. Increase in fee-based income; 4. Increase in DPK market share.	1. Meningkatkan rasio CASA dan peningkatan transaksi kanal layanan; 2. Rencana sinergi dan kolaborasi bisnis dengan Bank calon KUB; 3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama KUB, stakeholders, pemerintah daerah, korporasi dan swasta lainnya; 4. Optimalisasi point reward dan program gimmick. 1. Increase the CASA ratio and increase transactions service channels; 2. Plans for synergy and collaboration business with prospective KUB banks; 3. Enhancement synergy and cooperation among KUBs, stakeholders, the corporations, and other private entities; 4. Optimization of reward points and promotional
3	Peningkatan pertumbuhan kredit. Increase in credit growth.	Peningkatan pertumbuhan bisnis bank pertumbuhan kredit Increasing the bank's business growth and credit growth	1. Peningkatan pertumbuhan kredit; 2. Pengendalian Rasio NPL; 3. Peningkatan market share kredit. 1. Increase credit growth; 2. Control NPL ratio; 3. Increase credit market share.	1. Peningkatan pertumbuhan kredit; 2. Pengendalian Rasio NPL; 3. Peningkatan market share kredit. fokus recovery NPL, Loan at Risk (LAR) dan pengendalian biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); 4. Melakukan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah: Implementasi program semangat tagih, program insentif penagihan, penjualan agunan dibawah tangan via bursa asset, eksekusi lewat KPKNL, gugatan sederhana, PKPU/ kepailitan, kerjasama dengan APH dan strategi penyelesaian lainnya; 5. Peningkatan sinergitas dan kerjasama stakeholders; pemerintah daerah, korporasi dan swasta lainnya.

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
				1. Increase in credit growth; 2. Control of NPL Ratio; 3. Increase in credit, Focus recovery NPL, Loans at Risk (LAR), and cost control Allowance for Impairment (CKPN); 4. Conduct collection and settlement of: Implementation of collection drive, collection incentive program, sale of collateral over-the-counter via the asset exchange, enforcement through the KPKNL, summary proceedings, PKPU/ bankruptcy, collaboration with law enforcement agencies and settlement strategies; 5. Enhancing synergy and cooperation among stakeholders; Government local, corporate, and private.
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Development Human Human	Bank terus berkomitmen meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia mengantisipasi tantangan dan persaingan lembaga jasa keuangan dan perbankan ke depan. The Bank remains committed to improving and developing human to anticipate future challenges and competition in the financial and banking sectors.	Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan. Enhancing the competence and quality of Human Human Resources on an ongoing basis.	1. Melanjutkan program pengembangan sumber daya manusia; 2. Melanjutkan program pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi dalam bisnis dan operasional bank. 1. Continuing human; 2. Continuing education, training, and certification in business and bank operations.
5	Optimalisasi dan pengembangan TI & digitalisasi bisnis dan supporting Optimization and IT development & business digitalization and supporting	Bank secara berkelanjutan melakukan optimalisasi dan pengembangan digitalisasi sesuai kebutuhan bisnis dan operasional The Bank continuously carries out optimization and development of digitalization in accordance with business and operational needs	Peningkatan layanan nasabah dan operasional, pertumbuhan transaksi dan peningkatan fee base income. Improvement customer service and operations, transaction growth, and increased fee-based income.	1. Stabilitas dan dukungan TI dalam operasional dan bisnis; 2. Melakukan evaluasi, penyesuaian, review atas seluruh kanal layanan bank. 3. Inovasi layanan operasional dan bisnis sesuai kebutuhan masyarakat; 4. Sinergi KUB bidang TI & digitalisasi. 1. Stability and IT IT in operational and business; 2. Conducting evaluations, adjustments, review of all bank service channels. 3. Innovation operational and business tailored to the needs of the community; 4. Synergy KUB in the IT & Digitalization.

No	Target Target	Alasan Pemilihan Target Reason for Selecting the Target	Target Asumsi Target Assumptions	Strategi Pencapaian Achievement Strategy
6	Peningkatan tata kelola bank, Manajemen risiko dan Pengendalian internal Improvement of bank governance, risk management, and Internal controls	Bank akan terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, risk management dan kepatuhan The Bank will continue to improve the quality of the implementation of GCG, risk management, and compliance	Peningkatan penerapan GRC (Good Corporate Governance), Risk Management dan Compliance) untuk mempertahankan tingkat kesehatan bank Sehat Improvement in the implementation of GRC (Good Corporate Governance), Risk Management and Compliance) to maintain the bank's "Healthy" rating	1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan bank 2 (SEHAT). 2. Menjaga konsentrasi profil risiko Bank tetap sehat; 3. Mempertahankan profil GCG Bank; 4. Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko dan compliance; 5. Mengoptimalkan penerapan prinsip *three line of defense* dalam mitigasi dan pengendalian *fraud*. 1. Maintain the Bank's Health Level at 2 (SEHAT). 2. Maintaining a healthy risk profile for the Bank; 3. Maintaining the Bank's GCG profile; 4. Improving the quality of risk management and compliance implementation; 5. Optimizing implementation of the principles three lines of defense in mitigation andfraud control fraud.

ASPEK PEMEGANG SAHAM

Shareholder Aspects

Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.

The Bank's shareholders support the implementation of sound business operations and ensure the Bank's business continuity, and are responsible for addressing and resolving the Bank's issues.

Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SK Direksi Nomor 151 Tahun 2025 tentang Pedoman Deviden pada PT. BPD NTT. Bank mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan telah melakukan pengkinian secara berkala atas kebijakan dividen. Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank. Bank juga mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham serta memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen. Hak seluruh pemegang saham Bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The Bank has formulated and maintains a dividend policy that aligns with the provisions set forth in Board of Directors' Resolution No. 151 of 2025 regarding Dividend Guidelines at PT. BPD NTT. The Bank communicates its dividend policy to shareholders and regularly updates the policy. The dividend distribution plan is based on fulfilling shareholders' rights while prioritizing the Bank's interests. The Bank also considers external and internal factors in determining dividend distributions to shareholders and takes into account the Bank's profitability performance in a reasonable manner when calculating dividends. The rights of all the Bank's shareholders are protected, including the right to receive timely reports on the Bank's financial condition, the right to seek resolution if shareholders disagree with the Bank's corporate activities and actions, the right to vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), and the right to receive dividends based on GMS decisions in accordance with applicable laws and regulations.

Terkait pencatatan modal, Bank sebelumnya juga telah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham yang tercantum dalam SK Direksi Nomor 032 Tahun 2023 tentang Penambahan Bab VI pada Keputusan Direksi PT. BPD NTT tentang Pedoman Pencatatan Modal Disetor dan Saham PT. BPD NTT.

Regarding capital accounting, the Bank had previously established a policy on maintaining fair relations with all shareholders, as set forth in Board of Directors Decree No. 032 of 2023 regarding the Addition of Chapter VI to the PT. BPD NTT Board of Directors' Decision on Guidelines for the Accounting of Paid-in Capital and Shares of PT. BPD NTT.

STRATEGI PERMODALAN

Komposisi Permodalan Bank

a. Modal Dasar

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 04 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat Notaris Serlina Sari Dewi Dermawan, S.H,.M.Kn modal dasar Bank adalah Rp 7.000.000.000.000,-. Saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur terbagi atas Saham Seri A dan Saham Seri B. Saham seri A merupakan saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah kota dan Pemerintah Kabupaten se NTT. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima dividen dan sisa likuiditas terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor

Berdasarkan Surat OJK No: SR-138/KO.1802/2025 tanggal 3 Desember 2025 Perihal: Tambahan Modal Disetor PT BPD NTT, modal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah Rp. 2.209.536.800.000,- dengan rincian:

- **Saham Seri A**
  220.822.955 lembar saham dengan nominal Rp 10.000,-
- **Saham Seri B**
  130.725 lembar saham dengan nominal Rp 10.000,-

Berdasarkan Laporan Perkembangan Modal Posisi Desember 2025, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRATEGY

Bank Capital Composition

a. Authorized Capital

Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 04 dated February 7, 2022, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Dermawan, S.H., M.Kn., the Bank's authorized capital is IDR 7,000,000,000,000. Shares in PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur are divided into Series A Shares and Series B Shares. Series A shares are held exclusively by the Provincial Government, City Governments, and Regency Governments throughout NTT. Series A shares carry special voting rights, are exchangeable for Series B shares, receive dividends and residual liquidity first, and hold special voting rights in proposing candidates for the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners. Series B shares are common shares.

b. Paid-in capital and additional paid-in capital

Pursuant to OJK Letter No. SR-138/KO.1802/2025 dated December 3, 2025, regarding the Additional Paid-in Capital of PT BPD NTT, the fully paid-in capital amounts to Rp. 2,209,536,800,000, with the following breakdown:

- **Series A Shares**
  220,822,955 shares with a par value of Rp 10,000
- **Series B Shares**
  130,725 shares with a par value of Rp 10,000 each

Based on the December 2025 Shareholder Structure Report, the shareholder structure is as follows:

nominal dalam ribu rupiah

No	Pemegang Saham	Setoran Modal				
		Sebelum		Setoran	Setelah	
		Nominal	%	Nominal	Nominal	%
1	Pemerintah Provinsi NTT	525.007.550	24,55	-	525.007.550	23,76
2	Pemerintah Kota Kupang	130.000.000	6,08	-	130.000.000	5,88
3	Pemerintah Kab. Kupang	125.000.000	5,85	-	125.000.000	5,66
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	115.654.220	5,41	-	115.654.220	5,23
5	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	100.582.820	4,70	-	100.582.820	4,55
6	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	100.065.770	4,68	-	100.065.770	4,53
7	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	96.781.750	4,53	-	96.781.750	4,38
8	Pemerintah Kab. Sumba Timur	92.280.660	4,32	-	92.280.660	4,18
9	Pemerintah Kab. Sumba Barat	90.340.310	4,23	-	90.340.310	4,09
10	Pemerintah Kab. Rote Ndao	90.272.610	4,22	-	90.272.610	4,09
11	Pemerintah Kab. Malaka	79.041.410	3,70	-	79.041.410	3,58
12	Pemerintah Kab. Belu	73.871.720	3,46	-	73.871.720	3,34
13	PT BPD Jawa Timur	-	0,00	71.428.570	71.428.570	3,23
14	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	66.422.830	3,11	-	66.422.830	3,01

No	Pemegang Saham	Setoran Modal				
		Sebelum		Setoran	Setelah	
		Nominal	%	Nominal	Nominal	%
15	Pemerintah Kab. Manggarai	61.408.110	2,87	-	61.408.110	2,78
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	57.199.670	2,68	-	57.199.670	2,59
17	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	56.492.830	2,64	-	56.492.830	2,56
18	Pemerintah Kab. Lembata	53.960.880	2,52	-	53.960.880	2,44
19	Pemerintah Kab. Ende	52.616.530	2,46	-	52.616.530	2,38
20	Pemerintah Kab. Nagekeo	44.699.670	2,09	-	44.699.670	2,02
21	Pemerintah Kab. Sikka	35.724.630	1,67	-	35.724.630	1,62
22	Pemerintah Kab. Flores Timur	35.298.590	1,65	-	35.298.590	1,60
23	Pemerintah Kab. Ngada	27.057.370	1,27	-	27.057.370	1,22
24	Pemerintah Kab. Alor	27.021.050	1,26	-	27.021.050	1,22
25	Ch. Amas Corputty	957.440	0,04	-	957.440	0,04
26	Luther Oktovianus Wila Huky	233.210	0,01	-	233.210	0,01
27	Johan Christian Tallo	116.600	0,01	-	116.600	0,01
	TOTAL	**2.138.108.230**	**100,00**	**71.428.570**	**2.209.536.800**	**100,00**

c. Perincian Modal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dirinci modal Bank sebagai berikut:

c. Capital Breakdown

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 27 of 2022 regarding the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 on the Minimum Capital Requirements for Commercial Banks, the Bank's capital is detailed as follows:

PERINCIAN MODAL POSISI DESEMBER 2025

CAPITAL DETAILS AS OF DECEMBER 2025

NO	KETERANGAN	NOMINAL (Rupiah Penuh)		
A	MODAL INTI (Tier 1)			2.614.907.017.066
	a. Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*)		2.614.907.017.066	
	1. Modal Disetor	2.209.536.800.000		
	2. Cadangan Tambahan Modal (*disclosed reserve*)	453.435.012.611		
	2.1. Faktor Penambah	660.688.391.940		
	a. Agio Saham	28.571.430.000		
	b. Modal Sumbangan	247.088.700		
	c. Cadangan Umum	487.664.061.080		
	d. Laba Tahun-Tahun Lalu yang dpt diperhitungkan (100%)	0		
	d.i. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	-		
	d.ii. Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kew.keuangan			
	d.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi			
	e. Laba tahun berjalan yg dpt diperhitungkn (100%)	139.205.792.274		
	e.i. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	139.205.792.274		
	e.ii. Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan			
	e.iii. Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi			
	f. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan			
	g. Dana setoran modal	5.000.019.886		
	h. Waran yang diterbitkan (50%)			
	i. Opsi saham yg diterbitkan dlm rangka program komp berbasis saham (50%)			
	j. pendapatan komprehensif lainnya	0		
	k. saldo surplus revaluasi aset tetap	0		
	2.2. Faktor Pengurang	207.253.379.329		
	a. Disagio			
	b. Rugi tahun-tahun lalu yg dpt diperhitungkan (100%)	0		
	b.i. Rugi tahun-tahun lalu	0		
	c. Rugi tahun berjalan yg dpt diperhitungkan (100%)	0		
	c.i. Rugi tahun berjalan	0		
	d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan			
	e. Pendapatan kompr.lain : kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual	0		
	f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	177.566.008.836		
	g. PPA Non Produktif	29.687.370.493		
	h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book			
	3. Faktor Pengurang Modal Inti Utama	48.064.795.545		
	3.1. Perhitungan pajak tangguhan	46.290.082.658		
	3.2. goodwill			
	3.3. Aset tidak berwujud lainnya	1.774.712.887		
	3.4. Seluruh penyertaan			
	3.5. kekurangan modal pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan			
	3.6. eksposur sekuritisasi			
	b. Modal Inti tambahan (*Additional Tier 1*)		0	
B	MODAL PELENGKAP (Tier 2)			96.588.480.625
	a. Modal Saham atau lainnya			
	b. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan modal pelengkap			
	c. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR)	134.219.576.096	96.588.480.625	
	1) Cadangan umum PPA	133.820.158.855		
	2) Cadangan umum PPA Transaksi Rekening Administratif	399.417.241		
	d. Cadangan Tujuan			
C	FAKTOR PENGURANG MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP			0
	a). Pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank			
	b). Penempatan dana pada instrumen utang Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain tersebut.			
D	TOTAL MODAL (A + B - C)			2.711.495.497.691

1.2. Strategi pengelolaan modal

a. Sumber Permodalan

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku dimana modal yang diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianalisa dalam 2 tier:

1. Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan Laba periode berjalan setelah pajak
2. Modal tier 2, meliputi Cadangan Umum Aset Produktif (maksimal 1,25% ATMR) dan Cadangan Tujuan

b. Perencanaan Modal

Untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan mendukung rencana bisnis, bank memiliki kebijakan untuk menjaga modal yang kuat antara lain:

1. Tingkat Pengembalian kepada pemegang saham berupa dividen ditentukan oleh besarnya modal yang disetor.
2. Melaksanakan berbagai strategi yang bertujuan menghasilkan rentabilitas yang tinggi.
3. Meningkatkan Modal Disetor melalui peningkatan/pendekatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota selaku Pemegang Saham.
4. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota melalui dukungan atas program pemberdayaan masyarakat dan kepedulian Bank melalui Corporate Social Responsibility dan promosi-promosi.
5. Menjalankan proses KUB yang telah resmi terjalin dengan BPD Jatim berdasarkan surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kepr-230/D.03/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sebagai Calon Ultimate Shareholder PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Pembelian Saham tertanggal 28 November 2025. Penambahan modal disetor PT BPD NTT oleh PT BPD Jawa Timur sebagai Pemegang Saham Pengendali Kedua Bank pada struktur saham seri A dalam bentuk uang dengan nominal setoran sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada harga per lembar saham sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), sehingga jumlah nominal kepemilikan

1.2. Capital Management Strategy

a. Sources of Capital

The Bank calculates capital requirements based on applicable Financial Services Authority (OJK) regulations, wherein the capital required by the Financial Services Authority (OJK) is analyzed in two tiers:

1. Tier 1 capital, comprising fully paid-in capital, general reserves, retained earnings, and net income for the current period
2. Tier 2 capital, comprising the General Reserve for Earning Assets (maximum 1.25% of ATMR) and the Special Purpose Reserve

b. Capital Planning

To meet the Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) in accordance with its risk profile and to support its business plan, the bank has a policy to maintain strong capital, including:

1. The rate of return to shareholders in the form of dividends is determined by the amount of paid-in capital.
2. Implementing various strategies aimed at generating high profitability.
3. Increasing paid-in capital through enhanced cooperation and collaboration with provincial, regency, and municipal governments as shareholders.
4. To serve as a partner to local governments in community economic development in districts and cities through support for community empowerment programs and the Bank's commitment via Corporate Social Responsibility initiatives and promotional activities.
5. Carrying out the KUB process that has been officially established with BPD Jatim based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. Kepr-230/D.03/2025 regarding the Results of the Fitness and Propriety Assessment of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk as the Prospective Controlling Shareholder and the Government of East Java Province as the Prospective Ultimate Shareholder of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur through a Share Purchase dated November 28, 2025. An increase in the paid-in capital of PT BPD NTT by PT BPD Jawa Timur as the Controlling Shareholder of both Banks in the Series A share structure in the form of cash with a nominal contribution of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) at a price per share of Rp. 14,000.00 (fourteen thousand rupiah),

saham sebesar Rp. 71.428.570.000 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas 7.142.857 lembar saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 14 tanggal 15 Oktober 2025 yang dibuat oleh Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn. Modal disetor PT BPD NTT bertambah dari semula sebesar Rp. 2.138.108.230.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.209.536.800.000 (dua triliun dua ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

resulting in a total nominal shareholding of Rp. 71,428,570,000 (seventy-one billion four hundred twenty-eight million five hundred seventy thousand rupiah) for 7,142,857 shares as set forth in Deed No. 14 dated October 15, 2025, drawn up by Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn. The paid-in capital of PT BPD NTT increased from the original amount of Rp. 2,138,108,230,000.00 (two trillion one hundred thirty-eight billion one hundred eight million two hundred thirty thousand rupiah) to Rp. 2,209,536,800,000 (two trillion two hundred nine billion five hundred thirty-six million eight hundred thousand rupiah).

Kepemilikan Saham dan *Shares Option*

Untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2025, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi NTT.

Selama periode tahun pelaporan 2025 Bank NTT tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Share Ownership and Stock Options

For the period ending December 31, 2025, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank NTT do not hold shares in Bank NTT, other banks, non-bank financial institutions, or other companies located either within or outside the Province of NTT.

During the 2025 reporting period, Bank NTT has no stock options for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers granted through stock offerings or stock option offerings as part of compensation provided to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers of the Bank.

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD TERMASUK ANTI PENYUAPAN

Implementation of Anti-Fraud Strategies, Including Anti-Bribery

Penyimpangan Internal

Pada dasarnya bank menerapkan "*Zero tolerance* untuk tindakan *fraud*" dan bank tidak mentolerir kejadian *fraud* khususnya yang dilakukan oleh pihak Internal Bank, Sebagai lembaga keuangan yang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat maka adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat, Dalam hal pelaporan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan maka Bank menetapkan kategori *fraud* yang dianggap signifikan oleh Bank adalah:

1. Jika kejadian *fraud* diduga melibatkan pejabat eksekutif dan Direksi Bank karena Pejabat Eksekutif dan Direksi merupakan pengendali bisnis bank dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berapapun nilai kerugian dari kejadian *fraud* yang dilakukan;
2. Jika kejadian *fraud* berdampak kepada kerugian financial untuk nasabah sebagai akibat perbuatan oknum internal bank, berapapun nilai kerugian dari kejadian *fraud* yang dilakukan;
3. Jika kejadian *fraud* memiliki dampak pada aktivitasoperasional Bank, reputasi Bank dan berpotensi menjadi perhatian publik, terutama jenis *fraud* merupakan tipibank;
4. Jika kejadian *fraud* diduga melibatkan pihak eksternal Bank baik langsung maupun tidak langsung, Secara langsung berarti bahwa kejadian *fraud* dilakukan oleh pihak eksternal bank tanpa bantuan internal bank, Secara tidak langsung berarti bahwa kejadian *fraud* dilakukan oleh pihak eksternal bank dengan melibatkan atau dibantu oleh pihak internal bank;
5. Untuk kejadian internal *fraud* yang hanya berdampak pada kerugian Bank tanpa melibatkan pihak eksternal dan tanpa merugikan nasabah atau pihak yang terkait dengan bank, dengan nilai nominal di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan internal terhadap kategori *fraud* penyimpangan internal yang memenuhi kriteria diatas yang dilaporkan sebagai temuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Internal Misconduct

In essence, the bank enforces *a* "*zero-tolerance* policy for *fraud*," and the bank does not tolerate instances *of fraud*, particularly those committed by internal bank personnel. As a financial institution whose primary business is providing financial services to the public, it is of utmost importance for the bank to safeguard its reputation and the public's trust. Regarding reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority, the bank defines the categories of *fraud* it considers significant as follows:

1. If the *fraud* incident is suspected to involve executive officers and the Bank's Board of Directors, as executive officers and the Board of Directors are the controllers of the bank's business and hold decision-making authority, regardless of the amount of loss resulting from the *fraud* incident;
2. If the *fraud* incident results in financial losses for customers due to the actions of internal bank personnel, regardless of the amount of loss resulting from *the fraud*;
3. If a *fraud* incident impacts the Bank's operational activities, the Bank's reputation, and has the potential to attract public attention—particularly if *the fraud* involves bank-related schemes;
4. If the *fraud* incident is suspected to involve parties external to the Bank, either directly or indirectly; "Directly" means that the *fraud* incident was committed by a party external to the Bank without assistance from internal Bank personnel; "Indirectly" means that the *fraud* incident was committed by a party external to the Bank with the involvement or assistance of internal Bank personnel;
5. For internal *fraud* incidents that only result in losses to the Bank without involving external parties and without harming customers or parties related to the Bank, with a nominal value exceeding Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah).

Based on internal regulations regarding categories of internal *fraud* that meet the above criteria, such incidents are reported as findings to the Financial Services Authority.

Bank juga telah mengeluarkan:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 154 Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 004 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pedoman Strategi Anti Fraud.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan salah satu bentuk komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Pelayanan Prima melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terus menerus ditingkatkan sehingga pelayanan Nasabah yang disediakan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Bank NTT menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pertam kali pada tanggal 7 Juli 2022 yang ditandai dengan penerimaan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia dengan ruang lingkup penerapan pada 5 Divisi pada Kantor Pusat (Divisi Umum, Divisi Supporting Kredit, Divisi Kredit Komersil & Menengah, Divisi Kredit Mikro, dan Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit). Pada tanggal 4 Agustus 2023 Bank NTT telah menjalani Audit Surveillance Pertama dan pada tanggal 15 November 2024 Bank NTT menjalani Audit Surveillance Kedua sekaligus perluasan ruang lingkup penerapan menjadi 8 Divisi pada Kantor Pusat (Divisi Umum, Divisi Supporting Kredit, Divisi Kredit Komersil & Menengah, Divisi Kredit Mikro, Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Corporate Secretary & Legal). Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam pencegahan suap, pungli dan gratifikasi, Bank NTT memperbarui kembali Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia yang diterima pada tanggal 9 Juli 2025 dengan ruang lingkup penerapan 8 Divisi pada Kantor Pusat.

The Bank has also issued the following:

1. Board of Directors Decree No. 18 of 2020 dated January 29, 2023, concerning the State Officials' Asset Declaration Report (LHKPN) within PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

2. Board of Directors Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 154 of 2024 dated October 11, 2024, concerning the Anti-Bribery Management System Guidelines ISO 37001:2016;
3. Board of Directors Decree No. 004 of 2025 dated January 31, 2025, concerning the Anti-Fraud Strategy Guidelines.

Implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016

The implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) represents one of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur's commitments to delivering excellent service through the continuous enhancement of the Anti-Bribery Management System, thereby ensuring that customer services improve over time.

Bank NTT first implemented the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 on July 7, 2022, marked by the receipt of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate from PT Garuda Sertifikasi Indonesia. The initial scope of implementation covered five divisions at the Head Office (General Division, Credit Supporting Division, Commercial & Middle Credit Division, Micro Credit Division, and Credit Recovery & Resolution Division). On August 4, 2023, Bank NTT underwent its first Surveillance Audit, followed by the second Surveillance Audit on November 15, 2024, which also included an expansion of the implementation scope to eight divisions at the Head Office (General Division, Credit Supporting Division, Commercial & Middle Credit Division, Micro Credit Division, Credit Recovery & Resolution Division, Information Technology Division, Human Capital Division, and Corporate Secretary & Legal Division). As part of its ongoing commitment to preventing bribery, illegal levies, and gratuities, Bank NTT renewed its SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certificate issued by PT Garuda Sertifikasi Indonesia, which was received on July 9, 2025, covering eight divisions at the Head Office.

PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Code of Conduct

Pernyataan Etika Bisnis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank NTT senantiasa mendorong penerapan pedoman perilaku (*code of conduct*) untuk menunjang implementasi Tata Kelola pada seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan, Keberadaan *Code of Conduct* ditujukan antara lain untuk menerapkan nilai-nilai Perseroan ke dalam perilaku Pegawai dan etika bisnis yang sesuai dengan tujuan Perseroan serta menerapkan secara rinci standar perilaku yang harus ditunjukkan oleh seluruh insan Bank NTT dalam melakukan kegiatan usaha

Perseroan, *Code of Conduct* merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan, Pedoman ini juga merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh manajemen di Perusahaan, Hal ini dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* (CoC) dan *Code of Corporate Governance* (CoCG).

Isi Kode Etik

Isi Kode Etik/perilaku Karyawan Bank NTT

1. Sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bekerja dan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab kerja keras);
2. Menempatkan setiap nasabah sebagai Aset mitra utama melalui pelayanan yang cepat, akurat, aman, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata;
3. Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya bank yang sehat dan dinamis;
4. Mengembangkan sikap kewirausahan, inovasi, kreativitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut dalam bisnis perbankan ini;
5. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang;

Business Ethics Statement

In conducting its business activities, Bank NTT consistently promotes the implementation of *a Code of* Conduct to support the implementation of Corporate Governance across all levels of Management and Employees. *The Code of Conduct* is intended, among other things, to embed the Company's values into employee behavior and business ethics aligned with the Company's objectives, as well as to detail the behavioral standards that all members of Bank NTT must demonstrate in conducting business activities.

For the Company, *the Code of Conduct* serves as a guideline for employees in conducting business activities in accordance with the expected corporate culture. This guideline also embodies the Company's business ethics and values that govern how the Company is managed to achieve its vision, mission, and objectives. *The Code of Conduct* applies to all management within the Company. This is stipulated in Board of Directors Resolution No. 89 of 2022 dated June 30, 2022, regarding *the Code of Conduct* (CoC) and *Code of Corporate Governance* (CoCG) Guidelines.

Contents of the Code of Conduct

Contents of the Code of Ethics/Employee Conduct for Bank NTT

1. As a manifestation of faith and piety toward God Almighty (working with honesty, discipline, responsibility, and hard work);
2. Treating every customer as a primary partner asset through fast, accurate, secure, and pleasant service to achieve tangible customer satisfaction;
3. Fostering professionalism among human resources in accordance with their respective roles to support the realization of a healthy and dynamic bank;
4. Fostering an entrepreneurial spirit, innovation, creativity, and a proactive attitude in performing each individual's job duties, while avoiding bureaucratic attitudes—as these are the attitudes required in the banking industry;
5. Prioritizing individual and team performance and the quality of work outcomes to enhance the bank's performance, thereby serving as the foundation for the balanced and optimal improvement of employee well-being;

6. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berpikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat;
7. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan;
8. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan bank secara keseluruhan;
9. Meningkatkan citra bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji,

Sosialisasi dan Pelaksanaan Pedoman Perilaku

Sosialisasi pedoman perilaku Bank NTT dilakukan melalui proses internalisasi berkala yang diikuti oleh seluruh Karyawan Bank NTT dari seluruh tingkat organisasi yang ada. Selain sosialisasi, Bank NTT menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang termasuk dalam Kebijakan Perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang diwajibkan melakukan sosialisasi Etika Kerja untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing.

Bank NTT juga melarang seluruh jajaran yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja, Kantor Cabang serta pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank NTT menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hokum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Whistleblowing System (WBS) di bank NTT

Dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* yang baik serta upaya pencegahan dan penanganan *fraud* yang dapat merugikan bank baik secara finansial maupun non finansial dan untuk

6. Fostering a positive, open-minded attitude, constructive thinking, broad perspectives, a sense of community, harmony, and mutual respect to foster collaboration and a healthy work environment;
7. Enhancing a sense of care and responsiveness, and proactively addressing issues that arise in the workplace, grounded in a spirit of teamwork and prioritizing the company's interests;
8. Prioritizing a hard-working, diligent, and highly disciplined attitude to achieve personal, unit, and overall bank performance;
9. Enhancing the bank's image through orderly, neat, and punctual conduct, keeping promises, and upholding good professional ethics as banking professionals, and refraining from unethical behavior;

Socialization and Implementation of the Code of Conduct

The dissemination of Bank NTT's Code of Conduct is conducted through periodic internalization processes attended by all Bank NTT employees across all organizational levels. In addition to socialization, Bank NTT applies ethical standards in all business activities based on the principles of Corporate Governance included in the Company Policy. All work units at the Head Office and Branch Offices are required to conduct Work Ethics socialization to uphold honesty, integrity, and fairness in all business activities within their respective work environments.

Bank NTT also prohibits all personnel—including the Board of Commissioners, the Board of Directors, all departments, branch offices, and related parties—from engaging in transactions that violate the law and the principles of corporate governance. Bank NTT implements oversight functions through audits based on sound and generally accepted principles and consistently works to ensure that violations of applicable norms and applicable regulations are subject to sanctions in accordance with the provisions, whether administrative or legal. Each work unit is obligated to consistently follow up on every audit finding communicated by the oversight function.

Whistleblowing System (WBS) at Bank NTT

In order to *establish* sound *corporate governance* and to prevent and address *fraud* that could cause financial or non-financial harm to the bank, as well as to ensure the implementation of an effective mechanism for resolving

menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif serta sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di bank NTT yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen, bank NTT telah menerbitkan suatu produk hukum mekanisme pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 169 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pedoman Strategi Anti *Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Guna mencegah terjadinya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT, maka secara *continue* dilakukan sosialisasi terkait pencegahan *fraud* dan mewajibkan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali menandatangani Deklarasi Anti *Fraud (Anti Fraud Statement).*

Mekanisme Pelaksanaan Penanganan *Whistleblowing System* (WBS)

Terkait dengan mekanisme pengelolaan pelaporan pengaduan *(whistleblowing system),* tindakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas tindakan *fraud* yang terjadi di Bank NTT ditangani oleh Sub Divisi Anti *Fraud* yang berada pada Divisi Pengawasan & SKAI.

Adapun media pelaporan pengaduan yang dapat dipakai yaitu:

1. Bersurat secara resmi dengan alamat tujuan: Direktur Utama/Dewan Komisaris Bank NTT cc, Divisi Pengawasan & SKAI Jl. W.J. Lalamentik No, 102 Kota Kupang-NTT;
2. Melalui *hotline number*: (0380) 840555-309/fax (0380) 840570;
3. Pelaporan pengaduan yang terjadi di Kantor Cabang bank NTT dapat disampaikan melalui staff Divisi Manajemen Risiko (*Risk Control*) pada masing-masing Kantor Cabang bank NTT untuk selanjutnya apabila benar terjadi penyimpangan akan dilaporkan ke Divisi Pengawasan & SKAI untuk ditindak lanjuti.

Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran

Terkait dengan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), Divisi Pengawasan & SKAI akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur yang ada di bank NTT yaitu:

complaints regarding violations and to address various issues that do not comply with the ethical standards in effect at Bank NTT—committed by certain employees and members of management— Bank NTT has issued a legal instrument establishing a complaint reporting mechanism (*whistleblowing system*) as set forth in the Board of Directors' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 169 of 2022 dated October 31, 2022, regarding *the Anti-Fraud* Strategy Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, To prevent *fraud* committed by certain employees and management members of Bank NTT, *ongoing* awareness campaigns regarding *fraud* prevention are conducted, and all employees without exception are required to sign an *Anti-Fraud* Declaration *(Anti-Fraud Statement).*

Mechanism for Implementing the Whistleblowing System (WBS)

Regarding the mechanism for managing complaint reporting *(whistleblowing system),* the implementation of preventive measures and the handling of *fraud* occurring at Bank NTT are managed by the *Anti-Fraud* Subdivision within the Supervision & SKAI Division.

The following channels may be used to file a complaint:

1. Send a formal letter to the following address: President Director/Board of Commissioners of Bank NTT cc, Supervision & SKAI Division, Jl. W.J. Lalamentik No. 102, Kupang City, NTT;
2. Via the *hotline* number: (0380) 840555-309 / fax (0380) 840570;
3. Complaints regarding incidents at Bank NTT branch offices may be submitted through staff of the Risk Management Division (*Risk Control*) at each Bank NTT branch office; if a violation is confirmed, it will be reported to the Supervision & SKAI Division for further action.

Procedures for Handling Reports of Violations

Regarding complaint reporting (*whistleblowing system*), the Supervision & SKAI Division will follow up in accordance with NTT Bank's established procedures, namely:

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran laporan pengaduan yang disampaikan, hal ini untuk menghindari terjadinya laporan pengaduan yang sifatnya fitnah;
2. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dikategorikan *fraud* dilakukan oleh oknum karyawan, Divisi Pengawasan & SKAI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama, Jika laporan tersebut membutuhkan proses investigasi maka dengan persetujuan Direktur Utama, Divisi Pengawasan & SKAI akan melakukan proses investigasi;
3. Apabila pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Direksi, maka laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan proses investigasi tetap dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI atau Divisi SDM dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Jangka waktu proses verifikasi sampai pada dilakukannya investigasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pemantauan Tindak Lanjut dan Penyampaian Tanggapan

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI;
2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya;
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

Komitmen

Sebagai bentuk komitmen bank NTT dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris bank NTT:

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT;

1. Verifying the accuracy of the submitted complaint to prevent the filing of malicious or defamatory reports;
2. If the verification results indicate a violation categorized as *fraud* committed by an employee, the Supervision & SKAI Division will report the verification results to the President Director. If the report requires an investigation, then with the President Director's approval, the Supervision & SKAI Division will conduct the investigation;
3. If the violation is suspected to have been committed by a member of the Board of Directors, the verification report shall be submitted to the Board of Commissioners, and the investigation process shall still be conducted by the Supervision & SKAI Division or the Human Resources Division with the approval of the Board of Commissioners;
4. The verification process, including the investigation, must be completed within a maximum of 7 (seven) business days and may be extended for an additional 7 (seven) business days.

Follow-up Monitoring and Submission of Responses

1. Monitoring of follow-up actions regarding reports of violations is conducted by the Supervision & SKAI Division;
2. The Supervision & SKAI Division is required to report complaints of violations to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
3. Bank NTT, through the Supervision & SKAI Division, may inform and/or provide a response regarding the status of the complaint resolution process to *stakeholders* and/or *stakeholder* representatives who request an explanation from the bank regarding the complaint they have filed;
4. Bank NTT is not required to respond to complaints of violations without accompanying proof of identity.

Commitment

1As part of Bank NTT's commitment to implementing *anti-fraud* strategies and to provide guidance to stakeholders regarding the complaint mechanism for violations, the Board of Directors and the Board of Commissioners of Bank NTT:

1. Are responsible for the implementation of the policy for handling complaints regarding violations allegedly committed by individual employees and members of Bank NTT's management;

2. Memastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang masuk disertai dengan identitas yang lengkap atau yang tidak disertai identitas namun menyertakan bukti-bukti terjadinya pelanggaran;
3. Direksi dan Dewan Komisaris menjamin adanya perlindungan terhadap pelaporan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dengan menyertakan identitas pelapor dan memastikan bahwa kerahasiaan identitas tetap terjaga.

Upaya Peningkatan Efektivitas Program *Whistleblowing*

Bank NTT telah melakukan usaha untuk meningkatkan efektivitas Program *Whistleblowing* seperti :

1. Sosialisasi *whistleblowing* kepada karyawan Bank NTT;
2. Mendorong karyawan Bank untuk berani melaporkan kejadian;

Perlindungan Pelapor (*Whistleblower Protection*)

Penerapan perlindungan pelapor dan korban pada bank NTT dapat mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor: 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga:

1. Bank NTT tidak akan melakukan tindakan pembalasan apapun baik dalam bentuk kompensasi, diskriminasi maupun terminasi kepada pegawai maupun orang yang bertindak atas nama karyawan yang melakukan pelaporan;
2. Bank NTT akan memberikan perlindungan penuh baik untuk identitas pelapor maupun perlindungan keamanan pelapor dan keluarganya;
3. Bank NTT dapat memberikan suatu insentif sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang melakukan pengaduan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum karyawan atau oknum manajemen bank NTT sehingga dapat menyelamatkan kerugian finansial atau aset milik bank NTT.

Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi

Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing, Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya Keputusan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 89

2. Ensure that all received reports of violations are accompanied by complete identification or, if not accompanied by identification, include evidence of the violation;
3. The Board of Directors and the Board of Commissioners guarantee protection for reports of violations submitted with the reporter's identity and ensure that the confidentiality of the identity is maintained.

Efforts to Improve the Effectiveness of the Whistleblowing Program

Bank NTT has made efforts to improve the effectiveness of the *Whistleblowing* Program, such as:

1. Educating Bank NTT employees about *whistleblowing*;
2. Encouraging Bank employees to have the courage to report incidents;

Whistleblower Protection

The implementation of protection for whistleblowers and victims at Bank NTT is based on the provisions of Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, whereby:

1. Bank NTT will not take any retaliatory action, whether in the form of compensation, discrimination, or termination, against employees or individuals acting on behalf of employees who file reports;
2. Bank NTT will provide full protection for both the whistleblower's identity and the safety of the whistleblower and their family;
3. Bank NTT may provide an incentive as a token of appreciation to employees who report violations committed by individual employees or members of Bank NTT's management, thereby preventing financial losses or the loss of Bank NTT's assets.

Efforts to Enforce the Code of Ethics and Types of Sanctions

The Bank consistently encourages all employees to adhere to the Code of Conduct and to remind one another to work with focus, professionalism, and integrity within their respective roles. Regarding the enforcement of the Code of Conduct, the Bank has established and regulated it through East Nusa Tenggara Regional Development Bank Decision No. 89

Tahun 2022 tentang Pedoman *Code of Conduct* (CoC) dan *Code of Corporate Governance* (CoCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dimana penetapan penerapan *Good Corporate Governance* Bank, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT. Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Bentuk sanksi yang diberikan berupa :

a. Teguran lisan yang dituangkan dalam *coaching form*
b. Surat peringatan
c. Denda dan atau ganti kerugian
d. Demosi
e. Surat pembebasan tugas sementara
f. Skorsing
g. Pemutusan hubungan kerja

Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materiil, seperti korupsi atau *fraud*.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan SDM, Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat.

of 2022 on Guidelines for *the Code of Conduct* (CoC) and *Code of Corporate Governance* (CoCG) of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank, which establishes the implementation of *Good Corporate Governance* at the Bank. Meanwhile, to improve the quality of service to customers, the company has a Service Quality SOP and has issued a Pocket Guide to Operational Service Standards, which every employee of Bank NTT is required to possess. In the event of a violation of the Code of Ethics by an employee, the Bank may impose sanctions by considering the nature of the offense, the resulting reputational or material losses, and the violator's efforts to rectify the situation.

a. The forms of sanctions imposed are as follows:

b. A verbal reprimand documented in *a coaching form*
c. A written warning
d. Fines and/or compensation for damages
e. Demotion
f. Letter of temporary suspension
g. Suspension Termination

In addition to the forms listed above, sanctions for violations of the Code of Ethics may also affect the provision of benefits, loans, compensation adjustments, or employee promotions. Legal action will be taken if the violation is deemed material, such as corruption or *fraud*.

Sanctions for violators of the Code of Ethics and responsible parties will be determined based on HR decisions; the Code of Ethics will be continuously refined or aligned with the company's and society's conditions.

Laporan *Fraud* Tahun 2025

2025 Fraud Report

NO.	UNIT KERJA Department	JABATAN Position
1.	Kantor Fungsional Semau, Kantor Cabang Oelamasi Semau Functional Office, Oelamasi Branch Office	Teller, Petugas CS dan Kepala KF Teller, Customer Service Officer, and Functional Office Head
2.	Kantor Fungsional RSUD W. Z. Johanes, Kantor Cabang Utama Kupang W. Z. Johanes Regional General Hospital Functional Office, Kupang Main Branch Office	Teller Teller
3.	Kantor Fungsional Bupati SBD, Kantor Cabang Waibakul SBD Regent's Functional Office, Waibakul Branch Office	Petugas CS Customer Service Representative
4.	Kantor Fungsional Bupati SBD dan Cabang Pembantu Elopada SBD Regent's Functional Office and Elopada Branch Office	Teller Teller

NO.	UNIT KERJA Department	JABATAN Position
5.	Kantor Cabang Oelamasi Oelamasi Branch Office	Teller Teller
6.	Kantor Fungsional UKAW KCK Kupang UKAW KCK Kupang Functional Office	Teller Teller
7.	Kantor Fungsional Bupati Alor, Kantor Cabang Alor Alor Regent's Functional Office, Alor Branch Office	PGS Kepala Kantor Fungsional Acting Head of the Functional Office
8.	Kantor Cabang Sabu Sabu Branch Office	Tenaga Marketing Marketing Staff

Pemantauan Tindak Lanjut dan Penyampaian Tanggapan

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI;
2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada *stakeholder*s dan/atau perwakilan *stakeholders* yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya;
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

Follow-up Monitoring and Response Submission

1. Monitoring of follow-up on violation complaints is conducted by the Supervision & SKAI Division;
2. The Supervision & SKAI Division is required to report complaints of violations to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
3. Bank NTT, through the Supervision & SKAI Division, may inform and/or provide a response regarding the status of the resolution process for violation complaints to stakeholders and/or *stakeholder* representatives who request an explanation from the bank regarding the violation complaint they have filed;
4. Bank NTT is not required to respond to a complaint of a violation without accompanying proof of identity.

Permasalahan Hukum

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 105 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko, Limit risiko bank yang telah ditetapkan oleh Bank untuk permasalahan hukum adalah jumlah gugatan hukum perdata untuk kasus bawaan maksimal 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun dan untuk kasus baru maksimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun, uraian sengketa yang masih berjalan dan sengketa hukum baru dijabarkan sebagai berikut:

Legal Issues

Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 105 of 2025 dated June 30, 2025, regarding the Policy on the Determination of Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits, The risk limit set by the Bank for legal matters is the number of civil lawsuits for existing cases, with a maximum of 5 (five) times in 1 (one) year, and for new cases, a maximum of 10 (ten) times in 1 (one) year. The breakdown of ongoing disputes and new legal disputes is as follows:

Jumlah Number		
Sengketa 2023 Disputes 2023	Sengketa 2024 Disputes 2024	Disputes 2025
3	6	13

Seluruh kasus yang timbul merupakan kasus Perdata, Kasus baru yang timbul dalam tahun 2025 ini sebanyak 13 (tiga belas) kasus baru, sedangkan kasus bawaan berjumlah 9 (sembilan) kasus. Untuk seluruh sengketa yang ada, masih perlu mendapatkan perhatian khusus manajemen karena melampaui limit risiko Bank yang telah ditetapkan yaitu jumlah gugatan hukum perdata untuk kasus bawaan maksimal 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun dan untuk kasus baru maksimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Terhadap sengketa hukum perdata, Sub Divisi Legal melakukan pendampingan sampai penyelesaian kasus hukum. Seluruh kasus yang timbul merupakan kasus Perdata.

All cases that have arisen are civil cases. There were 13 (thirteen) new cases arising in 2025, while there were 9 (nine) carryover cases. All existing disputes still require special management attention as they exceed the Bank's established risk limits, namely a maximum of 5 (five) civil lawsuits for carryover cases per year and a maximum of 10 (ten) for new cases per year. Regarding civil legal disputes, the Legal Subdivision provides assistance until the legal case is resolved. All cases that arise are civil cases.

Pengungkapan Manajemen Risiko secara kuantitatif sesuai SE BI No. 14/35/DNDP tanggal 10 Desember 2012

Disclosure of Risk Management quantitatively according Circular Letter No. 14/35 / DPNP on December 10, 2012

Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

Table 1.a Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM QUANTITATIVE DISCLOSURE OF CAPITAL STRUCTURE OF COMMERCIAL BANKS						
No	KOMPONEN MODAL	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024		CAPITAL SCTRUCTURE
		Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
I	KOMPONEN MODAL					CAPITAL SCTRUCTURE
	A. Modal Inti	2.659.691		2,480,232		Core Capital (Tier - 1)
	1. Modal Disetor	2.209.537		2,114,551		Paid-in Capital
	2. Cadangan Tambahan Modal	505.571		654,143		Reserves of Additional Paid-in Capital
	3. Modal Inovatif *)					Innovative Capital Instruments *)
	4. Faktor Pengurang Modal Inti *)	53.416		288,462		Tier - 1 Capital Deduction Factor
	5. Kepentingan Non Pengendali					Non-Controlling Interest
	B. Modal Pelengkap	98.213		91,485		Supplementary Capital
	1. Level Atas (Upper Tier 2) *)					(Upper Tier 2) *)
	2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *)					2. (Lower Tier 2) maximum 50% of Tier - 1 Capital *)
	3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap*)					Tier - 2 Capital Deducation Factor
	C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal pelengkap					Tier - 1 and Tier - 2 Capital Deduction Factor
	Eksposur Sekuritisasi					Securitization exposure
	D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)					Additional Supplementary Capital (Tier - 3)
	E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK					Additional Supplementary Capital for Market Risk Anticipation
	MENGANTISIPASI RISIKO PASAR					MARKET RISK ANTICIPATE

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM
QUANTITATIVE DISCLOSURE OF CAPITAL STRUCTURE OF COMMERCIAL BANKS

No	KOMPONEN MODAL	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024		CAPITAL SCTRUCTURE
		Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	Bank Bank	Konsolidasi Consolidated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C)	2.757.904		2,571,717		TOTAL OF CORE CAPITAL AND SUPPLEMENTARY CAPITAL
III	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E)	2.757.904		2,571,717		TOTAL OF CORE CAPITAL, SUPPLEMENTARY CAPITAL, AND ADDITIONAL SUPPLEMENTARY FOR MARKET RISK ANTICIPATION (A+B+C+E)
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT	7.857.039		7,318,818		RISK WEIGHTED ASSET FOR CREDIT RISK
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL	2.317.684		2,186,950		RISK WEIGHTED ASSET FOR OPERATIONAL RISK
VI	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR	110.339		-		RISK WEIGHTED ASSET FOR MARKET RISK
	A. Metode Standard					Standardized Method
	B. Model Internal					Internal Model
VII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II: (IV+V)]	26,81		27.05		MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK AND OPERATIONAL RISK [II: (IV+V)]
VIII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL & RISIKO PASAR [(III: (IV+V+VI)]	26,81		27.05		MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK AND MARKET RISK [(III: (IV+V+VI)]

Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Table 2.4.a. Disclosure of Receivables and Reserves by Region - Bank Individually

No.	Keterangan Description	Posisi Tanggal Laporan Report Date Position				
		Wilayah Area				
		Wilayah 1 Area 1	Wilayah 2 Area 2	Wilayah 3 Area 3	dst. dst.	Total Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Bill	8,980,746	4,964,956			13,945,702
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3) Receivables that experience increased or worsened credit risk (Stage 2 and Stage 3)	8,980,746	4,964,956			13,945,702
	a. Belum jatuh tempo a. Not yet due	8,794,078	4,933,745			13,727,824
	b. Telah jatuh tempo b. It has matured	186,667	31,211			217,878
3	CKPN - *Stage* 1 CKPN - Stage 1	10,449	4,134			14,583
4	CKPN - *Stage* 2 CKPN - Stage 2	10,912	2,640			13,552
5	CKPN - Stage 3	362,959	75,495			438,454
6	Tagihan yang dihapus buku Written-off bills					

Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL								
31 Desember 2025 December 31, 2025								
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1 Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2 Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3 Allowance for Impairment	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Non Past Due				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Posisi Tanggal Laporan :							
1	Rumah Tangga	304.780	304.705	75	1.290	4.057	11.362	
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	12.014.360	12.011.031	3.329	8.980	3.734	64.830	
3	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	66.327	51.707	14.620	409	70	14.978	
4	Pertambangan dan Penggalian	15.899	14.303	1.596	46	141	1.102	
5	Industri pengolahan	121.121	117.095	4.026	191	135	9.013	
6	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6.207	1.212	4.995	0	3	979	
7	Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang Sampah & Aktivitas Remediasi	7.617	7.615	2	22	0	2	
8	Konstruksi	460.484	424.519	35.965	627	273	158.982	
9	Perdagangan besar dan eceran	532.748	389.882	142.866	1.474	1.557	147.058	
10	Pengangkutan dan pergudangan	13.355	12.968	387	72	299	1.093	
11	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	111.240	103.874	7.366	172	2.728	12.650	
12	Informasi & Komunikasi	617	615	2	5	4	2	
13	Aktivitas Keuangan & Asuransi	167.329	167.329	0	1.013	0	32	
14	Real Estate	17.394	17.301	93	57	69	6.588	
15	Aktifitas Profesional, Ilmiah & Teknis	596	596	0	0	0	596	
16	Aktivitas Penyewaan & Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan & Penunjang Usaha Lainnya	16.728	16.636	92	33	201	5.069	
17	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0	
18	Pendidikan	10.151	10.151	0	19	188	0	
19	Aktivitas Kesehatan Manusia & Sosial	20.712	19.650	1.061	119	0	2.715	
20	Aktivitas Kesehatan Manusia & Sosial	52.450	52.450	0	37	0	0	
21	Aktivitas Jasa Lainnya	4.251	2.865	1.386	14	0	1.386	
22	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang & Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	1.337	1.320	17	2	94	17	
23	Aktivitas Badan Internasional & Badan Extra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	
	Total	13.945.702	13.727.824	217.878	14.583	13.552	438.454	

Table 2.5.a Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Bank Only

(Jutaan Rp)

PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL								
31 Desember 2024 December 31, 2024								
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Receivables	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 1 Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 2 Allowance for Impairment	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Stage 3 Allowance for Impairment	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables
			Belum Jatuh Tempo Non Past Due	Telah jatuh tempo Non Past Due				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Posisi Tanggal Laporan :							
1	Rumah Tangga	282,288	282,285	3	759	2,850	6,529	
2	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	10,519,584	10,519,514	70	5,860	2,356	53,012	
3	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	89,161	84,575	4,586	353	63	20,323	
4	Pertambangan dan Penggalian	20,310	20,310	0	53	349	142	
5	Industri pengolahan	206,737	206,080	657	210	445	6,457	
6	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6,038	1,674	4,364	4	0	2,134	
7	Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang Sampah & Aktivitas Remediasi	11,468	11,468	0	34	0	3	
8	Konstruksi	397,552	219,109	178,443	22,292	702	71,009	
9	Perdagangan besar dan eceran	516,261	462,074	54,187	2,137	1,508	125,101	
10	Pengangkutan dan pergudangan	17,679	17,451	228	129	161	1,001	
11	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	117,216	115,342	1,875	495	334	8,233	
12	Informasi & Komunikasi	896	896	0	6	6	34	
13	Aktivitas Keuangan & Asuransi	95,573	95,573	0	524	0	0	
14	Real Estate	13,573	13,561	12	71	49	6,620	
15	Aktifitas Profesional, Ilmiah & Teknis	10	10	0	0	0	596	
16	Aktivitas Penyewaan & Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan & Penunjang Usaha Lainnya	16,522	16,502	20	36	398	468	
17	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0	
18	Pendidikan	11,948	11,948	0	31	13	0	
19	Aktivitas Kesehatan Manusia & Sosial	20,849	20,533	316	57	0	2,570	
20	Aktivitas Kesehatan Manusia & Sosial	70,736	70,736	0	37	0	0	
21	Aktivitas Jasa Lainnya	3,958	3,926	33	13	0	1,359	
22	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang & Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	282	282	0	1	0	17	
23	Aktivitas Badan Internasional & Badan Extra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	
	Total	12,418,640	12,173,847	244,793	33,103	9,235	305,608	

Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual				
No	Keterangan	31 Desember 2025 December 31, 2025		
		CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual"	**CKPN Kolektif** "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective"	**Stage 3**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo awal CKPN	14.583	13.552	438.454
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	0	0	0
	a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan			
	b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan			
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan			
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan			
Saldo akhir CKPN		14.583	13.552	438.454

Table 2.6.a Movements of Impairment Provision Disclosure - Bank Only

(million Rp)

Movements of Impairment Provision Disclosure - Bank Only				
	31 Desember 2024 December 31, 2024			
	CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual"	**CKPN Kolektif** "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective"	**Stage 3**	**Description**
	(3)	(4)	(5)	
	33,103	9,235	305,608	Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses
	0	0	0	Additional/reversal allowance for impairment losses
				during the year-net
				Reversal allowance for impairment losses during the year
				Allowance for impairment losses used for written off receivables during the year
				Other additional allowance during the year
	33,103	9,235	305,608	"Ending Balance-Allowance for Impairment

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual 31 Desember 2025 December 31, 2025							
No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT. Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia	AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA	AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA-	A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA-	BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB- Id BBB+ s.d Id BBB-	BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		0	0	0	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan						
4	Multilateral dan Lembaga Internasional						
5	Tagihan Kepada Bank		15.802				
6	Tagihan berupa Covered Bond						
7	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya						
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
9	Kredit Beragun Properti Komersial						
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi						
11	Kredit Pegawai/Pensiunan						
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
13	Tagihan kepada Korporasi						
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
15	Aset Lainnya						
16	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	TOTAL		15.802	0	0	0	0

Table 3.1.a. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(million Rp)

Disclosure Of Portfolio Net Claims By Category And Scale Rating - Bank Individual

31 Desember 2025
December 31, 2025

B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr]B- Id B+ s.d Id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- **Less than B-** **Less than B-** **Less than B3** **Less than B-(idn)** **Less than [Idr] B-** **Less than Id B-**	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1	A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2	A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4	Tanpa Peringkat Without Rating	Total Total
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0	0	0	0	0	0	4.723.172	4.723.172	0
						439.072	439.072	2,845,553
						0	0	444,913
						0	0	32,025
						365.780	381.582	0
						0	0	0
						0	0	0
						304.700	304.700	304,062
						167.922	167.922	66,055
						28.422	28.422	23,049
						12.000.020	12.000.020	10,553,786
						482.704	482.704	817,049
						250.358	250.358	259,907
						57.739	57.739	72,941
						1.012.748	1.012.748	857,980
							0	0
0	0	0	0	0	0	19.832.637	19.848.439	16,277,320

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

31 Desember 2024
December 31, 2024

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT. Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia	AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA	AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA-	A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA-	BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB- Id BBB+ s.d Id BBB-	BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		0	0	0	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan						
4	Multilateral dan Lembaga Internasional						
5	Tagihan Kepada Bank		17,795				
6	Tagihan berupa Covered Bond						
7	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya						
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
9	Kredit Beragun Properti Komersial						
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi						
11	Kredit Pegawai/Pensiunan						
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
13	Tagihan kepada Korporasi			8,000			
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
15	Aset Lainnya						
16	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
	TOTAL		17,795	8,000	0	0	0

Table 3.1.a. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(million Rp)

Disclosure Of Portfolio Net Claims By Category And Scale Rating - Bank Individual

31 Desember 2024
December 31, 2024

B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr]B- Id B+ s.d Id B-	Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- **Less than B-** **Less than B-** **Less than B3** **Less than B-(idn)** **Less than [Idr] B-** **Less than Id B-**	A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1	A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2	A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4	Tanpa Peringkat Without Rating	Total Total
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0	0	0	0	0	0		0
						2,845,553	2,845,553
						444,913	444,913
						14,230	32,025
							0
							0
							0
						304,062	304,062
						66,055	66,055
						23,049	23,049
						10,553,786	10,553,786
						817,049	817,049
						251,907	259,907
						72,941	72,941
						857,980	857,980
							0
0	0	0	0	0	0	16,251,525	16,277,320

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual						
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk				
		0%	20%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,845,553				
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank		18,065		13,960	
5	Tagihan berupa Covered Bond					
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya					
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya					
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal					
9	Kredit Beragun Properti Komersial					
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi					
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan					
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel					
13	Tagihan kepada Korporasi		8,000			
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
15	Aset Lainnya					
	Total Eksposur Neraca					
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank					
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya					
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal					
7	Kredit Beragun Properti Komersial					

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only								
31 Desember 2024 December 31, 2024						ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk								
50%	75%	100%	150%	Lainnya				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	
							0	Balance Sheet Exposure
						0	0	Receivables on Sovereigns
444,913						222,457	22,246	Receivables on Public Sector Entities
						0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						9,197	920	Receivables on Banks
								Loans Secured by Residential Property
								Loans Secured by Commercial Real Estate
								Employee/Retired Loans
	304,062			315,613		228,047	22,805	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
	66,055			90,375		49,541	4,954	Receivables on Corporate
		23,049						Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi
10,553,786						5,276,893	527,689	Kredit Pegawai atau Pensiunan
		817,049				817,049	81,705	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
		251,907				253,507	25,351	Past Due Receivables
4,430		15,514	52,997			97,225	9,722	Other Assets
						0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
				405,988		0	0	Total Balance Sheet Exposure
						6,953,915	695,391	Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
								Receivables on Sovereigns
								Receivables on Public Sector Entities
								Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
								Receivables on Banks
								Loans Secured by Residential Property
								Loans Secured by Commercial Real Estate
								Employee/Retired Loans

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual								
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
		0%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi							
9	Kredit Pegawai atau Pensiunan							
10	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel							
11	Tagihan kepada Korporasi							
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
	Total Eksposur TRA	0	0	0	0	0	0	0
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya							
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
7	Tagihan kepada Korporasi							
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk							

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only									
31 Desember 2024 December 31, 2024									
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk							ATMR RWA	**Beban Modal** Capital load	**Portfolio Category**
40%	50%	75%	85%	100%	Lainnya				
(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)		(15)	(16)	
									Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
									Receivables on Corporate
					334,230				
					80,521		80,521		Past Due Receivables
									Exposures at Sharia Based Business (if any)
0	0	0	0	0	414,751		80,521		Total Off Balance Transaction
									Counterparty Credit Risk
									Receivables on Sovereigns
									Receivables on Public Sector Entities
									Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
									Receivables on Banks
									Receivables on Corporate
									Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
									Exposures at Sharia Based Business (if any)
									Total Counterparty Credit Risk Exposure
									Total (A+B+C)

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual						
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk				
		0%	20%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank					
5	Tagihan berupa Covered Bond					
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya					
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya					
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal					
9	Kredit Beragun Properti Komersial					
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi					
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan					
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel					
13	Tagihan kepada Korporasi					
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
15	Aset Lainnya					
	Total Eksposur Neraca					
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah					
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik					
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank					
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya					
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal					
7	Kredit Beragun Properti Komersial					

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only								
31 Desember 2025 December 31, 2025						ATMR RWA	Beban Modal Capital load	Portfolio Category
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk								
50%	75%	100%	150%	Lainnya				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	
							0	Balance Sheet Exposure
							0	Receivables on Sovereigns
						0	0	Receivables on Public Sector Entities
						0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
					14,788	0	0	Receivables on Banks
						0	0	Loans Secured by Residential Property
								Loans Secured by Commercial Real Estate
								Employee/Retired Loans
								Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
						0	0	Receivables on Corporate
						0	0	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi
								Kredit Pegawai atau Pensiunan
						0	0	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
						0	0	Past Due Receivables
						0	0	Other Assets
						0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
					14,788	0	0	Total Balance Sheet Exposure
						0	0	Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure
						0	0	Receivables on Sovereigns
						0	0	Receivables on Public Sector Entities
						0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
						0	0	Receivables on Banks
								Loans Secured by Residential Property
						0	0	Loans Secured by Commercial Real Estate
						0	0	Employee/Retired Loans

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual								
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk						
		0%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi							
9	Kredit Pegawai atau Pensiunan							
10	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel							
11	Tagihan kepada Korporasi							
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
	Total Eksposur TRA							
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah							
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik							
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional							
4	Tagihan Kepada Bank							
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya							
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
7	Tagihan kepada Korporasi							
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)							
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	0	0	0	0	0	0	0

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(million Rp)

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only									
31 Desember 2025 December 31, 2025									
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk							ATMR RWA	**Beban Modal** Capital load	**Portfolio Category**
40%	50%	75%	85%	100%	Lainnya				
(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)		(15)	(16)	
									Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
									Receivables on Corporate
							0	0	
							0	0	Past Due Receivables
							0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
						0	0	0	Total Off Balance Transaction
							0	0	Counterparty Credit Risk
							0	0	Receivables on Sovereigns
							0	0	Receivables on Public Sector Entities
							0	0	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
							0	0	Receivables on Banks
									Receivables on Corporate
							0	0	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
							0	0	Exposures at Sharia Based Business (if any)
							0	0	Total Counterparty Credit Risk Exposure
0	0					0	0	0	Total (A+B+C)

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2024 December 31, 2024				
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By				
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other	Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,845,553					2,845,553
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	444,913					444,913
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0					0
4	Tagihan Kepada Bank	32,025					32,025
5	Tagihan berupa Covered Bond	0					0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0					0
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	0					0
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	304,062					304,062
9	Kredit Beragun Properti Komersial	66,055					
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	23,049					
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	10,553,786					
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	817,049					
13	Tagihan kepada Korporasi	259,907					259,907
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	72,941					72,941
15	Aset Lainnya	857,980					857,980
16	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	0	0	0	0
	Total Eksposur Neraca	16,277,320	0	0	0	0	4,817,381
B	Eksposur Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya						
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal						
7	Kredit Beragun Properti Komersial						
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi						
9	Kredit Pegawai atau Pensiunan	78,808					78,808
10	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
11	Tagihan kepada Korporasi						

Table 4.2.a Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual							
No.	**Kategori Portofolio**	**Tagihan Bersih** Net Receivables	**31 Desember 2024** December 31, 2024				
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By				
			Agunan Collateral	**Garansi** Guarantee	**Asuransi Kredit** Loan Insurance	**Lainnya** Other	**Bagian Yang Tidak Dijamin** Non-secured Part
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
14	Total Eksposur Rekening Administratif	78,808	0	0	0	0	78,808
C	Eksposur Counterparty Credit Risk						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0	0	0	0
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	0	0	0	0	0	0
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	0
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	0	0	0	0	0	0
7	Tagihan kepada Korporasi	0	0	0	0	0	0
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	0	0	0	0
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	0	0	0	0	0	0
	Total (A+B+C)	16,356,128	0	0	0	0	4,896,189

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Net Receivables	31 Desember 2025 December 31, 2025				
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By				
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Loan Insurance	Lainnya Other	Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4,723,172					4,723,172
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	439,072					439,072
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0					0
4	Tagihan Kepada Bank	0					0
5	Tagihan berupa Covered Bond	381,582					381,582
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0					0
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	0					0
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	304,700					304,700
9	Kredit Beragun Properti Komersial	167,922					167,922
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	28,422					28,422
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	12,000,020					12,000,020
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	482,704					482,704
13	Tagihan kepada Korporasi	250,358					250,358
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	57,739					57,739
15	Aset Lainnya	1,012,748					1,012,748
16	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	0	0	0	0
	Total Eksposur Neraca	**19,848,439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,848,439**
B	Eksposur Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah						
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank						
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya						
6	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal						
7	Kredit Beragun Properti Komersial						
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi						
9	Kredit Pegawai atau Pensiunan	39,942					39,942
10	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						

Table 4.2.a Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual							
No.	**Kategori Portofolio**	**Tagihan Bersih** Net Receivables	**31 Desember 2025** December 31, 2025				
			Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By				
			Agunan Collateral	**Garansi** Guarantee	**Asuransi Kredit** Loan Insurance	**Lainnya** Other	**Bagian Yang Tidak Dijamin** Non-secured Part
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Tagihan kepada Korporasi						
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)						
14	Total Eksposur Rekening Administratif	39,942	0	0	0	0	39,942
C	Eksposur Counterparty Credit Risk						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	258,656	0	0	0	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0	0	0	0
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	0	0	0	0	0	0
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya						
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	0	0	0	0	0	0
7	Tagihan kepada Korporasi	0	0	0	0	0	0
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	0	0	0	0
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	258,656	0	0	0	0	0
	Total (A+B+C)	20,147,037	0	0	0	0	19,888,381

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual
Credit Risk RWA Calculation Based on Standard Approach - Bank Only

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,845,553	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	444,913	222,457	222,457
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	32,025	9,197	9,197
5	Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0	0	0
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	0	0	0
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	304,062	228,047	228,047
9	Kredit Beragun Properti Komersial	66,055	49,541	49,541
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	23,049	23,049	23,049
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	10,553,786	5,276,893	5,276,893
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	817,049	817,049	817,049
13	Tagihan kepada Korporasi	259,907	253,507	253,507
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	72,941	97,225	97,225
15	Aset Lainnya	857,980	0	263,046
16	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	
	TOTAL	16,277,320	6,976,964	7,240,010

Table 6.1.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2025 December 31, 2025		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	4,723,172	0	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	439,072	219,536	219,536
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	0	0	0
5	Tagihan berupa Covered Bond	381,582	78,403	78,403
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0	0	0
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	0	0	0
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	304,700	228,525	228,525
9	Kredit Beragun Properti Komersial	167,922	125,942	125,942
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	28,422	28,422	28,422
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	12,000,020	6,000,010	6,000,010
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	482,704	482,704	482,704
13	Tagihan kepada Korporasi	250,358	250,358	250,358
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	57,739	77,746	77,746
15	Aset Lainnya	1,012,748	0	325,452
16	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	0
	TOTAL	19,848,439	7,491,645	7,817,097

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(Jutaan Rp)

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional			
4	Tagihan Kepada Bank			
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya			
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal			
7	Kredit Beragun Properti Komersial			
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi			
9	Kredit Pegawai/Pensiunan			
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
11	Tagihan kepada Korporasi	78,808	78,808	78,808
12	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
13	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)			
	TOTAL	78,808	78,808	78,808

Table 6.1.2. Disclosure of Commitment/Contingency Liability Exposure in Off-Balance Sheet Transactions

(million Rp)

Exposure Disclosure Obligations Commitments / Contingent on the Balance Sheet			Portfolio Category
31 Desember 2025 December, 31 2025			
Tagihan Bersih Net Receivables	**ATMR Sebelum MRK** RWA Before MRK	**ATMR Setelah MRK** RWA After MRK	
(3)	(4)	(5)	
-	-	-	Receivables on Sovereigns
-	-	-	Receivables on Public Sector Entities
-	-	-	Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution
-	-	-	Receivables on Banks
-	-	-	Bills to Securities Companies and Other Financial Services Institutions
-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	Loans Secured by Residential Property
-	-	-	Credit for Land Acquisition, Land Cultivation, and Construction
-	-	-	Employee/Retired Loans
-	-	-	Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio
39,942	39,942	39,942	Receivables on Corporate
-	-	-	Past Due Receivables
-	-	-	Bills to Securities Companies and Other Financial Services Institutions
39,942	39,942	39,942	TOTAL

Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Table 6.1.3. Disclosure of Exposures that Give Rise to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan rupiah) (in million rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan			Portfolio Category
		Tagihan Bersih Net Receivables	**ATMR Sebelum MRK** RWA Before MRK	**ATMR Setelah MRK** RWA After MRK	
			MRK	**MRK**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	258656	0	0	Claims on Government
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0	Claims on Public Sector Entities
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
4	Tagihan Kepada Bank	0	0	0	Claims on Banks
5	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0	0	0	Claims on Multilateral Development Banks and International Institutions
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	0	0	0	Claims on Micro, Small, and Retail Portfolio Enterprises
7	Tagihan kepada Korporasi	0	0	0	Claims on Corporations
8	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	0	0	0	Sharia Business Unit Exposure (if any)
	TOTAL	258656	0	0	TOTAL

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit
Table 6.1.7 Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp) (million Rp)

Kategori Portofolio	31 Desember 2024 31 December 2024	31 Desember 2025 31 December 2025	Portfolio Category
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	7,318,818	7,857,039	TOTAL RWA CREDIT RISK
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-	TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility (CSR)

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur disingkat PT. Bank NTT (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang.

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa TenggaraTimur disingkat PT. Bank NTT (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat di hadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang.

KOMITMEN PERUSAHAAN

Sebagai bank yang telah bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak 17 Juli 1962, Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui

COMPANY COMMITMENT

As a bank that has grown amidst the community of East Nusa Tenggara since July 17, 1962, Bank NTT plays a vital role in actively participating through corporate social responsibility programs; this spirit underpins management's commitment to implementing Corporate *Social* Responsibility (CSR) programs

komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja bank pada beberapa aspek dasar yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Bank NTT senantiasa berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan bank maupun melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tak terpisahkan dari aktivitas perusahaan, Penyaluran CSR mengacu pada Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bank NTT Melayani Lebih Sungguh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai pedoman tersebut, kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan yang diarahkan pada bidang pendidikan, olahraga, budaya, Kesehatan, ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan.

DASAR PELAKSANAAN CSR

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana setiap penanaman modal berkewajiban:
   a. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
   b. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

   c. Penjelasan pasal 15 (b); "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan";
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47 ayat 1 (satu), "Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) "setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan";
4. SK Direksi PT, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No, 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bank NTT Melayani Lebih Sungguh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

sustainably by enhancing the bank's performance across fundamental aspects encompassing social, economic, and environmental dimensions,

In relation to community and environmental empowerment, Bank NTT remains committed to promoting community empowerment and well-being through its banking products and services as well as through *Corporate Social Responsibility* (CSR) programs, which are an integral part of the company's operations. The implementation of CSR activities is guided by the Board of Directors' Decision of PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 86 of 2019 regarding Guidelines for the Implementation of the "Bank NTT Serving More Sincerely" Program at PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. In accordance with these guidelines, these activities are carried out continuously and are directed toward the fields of education, sports, culture, health, economy, social welfare, and environmental conservation.

LEGAL BASIS FOR CSR IMPLEMENTATION

1. Law No. 25 of 2007 on Investment, which stipulates that every investment is obligated to:

   a. Carry out corporate social responsibility;

   b. Respect the cultural traditions of the communities surrounding the location of the investment business activities;
   c. Explanation of Article 15 (b): "Every investment is obligated to fulfill corporate social responsibility";

2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 47, Paragraph 1: "A company conducting business in the field of and/or related to natural resources is required to fulfill its social and environmental responsibilities. This provision aims to ensure that the company maintains harmonious, balanced, and appropriate relationships with the environment, as well as with the norms and culture of the local community;
3. Government Regulation No. 47 of 2012, Article 2 (two): "Every company, as a legal entity, has social and environmental responsibilities";
4. Board of Directors' Decision of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 86 of 2019 regarding Guidelines for the Implementation of the "Bank NTT Serving More Sincerely" Program at PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat,

Corporate social responsibility refers to the inherent responsibility of every company to maintain harmonious and appropriate relationships with the environment, values, norms, and culture of the local community,

LOGO CSR BANK NTT

BANK NTT CSR LOGO

Arti Logo CSR

Guna membedakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT, Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang memiliki nilai filosofis tersendiri,

Meaning of the CSR Logo

To distinguish *Corporate Social Responsibility* activities from corporate promotional activities, PT Bank NTT has designed and uses a special logo for every *Corporate Social Responsibility* program, which carries its own philosophical significance,

Gambar tangan

Gambar tangan pada logo *Corporate Social Responsibility* PT, Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang,

Image of a hand

The hand image on PT Bank NTT's *Corporate Social Responsibility* logo symbolizes sincerity and partnership in fulfilling social and environmental responsibilities across various fields,

Warna biru

Warna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan,

Blue Color

The color blue symbolizes professionalism, solidarity, and compassionate strength in the fulfillment of social and environmental responsibilities,

Warna oranye

Warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT. Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat

Orange

The color orange is an inspiring color that symbolizes PT Bank NTT as a pioneer in regional development—not only in the field of financial products and services but also in building the social capacity of the community and the environment in East Nusa Tenggara. All of this is

serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.

done with a single spirit to make the people of East Nusa Tenggara Province better by working in synergy with the community and the environment.

LAPORAN CSR PT BANK NTT TRIWULAN I - IV TAHUN BUKU 2025 (JANUARI 2025 - DESEMBER 2025)
PT Bank NTT CSR Report Quarters I–IV Fiscal Year 2025 (January 2025–December 2025)

No	NAMA PROGRAM Program Name	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/KAB. Government Region (Prov/City/Regency)	TANGGAL Date	DOKUMENTASI Documentation
I	**BIDANG PENDIDIKAN** Education Sector			
1	Bantuan dana CSR dalam rangka Renovasi Ruang Kelas SD Inpres Ndetu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo CSR funding assistance for the renovation of classrooms at SD Inpres Ndetu, Nangaroro Subdistrict, Nagekeo Regency	Pemkab Nagekeo Nagekeo Regency Government	17/12/2025 12/17/2025	
II	**BIDANG OLAHRAGA** Sports Sector			
1	Bantuan Dana CSR UnPlan Turnamen Sepak Bola Liga IV – El Tari Memorial Cup Tahun 2025 UnPlan CSR Funding for the 2025 Liga IV Soccer Tournament – El Tari Memorial Cup	Kota Kupang Kupang City	10/03/2025 March 10, 2025	
2	Bantuan Dana CSR Humba Berlari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur CSR Funding from Humba Berlari for the East Sumba Regency Government	Pemkab Sumba Timur East Sumba Regency Government	27/05/2025 May 27, 2025	

LAPORAN CSR PT BANK NTT TRIWULAN I - IV TAHUN BUKU 2025 (JANUARI 2025 - DESEMBER 2025)
PT Bank NTT CSR Report Quarters I–IV Fiscal Year 2025 (January 2025–December 2025)

No	NAMA PROGRAM Program Name	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/KAB. Government Region (Prov/City/Regency)	TANGGAL Date	DOKUMENTASI Documentation
3	Bantuan Dana CSR dalam rangka Turnamen Sepak Bola Falentino Cup III 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) CSR Funding Assistance for the 2025 Falentino Cup III Soccer Tournament, North Central Timor Regency (TTU) Government	Pemkab TTU TTU Regency Government	29/07/2025 07/29/2025	
4	Bantuan Dana CSR Tim Persebata Dalam Ajang Liga 3 Nasional CSR Funding Assistance for the Persebata Team in the National League 3 Tournament	Pemkab Lewoleba Lewoleba Regency Government	29/08/2025 August 29, 2025	
5	Bantuan Dana CSR Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk Pembangunan Lapangan Sepak Bola dan Joging Track di Area Civic Center Kantor Bupati Kupang CSR Funding Assistance to the Kupang Regency Government for the Construction of a Soccer Field and Jogging Track in the Civic Center Area of the Kupang Regent's Office	Pemkab Kupang Kupang Regency Government	03/09/2025 09/03/2025	
6	Bantaun Dana CSR Unplan CSR Unplan Bank NTT Pada Kegiatan POPDA Provinsi NTT Tahun 2025 CSR Funding from Unplan Bank NTT for the 2025 NTT Provincial POPDA Event	Pemprov NTT NTT Provincial Government	18/09/2025 09/18/2025	
III	**BIDANG BUDAYA** **Cultural Affairs**			

LAPORAN CSR PT BANK NTT TRIWULAN I - IV TAHUN BUKU 2025 (JANUARI 2025 - DESEMBER 2025) PT Bank NTT CSR Report Quarters I–IV Fiscal Year 2025 (January 2025–December 2025)				
No	**NAMA PROGRAM** **Program Name**	**DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/KAB.** **Government Region (Prov/City/Regency)**	**TANGGAL** **Date**	**DOKUMENTASI** **Documentation**
IV	**BIDANG KESEHATAN** Health Sector			
1	Bantuan Dana CSR Penanganan Stunting, Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah CSR Funding Assistance for Addressing Stunting, Malnutrition, and Undernutrition by the Central Sumba Regency Government	Pemkab Sumba Tengah Central Sumba Regency Government	30/06/2025 June 30, 2025	
V	**BIDANG EKONOMI** Economic Sector			
1	Bantuan CSR Tangki Fiber Kabupaten Ngada CSR Assistance for Fiber Tanks in Ngada Regency	Pemkab Ngada Ngada Regency Government	31/07/2025 July 31, 2025	
2	Bantuan Dana CSR dalam rangka Peningkatan Gizi & Penggerak UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao CSR Funding Assistance for Nutrition Improvement & SME Promotion Rote Ndao Regency Government	Pemkab Rote ndao Rote Ndao Regency Government	10/09/2025 09/10/2025	
3	Bantuan Dana CSR Pelaksanaan Penataan dan Pengambangan Obyek Wisata Pemkab Belu CSR Funding Assistance for the Development and Improvement of Tourist Attractions by the Belu Regency Government	Pemkab Belu Belu Regency Government	2711/2025 2711/2025	
4	Bantuan Dana CSR Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemkab SBD CSR Funding Assistance for Training in Tourism and Creative Economy Human Resources, SBD Regency Government	Pemkab SBD SBD Regency	28/11/2025 November 28, 2025	

LAPORAN CSR PT BANK NTT TRIWULAN I - IV TAHUN BUKU 2025 (JANUARI 2025 - DESEMBER 2025)
PT Bank NTT CSR Report Quarters I–IV Fiscal Year 2025 (January 2025–December 2025)

No	NAMA PROGRAM Program Name	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/KAB. Government Region (Prov/City/Regency)	TANGGAL Date	DOKUMENTASI Documentation
5	Bantuan Dana CSR Pembuatan Selasar/Kanopi dalam Mendukung Pelaku UMKM CSR Funding Assistance for the Construction of Walkways/ Canopies to Support MSME Actors	Pemkab TTU TTU Regency Government	09/10/2025 October 9, 2025	
VI	**BIDANG SOSIAL** **Social Affairs**			
1	Bantuan Dana CSR Paskah Oekumene & Prosesi Paskah Pemuda GMIT Tahun 2025 CSR Funding for the Ecumenical Easter Celebration & GMIT Youth Easter Procession 2025	Kota Kupang Kupang City	16/04/2025 April 16, 2025	
2	Bantuan Dana CSR Perayaan Paskah bagi Pemkab Kupang CSR Funding for the Kupang Regency Government's Easter Celebration	Pemkab Kupang Kupang Regency Government	25/04/2025 April 25, 2025	
3	Bantuan Dana CSR Pembangunan Gedung Gereja Paroki ST. Yoseph Pekerja Penfui ST. Yesus Maria Yosep (YMY) Liliba Tahap II CSR Funding for the Construction of the St. Joseph the Worker Parish Church in Penfui, St. Jesus Mary Joseph (YMY) Liliba, Phase II	Kota Kupang Kupang City	10/06/2025 06/10/2025	
4	Bantuan Dana CSR pada kegiatan Konven Kaum Bapa Sinode GMIT Pemkab TTS Tahun 2025 CSR Funding Assistance for the GMIT Synod Fathers' Convention organized by the TTS Regency Government in 2025	Pemkab TTS TTS Regency	16/07/2025 July 16, 2025	
5	Bantuan Dana CSR Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Pembangunan Sarana Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Alor CSR Funding Assistance for Addressing Extreme Poverty and the Development of Local Government Social Infrastructure in Alor Regency	Pemkab Alor Alor Regency Government	26/08/2025 August 26, 2025	

LAPORAN CSR PT BANK NTT TRIWULAN I - IV TAHUN BUKU 2025 (JANUARI 2025 - DESEMBER 2025)
PT Bank NTT CSR Report Quarters I–IV Fiscal Year 2025 (January 2025–December 2025)

No	NAMA PROGRAM Program Name	DAERAH PEMERINTAH PROV/KOTA/KAB. Government Region (Prov/City/Regency)	TANGGAL Date	DOKUMENTASI Documentation
6	Bantuan Dana CSR Renovasi Bangunan Gereja St. Yosef Paroki Reweng, Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat CSR Funding for the Renovation of St. Joseph Church in Reweng Parish, South Lembor, West Manggarai Regency	Pemkab Manggarai Barat West Manggarai Regency Government	26/09/2025 09/26/2025	
7	Bantuan Dana CSR 1 Unit tangki Air bagi Pemkab Malaka CSR Funding Assistance for 1 Water Tank for the Malaka Regency Government	Pemkab Malaka Malaka Regency Government	05/11/2025 11/05/2025	
8	Bantuan Dana CSR Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Pasang Baru Listrik CSR Funding for Solar-Powered Street Lighting and New Electrical Installations	Pemkab Manggarai Timur East Manggarai Regency	27/11/2025 11/27/2025	
VII	**BIDANG LINGKUNGAN** Environmental Sector			
1	Bantuan Dana CSR Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat CSR Funding Assistance for Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU) from the West Sumba Regency Government	Pemkab Sumba Barat West Sumba Regency Government	26/05/2025 May 26, 2025	
2	Bantuan CSR Kontainer Sampah dan Kendaraan Pengangkut Sampah Kabupaten Ende CSR Assistance for Waste Containers and Waste Collection Vehicles in Ende Regency	Pemkab Ende Ende Regency Government	06/08/2025 08/06/2025	

TATA KELOLA DALAM KELOMPOK USAHA BANK (KUB)

Governance In Bank Business Groups (KUB)

Kompetisi industri jasa keuangan yang semakin ketat menuntut Lembaga Jasa Keuangan termasuk perbankan untuk penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional. Penguatan struktur, ketahanan dan daya saing perbankan bertujuan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional dapat dicapai dengan melakukan penguatan permodalan dan konsolidasi perbankan di Indonesia. Pengaturan dan kebijakan ini untuk mendorong industri perbankan menjadi lebih efisien, berdaya saing dan kontributif bagi perekonomian nasional. Beberapa butir penting dalam pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) sebagai berikut:

Increasingly intense competition in the financial services industry requires financial institutions, including banks, to strengthen the structure, resilience, and competitiveness of the national banking industry. Strengthening the structure, resilience, and competitiveness of the banking sector aims to support national economic stability and growth, which can be achieved by strengthening capital and consolidating the banking sector in Indonesia. These regulations and policies are intended to encourage the banking industry to become more efficient, competitive, and contribute to the national economy. Several key points regarding the fulfillment of the Minimum Core Capital (MIM) are as follows:

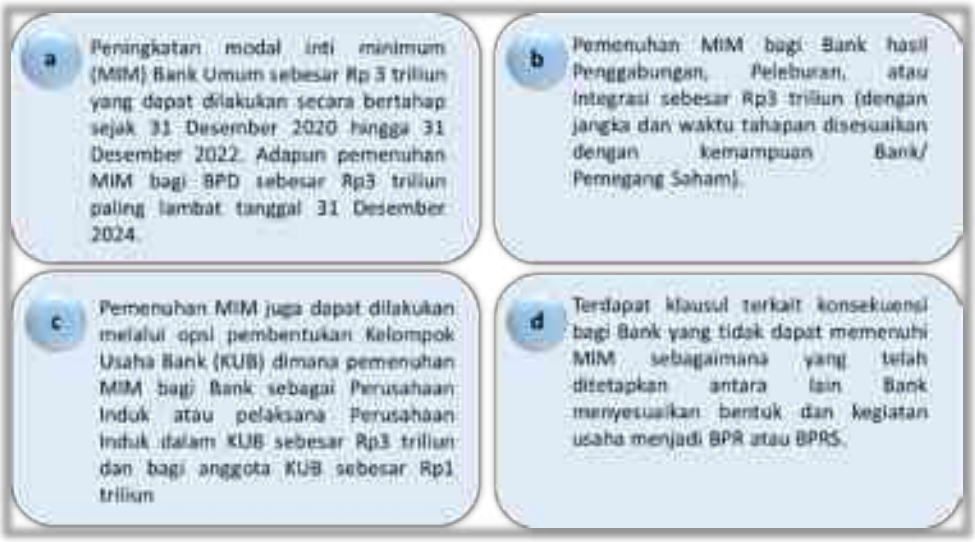

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, serta sejalan dengan rencana sinergi strategis dan aksi korporasi yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024–2026, dan Rencana Bisnis Tahun 2025-2027 Direksi Bank NTT bersama dengan Bank Jatim telah menempuh berbagai tahapan kegiatan sejak tahun 2024 melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB). Seluruh proses ini dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku dan arahan

As a follow-up to the provisions of POJK No. 12/POJK.03/2020 on the Consolidation of Commercial Banks, and in line with the strategic synergy plans and corporate actions outlined in the Bank's Business Plan (RBB) for 2024–2026, and the 2025–2027 Business Plan, the Board of Directors of Bank NTT, together with Bank Jatim, has undertaken various stages of activities since 2024 through the Bank Business Group (KUB) scheme. This entire process is carried out in accordance with applicable regulations and guidance from the Financial

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan utama memperkuat struktur permodalan, tata kelola perusahaan (*governance*), serta daya saing Bank NTT sebagai bagian dari konsolidasi industri perbankan nasional.

Services Authority (OJK), with the primary objective of strengthening Bank NTT's capital structure, corporate *governance*, and competitiveness as part of the national banking industry consolidation.

Tahapan KUB yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini dijabarkan sebagai berikut:

The KUB stages to be implemented in 2025 are outlined as follows:

No.	Tahapan Kegiatan Activity Phase	Status	Keterangan, Makna & Tujuan Strategis Description, Meaning & Strategic Objectives
1.	Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat Conditional Share Subscription Agreement	Selesai (4 Juli 2025) Completed (July 4, 2025)	Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan penyertaan Modal dan pembentukan KUB antara Para Pihak. Menjadi dasar legal bagi Bank Jatim menyalurkan modal Rp100 miliar → meningkatkan modal inti Bank NTT The purpose of this Agreement is to govern the procedures for the capital injection and the establishment of KUB between the Parties. It serves as the legal basis for Bank Jatim to disburse capital of Rp100 billion → to increase Bank NTT's core capital
2.	Perjanjian Kerja Sama Implementasi Teknis Cooperation Cooperation Technical Implementation	Selesai (29 September 2025) Completed (September 29, 2025)	Mengatur mekanisme operasional teknis (Aksi korprorasi, Rencana Bisnis bank, corporate plan, Manajemen Risiko Teknologi informasi, konsolidiasi lapaoran keuangan) agar sinergi berjalan nyata. Establishing technical operational mechanisms (corporate actions, bank business plans, corporate plans, IT risk management, financial statement consolidation) to ensure is effectively realized.
3.	Side Letter Agreement Side Letter Agreement	Selesai (29 September 2025) Completed (September 29, 2025)	SLA dimaksudkan sebagai dokumen pelengkap yang bersifat mengikat, yang mengatur secara lebih rinci kewajiban Bank NTT dalam rangka menindaklanjuti hasil uji tuntas (due diligence). SLA ini tidak menggantikan perjanjian utama, melainkan menyempurnakan implementasi sinergi dalam kerangka Kelompok Usaha Bank (KUB). The SLA is intended as a binding supplementary document that sets out in greater detail the obligations of Bank NTT in following up on the results of due diligence. This SLA does not replace the main agreement but rather enhances the implementation of synergies within the framework of the Bank (KUB).
4.	Permohonan Izin Penyertaan Modal ke OJK Application for Capital Participation to OJK	Selesai (16 Juli 2025) Completed (July 16, 2025)	Telah disetujui OJK. Memberikan otorisasi resmi agar penyertaan modal Rp100 miliar sah secara hokum. Approved by the OJK. Grants official authorization for the Rp100 billion capital injection to be under the law.
5.	Surat Izin Penyertaan Modal dari OJK Capital Contribution Permit from the OJK	Selesai (28 Juli 2025) Completed (July 28, 2025)	OJK telah mengeluarkan izin resmi (S-141/KO.14/2025) tanggal 28 Juli 2025 Perihal: Persetujuan Penyertaan Modal PT BPD Jawa Timur, Tbk kepada PT BPD Nusa Tenggara Timur. Legalitas final dari regulator, memberi kepastian hukum bahwa modal dapat segera direalisasikan The OJK has issued an official permit (S-141/KO.14/2025) dated July 28, 2025, regarding: Approval of the Capital Contribution by PT BPD Jawa Timur, Tbk to PT BPD Nusa Tenggara Timur. This final regulatory approval provides legal certainty that the capital can be be injected

No.	Tahapan Kegiatan Activity Phase	Status	Keterangan, Makna & Tujuan Strategis Description, Meaning & Strategic Objectives
6.	Pelaksanaan Penyertaan Modal Execution of Capital Contribution	Selesai (30 September 2025) Completed (September 30, 2025)	Bank Jatim Tbk telah melaksanakan penyertaan modal pada tanggal 30 September 2025 dengan total nilai sebesar Rp100.000.000.000 (serratus miliar rupiah). Penyertaan modal tersebut dilakukan melalui pengambilan saham baru dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 14.000,- sehingga jumlah saham yang diperoleh adalah sebanyak 7.142.857 (tujuh juta serratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) lembar saham. Transfer modal Rp100 miliar → meningkatkan permodalan & CAR Bank NTT. Bank Jatim Tbk has completed the capital injection on September 30, 2025, with a total value of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). The capital injection was carried out through the issuance of new shares with a par value of Rp14,000 per share, resulting in a total of 7,142,857 (seven million one hundred forty-two thousand eight hundred fifty-seven) shares. The transfer of Rp100 billion in capital → increased Bank NTT's capital and CAR.
7.	Pemenuhan Data Calon PSP Fulfillment Data on PSP Candidates	Data permohonan calon Pemegang Saham Pengendali II (PSP II) telah selesai dilaksanakan dan diprosessesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Data for the application of a prospective Controlling Shareholder II (PSP II) has been completed and processed in accordance with the provisions of the Financial Services Authority	telah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP. Pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor SR-498/PB.02/2025 tanggal 28 November 2025, dengan melampirkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-230/D.03/2025. Merupakan Persyaratan OJK untuk menetapkan Bank Jatim sebagai PSP II, memastikan tata kelola & pengendalian sesuai aturan. a fit and proper test has been conducted on the PSP candidate. The implementation is outlined in Letter No. SR-498/PB.02/2025 dated November 28, 2025, with the attached Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-230/D.03/2025. It is an OJK requirement to designate Bank Jatim as PSP II, ensuring that governance and controls are in accordance with regulations.
8.	Permohonan Izin KUB OJK Application for OJK KUB License	Selesai (14 Desember 2025) Done (December 14, 2025)	Surat OJK Nomar S-228/KO.14 / 2025 Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan DaerahJawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Finalisasi agar Bank Jatim sah sebagai Bank Induk KUB, dan Bank NTT memperoleh akses penuh ke dukungan grup. OJK Letter No. S-228/KO.14 / 2025 Confirmation of the Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk with PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Finalization to make Bank Jatim legally recognized as the parent company of Bank KUB, and Bank NTT gain full access to group support.

Tahapan Proses Kegiatan KUB Bank NTT bersama Bank Jatim

Stages of the KUB Bank NTT Activity Process in Collaboration with Bank Jatim

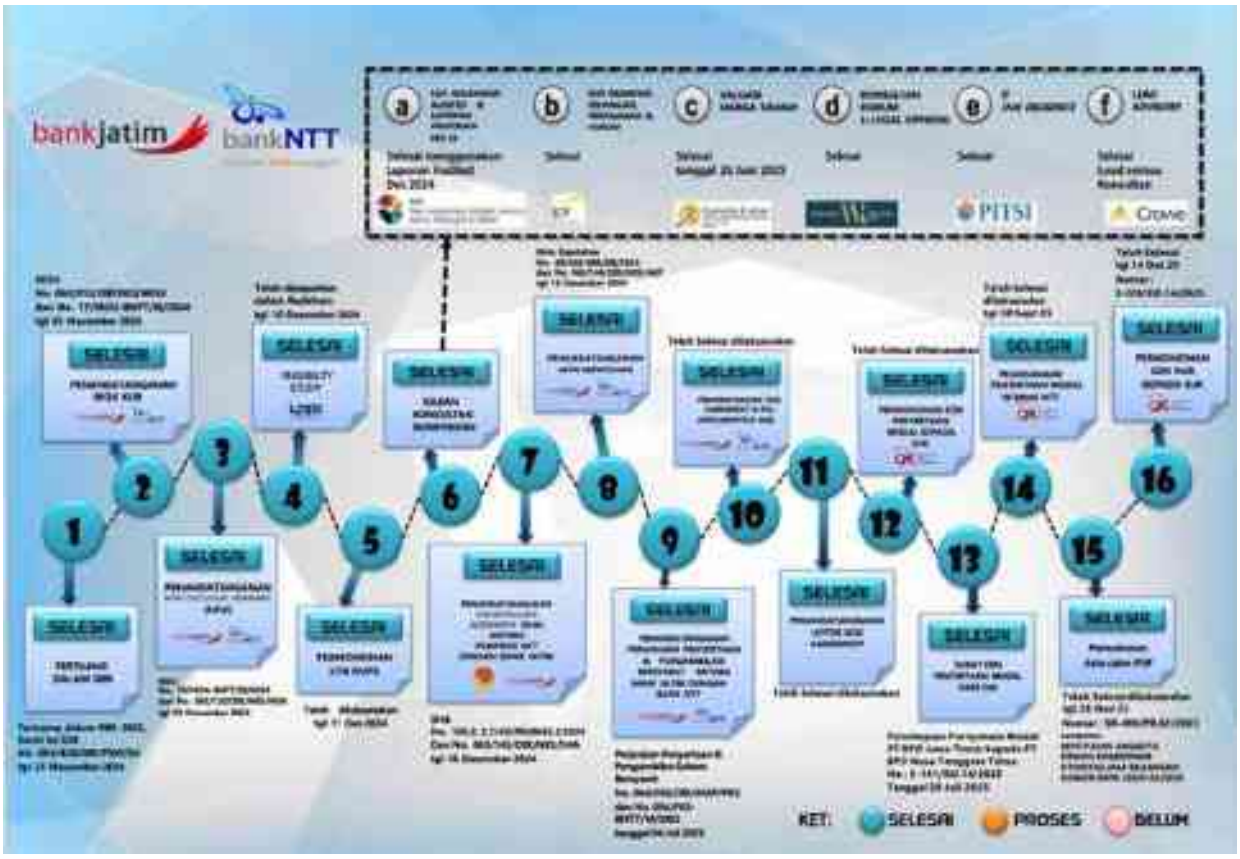

Halaman ini sengaja di kosongkan
This page is intentionally left blank

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025

RESPONSIBILITY FOR THE 2025 ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kupang, 22 April 2026

Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners on Responsibility for the 2025 Annual Report

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur has been fully disclosed, and we assume full responsibility for the accuracy and completeness of the contents of the Company's Annual Report.

This statement has been made truthfully and in good faith.
Kupang, April 22, 2026

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

S. Donny H. Heatubun, S.E., M.B.M.
Komisaris Utama
President Commissioner

Prof. Dr. Drs. Frans Gana, M.Si.
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Ir. Charlie Paulus, M.S.M
Direktur Utama
President Director

Rahmat Saleh, S.T.
Direktur Umum & Sumber Daya Manusia
Director of General Affairs & Human Capital

Christofel S.M. Adoe, S.Sos.
Direktur Kepatuhan
Compliance Director

Heru Helbianto, S.E., M.M.
Direktur Keuangan & Treasury
Director of Finance & Treasury

Aloysius R.A. Geong, S.E.
Direktur Kredit
Credit Director

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal – tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial Statements
as of December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
with independent auditors' report

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Lettter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5-6	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	7-119	*Notes to the Financial Statement*

bankNTT
melayani lebih sungguh

bpd
bersama membangun Indonesia

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Charlie Paulus
   Alamat Kantor : Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang
   Alamat Domisili : Jl. Alam Asri IV/3, RT.008/RW.015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 0380-840555
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Rahmat Saleh
   Alamat Kantor : Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang
   Alamat Domisili : Jl. Srikandi No. 18A, RT.034 / RW.015, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
   Nomor Telepon : 0380-840555
   Jabatan : Direktur Umum & SDM

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

We, the undersigned:

1. *Name : Charlie Paulus*
   Office Address : Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang
   Domicile Address : Jl. Alam Asri IV/3, RT.008/RW.015, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   Telephone : 0380-840555
   Title : President Director

2. *Name : Rahmat Saleh*
   Office Address : Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang
   Domicile Address : Jl. Srikandi No. 18A, RT.034 / RW.015, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
   Telephone : 0380-840555
   Title : General & Human Resource Director

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (the "Bank");*
2. *The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the financial statements of the Bank have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The financial statements of the Bank do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for the Bank internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Kupang, Maret 2026 / *March* 2026

Charlie Paulus
Direktur Utama/
President Director

Rahmat Saleh
Direktur Umum & SDM/
General & Human Resource Director

Kantor Pusat
Jl. W. J. Lalamentik No. 102
Kupang / NTT
T | 0380-840555 (Kupang)
F | 0380-840567
W | www.bankntt.co.id

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 055/KM.1/2007

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 2993 2121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur as at December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan dibawah ini.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") – cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e (informasi kebijakan akuntansi yang material – identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan) dan Catatan 8 (kredit yang diberikan) atas laporan keuangan, pada tanggal 31 Desember 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan Bank adalah sebesar Rp466.589.628.373. Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan, yang mewakili 69,41% dari total aset Bank, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas kredit tersebut yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang nilainya signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut penentukan KKE membutuhkan pertimbangan manajemen yang subyektif dan melibatkan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans

As described in Note 2e (material accounting policies information – identification and measurement of impairment on financial assets) and Note 8 (loans) to the financial statements, as at December 31, 2025, the allowance for impairment losses for loans of the Bank was Rp 466,589,628,373. These allowance for impairment losses for loans measured at amortised cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under PSAK 109, "Financial Instruments" ("PSAK 109").

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans, which represented 69.41% of total assets of the Bank, and the respective allowance for impairment losses provided against the loans measured at amortised cost, which are significant to the Bank's financial statements. In addition, determining ECL involves subjective management judgment and is subject to high degree of estimation uncertainty.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

Bank menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan. Bank menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

The Bank calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and ar credit-impaired loans which are not considered individually significant, the Bank assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Bank assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Bank uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortised cost.

The significant judgments involved in determining the ECL include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgment is applied in determining the models;*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti obyektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

- *Identification of loans measured at amortised cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*

How our audit addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

- Ketika bukti obyektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan penggunakan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.

- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default, loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap pesyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input* data yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Bank.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

- *Where objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.*

- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Bank.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Hal audit utama (lanjutan)

- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.

- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

Hal lain

Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 19 Maret 2025 menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Key audit matters (continued)

- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*

- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

Other matter

The financial statements of the Bank as of December 31, 2024 which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2025, were audited by other independent auditor, whose report dated March 19, 2025 expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

-
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No.:
00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No.: 00424/2.1133/AU.1/07/1192-1/1/III/2026

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

00424

Gideon, CPA
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration* No.AP.1192
12 Maret 2026 / *March 12, 2026*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
Kas	2d,4	687.295.642.009	594.934.066.970	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2d,2f,5	997.936.030.834	1.510.734.797.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2d,2e,2f,6	16.069.608.774	18.091.833.276	*Current accounts with other banks*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(2.722.680)	(28.705.478)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		16.066.886.094	18.063.127.798	*Total - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2d,2e,2g,7	3.137.850.149.969	399.941.683.676	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(5.742.187)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		3.137.844.407.782	399.941.683.676	*Total - net*
Kredit yang diberikan	2d,2e,2h,2ab,8,35			*Loans*
Pihak berelasi		31.708.303.575	8.662.299.094	*Related parties*
Pihak ketiga		13.913.994.001.615	12.757.923.148.416	*Third parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		13.479.112.676.817	12.418.640.352.913	*Total - net*
Surat berharga	2d,2e,2i,9	941.920.294.323	907.845.096.794	*Marketable securities*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		941.920.294.323	907.840.831.644	*Total - net*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2d,2e,2j,10	258.790.818.168	-	*Securities purchased under resale agreements*
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp304.756.920.561 (31 Desember 2024 : Rp278.284.125.125)	2k,11	280.173.455.279	202.528.101.039	*Fixed assets Net of accumulated depreciation of Rp304,756,920,561 (December 31, 2024 : Rp278,284,125,125)*
Aset takberwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp13.772.875.148 (31 Desember 2024 : Rp13.252.254.105)	2l,12	1.793.854.932	1.998.189.574	*Intangible assets Net of accumulated amortization of Rp13,772,875,148 (December 31, 2024 : Rp13,252,254,105)*
Aset hak guna setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp72.359.311.543 (31 Desember 2024 : Rp119.556.774.877)	2z,13	43.503.517.825	57.760.078.799	*Right of use assets Net of accumulated amortization of Rp72,359,311,543 (December 31, 2024 : Rp119,556,774,877)*
Aset pajak tangguhan	2s,19d	51.622.606.910	47.691.658.341	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	2d,2e,2n,14	196.824.320.730	274.328.639.879	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**20.092.884.511.703**	**16.434.461.528.009**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2d,2o,15	62.439.844.787	70.808.421.090	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	2d,2p,2ab,16,35			*Deposits from customers*
Pihak berelasi		1.568.184.565.937	260.760.731.729	*Related parties*
Pihak ketiga		14.361.627.710.745	11.726.494.295.908	*Third parties*
Jumlah		15.929.812.276.682	11.987.255.027.637	*Total*
Simpanan dari bank lain	2d,2q,17	266.648.689.186	421.089.316.957	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	2d,2r,18	-	36.955.494.571	*Securities issued*
Utang pajak	2s,19b	1.460.374.624	18.038.396.871	*Taxes payable*
Pinjaman yang diterima	2t,20	745.109.502.734	905.345.188.006	*Borrowings*
Liabilitas lain-lain	2d,2aa,21,33	276.139.714.288	294.499.883.189	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**17.281.610.402.301**	**13.733.991.728.321**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp10.000 per saham				*Share capital - par value Rp10,000 per share*
Modal dasar:				*Authorized capital:*
- 700.000.000 saham				*700,000,000 shares -*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				*Issued and fully paid-in capital:*
- Seri A 220.822.955 (31 Desember 2024 : 211.324.361) lembar saham				*Serie A 220,822,955 - (December 31, 2024 : 211,324,361) shares*
- Seri B 130.725 lembar saham	2u,22	2.209.536.800.000	2.114.550.860.000	*Serie B 130,725 shares -*
Tambahan modal disetor	22	33.818.538.586	11.747.108.586	*Additional paid-in capital*
Kerugian pengukuran kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan	2aa,33	(95.792.242.849)	(68.224.203.763)	*Loss remeasurement of defined benefit pension plans - net of deferred tax*
Selisih penilaian kembali aset tetap	11	83.428.725.329	-	*Revaluation surplus of fixed assets*
Saldo laba	2v,23			*Retained earnings*
- telah ditentukan penggunaannya		487.664.061.080	465.559.493.396	*Appropriated -*
- belum ditentukan penggunaannya		92.618.227.256	176.836.541.469	*Unappropriated -*
JUMLAH EKUITAS		**2.811.274.109.402**	**2.700.469.799.688**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**20.092.884.511.703**	**16.434.461.528.009**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years then ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan bunga	2w,2x,2ab,24,35	1.678.299.390.699	1.639.358.431.888	*Interest income*
Beban bunga	2w,2x,2ab,25,35	(597.016.168.357)	(556.618.616.448)	*Interest expense*
Pendapatan bunga - bersih		**1.081.283.222.342**	**1.082.739.815.439**	***Interest income - net***
Pendapatan operasional lainnya				***Other operating income***
Provisi dan komisi lainnya	2x	65.250.423.414	58.194.224.544	*Other fees and commissions*
Lain-lain	26	78.774.819.023	76.435.294.336	*Others*
		144.025.242.437	134.629.518.880	
Pendapatan operasional		**1.225.308.464.779**	**1.217.369.334.319**	***Operating income***
Beban operasional lainnya				***Other operating expenses***
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset	2e,27	(184.730.104.257)	(135.865.351.780)	*Allowance for impairment losses on assets*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Tenaga kerja	2aa,28,33	(535.925.711.543)	(548.070.635.820)	*Personnel*
Umum dan administrasi	29	(321.044.386.950)	(307.716.065.828)	*General and administrative*
		(1.041.700.202.750)	(991.652.053.427)	
LABA OPERASIONAL		**183.608.262.029**	**225.717.280.892**	***OPERATING INCOME***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL	30			***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan non-operasional		9.877.071.730	30.179.610.317	*Non-operating income*
Beban non-operasional		(21.654.594.846)	(24.788.221.444)	*Non-operating expenses*
		(11.777.523.116)	**5.391.388.873**	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**171.830.738.913**	**231.108.669.765**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
Beban pajak				***Tax expense***
Kini	2s,19c	(39.865.437.480)	(65.302.262.518)	*Current*
Tangguhan	2s,19c	(3.844.652.198)	11.030.134.222	*Deferred*
Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	2s,19c	(35.502.421.979)	-	*Tax related to Tax Assessment Letter (SKP)*
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		**(79.212.511.657)**	**(54.272.128.296)**	***INCOME TAX EXPENSE - NET***
LABA BERSIH		**92.618.227.256**	**176.836.541.469**	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:***
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti	2y	(35.343.639.853)	4.423.094.061	*Gain (loss) remeasurement of defined benefit pension plans*
Selisih penilaian kembali aset tetap	11	83.428.725.329	-	*Revaluation surplus of fixed assets*
Pajak penghasilan terkait	2y	7.775.600.767	(973.080.693)	*Related income tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		**148.478.913.499**	**180.286.554.837**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA BERSIH PER SAHAM	2ac,34	431	851	***EARNINGS PER SHARE***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-in capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*		Selisih penilaian kembali aset tetap/ *Revaluation surplus of fixed assets*	Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan/ *Gain (loss) remeasurement of defined benefit pension plans - net of deferred tax*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
			Modal sumbangan/ *Donation capital*	Modal disetor lainnya/ *Other paid-in capital*			Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Cadangan umum/ *General reserves*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2024		**2.045.186.350.000**	**247.088.700**	**12.467.514.968**	**-**	**(71.674.217.131)**	**451.790.573.273**	**110.151.360.982**	**2.548.168.670.792**	***Balance as at January 1, 2024***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	22	69.364.510.000	-	(69.364.510.000)	-	-	-	-	-	*Reclassified to issued and fully paid-in capital*
Setoran modal	22	-	-	68.397.014.918	-	-	-	-	68.397.014.918	*Paid-in capital*
Pembagian laba tahun 2023:										*Distribution of profit in 2023:*
Cadangan umum	23	-	-	-	-	-	13.768.920.123	(13.768.920.123)	-	*General reserves*
Dividen kas	2ad, 23	-	-	-	-	-	-	(96.382.440.859)	(96.382.440.859)	*Cash dividends*
Laba komprehensif periode berjalan		-	-	-	-	3.450.013.368	-	176.836.541.469	180.286.554.837	*Comprehensive income for the period*
Saldo 31 Desember 2024		**2.114.550.860.000**	**247.088.700**	**11.500.019.886**	**-**	**(68.224.203.763)**	**465.559.493.396**	**176.836.541.469**	**2.700.469.799.688**	***Balance as at December 31, 2024***
Saldo 1 Januari 2025		**2.114.550.860.000**	**247.088.700**	**11.500.019.886**	**-**	**(68.224.203.763)**	**465.559.493.396**	**176.836.541.469**	**2.700.469.799.688**	***Balance as at January 1, 2025***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	22	94.985.940.000	-	(94.985.940.000)	-	-	-	-	-	*Reclassified to issued and fully paid-in capital*
Setoran modal	22	-	-	88.485.940.000	-	-	-	-	88.485.940.000	*Paid-in capital*
Agio saham	22	-	-	28.571.430.000	-	-	-	-	28.571.430.000	*Share premium*
Pembagian laba tahun 2024:										*Distribution of profit in 2024:*
Cadangan umum	23	-	-	-	-	-	22.104.567.684	(22.104.567.684)	-	*General reserves*
Dividen kas	2ad, 23	-	-	-	-	-	-	(154.731.973.785)	(154.731.973.785)	*Cash dividends*
Jumlah laba komprehensif - tahun berjalan:										*Total comprehensive income for the year*
- Laba bersih		-	-	-	-	(27.568.039.086)	-	92.618.227.256	65.050.188.170	*Net income -*
- Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	83.428.725.329	-	-	-	83.428.725.329	*Other comprehensive income -*
Saldo 31 Desember 2025		**2.209.536.800.000**	**247.088.700**	**33.571.449.886**	**83.428.725.329**	**(95.792.242.849)**	**487.664.061.080**	**92.618.227.256**	**2.811.274.109.402**	***Balance as at December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		1.672.799.721.548	1.639.468.727.072	*Interest income, fees and commission received*
Pembayaran bunga		(592.069.284.712)	(556.580.013.319)	*Interest expenses paid*
Pembayaran beban karyawan		(567.093.167.873)	(561.768.059.189)	*Employee expenses paid*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(252.525.094.580)	(321.231.322.866)	*General and administrative expenses paid*
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya		144.025.242.437	161.031.724.526	*Other operating income received*
Pembayaran beban non-operasional		(12.620.816.795)	(24.788.221.444)	*Other non-operating expense paid*
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**392.516.600.025**	**336.132.834.780**	***Cash received before changes in operating assets and liabilities***
(Kenaikan) penurunan dalam aset operasi:				***(Increase) decrease in operating assets:***
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		(258.790.818.168)	-	*Securities purchased under resale agreements*
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		(304.370.894.108)	-	*Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss*
Kredit yang diberikan		(1.219.515.561.888)	(292.373.231.551)	*Loans*
Aset hak guna	13	(14.103.845.915)	12.226.114.126	*Right of use assets*
Aset lain-lain		11.802.745.075	24.465.832.774	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:				***Decrease (increase) in operating liabilities:***
Liabilitas segera		(8.368.576.303)	(33.219.038.703)	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah:				*Deposits from customers*
Giro		(9.212.622.046)	(48.360.751.459)	*Current accounts*
Tabungan		83.979.918.635	69.484.538.210	*Saving deposits*
Deposito berjangka		3.867.789.952.456	(929.616.212.551)	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain		(154.440.627.771)	55.354.117.483	*Deposits from other banks*
Liabilitas lain-lain		(7.468.342.401)	57.242.218.707	*Other liabilities*
Pembayaran pajak penghasilan		(56.443.459.727)	(50.260.432.064)	*Income tax paid*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		**2.323.374.467.864**	**(798.924.010.249)**	***Net cash provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penurunan (kenaikan) surat berharga		278.000.000.000	77.218.467.941	*Decrease (increase) in Marketable securities*
Pembelian aset tetap	11	(20.689.424.347)	(22.792.435.233)	*Acquisitions of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	12	(316.286.400)	(1.214.660.999)	*Acquisitions of intangible assets*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi		**256.994.289.253**	**53.211.371.709**	***Net cash provided by investing activities***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima		(160.235.685.272)	(169.567.320.146)	*Borrowings received (paid)*
Setoran modal	22	117.057.370.000	68.397.014.918	*Paid-in capital*
Pembayaran dividen kas	2ad, 23	(154.731.973.785)	(96.382.440.859)	*Cash dividend paid*
Pembayaran liabilitas sewa		(30.537.460.559)	(41.560.618.243)	*Payment of lease liabilities*
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan		(37.000.000.000)	-	*Payment of securities issued*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(265.447.749.616)**	**(239.113.364.330)**	***Net cash used in financing activities***
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		**2.314.921.007.501**	**(984.826.002.871)**	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun		2.523.673.675.821	3.504.722.274.021	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		846.598.295	3.777.404.671	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
Kas dan setara kas pada akhir tahun		**4.839.441.281.617**	**2.523.673.675.821**	***Cash and cash equivalents at end of year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:				***Cash and cash equivalents at end of year consisted of:***
Kas	4	687.295.642.009	594.934.066.970	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	997.936.030.834	1.510.734.797.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	16.069.608.774	18.063.127.798	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	3.138.140.000.000	399.941.683.676	*Placements with other banks maturing three months or less since - the acquisition date*
Jumlah kas dan setara kas		**4.839.441.281.617**	**2.523.673.675.821**	***Total cash and cash equivalents***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ("Bank") didirikan berdasarkan akta notaris No.12 tanggal 18 Oktober 1961 yang dibuat dihadapan Casper Melchior Keluanan Amalo, wakil notaris sementara di Kupang. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Juli 1962 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM.9-13/II tanggal 5 Februari 1962.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.01/pd/DPRD-GR/1963 tanggal 12 Maret 1963.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, Bank kembali merubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tanggal 26 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.584.63-345 tanggal 20 April 1999 tentang pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No.3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.122 tanggal 22 April 1999 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-8228.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 11 Juni 1999, Tambahan No.3491.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank telah dilakukan penyesuaian melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 April 2008. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dinyatakan dalam akta No.26 tanggal 6 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, S.H., notaris di Kupang, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-48098.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7 Oktober 2008 Tambahan No.19417.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (the "Bank") was established based on the notarial deed No.12 dated October 18, 1961 as notarised by Casper Melchior Keluanan Amalo, vice notary in Kupang. The Bank has started commercial operations on July 17, 1962 based on the Decision Letter of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM.9-13/II dated February 5, 1962.

In complying with the regulations of Law No.13 Year 1962 on Basic Regulations of Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No.59, Supplement to the State Gazette No.2490), East Nusa Tenggara Provincial Government establishes the Bank's legal status change from Limited Company became Region Company through Regional Regulation Level I East Nusa Tenggara No.01/pd/DPRD-GR/1963 dated March 12, 1963.

Based on the regulation of Minister of Home Affairs No.1 Year 1998 dated February 4, 1998 on the Legal Entity of the Regional Development Bank, the Bank re-change of the legal entity of the Regional Company into a Limited Company (PT). Changes of legal entity of the Bank was stipulated in Regional Regulation of the Province Level 1 of East Nusa Tenggara No.3 Year 1999 dated March 26, 1999 regarding the Legal Forms Amendment of Regional Development Bank of the Province of East Nusa Tenggara Level I from the Regional Company into a Limited Company that has been approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia based on Decree No.584.63-345 dated April 20, 1999 on the ratification of the Regional Regulation of the Province Level 1 of East Nusa Tenggara No.3 Year 1999 on Amendment Legal Forms Bank Regional Development of the Province of East Nusa Tenggara Level I from the Regional Company into PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Amendment of legal entity into a Limited Company stated on notarial deed No.122 dated April 22, 1999 as notarized by Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., that has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia Decree No.C2-8228.HT.01.01.TH.99 dated May 5, 1999 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.47 dated June 11, 1999, Supplement No.3491.

To comply with the Law No.40 Year 2007 dated August 16, 2007 regarding the Limited Company, the Bank's Articles of Association has been amended through the Shareholders' Extraordinary General Meeting dated April 10, 2008. Decision of Shareholders' Extraordinary General Meeting is stated in the deed No.26 dated June 6, 2008 as notarized by Emmanuel Mali, S.H., notary in Kupang, and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No.AHU-48098.AH.01.02. Tahun 2008 dated August 5, 2008 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.81 dated October 7, 2008 Supplement No.19417.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum Bank (lanjutan)

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank berdasarkan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.10 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. notaris di Kupang mengenai Direksi dan Komisaris. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-AH.01.03-0156996.Tahun 2025 tanggal 12 Juni 2025.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-62/D.03/2023 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

b. Maksud dan tujuan

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank antara lain adalah:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberi kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jaringan kantor

Bank berkantor pusat di Jalan W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bank mengklasifikasikan Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional. Jumlah kantor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The latest amendment to the Bank's Articles of Association based on the deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.10 dated May 14, 2025, as notarized by Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. notary in Kupang regarding the Board of Directors and Board of Commissioners. This amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0156996.Year 2025 dated June 12, 2025.

On August 31, 2023, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank from the Financial Services Authority (OJK) in accordance with a Copy of the Decree of the Member of the Board of Commissioners OJK No.KEP-62/D.03/2023 regarding the Granting of Licenses to Conduct Business Activities in Foreign Currencies for PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

b. Purpose and objectives

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's purpose and objective of the Bank is to engage in banking services. To achieve its purpose and objectives, the scope of activities of the Bank include:

- *Collecting funds from the public in the form of deposits such as current accounts, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other equivalent form with it;*
- *Giving loans;*
- *Issuing debt instruments;*
- *Placing funds on, borrow from or lend funds to other banks, either by using the mail, telecommunication facilities and the money order, check or other means;*
- *Other activities commonly conducted by the Bank is not contrary to the applicable regulations.*

c. Office network

The Bank's head office is located at Jalan W.J. Lalamentik No.102, Kupang, Nusa Tenggara Timur. The Bank classifies Branch Offices to the Main Branch Office, Special Branch Office, Branch Office, Sub-branch Office, Cash Office and Functional Office. Number of office as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Kantor cabang utama	1	1	*Main branch office*
Kantor cabang khusus	1	1	*Special branch office*
Kantor cabang	21	21	*Branch office*
Kantor cabang pembantu	46	46	*Sub-branch office*
Kantor fungsional	117	117	*Functional office*
Payment point	28	26	*Payment point*
Kas mobil	8	8	*Mobile cash*
Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	248	248	*Automated Teller Machines (ATM)*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi Bank adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Executive Boards

As of December 31, 2025 and 2024, the members of the Bank's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee are as follows:

2025

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Stefanus Donny H. Heatubun*)	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Frans Gana	*Independent Commissioners*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Charlie Paulus*)	*President Director*
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	Rahmat Saleh*)	*Information Technology and Operations Director*
Direktur Keuangan dan Treasury	Heru Helbianto*)	*Finance and Treasury Director*
Direktur Kredit	Aloysius Rahmat Aliman Geong*)	*Loans Director*
Direktur Kepatuhan	Christofel Samuel Melianus Adoe	*Compliance Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Stanis Man	*Members*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	Ahmad Atang Agustinus Tetiro	*Members*
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Kepala Divisi SDM	*Members*

2024

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	-	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Frans Gana***)	*Independent Commissioners*
Direksi		***Directors***
Plt. Direktur Utama	Yohanis Landu Praing ****)	*Acting President Director*
Direktur Teknologi Informasi dan Operasional	Yohanis Landu Praing ***)	*Information Technology and Operations Director*
Direktur Dana dan Treasury	Hilarius Minggu **)	*Fund and Treasury Director*
Plt.Direktur Kredit	Hilarius Minggu ****)	*Acting Loans Director*
Direktur Kepatuhan	Christofel Samuel Melianus Adoe	*Compliance Director*
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Yosef Juma Dobe Ngole Fauziyah Lamaya	*Members*
Komite Pemantau Risiko		***Risk Monitoring Committee***
Ketua	-	*Chairman*
Anggota	Ahmad Atang Stanis Man	*Members*
Komite Remunerasi dan Nominasi		***Remuneration and Nomination Committee***
Ketua	Frans Gana	*Chairman*
Anggota	Kepala Divisi SDM	*Members*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif (lanjutan)

*) Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2025, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.09 oleh Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.

**) Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 13 oleh Emmanuel Mali, SH, MH.

***) Diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2024, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 18 oleh Notaris Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.

****) Diangkat berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 8 Mei 2024 (Akta No. 13 oleh Notaris Emmanuel Mali, S.H., M.H.) dan diperpanjang melalui keputusan RUPSLB tanggal 16 November 2024 (Akta No. 18 oleh Notaris Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.)

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.IX.I.5 tanggal 24 September 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Kepala Satuan Kerja Audit Intern	Max Daniel Siokain	Max Daniel Siokain	*Head of Internal Audit*
Sekretaris Perusahaan	Fransiskus A.L.A. Boli Tobi	Yuan N. Taneo	*Corporate Secretary*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki karyawan masing-masing sebanyak 2.007 dan 2.057 (tidak diaudit).

e. Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan penyajian laporan keuangan ini yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 12 Maret 2026.

f. Penawaran umum obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 diterbitkan tanggal 21 Desember 2018, terdiri dari:

(i). Seri A dengan nilai nominal Rp228.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama 370 hari sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
(ii). Seri B dengan nilai nominal Rp155.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10,5% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tiga tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
(iii). Seri C dengan nilai nominal Rp80.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 10,75% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama lima tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Executive Boards (continued)

**) Appointed in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 12, 2025, as stated in notarial deed No.09 by Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.*

***) Appointed in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on May 8, 2024, as stated in notarial deed No. 13 by Emmanuel Mali, SH, MH.*

****) Appointed in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 16, 2024, as stated in notarial deed No. 18 by Notary Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.*

*****) Appointed based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 8, 2024 (Deed No. 13 by Notary Emmanuel Mali, S.H., M.H.) and extended through the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 16, 2024 (Deed No. 18 by Notary Sarlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn.)*

Establishment of Audit Committee in accordance with the Regulatory Authority for the Indonesian Capital Market-Financial Institution (Bapepam-LK) No.IX.I.5 dated September 24, 2004.

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Head of Internal Audit and Corporate Secretary are as follows:

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has 2,007 dan 2,057 employees, respectively (unaudited).

e. *The management of the Bank is responsible for the preparation of these financial statements which were completed and authorised for issuance by the Directors on March 12, 2026.*

f. Public offering of bonds

Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I issued on December 21, 2018, consisting of:

(i). Series A with a par value of Rp228,000,000,000, a fixed interest rate of 9.25% per annum payable every three months, a period of 370 days to the date of January 1, 2020;
(ii). Series B with a par value of Rp155,000,000,000, a fixed interest rate of 10.5% per annum payable every three months, a period of three years up to the date of December 21, 2021;
(iii). Series C with a par value of Rp80,000,000,000, a fixed interest rate of 10.75% per annum payable every three months, a period of five years up to the date of December 21, 2023;

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Penawaran umum obligasi (lanjutan)

(iv). Seri D dengan nilai nominal Rp37.000.000.000, tingkat suku bunga tetap 11% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan, jangka waktu selama tujuh tahun sampai dengan tanggal 21 Desember 2025.

Obligasi ini ditawarkan sebesar nilai nominal, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Desember 2018.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (mulai tanggal 1 Januari 2013 BAPEPAM-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No.VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", serta Surat Edaran BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang "Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Untuk Semua Jenis Industri di Pasar Modal di Indonesia".

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan diklasifikasikan ke dalam arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

f. Public offering of bonds (continued)

(iv). Series D with a par value of Rp37,000,000,000, a fixed interest rate of 11% per annum payable every three months, a period during the seven years prior to the date of December 21, 2025.

The bonds were offered at their par value, listed on the Indonesia Stock Exchange on December 26, 2018 and effectively declared by decision letter of Financial Services Authority on December 17, 2018.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The material accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprised of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of the Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) and Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (starting January 1, 2013 BAPEPAM-LK is called Financial Services Authority (OJK)) Regulation No.VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Publicly Listed Companies", and Circular Letter of BAPEPAM-LK No.SE-17/BL/2012 dated December 21, 2012 regarding the "Use of Financial Statements Disclosure Checklist For All Types of Industries in the Capital Market of Indonesia".

b. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows, using the historical cost convention, except for certain accounts which are valued on other measurement bases as described in the accounting policies for such accounts.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method and are classified into cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalent consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing 3 (three) months since acquisition date, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings and not restricted for use.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah), which is the functional currency of the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Perubahan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

  Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.
- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi
  Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

(i) Klasifikasi
Sesuai dengan PSAK 109, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:
- Biaya perolehan diamortisasi;
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL);
- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the statements of financial accounting standard

The following standards, amendments and interpretations became effective since January 1, 2025:

- *Amendment of PSAK 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.*
  The amendments require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of currency exchange. The amendments apply to annual reporting periods beginning with annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Early application is permitted where an entity is required to disclose that fact. The date of initial application is the beginning of the annual period in which the entity first applies the amendments.

- *Amendment of PSAK 117: "Insurance Contract" regarding insurance contract.*
  A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, when effective PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and reinsurance, regardless of the issuing entity, as well as to certain guarantees and financial instruments with non-binding participation features, and some scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current period or prior financial years.

d. Financial assets and liabilities

(i) Classification
In accordance with PSAK 109, there are three measurement classifications for financial assets:
- *Amortised cost;*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL);*
- *Fair value through other comprehensive income (FVOCI).*

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan

- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.
Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch* .

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:
- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverege* ;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. sub-portfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for PSAK 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)
Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 109 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

(ii) Pengakuan awal

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Bank pada awalnya mengakui kredit yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Business model assessment (continued)
Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The Targeting Operating Model for PSAK 109 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

(ii) Initial recognition

The Bank can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual, FVOCI dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebagai nilai wajar. Kredit yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

(iii) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in the profit or loss. Available-for-sale financial assets, FVOCI and financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value. Loans and receivables and financial asset held to maturity are carried at amortised cost using the effective interest rate method.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

(iii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.
Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi long berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi short berdasarkan harga permintaan.

Kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi net long (atau dibayar untuk mengalihkan posisi net short) untuk eksposur risiko tertentu.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam kelompok.

(v) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

(vi) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Fair value measurement (continued)

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

(v) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

(vi) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy or the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-*month* ECL) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). Lifetime ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.
Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan *exposure at default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- *Probability of Default* (PD)
  Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage* 1) atau sepanjang umur (*Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

- *Loss Given Default* (LGD)
  Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

- *Exposure at Default* (EAD)
  Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Identification and measurement of impairment on financial assets

PSAK 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (ECL) or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at FVOCI.

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposureat default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate.

- *Probability of Default (PD)*
  The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

- *Loss Given Default (LGD)*
  The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

- *Exposure at Default (EAD)*
  The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage* 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage* 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Identification and measurement of impairment on financial assets (continued)

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a 12-month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not creditimpaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.

Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage* 3) (lanjutan)

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio revolving tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage* 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage* 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana workout untuk masing-masing debitur individu.

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (forward looking). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen kredit yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Identification and measurement of impairment on financial assets (continued)

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3) (continued)

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum 3 scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari *deposit facilities* dan *interbank call money*.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

h. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit sindikasi
Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang dihapusbuku
Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Setelah pengakuan awal, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consist of deposit facilities and interbank call money.

Placements with Bank Indonesia are stated at the outstanding balances net of unearned interest income.

Placements with other banks are stated at amortised cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

h. Loans

Loans are measured at amortised cost using the effective interest method, less allowance for impairment losses. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortisation is recognised in profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

Syndicated loans
Loans in order to the joint finance (syndicated loans) are stated at amortised cost in accordance with the risk portion which covered by the Bank.

Loans written-off
Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans, in current period is credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous period are recorded as operational incomes other than interest income.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit yang diberikan
Bank mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitur), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat kredit yang diberikan di atas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

i. Surat berharga

Surat Berharga yang dimiliki terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi (termasuk obligasi korporasi yang diperdagangkan di bursa efek) dan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, efek-efek diukur sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI).

Diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Surat berharga untuk tujuan investasi yang diklasifikasikan ke dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Bila terjadi penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan/atau diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan Surat berharga yang bersangkutan diturunkan sebesar nilai wajarnya. Jumlah penurunan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi periode berjalan.

Premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Loans (continued)

Restructuring of loans
The Bank accounts for troubled debtrestructuring in accordance with the type of restructuring.

In troubled debt restructuring which involves a repossesion of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank shall recalculate the gross carrying amount of the financial asset and shall recognise a modification gain or loss in profit or loss. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

i. Marketable securities

Marketable securities consist of Government Treasury Bills, Certificates of Bank Indonesia, bonds (including corporate bonds traded on the stock exchanges) and that are classified as financial assets held to maturity.

Subsequently accounted for, depending on their respective classifications, as either measured at amortised cost, measured at fair values through profit or loss or measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Measured at amortised cost
Marketable securities classified as amortised cost are stated at cost adjusted for unamortised premium and/or discount. If it is probable that the cost (including amortisation of premium and/or discount) of such marketable securities will not be fully recovered, a permanent decline in value is considered to have occurred and the individual security is written down to its fair value. Any such write-down is recognised as loss in the current period's profit or loss.

Premium or discount is amortised using effective interest method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Surat berharga (lanjutan)

Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah surat berharga yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan dan/atau tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi maupun nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Surat berharga tersebut dicatat pada nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, termasuk pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian dari pelepasan, serta selisih perubahan nilai wajar, diakui langsung dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Biaya transaksi yang timbul pada saat perolehan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan langsung pada laporan laba rugi pada saat terjadinya dan tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat surat berharga.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dan perubahan nilai wajar disajikan sebagai penambah/pengurang terhadap surat berharga untuk tujuan investasi.

j. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati (pendapatan bunga yang ditangguhkan) dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak Surat Berharga itu dibeli hingga saat dijual kembali.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

k. Aset tetap

Bank menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap". Revisi PSAK ini juga mengatur akuntansi tanah dan sekaligus mencabut PSAK 47, "Akuntansi Tanah".

Efektif 13 Desember 2025, Bank mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap atas tanah. Perubahan kebijakan akuntansi ini diperlakukan secara prospektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Marketable securities (continued)

Measured at fair values through profit or loss

Securities classified as measured at fair value through profit or loss are securities that are held for trading purposes and/or do not meet the criteria to be classified as measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Such securities are recognized at fair value in the statement of financial position. Gains or losses arising from changes in fair value, including interest income, gains or losses on disposal, and changes in fair value, are recognized directly in profit or loss for the current period.

Transaction costs incurred on the acquisition of securities measured at fair value through profit or loss are expensed immediately in profit or loss when incurred and are not capitalized as part of the carrying amount of the securities.

The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

The allowance for impairment losses and changes in fair value are presented as additions to/deductions from the outstanding balance of marketable securities.

j. Securities purchased under resale agreements

Securities purchased under resale agreements are presented as receivables at the agreed resale price net of the difference between the purchase price and agreed resale price (unearned interest income) and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the agreed resale price are amortized using effective interest rate as interest income over the period, commencing from the acquisition date to the resale date.

Securities purchased under resale agreements are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

k. Fixed assets

The Bank implemented PSAK 216, "Fixed Assets". This revised PSAK also prescribes the accounting for land and therefore, it revoked PSAK 47, "Accounting for Land".

Effective December 13, 2025, the Bank has changed its accounting policy from cost model to revaluation model on measurement of fixed assets on the class of land. The changes in this accounting policy is applied prospectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Tanah disajikan pada nilai revaluasian dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasian. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Tanah tidak disusutkan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah tersebut dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di surplus revaluasi pada bagian ekuitas, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah yang dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan yang dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Hak atas tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak yang timbul pada awal perolehan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembaharuan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau taksiran masa manfaat ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Biaya yang ditangguhkan tersebut disajikan sebagai "Aset Takberwujud".

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari “Aset Tetap”. Akumulasi biaya perolehan meliputi biaya konstruksi dan biaya langsung lainnya. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan dan hanya akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Pengakuan penyusutan dimulai ketika aset tersebut ada di lokasi dan kondisinya dan dapat dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

k. Fixed assets (continued)

Land are stated at their revalued amount, it is the fair value at the date of revaluation less accumulated impairment losses occurring after the date of revaluation. Revaluation carried out with sufficient regularity to ensure that regular carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at reporting date. Land is not depreciated.

The increase from the revaluation of land are recognized as other comprehensive income and accumulated to revaluation surplus in equity, unless earlier revaluation decrease over the same asset been recognized in the profit on loss, in this case, the increase revaluation of up to write-downs due to the revaluation, are recognized in the statement of profit or loss.

Impairment in the carrying amount derived from the revaluation of land are charged to profit or loss when the account balance exceeds the decline in revaluation surplus of fixed assets that come from the previous revaluation, if any.

Impairment in the carrying amount derived from the revaluation of land dan buildings are charged to profit or loss when the account balance exceeds the decline in revaluation surplus of fixed assets that come from the previous revaluation, if any.

Land rights, including the right to legal expenditures incurred in the early acquisition of land, are stated at cost and is not amortised. Costs incurred in connection with the renewal or extension of land rights are deferred and amortised over the period of land rights or the estimated useful lives of the land, whichever is shorter. Deferred costs are presented as "Intangible Assets".

Assets under construction are stated at cost and are presented as part of “Fixed Assets”. The accumulated costs include cost of construction and other direct costs. Assets under construction are not depreciated and they will only be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the constructed asset is ready for its intended use.

All fixed assets except land, are depreciated using the straight line method.

Recognition of depreciation commences when an asset is in its location and condition and capable of being operated in the manner intended by management. Depreciation of fixed assets, is calculated using the straight line to allocate the purchase price up to the residual value over the expected useful lives as follows:

	Tahun/ Years	**Persentase/ *Percentage***	
Bangunan	20	5%	*Building*
Kendaraan bermotor	4 - 8	12,5% - 25%	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	4 - 16	6,25% - 25%	*Office equipment and furnitures*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung dari selisih antara jumlah *neto* hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi pada tahun yang sama ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

l. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak dan hak legal atas tanah.

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tidak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh biaya yang berkaitan secara langsung dengan persiapan perangkat lunak tersebut sampai menjadi siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Perangkat lunak
Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan, dimana kinerjanya akan lebih baik dari yang semula diperkirakan. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Pengakuan amortisasi dimulai ketika perangkat lunak tersebut ada di kondisinya dan siap digunakan atau dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan masa manfaat perangkat lunak yang diestimasi, yaitu 4 (empat) tahun.

Hak legal atas tanah
Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek menggunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Fixed assets (continued)

When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalised as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalisation criteria, are recognised in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognised in profit or loss in the year the asset is derecognised.

l. Intangible assets

Intangible assets consist of software and land right.

Intangible assets is recognised only when its cost can be measured reliably and it is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortisation.

Cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software until it becomes ready to be used for its intended purpose.

Software
Subsequent expenditures on the software is capitalised only when it increases the future economic benefits, wherein its performance becomes better than originally expected. Expenditures with no additional future economic benefits from the software is directly recognised as expenses when incurred.

Recognition of amortisation commences when the software is in its condition and ready to be used or operated in the manner intended by management. Amortisation is calculated using the double declining balance method, based on the estimated useful lives of the software, which is 4 (four) years.

Land right
Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognised as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter using the straight-line method.

Intangible assets are derecognised when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai. Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk aset.

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan.

Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset non-keuangan Bank yang terdiri atas aset tetap dan perangkat lunak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Impairment of non-financial assets

The carrying values of non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the assets or cash-generating units are written down to their recoverable amount. The estimated recoverable amount of an asset is the higher of an asset's fair value and value-in-use. The fair value is the amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction less costs of disposal while value-in-use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. For an asset that does not generate largely independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses are recognised in profit or loss.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortisation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

As of December 31, 2025 and 2024, no impairment loss was recognised for the Bank's non-financial assets which consist of fixed assets and software.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari taksiran tagihan pajak, pendapatan yang masih akan diterima, beban dibayar di muka, agunan yang diambil alih, uang muka, persediaan dan lain-lain.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".
Agunan yang diambil alih disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

o. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Simpanan nasabah

Giro, tabungan dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Other assets

Other assets include estimated tax receivables, interest receivables, prepaid expenses, foreclosed assets, advances, office supplies and others.

Prepaid expenses are amortised over their beneficial period using the straight-line method.

Foreclosed assets represent assets acquired by Bank, both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral when the debtor could not fulfill their obligations to Bank. Foreclosed assets represent loan collateral acquired in settlement of loans and are presented in "Other assets".

Foreclosed assets are presented at their net realizable value. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated cost of liquidating the foreclosed assets. Any excess of the loan balance over the value of the foreclosed assets, which is not recoverable from the borrower, is charged to the allowance for impairment losses. The difference between net realizable value and proceed from selling is recognized as gains or losses in the current period.

Expenses related of foreclosed assets maintainance are charged to the current year statements of profit or loss as incurred. If there is permanent impairment then the carrying value is decreased to recognize the impairment and the loss is charged to the current year statements of profit or loss.

o. Liabilities immediately payable

Liabilities immediately payable represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Liabilities immediately payable are measured at their amortised cost using effective interest method.

p. Deposits from customers

Current accounts, savings deposits and time deposits are classified as liabilities measured at amortised cost, which are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of the deposits from customers and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Simpanan nasabah (lanjutan)

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

q. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, *call money* dan *negotiable certificate of deposit* .

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

r. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank berupa obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan.

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Deposits from customers (continued)

Current accounts represent deposits from customers that can be used as a medium of exchange, which may be withdrawn at any time by check, or by transfer to a bank draft or other medium of exchanges.

Saving deposits represent deposit from customers who may only be withdrawn over the counter and Automated Teller Machine (ATM), if the agreed conditions are met, but may not be withdrawn by check or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposit from customers that can be withdrawn only at a certain time in accordance with the agreement between the depositor and the Bank.

q. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of current accounts, saving deposits, time deposits, call money and negotiable certificate of deposit.

Deposits from other banks are classified as liabilities measured at amortised cost, which are initially recognised at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other banks and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

r. Securities issued

Securities issued by the Bank in the form of bonds.

Securities issued are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued.

Bonds issued are recorded at par value less the balance of unamortized discount. Costs incurred in connection with the issuance of bonds recorded as a deduction of the related proceeds and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan dan dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh digunakan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi laporan keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi *neto* tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan, atau apabila diajukan permohonan keberatan atau banding, ketika hasil keberatan atau banding sudah ditetapkan.

t. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya dinyatakan sebesar nilai wajar dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation

The accounting treatment for income taxes in accordance with PSAK 212, "Income Taxes".

Current tax expense is determined based on taxable income for the current year and is calculated using the applicable tax rates. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the assets and liabilities of financial and tax reporting at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised using the liability method of financial position for all temporary differences are deductible and tax losses that have not been used to the extent that the possibility of temporary differences may be used and tax losses that have not been used can be utilized to reduce taxable income in the future come.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each financial statement position date and the carrying value of deferred tax assets is no longer reduced to the extent that it is probable that sufficient taxable profit will be available to compensate for some or all of the benefits of the deferred tax assets.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that will apply in the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Tax effects related to the allowance for and/or reversal of all temporary differences during the year, including the effect of changes in tax rates, are recognised as "Benefit (Expense) Income Taxes - Deferred" and included in the net earnings or losses of the current year, except for transactions previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or if the petition filed an objection or appeal, as the result of an objection or appeal has been set.

t. Borrowings

Borrowings are funds received from other parties with the obligation of repayment in accordance with the terms of the borrowing agreement.

Borrowings are classified as financial liabilities measured at amortized cost, which was initially valued at fair value and subsequently stated at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated with the initial recognition of loans received and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Modal saham

Modal saham diukur dengan nilai nominal untuk seluruh saham yang diterbitkan dan diklasifikasikan sebagai bagian dari "Ekuitas". Biaya tambahan yang terkait langsung dengan penerbitan saham baru dikurangkan terhadap modal saham.

v. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif laba atau rugi bersih, distribusi dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

w. Pengakuan pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (*Stage* 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan.

Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan S*tage* 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

x. Pengakuan pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan, atau selama periode risiko.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

y. Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain terdiri item pendapatan atau beban (termasuk item yang sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan sesuai dengan PSAK.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Share capital

Share capital is measured with a par value of the shares issued and classified as part of the "Equity". Incremental costs directly associated with the issuance of new shares are deducted against the share capital.

v. Retained earnings

Retained earnings are the cumulative balance of net income or loss, dividend distribution, prior period adjustments, the effects of changes in accounting policies and other capital adjustments.

w. Interest income and expense recognition

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate.

This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the financial asset gross.

x. Fees and commission income and expense

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortised during the life of financial assets or liabilities or during the period of the risk.

Commissions and fees not related to lending activities or loan period, or not material are recognised as revenues and expenses at the time the transactions occur.

Fees and commission income related to lending activities are recognised as part of interest income.

y. Other comprehensive income

Other comprehensive income comprises items of income or expense (including items previously presented under the statements of changes in equity) that are not recognised in profit or loss for the year in accordance with PSAK.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah
- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Lease

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Short term lease; and*
- *Low value asset*
- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*

  1. *The Bank has the right to operate the asset;*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Sewa (lanjutan)

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

aa. Imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 219, "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, iuran jaminan sosial, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.6/2023.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, Bank memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No.KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.
Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Lease (continued)

The Bank account for a leases modification as a separate leases if both:

- *the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

aa. Employee benefit

Bank apply PSAK 219, "Employee Benefits", which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term and long-term. The Bank also requires recognition of liability and expense when an employee has provided service and the entity consumes economic benefit arising from the service.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when owed to employees on an accrual basis.

Short-term employee benefits such as salary, benefits, social security contributions, bonuses and non-monetary rewards are recognised over the period the services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Long-term employee benefits and post- employment benefits

Long-term employee benefits and post-employment benefits, such as pensions, long service leave, service pay benefits and proportional service pay benefits, calculated based on company regulations in accordance with Job Creation Law No.6/2023.

In connection with pension benefits, the Bank has a defined benefit pension plan for all its permanent employees. Defined benefit pension plan is funded through payments to Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur are determined by periodic actuarial calculations. Establishment of the Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No.KEP-479/KM.17/1996 dated December 30, 1996.

Defined benefit plan is a pension plan that defines the amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The number of employee contributions to pension plans is set at 5% of the basic salary of the employee concerned and the rest is borne by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja (lanjutan)

Beban kewajiban masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Pengukuran kembali dapat timbul dari perubahan pada asumsi-asumsi aktuarial yang dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain dan disajikan bagian dari penghasilan komprehensif lain di ekuitas.

Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya jumlah program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakannya.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Diluar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya, yaitu meliputi penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bhakti, penghargaan masa bhakti proporsional, cuti besar dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

aa. *Employee benefit (continued)*

Long-term employee benefits and post- employment benefits (continued)

The expense of past liabilities are recognised immediately in the statement of profit or loss, except for the payment of the reward depends on whether the employee remaining in service for a certain period of time (the vesting period). In this case the past service costs are amortized on a straight-line basis over the vesting period.

Employee benefit liabilities is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets and adjusted for gains or losses and past service costs not yet recognised. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows future using interest rates of government bonds (considering currently there is no active market for high quality corporate bonds) in the same currency with the benefit that will be paid and maturity roughly equal to the time to maturity remuneration is concerned.

Remeasurement may arise from changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income and presented part of other comprehensive income in equity.

Past service cost is recognised immediately in the statement of profit or loss.

Banks should provide a minimum amount of pension benefits specified in accordance with the Labor Law. Since the Labor Law sets the formula for calculating the minimum amount of benefits, basically the number of pension plans under Labor Law represent defined benefit plans. The calculation of pension benefits made by the actuary shows that the expected benefits are provided by the Bank's pension fund will exceed the minimum pension benefits of the Labor Law, therefore, the Bank did not need to make adjustments on pension benefits that it provides.

Other long-term benefit plan

Outside the defined benefit pension plan, the Bank also provides rewards that are other long terms, which includes service pay benefits, proportional service pay benefits, long service leave and mourning.

Same as pension benefits, liabilities and financing costs of the service pay benefits, proportional service pay benefits, long service leave and mourning is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

aa. Imbalan kerja (lanjutan)

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi kepada karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Jika terdapat selisih antara jumlah yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Kesejahteraan pensiun pegawai

Bank memberikan dana kesejahteraan pensiun pegawai kepada karyawan Bank. Estimasi besarnya penyisihan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Jasa pengabdian dan penghargaan masa bhakti bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan jasa pengabdian kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya jasa pengabdian direksi secara bersama-sama ditetapkan maksimum 2,5% dari laba setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan, dengan perbandingan Direktur menerima 90% dari jumlah yang diterima Direktur Utama.

Besarnya jasa pengabdian bagi Komisaris Utama ditetapkan sebesar 70% dari jasa pengabdian yang diterima Direktur Utama, sedangkan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari jumlah yang diterima Komisaris Utama. Jasa pengabdian tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Bank memberikan Penghargaan Masa Bhakti kepada Direksi Bank yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Besarnya penghargaan masa bhakti bagi Direktur Utama ditetapkan maksimum sebesar 10 kali penghasilan terakhir yang diterima. Penghargaan Masa Bhakti untuk Direktur ditetapkan 90% dari Penghargaan Masa Bhakti yang diterima Direktur Utama. Penghargaan Masa Bhakti tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan Siaran Pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada April 2022, menyebutkan bahwa PSAK 219: Imbalan Kerja paragraf 70 – 74 mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan ke periode jasa berdasarkan formula imbalan program dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan menurut program sampai tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan selanjutnya yang material berdasarkan program, selain dari kenaikan gaji berikutnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Employee benefit (continued)

Bonuses

Banks also provide bonuses to employees, the Board of Commissioners and Board of Directors. Estimates of the amount of the allowance is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial capacity of the Bank, and then require approval by the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount reserved to its realization, the difference is charged to profit and loss for the year.

Employee pension welfare

Bank provides employee pension welfare fund to the employees of the Bank. Estimates of the amount of the allowance is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial capacity of the Bank, and then require approval by the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount reserved to its realization, the difference is charged to profit and loss for the year.

Dedication services and service pay benefits for the Directors and Board of Commissioners

The Bank provides dedication services to the Board of Directors and the Board of Commissioners at the end of his term. The amount of directors dedication services jointly set a maximum of 2.5% from profit after tax financial year before the end of the services, by comparison Directors receives 90% of the amount received by the President Director.

The amount of dedication services for the Commissioner set at 70% of the service pay benefits received by President Director, while Commissioners set at 90% of the amount received President Commissioner. The dedication services is reserved proportionally each year during his services, which is recognised as expenses in the current year.

The Bank provides end of service pay benefits to its Directors who had completed his services and was not re-elected for another term. The amount of the end of service pay benefits to the President Director is set to a maximum of 10 times the last income received. End of service pay benefits for Directors shall be 90% of the end of service pay benefits received by President Director. The end of service pay benefits proportionally reserved each year during his services, which is recognised as expenses in the current year.

Based on the Press Release issued by Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) of Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) in April 2022, states that PSAK 219: Employee Benefits paragraphs 70 – 74 requires an entity to attribute benefits to the period of service based on the plan benefit formula from the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further service by the employee will lead to no material amount of further benefits under the plan, other then from further salary increases.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ab. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".
Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

(i). Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (b) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (c) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(ii). suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(iii). suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai venturer;
(iv). suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(v). suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
(vi). suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v);
(vii). suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 35).

ac. Laba bersih per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

ae. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Related parties transactions

Bank transactions with related parties. In these financial statements, the term related parties in accordance with PSAK 224 on "Related Party Disclosures".
The Bank considers the following as its related parties:

(i). a person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (a) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank, (b) has significant influence over the Bank or (c) has joint control over the Bank;
(ii). an entity which is a member of the same group as the Bank;
(iii). an entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;
(iv). a member of key management personnel of the Bank;
(v). a close family member of the person described in clause (i) or (iv);
(vi). an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (iv) or (v);
(vii). an entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank.

Transactions with related parties are made on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions undertaken with third parties. Material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements and the relevant details have been presented in note of the financial statements (Note 35).

ac. Basic earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of shares issued and fully paid during the year.

ad. Dividend

Dividend distribution to the Bank's shareholders is recognised as a liability in the financial statements of the Bank in the year the dividends are approved by the shareholders of the Bank.

ae. Operating segment

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the entity, which whose operating results are regularly reviewed by the operating decision maker to make decisions about resource allocated to the segment and assess its performance, and financial information is available that can be separated.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ae. Segmen operasi (lanjutan)

Karena pada saat ini Direksi Bank hanya menelaah alokasi aset keuangan tertentu di antara nasabah ritel, nasabah usaha kecil dan menengah (UKM) serta nasabah Middle Market, tetapi tidak untuk hasil operasi lainnya serta informasi keuangan yang dapat dipisahkan juga tidak tersedia di Bank, maka manajemen berkeyakinan bahwa Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal.

af. Provisi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ag. Liabilitas dan aset kontinjensi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

ah. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah periode pelaporan yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan adjusting event, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ai. Transaksi dan penjabaran mata uang asing

Bank menerapkan PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing".

Transaksi dalam mata uang asing awalnya dicatat menggunakan kurs tukar mata uang fungsional pada tanggal transaksi. Pada tanggal posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup mata uang fungsional. Aset dan liabilitas nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs tukar mata uang fungsional pada tanggal awal transaksinya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ae. Operating segment (continued)

Because at this time the Board of Directors of the Bank only examine the allocation of financial assets of certain among retail customers, clients small and medium enterprises (SMEs) as well as the customers of Middle Market, but not to the results of other operations as well as financial information that can be separated is also not available in the Bank, management believes that the Bank is currently managed as a single operating segment.

af. Provision

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the entity, which whose operating results are regularly reviewed by the operating decision maker to make decisions about resource allocated to the segment and assess its performance, and financial information is available that can be separated.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If the outflow of resources to settle the obligation is most likely not the case, then the provision is cancelled.

ag. Contingent liabilities and assets

An operating segment is a component of an entity engaged in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the entity, which whose operating results are regularly reviewed by the operating decision maker to make decisions about resource allocated to the segment and assess its performance, and financial information is available that can be separated.

ah. Events after the reporting period

Each event after the reporting period that led to additional information about the financial position of the Bank (adjusting event) will be adjusted in the financial statements. Events after the reporting period that is not an adjusting event, if any, will be disclosed when it has a material impact on the financial statements.

ai. Foreign currency transaction and translations

The Bank adopted PSAK 221 : "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

Transactions in foreign currencies are initially recorded using the functional currency exchange rate at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are restated using the closing functional currency exchange rate at the financial position date. Non-monetary assets and liabilities that are measured in terms of historical cost in foreign currency are translated using the functional currency exchange rates at the date of the initial transactions.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ai. Transaksi dan penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Aset dan liabilitas non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs mata uang fungsional pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Keuntungan dan kerugian mata uang asing, baik yang telah terealisasi maupun belum terealisasi, tercermin dalam laporan laba rugi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat):

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ai. Foreign currency transaction and translations (continued)

Non-monetary assets and liabilities measured at fair value in a foreign currency are translated using the functional currency exchange rates at the date when fair value was determined.

Foreign exchange gains and losses, both realised and unrealised, are reflected in the profit or loss.

Below are the major exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2025 and 2024 using the middle rates based on Bank Indonesia closing rate (16.00 hours Western Indonesian Time):

	2025	2024	
Euro Eropa	19.571	16.758	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	16.675	16.095	*United States Dollar*
Dolar Singapura	12.965	11.845	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	11.152	10.014	*Australian Dollar*
Yen Jepang	107	103	*Japan Yen*
Yuan China	2.385	2.205	*China Yuan*
Ringgit Malaysia	4.108	3.598	*Malaysian Ringgit*

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:
- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

In the preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia required estimates and assumptions that affect:
- *reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements,*
- *the amount of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on Management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Significant professional judgment and estimates in determining the amounts recognised in the financial statements are as follows:

Going concern

The Bank's management made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabillitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada catatan 2d.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;
- Tingkat 2 - nilai wajar yang menggunakan *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan
- Tingkat 3 - nilai wajar yang menggunakan *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Kontinjensi

Manajemen Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen Bank tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Classification financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in note 2d.

Fair value of financial instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as prepayment rates and default rate assumptions.

The Bank presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

- *Level 1 - the fair value is based quoted prices (unadjusted) in active markets;*
- *Level 2 - the fair value uses inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable, either directly (ie as prices) or indirectly (i.e, derived from prices); and*
- *Level 3 - the fair value uses inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Contingencies

Management of the Bank is involved in legal proceedings. Estimated cost for the possibility of settlement of claims has been developed through consultation with the assistance of Bank's legal counsel based on an analysis of potential results. Management of the Bank does not believe that the outcome of this case will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimate or the effectiveness of the strategies associated with it.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. Banks base their assumptions and estimates that are used on parameters available when the financial statements are prepared.

Assumptions and circumstances regarding future developments are subject to change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. The changes are reflected in the assumptions used at the time of the occurrence.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penurunan nilai instrumen keuangan

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya diamortisasi berdasarkan PSAK 109 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi.

PSAK 109 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang; dan
   c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Penghitungan kerugian kredit ekspektasian Bank berdasarkan PSAK 109 adalah keluaran dari model kompleks dengan sejumlah asumsi mendasar mengenai pilihan *input* variabel dan saling ketergantungannya. Elemen-elemen dari model kerugian kredit ekspektasian yang dianggap sebagai pertimbangan dan estimasi akuntansi meliputi:

a. Model penilaian kredit internal, yang menetapkan *probability of default* untuk tingkat individual.
b. Kriteria penilaian jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan dan oleh karena itu cadangan untuk aset keuangan harus diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dan penilaian kualitatif;
c. Pengembangan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk berbagai formula dan pilihan *input*;
d. Penentuan asosiasi antara skenario makroekonomi dan, *input* ekonomi, seperti nilai tukar Dolar Amerika Serikat ke Rupiah dan suku bunga BI, dan pengaruhnya terhadap *probability of defaults, exposure at defaults* dan *loss given defaults*; dan
e. Pemilihan skenario forward-looking untuk makroekonomi dan bobot probabilitasnya, untuk mendapatkan *input* ekonomi ke dalam model kerugian kredit ekspektasian.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Impairment losses on financial instruments

The Bank review their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortised cost under PSAK 109 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss.

PSAK 109 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money; and
   c. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Bank's expected credit loss calculations under PSAK 109 are outputs of complex models with a number of underlying assumptions regarding the choice of variable inputs and their interdependencies. Elements of the expected credit loss models that are considered accounting judgements and estimates include:

a. Internal credit grading model, which assigns PDs to the individual grades;
b. Criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk and so allowances for financial assets should be measured on a life time expected credit loss basis and the qualitative assessment;
c. Development of expected credit loss models, including the various formulas and the choice of inputs;
d. Determination of associations between macroeconomic scenarios and, economic inputs, such as USD to IDR exchange rate and BI rate, and the effect on probability of defaults, exposure at defaults and loss given defaults; and
e. Selection of forward-looking macroeconomic scenarios and their probability weightings, to derive the economic inputs into the expected credit loss models.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap dan aset takberwujud

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Penurunan nilai atas aset non-keuangan

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan. Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Useful life of fixed assets and intangible assets

The Bank estimate the useful lives of fixed assets and intangible assets based on the period over which the assets are expected to be available for use.

The estimated useful lives of fixed assets are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets.

In addition, estimation of the useful lives of fixed assets and intangible assets is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of fixed assets would increase operating expenses.

Impairment of non-financial assets

Bank assesses the impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Factors that are considered important by the Bank which could lead to impairment review include the following:

- *Performance is below average are significant relative to historical or projected results of operations results are expected in the future;*
- *Significant changes on how to use the acquired assets or the strategy for the overall business; and*
- *The negative trend of the industry and the economy are significant.*

The Bank recognises an impairment loss when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. Recoverable amount is the higher value between fair value less costs to sell and value in use of the asset (cash-generating unit). Estimated recoverable amount for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit in which the asset forming part of the unit.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for all unused tax losses and temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca-kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuaria. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

The present value of pension liabilities

The cost for defined benefit pension plan and post-employment benefits is determined using actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected return on assets, future salary increases, mortality rates and an increase in the number of pensions in the future. Because the long-term nature of these plans, estimates have significant uncertainties.

4. KAS / *4. CASH*

	2025	2024	
Rupiah	685.996.826.150	593.809.031.350	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	777.021.650	495.371.910	*United States Dollars*
Dolar Singapura	217.086.797	369.763.942	*Singapore Dollars*
Euro Eropa	178.100.150	192.215.579	*European Euro*
Dolar Australia	74.831.530	42.056.721	*Australian Dollars*
Ringgit Malaysia	36.792.636	13.419.999	*Malaysian Ringgit*
Yuan China	9.658.096	7.055.968	*China Yuan*
Yen Jepang	5.325.000	5.151.500	*Japan Yen*
Jumlah	**687.295.642.009**	**594.934.066.970**	***Total***

Saldo kas dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp114.146.900.000 dan Rp105.861.600.000 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Cash balance in Rupiah includes cash at the ATM machine (Automatic Teller Machine), amounted Rp114,146,900,000 and and Rp105,861,600,000 As of December 31, 2025 and 2024 respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2025	2024	
Rupiah	991.598.826.816	1.504.618.017.847	*Rupiah*
Mata uang asing:			*Foreign currencies*
Dollar Amerika Serikat	6.337.204.019	6.116.779.531	*United States Dollar*
Total	**997.936.030.834**	**1.510.734.797.378**	*Total*

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 43a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 43a.

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada pihak berelasi.

There was no related party in current accounts with other banks.

a. **Berdasarkan nama bank** / ***a. By counterparty bank***

	2025	2024	
Bank Umum			***Commercial Bank***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	589.829.414	586.587.070	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	554.078.816	552.803.596	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	231.538.288	231.067.074	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	211.321.512	236.308.873	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	13.502.159	15.433.873	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	1.600.270.189	1.622.200.486	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollars***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.581.046.380	11.946.267.657	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	164.665.625	160.950.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	111.617.948	141.636.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	12.857.329.953	12.248.853.657	
Dolar Singapura			***Singapore Dollars***
PT Bank DBS Indonesia	212.626.820	226.231.383	*PT Bank DBS Indonesia*
	212.626.820	226.231.383	
Dolar Australia			***Australian Dollars***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.223.883.062	743.427.845	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	1.223.883.062	743.427.845	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

a. **Berdasarkan nama bank (lanjutan)** / ***a. By counterparty bank (continued)***

	2025	2024	
Mata uang asing (lanjutan)			***Foreign currencies (continued)***
Bank Pemerintah Daerah			***Regional Development Bank***
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	81.402.104	3.138.045.887	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	55.732.562	56.092.562	*PT Bank Pembangunan Daerah Papua*
PT Bank Jakarta	29.340.593	29.580.593	*PT Bank Jakarta*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	9.023.491	2.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Bank Pembangunan Daerah Timor Timur	-	25.400.862	*Bank Pembangunan Daerah Timor Timur*
	175.498.750	3.251.119.904	
Jumlah	16.069.608.774	18.091.833.276	***Total***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.722.680)	(28.705.478)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.066.886.094**	**18.063.127.798**	***Total - net***

Tidak terdapat giro pada bank lain yang diblokir dan dijadikan agunan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There are no other banks were blocked and used as collateral on December 31, 2025 and 2024.

b. **Tingkat suku bunga rata-rata per tahun** / ***b. Average annual interest rates***

	2025	2024	
Rupiah	0,09%	0,20%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00%	0,00%	*Foreign currencies*

c. **Penyisihan kerugian penurunan nilai** / ***c. Allowance for impairment losses***

	2025	2024	
Saldo awal	28.705.478	28.728.038	*Beginning balance*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(25.400.862)	-	*Written-off during the year*
Pemulihan selama tahun berjalan	(581.936)	(22.560)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**2.722.680**	**28.705.478**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible current accounts with other banks.

d. **Berdasarkan kolektibilitas** / ***d. By collectibility***

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 43b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 43b.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan pada bank lain kepada pihak berelasi.

a. **Berdasarkan jenis dan jatuh tempo**

	Jatuh tempo (bulan)	2025	2024	Maturity (month)	
Deposit facilities	< 1	2.782.850.149.969	399.941.683.676	*< 1*	*Deposit facilities*
Interbank call money	< 1	355.000.000.000	-	*< 1*	*Interbank call money*
Jumlah		3.137.850.149.969	399.941.683.676		*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(5.742.187)	-		*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih		**3.137.844.407.782**	**399.941.683.676**		***Total - net***

b. **Berdasarkan jenis dan *counterparty***

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Deposit facilities			***Deposit facilities***
Bank Indonesia	2.782.850.149.969	399.941.683.676	*Bank Indonesia*
Interbank call money			***Term deposit***
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda)	165.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda)*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	100.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara*
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	50.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tbk	40.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Jumlah	3.137.850.149.969	399.941.683.676	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(5.742.187)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.137.844.407.782**	**399.941.683.676**	***Total - net***

c. **Tingkat suku bunga rata-rata per tahun**

	2025	2024	
Deposit facilities	4,48%	5,25%	*Deposit facilities*
Interbank call money	4,35%	-	*Interbank call money*

d. **Penyisihan kerugian penurunan nilai**

	2025	2024	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	5.742.187	-	*Allowance during the year*
Saldo akhir	**5.742.187**	**-**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

d. **Berdasarkan kolektibilitas**

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada catatan 43c.

7. *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

There was no related party in placement with Bank Indonesia and other banks.

a. ***By type and maturity***

b. ***By type and counterparty***

c. ***Average annual interest rates***

d. ***Allowance for impairment losses***

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible placements with Bank Indonesia and other banks.

d. ***By collectibility***

Collectibility placements with Bank Indonesia and other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43c.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN / *8. LOANS*

a. Berdasarkan jenis dan kualitas kredit / *a. By type and loan quality*

	2025				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Pihak berelasi					*Related parties*
Modal kerja	185.807.092	643.390.556	7.746.248.920	8.575.446.568	*Working capital*
Konsumsi	22.461.338.503	128.810.052	252.838.705	22.842.987.260	*Consumer*
Investasi	247.579.058	-	42.290.689	289.869.747	*Investment*
	22.894.724.653	772.200.608,00	8.041.378.314	31.708.303.575	
Pihak ketiga					*Third parties*
Konsumsi	11.653.254.177.040	66.046.810.425	80.452.957.613	11.799.753.945.078	*Consumer*
Modal kerja	620.749.361.700	78.492.959.363	264.283.518.163	963.525.839.226	*Working capital*
Investasi	152.281.533.077	27.026.537.203	109.627.749.151	288.935.819.431	*Investment*
Sindikasi	178.461.246.580	-	186.773.737.791	365.234.984.371	*Syndication*
Karyawan	488.473.973.420	4.479.320.927	3.590.119.162	496.543.413.509	*Employee*
	13.093.220.291.817	176.045.627.918	644.728.081.880	13.913.994.001.615	
Jumlah	13.116.115.016.470	176.817.828.526	652.769.460.194	13.945.702.305.190	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(14.583.358.225)	(13.552.222.025)	(438.454.048.123)	(466.589.628.373)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.101.531.658.245**	**163.265.606.501**	**214.315.412.071**	**13.479.112.676.817**	***Total - net***

	2024				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Pihak berelasi					*Related parties*
Konsumsi	916.050.174	-	7.746.248.920	8.662.299.094	*Consumer*
	916.050.174	-	7.746.248.920	8.662.299.094	
Pihak ketiga					*Third parties*
Konsumsi	10.196.164.836.106	127.458.681.879	428.195.666.351	10.751.819.184.336	*Consumer*
Modal kerja	900.840.722.740	7.368.948.381	32.098.259.878	940.307.930.999	*Working capital*
Investasi	125.532.526.610	457.467.588	3.444.557.050	129.434.551.248	*Investment*
Sindikasi	462.610.791.171	-	-	462.610.791.171	*Syndication*
Karyawan	472.634.037.574	1.116.653.088	-	473.750.690.662	*Employee*
	12.157.782.914.201	136.401.750.936	463.738.483.279	12.757.923.148.416	
Jumlah	12.158.698.964.375	136.401.750.936	471.484.732.199	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(33.102.661.118)	(9.234.605.419)	(305.607.828.060)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**12.125.596.303.257**	**127.167.145.517**	**165.876.904.139**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

8. LOANS (continued)

b. By economic sectors

	2025	2024	
Rumah tangga	12.320.477.370.144	10.873.538.745.180	*Households*
Perdagangan besar dan eceran	532.748.347.095	645.007.107.537	*Wholesale and retail*
Konstruksi	460.484.374.701	491.555.431.926	*Construction*
Industri pengolahan	121.120.581.629	213.849.739.912	*Manufacturing*
Real estate, usaha persewaan dan perusahaan jasa	202.718.950.408	38.342.835.973	*Real estate, leasing services and servicing companies*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	111.240.118.290	126.277.905.837	*Accommodation and food and beverages*
Pertanian, perburuan dan kehutanan	39.945.860.969	76.997.862.976	*Agriculture, hunting and forestry*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	55.283.389.485	76.103.503.389	*Services in social, art culture, recreation and other individual services*
Perikanan	26.380.680.331	32.901.916.204	*Fishing*
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	20.711.623.040	23.475.564.045	*Health services and social activities*
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	14.567.952.696	19.911.658.447	*Transportation, warehousing and communication*
Listrik, gas dan air	13.823.534.794	19.680.991.057	*Electricity, gas and water*
Jasa pendidikan	10.151.044.775	11.991.620.842	*Education services*
Pertambangan dan penggalian	15.898.824.227	20.853.915.774	*Mining and excavation*
Perantara keuangan	149.652.606	96.096.648.411	*Financial intermediary*
Jumlah	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.479.112.676.817**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

Rincian kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi "Rumah tangga" adalah sebagai berikut:

Details of loans to the economic sectors "Households" as follows:

	2025	2024	
Kredit Multiguna	12.012.790.206.248	10.598.809.902.406	*Multipurpose Loans*
Kredit Pemilikan Rumah	307.687.163.896	274.728.842.774	*House Ownership Loans*
Jumlah	**12.320.477.370.144**	**10.873.538.745.180**	***Total***

Kredit Multiguna merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan untuk keperluan konsumer.

Multipurpose Loan represent loans facility granted to civil servants (PNS) and employees for the purposes of the consumer.

Kredit Pemilikan Rumah merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan pembangunan atau renovasi rumah.

House Ownership Loans represent loans facilities granted for the construction or renovation of house.

Pembayaran kredit tersebut di atas sebagian besar dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan oleh Bank.

Loans payments mentioned above are mostly done through monthly payroll deductions by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *By maturity date*

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Loans period classified by loans period as specified in the loans agreement and the remaining period until the maturity date is as follows:

Berdasarkan periode perjanjian kredit / *Based on the period of the loans agreement*

	2025	2024	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	88.061.953.874	328.516.107.281	*1 year or less*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	228.917.624.089	188.099.670.950	*More than 1 year to 2 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	3.793.039.024.714	2.786.265.398.839	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	9.835.683.702.513	9.463.704.270.440	*More than 5 years*
Jumlah	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.479.112.676.817**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *Based on the remaining period to maturity*

	2025	2024	
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.281.820.760.706	1.253.045.698.879	*1 year or less*
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	657.386.226.162	565.504.552.379	*More than 1 year to 2 years*
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	4.107.096.185.695	3.118.818.600.722	*More than 2 years to 5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.899.399.132.627	7.829.216.595.530	*More than 5 years*
Jumlah	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.589.628.373)	(347.945.094.597)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.479.112.676.817**	**12.418.640.352.913**	***Total - net***

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *Average annual interest rates*

	2025	2024	
Kredit yang diberikan	11,41%	11,17%	*Loans*

e. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai / *Movements in the allowance for impairment losses*

	2025	2024	
Saldo awal	347.945.094.597	262.691.065.528	***Beginning balance***
Penyisihan selama tahun berjalan	159.043.237.984	112.852.553.892	*Allowance during the year*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(40.398.704.208)	(27.598.524.823)	*Written-off during the year*
Saldo akhir	**466.589.628.373**	**347.945.094.597**	***Ending balance***
Minimum penyisihan kerugian menurut Otoritas Jasa Keuangan	599.083.136.928	573.636.601.895	*Minimum of Allowance for losses by the Financial Services Authority*
Rasio	77,88%	60,66%	*Ratio*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses of loans is adequate.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Berdasarkan *stage*

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2025:

8. *LOANS (continued)*

f. *By stage*

Below is movement of loans based on stages as of December 31, 2025:

	2025				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	12.158.698.964.375	136.401.750.936	471.484.732.199	12.766.585.447.510	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(134.890.443.717)	135.559.822.869	(669.379.152)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(242.813.518.356)	(41.625.622.517)	284.439.140.873	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	54.382.433.487	(38.784.795.956)	(15.597.637.531)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(40.398.704.208)	(40.398.704.208)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.280.737.580.681	(14.733.326.806)	(46.488.691.987)	1.219.515.561.888	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**13.116.115.016.470**	**176.817.828.526**	**652.769.460.194**	**13.945.702.305.190**	***Ending balance***

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* pada tanggal 31 Desember 2024:

Below is movement of loans based on stages as of Desember 31, 2024:

	2024				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	11.829.629.329.625	272.248.819.088	372.334.067.246	12.474.212.215.959	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(82.828.223.023)	84.123.576.310	(1.295.353.287)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(61.334.944.017)	(131.988.977.752)	193.323.921.769	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	57.021.219.478	(55.807.629.259)	(1.213.590.219)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(27.598.524.823)	(27.598.524.823)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	416.211.582.312	(32.174.037.451)	(64.065.788.487)	319.971.756.374	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**12.158.698.964.375**	**136.401.750.936**	**471.484.732.199**	**12.766.585.447.510**	***Ending balance***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Berdasarkan *stage*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

8. LOANS (continued)

f. By stage

The movement of allowance for impairment losses loans as of December 31, 2025 was as follows:

	2025				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	33.102.661.118	9.234.605.419	305.607.828.060	347.945.094.597	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(802.243.730)	1.197.909.479	(395.665.749)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(22.073.146.187)	(2.570.286.867)	24.643.433.055	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	10.790.920.073	(2.341.453.257)	(8.449.466.816)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(40.398.704.208)	(40.398.704.208)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(6.434.833.049)	8.031.447.252	157.446.623.781	159.043.237.984	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**14.583.358.225**	**13.552.222.025**	**438.454.048.123**	**466.589.628.373**	***Ending balance***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses loans as of Desember 31, 2024 was as follows:

	2024				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah / *Total***	
Saldo awal	17.595.399.723	32.154.437.980	212.941.227.825	262.691.065.528	***Beginning balance***
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(4.653.917.380)	4.739.449.241	(85.531.861)	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(32.139.333.047)	(71.139.111.373)	103.278.444.420	-	*Transfer to impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	283.326.562	(233.362.410)	(49.964.152)	-	*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(27.598.524.823)	(27.598.524.823)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	52.017.185.260	43.713.191.981	17.122.176.651	112.852.553.892	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**33.102.661.118**	**9.234.605.419**	**305.607.828.060**	**347.945.094.597**	***Ending balance***

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Berdasarkan kolektibilitas dan lainnya

Kolektibilitas dan informasi penting lainnya kredit yang diberikan sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada catatan 43d.

h. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

1. Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.
2. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.
3. Kredit karyawan adalah kredit yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sebesar 5%-7,5% per tahun dan jangka waktu antara 1 sampai 25 tahun. Pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.
4. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kredit yang diberikan kepada personel manajemen kunci (pihak berelasi) masing-masing sebesar Rp20.795.027.956 dan Rp8.662.299.094.
5. Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 1,21% dan 2,72%.
6. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi dengan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp365.234.984.371 dan Rp462.610.791.171. Partisipasi Bank dalam kredit sindikasi tersebut masing-masing sebesar 4,45%-15,35% dan 1,00%-14,07% pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.
7. Kredit yang dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp419.088.321.840 dan Rp385.257.258.978. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.
8. Deposito yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.025.000.000 dan Rp6.613.500.000 dengan jumlah kredit yang dijamin masing-masing sebesar Rp8.920.432.241 dan Rp6.340.000.000.
9. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah melakukan perjanjian dan perikatan dengan Perum Jaminan Kredit Indonesia sehubungan dengan pertanggungan asuransi debitur kredit Multiguna, Pensiunan, Umum (Mikro), Konstruksi dan Pengadaan Barang atau Jasa. Nilai pertanggungan per debitur maksimum sebesar plafon pokok kredit. Premi asuransi tersebut ditanggung oleh debitur.

8. LOANS (continued)

g. By Collectibility

Collectibility loans and other important information in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43d.

h. Other significant information relating to loans

1. *Loans are secured by time deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell and other collateral commonly accepted by banks.*
2. *The consumer loans portfolio consists of house ownership loans, vehicle loans and other personal loans.*
3. *Employee loans are loans granted to employees to purchase a vehicle, house or other purposes with an interest rate of 5%-7.5% per year and the maturity period between 1 to 25 years. Loans and interest repaid through monthly payroll deductions.*
4. *For the years ended December 31, 2025 and 2024, loans granted to key management personnel (a related party) amounted Rp20,795,027,956 and Rp8,662,299,094 respectively.*
5. *Ratio of small business loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted 1.21% and 2.72%, respectively.*
6. *Syndication loans are loans given to customers under syndication agreements with other banks. Bank's participation in syndication loans with other banks on December 31, 2025 and 2024 amounted Rp365,234,984,371 and Rp462,610,791,171 respectively. Bank's participation in the syndication loans amounted 4.45%-15.35% and 1,00%-14,07% As of December 31, 2025 and 2024, respectively.*
7. *Written-off loans for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted Rp419,088,321,840 and Rp385,257,258,978 respectively. This credit write-off is not a charge-off, so collection efforts are still made.*
8. *Deposits which were blocked and pledged as collateral as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp12,025,000,000 and Rp6,613,500,000, respectively with the guaranteed loans amounted Rp8,920,432,241 and Rp6,340,000,000, respectively.*
9. *As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has made agreements and engagements with Perum Jaminan Kredit Indonesia in connection with debtor's insurance coverage of Multipurpose, Retired, General (Micro), Construction and Procurement of Goods or Services loans. The insured amount per borrower maximum ceiling of loan principal. The insurance premium is borne by the debtor.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

8. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

h. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

10. Kredit restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp520.826.267.199 dan Rp491.231.000.000. Restrukturisasi dilakukan melalui penambahan jangka waktu, penurunan suku bunga kredit dan perubahan fasilitas kredit.
    Pinjaman yang direstrukturisasi meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman dan bunga, penyesuaian tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas pinjaman.
    Restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara perpanjangan masa pelunasan kredit, penurunan bunga yang jatuh tempo, perubahan persentase tingkat bunga dan kapitalisasi bunga menjadi pokok kredit.
    Tidak ada kredit yang direstrukturisasi yang termasuk dalam kredit yang diberikan kepada pihak berelasi.

8. LOANS (continued)

h. Other significant information relating to loans (continued)

10. Restructured loans as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp520,826,267,199 and Rp491,231,000,000 respectively. Restructuring is performed through the addition of period, reduction of interest rates and change of loan facilities.
Restructured loans consist of loan with rescheduled principal and interest payments, adjusted interest rates, reduced overdue interest and increased loan facilities.

The term of restructured loans consists of extension of payment maturity dates, reduced overdue interest, modification of interest rate and capitalised interest into the new outstanding principal loan balance.
There are no restructured loans to related parties.

9. SURAT BERHARGA

Tidak terdapat surat berharga kepada pihak berelasi.

a. Berdasarkan tujuan dan jenis

	2025	2024	
Dimiliki hingga jatuh tempo			***Held-to-maturity***
Obligasi pemerintah	634.876.000.000	904.876.000.000	*Government bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	-	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Diskonto yang belum diamortisasi	(27.326.599.785)	(35.030.903.206)	*Unamortised discount*
Sub jumlah	607.549.400.215	899.845.096.794	*Sub total*
Obligasi korporasi	-	8.000.000.000	*Corporate bonds*
Jumlah	607.549.400.215	907.845.096.794	*Total*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)			***Fair value through profit loss (FVTPL)***
Sertifikat Bank Indonesia	334.559.800.000	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Perubahan rugi yang belum direalisasi	(188.905.892)	-	*Movement of unrealized loss*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	334.370.894.108	29.995.734.849	*Total*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

	2025	2024	
Bank Indonesia			***Bank Indonesia***
Sertifikat Bank Indonesia	334.559.800.000	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(596.925.394)	*Unamortised discount*
Perubahan rugi yang belum direalisasi	(188.905.892)		*Movement of unrealized loss*
	334.370.894.108	**29.403.074.606**	

9. SURAT BERHARGA (lanjutan) / *9. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) / *b. By issuer (continued)*

	2025	2024	
Pemerintah			***Government***
Obligasi pemerintah	634.876.000.000	904.876.000.000	*Government bonds*
Diskonto yang belum diamortisasi	(27.326.599.785)	(34.433.977.812)	*Unamortised discount*
	607.549.400.215	870.442.022.188	
Bank			***Bank***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	8.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	-	8.000.000.000	
Jumlah	941.920.294.323	907.845.096.794	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Total*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

c. Berdasarkan peringkat / *c. By rating*

	2025	2024	
Obligasi Berwawasan Lingkungan I			*Obligasi Berwawasan Lingkungan I*
PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri A	-	idAAA	*PT BNI (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri A*

d. Berdasarkan jatuh tempo / *d. By maturity*

	2025	2024	
Kurang dari 1 tahun	513.441.679.165	272.969.096.794	*Less than 1 year*
1-5 tahun	126.242.301.405	284.160.000.000	*1-5 years*
Lebih dari 5 tahun	302.236.313.753	350.716.000.000	*More than 5 years*
Jumlah	941.920.294.323	907.845.096.794	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

e. Berdasarkan efek pemerintah dan bukan pemerintah / *e. By government and non-government securities*

	2025	2024	
Pemerintah			***Government***
Obligasi pemerintah	634.876.000.000	544.876.000.000	*Government bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	334.370.894.108	30.000.000.000	*Certificates of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara	-	360.000.000.000	*Government Treasury Bills*
Diskonto yang belum diamortisasi	(27.326.599.785)	(35.030.903.206)	*Unamortised discount*
Jumlah	941.920.294.323	899.845.096.794	*Total*
Bukan pemerintah			***Non-government***
Obligasi korporasi	-	8.000.000.000	*Corporate bonds*
Jumlah	941.920.294.323	907.845.096.794	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(4.265.151)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**941.920.294.323**	**907.840.831.644**	***Total - net***

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *f. Average annual interest rates*

	2025	2024	
Surat berharga	5,96%	6,35%	*Investment securities*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

9. SURAT BERHARGA (lanjutan)

g. Berdasarkan Kolektibilitas

Kolektibilitas surat-surat berharga sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada catatan 43e.

h. Penyisihan kerugian penurunan nilai

	2025	2024	
Saldo awal	4.265.151	10.096.693	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan	(4.265.151)	(5.831.542)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**-**	**4.265.151**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat adanya surat berharga adalah memadai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada surat berharga yang digunakan sebagai agunan.

9. MARKETABLE SECURITIES (continued)

g. By collectibility

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43e.

h. Allowance for impairment losses

Management believes that the allowance for impairment losses on marketable securities is adequate.

As of December 31, 2025 and 2024, no marketable securities that are used as collateral.

10. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Tidak terdapat surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali kepada pihak berelasi.

10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

There was no securities purchased under resale agreements which are related parties.

2025

Seri/ *Series*	Jangka waktu/ *Period*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Tanggal jual kembali/ *Resell date*	Harga jual kembali/ *Resell price*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortised*	Nilai bersih/ *Net value*
Bank Indonesia						
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.223	7.459.762	9.424.100.461
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
				75.452.481.777	59.678.096	75.392.803.681

10. SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) / *10. SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS (continued)*

Seri/ *Series*	Jangka waktu/ *Period*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Tanggal jual kembali/ *Resell date*	Harga jual kembali/ *Resell price*	Bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortised interest*	Nilai bersih/ *Net value*
			2025			
Pindahan/ *Carried forward*				75.452.481.777	59.678.096	75.392.803.681
Bank Indonesia						
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.223	7.459.762	9.424.100.461
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
VR0070	7 hari/*days*	31 Desember / *December 31*, 2025	7 Januari / *January 7*, 2026	9.431.560.222	7.459.762	9.424.100.460
Bank Lain						
FR0071	7 hari/*days*	24 Desember / *December 24*, 2025	2 Januari / *January 2*, 2026	54.009.768.138	7.162.738	54.002.605.400
FR0071	7 hari/*days*	24 Desember / *December 24*, 2025	2 Januari / *January 2*, 2026	54.009.768.138	7.162.732	54.002.605.406
Jumlah/*Total*				**258.924.499.830**	**133.681.662**	**258.790.818.168**

Kolektibilitas Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada catatan 43f.

Collectibility Marketable securities purchased with agreements to resell in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in note 43f.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ *Revaluation*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah	36.832.174.671	-	-	83.428.725.329	120.260.900.000	*Land*
Bangunan	191.345.386.174	-	(2.264.740.100)	-	189.080.646.074	*Buildings*
Kendaraan	14.182.499.993	285.258.000	-	-	14.467.757.993	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	219.537.750.727	7.212.620.947	2.264.740.100	-	229.015.111.774	*Office equipment and furnitures*
	461.897.811.565	7.497.878.947	-	83.428.725.329	552.824.415.841	
Aset dalam penyelesaian	18.914.414.599	13.191.545.400	-	-	32.105.959.999	*Construction in progress*
	480.812.226.164	20.689.424.347	-	83.428.725.329	584.930.375.840	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	83.553.217.418	9.557.462.688	-	-	93.110.680.106	*Buildings*
Kendaraan	12.178.152.130	814.628.829	-	-	12.992.780.959	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	182.552.755.577	16.100.703.919	-	-	198.653.459.496	*Office equipment and furnitures*
	278.284.125.125	26.472.795.436	-	-	304.756.920.561	
Nilai buku	**202.528.101.039**				**280.173.455.279**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December 31*	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah	36.832.174.671	-	-	-	36.832.174.671	*Land*
Bangunan	187.197.927.507	181.792.000	-	3.965.666.667	191.345.386.174	*Buildings*
Kendaraan	13.695.431.493	487.068.500	-	-	14.182.499.993	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	210.241.044.194	9.296.706.533	-	-	219.537.750.727	*Office equipment and furnitures*
	447.966.577.865	9.965.567.033	-	3.965.666.667	461.897.811.565	
Aset dalam penyelesaian	10.053.213.066	12.826.868.200	-	(3.965.666.667)	18.914.414.599	*Construction in progress*
	458.019.790.931	22.792.435.233	-	-	480.812.226.164	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	74.258.896.584	9.294.320.834	-	-	83.553.217.418	*Buildings*
Kendaraan	11.641.394.411	536.757.719	-	-	12.178.152.130	*Vehicles*
Perlengkapan dan perabot kantor	166.076.729.785	16.476.025.792	-	-	182.552.755.577	*Office equipment and furnitures*
	251.977.020.780	26.307.104.345	-	-	278.284.125.125	
Nilai buku	**206.042.770.151**				**202.528.101.039**	***Book value***

Rincian bangunan dan prasarana dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of the buildings and infrastructure in the settlement on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Completion percentage*	Akumulasi biaya/ *Accumulated cost*	Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date*	
Bangunan				***Buildings***
31 Desember 2025				***December 31, 2025***
Pembangunan gedung kantor	45,87%	32.105.959.999	Tahun/*Year* 2026	*Construction of office buildings*
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Pembangunan gedung kantor	27,02%	18.914.414.599	Tahun/*Year* 2026	*Construction of office buildings*

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebanyak 38 bidang. Sertifikat tersebut mempunyai masa manfaat hingga 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku HGB berakhir antara tahun 2031-2041. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp494.632.154.120 dan Rp355.543.573.714 pada PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Jasa Indonesia bukan pihak yang mempunyai relasi dengan Bank.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 13 Desember 2025, Bank melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Berdasarkan laporan penilaian revaluasi dari Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman & Rekan tanggal 27 Februari 2026 tentang penilaian nilai wajar atas aset tetap sebesar Rp120.260.900.000.
Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp83.428.725.329.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode pendekatan data pasar.

Manajemen telah mengkaji ulang metode penyusutan dan nilai residu aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Bank memiliki aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank masing-masing sebesar Rp177.797.050.022 dan Rp131.157.935.594.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

11. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank had 38 plots of land, respectively, with Building Use Rights (HGB) titles. Those certificates have useful lives until 30 years. The HGB expiration period up to 2031-2041. Management believes that there will be no difficulty in obtaining the extension of the land rights as all the land were acquired legally and are supported by sufficient evidence of ownership.

Bank has insured its fixed assets to cover potential losses against fire, theft and natural disasters with the insurance coverage as of December 31, 2023 and December 31, 2024 Rp494,632,154,120 and Rp355,543,573,714, respectively on PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Jasa Indonesia does not have a related with Bank.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on these insured fixed assets.

On December 13, 2025, the Bank revalued its fixed assets of land for the purpose of accounting. Based on revaluation appraisal report of "Desmar, Susanto, Salman & Rekan" dated February 27, 2026 related with the valuation of fixed assets amounted Rp120,260,900,000.

The increase in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income of Rp83,428,725,329.

Assessment is conducted by Indonesian Standards Assessment, is determined based on current market transactions and carried out with the usual provisions. Valuation method used is a market data approach.

Management has reviewed the depreciation method and residual value of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

Bank has fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 have been fully depreciated but still in use to support the activities of Bank operations respectively Rp177,797,050,022 and Rp131,157,935,594.

There are no fixed assets that pledged by the Bank as of December 31, 2025 and 2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

12. ASET TAKBERWUJUD / *12. INTANGIBLE ASSETS*

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December 31***	
Biaya perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	14.231.420.805	399.600.000,00	-	-	14.631.020.805	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
Aset dalam penyelesaian	368.631.000	316.286.400	399.600.000	-	285.317.400	*Assets in progress*
	15.250.443.680	316.286.400	-	-	15.566.730.080	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	12.601.862.230	520.621.043	-	-	13.122.483.273	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
	13.252.254.105	520.621.043	-	-	13.772.875.148	
Nilai buku	**1.998.189.575**				**1.793.854.932**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December 31***	
Biaya perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	12.719.270.805	44.400.000	-	1.467.750.000	14.231.420.805	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
Aset dalam penyelesaian	666.120.000	1.170.261.000	-	(1.467.750.000)	368.631.000	*Assets in progress*
	14.035.782.680	1.214.661.000	-	-	15.250.443.680	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	12.348.355.148	253.507.082	-	-	12.601.862.230	*Software*
Hak legal atas tanah	650.391.875	-	-	-	650.391.875	*Land rights*
	12.998.747.023	253.507.082	-	-	13.252.254.105	
Nilai buku	**1.037.035.657**				**1.998.189.575**	***Book value***

Rincian aset takberwujud dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of intangible assets in progress as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Completion percentage*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated cost***	**Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date***	
31 Desember 2025				***December 31, 2025***
Perangkat lunak				***Software***
Host to Host KPR Tapera	80%	46.886.400	Tahun/*Year* 2026	*Host to Host KPR Tapera*
Otomatis Treasury Reporting	80%	238.431.000	Tahun/*Year* 2026	*Automated Treasury Reporting*
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Perangkat lunak				***Software***
Activo Asset Management	70%	279.720.000	Tahun/*Year* 2025	*Activo Asset Management*
Otomatis Treasury Reporting	30%	88.911.000	Tahun/*Year* 2026	*Automated Treasury Reporting*

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset takberwujud yang dimiliki Bank.

Management believes there is no indication of impairment on intangible assets owned by the Bank.

13. ASET HAK GUNA / *13. RIGHT OF USE ASSETS*

Berikut adalah rincian transaksi sewa Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Following are the details of the Bank's lease transactions as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025					
	1 Januari/ *January 1*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December 31***	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah dan bangunan	29.624.435.841	13.558.077.003	15.721.750.485	3.773.461.098	31.234.223.457	*Land and buildings*
Kendaraan	38.425.220.335	8.154.561.895	23.434.730.512	-	23.145.051.718	*Vehicles*
Core Banking System	53.168.066.337	605.910.274	44.616.092.483	-	9.157.884.128	*Core Banking System*
Mesin ATM	56.099.131.163	-	-	(3.773.461.098)	52.325.670.065	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	177.316.853.676	22.318.549.172	83.772.573.480	-	115.862.829.368	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah dan bangunan	18.180.381.702	8.966.708.625	15.721.750.485	2.470.599.105	13.895.938.947	*Land and buildings*
Kendaraan	27.774.583.433	8.268.833.621	23.434.730.512	-	12.608.686.542	*Vehicles*
Core Banking System	45.980.928.518	7.509.358.402	44.616.092.483	-	8.874.194.437	*Core Banking System*
Mesin ATM	27.620.881.224	11.830.209.498	-	(2.470.599.105)	36.980.491.617	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	119.556.774.877	36.575.110.146	83.772.573.480	-	72.359.311.543	***Total***
Nilai buku	**57.760.078.799**				**43.503.517.825**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Disposal***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December 31***	
Biaya perolehan						***Cost***
Tanah dan bangunan	24.007.232.595	5.617.203.246	-	-	29.624.435.841	*Land and buildings*
Kendaraan	34.402.647.545	4.022.572.790	-	-	38.425.220.335	*Vehicles*
Core Banking System	51.218.966.146	1.949.100.191	-	-	53.168.066.337	*Core Banking System*
Mesin ATM	55.461.893.264	637.237.899	-	-	56.099.131.163	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	165.090.739.550	12.226.114.126	-	-	177.316.853.676	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah dan bangunan	13.137.072.903	5.043.308.799	-	-	18.180.381.702	*Land and buildings*
Kendaraan	19.142.755.170	8.631.828.263	-	-	27.774.583.433	*Vehicles*
Core Banking System	34.539.751.063	11.441.177.455	-	-	45.980.928.518	*Core Banking System*
Mesin ATM	17.743.681.702	9.877.199.522	-	-	27.620.881.224	*Automatic Teller Machine*
Jumlah	84.563.260.838	34.993.514.039	-	-	119.556.774.877	***Total***
Nilai buku	**80.527.478.712**				**57.760.078.799**	***Book value***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2025	2024	
Pendapatan yang masih akan diterima	86.863.286.952	88.778.071.191	*Interest receivables*
Agunan yang diambil alih-bersih	54.241.675.500	80.044.056.433	*Foreclosed assets-net*
Taksiran tagihan pajak (Catatan 19a)	42.479.672.477	87.240.766.889	*Estimated tax receivables (Note 19a)*
Persediaan	5.319.305.466	6.633.976.672	*Office supplies*
Uang muka	3.844.259.279	4.301.599.355	*Advance*
Beban dibayar di muka	529.798.579	1.697.114.296	*Prepaid expenses*
Lain-lain	3.546.322.477	5.633.055.043	*Others*
Jumlah	**196.824.320.730**	**274.328.639.879**	***Total***

Pendapatan yang masih akan diterima terdiri dari bunga yang masih akan diterima dari giro pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga dan kredit yang diberikan.

Interest receivables consist of interest accrued from current accounts with Bank Indonesia, placements with other banks, investment securities and loans.

Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka yang berkaitan dengan beban sewa dan premi asuransi.

Prepaid expenses represents advance payments related to rental expenses and insurance premiums.

Agunan yang diambil alih
Mutasi agunan yang diambil alih:

Foreclosed assets
Movement of foreclosed assets:

	2025	2024	
Saldo awal	113.919.906.636	113.919.906.636	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Additions*
Penjualan	-	-	*Disposal*
Saldo akhir	**113.919.906.636**	**113.919.906.636**	***Ending balance***

b. Penyisihan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih: / *b. Allowance for impairment losses of foreclosed assets:*

	2025	2024	
Saldo awal	33.875.850.204	10.315.058.569	*Beginning balance*
Penambahan	25.802.380.932	23.560.791.635	*Additions*
Saldo akhir	**59.678.231.136**	**33.875.850.204**	***Ending balance***

15. LIABILITAS SEGERA / *15. LIABILITIES IMMEDIATELY PAYABLE*

	2025	2024	
Rekening titipan	37.971.692.331	1.896.453.148	*Deposit accounts*
Titipan dana bantuan Pemerintah	712.152.733	137.560.815	*Deposit of government grants*
Titipan gaji Pegawai Negeri Sipil	129.646.402	1.663.263.727	*Deposit of government employees salary*
Lain-lain	23.626.353.321	67.111.143.400	*Others*
Jumlah	**62.439.844.787**	**70.808.421.090**	***Total***

Rekening titipan merupakan titipan transfer dari nasabah, titipan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak yang diterima Bank sebagai bank persepsi dan titipan lainnya dari pihak ketiga.

Deposit accounts represent a transfer deposits from customers, deposit of the tax proceeds from taxpayers received by the bank as a perception bank and other deposit from third parties.

16. SIMPANAN NASABAH / *16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	1.447.556.491.534	243.521.378.038	*Current accounts*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Simpeda	8.977.255.826	3.438.438.591	*Tabungan Simpeda*
Tabungan Flobamora	3.054.819.540	3.181.364.856	*Tabungan Flobamora*
Tabungan Khusus PNS	2.075.739.614	840.680.810	*Tabungan Khusus PNS*
TabunganKu	281.389.138	27.813.662	*TabunganKu*
Tabungan Pensiun	394.686.453	221.499.331	*Tabungan Pensiun*
Deposito berjangka	105.137.414.197	8.988.500.000	*Time deposits*
	1.567.477.796.302	260.219.675.288	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Flobamora	698.432.135	524.755.103	*Tabungan Flobamora*
Deposito berjangka	8.337.500	16.301.338	*Time deposits*
	706.769.635	541.056.441	
	1.568.184.565.937	260.760.731.729	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
Giro	969.280.362.516	2.182.537.018.597	*Current accounts*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Flobamora	1.493.397.056.663	1.499.970.299.393	*Tabungan Flobamora*
Simpeda	1.075.338.597.723	1.085.030.773.423	*Simpeda*
Tabungan Khusus PNS	1.076.059.559.594	1.029.617.382.696	*Tabungan Khusus PNS*
TabunganKu	470.084.754.912	446.880.992.157	*TabunganKu*
Tabungan Simpel	67.576.937.616	63.104.986.208	*Tabungan Simpel*
Tabungan Pensiun	34.152.377.391	16.215.682.307	*Tabungan Pensiun*
Tabungan Ziarah	462.222.389	327.179.128	*Tabungan Ziarah*
Deposito berjangka	9.173.496.628.778	5.401.866.878.575	*Time deposits*
	14.359.848.497.583	11.725.551.192.484	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	24.803.729	15.883.190	*Current accounts*
Tabungan			*Saving deposits*
Tabungan Flobamora	1.532.418.160	724.480.855	*Tabungan Flobamora*
Deposito berjangka	221.991.274	202.739.380	*Time deposits*
	1.779.213.162	943.103.425	
	14.361.627.710.745	11.726.494.295.909	
Jumlah	**15.929.812.276.682**	**11.987.255.027.637**	***Total***

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu / *b. Details of time deposits by term*

	2025	2024	
1 bulan	205.483.445.180	201.486.486.533	*1 month*
3 bulan	167.930.620.747	141.543.939.008	*3 months*
6 bulan	1.751.743.261.630	156.796.635.807	*6 months*
9 bulan	1.690.300.000	2.322.000.000	*9 months*
12 bulan	7.125.677.654.321	4.867.799.859.742	*12 months*
24 bulan	26.339.089.871	41.125.498.204	*24 months*
Jumlah	**9.278.864.371.749**	**5.411.074.419.293**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***c. Average annual interest rates***

	2025	2024	
Rupiah			*Rupiah*
Giro	0,64%	0,25%	*Current accounts*
Tabungan	0,94%	0,26%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	6,43%	3,40%	*Time deposits*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Giro	0,75%	0,75%	*Current accounts*
Tabungan	0,56%	0,38%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	2,47%	2,47%	*Time deposits*

d. Simpanan nasabah yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.025.000.000 dan Rp6.613.500.000.

d. *Deposits from customer which were blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2025 and 2024 amounted RpRp12,025,000,000 and Rp6,613,500,000, respectively.*

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Tidak terdapat simpanan dari bank lain kepada pihak berelasi.

There was no related party in deposits from customer

a. Berdasarkan jenis / ***a. By type***

	2025	2024	
Call money	-	405.000.000.000	*Call money*
Deposito berjangka	4.440.000.000	5.440.000.000	*Time deposits*
Giro	7.569.435.714	5.663.841.311	*Current accounts*
Tabungan	5.320.580.226	4.985.475.645	*Saving deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	249.318.573.246	-	*Negotiable Certificate of Deposit*
Jumlah	**266.648.589.186**	**421.089.316.957**	***Total***

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu / ***b. Details of time deposits by term***

	2025	2024	
1 bulan	440.000.000	440.000.000	*1 month*
12 bulan	4.000.000.000	5.000.000.000	*12 months*
Jumlah	**4.440.000.000**	**5.440.000.000**	***Total***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***c. Average annual interest rates***

	2025	2024	
Giro	0,44%	0,50%	*Current accounts*
Tabungan	1,73%	0,41%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	3,60%	3,33%	*Time deposits*
Negotiable Certificate of Deposit	7,00%	0,00%	*Negotiable Certificate of Deposit*
Call money	-	6,39%	*Call money*

d. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan.

d. *As of December 31, 2025 and 2024 there are no deposits from other banks that are blocked or pledged as loans collateral.*

18. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *18. SECURITIES ISSUED*

	2025	2024	
Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018			***Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018***
Nilai nominal	-	37.000.000.000	*Par value*
Dikurangi beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	-	(44.505.429)	*Less unamortised bond issuance costs*
Jumlah	**-**	**36.955.494.571**	***Total***
Mutasi beban emisi obligasi yang belum diamortisasi			***Movement of unamortised bond issuance costs***
Saldo awal	44.505.429	83.108.558	*Beginning balance*
Amortisasi selama tahun berjalan	(44.505.429)	(38.603.129)	*Amortisation during the year*
Saldo akhir	**-**	**44.505.429**	***Ending balance***

Pada tanggal 21 Desember 2018, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 dengan Tingkat Bunga Tetap dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 di Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini terbagi menjadi 4 seri, yaitu seri A, seri B, seri C dan seri D yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020, 21 Desember 2021, 21 Desember 2023 dan 21 Desember 2025 dan memiliki suku bunga tetap masing-masing sebesar 9,25%, 10,5%, 10,75% dan 11% setahun.

As of December 21, 2018, the Bank issued and listed continuous Bonds I Bank NTT Phase I Year 2018 with Fixed Interest Rate with a par value amounted Rp500,000,000,000 in the Indonesia Stock Exchange. These bonds are divided into four series, namely Series A, Series B, Series C and Series D, each of which will mature on January 1, 2020, December 21, 2021, December 21, 2023 and December 21, 2025 and has a fixed interest rate amounted 9.25%, 10.5%, 10.75% and 11% a year, respectively.

Bunga dibayar setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 21 Maret 2019 dan terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Wali amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Interest is paid every three months with the first payment was paid on March 21, 2018 and last payment performed together with payment of the principal of each series of bonds. Trustee for Bonds I Bank NTT is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Continuous Bonds I Bank NTT Phase I Year 2018 is not guaranteed with specific collateral, but guaranteed with all assets of the Bank, that exist in the present or in the future, whether fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

Perjanjian obligasi juga mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai penggabungan dan peleburan usaha, perubahan bidang usaha untuk Bank, serta pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Bond agreement also includes several restrictions, among others, the merger and consolidation, changes in the field of business for the Bank, and the reduction of the authorized capital, issued and paid-in capital.

Bank dapat melakukan pembelian kembali (buyback) untuk sebagian atau seluruh obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi.

The Bank may repurchase (buyback) for part or all of the bonds provided that it can only be implemented after the first anniversary of the issuance date.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 mendapat peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

As of December 31, 2025 and 2024, Continuous Bonds I Bank NTT Phase I Year 2018 received rating idA- from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian obligasi yang diterbitkan. Seluruh pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with all the important limitations with respect to the securities issued agreement. All payments on the amount of interest due has been done in a timely manner.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Taksiran tagihan pajak / *a. Estimated tax receivables*

	2025	2024	
Lebih bayar pajak penghasilan badan:			*Over payment of corporate income tax:*
Tahun 2018	-	15.256.593.210	*Year 2018*
Tahun 2019	23.764.911.822	41.662.707.003	*Year 2019*
Tahun 2021	7.019.180.491	18.625.886.512	*Year 2021*
Tahun 2023	11.695.580.164	11.695.580.164	*Year 2023*
Jumlah	**42.479.672.477**	**87.240.766.889**	***Total***

b. Utang pajak penghasilan / *b. Income tax payables*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Pasal 25	858.109.323	5.776.769.526	*Article 25*
Pasal 29	602.265.301	12.261.627.345	*Article 29*
Jumlah	**1.460.374.624**	**18.038.396.871**	***Total***

Utang pajak lainnya disajikan dalam liabilitas lain-lain (Catatan 21). / *Other tax liabilities are presented in other liabilities (Note 21).*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expenses*

	2025	2024	
Kini	(39.865.437.480)	(65.302.262.518)	*Current*
Tangguhan	(3.844.652.198)	11.030.134.222	*Deferred*
Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	(35.502.421.979)	-	*Tax related to tax assessment letter (SKP)*
Jumlah	**(79.212.511.657)**	**(54.272.128.296)**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut: / *The reconciliation between income before tax based on statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:*

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	171.830.738.913	231.108.669.765	*Income before tax per statements of profit or loss*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Penyisihan jasa produksi	(17.934.174.985)	17.195.549.686	*Provision for bonuses*
Penyisihan tunjangan hari raya			*Holiday allowance*
Penyisihan imbalan kerja	(14.143.701.016)	10.062.258.488	*Employee benefits allowance*
Penyusutan aset hak guna	(7.045.253.277)	(811.715.829)	*Depreciation of right of use assets*
Penyisihan penghargaan kerja	47.186.667	(3.359.649.685)	*Service awards allowance*
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	(27.598.524.823)	27.598.524.823	*Allowance for impairment losses loans*
Penyisihan penurunan nilai - selain kredit yang diberikan	49.009.869.736	(547.993.747)	*Allowance for impairment other than loans*
Rugi yang belum direalisasi atas surat berharga yang diperdagangkan	188.905.892	-	*Unrealised loss on trading marketable securities*
Jumlah perbedaan temporer	(17.475.691.806)	50.136.973.736	***Total temporary differences***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

19. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

The reconciliation between income before tax based on statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows (continued):

	2025	2024	
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
Representasi	5.310.383.951	6.203.617.975	*Representations*
Hadiah dan suvenir	8.344.695.276	3.732.163.158	*Gifts and souvenir*
Tunjangan karyawan	1.747.960.132	-	*Employee allowances*
Lain-lain	11.448.447.534	5.647.041.357	*Others*
	26.851.486.893	15.582.822.490	
Laba kena pajak	**181.206.534.000**	**296.828.465.991**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan			***Income tax expense***
22% x Rp181.017.628.000	39.865.437.480	-	*22% x Rp181,017,628,000*
22% x Rp296.828.465.991	-	65.302.262.518	*22% x Rp296,828,465,991*
Jumlah pajak kini	39.865.437.480	65.302.262.518	***Total current tax***
Dikurangi:			***Less:***
Pajak penghasilan yang dibayar di muka	(39.263.172.179)	(53.040.635.173)	*Prepaid income tax*
Kurang bayar pajak penghasilan badan	**(602.265.301)**	**(12.261.627.345)**	***Under payment of corporate income tax***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan ke kantor pajak.

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2024 is in accordance with the Annual Corporate Income Tax Return reported to the Tax Office.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Bank's income tax expense and the Bank's commercial reporting income before income tax expense multiplied by the tax rate is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	171.830.738.913	231.108.669.765	*Income before tax per statements of profit or loss*
Tarif pajak efektif:			***Effective tax rate:***
22% x Rp171.830.738.913	(37.802.762.561)	-	*22% x Rp171,830,738,913*
22% x Rp231.108.669.765	-	(50.843.907.348)	*22% x Rp231,108,669,765*
Pengaruh pajak atas beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			*Tax effect of non deductible expense:*
Representasi	(1.168.284.469)	(1.364.795.954)	*Representations*
Hadiah dan suvenir	(1.835.832.961)	(821.075.895)	*Gifts and souvenir*
Tunjangan karyawan	(384.551.229)	-	*Employee allowances*
Lain-lain	(2.518.658.458)	(1.242.349.099)	*Others*
Jumlah	(5.907.327.117)	(3.428.220.948)	*Total*
Pajak sehubungan dengan SKP	(35.502.421.979)	-	*Impact on changes of tax rate*
Jumlah beban pajak	**(79.212.511.657)**	**(54.272.128.296)**	***Total tax expense***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pemeriksaan pajak tahun 2018

Bank menerima pengembalian atas Pajak Lebih Bayar hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2018. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan tahun 2018 pada tanggal 15 Mei 2020 dan pada tanggal 22 Desember 2023 Bank memperoleh kembali masing-masing sebesar Rp4.324.242.623 dan sebesar Rp3.783.241.322.

Pada tahun 2023 Bank menerima hasil putusan Pengadilan Pajak No.PUT-009410.15/2021/PP/M.IIIA yang diputuskan pada tanggal 3 November 2023 terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00011/KEB/WPJ.31/2021 tanggal 23 Juni 2021. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan pajak mengabulkan banding Bank sehingga pajak penghasilan lebih bayar adalah sebesar Rp8.109.456.123.

Pada tahun 2024, Bank menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4082/B/PK/Pjk/2024 tanggal 30 September 2024 terkait peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 009410.15/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengabulkan sebagian banding Bank atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2018. Atas selisih lebih bayar pajak yang sebelumnya dicatat sebagai uang muka pajak dan setelah memperhitungkan restitusi yang telah diterima, Bank membebankan sisa selisih tersebut ke beban pajak kini pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemeriksaan pajak tahun 2019

Pada tanggal 22 April 2021, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2019 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp27.958.071.150 terdiri dari pokok sebesar Rp21.652.781.250 dan sanksi administrasi sebesar Rp6.305.289.900. Bank telah melakukan pembayaran atas pokok pajak beserta sanksi administrasi dan dicatat sebagai taksiran tagihan pajak (Catatan 19a). Bank mengajukan keberatan atas SKPLB pajak penghasilan badan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2019 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp19.651.030.072. Bank mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tersebut.

Bank menerima surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Nomor KEP-0015/KP-CT/KPP.3104/2025 tanggal 21 April 2025 yang menyebutkan berdasarkan putusan banding nomor PUT-008993.15/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Tahun Pajak 2019 sebesar Rp23.764.911.822, terdapat kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan/atau deposit pajak serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak. Bank mengajukan keberatan atas SKPLB pajak penghasilan badan tersebut.

19. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

Tax audit year 2018

The Bank received refunds for overpaid taxes resulting from the 2018 fiscal year tax audit. Based on the Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for Corporate Income Tax (PPh Badan) for 2018, issued on May 15, 2020, and December 22, 2023, the bank recovered Rp4,324,242,623 and Rp3,783,241,322 respectively.

In 2023, the Bank received the Tax Court Decision No. PUT-009410.15/2021/PP/M.IIIA dated November 3, 2023 regarding the Director General of Taxes Decree No. KEP-00011/KEB/WPJ.31/2021 dated June 23, 2021. Based on this decision, the Tax Court granted the Bank's appeal, resulting in a corporate income tax overpayment of Rp8,109,456,123.

In 2024, the Bank received a copy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 4082/B/PK/Pjk/2024 dated September 30, 2024, regarding a judicial review of Tax Court Decision No. PUT 009410.15/2021/PP/M.IIIA of 2023. The Supreme Court decision partially granted the Bank appeal against the Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) for Corporate Income Tax for Fiscal Year 2018. The remaining tax overpayment, which had previously been recorded as a tax prepayment and after accounting for the restitution received, was charged by the Bank to current tax expense in the current year's statement of profit or loss.

Tax audit year 2019

On April 22, 2021, the Bank received Notice of Overpayment Assessment (SKPLB) related the tax audit fiscal year 2019 on the corporate income tax amounted Rp27,958,071,150 consisting of principal for Rp21,652,781,250 and administrative sanctions for Rp6,305,289,900. The Bank has paid the tax principal along with administrative sanctions and recorded it as an estimated tax receivables (Note 19a). The Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

On May 31, 2022, the Bank received Notice of Underpayment Assessment (SKPLB) related the tax audit fiscal year 2019 on the corporate income tax amounted Rp19,651,030,072. Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

The Bank received the Tax Refund Decree No. KEP-0015/KP-CT/KPP.3104/2025 dated April 21, 2025, which stated that, based on Appeal Decision No. PUT-008993.15/2022/PP/M.XIIIA of 2025 dated February 27, 2025, for Income Tax Article 25/29 of Fiscal Year 2019 amounting to Rp23,764,911,822, there was a tax overpayment. The overpayment was fully offset against tax payables and/or tax deposits, leaving no remaining tax overpayment. Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pemeriksaan pajak tahun 2020
Pada tanggal 10 Februari 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2020 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp25.571.460.123 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 21 tahun fiscal 2020 sebesar Rp4.696.687.972. Bank berencana mengajukan keberatan.

Pemeriksaan pajak tahun 2021
Pada tanggal 13 April 2023, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Krang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2021 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp9.488.360.561 terdiri dari pokok sebesar Rp7.394.295.949 dan sanksi administrasi sebesar Rp2.094.064.612. Bank telah melakukan pembayaran atas pokok pajak beserta sanksi administrasi dan dicatat sebagai taksiran tagihan pajak (Catatan 19a). Bank mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tersebut.

Pemeriksaan pajak tahun 2022
Pada tanggal 8 Januari 2025, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2022 atas pajak penghasilan badan sebesar Rp31.575.076.367, SKPKB atas pajak penghasilan pasal 21 tahun 2021 sebesar Rp1.476.928.113, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan pasal 21 masa pajak Desember 2022 sebesar Rp448.505.294. Bank berencana mengajukan keberatan.

d. Pajak tangguhan

19. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

Tax audit year 2020
On Februari 10, 2025, the Bank received a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) resulting from a tax audit for the 2020 fiscal year on corporate income tax of Rp25,571,460,123 and a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21 for the 2020 fiscal year of Rp4,696,687,972. The Bank plans to submit an objection.

Tax audit year 2021
On April 13, 2023, the Bank received Notice of Underpayment Assessment (SKPKB) related the tax audit fiscal year 2021 on the corporate income tax amounted Rp9,488,360,561 consisting of principal for Rp7,394,295,949 and administrative sanctions for Rp2,094,064,612. The Bank has paid the tax principal along with administrative sanctions and recorded it as an estimated tax receivables (Note 19a). The Bank appeal the Notice of Underpayment Assessment on the corporate income tax.

Tax audit year 2022
On January 8, 2025, the Bank received a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) resulting from a tax audit for the 2022 fiscal year on corporate income tax of Rp31,575,076,367, a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21 for the 2021 fiscal year of Rp1,476,928,113, and a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for income tax article 21 for the December 2022 tax period of Rp448,505,294. The bank plans to submit an objection.

d. Deferred tax

	2024	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Dibebankan ke laporan laba rugi/ *Charged to other comprehensive income*	2025
Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ ***Deferred tax assets (liabilities)***				
Penyisihan imbalan kerja/ *Provision for employee benefits*	30.323.651.424	7.775.600.767	(3.111.614.224)	34.987.637.967
Penyisihan jasa produksi/ *Provision for bonuses*	10.031.859.146	-	(3.945.518.497)	6.086.340.649
Penyisihan tunjangan hari raya/ *Provision for holiday allowance*	-	-	-	-
Penyisihan penghargaan kerja/ *Provision for service awards*	211.273.306	-	10.381.067	221.654.373
Penyusutan aset hak guna/ *Depreciation of right of use assets*	(1.293.840.504)	-	(1.549.955.721)	(2.843.796.225)
Penyisihan penurunan nilai selain kredit yang diberikan/ *Allowance for impairment other than loans*	2.347.039.508	-	10.782.171.342	13.129.210.850
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan/ *Allowance for impairment other than loans*	6.071.675.461	-	(6.071.675.461)	-
Laba yang belum direalisasi atas surat berharga yang diperdagangkan/ *Unrealised gain on trading marketable securities*	-	-	41.559.296	41.559.296
Jumlah/ *Total*	**47.691.658.341**	**7.775.600.767**	**(3.844.652.198)**	**51.622.606.910**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	2023	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to statement of profit or loss*	2024
Aset (liabilitas) pajak tangguhan/ *Deferred tax assets (liabilities)*				
Penyisihan imbalan kerja/ *Provision for employee benefits*	29.083.035.250	(973.080.693)	2.213.696.867	30.323.651.424
Penyisihan jasa produksi/ *Provision for bonuses*	6.248.838.215	-	3.783.020.931	10.031.859.146
Penyisihan penghargaan kerja/ *Provision for service awards*	950.396.237	-	(739.122.931)	211.273.306
Penyusutan aset hak guna/ *Depreciation of right of use assets*	(1.115.263.022)	-	(178.577.482)	(1.293.840.504)
Penyisihan penurunan nilai selain kredit yang diberikan/ *Allowance for impairment other than loans*	2.467.598.132	-	(120.558.624)	2.347.039.508
Penyisihan kredit yang diberikan/ *Allowance for credit provided*	-	-	6.071.675.461	6.071.675.461
Jumlah/ *Total*	**37.634.604.812**	**(973.080.693)**	**11.030.134.222**	**47.691.658.341**

e. Administrasi / *e. Administrative*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Based on Law of the Republic of Indonesia No.28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No.6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which are applicable starting 2008, the Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

20. PINJAMAN YANG DITERIMA / *20. BORROWINGS*

	2025	2024	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	300.000.000.000	200.000.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	249.944.444.637	250.083.333.542	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Dana kelolaan	195.165.058.097	175.261.854.464	*Managed funds*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	280.000.000.000	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Jumlah	**745.109.502.734**	**905.345.188.006**	***Total***

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Perusahaan memperoleh *Term Loan Facility* dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan perjanjian No. 7 tanggal 6 Desember 2024 oleh Notaris Yatiningsih, SH., dengan limit fasilitas Rp 280.000.000.000. Jangka waktu fasilitas maksimal 3 (tiga) bulan dan jangka waktu pencairan selama 14 (empat belas) hari. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,20% dengan jaminan berupa *clean basis*.

Selama periode pinjaman Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian diantaranya menjaga NPL tidak lebih dari 5% dan rasio kecukupan modal (KPMM) minimal sebesar 14%.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

The Company obtained a Term Loan Facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk with agreement No. 7 dated December 6, 2024 by Notary Yatiningsih, SH., with a facility limit amounting to Rp280,000,000,000. The maximum facility term is 3 (three) months and the witdrawal period is 14 (fourteen) days. The interest rate for this loan facility is 7.20% with a clean basis guarantee.

During the loan period, the Company has an obligation to fulfill the provisions in the agreement, including maintaining an NPL of no more than 5% and a minimum capital adequacy ratio (KPMM) of 14%.

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara dengan perjanjian No. 29 tanggal 23 Desember 2024, dengan limit fasilitas Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 6 (enam) bulan. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,10% dengan jaminan berupa *clean basis* .

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara dengan perjanjian No. 00001/351/KKLK/2025 tanggal 26 Juni 2025, dengan limit fasilitas Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 12 (duabelas) bulan. Tingkat suku bunga fasilitas pinjaman ini 7,60% dengan jaminan berupa *clean basis* .

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Bank memperoleh fasilitas pinjaman berupa pinjaman Uncommitted Facility Linebatch dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan akta perjanjian No.96. Jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp500.000.000.000.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Bank memperoleh fasilitas pinjaman berupa pinjaman Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan Perjanjian No. 096/PP/SMF-BPD.NTT/V/2023. Jumlah fasilitas sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,50% p.a. tetap selama jangka waktu pinjaman. Tujuan fasilitas pinjaman ini digunakan untuk refinancing multiguna perumahan. Jangka waktu fasilitas selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman. Bank telah melunasi atas fasilitas tersebut tanggal 31 Mei 2024.

Pada tanggal 22 Februari 2023, Bank memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Perumahan Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan Perjanjian No. 036/FLPP/PP/SMF-BPD.NTT/II/2023. Fasilitas ini menyediakan pendanaan sebesar 25% dari pembiayaan dan digunakan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit pemilikan rumah sejahtera, dengan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Bank memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Multiguna Perumahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan Perjanjian No. 199/PP/SMF-BPD.NTT/VIII/2022 dengan plafon sebesar Rp250.000.000.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tetap sebesar 4,50% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pencairan dan digunakan untuk keperluan refinancing multiguna perumahan.

BP Tapera

Dana kelolaan merupakan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera, dimana Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia menyediakan 75%-90% dana dan Bank menyediakan 10%-25% dana sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.07/PKS/DP/2016 dan No.79/MOU-BNTT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

20. BORROWINGS (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

The Company obtained a credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara with agreement No. 29 dated December 23, 2024, with a facility limit of Rp200,000,000,000 with a credit facility term of 6 (six) months. The interest rate for this loan facility is 7.10% with a clean basis guarantee.

The Company obtained a credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Sumater Utara with agreement No. No. 00001/351/KKLK/2025 dated June 26, 2025 , with a facility limit of Rp300,000,000,000 with a credit facility term of 12 (twelve) months. The interest rate for this loan facility is 7.60% with a clean basis guarantee.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

On August 18, 2023, the Bank obtained a loan facility in the form of an Uncommitted Facility Linebatch loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with deed of agreement No.96. The maximum amount of facilities is Rp500,000,000,000.

On May 30, 2023, the Bank obtained a loan facility in the form of a Housing Multiguna Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) with agreement No.096/PP/SMF-BPD.NTT/V/2023. The total facility is Rp350,000,000,000 with an interest rate of 6.50% p.a. fixed for the term of the loan. The purpose of this loan facility is used for refinancing Housing Multiguna. The term of the facility is 1 year from the date of disbursement of the loan facility. The Bank has paid off the facility on May 31, 2024.

On February 22, 2023, the Bank obtained a Housing Loan facility for Low-Income Communities from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) under Agreement No. 036/FLPP/PP/SMF-BPD.NTT/II/2023. The facility provides funding amounting to 25% of the total financing and is used for the distribution of the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) through subsidized home ownership loans, with a tenor of 20 years from the date of disbursement.

On August 18, 2022, the Bank obtained a Multi-purpose Housing Loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) under Agreement No. 199/PP/SMF-BPD.NTT/VIII/2022 with a maximum facility amount of Rp250,000,000,000. The loan bears a fixed interest rate of 4.50% per annum with a tenor of one year from the date of disbursement and is used for refinancing multi-purpose housing loans.

BP Tapera

Managed funds represent the fund distribution Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in order to procure housing through prosperous house ownership loans, in which the Government, through the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia provide 75%-90% of the funds and the Bank provides 10%-25% of funds in accordance with the Agreement between the Ministry of Housing of the Republic of Indonesia with PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.07/PKS/DP/2016 and No.79/MOU-BNTT/VIII/2016 dated August 3, 2016 regarding fund distribution of the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) in the Framework of Housing Procurement through Prosperous House Ownership Loans/Finance.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / *BORROWINGS (continued)*

BP Tapera (lanjutan)

Bank melaksanakan penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran dana dilakukan kepada debitur dengan suku bunga tetap maksimal sebesar 5% per tahun dan jangka waktu kredit maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dana kelolaan atas pembiayaan FLPP KPR dikelola melalui rekening program FLPP KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional No. 117/PKS/Sg/2018 dan No. 124/PKS-BNTT/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

BP Tapera (continued)

The Bank distributes Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) funds for housing provision through subsidized home ownership loans (KPR Sejahtera) for low-income communities. The loans are granted to borrowers at a fixed interest rate of up to 5% per annum with a maximum tenor of 20 (twenty) years. The managed funds related to FLPP housing financing are administered through the FLPP Subsidized Mortgage program account in accordance with the provisions stipulated in the Operational Cooperation Agreements No. 117/PKS/Sg/2018 and No. 124/PKS-BNTT/XII/2018 dated December 21, 2018.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN / *OTHER LIABILITIES*

	2025	2024	
Penyisihan imbalan kerja (Catatan 33)	159.034.718.038	137.834.779.201	*Provision for employee benefits (Note 33)*
Liabilitas sewa	30.577.171.348	50.166.308.164	*Lease liabilities*
Jasa produksi	27.665.184.765	45.599.359.750	*Productivity bonus*
Bunga yang masih harus dibayar	21.942.933.393	18.207.535.616	*Interest payables*
Beban yang masih harus dibayar	11.518.301.716	12.189.164.397	*Accrued expenses*
Utang pajak lainnya	4.549.842.986	2.113.608.526	*Other tax liabilities*
Penghargaan kerja	1.007.519.877	960.333.210	*Service awards*
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif	203.922.442	320.332.201	*Allowance for impairment losses on transactions of administrative accounts*
Lain-lain	19.640.119.723	27.108.462.125	*Others*
Jumlah	**276.139.714.288**	**294.499.883.190**	***Total***

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai rekening administratif / ***Movements in the allowance for impairment losses of administrative accounts***

	2025	2024	
Saldo awal	320.332.201	862.471.846	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan	(116.409.759)	(542.139.645)	*Recovery during the year*
Saldo akhir	**203.922.442**	**320.332.201**	***Ending balance***

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR / *AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

a. Modal dasar / ***a. Authorised capital***

Berdasarkan akta No.8 tanggal 27 Mei 2016 dari notaris Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., modal dasar Bank adalah sebesar Rp4.000.000.000.000, terbagi atas 300.000.000 saham seri A dengan nominal Rp10.000 dan 100.000.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp10.000.

Based on the deed No.8 dated May 27, 2016 of notary Lalu Muhamad Supriandi, S.H., M.Kn., the authorised capital of the Bank amounted Rp4,000,000,000,000, divided into 300,000,000 series A shares with a nominal amounted Rp10,000 and 100,000,000 series B shares with a nominal amounted Rp10,000.

Berdasarkan akta No.4 tanggal 7 Februari 2022 dari notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., modal dasar Bank mengalami perubahan menjadi sebesar Rp7.000.000.000.000.

Based on deed No. 4 dated February 7, 2022 from notary Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn., the authorized capital of the Bank has changed to Rp7,000,000,000,000.

Saham seri A merupakan saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima dividen dan sisa likuidasi terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota direksi dan dewan komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

Series A shares are shares that can only be owned by the provincial government, municipal government and district government. Series A shares have special voting rights, can be exchanged for shares of series B, receive dividends and the remaining liquidation in advance and has special voting rights in proposing the nomination of directors and board of commissioners Bank. Series B shares are common shares.

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor

Pada tanggal 31 Desember 2025 susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

22. AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

b. Issued and fully paid-in capital and additional paid-in capital

As of December 31, 2025, the shareholder composition is as follows:

Pemegang saham	**Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage***	**Jumlah/ *Total***	***Shareholders***
Saham Seri A				***Series A Shares***
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur	52.500.755	23,76%	525.007.550.000	*A. East Nusa Tenggara Province*
B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur:				*B. City/Municipality the Province East Nusa Tenggara:*
Pemerintah Kota				***Municipal Government***
- Kupang	13.000.000	5,88%	130.000.000.000	*Kupang -*
Pemerintah Kabupaten				***District Government***
- Kupang	12.500.000	5,66%	125.000.000.000	*Kupang -*
- Timor Tengah Utara	11.565.422	5,23%	115.654.220.000	*Timor Tengah Utara -*
- Manggarai Timur	10.058.282	4,55%	100.582.820.000	*Manggarai Timur -*
- Timor Tengah Selatan	10.006.577	4,53%	100.065.770.000	*Timor Tengah Selatan -*
- Sumba Barat Daya	9.678.175	4,38%	96.781.750.000	*Sumba Barat Daya -*
- Sumba Timur	9.228.066	4,18%	92.280.660.000	*Sumba Timur -*
- Sumba Barat	9.034.031	4,09%	90.340.310.000	*Sumba Barat -*
- Rote Ndao	9.027.261	4,09%	90.272.610.000	*Rote Ndao -*
- Malaka	7.904.141	3,58%	79.041.410.000	*Malaka -*
- Belu	7.387.172	3,34%	73.871.720.000	*Belu -*
- Sumba Tengah	6.642.283	3,01%	66.422.830.000	*Sumba Tengah -*
- Manggarai	6.140.811	2,78%	61.408.110.000	*Manggarai -*
- Manggarai Barat	5.719.967	2,59%	57.199.670.000	*Manggarai Barat -*
- Sabu Raijua	5.649.283	2,56%	56.492.830.000	*Sabu Raijua -*
- Lembata	5.396.088	2,44%	53.960.880.000	*Lembata -*
- Ende	5.261.653	2,38%	52.616.530.000	*Ende -*
- Nagekeo	4.469.967	2,02%	44.699.670.000	*Nagekeo -*
- Sikka	3.572.463	1,62%	35.724.630.000	*Sikka -*
- Flores Timur	3.529.859	1,60%	35.298.590.000	*Flores Timur -*
- Alor	2.702.105	1,22%	27.021.050.000	*Alor -*
- Ngada	2.705.737	1,22%	27.057.370.000	*Ngada -*
C. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	7.142.857	3,23%	71.428.570.000	*C. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
	168.322.200	76,18%	1.683.222.000.000	
Jumlah Saham Seri A	**220.822.955**	**99,94%**	**2.208.229.550.000**	***Total Series A Shares***
Saham Seri B				***Series B Shares***
Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc	95.744	0,04%	957.440.000	*Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc*
Luther Oktovianus Wila Huky	23.321	0,01%	233.210.000	*Luther Oktovianus Wila Huky*
Johan Christian Tallo	11.660	0,01%	116.600.000	*Johan Christian Tallo*
Jumlah Saham Seri B	**130.725**	**0,06%**	**1.307.250.000**	***Total Series B Shares***
Jumlah	**220.953.680**	**100,00%**	**2.209.536.800.000**	***Total***

Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.14 tanggal 15 Oktober 2025 dari Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.114.550.860.000 menjadi Rp2.209.536.800.000, yang terdiri dari 220.822.955 saham seri A dan 130.725 saham seri B. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0243578 tanggal 16 October 2025.

Based on the deed of approval statement of Bank's additional paid-in capital No.14 dated October 15, 2025 of Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn has approved the increase of the issued and fully paid-in capital amounted Rp2,114,550,860,000 to Rp2,209,536,800,000, consisting of 220,822,955 series A shares and 130,725 shares of series B. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0243578 dated October 16, 2025.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

22. AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

b. Issued and fully paid-in capital and additional paid-in capital (continued)

As of December 31, 2024, the shareholder composition is as follows:

Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah/ *Total*	*Shareholders*
Saham Seri A				***Series A Shares***
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur	52.500.755	24,83%	525.007.550.000	*A. East Nusa Tenggara Province*
B. Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur:				*B. City/Municipality the Province East Nusa Tenggara:*
Pemerintah Kota				***Municipal Government***
- Kupang	12.500.000	5,91%	125.000.000.000	*Kupang -*
Pemerintah Kabupaten				***District Government***
- Kupang	12.500.000	5,91%	125.000.000.000	*Kupang -*
- Timor Tengah Utara	11.565.422	5,47%	115.654.220.000	*Timor Tengah Utara -*
- Manggarai Timur	10.058.282	4,76%	100.582.820.000	*Manggarai Timur -*
- Timor Tengah Selatan	10.006.577	4,73%	100.065.770.000	*Timor Tengah Selatan -*
- Sumba Timur	9.228.066	4,36%	92.280.660.000	*Sumba Timur -*
- Sumba Barat	9.034.031	4,27%	90.340.310.000	*Sumba Barat -*
- Sumba Barat Daya	8.978.175	4,25%	89.781.750.000	*Sumba Barat Daya -*
- Rote Ndao	9.027.261	4,27%	90.272.610.000	*Rote Ndao -*
- Belu	7.387.172	3,49%	73.871.720.000	*Belu -*
- Malaka	7.404.141	3,50%	74.041.410.000	*Malaka -*
- Sumba Tengah	6.342.283	3,00%	63.422.830.000	*Sumba Tengah -*
- Manggarai	6.140.811	2,90%	61.408.110.000	*Manggarai -*
- Manggarai Barat	5.719.967	2,71%	57.199.670.000	*Manggarai Barat -*
- Sabu Raijua	5.649.283	2,67%	56.492.830.000	*Sabu Raijua -*
- Ende	5.261.653	2,49%	52.616.530.000	*Ende -*
- Lembata	5.396.088	2,55%	53.960.880.000	*Lembata -*
- Nagekeo	4.369.967	2,07%	43.699.670.000	*Nagekeo -*
- Sikka	3.572.463	1,69%	35.724.630.000	*Sikka -*
- Flores Timur	3.479.859	1,65%	34.798.590.000	*Flores Timur -*
- Alor	2.702.105	1,28%	27.021.050.000	*Alor -*
- Ngada	2.500.000	1,18%	25.000.000.000	*Ngada -*
	158.823.606	75,11%	1.588.236.060.000	
Jumlah Saham Seri A	**211.324.361**	99,94%	**2.113.243.610.000**	***Total Series A Shares***
Saham Seri B				***Series B Shares***
Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc	95.744	0,05%	957.440.000	*Charles Amos Corputty, BSc, MBA, MSc*
Luther Oktovianus Wila Huky	23.321	0,01%	233.210.000	*Luther Oktovianus Wila Huky*
Johan Christian Tallo	11.660	0,01%	116.600.000	*Johan Christian Tallo*
Jumlah Saham Seri B	**130.725**	0,06%	**1.307.250.000**	***Total Series B Shares***
Jumlah	**211.455.086**	**100,00%**	**2.114.550.860.000**	***Total***

Berdasarkan akta pernyataan persetujuan penambahan setoran modal Bank No.16 tanggal 13 November 2024 dari Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp2.045.186.350.000 menjadi Rp2.114.550.860.000, yang terdiri dari 211.324.361 saham seri A dan 130.725 saham seri B. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0210882 tanggal 14 November 2024.

Based on the deed of approval statement of Bank's additional paid-in capital No.16 dated November 13, 2024 of Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn has approved the increase of the issued and fully paid-in capital amounted Rp2,045,186,350,000 to Rp2,114,550,860,000, consisting of 211,324,361 series A shares and 130,725 shares of series B. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0210882 dated November 14, 2024.

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Tambahan modal disetor

Agio saham

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo agio saham adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Penjualan saham kepada:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28.571.430.000	-
Jumlah	**28.571.430.000**	**-**

Agio Saham merupakan selisih lebih yang timbul dari penerbitan saham di atas nilai nominalnya. Selisih ini telah dicatat dalam akun tambahan modal disetor atas agio saham pada bagian ekuitas Perseroan. Penerimaan setoran modal tersebut telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 4 September 2025, yang kemudian dituangkan secara resmi dalam Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal No. 14 tanggal 15 Oktober 2025. Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. di Kupang.

Modal disetor lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo modal disetor lainnya adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Saldo awal	11.500.019.886	12.467.514.968
Setoran modal tahun berjalan:		
Saham Seri A		
A. Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-
B. Pemerintah Kota Kupang	5.000.000.000	5.000.000.000
C. Pemerintah Kabupaten	12.057.370.000	63.397.014.918
D. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	71.428.570.000	-
Jumlah	**88.485.940.000**	**68.397.014.918**
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh	(94.985.940.000)	(69.364.510.000)
Saldo akhir tahun	**5.000.019.886**	**11.500.019.886**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdapat setoran modal dari para pemegang saham masing-masing sebesar Rp88.485.940.000 dan Rp68.397.014.918.

Setoran modal dari para pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2025 and 31 Desember 2024, yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar Rp5.000.019.886 dan Rp11.500.019.886, yang merupakan setoran saham seri A dan seri B. Setoran modal tersebut dibukukan pada akun "Tambahan modal disetor - modal disetor lainnya".

22. AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

c. Additional paid-in capital

Share premium

As of December 31, 2025 and 2024 the balance of share premium are as follows:

	2025	2024
Sale of shares to:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	28.571.430.000	-
Total	**28.571.430.000**	**-**

Share Premium is the excess amount arising from the issuance of shares above their nominal value. This excess has been recorded in the Additional Paid-in Capital – Share Premium account within the Company's equity. The receipt of this capital contribution was approved through the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 10 dated September 4, 2025, and was formally documented in the Deed of Statement of Approval for Additional Capital Contribution No. 14 dated October 15, 2025. This deed was executed before Notary Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. in Kupang.

Other paid-in capital

As of December 31, 2025 and 2024 the balance of other paid-in capital are as follows:

	2025	2024
Beginning balance	11.500.019.886	12.467.514.968
Paid-in capital during the year:		
Series A Shares		
A. East Nusa Tenggara Province	-	-
B. Kupang City Government	5.000.000.000	5.000.000.000
C. District Government	12.057.370.000	63.397.014.918
D. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	71.428.570.000	-
Total	**88.485.940.000**	**68.397.014.918**
Reclassification to issued and fully paid-in capital	(94.985.940.000)	(69.364.510.000)
Balance at end of year	**5.000.019.886**	**11.500.019.886**

As of December 31, 2025 and 2024, there is paid-in capital from shareholders amounted Rp88,485,940,000 and Rp68,397,014,918 respectively.

Paid-in capital from the shareholders of the Bank as of December 31, 2025 and 2024, that has not received approval from the Financial Services Authority amounted Rp5,000,019,886 and Rp11,500,019,886, respectively, which is the shares of series A and series B. The paid-in capital recorded as "Additional paid-in capital - other paid-in capital".

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Modal sumbangan

Modal sumbangan sebesar Rp247.088.700 merupakan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia berupa penyediaan jasa konsultansi, penyediaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta pelatihan sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.26/23/Bppp tanggal 21 Mei 1993.

22. AUTHORISED CAPITAL, ISSUED AND FULLY PAID-IN CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

c. Additional paid-in capital (continued)

Donation capital

Donation capital amounted Rp247,088,700 represent donations of banking facilities obtained from Bank Indonesia in the form of the procurement of consultancy services, procurement of hardware and software and training in accordance with the letter from Bank Indonesia No.26/23/Bppp dated May 21, 1993.

23. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Penggunaan laba bersih tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 14 Mei 2025, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.9 oleh Serlina Sari Darmawan, S.H., M.H.

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.12 oleh Emmanuel Mali, S.H., M.H.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba bersih tahun 2024 dan 2023 ditetapkan sebagai berikut:

23. DISTRIBUTION OF NET INCOME

Distribution of net income year 2024 set by the Annual Shareholders General Meeting for Fiscal Year 2024 dated May 14, 2025 as stated in notarial deed No.9 by Serlina Sari Darmawan, S.H., M.H.

Distribution of net income year 2023 set by the Annual Shareholders General Meeting for Fiscal Year 2023 dated May 8, 2024 as stated in notarial deed No.12 by Emmanuel Mali, S.H., M.H.

Based on the Shareholders' General Meeting decision on the above, net income in 2024 and 2023 is set as follows:

	2025	2024	
Pembagian dividen	154.731.973.785	96.382.440.859	*Distribution of dividends*
Pembentukan cadangan umum	22.104.567.684	13.768.920.123	*Establishment of general reserves*

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

The amount of dividends declared for each year are as follows:

Periode	Jumlah / *Amount*	Per saham/ *Per shares*	*Period*
Distribusi pada 2025 untuk laba tahun 2024	154.731.973.785	744	*Distribution in 2025 for profit in 2024*
Distribusi pada 2024 untuk laba tahun 2023	96.382.440.859	475	*Distribution in 2024 for profit in 2023*

24. PENDAPATAN BUNGA

24. INTEREST INCOME

	2025	2024	
Kredit yang diberikan	1.502.917.330.803	1.454.498.737.798	*Loans*
Surat berharga	115.309.862.906	109.409.331.924	*Marketable securities*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	35.508.473.058	41.089.598.039	*Current accounts and placement with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	24.563.723.932	34.360.764.126	*Current accounts and placement with other banks*
Jumlah	**1.678.299.390.699**	**1.639.358.431.888**	***Total***

Jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.205.980.286 dan Rp4.071.530.938 (Catatan 35).

Total interest income received from related parties as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp2,205,980,286 and Rp4,071,530,938 respectively (Note 35).

25. BEBAN BUNGA / *25. INTEREST EXPENSE*

	2025	2024	
Simpanan nasabah:			*Deposits from customers:*
Deposito berjangka	405.676.146.779	384.502.129.423	*Time deposits*
Tabungan	34.766.338.488	35.313.019.816	*Saving deposits*
Giro	24.337.338.343	26.916.031.927	*Current accounts*
Pinjaman yang diterima	59.736.282.181	30.801.313.311	*Borrowings*
Premi asuransi untuk program penjaminan dana nasabah (Catatan 40)	27.823.338.785	28.614.898.635	*Premium on deposit guarantee (Note 40)*
Obligasi yang diterbitkan	14.923.361.794	4.351.264.041	*Securities issued*
Simpanan dari bank lain	1.191.100.221	18.055.119.103	*Deposits from other banks*
Lain-lain	28.562.261.766	28.064.840.192	*Others*
Jumlah	**597.016.168.357**	**556.618.616.448**	***Total***

Jumlah beban bunga kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.659.392.312 dan Rp81.355.116.336 (Catatan 35).

Total interest expense to related parties as of December 31, 2025 and 2024 amounted Rp31,659,392,312 and Rp81,355,116,336 respectively (Note 35).

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *26. OTHER OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Administrasi simpanan	49.943.672.705	46.857.346.349	*Saving administrations*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	6.807.348.614	2.405.700.674	*Collection of written-off loans*
Administrasi lainnya	762.332.017	1.487.327.623	*Other administrations*
Pendapatan ATM	538.874.166	553.366.900	*ATM revenues*
Administrasi jasa perbankan	240.847.800	257.095.000	*Banking services administrations*
Lain-lain	20.481.743.721	24.874.457.791	*Others*
Jumlah	**78.774.819.023**	**76.435.294.336**	***Total***

27. PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *27. ALLOWANCE (REVERSAL) FOR IMPAIRMENT LOSSES OF ASSETS*

	2025	2024	
Kredit yang diberikan (Catatan 8)	159.043.237.984	112.852.553.892	*Loans (Note 8)*
Agunan yang diambil alih (Catatan 14)	25.802.380.932	23.560.791.635	*foreclosed assets (Note 14)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (Catatan 7)	5.742.187	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)*
Giro pada bank lain (Catatan 6)	(581.936)	(22.560)	*Current accounts with other banks (Note 6)*
Surat berharga (Catatan 9)	(4.265.151)	(5.831.543)	*Marketable securities (Note 9)*
Rekening administratif (Catatan 21)	(116.409.759)	(542.139.645)	*Administrative account (Note 21)*
Jumlah	**184.730.104.257**	**135.865.351.780**	***Total***

28. BEBAN TENAGA KERJA / *28. PERSONNEL EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji, upah dan honorarium	223.874.761.463	219.732.849.497	*Salaries, wages and honorarium*
Tunjangan karyawan	219.669.852.310	193.250.935.216	*Employee allowances*
Jasa produksi dan bonus	27.665.184.768	45.599.359.750	*Bonuses and other bonuses*
Imbalan kerja	48.048.501.372	67.891.360.070	*Employee benefits*
Pendidikan dan pelatihan	16.667.411.630	21.596.131.287	*Education and training*
Jumlah	**535.925.711.543**	**548.070.635.820**	***Total***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

28. BEBAN TENAGA KERJA (lanjutan)

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan pejabat eksekutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

28. *PERSONNEL EXPENSES (continued)*

Total gross salaries, allowances and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and executive officers respectively as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Komisaris			*Commissioners*
Gaji	698.118.400	1.107.172.150	*Salaries*
Tunjangan	1.459.919.100	4.693.470.369	*Allowances*
Bonus	1.647.308.361	1.985.607.297	*Bonuses*
Direksi			*Directors*
Gaji	3.551.841.900	2.985.207.097	*Salaries*
Tunjangan	8.628.221.829	10.968.163.242	*Allowances*
Bonus	6.945.193.095	4.477.276.775	*Bonuses*
Komite			*Committee*
Gaji	420.000.000	528.000.000	*Salaries*
Tunjangan	116.232.900	135.202.913	*Allowances*
Bonus	86.290.373	83.095.362	*Bonuses*
Pejabat Eksekutif Bank			*Executive Bank Officers*
Gaji	11.568.925.041	13.452.878.636	*Salaries*
Tunjangan	11.568.925.041	14.365.123.474	*Allowances*
Bonus	14.521.604.296	3.938.176.651	*Bonuses*
Jumlah	**61.212.580.335**	**58.719.373.966**	***Total***

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

29. *GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Sewa	45.723.223.876	32.516.383.511	*Rent*
Tenaga kerja *outsourcing*	37.818.350.910	36.353.177.931	*Outsourcing labour*
Penyusutan aset hak guna (Catatan 13)	36.575.110.146	34.993.514.039	*Depreciation of right of use assets (Note 13)*
Perjalanan dinas	27.942.075.431	30.822.055.646	*Business trip*
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	26.472.795.436	26.307.104.345	*Depreciation of fixed assets (Note 11)*
Iklan dan promosi	18.897.219.359	14.893.054.639	*Advertisement and promotion*
Rumah tangga kantor	15.459.081.392	16.916.257.704	*Households office*
Pemeliharaan dan perbaikan	13.368.145.898	16.241.005.999	*Maintenance and repairs*
Alat tulis kantor	12.377.994.714	13.334.524.842	*Office stationery*
Jasa profesional	9.859.554.006	9.934.891.309	*Professional services*
Listrik, air dan gas	8.345.925.342	8.442.752.434	*Electricity, water and gas*
Iuran	8.050.680.140	9.207.899.205	*Fees*
Representasi	5.310.383.951	6.203.617.975	*Representations*
Premi asuransi	4.856.339.527	4.448.395.505	*Insurance premium*
Transportasi	4.651.919.272	5.894.768.561	*Transportation*
Komunikasi	3.620.305.438	3.161.984.917	*Communication*
Ekspedisi	1.262.273.415	1.898.412.556	*Expedition*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12)	520.621.043	253.507.082	*Amortisation of Intangible assets (Note 12)*
Lain-lain	39.932.387.654	35.892.757.629	*Others*
Jumlah	**321.044.386.950**	**307.716.065.828**	***Total***

30. PENDAPATAN/BEBAN NON-OPERASIONAL / *30. NON-OPERATING INCOME/EXPENSE*

	2025	2024	
Pendapatan non-operasional			***Non-operating incomes***
Lain-lain	9.877.071.730	30.179.610.317	*Others*
Jumlah	**9.877.071.730**	**30.179.610.317**	***Total***
Beban non-operasional			***Non-operating expenses***
Hadiah, souvenir dan sumbangan	8.344.695.276	8.697.607.081	*Gifts, souvenir and donations*
Denda	38.617.149	11.700.000	*Penalties*
Lain-lain	13.271.282.421	16.078.914.363	*Others*
Jumlah	**21.654.594.846**	**24.788.221.444**	***Total***

Pendapatan non-operasional - lain-lain merupakan koreksi atas kelebihan pencadangan beban tahun sebelumnya.

Non-operating income - others is correction of the excess of expense allowances of the previous year.

31. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *31. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	2025	2024	
KOMITMEN			***COMMITMENTS***
Liabilitas komitmen			***Commitment liabilities***
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan			*Unused loans commitments granted to debtors*
Pihak ketiga	(184.471.423.616)	(208.383.051.708)	*Third parties*
Jumlah liabilitas komitmen	(184.471.423.616)	(208.383.051.708)	***Total commitment liabilities***
JUMLAH LIABILITAS KOMITMEN - BERSIH	**(184.471.423.616)**	**(208.383.051.708)**	***TOTAL COMMITMENTS LIABILITIES - NET***
KONTINJENSI			***CONTINGENCIES***
Tagihan kontinjensi			***Contingent receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	155.148.072.398	123.142.133.514	*Past due interest receivables*
Jumlah tagihan kontinjensi	155.148.072.398	123.142.133.514	***Total contingent receivables***
Liabilitas kontinjensi			***Contingent liabilities***
Garansi yang diterbitkan			*Guarantees issued*
Pihak ketiga	(39.941.724.094)	(78.807.892.638)	*Third parties*
Jumlah liabilitas kontinjensi	(39.941.724.094)	(78.807.892.638)	***Total contingent liabilities***
JUMLAH LIABILITAS KONTINJENSI - BERSIH	**115.206.348.304**	**44.334.240.876**	***TOTAL CONTINGENT LIABILITIES NET***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Bank yang tercatat dalam laporan keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT

The table below presents comparison of the carrying value with the fair value of the Bank's financial instruments that recorded in the financial statements. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2025 and 2024 , and was not updated to reflect changes in market conditions that have occurred after this date.

	2025				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				
	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Liabilitas diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Jumlah nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	687.295.642.009	-	687.295.642.009	687.295.642.009	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	997.936.030.834	-	997.936.030.834	997.936.030.834	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	16.066.886.094	-	16.066.886.094	16.066.886.094	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.137.844.407.782	-	3.137.844.407.782	3.137.844.407.782	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	13.479.112.676.817	-	13.479.112.676.817	13.479.112.676.817	*Loans*
Surat berharga	941.920.294.323	-	941.920.294.323	988.702.310.241	*Marketable securities*
Surat berharga yang dibeli dengan dengan janji dijual kembali	258.790.818.168	-	258.790.818.168	264.355.707.849	*Securities purchased under resale agreements*
Aset lain-lain	86.863.286.952,00	-	86.863.286.952	86.863.286.952	*Other assets*
	19.605.830.042.979	**-**	**19.347.039.224.811**	**19.658.176.948.578**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	-	62.439.844.787	62.439.844.787	62.439.844.787	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	-	15.929.812.276.682	15.929.812.276.682	15.929.812.276.682	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	266.648.689.186	266.648.689.186	266.648.689.186	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	-	745.109.502.734	745.109.502.734	745.109.502.734	*Borrowings*
	-	**17.004.010.313.389**	**17.004.010.313.389**	**17.004.010.313.389**	

	2024				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				
	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Liabilitas diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Jumlah nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas	594.934.066.970	-	594.934.066.970	526.951.698.129	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.510.734.797.378	-	1.510.734.797.378	1.616.683.742.502	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	18.063.127.798	-	18.063.127.798	16.058.105.352	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	399.941.683.676	-	399.941.683.676	1.344.803.968.519	*Placements with Bank Indonesia and*
Kredit yang diberikan	12.418.640.352.913	-	12.418.640.352.913	12.211.521.150.431	*Loans*
Surat berharga	907.840.831.644	-	907.840.831.644	1.030.955.397.060	*Marketable securities*
Aset lain-lain	88.778.071.191	-	88.778.071.191	88.888.366.375	*Other assets*
	15.938.932.931.568	**-**	**15.938.932.931.568**	**16.835.862.428.368**	

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *32. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT (continued)*

	2024				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				
	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Liabilitas diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Jumlah nilai wajar/ *Total fair value*	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Liabilitas segera	-	70.808.421.090	70.808.421.090	70.808.421.090	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	-	11.987.255.027.637	11.987.255.027.637	11.987.255.027.637	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	421.089.316.957	421.089.316.957	421.089.316.957	*Deposits from other banks*
Surat berharga yang diterbitkan	-	36.955.494.571	36.955.494.571	36.955.494.571	*Securities issued*
Pinjaman yang diterima	-	905.345.188.006	905.345.188.006	905.345.188.006	*Borrowings*
	-	**13.421.453.448.261**	**13.421.453.448.261**	**13.421.453.448.261**	

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga untuk tujuan investasi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro dan penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat berharga untuk tujuan investasi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks, investment securities, securities purchased under resale agreements and other assets.

The carrying values of cash and cash equivalents, current accounts and placements with floating interest rate is a reasonable approximation of fair value.

Estimated fair value of placements with fixed interest rate, investment securities, securities purchased under resale agreements and other assets is based on discounted cash flows using money market interest rate applicable to the debt with credit risk and similar remaining maturity. Since the remaining maturity below one year, the carrying amount of placements with fixed interest rate and other assets is a reasonable approximation of fair value.

(ii) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar, sedangkan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajarnya.

(ii) Loans

The Bank's loan portfolio generally consists of loans with floating interest rates. Loans are stated at carrying amount. The fair value of loans shows the discounted value of the estimated future cash flows expected to be received by the Bank. Estimated cash flows is discounted using market rates to determine fair value.

The carrying amounts of loans with floating interest rate is a reasonable approximation of fair value, while the carrying value of short-term loans with fixed interest rate is a reasonable approximation of fair value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

32. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

(iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(iv) Surat berharga

Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

(v) Surat berharga yang diterbitkan

Nilai wajar agregat dihitung berdasarkan harga pasar kuotasi. Jika informasi ini tidak tersedia, model diskonto arus kas digunakan berdasarkan kurva *yield* terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

32. *FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENT (continued)*

(iii) Liabilities immediately payable, deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities

Estimated of fair value of liabilities immediately payable, deposits without maturity, including non-interest bearing deposits is the amount owed when the debt is paid.

Estimated fair value of deposits with fixed interest rate and other liabilities that are not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the remaining maturity below one year, the carrying amount of deposits with fixed interest rates and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

(iv) Marketable securities

The fair value of held-to-maturity securities is determined based on market prices or intermediary quotations price (broker)/securities traders (dealers). If this information is not available, fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield.

(v) Securities issued

The aggregate fair values are calculated based on quoted market prices. If this information is not available, discounted cash flow model is used based on a current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

33. IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun manfaat pasti, sumbangan kematian, pesangon dan uang pisah, cuti besar serta Penghargaan Masa Bhakti (PMB).

Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh akturia independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank. Program dana pensiun manfaat pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.67 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-174/KM.10/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

Program PMB dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.01.A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Imbalan PMB berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 kali, 4 kali, 5 kali dan 6 kali dari dasar pemberian penghargaan (DPP) kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

33. *EMPLOYEE BENEFITS*

Bank provides long-term employee benefits and other post-employment to employees who qualify consisting of defined benefit pension plan, mourning donation, severance and severance pay, long service leave and service pay benefits.

The actuarial valuation for long-term employee benefit liabilities and post-employment are calculated by independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Agus Susanto using the projected unit credit method.

Bank's pension plan administered by Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Employee contribution is 5% of their pensionable earnings and the remaining amount required to fund the program is contributed by the Bank. Defined benefit pension plan that last set by the Decree of Directors No.67 Year 2007 dated September 12, 2007 which was approved by the Ministry of Finance Decree No.KEP-174/KM.10/2008 dated August 21, 2008.

Service pay benefits program managed by the Bank and regulated in the service pay benefits program regulation established by the Decree of Directors No.01.A Year 2007 January 2, 2007. Service pay benefits rewards form of payment amount for each 3 times, 4 times, 5 times and 6 times of the basic award (DPP) to employees with services of 15 years, 20 years, 25 years and 30 years with certain conditions.

33. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

33. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Long leave program managed by the Bank and an employee benefits program for employees to leave substantial compensation.

Status of assets (liabilities) employee benefits programs as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program pensiun/ *Pension program*	**Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program***	**Program jangka panjang/ *Long-term program***	**Program penghargaan pengurus/ *Management awards***	**Jumlah/ *Total***
Nilai wajar aset/ *Fair value of assets*	1.062.236.113.462	-	-	-	1.062.236.113.462
Nilai kini liabilitas *Fair value of liabilities*	(1.157.668.344.710)	(4.760.037.194)	(58.629.459.425)	(212.990.171)	(1.221.270.831.500)
Jumlah/*Total*	**(95.432.231.248,00)**	**(4.760.037.194)**	**(58.629.459.425)**	**(212.990.171)**	**(159.034.718.038)**

	2024				
	Program pensiun/ *Pension program*	**Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program***	**Program jangka panjang/ *Long-term program***	**Program penghargaan pengurus/ *Management awards***	**Jumlah/ *Total***
Nilai wajar aset/ *Fair value of assets*	959.388.478.380	-	-	-	959.388.478.380
Nilai kini liabilitas *Fair value of liabilities*	(1.019.018.974.059)	(26.512.696.155)	(51.519.035.401)	(172.551.966)	(1.097.223.257.581)
Jumlah/*Total*	**(59.630.495.679)**	**(26.512.696.155)**	**(51.519.035.401)**	**(172.551.966)**	**(137.834.779.201)**

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program pensiun/ *Pension program*	**Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program***	**Program jangka panjang/ *Long-term program***	**Program penghargaan pengurus/ *Management awards program***	**Jumlah/ *Total***
Saldo awal/ *Beginning balance*	(59.630.495.679)	(26.512.696.155)	(51.519.035.401)	(172.551.966)	(137.834.779.201)
Beban periode berjalan/ *Expenses for the period*	(47.683.055.458)	21.707.925.645	(20.576.620.544)	(1.496.751.015)	(48.048.501.372)
Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	(24.770.540.947)	(10.476.530.049)	-	(96.568.857)	(35.343.639.853)
Kontribusi pemberi kerja/ *Employer contributions*	36.651.860.836	-	-	-	36.651.860.836
Imbalan yang dibayarkan/ *Payment of benefits*	-	10.521.263.365	13.466.196.520	1.552.881.667	25.540.341.552
Jumlah	**(95.432.231.248)**	**(4.760.037.194)**	**(58.629.459.425)**	**(212.990.171)**	**(159.034.718.038)**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

33. *EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Reconciliation of changes in assets (liabilities) of employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	2024				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management awards program*	Jumlah/ *Total*
Saldo awal/ *Beginning balance*	(60.196.032.727)	(24.298.225.600)	(45.547.233.911)	(2.154.122.536)	(132.195.614.774)
Beban tahun berjalan/ *Expenses for the year*	(44.326.144.147)	(4.279.030.859)	(19.012.890.873)	(273.294.191)	(67.891.360.070)
Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	8.701.619.782	(3.711.789.501)	-	(566.736.220)	4.423.094.061
Kontribusi pemberi kerja/ *Employer contributions*	36.190.061.413	-	-	-	36.190.061.413
Imbalan yang dibayarkan/ *Payment of benefits*	-	5.776.349.805	13.041.089.383	2.821.600.981	21.639.040.169
Jumlah	**(59.630.495.679)**	**(26.512.696.155)**	**(51.519.035.401)**	**(172.551.966)**	**(137.834.779.201)**

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management*	Jumlah/ *Total*
Biaya jasa kini/ *Current service cost*	(43.449.290.265)	(402.646.210)	(8.210.295.196)	(161.602.962)	(52.223.834.633)
Biaya bunga/ *Interest cost*	(72.350.347.158)	(1.882.401.427)	(3.657.851.513)	(12.078.638)	(77.902.678.736)
Rugi aktuaria/ *Actuarial loss*	-	-	(8.708.473.835)	-	(8.708.473.835)
Biaya jasa lalu / *Past service cost*	-	23.992.973.282	-	(1.323.069.415,00)	22.669.903.867
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun/ *Results are expected on pension fund assets*	68.116.581.965	-	-	-	68.116.581.965
Jumlah	**(47.683.055.458)**	**21.707.925.645**	**(20.576.620.544)**	**(1.496.751.015)**	**(48.048.501.372)**

33. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *33. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

Biaya program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The expense of employee benefits programs as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	2024				
	Program pensiun/ *Pension program*	Program pasca kerja lainnya/*Other post-employment program*	Program jangka panjang/ *Long-term program*	Program penghargaan pengurus/ *Management*	Jumlah/ *Total*
Biaya jasa kini/ *Current service cost*	(40.172.617.889)	(2.602.453.293)	(8.039.098.775)	(135.430.349)	(50.949.600.306)
Biaya bunga/ *Interest cost*	(66.806.485.803)	(1.676.577.566)	(3.142.759.140)	(137.863.842)	(71.763.686.351)
Rugi aktuaria/ *Actuarial loss*	-	-	(7.831.032.958)	-	(7.831.032.958)
Hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun/ *Results are expected on pension fund assets*	62.652.959.545	-	-	-	62.652.959.545
Jumlah	**(44.326.144.147)**	**(4.279.030.859)**	**(19.012.890.873)**	**(273.294.191)**	**(67.891.360.070)**

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The main assumptions used in the actuarial calculation for all employee benefits as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Tingkat bunga per tahun			*Interest rate per annum*
- Liabilitas	6,80%	7,10%	*Liabilities -*
- Aset	0,00%	0,00%	*Assets -*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	5,00%	5,00%	*Basic salary increment rate per annum*
Tabel mortalitas	GAM-1971	GAM-1971	*Mortality table*
Tingkat cacat per tahun	0,01%	0,01%	*Disability rate per annum*
Tingkat pengunduran diri per tahun			*Resignation rate per annum*
Usia 18-45 tahun	0,10%	0,10%	*Age 18-45 years*
Usia 46-55 tahun	0,05%	0,05%	*Age 46-55 years*

Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

Employee benefits expense recognised in other comprehensive income:

	2025	2024	
Perubahan asumsi aktuarial	-	(475.780.227)	*Changes in actuarial assumption*
Penyesuaian	35.343.639.853	(3.947.313.834)	*Adjustments*
Total biaya yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	**35.343.639.853**	**(4.423.094.061)**	***Total expense recognised in other comprehensive income***

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Remeasurement on liabilities (assets) post-employment benefits are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	87.466.927.902	91.890.021.963	*Beginning balance*
Kerugian (keuntungan) aktuaria	35.343.639.853	(4.423.094.061)	*Actuarial loss (gain)*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	**122.810.567.755**	**87.466.927.902**	***Total remeasurement on defined benefit liabilites***

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

33. IMBALAN KERJA (lanjutan) / 33. *EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

	PVBO			
	Nilai kini kewajiban manfaat kerja/ *Present value of employee benefit*	**Penyesuaian historis (nilai)/ *Historically adjustments (value)***	**Penyesuaian historis (%)/ *Historically adjustments (%)***	
31 Desember 2025	1.157.668.344.710	3.790.636.936	0,33%	*December 31, 2025*
31 Desember 2024	1.019.018.974.059	(84.252.837)	-0,01%	*December 31, 2024*

	PVA			
	Nilai wajar aset program/ *Fair value of program assets*	**Penyesuaian historis (nilai)/ *Historically adjustments (value)***	**Beban tahun(%) / *Expenses in the current year (%)***	
31 Desember 2025	1.062.236.113.462	32.823.133.470	3,09%	*December 31, 2025*
31 Desember 2024	959.388.478.380	(15.642.217.970)	-1,63%	*December 31, 2024*

34. LABA BERSIH PER SAHAM / 34. *EARNINGS PER SHARE*

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun bersangkutan. Jumlah saham yang beredar termasuk modal disetor lainnya selama tahun berjalan (Catatan 22).

Earnings per share is calculated by dividing net income to shareholders by the weighted average number of shares outstanding during the year. Number of outstanding shares including other paid-in capital during the year (Note 22).

	2025	**2024**	
Laba bersih	92.618.227.256	176.836.541.469	*Net income*
Rata-rata tertimbang jumlah saham	215.030.538	205.089.940	*Weighted average number of shares*
Laba bersih per saham	431	851	*Earnings per share*

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / 35. *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties for the relationship of ownership and/or management. All transactions with related parties have been conducted with the policies and requirements that have been agreed.

Pihak berelasi/ *Related parties*	**Sifat hubungan/ *Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction***
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemegang saham pengendali/ *Ultimate shareholder*	Kredit yang diberikan, simpanan, pendapatan dan beban bunga/ *Loans, deposits, interest income and expenses*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pemegang saham pengendali/ *Ultimate shareholder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
PT Flobamor	Dikendalikan oleh pemegang saham akhir yang sama/ *Under same ultimate shareholder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai pendiri/*as founder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
Badan Kesejahteraan Karyawan	PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai pendiri/*as founder*	Simpanan dan beban bunga/ *Deposits and interest expenses*
Karyawan kunci/ *Key employees*	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut/ *Directors, Commissioners, Branch Managers and Division Heads and close family members*	Kredit yang diberikan, simpanan, pendapatan dan beban bunga/*Loans, deposits, interest income and expenses*

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

	2025	2024	
Aset			***Assets***
Kredit yang diberikan	31.708.303.575	8.662.299.094	*Loans*
Persentase terhadap jumlah aset			*Percentage of total assets*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro	1.447.556.491.534	243.521.378.038	*Current accounts*
Tabungan	15.482.322.706	7.709.797.250	*Saving deposits*
Deposito berjangka	105.145.751.697	9.004.801.338	*Time deposits*
Jumlah	1.568.184.565.937	260.235.976.626	*Total*
Persentase terhadap jumlah liabilitas			*Percentage of total liabilities*
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	15.975.075.720	18.417.296.013	*Allowance for long-term employee benefits*
Penyisihan imbalan pasca kerja	14.667.253.247	13.182.703.987	*Allowance for post-employment benefits*
Jumlah	30.642.328.967	31.600.000.000	*Total*
Persentase terhadap jumlah penyisihan imbalan kerja	19,27%	22,93%	*Percentage of total allowance for employee benefits*

	2025	2024	
Pendapatan bunga			***Interest income***
Kredit yang diberikan	2.205.980.286	4.071.530.938	*Loans*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0,13%	0,25%	*Percentage of total interest imcome*
Beban bunga			***Interest expenses***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro	9.408.350.151	9.642.660.733	*Current accounts*
Tabungan	251.042.162	372.518.017	*Saving deposits*
Deposito berjangka	22.000.000.000	71.339.937.585	*Time deposits*
Jumlah	31.659.392.312	81.355.116.336	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban bunga	5,30%	14,62%	*Percentage of total interest expenses*
Kompensasi kepada personil manajemen kunci			***Compensation to the key management personnel***
Imbalan kerja jangka pendek	37.659.454.378	31.412.149.961	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	1.875.113.800	344.028.800	*Long-term employee benefits*
Imbalan pasca kerja	812.752.807	-	*Post-employment benefits*
Jumlah	40.347.320.985	31.756.178.761	*Total*
Persentase terhadap jumlah beban tenaga kerja	7,53%	5,79%	*Percentage of total personnel expenses*

Komitmen dan Kontijensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontijensi kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Commitments and contingencies

There are no commitment and contingency balances with related parties as of December 31, 2025 and 2024.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Laporan Profil Risiko Bank disusun setiap triwulan sebagai salah satu parameter yang menggambarkan kondisi kegiatan operasional Bank terkait dengan pengelolaan risiko serta digunakan sebagai pemenuhan ketentuan regulator yaitu:

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk In The Banking Book*) Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Komitmen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko diwujudkan melalui penyusunan buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur mengenai:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Selain itu, manajemen telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dengan harapan pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, terkoordinir dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja usaha Bank.

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi.

Setiap triwulan, Bank telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Bank.

Kerangka manajemen risiko
Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank.

36. RISK MANAGEMENT

Implementation of risk management in Bank accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and Bank Indonesia Circular Letter No.13/23/DPNP dated October 25, 2011 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

The Bank's Risk Profile Report is prepared quarterly as one of the parameters that describe the condition of the Bank's operational activities related to the risk management and is used as the fulfillment of regulatory provisions, as follows:

- *Circular Letter of Financial Service Authority No.12/SEOJK.03/2018 Dated August 21, 2018 regarding the Application of Risk Management and Risk Measurement Standard Approach for Interest Rate Risk in the Banking Book for Conventional Banks.*
- *Financial Services Authority Regulation (POJK) No.14/POJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding assessment of Bank Health Level.*
- *Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016 regarding Risk Management for Commercial.*

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and to anticipate the possible risks. Management's commitment to enhance the quality of risk management is implemented by formulating the manual of Guidelines for Application of Risk Management which shall cover the policies and procedures as follows:

- *Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors;*
- *Adequacy of policies, procedures, and establishment of limits;*
- *Adequacy of processes of identification, measurement, monitoring, and control of risks and the Risk Management information system; and*
- *Comprehensive internal control system.*

In addition, the management has been establishing the Risk Management Committee and Risk Management Division, where, the overall risk management will be integrated, coordinated, and continuously practice to improve operational performance of the Bank.

In accordance with the complexity of business, the Bank has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Bank has prepared the risks profile globally which reflected the Bank's risk rate.

Risk management framework
The Bank's risk management organization involves the supervision of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Risk Oversight Committee. Risk Monitoring Committee is the highest risk supervisor at the Board of Commissioners. The Risk Oversight Committee approve and monitor the implementation of the framework and the Bank's risk management policies. The Board of Commissioners delegate authority to the Managing Director and the Board of Directors to implement risk management strategies. Risk Monitoring Committee formed by the Board of Directors and is responsible for managing risks in the Bank.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)
Kebijakan manajemen risiko Bank ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Pengawasan dan SKAI. Divisi Pengawasan dan SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan menajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Divisi Manajemen Risiko.

ALCO merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan dalam mengelola aset. Liabilitas dan modal sedemikian rupa dengan memperhatikan risiko terkait untuk tujuan penggunaan secara efisien dan optimum. Tujuan utama dari ALCO adalah:

(i) memberikan arahan dan menyakinkan penerapan strategi untuk mengelola komposisi posisi keuangan dan struktur pendanaan Bank pada kondisi normal dan *stress* ;
(ii) memonitor risiko-risiko dan pengaruh dari kondisi pasar;
(iii) menyediakan sarana untuk mendiskusikan masalah ALCO;
(iv) memfasilitasi kerjasama antara bisnis/departemen yang berbeda;
(v) menyelesaikan isu antar departemen seperti alokasi sumber daya;
(vi) menelaah sumber dan alokasi pendanaan secara keseluruhan;
(vii) melakukan perencanaan ke depan dan menentukan lingkungan perbankan yang paling sesuai untuk perencanaan aset/liabilitas di masa depan dan menelaah skenario kontinjensi;
(viii) mengevaluasi skenario alternatif tingkat suku bunga, harga dan kombinasi portofolio; menelaah distribusi aset/liabilitas dan jatuh temponya.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management framework (continued)
The Bank's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Division of Supervision and Internal Audit Task Force. Division of Supervision and Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Bank. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Division.

The ALCO is the primary vehicle for achieving the objectives of managing assets, liabilities and capital with the consideration of related risk for the purpose of efficient and optimum utilization. The main purposes of an ALCO are to:

(i) provide direction and ensure tactical follow-throught to manage the Bank's balance sheet composition and finding structure under normal and stressed conditions;
(ii) monitor the risk and market influences;
(iii) provide a forum for discussing ALCO issues;
(iv) facilitate teamwork between different businesses /departements;
(v) resolve departmental inter-face issues such as resource allocation;
(vi) review overall sources and funding allocations;
(vii) plan and determine the most appropriate banking environment for asset/liability forward planning and review contingency scenarios;
(viii) evaluate alternative scenarios of interest rates, pricing and portfolio combinations; examine the distribution of assets/liabilities and its maturity.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional Bank yaitu perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi serta operasional dan pelayanan.

Di dalam melakukan pengelolaan risiko kredit Bank berfokus pada beberapa unsur utama yang meliputi sumber daya manusia yang sadar risiko, proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit, tata cara, kriteria dan alat ukur risiko yang jelas, administrasi dan dokumentasi yang lengkap serta pengawasan kredit secara berkesinambungan terhadap kualitas kredit yang diberikan.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara obyektif dan memberikan rating kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit konsumtif.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap kantor cabang dengan memisahkan fungsi analisis pemasaran dan analisis risiko kredit.

Upaya yang dilakukan Bank dalam memperbaiki profil risiko kredit adalah monitoring atas debitur dan mengambil tindakan yang diperlukan agar kualitas kreditnya tidak menjadi *non-performing loans* (NPL); melakukan penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah; melakukan kaji ulang dan mengevaluasi indikator aspek risiko dan aspek kepatuhan untuk mengevaluasi penerapan *four eyes principles* serta peratingan untuk pemberian kredit koperasi; mengintensifkan rapat Komite Pemutus Kredit untuk pemberian kredit dengan plafon besar; dan secara konsisten memantau kredit dalam rangka ekspansi kredit yang sehat dan berkualitas.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk

Credit risk is the risk resulting from the default of counterparty in fulfilling its obligation. Credit risk can arise from various functional activities of the Bank such as credit (finance of fund), treasury and investment also operational and services.

In managing credit risk, the Bank focuses on several major, elements which are people's risk-awareness, transparent and layered credit process by Credit Committee, clear risk procedures, criteria and measurement tools, adequate credit administration and documentation also a continuous credit oversight on the loans portfolio quality.

According to their characteristics, existing loans in the current Bank is divided into productive and consumptive loans. To manage risk, the Bank measures the credit risk of the portfolio that is both quantitatively and qualitatively. This is to ensure the possibility of losses from unpaid loans to a minimum, both for individual and overall debtors.

Loans systems and procedures of the Bank have been standardized to ensure the application of lending policies and practices consistently. For a productive loan, the Bank uses the Internal Credit Risk Rating models to analyze business and financial risk of the debtor objectively and give ratings to its customers. In addition, the Bank also uses the Credit Risk Capital Allocation and Pricing for quantifying credit risk and determine an appropriate price based on credit risk.

For consumer loans, the Bank uses the Internal Credit Scoring models to analyze and calculate the risks of granting consumer loans.

In order to apply the principle of healthy lending, the Bank applies the principle of Four Eyes (making loans decisions made by two or more persons) in each branch office by separating the functions of marketing analysis and credit risk analysis.

Efforts by the Bank in improving credit risk profile are the monitoring of borrowers and taking necessary actions so that the credit quality does not become non-performing loans (NPL); conduct an intensive collection of problematic debtors; conducted a review and evaluating indicators of risk aspects and compliance aspects to evaluate the application of four eyes principles and rating for cooperatives credit; intensify the Credit Approval Committee meeting for credit approval with a large plafond, and consistently monitor the credit in order to make qualified and healthy loans expansion.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Pedoman Perusahaan (PP) dan dikaji secara periodik.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya.
Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Giro pada Bank Indonesia	997.936.030.834	1.510.734.797.378	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	16.069.608.774	18.091.833.276	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.137.850.149.969	399.941.683.676	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	13.945.702.305.190	12.766.585.447.510	*Loans*
Surat berharga	941.920.294.323	907.845.096.794	*Marketable securities*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	258.790.818.168	-	*Securities purchased under resale agreements*
Jumlah - bruto	19.298.269.207.258	15.603.198.858.634	*Total - gross*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(466.592.351.053)	(347.978.065.226)	*Alowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.831.676.856.205**	**15.255.220.793.408**	***Total - net***

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Garansi yang diterbitkan	(39.941.724.094)	(78.807.892.638)	*Guarantees issued*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan			*Unused loans commitments granted to customers*
Pihak ketiga	(184.471.423.616)	(208.383.051.708)	*Third parties*
Jumlah	**(224.413.147.710)**	**(287.190.944.346)**	***Total***

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai
(i) Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian
(ii) Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit risk (continued)

The Bank credit risk management system has been standarized in the Company's Guidelines (PP) and reviewed periodically.

(i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.
Credit risk exposure to the assets in the statement of financial position as of December 31, 2025 and 2024:

Credit risk exposure on the administrative accounts as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2025 and 2024 without calculating the collateral or other credit support. For the statements of financial position assets, the exposure is determined based on net carrying value as disclosed in the financial statements.

Managements believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising from loans based on the following:
(i) The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each
(ii) The Bank has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

a. Sektor geografis
Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis nasabah atau counterparty.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

a. Geographical sectors
The following tables break down Bank's credit exposure at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by geographical region as of December 31, 2025 and 2024. For these tables, Bank has allocated exposures to regions based on the customer or counterparty geographical area.

	2025				
	Nusa Tenggara Timur	Jawa Timur/ *East Java*	DKI Jakarta	*Lain-lain/ Others*	Jumlah/ *Total*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	997.936.030.834	-	997.936.030.834
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	13.312.760.946	90.425.595	2.056.610.855	609.811.378	16.069.608.774
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	2.782.850.149.969	355.000.000.000	3.137.850.149.969
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.945.702.305.190	-	-	-	13.945.702.305.190
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	941.920.294.323	-	941.920.294.323
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under resale agreements*	-	-	258.790.818.168	-	258.790.818.168
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	13.959.015.066.136	90.425.595,00	4.983.553.904.149	355.609.811.378	19.298.269.207.258
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*					(466.592.351.053)
Jumlah - bersih/ *Total - net*					**18.831.676.856.205**
Rekening administratif/ *administrative accounts*					
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	39.941.724.094	-	-	-	39.941.724.094
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/ *Unused loans facilities*	184.471.423.616	-	-	-	184.471.423.616
Jumlah/ *Total*	**224.413.147.710**	**-**	**-**	**-**	**224.413.147.710**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)
a. Sektor geografis (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)
a. Geographical sectors (continued)

	2024				
	Nusa Tenggara Timur	**Jawa Timur/ *East Java***	**DKI Jakarta**	***Lain-lain/ Others***	**Jumlah/ *Total***
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	-	-	1.510.734.797.378	-	1.510.734.797.378
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	13.343.651.410,20	2.000.000,00	29.580.593,00	4.716.601.272,48	18.091.833.276
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	399.941.683.676	-	399.941.683.676
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12.766.585.447.510	-	-	-	12.766.585.447.510
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	907.845.096.794	-	907.845.096.794
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	12.779.929.098.920	2.000.000,00	2.818.551.158.441	4.716.601.272,48	15.603.198.858.634
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*					(347.978.065.226)
Jumlah - bersih/ *Total - net*					**15.255.220.793.408**
Rekening administratif/ *administrative accounts*					
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	78.807.892.638	-	-	-	78.807.892.638
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/ *Unused loans facilities*	208.383.051.708	-	-	-	208.383.051.708
Jumlah/ *Total*	**287.190.944.346**	**-**	**-**	**-**	**287.190.944.346**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

b. Industry sector

The following table describes the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized by industri sector.

	2025					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya / *Other companies*	Perseorangan / *Individuals*	Jumlah/ *Total*
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	997.936.030.834	-	-	-	-	997.936.030.834
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	-	16.069.608.774	-	-	-	16.069.608.774
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	2.782.850.149.969	355.000.000.000	-	-	-	3.137.850.149.969
Kredit yang diberikan/ *Loans*	5.280.971.592	97.916.668	185.922.546.977	956.766.345.671	12.797.634.524.283	13.945.702.305.191
Surat berharga/ *Marketable securities*	941.920.294.323	-	-	-	-	941.920.294.323
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under resale agreements*	258.790.818.168	-	-	-	-	258.790.818.168
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**4.986.778.264.886**	**371.167.525.442**	**185.922.546.977**	**956.766.345.671**	**12.797.634.524.283**	**19.298.269.207.259**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*						(466.592.351.053)
Jumlah - bersih/ *Total - net*						**18.831.676.856.206**

	2025					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/ *Banks*	Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions*	Perusahaan lainnya / *Other companies*	Perseorangan / *Individuals*	Jumlah/ *Total*
Rekening administratif/ *administrative accounts*						
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	-	-	-	39.941.724.094	-	39.941.724.094
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/	23.394.587	400.000.000	79.595.954.178	52.169.982.493	52.282.092.358	184.471.423.616
Jumlah / *Total*	**23.394.587**	**400.000.000**	**79.595.954.178**	**92.111.706.587**	**52.282.092.358**	**224.413.147.710**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure (continued)

b. Industry sector

The following table describes the details of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculating collateral or other credit support), which are categorized by industri sector. (continued)

	2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya / *Other companies***	**Perseorangan / *Individuals***	**Jumlah/ Total**
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	1.510.734.797.378	-	-	-	-	1.510.734.797.378
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	-	18.091.833.276	-	-	-	18.091.833.276
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	399.941.683.676	-	-	-	-	399.941.683.676
Kredit yang diberikan/ *Loans*	-	-	95.765.958.074	462.610.791.171	12.208.208.698.265	12.766.585.447.510
Surat berharga/ *Marketable securities*	899.845.096.794	8.000.000.000	-	-	-	907.845.096.794
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**2.810.521.577.848**	**26.091.833.276**	**95.765.958.074**	**462.610.791.171**	**12.208.208.698.265**	**15.603.198.858.634**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*						(347.978.065.226)
Jumlah - bersih/ *Total - net*						**15.255.220.793.408**

	2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) / *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank/ *Banks***	**Lembaga keuangan bukan bank / *Non-bank financial institutions***	**Perusahaan lainnya / *Other companies***	**Perseorangan / *Individuals***	**Jumlah/ *Total***
Rekening administratif/ *administrative accounts*						
Bank garansi yang diterbitkan/ *Bank guarantees issued*	-	-	-	78.807.892.638	-	78.807.892.638
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/	-	-	-	114.672.822.734	93.710.228.974	208.383.051.708
Jumlah / *Total*	**-**	**-**	**-**	**193.480.715.372**	**93.710.228.974**	**287.190.944.346**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Kualitas kredit dari aset keuangan
Tabel berikut menyajikan aset keuangan berdasarkan stage dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap aset keuangan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iii) Credit quality of financial assets
The following table presents the financial assets by stage with the allowance for impairment losses against each financial assets under classification of amortised cost and fair value through other comprehensive income as of December 31, 2025 and 2024 :

	2025					
	Nilai tercatat/ Carrying amount				Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*
	Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah - kotor/ *Total - gross*		
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	997.936.030.834	-	-	997.936.030.834	-	997.936.030.834
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	16.069.608.774	-	-	16.069.608.774	(2.722.680)	16.066.886.094
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	3.137.850.149.969	-	-	3.137.850.149.969	(5.742.187)	3.137.844.407.782
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.116.115.016.470	176.817.828.526	652.769.460.194	13.945.702.305.190	(466.589.628.373)	13.479.112.676.817
Surat berharga/ *Marketable securities*	941.920.294.323	-	-	941.920.294.323	-	941.920.294.323
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Securities *purchased under resale agreements*	258.790.818.168	-	-	258.790.818.168	-	258.790.818.168
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**18.468.681.918.538**	**176.817.828.526**	**652.769.460.194**	**19.298.269.207.258**	**(466.598.093.240)**	**18.831.671.114.018**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Kualitas kredit dari aset keuangan
Tabel berikut menyajikan aset keuangan berdasarkan stage dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap aset keuangan dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iii) Credit quality of financial assets
The following table presents the financial assets by stage with the allowance for impairment losses against each financial assets under classification of amortised cost and fair value through other comprehensive income as of December 31, 2025 and 2024 : (continued)

	2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*				**Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses***	**Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount***
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Jumlah - kotor/ *Total - gross***		
Aset/ *Assets*						
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	1.510.734.797.378	-	-	1.510.734.797.378	-	1.510.734.797.378
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	18.066.432.414	-	25.400.862	18.091.833.276	(28.705.478)	18.063.127.798
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with *Bank Indonesia and other banks*	399.941.683.676	-	-	399.941.683.676	-	399.941.683.676
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12.158.698.964.375	136.401.750.936	471.484.732.199	12.766.585.447.510	(347.945.094.597)	12.418.640.352.913
Surat berharga/ *Marketable securities*	907.845.096.794	-	-	907.845.096.794	(4.265.151)	907.840.831.644
Jumlah - kotor/ *Total - gross*	**14.995.286.974.637**	**136.401.750.936**	**471.510.133.061**	**15.603.198.858.634**	**(347.978.065.226)**	**15.255.220.793.408**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Kualitas kredit dari aset keuangan

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian

Variabel Makro Ekonomi (MEV)
Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi forward looking dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali nasabah Bank.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Diantaranya adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat ke Rupiah dan suku bunga BI.

Bank menggunakan metode pemodelan untuk memproyeksikan MEV di masa depan. Bank menggunakan 3 skenario untuk pemodelan, yaitu normal, batas prediksi bawah dan batas prediksi atas. Bank akan memberikan bobot pada ketiga skenario tersebut untuk memperoleh proyeksi dasar untuk setiap MEV. Semua proyeksi diperbarui setiap satu tahun.

Sensitivitas MEV terhadap ECL
Perhitungan ECL bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linier dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, alih-alih variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

(iii) Credit quality of financial assets

Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the borrowers.

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss

Macro Economic Variable (MEV)
The developing economic environment is the key determinant of the ability of a Bank's customer to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of PSAK 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Bank was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Bank should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.

To capture the effect of changes to the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forward-looking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the Bank's customer.

Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. Amongst others are USD to IDR exchange rate and BI rate.

The Banks uses modeling method to forecast the MEV in the future. The Bank uses 3 modeling scenarios, i.e. normal, lower prediction limit and upper prediction limit. The Bank will give weight to all three scenarios to obtain the base forecast for each MEV. All projections are updated on a yearly basis.

Sensitivity of MEV to ECL
The ECL calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Bank believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas keuangan yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan. Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Divisi *Treasury*.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aset yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

(i) Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
(ii) Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
(iii) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
(iv) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Satuan Kerja Likuiditas sedangkan pengukuran serta analisa terhadap kondisi likuiditas menjadi tugas Divisi Manajemen Risiko diantaranya stress test likuiditas berdasarkan skenario dan pembuatan profil risiko yang terkait likuiditas.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalisasi melalui pengelolaan treasury. Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang idle dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that caused by the inability of the Bank in meeting obligations associated with financial liabilities that are due and closing positions in the market. The Bank's liquidity policy is intended to ensure that the funding requirements can be met, either to pay the deposit at maturity or to meet the unused loans facilities. Liquidity risk is the risk that the most important in commercial banks and need to be managed sustainably. Management and monitoring of the Bank's liquidity position is within the responsibility of the Treasury Division.

The risk of loss resulting from the gap between short-term funding and long term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e.:

(i) Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
(ii) The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
(iii) To be availability of asset that is ready to be converted into cash; and
(iv) Ability to create access to the interbank market or other funding sources.

If the gap is large enough it will reduce it will reduce the Bank ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's liquidity policies are aimed at ensuring that fund requirements can be fulfilled, either to pay deposits at maturity or to fulfill additional loans on request.

Maintaining and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility of the Liquidity Unit while measuring and analysing on liquidity condition is the responsibility of the Risk Management Division which among others include liquidity stress test based on scenarios and preparing risk profile related to liquidity risk.

Managing the excess of liquidity fund which are not absorbed by credits will be optimized thorugh managing treasury. Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and maturity dates of deposits are managed to avoid idle funds and determine the appropriate liquidity level and liquid asset instrument to ensure a sustainable liquidity level.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2025								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Aset/ *Assets*									
Kas/ Cash	687.296	687.296	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	997.936	-	997.936	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	16.070	-	16.070	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	3.137.850	-	3.137.850	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.945.702	-	331.700	133.706	142.833	673.582	657.386	4.107.096	7.899.399
Surat berharga/ *Marketable securities*	941.920	-	-	125.974	53.096	334.371	88.904	37.338	302.236
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under resale agreemets*	258.791	-	258.791	-	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	280.173	280.173	-	-	-	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih/ *Intangible assets - net*	1.794	1.794	-	-	-	-	-	-	-
Aset hak guna/ *Right of use assets*	43.504	43.504	-	-	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	51.623	51.623	-	-	-	-	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other assets*	196.824	109.961	86.863	-	-	-	-	-	-
	20.559.482	**1.174.350**	**4.829.210**	**259.680**	**195.929**	**1.007.953**	**746.290**	**4.144.434**	**8.201.635**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(466.598)								
	20.092.884								

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2025								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Liabilitas/ *Liabilities*									
Liabilitas segera/ *Liabilities immediately payable*	62.440	-	62.440	-	-	-	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposits from cutomers*	15.929.812	-	6.856.431	59.364	244.792	1.617.208	7.125.678	26.339	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	266.649	-	13.330	6.166	115.900	-	48.693	82.560	-
Utang pajak/ *Taxes payable*	1.460	1.460	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	745.110	-	-	-	300.000	-	249.944	195.165	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	276.140	-	276.140	-	-	-	-	-	-
	17.281.610	**1.460**	**7.208.341**	**65.530**	**660.692**	**1.617.208**	**7.424.315**	**304.064**	**-**
Perbedaan jatuh tempo/ *Differences in maturity*	**3.277.872**	**1.172.890**	**(2.379.131)**	**194.150**	**(464.763)**	**(609.255)**	**(6.678.025)**	**3.840.370**	**8.201.635**
Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Position net of allowance for impairment losses*	**2.811.274**								

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2024								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Aset/ *Assets*									
Kas/ *Cash*	594.934	594.934	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	1.510.735	-	1.510.735	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	18.092	-	18.092	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	399.942	-	399.942	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12.766.585	410.516	41.368	208.718	172.771	408.997	528.536	3.141.303	7.854.376
Surat berharga/ *Marketable securities*	907.845	-	-	-	30.000	242.969	179.160	105.000	350.716
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	202.528	202.528	-	-	-	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih/ *Intangible assets - net*	1.998	1.998	-	-	-	-	-	-	-
Aset hak guna/ *Right of use assets*	57.760	57.760	-	-	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan/ *Deferred tax assets*	47.692	47.692	-	-	-	-	-	-	-
Aset lain-lain/ *Other assets*	274.330	185.551	88.779	-	-	-	-	-	-
	16.782.440	1.500.979	2.058.915	208.718	202.771	651.966	707.696	3.246.303	8.205.092
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(347.978)								
	16.434.462								

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank dihitung berdasarkan sisa periode jatuh tempo kontrak pada tanggal laporan posisi keuangan:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

The following table illustrates the maturity profile analysis of the Bank's assets and liabilities according to their remaining maturity period at the statement of financial position date:

Rp juta/*Rp million*

	2024								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Lain-lain/ *Others*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1-3 bulan/ *> 1-3 months*	> 3-6 bulan/ *> 3-6 months*	> 6-12 *> 6-12 months*	> 1-2 tahun/ *> 1-2 years*	> 2-5 tahun/ *> 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*
Liabilitas/ *Liabilities*									
Liabilitas segera/ *Liabilities immediately payable*	70.808	-	70.808	-	-	-	-	-	-
Simpanan nasabah/ *Deposits from cutomers*	11.987.255	-	201.486	141.544	6.732.977	4.870.122	41.125	-	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	421.089	-	405.000	-	10.649	5.440	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan/ *Securities issued*	36.955	-	-	-	-	-	-	36.955	-
Utang pajak/ *Taxes payable*	18.038	-	18.038	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	905.345	-	-	-	480.000	-	175.262	250.083	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	294.500	-	294.500	-	-	-	-	-	-
	13.733.992	**-**	**989.833**	**141.544**	**7.223.627**	**4.875.562**	**216.387**	**287.039**	**-**
Perbedaan jatuh tempo/ *Differences in maturity*	**3.048.448**	**1.500.979**	**1.069.082**	**67.174**	**(7.020.856)**	**(4.223.596)**	**491.309**	**2.959.264**	**8.205.092**
Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Position net of allowance for impairment losses*	**2.700.470**								

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (*best case*), terburuk (*worst case*) dan paling mungkin terjadi (*most probable case*) serta optimalisasi rapat *Asset-Liability Committee* (ALCO) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas Bank.

Untuk mengelola *maturity gap*, Bank mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pemantauan terhadap adanya pencairan dan penempatan dana setiap hari;
b. Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada nasabah utama;
c. Menjaga hubungan baik dengan para deposan agar tetap menambahkan dananya pada Bank;
d. Menerbitkan instrumen utang berupa obligasi;
e. Menetapkan batas maksimum dan minimum kas pada kantor cabang operasional;
f. Menetapkan batas maksimal giro antar bank.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga.

Risiko suku bunga timbul dari berbagai layanan perbankan Bank bagi nasabah termasuk deposito, kredit yang diberikan dan fasilitas giro. Bank juga melakukan aktivitas investasi terbatas untuk kepentingan sendiri.

Bank melakukan pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan metodologi yang dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Liquidity risk (continued)

Bank has built liquidity risk measurement model for measuring the liquidity risk of the portfolio of assets and liabilities of the Bank, and provide additional security guarantees based on the best-case scenario (best case), worst (worst case) and most likely to occur (most probable case) as well as the optimization of Asset-Liability Committee (ALCO) meeting which responsible for managing the Bank's liquidity.

To manage the maturity gap, the Bank take the following steps:

a. Monitor the presence and placement of disbursement of funds on a daily basis;
b. Provide higher interest rate to major customers;
c. Maintain good relations with the depositors to keep adding funds to the Bank;
d. Issue debt instruments in the form of bonds;
e. Set maximum and minimum cash at the branch office operations;
f. Setting a limit on inter-bank current accounts.

Market risk

Market risk is the risk arising from movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables is defined as interest rates.

Interest rate risk arising from the Bank's range of banking services for customers, including deposits, loans and current account facilities. The Bank also make limited investment activity for its own interests.

The Bank conducts the measurement of interest rate risk by using a methodology that can identify the interest rate risk of the portfolio of assets and liabilities that are sensitive to changes in interest rates and to determine the amount of risk to the bank.

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain	0,00% - 1,25%	0,00% - 0,18%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,75% - 4,80%	0,00% - 5,25%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Kredit yang diberikan	4,00% - 26,00%	4,00% - 26,00%	*Loans*
Surat berharga	4,88% - 7,75%	4,00% - 7,75%	*Marketable securities*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,75% - 4,78%	-	*Securities purchased under resale agreements*

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / 36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / ***Market risk (continued)***

	2025	2024	
liabilitas			***liabilities***
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
- Giro	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%	*Current accounts -*
- Tabungan	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%	*Saving deposits -*
- Deposito berjangka	2,25% - 7,65%	3,00% - 8,00%	*Time deposits -*
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
- Giro	0,00% - 2,50%	0,00% - 2,50%	*Current accounts -*
- Tabungan	0,00% - 1,75%	0,00% - 1,00%	*Saving deposits -*
- Deposito berjangka	3,00% - 3,75%	6,75% - 7,25%	*Time deposits -*
- *Call money*	-	0,00% - 6,45%	*Call money -*
- *NCD*	1,49% - 9,00%	-	*NCD -*
Surat berharga yang diterbitkan	11,00%	10,75% - 11,00%	*Securities issued*

Rp juta/*Rp million*

	2025									
	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Aset/ Assets										
Giro pada Bank Indonesia/ *Current account with Bank Indonesia*	997.936	-	-	-	-	-	-	-	-	997.936
Giro pada bank lain/ *Current account with other banks*	16.070	-	-	-	-	-	-	-	-	16.070
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	-	3.137.850	-	-	-	-	3.137.850
Kredit yang diberikan/ *Loans*	13.740.956	-	-	-	-	-	-	-	204.746	13.945.702
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	-	-	-	125.974	387.467	88.904	37.338	639.684
Surat berharga yang dibeli dengan janji/ *Securities purchased under resale agreements*	-	-	-	-	258.791	-	-	-	-	258.791
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**14.754.962**	**-**	**-**	**-**	**3.396.641**	**125.974**	**387.467**	**88.904**	**242.084**	**18.996.033**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025 and 2024
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *36. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / *Market risk (continued)*

2025

	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Liabilitas										
Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*	-	-	-	-	6.856.431	59.364	1.862.000	7.125.678	26.339	15.929.812
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	-	-	-	-	13.330	6.166	115.901	48.693	82.560	266.650
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	-	-	-	-	-	-	549.944	-	195.165	745.110
	-	-	-	-	6.869.761	65.530	2.527.845	7.174.371	304.064	16.941.572
Jumlah gap repricing suku bunga/ *Total gap repricing interest rate*	**14.754.962**	**-**	**-**	**-**	**(3.473.120)**	**60.444**	**(2.140.378)**	**(7.085.467)**	**(61.980)**	**2.054.461**

2024

	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Aset/ Assets										
Giro pada Bank Indonesia/ *Current account with Bank Indonesia*	1.510.735	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.735
Giro pada bank lain/ *Current account with other banks*	18.092	-	-	-	-	-	-	-	-	18.092
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	-	-	-	-	399.942	-	-	-	-	399.942
Kredit yang diberikan/ *Loans*	-	-	-	-	-	-	-	-	12.766.585	12.766.585
Surat berharga/ *Marketable securities*	-	-	-	-	-	-	272.969	179.160	455.716	907.845
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**1.528.827**	**-**	**-**	**-**	**399.942**	**-**	**272.969**	**179.160**	**13.222.301**	**15.603.199**

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *36. RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / *Market risk (continued)*

2024

	Bunga mengambang/ *Floating interest*				Bunga tetap/*Fixed interest*					
	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 years*	≤ 1 bulan/ *≤ 1 month*	> 1 ≤ 3 bulan/ *> 1 ≤ 3 months*	> 3 bulan ≤ 1 tahun/ *> 3 months ≤ 1 year*	> 1 ≤ 2 tahun/ *> 1 ≤ 2 years*	> 2 tahun/ *> 2 years*	Jumlah/ *Total*
Liabilitas										
Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*	6.576.181	-	-	-	201.486	141.544	159.119	4.908.925	-	11.987.255
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	415.649	-	-	-	440	-	5.000	-	-	421.089
Surat berharga yang diterbitkan/ *Securities issued*	-	-	-	-	-	-	-	36.955	-	36.955
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	-	-	-	-	-	-	-	655.262	250.083	905.345
	6.991.830	-	-	-	201.926	141.544	164.119	5.601.143	250.083	13.350.645
Jumlah gap repricing suku bunga/ *Total gap repricing interest rate*	**(5.463.003)**	**-**	**-**	**-**	**198.015**	**(141.544)**	**108.850**	**(5.421.983)**	**12.972.218**	**2.252.554**

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel di bawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of June 30, 2025 and December 31, 2024.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of June 30, 2025 and December 31, 2024:

Perubahan basis poin/ *Change in basis point*	2025	2024
+1,00%	20.545	(52.977)
-1,00%	(20.545)	52.977

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)
Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian.

Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan mengoptimalkan struktur laporan posisi keuangan Bank untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Bank. Pengendalian risiko pasar *banking book* dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan regulator dan internal yang dimonitor secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Risiko operasional
Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai seluruh jaringan kantor. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian finansial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Untuk mengawasi risiko operasional yang mungkin terjadi, Bank telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan metodologi pengukuran sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh masing-masing *risk owner*, sehingga dapat dibentuk suatu peta risiko yang mungkin terjadi di setiap unit kerja.

Dengan peta risiko, risiko operasional dapat diukur (*high, medium,* atau *low*), sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian terhadap dampak risiko yang timbul. Untuk mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional, sesuai dengan *Basel Committee on Banking Supervision*, serta roadmap implementasi Basel II di Indonesia, pertama kali Bank akan menggunakan metodologi pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengumpulan data risiko yang akan digunakan dalam aplikasi metodologi *Advanced Measurement Approach*.

Risiko hukum
Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

36. *RISK MANAGEMENT (continued)*

Market risk (continued)
The objective of market risk management is to identify, measure, control and manage the market risk exposures within acceptable parameters, while maximizing returns.

Banking book market risk management is carried out by optimizing the structure of the Bank's financial position report to get maximum returns according to the level of risk that is acceptable to the Bank. Banking book market risk control is carried out by setting limits that refer to regulatory and internal provisions that are monitored regularly by the Risk Management Work Unit.

Operational risk
Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failure of internal processes, human factors and systems or from external events.

The risk is inherent in all business processes, operational activities, the Bank's systems and products, ranging from the Central Office to the entire office network. Failure to manage operational risk can result in financial losses, the safety of employees and the reputation of the Bank.

To oversee the operational risks that may occur, the Bank has developed a system using measurement methodology (self-assessment) conducted by each risk owner, which enables the Bank to develop a risk mapping system that could potentially be implemented at each work unit.

With map of risks, operational risks can be measured (high, medium, or low), so that management can exercise control over the impact of risks arising. To allocate the needs of operational risk capital, in accordance with the Basel Committee on Banking Supervision, as well as the roadmap for implementation of Basel II in Indonesia, the first time the Bank will use the methodology Basic Indicator Approach and currently still collecting risk data that will be used in the application methodology of the Advanced Measurement Approach.

Legal risk
Legal risk is the risk raised by weakness in juridicial aspects of the business, which could be caused by legal claims, non-existence of supported regulation or weaknesses in agreements, such a unfulfilled terms and conditions in contracts and binding collateral which is not complete.

Legal risks are managed by ensuring that all activities and business relationships between the Bank with third parties are based on rules and conditions which able to protecting the Bank's interests from a legal perspective.

36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko reputasi
Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

Risiko strategis
Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis yaitu visi Bank, rencana strategis, perubahan kepemilikan dan peluncuran produk baru.

Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-komite yang telah dibentuk.

Risiko kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank mengelola risiko kepatuhan dengan melakukan penelaahan secara komprehensif untuk memastikan kesesuaian kebijakan standar operasi dan prosedur serta pengembangan produk baru dengan peraturan eksternal.

Divisi Kepatuhan dan Sub Divisi Hukum Korporasi juga telah melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur terhadap rencana kebijakan dan rancangan keputusan dalam rangka mencegah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Di samping itu, Bank juga melaksanakan fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

(i) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
(ii) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; tindakan mengelola risiko kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
(iii) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(iv) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

36. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputation risk
Reputational risk is the risk that is caused by negative publicity related to the business activity of the Bank or negative perception of the Bank.

The Bank manages its reputational risk by ensuring that its business activities are in conformity with its other activities, so as to maintain the Bank's reputation.

Strategic risk
Strategic risk is the risk that is caused by inappropriate determination and implementation of the Bank strategy, inappropriate business decisions or being unresponsive to external changes. Here are the factors that influence the strategic risk that the Bank's vision, strategic plan, changes in ownership and new product launches.

The Bank manages strategic risk through a consideration of, and decision making process regarding every strategic policy in a collective and comprehensive manner performed by the established Bank's Directors and Committees.

Compliance risk
Compliance risk is the risk caused by non-compliance with or non-application of prevailing regulations.

The Bank manages its compliance risk by performing comprehensive review to ensure that Bank's Standard Operating Procedures and new product development conform with external regulations.

Compliance Division and Corporate Law Sub Division have also evaluated systems and procedures relating to new or revised policies and decisions to ensure their compliance with the applicable regulations. Furthermore, the Bank has also perform compliance function including:

(i) To create compliance culture in all level of organization and Bank's business activities;
(ii) Manages compliance risk face by the Bank; managing compliance risk is based on Financial Services Authority's regulation about Risk Management for the Bank;
(iii) Ensure policy, regulation, system and procedure and bank business activities inline with Financial Services Authority's regulation and law; and
(iv) Ensure bank's compliance with comitments made by the Bank to Financial Services Authority and/or other monitoring authority.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

37. POSISI DEVISA NETO

Posisi Devisa Neto (PDN)

Perhitungan posisi devisa neto bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2010, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal diungkapkan pada catatan 43g.

PDN secara keseluruhan merupakan angka penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari (i) selisih bersih aset dan liabilitas untuk setiap valuta asing dan (ii) selisih bersih tagihan dan liabilitas, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif (transaksi rekening administratif) untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Sedangkan PDN untuk laporan posisi keuangan, merupakan angka penjumlahan dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

37. *NET OPEN POSITION*

Net Open Position (NOP)

The calculation of the net open position of banks is based on Bank Indonesia Regulation No.12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010 and Bank Indonesia Regulation No.17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/ 2003 concerning the Net Open Position of Commercial Banks. Based on this regulation, starting on July 1, 2010, the Bank is only required to maintain a net open position as a whole at a maximum of 20% of total capital are disclosed in note 43g.

The aggregate NOP represents the sum of the absolute values of (i) the net difference between assets and liabilities denominated in each foreign currency and (ii) the net difference of receivables and liabilities of both commitments and contingencies recorded in the administrative account (administrative account transactions) denominated in each foreign currency, which are all stated in Rupiah. The NOP for statement of financial position represents the sum of the net differences of assets and liabilities on the statements of financial position for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

38. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama manajemen permodalan Bank adalah untuk memastikan bahwa permodalan telah memenuhi persyaratan permodalan eksternal dan mempertahankan peringkat kredit yang kuat dan rasio permodalan yang sehat dalam rangka menunjang bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan OJK yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Informasi tambahan manajemen modal yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada catatan 43h.

38. *CAPITAL MANAGEMENT*

The primary objectives of the Bank's capital management are to ensure that it complies with externally imposed capital requirements and it maintans strong credit ratings and healthy capital ratio in order to support its business and to maximize shareholders value.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing OJK regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organizational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial enviroment.

The Bank has complied with all regulatory imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

The following additional information capital management that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in note 43h.

39. SEGMEN OPERASI

Seperti yang dijelaskan di Catatan 2ae, Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal. Pada saat ini, Bank hanya menganalisa segmen secara geografis dimana manajemen menelaah laporan internal manajemen secara bulanan untuk masing-masing area. Berikut adalah ringkasan yang menjelaskan tiap-tiap area geografis dalam Bank:

- Pulau Timor
  Kupang, Atambua, Kefamenanu, Soe, Betun.
- Pulau Flores
  Ende, Maumere, Kalabahi, Lewoleba, Larantuka, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Mbay, Borong.
- Lain-lain
  Rote, Waengapu, Waekabubak, Waetabula, Sabu, Anakalang.

39. *OPERATION SEGMENTS*

As described in Note 2ae, the Bank is currently managed as single operating segment. Currently, the Bank only analyzed geographically segment where management examines the internal management reports on monthly basis for each area. Here is summary that explains each geographical area in the Bank:

- *Island Timor*
  Kupang, Atambua, Kefamenanu, Soe, Betun.
- *Flores Island*
  Ende, Maumere, Kalabahi, Lewoleba, Larantuka, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Mbay, Borong.
- *Others*
  Rote, Waengapu, Waekabubak, Waetabula, Sabu, Anakalang.

39. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *39. OPERATION SEGMENTS (continued)*

	2025	2024	
Jumlah aset			*Total assets*
Pulau Timor	11.371.317.308.995	8.405.426.064.096	*Island Timor*
Pulau Flores	5.234.038.732.501	4.780.819.472.011	*Island Flores*
Lain-lain	3.487.528.470.207	3.248.215.991.902	*Others*
Jumlah	20.092.884.511.703	16.434.461.528.009	***Total***

	2025	2024	
Pendapatan operasional			*Operating income*
Pulau Timor	294.608.239.659	324.620.312.756	*Island Timor*
Pulau Flores	556.037.439.449	540.850.586.254	*Island Flores*
Lain-lain	374.662.785.671	351.898.435.309	*Others*
Jumlah	1.225.308.464.779	1.217.369.334.319	***Total***
Laba operasional			*Operating income*
Pulau Timor	(114.584.978.701)	(75.482.335.128)	*Island Timor*
Pulau Flores	189.113.056.123	197.129.517.585	*Island Flores*
Lain-lain	109.080.184.607	104.070.098.435	*Others*
Jumlah	183.608.262.029	225.717.280.892	***Total***
Laba sebelum pajak			*Income before tax*
Pulau Timor	(133.922.900.917)	(68.980.844.902)	*Island Timor*
Pulau Flores	188.227.682.622	196.676.703.029	*Island Flores*
Lain-lain	117.525.957.208	103.412.811.638	*Others*
Jumlah	171.830.738.913	231.108.669.765	***Total***

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No.84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

40. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Article 8 of the Decision No.15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regrading the termination of the role and winding-up of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks, which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No.26 year 1998 and No.27 year 1998, shall be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Goverment Guarantee Implemantation Unit (Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah/UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No.17 year 2004, which was futher regulated by the Decision No.84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amandement of Decision No.179/KMK.017/2000 of the MInistry of Finance of the Term, Implementing Guidelines and Conditions of the Goverment Guarantee on the obligations of commercial banks.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LPS dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,5% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: 4,25% dan 2,25%).

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-Undang.

40. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No.68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payment of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005.

To replace UP3, the Government was formed an independent institution there is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS). Based on Law No.24 dated September 22, 2004, which have been amended Law No.4 Year 2023 dated January 12, 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector, LPS was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee is subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on Government Regulation No.66 year 2008 dated October 13, 2008 regarding the Amount of Deposit Guarantee by the Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposit covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per depositor per bank. Customer deposits are only covered if the rate of interest is equal to or below 3.5% for deposits denominated in Rupiah and 2% for deposits denominated in foreign currency as at December 31, 2025 (2024: 4.25% and 2.25%).

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has enacted Government Regulation in Lieu of Law No.3/2008 to the Law.

41. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

a. Pada tanggal 25 Juni 2025, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Mitra Edukasi Nusantara tentang Layanan *Virtual Account Online* atas Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah melalui *Marketplace*. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 2 (dua) tahun dan diperpanjang otomatis selama belum ada konfirmasi penghentian.

b. Pada tanggal 23 Januari 2025, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Kas Negara. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Januari 2027.

c. Pada tanggal 23 Desember 2024, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

d. Pada tanggal 24 Juni 2024, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang penyelenggaraan produk asuransi kumpulan Taspen Save, untuk jaminan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening bank. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 24 Juni 2026.

41. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. On June 25, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Mitra Edukasi Nusantara regarding Online Virtual Account Services for the Procurement of Goods/Services in Schools through Marketplace. This agreement is valid from the date of signing for a period of 2 (two) years and is automatically extended as long as there is no confirmation of termination.

b. On January 23, 2025, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding State Cash Management. This agreement is valid from the date of signing until January 31, 2027.

c. On December 23, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the People's Housing Savings Management Agency regarding the Distribution of Housing Financing Liquidity Facility Funds through Credit for Low-Income Communities. This agreement is valid from January 1, 2025 to December 31, 2025.

d. On June 24, 2024, the Bank has signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding the implementation of the Taspen Save collection of insurance products, for old age insurance, pensions, work accident insurance and death insurance through bank accounts. This Agreement is valid from the time it is signed until June 24, 2026.

42. MASALAH HUKUM

Bank menghadapi beberapa permasalahan hukum yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan, terdapat permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan atau likuiditas Bank.

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.31 tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 27/88/DKMP/Srt/B tanggal 28 Mei 2025 dan merujuk pada PBI No.11 tahun 2023 dan PADG No. 7 tahun 2025, pada tanggal 31 Desember 2025, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 3,8%.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 26/201/DKMP/Srt/B tanggal 2 Desember 2024 dan merujuk pada PBI No.11 tahun 2023 dan PADG No. 4 tahun 2024, pada tanggal 31 Desember 2024, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM sebesar 4,0%.

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2025 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 23 tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

42. LEGAL ISSUES

The Bank faces several legal issues related to the Bank's business activities. As of the completion date of the statement of financial position, there are legal issues that are still in the process of being resolved in court. However, the Bank's management believes that the outcome of the dispute resolution or lawsuit will not have a significant impact on the results of operations, financial position or liquidity of the Bank.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

The Bank is required to maintain statutory reserves in Rupiah currency in its activities as a commercial, and foreign statutory reserves in its activities in the conduct of foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

The statutory reserves ratio as of December 31, 2025 and 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 which have been amanded with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.31 year 2025 dated Desember 23, 2025 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No. 27/88/DKMP/Srt/B dated May 28, 2025 and referring to PBI No.11 year 2023 and PADG No.7 year 2025, as of December 31, 2025, Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 3.8%

Based on a letter from Bank Indonesia No. 26/201/DKMP/Srt/B dated December 2, 2024 and referring to PBI No.11 year 2023 and PADG No.4 year 2024, as of December 31, 2024, Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.0%

The PLM ratio as of December 31, 2025 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.23 year 2025 dated October 20, 2025 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Rasio PLM pada tanggal 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No. 18 tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

Rasio GWM dan PLM Bank pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

a. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

The PLM ratio as of December 31, 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.18 year 2023 dated November 29, 2023 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

As of December 31, 2025 and 2024, the GWM and PLM ratios of the Bank are as follows:

	2025		2024		
	Ketentuan/ *Provisions*	**Realisasi/ *Realization***	**Ketentuan/ *Provisions***	**Realisasi/ *Realization***	
Rupiah					*Rupiah*
- Giro Wajib Minimum	9,00%	6,58%	9%	10,78%	*Minimum Statutory Reserves -*
PLM	4,00%	6,72%	5%	6,64%	*Buffer of Macroprudential Liquidity*
Mata uang asing	4,00%	366,11%	4,00%	386,04%	*Foreign currencies*

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah giro wajib minimum pada Bank Indonesia tersebut telah memadai dan memenuhi syarat.

The Bank's management believes that the amount of minimum legal reserves at Bank Indonesia is adequate and meet the requirements set forth by Bank Indonesia.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 5.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 5.

b. Giro pada bank lain

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

b. Current Account with other bank

By Financial Service Authority Rule collectibility

	2025	2024	
Lancar	16.069.608.774	18.066.432.414	*Current*
Macet	-	25.400.862	*Loss*
Jumlah	16.069.608.774	18.091.833.276	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.722.680)	(28.705.478)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**16.066.886.094,00**	**18.063.127.798**	***Total - net***

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 6.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 7.

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

By Financial Service Authority Rule collectibility
All placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current as of December 31, 2025 and 2024.

The further disclosures on placements with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 7.

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

d. Kredit yang diberikan

d. Loans

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK

By Financial Service Authority Rule collectibility

Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

By type, currency and collectibility

	2025					
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/ *Related parties*:						
Modal kerja/ *Working capital*	-	829.197.648	-	-	7.746.248.920	8.575.446.568
Investasi/ *Investment*	247.579.058	-	-	-	42.290.689	289.869.747
Konsumsi/ *Consumer*	22.173.854.432	416.294.123	-	-	252.838.705	22.842.987.260
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	22.421.433.490	1.245.491.771	-	-	8.041.378.314	31.708.303.575
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak ketiga/ *Third parties*:						
Modal kerja/ *Working capital*	609.742.765.463	91.475.555.600	1.127.342.988	10.397.817.774	250.782.357.401	963.525.839.226
Investasi/ *Investment*	122.523.113.229	58.553.390.511	236.866.766	5.849.522.671	101.772.926.254	288.935.819.431
Konsumsi/ *Consumer*	11.587.562.287.406	131.366.233.498	5.071.970.071	6.667.342.111	69.086.111.992	11.799.753.945.078
Sindikasi/ *Syndication*	178.461.246.580	186.773.737.791	-	-	-	365.234.984.371
Karyawan/ *Employee*	487.743.895.469	5.209.398.878	345.646.078	68.926.198	3.175.546.886	496.543.413.509
	12.986.033.308.147	473.378.316.278	6.781.825.903	22.983.608.754	424.816.942.533	13.913.994.001.615
Jumlah/ *Total*	13.008.454.741.637	474.623.808.049	6.781.825.903	22.983.608.754	432.858.320.847	13.945.702.305.190
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(12.407.214.006)	(95.202.188.023)	(3.164.870.706)	(12.587.391.781)	(343.227.963.857)	(466.589.628.373)
Jumlah bersih/ *Total-net*	**12.996.047.527.631**	**379.421.620.026**	**3.616.955.197**	**10.396.216.973**	**89.630.356.990**	**13.479.112.676.817**

	2024					
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak berelasi/ *Related parties*:						
Konsumsi/ *Consumer*	916.050.174	-	-	-	7.746.248.920	8.662.299.094
Jumlah Rupiah/ *Total Rupiah*:	916.050.174	-	-	-	7.746.248.920	8.662.299.094
Rupiah/*Rupiah*:						
Pihak ketiga/ *Third parties*:						
Modal kerja/ *Working capital*	896.182.298.509	18.287.877.545	25.091.347	2.187.678.741	23.624.984.857	940.307.930.999
Investasi/ *Investment*	124.131.234.109	3.868.626.638	38.675.863	-	1.396.014.638	129.434.551.248
Konsumsi/ *Consumer*	10.106.361.007.668	241.361.682.308	2.672.756.448	7.300.167.984	394.123.569.928	10.751.819.184.336
Sindikasi/ Syndication	275.863.228.230	186.747.562.941	-	-	-	462.610.791.171
Karyawan/ Employee	466.099.463.778	7.651.226.884	-	-	-	473.750.690.662
	11.868.637.232.294	457.916.976.316	2.736.523.658	9.487.846.725	419.144.569.423	12.757.923.148.416
Jumlah/ *Total*	**11.869.553.282.468**	**457.916.976.316**	**2.736.523.658**	**9.487.846.725**	**426.890.818.343**	**12.766.585.447.510**
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(9.574.308.804)	(53.169.024.034)	(1.252.343.444)	(4.235.230.767)	(279.714.187.548)	(347.945.094.597)
Jumlah bersih/ *Total-net*	**11.859.978.973.664**	**404.747.952.282**	**1.484.180.214**	**5.252.615.958**	**147.176.630.795**	**12.418.640.352.913**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

d. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024	
Rasio NPL - bruto	3,32%	3,44%	*NPL ratio - gross*
Rasio NPL - bersih	0,74%	1,21%	*NPL ratio - net*
Rasio kualitas aset produktif	2,61%	3,12%	*Earnings asset quality ratio*

Rasio NPL-bersih dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pengungkapan lebih lanjut pada kredit yang diberikan diungkapkan pada Catatan 8.

e. Surat berharga

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua surat berharga diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada surat berharga diungkapkan pada Catatan 9.

f. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, semua Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan lancar.
Pengungkapan lebih lanjut pada surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali diungkapkan pada Catatan 10.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

d. Loans (continued)

The following are the non performing loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank As of December 31, 2025 and 2024:

NPL Ratio-net is calculated based on NPL less the minimum allowance for impairment losses, accordance with Bank Indonesia Regulations divided by the total loans.

As of December 31, 2025 and 2024 there were no violations for the provisions of Lending Limit (LLL), respectively.

The further disclosures on loans are presented in Note 8.

e. Marketable securities

By Financial Service Authority Rule collectibility
All placements marketable securities are classified as current as of December 31, 2025 and 2024.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 9.

f. Marketable securities purchased with agreements to resell

By Financial Service Authority Rule collectibility
All marketable securities purchased under resell agreements are classified as current as of December 31, 2025 and 2024.

The further disclosures on marketable securities purchased under resell agreements are presented in Note 10.

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

g. Posisi Devisa Neto (PDN)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam mata uang (ekuivalen Rupiah). Nilai ini adalah yang dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan harian.

g. Net Open Position (NOP)

Below is the Net Open Position of Bank as of December 31, 2025 and 2024 in currency (Rupiah equivalent). These amounts are reported to Bank Indonesia on the statement of financial position's date as part of daily reporting.

2025

(dalam jutaan Rupiah / *in million* Rupiah)

	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Nilai absolut bersih/ *Net absolute value***	***Currencies***
Posisi keuangan				***Financial position***
Dolar Amerika Serikat	19.972	1.788	18.184	*United States Dollar*
Dolar Australia	1.299	-	1.299	*Australian Dollar*
Euro	178	-	178	*Euro*
Dolar Singapura	430	-	430	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	5	-	5	*Japan Yen*
Yuan China	10	-	10	*China Yuan*
Ringgit Malaysia	37	-	37	*Malaysian Ringgit*
	21.930	1.788	20.142	
Rekening administrasi				***Administrative accounts***
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	*United States Dollar*
	-	-	-	
Jumlah			**20.142**	***Total***
Jumlah modal			2.757.903,82	*Total capital*
Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)			**0,73%**	***Net Open Position (NOP) ratio***

2024

(dalam jutaan Rupiah / *in million* Rupiah)

	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Nilai absolut bersih/ *Net absolute value***	***Currencies***
Posisi keuangan				***Financial position***
Dolar Amerika Serikat	18.859	1487	17.372	*United States Dollar*
Dolar Australia	785		785	*Australian Dollar*
Euro	192		192	*Euro*
Dolar Singapura	596		596	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	5		5	*Japanese Yen*
Yuan Tiongkok	7		7	*Chinese Yuan*
Ringgit Malaysia	13		13	*Malaysian Ringgit*
	20.458	1.487	18.971	
Rekening administrasi				***Administrative accounts***
Dolar Amerika Serikat	-	-	-	*United States Dollar*
	-	-	-	
Jumlah			**18.971**	***Total***
Jumlah modal			2.571.717	*Total capital*
Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)			**0,74%**	***Net Open Position (NOP) ratio***

Pengungkapan lebih lanjut pada risiko pasar diungkapkan pada Catatan 37.

The further disclosures on market risk are presented in Note 37.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

h. Manajemen modal

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (*tier* 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (*tier* 2) antara lain meliputi surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi serta penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

h. Capital Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with all capital requirements.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Bank calculates its capital requirements in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 27 Year 2022 about Minimum Capital Reserve or Commercial Bank"and OJK Circular Letter No.43/SEOJK.03/2016 about "Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report", where the regulatory capital is analysed into two tiers as follows:

- *Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*
- *Supplementary capital (tier 2), which includes subordinated securities and subordin ated debts and allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline.*

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

h. Manajemen modal (lanjutan)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*tier* 1) paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier* 1) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR.

- Modal *tier* 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba tahun berjalan.
- Modal *tier* 2, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal *tier* 3 sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier* 1; 100 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan dapat diperhitungkan dalam modal *tier* 1; dan modal *tier* 2 tidak boleh melebihi modal *tier* 1. Terdapat juga batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier* 2.

Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Bank ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

h. Capital Management (continued)

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as Banks are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6% from Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.5% from Risk Weighted Assets, both individually and consolidated level with subsidiary.

- *Tier 1 capital, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.*
- *Tier 2 capital, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.*

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing OJK regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; 100 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

The Bank's risk weighted assets ("ATMR") are determined according to spesified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on OJK regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognize the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the Bank's risk profile with the available capital. The Bank is required to provide minimum capital based on the risk profile.

The Bank actively manages its capital accordance with the applicable regulations. The primery objective is to ensure the Bank, at any time, can maintain adequate its capital adequacy to cover inherent risk to its banking activityies withaut reducing the optimizing of shareholder's value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

43. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

43. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (contiued)

h. Manajemen modal (lanjutan)

h. Capital Management (continued)

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The Bank's regulatory capital position under prevailing Financial Services Authority regulation as of December 31, 2025 and 2024 was as follows:

	2025	2024	
Modal *tier* 1			***Tier 1 capital***
Modal inti utama (CET 1)			*Common core capital (CET 1)*
Modal saham	2.209.537	2.114.551	*Share capital*
Modal sumbangan	247	247	*Donation capital*
Dana setoran modal	5.000	11.500	*Additional paid-in capital*
Agio saham	28.571	-	*Share premium*
Cadangan umum	487.664	465.559	*General reserves*
Laba tahun berjalan	92.618	176.837	*Current year income*
Pendapatan komprehensif lainnya	(27.568)	-	*Other comprehensif income*
Surplus revaluasi aset tetap	83.429	-	*Revaluation surplus of fixed assets*
Selisih kurang antara penyisihan diwajibkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	(136.704)	(226.765)	*Less difference between the allowance required and allowance for impairment losses on earning assets*
Penyisihan penghapusan aset non produktif	(29.687)	(12.007)	*Allowance for losses on non-earning assets*
Perhitungan pajak tangguhan	(51.623)	(47.692)	*Deferred assets calculations*
Aset takberwujud	(1.794)	(1.998)	*Intangible assets*
Modal inti tambahan (AT 1)			*Additional core capital (AT 1)*
	2.659.690,83	2.480.232	
Modal *tier* 2			***Tier 2 capital***
Cadangan umum aset produktif	98.213	91.485,00	*General reserve of earning assets*
	98.213	91.485	
Jumlah modal	**2.757.904**	**2.571.717**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko			*Risk Weighted Asset*
Risiko kredit	7.857.039	7.318.818	*Credit risk*
Risiko pasar	110.339	-	*Market risk*
Risiko operasional	2.317.683	2.186.950	*Operational risk*
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	**10.285.061**	**9.505.768**	*Total Risk Weighted Asset*
Rasio kecukupan modal			*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1	25,86%	26,09%	*CET 1 Ratio*
Rasio *tier* 1	25,86%	26,09%	*Tier 1 Ratio*
Rasio tier 2	0,95%	0,96%	*Tier 2 Ratio*
Rasio modal terhadap ATMR	26,81%	27,05%	*Ratio of capital to ATMR*
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9%-<10%	9%-<10%	*Required Capital Adequacy Ratio*

Berdasarkan self-assessment Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 10% sampai dengan kurang dari 11%. Pada tanggal 31 Desember 2024, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 26,81%.

Based on its self-assessment, the Bank risk profile is assessed to be in rating 2. Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 10% to less than 11%. As of December 31, 2024, the Bank Capital Adequate Ratio was 26.81%, which was higher than the required minimum provision of capital.

44. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada tahun 31 Desember 2024 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan 31 Desember 2025 untuk tujuan perbandingan.

44. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2024 have been reclassified to the preparation of financial statements as December 31, 2025 for comparative purposes.

	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Sesudah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
BEBAN TENAGA KERJA				***PERSONNEL EXPENSES***
Iuran pensiun	44.326.144.147	(44.326.144.147)	-	*Pension contribution*
Imbalan kerja	23.565.215.923	44.326.144.147	67.891.360.070	*Employee benefits*

45. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk Bank dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2025:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

  Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur non-recource dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche. Amandemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu dan jumlah arus kas kontraktual.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

45. STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) WHICH ISSUED AND REVISED

The following is a summary of PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and Sharia Accounting Standards Board (DSAS) - IAI that are relevant to the Bank and its Subsidiaries, but not yet effective for consolidated financial reporting as of December 31, 2025:

Effective on or after January 1, 2026

- *PSAK 109, "Financial Instrumens" and PSAK 107 "Financial Instruments" Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instrument".*

  The amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 related to derecognition of financial liabilities, and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with non-recourse features and contractually binding instruments such as tranches. The amendment also amends the provisions of PSAK 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing and amount of contractual cash flows.

The Bank is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the consolidated financial statement.

bankNTT
melayani lebih sungguh

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lalamentik 102, Kupang
Nusa Tenggara Timur 85000
Telp. +62 380 840555
Fax. +62 380 840567